Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2024

Tentang

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KOTA PALU

TAHUN 2025

SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
5. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 14);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk perioed 1 (satu) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

6. Kegiatan ...

6. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa PD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
8. Daerah adalah Kota Palu.
9. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
10. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai:
    a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah Tahun 2024;
    b. pedoman penyelarasan prioritas pembangunan Daerah; dan
    c. pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Daerah.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. Bab I : Pendahuluan;
    b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
    c. Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
    d. Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
    e. Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
    f. Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
    g. Bab VII : Penutup.
(2) Dokumen RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB ...

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Juli 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 5 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 14

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

BUKU I

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD KOTA PALU

2025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERATURAN WALI KOTA PALU

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen I-12
1.4. Maksud dan Tujuan I-13
1.5. Sistematika Penyusunan I-14

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah II-1

2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah..... II-16
2.1.3 Wilayah Rawan Bencana ..... II- 18
2.1.4 Demografi ..... II- 65
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... II-72
2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi..... II-72
2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial..... II-92
2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga..... II-104
2.3 Aspek Pelayanan Umum..... II-106
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar..... II-106
2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar..... II-142
2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan..... II-172

2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan..... II-180
2.4 Aspek Daya Saing Daerah..... II-183
2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah..... II-185
2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur..... II-192
2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi..... II-206
2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia..... II-212
2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD..... II-280
2.5.1 Persentase dan Predikat Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Palu Triwulan IV (empat) Tahun 2023..... II-280
2.5.2 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palu Triwulan IV (empat) Tahun 2023..... II-312
2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah..... II-412
2.6.1 Identifikasi Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah..... II-412
2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah..... II-417

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023 ..... III-2
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Palu Tahun 2024 dan Tahun 2025 ..... III-16
3.1.3. Perkembangan Ekonomi Global III-18
3.1.4. Perkembangan Perekonomian Indonesia III-20
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-23
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah..... III-25
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah III-34

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-43

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-1

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-1

4.1.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Palu. IV-1

4.1.2. Tema Pembangunan IV-5

4.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan..... IV-11

4.1.4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan IV-16

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025 .... IV-54

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional IV-54

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah IV-59

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Palu IV-71

4.2.4. Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota Palu IV-82

4.2.5. Sasaran Pembangunan IV-138

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH VI-1

BAB VII PENUTUP VII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2023	II-2
Tabel 2.2	Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu	II-4
Tabel 2.3	Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu Menurut Kecamatan	II-10
Tabel 2.4	Rata-rata Suhu Udara dan Kelembapan Relatif Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2023	II-11
Tabel 2.5	Rata-rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Arah Angin Terbanyak Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2023	II-12
Tabel 2.6	Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2023	II-13
Tabel 2.7	Penggunaan Lahan Kota Palu	II-15
Tabel 2.8	Data kejadian gempabumi Mw > 5,7 di Palu dan sekitarnya Tahun 1907-2018	II-25
Tabel 2.9	Luasan wilayah yang memiliki risiko bencana gempabumi di Kota Palu	II-29
Tabel 2.10	Nilai Indeks Risiko Bencana Gempabumi Kota Palu	II-29
Tabel 2.11	Luas risiko dari sisi permukiman dan penduduk pada ancaman gempabumi di Kota Palu	II-32
Tabel 2.12	Jumlah bangunan dan luas bangunan yan memiliki risiko bencana gempabumi di Kota Palu	II-33
Tabel 2.13	Luasan wilayah yang memiliki risiko bencana liquifaksi di Kota Palu	II-35
Tabel 2.14	Nilai Indeks Risiko Bencana Liquifaksi Kota Palu	II-35
Tabel 2.15	Luas permukiman dan penduduk di zona risiko bencana liquifaksi di Kota Palu	II-38
Tabel 2.16	Jumlah bangunan dan luas bangunan yan memiliki risiko bencana liquifaksi di Kota Palu	II-39
Tabel 2.17	Luasan wilayah yang memiliki risiko bencana tsunami di Kota Palu.....	II-40
Tabel 2.18	Nilai Indeks Risiko Bencana Tsunami Kota Palu	II-41

Tabel 2.19 Luas keterpaparan permukiman dan keterpaparan penduduk di zona risiko bencana tsunami di Kota Palu II-44
Tabel 2.20 Jumlah bangunan dan luas bangunan yan memiliki risiko bencana tsunami di Kota Palu II-45
Tabel 2.21 Luasan wilayah yang memiliki risiko bencana longsor di Kota Palu..... II-46
Tabel 2.22 Nilai Indeks Risiko Bencana Longsor Kota Palu..... II-47
Tabel 2.23 Luas permukiman dan penduduk di zona risiko bencana longsor di Kota Palu..... II-50
Tabel 2.24 Jumlah bangunan dan luas bangunan yan memiliki risiko bencana longsor di Kota Palu..... II-51
Tabel 2.25 Luas keterpaparan perkebunan dan ladang yang ada di zona risiko bencana longsor Kota Palu..... II-52
Tabel 2.26 Luasan wilayah yang memiliki risiko bencana banjir di Kota Palu..... II-53
Tabel 2.27 Nilai Indeks Risik Bencana Banjir Kota Palu..... II-54
Tabel 2.28 Luas permukiman dan penduduk di zona risiko bencana banjir di Kota Palu..... II-57
Tabel 2.29 Jumlah bangunan dan luas bangunan yang memiliki risiko bencana banjir di Kota Palu..... II-58
Tabel 2.31 Luasan wilayah yang memiliki risiko bencana kebakaran permukiman di Kota Palu..... II-60
Tabel 2.31 Nilai Indeks Risiko Bencana Kebakaran Permukiman Kota Palu..... II-60
Tabel 2.32 Nilai Indeks Risiko Bencana Kebakaran Permukiman Kota Palu..... II-60
Tabel 2.33 Luas permukiman dan penduduk di zona risiko bencana kebakaran permukiman di Kota Palu..... II-63
Tabel 2.34 Jumlah bangunan dan luas bangunan di zona risiko bencana kebakaran permukiman di Kota Palu..... II-64

Tabel 2.35	Tingkat Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan, Kelurahan, dan Rumah Tangga Tahun 2019-2023.....	II-66
Tabel 2.36	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2023.....	II-68
Tabel 2.37	Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2019-2023.....	II-71
Tabel 2.38	Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Persen).....	II-74
Tabel 2.39	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2019-2023 (Juta Rp).....	II-75
Tabel 2.40	PDRB Kota Palu ADHK Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2019-2023 (juta rupiah).....	II-77
Tabel 2.41	Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Palu Tahun 2019-2023.....	II-78
Tabel 2.42	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, Kabupaten Sigi, dan Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023.....	II-79
Tabel 2.43	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2019 -2023.....	II-81
Tabel 2.44	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023.....	II-82

Tabel 2.45	Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023.....	II-83
Tabel 2.46	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019 -2023.....	II-84
Tabel 2.47	Rata-rata Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2019-2023.....	II-85
Tabel 2.48	Perkembangan Inflasi Kota Palu menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2023.....	II-86
Tabel 2.49	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia untuk Kota Palu	II-90
Tabel 2.50	Kinerja Penangulangan Kemiskinan di Kota Palu Tahun 2019-2023.....	II-91
Tabel 2.51	APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MK Kota Palu (%) Tahun 2019-2023.....	II-96
Tabel 2.52	Perbandingan APM Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023.....	II-99
Tabel 2.53	AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup) Tahun 2019-2023.....	II-100
Tabel 2.54	Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka di Kota Palu Tahun 2019 2023.....	II-104
Tabel 2.55	Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga di Kota Palu Tahun 2019 – 2023.....	II-105
Tabel 2.56	Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Palu (per 10.000) Tahun 2019-2023.....	II-108
Tabel 2.57	Rasio Guru/Murid Jenjang PendidikanSD/MI, SMP/MTs di Kota Palu (per 1.000 Murid) Tahun 2019-2023.....	II-109
Tabel 2.58	Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palu Tahun 2019-2023.....	II-111

Tabel 2.59 Jumlah Kondisi Baik Bangunan Sekolah (Ruang Kelas)Pada Jenjang SD/MI di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-112
Tabel 2.60 Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik Pada Jenjang SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-113
Tabel 2.61 Perkembangan Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Palu Tahun 2019 -2023..... II-114
Tabel 2.62 Angka Kelulusan SD dan SMP Kota Palu (%) Tahun 2019-2023..... II-116
Tabel 2.63 Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu (%) Tahun 2019-2023..... II-117
Tabel 2.64 Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-119
Tabel 2.65 Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2023..... II-120
Tabel 2.66 Rasio Puskesmas,Poliklinik dan Pustu di Kota Palu (per 100.000 penduduk) Tahun 2019-2023..... II-121
Tabel 2.67 Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk Di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-123
Tabel 2.68 Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-124
Tabel 2.69 Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-125
Tabel 2.70 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2019-2023..... II-126
Tabel 2.71 Panjang Ruas Jalan Bertrotoar dan Berdrainase (Km) Tahun 2019-2023..... II-128
Tabel 2.72 Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2021-2023..... II-130
Tabel 2.73 Perkembangan Rasio Tempat Ibadah Per 1.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2021-2023..... II-131

Tabel 2.74 Perkembangan Rasio Daya Tampung Tempat Pemakaman per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2020-2023 ..... II-132
Tabel 2.75 Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-139
Tabel 2.76 Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-139
Tabel 2.77 Jumlah Sarana Sosial di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-140
Tabel 2.78 PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu Tahun 2019–2023..... II-140
Tabel 2.79 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-141
Tabel 2.80 Keterlibatan Pekerja Perempuan Di Lembaga Swasta Dan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021–2023..... II-142
Tabel 2.81 Rasio KDRT dan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-143
Tabel 2.82 Konsumsi Energi dan Protein di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-145
Tabel 2.83 Persentase Luas Lahan Bersertifikat, dan Penyeslesaian Kasus Tanah Negara di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-146
Tabel 2.84 Persentase Sampah yang Tertangani di Kota Palu Tahun 2021-2023..... II-147
Tabel 2.85 Cakupan Sarpras Kantor Kelurahan, dan Persentase PKK Aktif di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-153
Tabel 2.86 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-156
Tabel 2.87 Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2019–2023..... II-157
Tabel 2.88 Rasio Izin Trayek di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-157

Tabel 2.89 Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis Kota Palu Tahun 2019–2023..... II-159
Tabel 2.90 Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan di Kota Palu Tahun 2019–2023..... II-160
Tabel 2.91 Jaringan Komunikasi Propinsi/Kota Palu Tahun 2019–2023..... II-160
Tabel 2.92 Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-161
Tabel 2.93 Persentase Koperasi Aktif di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-163
Tabel 2.94 Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-164
Tabel 2.95 Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Palu Tahun 2019–2023.... II-164
Tabel 2.96 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Palu Tahun 2019 s/d 2023..... II-166
Tabel 2.97 Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Palu Tahun 2019 s/d 2023..... II-167
Tabel 2.98 Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga di Kota Palu Tahun 2019–2023..... II-167
Tabel 2.99 Data terkait Urusan Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2019–2023..... II-169
Tabel 2.100 Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-171
Tabel 2.101 Destinasi Wisata di Kota Palu..... II-173
Tabel 2.102 Persentase Silpa terhadap APBD Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-180
Tabel 2.103 Persentase Belanja Pendidikan 20% Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-181
Tabel 2.104 Persentase Belanja Kesehatan 10% Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-181

Tabel 2.105 Indek Daya Saing Daerah (IDSD) Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023..... II-182
Tabel 2.106 Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan Tahun 2023 ..... II-186
Tabel 2.107 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Palu Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan 2022-2023..... II-187
Tabel 2.108 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019-2023..... II-189
Tabel 2.109 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2019-2023 ..... II-191
Tabel 2.110 Jumlah Penumpang Bandara Tahun 2019-2023..... II-193
Tabel 2.111 Jumlah Penumpang Pelabuhan (Pantoloan + Taipa) Tahun 2017-2021..... II-193
Tabel 2.112 Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan di Kota Palu Tahun 2019–2023..... II-195
Tabel 2.113 Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Palu Tahun 2019–2023..... II-196
Tabel 2.114 Luasan Pola Ruang Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-196
Tabel 2.115 Jumlah Bank di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-198
Tabel 2.116 Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-199
Tabel 2.117 Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2019-2023..... II-200
Tabel 2.118 penduduk terlayani Air Minum di Kota PaluTahun 2019-2023..... II-201
Tabel 2.119 Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik Tahun 2019-2023..... II-202
Tabel 2.120 Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN) Tahun 2019-2023..... II-203
Tabel 2.121 Penduduk yang Menggunakan Telepon Tahun 2014-2018..... II-203

Tabel 2.122	Angka Kriminalitas yang tertangani di Kota Palu Tahun 2019-2023.....	II-205
Tabel 2.123	Jumlah Demonstrasi di Kota Palu Tahun 2018-2022.....	II-206
Tabel 2.124	Lama Proses Perizinan, Jumlah Persyaratan dan Biaya Perizinan di Kota Palu Tahun 2023.....	II-207
Tabel 2.125	Jumlah Jenis Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 2019-2023..	II-208
Tabel 2.126	Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2019-2023.....	II-211
Tabel 2.127	Rasio Ketergantungan Kota Palu Tahun 2019-2023.....	II-211
Tabel 2.128	Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah Terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan kota palu tahun 2019-2023	II-213
Tabel 2.129	Rekapan Persentase dan Predikat Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2023 Triwulan IV Per Bidang Urusan dan Unsur Pemerintahan.....	II-278
Tabel 2.130	Rata - Rata Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2022 Triwulan IV Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palu.....	II-310
Tabel 2.131	Pencapaian Program OPD terhadap 53 Program Unggulan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2023.....	II-313
Tabel 2.132	Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.....	II-384
Tabel 2.133	Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Pelayanan Dasar.....	II-403
Tabel 2.134	Permasalahan Kota Palu Berkaitan Urusan Pemerintahan Pilihan.....	II-418
Tabel 2.135	Permasalahan Kota Palu Berkaitan Urusan Pemerintahan Penunjang.....	II-429
Tabel 3.1	Pertumbuhan PDRB per Lapangan Usaha Tahun 2023.....	III-3

Tabel 3.2	PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Jutaan Rupiah).....	III-4
Tabel 3.3	Rata-Rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%) Tahun 2019-2023	III-7
Tabel 3.4	Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2023 (dalam %)	III-8
Tabel 3.5	Gini Ratio Kota Palu Tahun 2019-2023	III-11
Tabel 3.6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palu	III-15
Tabel 3.7	Perkiraan Kondisi Ekonomian Kota Palu Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025	III-17
Tabel 3.8	Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021-2022, Rencana Tahun Berjalan 2023 Tahun Berjalan 2024 Serta Proyeksi Tahun 2025	III-26
Tabel 3.9	Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022-2023, Tahun Berjalan 2024 Serta Proyeksi Tahun 2025-2026	III-38
Tabel 3.10	Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan 2023, Tahun Berjalan 2024 Serta Proyeksi Tahun 2025-2026	III-42
Tabel 4.1	Dasar Kebijakan Bagi Pembangunan Kota Palu Tahun 2025 ..	IV-12
Tabel 4.2	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026	IV-14
Tabel 4.3	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palu	IV-29
Tabel 4.4	Kesesuaian Arah Kebijakan Ekonomi Nasional, Sulawesi Tengah dan Kota Palu 2025.....	IV-37
Tabel 4.5	Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah.....	IV-61
Tabel 4.6	Prioritas Pembangunan Nasional 2025, Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2025, Prioritas Pembangunan Kota Palu 2025	IV-74
Tabel 4.7	Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Pembangunan Kota Palu dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025	IV-76

Tabel 4.8	Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2025 serta PD Penanggung Jawab	IV-77
Tabel 4.9	Matriks Keterkaitan Arahan Presiden, Misi Pemerintah, Misi Pemerintah Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu	IV-83
Tabel 4.10	Dukungan Program Daerah Pada RKPD 2024 Terhadap Program Prioritas pada Prioritas Nasional	IV-86
Tabel 4.11	Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah dan Kota Palu Tahun 2025.....	IV-139
Tabel 5.1	Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2024 Berdasarkan Urusan Pemerintahan	V-2
Tabel 6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Palu Tahun 2024	VI-2
Tabel 6.2	Kesepakatan Target 31 Indikator Kinerja Utama Kota Palu Tahun 2025	VI-4
Tabel 6.3	Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kota Palu 2025.....	VI-5
Tabel 6.4	Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Palu Tahun 2025.....	VI-25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Wilayah Kota Palu	II – 3
Gambar 2.2	Peta *Class* Kelerengan	II – 7
Gambar 2.3	Peta Penggunaan Lahan Kota Palu	II – 14
Gambar 2.4	Perkembangan tektonik Sulawesi menurut Hall dan Smyth (2008) dan Peta Geologi Sulawesi menurut Hall dan Wilson (2000).....	II – 20
Gambar 2.5	Peta Sumber Gempa Indonesia Tahun 2017.....	II – 22
Gambar 2.6	Peta Gempabumi Merusak dan Tsunami di Sulawesi Tahun 1904-2019	II – 23
Gambar 2.7	Peta-Peta hasil pengukuran tsunami (BMKG; 2018)	II – 27
Gambar 2.8	Peta Hasil Survei Makroseismik Tingkat Kerusakan Gempa Mw7,4 tanggal 28 September 2018 di Kota Palu (kiri, Stageof Palu; 2018) dan Peta Sebaran Gempa Bumi di Sulawesi Tengah dan sekitarnya Tahun 2018 (kanan, Stageof Palu; 2019)	II – 27
Gambar 2.9	Peta Risiko Bencana Gempa bumi Kota Palu	II – 30
Gambar 2.10	Peta Risiko Bencana Liquifaksi Kota Palu	II – 36
Gambar 2.11	Peta Risiko Bencana Tsunami Kota Palu	II – 42
Gambar 2.12	Peta Risiko Bencana Longsor Kota Palu	II – 48
Gambar 2.13	Peta Risiko Bencana Banjir Kota Palu	II – 55
Gambar 2.14	Peta Risiko Bencana Kebakaran Permukiman Kota Palu	II – 61
Gambar 2.15	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2023	II – 67
Gambar 2.16	Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Palu Tahun 2019– 2023	II – 70
Gambar 2.17	Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2019-2023	II – 76

Gambar 2.18	Inflasi Kota Palu Tahun 2019-2023	II – 85
Gambar 2.19	PDRB Per kapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (Juta Rupiah) Tahun 2019 – 2023	II – 87
Gambar 2.20	Angka Gini Rasio Kota Palu Tahun 2019-2023	II – 89
Gambar 2.21	Angka Melek Huruf Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2024	II – 93
Gambar 2.22	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota PaluTahun 2019-2023	II – 94
Gambar 2.23	Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2019-2023	II – 98
Gambar 2.24	Angka Harapan Hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023	II – 102
Gambar 2.25	Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palu Tahun 2019-2023	II – 103
Gambar 2.26	Perkembangan APS SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu (persen) Tahun 2019-2023	II – 107
Gambar 2.27	Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Kota Palu Tahun 2018-2022	II – 115
Gambar 2.28	Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani Tahun 2019-2023.....	II – 134
Gambar 2.29	Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Palu Tahun 2019–2023	II – 136
Gambar 2.30	Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Palu Tahun 2019-2023	II – 137
Gambar 2.31	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2019-2023	II – 138
Gambar 2.32	Rasio Polisi Pamong Praja di Kota Palu Tahun 2019–2022	II – 139
Gambar 2.33	Penduduk ber KTP, ber Akta Kelahiran, ber Akta Kematian, ber Akta Nikah, ber Akta Cerai, Memiliki KK di Kota Palu Tahun 2019-2023	II – 149

Gambar 2.34	Rasio Penduduk Ber KTP di Kota Palu Tahun 2019 – 2023	II – 150
Gambar 2.35	Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Palu Tahun 2019-2023	II – 151
Gambar 2.36	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Palu Tahun 2019-2023	II – 152
Gambar 2.37	Rata-rata Anak Per Keluarga di Kota Palu Tahun 2019-2023	II – 155
Gambar 2.38	Rasio Akseptor KB di Kota Palu Tahun 2019-2023	II – 156
Gambar 2.39	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kota Palu Tahun 2019–2023	II – 159
Gambar 2.40	Rasio Wartel/Warnet di Kota Palu Tahun 2017-2021	II – 162
Gambar 2.41	Total Stasiun Radio/TV Lokal di Kota Palu Tahun 2017-2021	II – 163
Gambar 2.42	Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) di Kota Palu Tahun 2019-2023	II – 173
Gambar 2.43	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makanan Minuman Terhadap PDRB (ADHB) Kota Palu Tahun 2019–2023.....	II – 175
Gambar 2.44	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2019-2023	II – 176
Gambar 2.45	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kota Palu (%) Tahun 2019-2023....	II – 177
Gambar 2.46	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2019–2023.....	II – 178
Gambar 2.47	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2019–2023.....	II –179
Gambar 2.48	Produksi Ikan di Kota Palu (Ton) Tahun 2019 – 2023	II –180

Gambar 2.49	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) W Tahun 2022-2023	II –184
Gambar 2.50	Rerata Pengeluaran Perkapita sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rp/Tahun) Tahun 2019-2023	II –186
Gambar 2.51	Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Palu, Tahun 2019-2023	II –194
Gambar 2.52	Jumlah Orang Yang Melalui Terminal	II – 196
Gambar 3.1	PDRB Perkapita Kota Palu Tahun 2019 – 2023 (dalam juta Rupiah).....	III – 6
Gambar 3.2	Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah, Dan Kota Palu Tahun 2019-2023.....	III – 9
Gambar 3.3	Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2019 2023 (dalam ribu jiwa).....	III – 9
Gambar 3.4	Garis Kemiskinan Antara Kota Palu Dan Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023	III – 10
Gambar 3.5	Indeks Pembangunan Manusia Indonesia, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2019-2023..	III – 12
Gambar 3.6	Usia Harapan Hidup Kota Palu Tahun 2019-2023...	III – 13
Gambar 3.7	Dimensi Pendidikan.....	III – 14
Gambar 3.8	Dimensi Daya Beli Masyarakat.....	III – 14
Gambar 4.1	Penyusunan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2024 Memperhatikan.....	IV – 5
Gambar 4.2	Tema Pembangunan Kota Palu	IV - 6
Gambar 4.3	Pendekatan Perencanaan Pembangunan.....	IV - 9
Gambar 4.4	Arahan Utama Presiden	IV-55
Gambar 4.5	Keterkaitan Misi Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan.....	IV-72
Gambar 4.6	Alur Pikir Prioritas Pembangunan.....	IV-72
Gambar 4.7	Program Prioritas Kota Palu.....	IV-73

Gambar 4.8	Indikasi Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah.	IV-80
Gambar 4.9	Kerangka Prioritas Nasional RKP 2025.....	IV-85
Gambar 4.10	Cross Cutting Penurunan Stunting Kota Palu Tahun 2025	IV-138



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Perencanaan pembangunan tersebut dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD. Secara substansial RKPD merupakan penjabaran dari visi, misi kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). RKPD memuat kebijakan umum, arahan operasional serta kerangka pendanaan dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk satu tahun ke depan. Selanjutnya menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Penyusunan RKPD dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan dengan berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan yang partisipatif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (***THIS***) serta tanpa meninggalkan unsur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi (***KISS***) antar pemangku kepentingan.

Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk

mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai Pemangku kepentingan. Pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Sedangkan, Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, hingga nasional. Selanjutnya, secara substansi dokumen RKPD menggunakan pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Penyusunan RKPD Tahun 2025 yang merupakan tahapan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Perubahan terhadap beberapa peraturan perUndang-Undangan yang terutama menyangkut urusan dan kewenangan pemerintahan daerah, serta terjadinya perubahan dan penyesuaian tata laksana organisasi perangkat daerah, sehingga RPJMD Kota Palu Tahun 2021 – 2026 sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, sudah mengakomodir perubahan Organisasi Perangkat Daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 secara jelas telah mengatur mekanisme dan waktu pelaksanaan penyusunan hingga penetapan RKPD, secara hierarkis penyusunan RKPD Kota Palu Tahun 2025 berpedoman dan mengacu pada dokumen RPJPD Kota Palu 2005-2025, dengan tetap memperhatikan RTRW Kota Palu 2021 – 2041, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, RKP Tahun 2025 dan RTRW Nasional.

RPJPD Kota Palu 2005 – 2025 menyatakan bahwa sasaran pokok dan sekaligus merupakan indikator kinerja utama yang akan dicapai dalam tahap keempat pembangunan jangka panjang Kota Palu adalah meningkatnya Kualitas Infrastruktur dengan tersedianya Kawasan Pusat Industri Perdagangan dan Industri, Pariwisata, serta Pelayanan Publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga Keseimbangan Lingkungan.

Hasil pembangunan yang ingin dicapai pada akhir tahap keempat RPJPD Kota Palu, ialah :

- Setiap wilayah kecamatan telah memiliki Kawasan Pusat Perdagangan dan Industri, Pariwisata, serta tersedianya Fasilitas untuk Kemudahan Pelayanan Publik, tanpa mengabaikan persoalan lingkungan;
- Terciptanya kondisi ketertiban dan keamanan yang kondusif, melalui pemahaman nilai - nilai demokrasi dengan menitikberatkan pada prinsip-prisip toleransi, kesetaraan dan nondiskriminasi, meningkatnya kesadaran dan penerapan penegakan hukum, serta meningkatnya tata kelola pemerintahan daerah yang didukung profesionalitas aparatur;

- Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial, yang mengarah pada perbaikan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat;
- Meningkatnya kualitas dan relevansi, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dengan didukung manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif dalam menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing;
- Meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa;
- Daya saing perekonomian yang semakin kuat dan kompetitif dengan terpadunya sektor perdagangan, periwisata, industri dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan;
- Terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha, makin selarasnya pembangunan pendidikan, Iptek, dan industri;
- Terlaksananya penata kelolaan lembaga ekonomi masyarakat yang mendorong pada peningkatan efisiensi dan produktivitas, serta penguasaan dan penerapan teknologi dalam kegiatan perekonomian;
- Ketersediaan dan kesesuaian pembangunan infrastruktur dengan rencana tata ruang daerah, melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dalam ketersediaan, air minum melalui konservasi, pengembangan dan keberlanjutan sumber daya air, pemukiman layak yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung, termasuk pemenuhan pasokan tenaga listrik hingga ke tingkat elektrifikasi rumah tangga;
- Pembangunan berkelanjutan menuju kota ekologis, yang dicerminkan oleh indikator terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas

kehidupan sosial dan ekonomi secara lestari; Semakin membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam, diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan dan semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang serta meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.

Pada tataran tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, RKPD Kota Palu Tahun 2025 diorientasikan untuk mendukung visi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2016-2021 yaitu Sulawesi Tengah Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing. Untuk tingkat nasional, RKPD Kota Palu menyesuaikan dan menyelaraskan dengan dokumen rencana kerja Pemerintah Tahun 2025 untuk mendukung tercapainya tujuh prioritas pembangunan nasional. Prioritas pembangunan nasional meliputi: 1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, 2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, 3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing, 4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, 5. memperkuat infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar, 6. membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, dan 7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (Polhukhankam) dan transformasi pelayanan publik.

Pada akhirnya, RKPD merupakan pedoman dalam menyusun Renja PD, terkait arah kebijakan, kerangka pendanaan serta implementasi dan operasionalisasi pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Beberapa peraturan perundangan yang menjadi dasar hukum dalam menyusunan RKPD Tahun 2025 adalah :

1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

10) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No.11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4966)

11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

12) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

14) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6757);

15) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

16) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);

17) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);

18) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
19) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
20) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115);
21) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
23) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
24) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

25) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
26) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
27) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara REPUBLIK INDONESIA Tahun 2020 Nomor 10);
28) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
31) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
35) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6);
36) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi

Tengah 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 51);

37) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 Nomor 140, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13-237);

38) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

39) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

40) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 4);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kota Palu Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada dokumen perencanaan pembangunan yang masih relevan dan berkaitan langsung dengan perencanaan pembangunan yang telah ada, serta dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan daerah provinsi dan nasional, serta kabupaten yang berbatasan (antar waktu, antar ruang, antar wilayah dan antar urusan pemerintahan).

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 ini berpedoman pada RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, memperhatikan dan selaras dengan agenda, arah kebijakan RKP Tahun 2025, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimana pelayanan dasar menjadi tujuan dan sasaran pemerintah Kota Palu serta perangkat daerah serta pencapaian target dan sasaran SDG's sebagai prioritas pembangunan daerah. Penyusunan RKPD dilakukan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Palu. Selanjutnya, RKPD Tahun 2024 akan menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Renja PD, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2025, Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2025, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sampai Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD Tahun 2025.

1.4. Maksud dan Tujuan

RKPD Kota Palu Tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memberikan informasi dan arahan bagi seluruh pemangku kepentingan, terkait arah kebijakan, strategi dan langkah-langkah dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta kerangka pendanaan dan pengalokasian anggaran yang akan dilakukan pada tahun perencanaan.

Secara substansial, normatif, operasional dan faktual penyusunan RKPD Kota Palu Tahun 2025 bertujuan:

a. Sebagai arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif,

kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah

penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;

b. Pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang akan diusulkan oleh Wali Kota untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
c. Sebagai arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala PD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja PD; dan
d. Menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

1.5. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Dokumen RKPD Kota Palu Tahun 2025 berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dangan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan
1.3. Hubungan antar Dokumen
1.4. Maksud dan Tujuan
1.5. Sistematika Dokumen RKPD

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Daerah
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
2.3.1. Identifikasi Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.
2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
Permasalahan Pembangunan Daerah.
2.3.3. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.
2.3.4. Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

BAB III. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VII. PENUTUP



BAB 2

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1994 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu, Kota Palu ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah dengan wilayah seluas 395,06 kilometer persegi. Kota Palu juga ditunjuk sebegai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) dalam struktur tata ruang. Secara umum, Kota Palu disebut sebagai Kota Lima Dimensi, sebab berpadunya unsur alami gunung, pantai, lembah, sungai dan bukit dalam satu *landscape* hamparan yang utuh. Adapun informasi kondisi umum Kota Palu dapat dilihat melalui aspek-aspek sebagai berikut :

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi Kota Palu dapat dijelaskan dan digambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan pada aspek demografi mencakup dan dapat pula digambarkan antara lain perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kota Palu terbagi atas delapan kecamatan dan empat puluh enam kelurahan. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Mantikulore yaitu seluas 206,80 km² (52,35%), dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Palu Timur yaitu seluas 7,71 km² (1,95%). Luas Wilayah Kota Palu secara rinci tergambar dalam tabel 2.1 di bawah ini :

Tabel 2.1

Luas Wilayah Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2023

No.	Kecamatan	Luas (KM^2)	Persentase
1.	Palu Barat	8,28	2,10
2.	Tatanga	14,95	3,78
3.	Ulujadi	40,25	10,19
4.	Palu Selatan	27,38	6,93
5.	Palu Timur	7,71	1,95
6.	Mantikulore	206,8	52,35
7.	Palu Utara	29,94	7,58
8.	Tawaeli	59,75	15,12
	Kota Palu	**395,06**	**100,00**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka, Tahun 2023

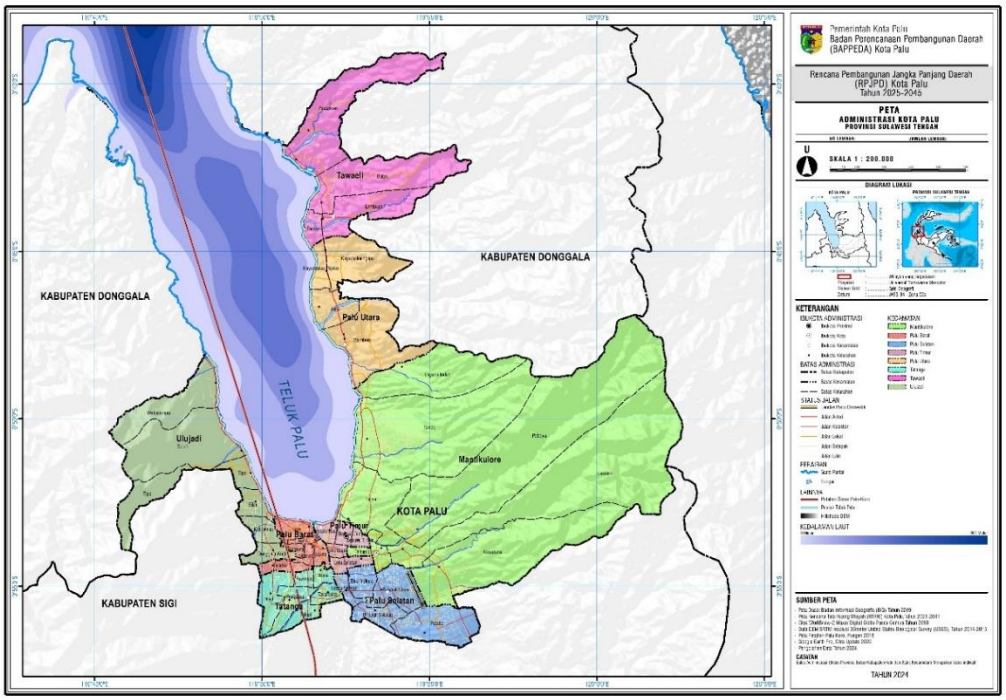
Kota Palu berada di sekitar Garis Khatulistiwa, di mana sebagian besar kelurahan berada pada daratan lembah Palu yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, dan 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu. Secara administratif batas-batas wilayah Kota Palu adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Marawola dan Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Sebelah Barat : Kecamatan Kinovaro dan Kecamatan Marawola Barat Kabupaten Sigi, dan Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala;
- Sebelah Timur : Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, dan Kecamatan Tanantovea Kabupaten Donggala.

B. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kota Palu secara astronomis terletak antara 0°,36" - 0°,56" Lintang Selatan dan 119°,45" - 121°,1" Bujur Timur yang juga berada di bawah Garis Katulistiwa. Keberadaannya di bawah garis itu menyebabkan suhu udara, curah hujan, dan kelembabannya rata-rata menjadi tinggi, serta berpotensi terjadinya hujan *Zenithal* atau hujan yang terjadi pada siang hari yang disebabkan oleh pemanasan udara di sekitarnya yang terlalu tinggi. Gambaran kondisi suhu udara, curah hujan, dan kelembaban akan dijelaskan pada bagian lain di sub-sub karakteristik lokasi dan wilayah Kota Palu selanjutnya.

Berikut letak wilayah Kota Palu menurut kecamatan tergambar pada peta administrasi wilayah Kota Palu di bawah ini:



Sumber: RTRW Kota Palu, 2021-2041

Gambar 2.1
Peta Administrasi Wilayah Kota Palu

Sebagian besar letak kelurahan di Kota Palu berada pada dataran Lembah Palu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kelurahan, sedangkan 17 (tujuh belas) kelurahan lainnya berada di sepanjang Pantai Teluk Palu. Letak kecamatan dengan sejumlah kelurahannya di Kota Palu menurut posisi pantai dijabarkan dalam tabel 2.2 di bawah ini:

Tabel 2.2
Letak Kecamatan Menurut Posisi Pantai di Kota Palu

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Letak	
			Pantai	Bukan Pantai
1	Palu Barat	6	1	5
2	Tatanga	6	-	6
3	Ulujadi	6	4	2
4	Palu Selatan	5	-	5
5	Palu Timur	5	1	4
6	Mantikulore	8	3	5
7	Palu Utara	5	4	1
8	Tawaeli	5	4	1
Kota Palu		**46**	**17**	**29**

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.2 memperlihatkan bahwa letak Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Palu Selatan berada pada wilayah lembah yang tidak memiliki pantai. Di sisi lain, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli memiliki masing-masing lima kelurahan yang hampir semuanya berada pada pesisir pantai, 4 (empat) kelurahan berada pada pesisir pantai dan 1 (satu) kelurahan berada pada wilayah bukan pantai. Demikian halnya dengan Kecamatan Ulujadi yang terdiri dari 6 (enam) kelurahan, 4 (empat) diantaranya berada disepanjang pesisir pantai dan 2 (dua) lainnya berada pada wilayah bukan pantai.

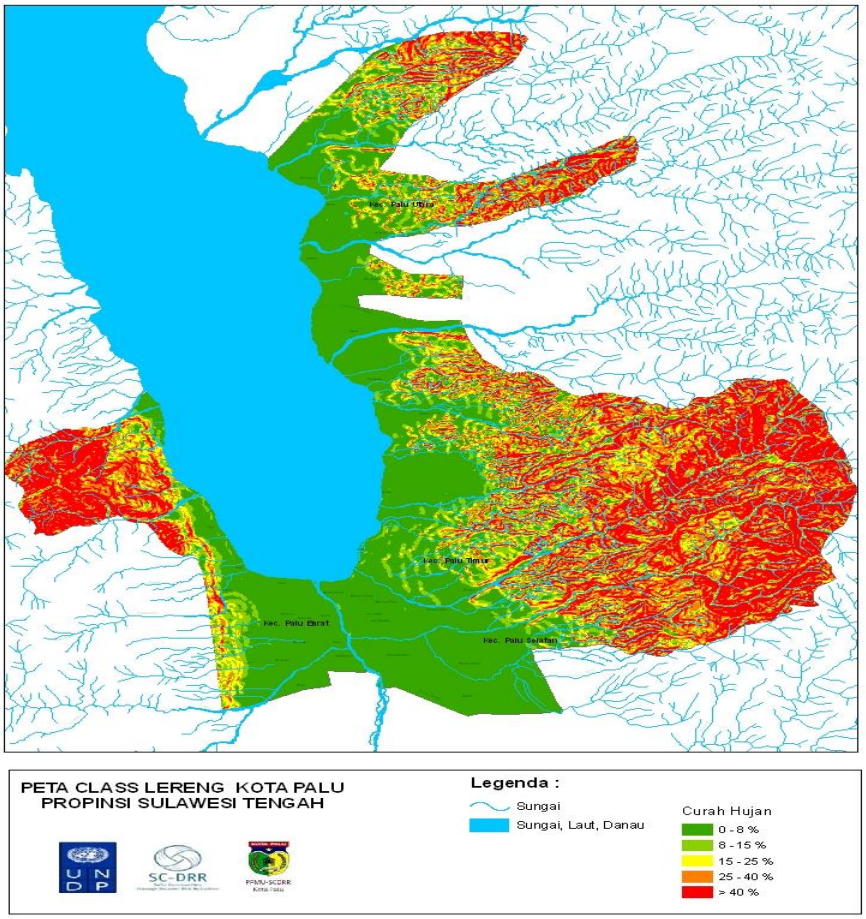
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 bahwa Kota Palu tidak termasuk dalam daftar penetapan daerah tertinggal Tahun 2020 sampai 2024 sehingga tidak memiliki Kawasan pedalaman, terpencil, dan Kawasan kepulauan. Pososi Geografis Kota Palu yang terbuka dan dapat dicapai melalui darat, laut, dan udara sangat dimungkinkan sebagai salah satu pusat perekonomian sulawesi melalui interkoneksitas pembangunan regional Pulau Sulawesi. Kota Palu memiliki *landscap* khas yang unik, dibelah oleh aliran sungai yang mengalir dari arah selatan, sedangkan sisi barat, dan timur Kota Palu adalah pegunungan yang indah yang ceruk lonjongnya kea rah utara membentuk garis pesisir teluk yang menawan. Dimensi gunung, sungai, laut dan pesisir teluk itu memberi ciri khas tersendiri bagi Kota Palu. Wilayah Kota Palu yang dicirikan dalam bentuk utama berupa lembah, di mana pusat kota terletak di bagian tengah dari lembah tersebut sehingga letak ini pula yng berpengaruh terhadap sebaran populasi penduduk yang relative memusat di bagian tengah lembah.

C. Kondisi Topografi

Topografi wilayah Kota Palu adalah datar sampai berombak-ombak dengan beberapa daerah yang berlembah.Keadaan topografi secara tak langsung merupakan kendala aktif atas penggunaan lahan. Tampak daerah pedataran merupakan pusat dari berbagai sektor kehidupan, seperti misalnya permukiman, perkotaan, pesawahan dan kebun palawija. Sedangkan daerah perbukitan dan pegunungan umumnya merupakan kawasan yang dimanfaatkan sebagai kebun-kebun, tanah tegalan, perkebunan permanen, hutan produksi dan hutan lindung, serta Taman Hutan Raya *(TAHURA).*

Hasil analisis terhadap peta topografi diperoleh klasifikasi kemiringan lereng terdapat di wilayah Kota Palu sebagaimana yang terlihat pada gambar 2.2, sebagai berikut :

1. Daerah pedataran berkemiringan lereng kurang dari 0% - 8% dan 8% - 15%, meliputi seluruh wilayah kecamatan yang tersebar di wilayah Kota Palu, termasuk semua kelurahan yang ada didalamnya;
2. Daerah landai dengan kemiringan lereng antara 15% - 25%, meliputi seluruh wilayah kelurahan yang tersebar di 4 kecamatan Kota Palu;
3. Daerah agak terjal berkemiringan lereng 25% - 40%, meliputi wilayah yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, kebun kopi, Buluri, Watusampu, Kabonena, dan Donggala Kodi dll;
4. Daerah terjal berkemiringan lereng > 40%, meliputi wilayah Pegunungan diwiyah Timur, Utara dan Barat Kota Palu yaitu di wilayah kelurahan Kawatuna, Poboya, Lasoani, Vatutela, kebun kopi, Buluri dan Watusampu.



Sumber: Bappeda Kota Palu Tahun 2023

Gambar 2.2.
Peta *Class* Kelerengan

Secara umum wilayah Kota Palu dapat dibagi menjadi tiga zona ketinggian, yaitu:

1. Sebagian daerah bagian barat sisi timur memanjang dari utara ke selatan, bagian timur arah utara dan bagian utara sisi barat yang memanjang dari utara keselatan merupakan dataran rendah/pantai dengan ketinggian antara 0-100 meter diatas permukaan laut (mdpl).
2. Daerah bagian barat sisi barat dan selatan, daerah bagian timur ke arah selatan dan bagian utara kearah timur dengan

ketinggian antara 100-500 meter diatas permukaan laut (mdpl).

3. Daerah pegunungan dengan ketinggian lebih dari 100 meter diatas permukaan laut (mdpl).

D. Kondisi Geologi

Geologi tanah dataran lembah Palu ini terdiri dari bahan-bahan *alluvial* dan *colluvial* yang berasal dari etamorfosis yang telah membeku. Disamping itu tanahnya kemungkinan bertekstur sedang. Secara umum batuan yang menyusun daerah penelitian terdiri atas Aluvium muda, berasal dari endapan sungai, aluvium, endapan kipas aluvial, koluvium, andesit basalt, batu pasir, konglomerat, batu lumpur, granit, granodiorit, riolit, quartzite, filit, serpih dan schist yang kesemuanya tersebar pada daerah di wilayah Kota Palu.

Secara geologis, orientasi fisiografi Kota Palu berhubungan dengan proses struktur yang terjadi serta jenis batuan yang menyusun Kota Palu, dimana sisi kiri dan kanan Kota Palu merupakan jalur patahan utama, yaitu patahan Palu-Koro serta wilayahnya disusun oleh batuan yang lebih keras dibanding material penyusun bagian lembah.

Berdasarkan hubungan geologi, geomorfologi Kota Palu dapat dibagi kedalam tiga satuan geomogfologi, yaitu :

1. Satuan Geomorfologi Dataran, dengan kenampakan morfologi berupa topografi tidak teratur, lemah, merupakan wilayah dengan banjir musiman, dasar sungai umumnya meninggi akibat sedimentasi fluvial. Morfologi ini disusun oleh material utama berupa aluvial sungai dan pantai. Wilayah tengah Kota Palu didominasi oleh satuan geomorfologi ini;

2. Satuan Geomorfologi Denudasi dan Perbukitan, dengan kenampakan berupa morfologi bergelombang lemah sampai bergelombang kuat. Wilayah kipas aluvial (aluvial fan) termasuk dalam satuan morfologi ini. Di wilayah Palu morfologi ini meluas di wilayah Palu Timur, Palu Utara, membatasi antara wilayah morfologi dataran dengan morfologi pegunungan.
3. Satuan Geomorfologi Pegunungan Tebing Patahan, merupakan wilayah dengan elevasi yang lebih tinggi. Kenampakan umum berupa tebing-tebing terjal dan pelurusan morfologi akibat proses patahan. Arah pegunungan ini hampir utara-selatan, baik di timur maupun dibarat dan menunjukkan pengaruh struktur/tektonik terhadap bentuk kini morfologi Kota berupa lembah. Umumnya wilayah ini bukan merupakan wilayah hunian.

E. Kondisi Hidrologi dan Klimatologi

Wilayah Kota Palu dilalui oleh 11 (sebelas) aliran sungai, melintas melalui semua kecamatan. Kecamatan terbanyak dilalui aliran sungai adalah Kecamatan Mantikulore sebanyak 3 (tiga) sungai yaitu Sungai Kawatuna, Sungai Pondo dan Sungai Watutela. Terdapat 2 (dua) kecamatan yang hanya dilalui oleh 1 (satu) sungai yaitu Kecamatan Palu Barat yang dilalui Sungai Palu dan Kecamatan Tatanga yang dilalui Sungai Lewara. Sementara 5 (lima) Kecamatan dilalui 2 (dua) sungai yaitu: Kecamatan Ulujadi dilalui Sungai Buvu Mpemata dan Sungai Ngolo, Kecamatan Palu Selatan dilalui Sungai Palu dan Sungai Kawatuna, Kecamatan Palu Timur dilalui Sungai Palu dan Sungai Pondo, Kecamatan Palu Utara dilalui Sungai Taipa dan Sungai Pajeko, serta Kecamatan Tawaeli dilalui Sungai Pantoloan dan Sungai Tawaeli. Tabel 2.3 menunjukan

nama-nama sungai yang mengalir melewati semua Kecamatan yang berada di wilayah Kota Palu.

Tabel 2.3
Nama Sungai yang Mengalir di Kota Palu
Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Nama Sungai
1.	Palu Barat	Sungai Palu
2.	Tatanga	Sungai Lewara
3.	Ulujadi	Sungai Buvu Mpemata, dan Sungai Ngolo
4.	Palu Selatan	Sungai Palu, dan Sungai Kawatuna.
5.	Palu Timur	Sungai Palu, dan Sungai Pondo
6.	Mantikulore	Sungai Kawatuna, Sungai Pondo, dan Sungai Watutela
7.	Palu Utara	Sungai Taipa dan Sungai Pajeko
8.	Tawaeli	Sungai Pantoloan, dan Sungan Tawaeli

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Berdasarkan tata letak wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), secara geografis Kota Palu hanya dilalui satu DAS yaitu DAS Palu, dengan luas 301.495,68 Ha. Sungai Palu sepanjang tahun tidak pernah mengalami kekeringan karena pada sungai tersebut bermuara 16 (enam belas) anak sungai dan sungai-sungai lainnya seperti Sungai Paneki, Sungai Miu, Sungai bambanua, dan Sungai Wuno yang memiliki hulu pada Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi. Sungai Palu amat potensial untuk dimanfaatkan sebagai sumber air bersih, pertanian dan industri. Debit maksimal Sungai Palu adalah 142,5 m^3/detik dan debit minimal adalah 45 m^3/detik.

Suhu udara maksimum yang tercatat pada Stasiun Udara Mutiara Palu pada Tahun 2022 adalah 36,4°C terjadi pada bulan Desember. Begitu pula suhu udara minimum terjadi pada bulan yang sama di Desember yaitu sebesar 18,6°C. Rata-rata suhu udara tertinggi terjadi pada bulan April yaitu sebesar 28°C, dan Rata-rata

suhu udara terendah terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 26,6°C. Kelembaban udara tertinggi terjadi pada bulan Juli yang mencapai 83,6 persen, sedangkan kelembaban udara terendah terjadi pada bulan Desember yaitu 74,7 persen.

Rata-rata suhu udara, dan kelembabannya di Kota Palu Tahun 2022 tertera dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Rata-Rata Suhu Udara dan Kelembapan Relatif Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2023

Bulan	Suhu Udara			Kelembapan
	Minimum	Maximum	Rata-rata	(%)
Januari	20,3	36,4	27,4	76,3
Februari	20,0	34,4	26,9	79,4
Maret	20,6	35,4	27,3	79,1
April	21,4	36,2	27,9	77,1
Mei	20,8	36,8	28,4	76,5
Juni	20,8	35,6	27,8	78,7
Juli	20,6	35,2	27,8	77,5
Agustus	23,0	35,6	28,2	74,7
September	22,2	36,6	28,4	74,6
Oktober	22,4	38,0	29,5	70,3
November	22,2	37,2	29,1	74,9
Desember	22,2	36,6	28,7	75,7

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Kondisi tekanan udara, kecepatan angin, dan arah angin setiap bulan di Kota Palu Tahun 2022 dapat dijelaskan di mana tekanan udara tertinggi tercatat pada Stasiun Meteorologi Mutiara Palu Tahun 2022 terjadi pada Bulan Januari dan September sebesar 1.001,2 mb, sedangkan tekanan udara terendah terjadi pada bulan Desember sebesar 999,3 mb. Untuk kecepatan angin, terlihat variatif antara 3,3 - 5 knots. Angka 5 knots sebagai kecepatan tertinggi terjadi pada Bulan April, dan 3,3 knots sebagai

kecepatan terendah terjadi pada Bulan Mei. Arah angin di wilayah Kota Palu setiap bulan bergerak dari tiga arah mata angin yaitu Utara, Selatan, dan Timur Laut dengan arah angin terbanyak dalam satu tahun bergerak dari arah Utara wilayah Kota Palu.

Rata-rata tekanan udara, kecepatan angin, dan arah angin terbanyak setiap bulan di Kota Palu Tahun 2022 terlihat dalam tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rata-Rata Tekanan Udara, Kecepatan Angin dan Arah Angin Terbanyak Setiap Bulan di Kota Palu Tahun 2023

Bulan	Tekanan Udara (mbar)	Kecepatan Angin (knot)
Januari	1000,2	4,4
Pebruari	1000,8	4,3
Maret	1001,6	5,4
April	1000,4	5,5
Mei	1001,5	5,4
Juni	1001,3	4,6
Juli	1001,7	5
Agustus	1002,2	4,6
September	1001,5	4,4
Oktober	1002,1	4,6
Nopember	1000,9	4,5
Desember	1001,2	4,3

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2023

Curah hujan tertinggi pada Tahun 2022 terjadi pada Bulan September yaitu 124,3 mm dan Bulan Oktober yaitu 120,3 mm, sedangkan curah hujan terendah terjadi pada Bulan Nopember yaitu 9,6 mm dan Bulan April yaitu 19,3 mm.

Berikut curah hujan setiap bulan di Kota Palu Tahun 2022 tertera dalam Tabel 2.6.

Tabel 2.6
Rata-rata Curah Hujan dan Hari Hujan setiap bulan di Kota Palu, Tahun 2023

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
Januari	52,0	17
Pebruari	63,9	18
Maret	52,4	23
April	43,2	17
Mei	65,8	15
Juni	42,0	20
Juli	120,8	15
Agustus	43,6	11
September	36,5	15
Oktober	9,8	8
Nopember	31,7	14
Desember	25,8	15

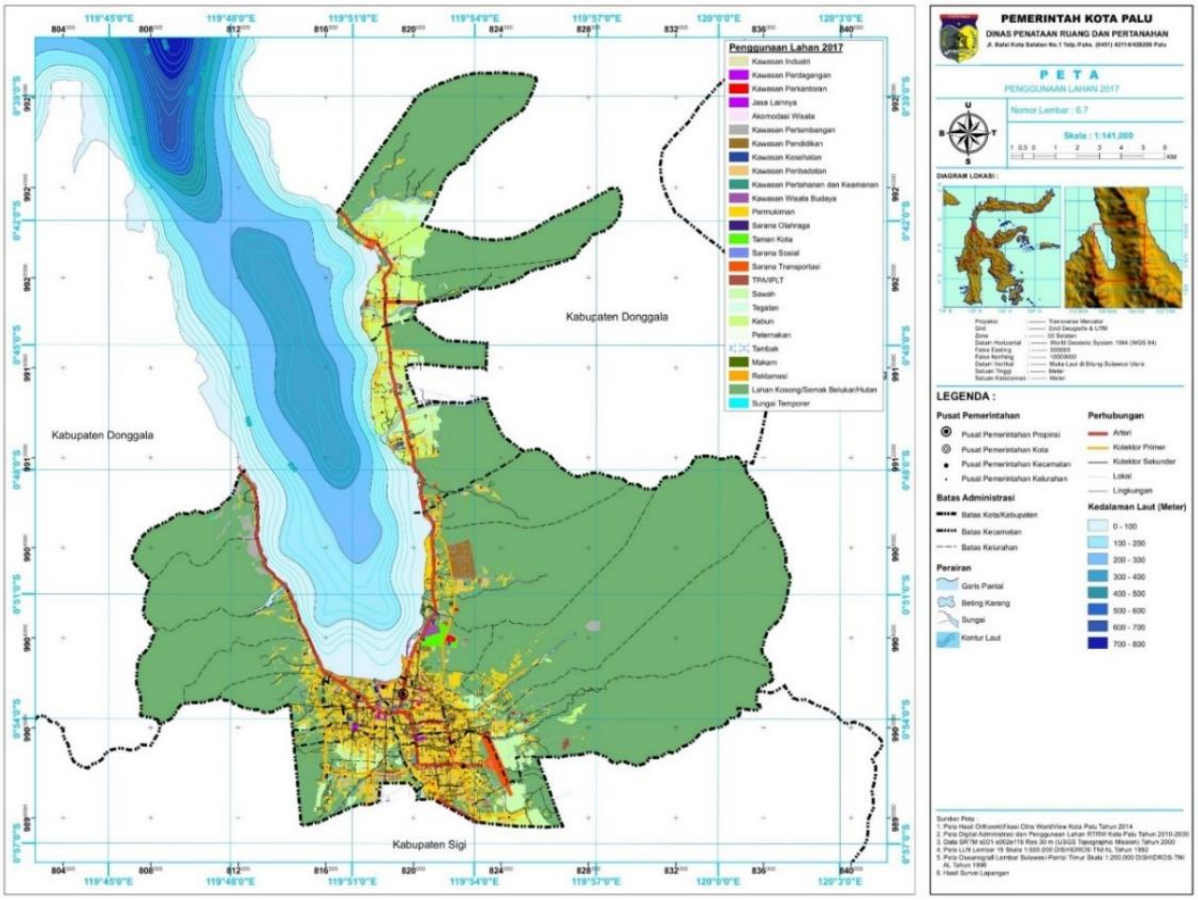
Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

F. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia dalam kaitannya dengan lahan, misalnya permukiman, perkotaan dan persawahan. Penggunaan lahan pada suatu wilayah dapat dilihat dalam Pola Ruang wilayah kota yang meliputi Kawasan Lindung, Kawasan Budi Daya, Kawasan Perdagangan, dan Kawasan Perumahan termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau. Secara garis besar, penggunaan lahan kota terbagi menjadi lahan terbangun dan lahan tak terbangun. Lahan Terbangun terdiri dari permukiman, industri, perdagangan, jasa dan perkantoran. Sedangkan lahan tak terbangun terbagi menjadi lahan tak

terbangun yang digunakan untuk aktivitas kota (makam, rekreasi, transportasi, ruang terbuka) dan lahan tak terbangun non aktivitas kota (pertanian, perkebunan, area perairan, produksi dan penambangan sumber daya alam).

Guna lahan pada kawasan budi daya Kota Palu didominasi oleh kawasan permukiman seluas 3.975,01 ha atau sebesar 10,06%. Namun secara garis besar penggunaan lahan di Kota Palu didominasi berupa lahan kosong/semak belukar/hutan seluas 30.839,85 ha atau sebesar 78,06%.



Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

Gambar 2.3
Peta Penggunaan Lahan Kota Palu

Tabel 2.7

Penggunaan Lahan Kota Palu

No.	Penggunaan Lahan	Kecamatan (Ha)								Jumlah (Ha)	Persentase (%)
		Mantikulore	Palu Barat	Palu Selatan	Palu Timur	Palu Utara	Tatanga	Ulujadi	Tawaeli		
1	Akomodasi Wisata	2,31	2,56	2,26	7,53	1,72	0,99	4,67		22,04	0,06
2	Permukiman	969,80	397,38	883,85	354,94	274,13	491,67	368,55	234,69	3.975,01	10,06
3	Kawasan Bersejarah		1,82		0,81					2,63	0,01
4	Kawasan Industri	18,93	1,04	4,39	1,31	67,05	1,64	12,69	66,77	173,82	0,44
5	Kawasan Kesehatan	6,93	4,80	1,58	3,11	6,19	0,59	1,63	0,76	25,59	0,06
6	Kawasan Pantai Berhutan Bakau				0,94					0,94	0,00
7	Kawasan Pariwisata					9,60				9,60	0,02
8	Kawasan Pendidikan	226,25	28,47	15,38	29,01	11,41	10,46	5,91	4,12	331,01	0,84
9	Kawasan Perdagangan	78,49	93,27	90,81	102,60	12,15	34,58	5,00	22,00	438,90	1,11
10	Kawasan Peribadatan	7,40	8,75	7,06	4,57	0,76	3,44	1,76	1,34	35,08	0,09
11	Kawasan Perkantoran	50,56	11,65	24,37	55,59	3,78	0,34	1,38	6,08	153,75	0,39
12	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	4,89	0,21	15,23	21,13	4,82	1,11		0,28	47,67	0,12
13	Kawasan Pertambangan	25,82		0,85		24,91	13,51	183,39		248,48	0,63
14	Kebun	43,22		59,16		458,57			784,46	1.345,41	3,40
15	Lahan Kosong/ Semak Belukar/ Hutan	17264	146,18	522,50	6,18	1788,75	766,75	5728,21	4617,28	30.839,85	78,06
16	Lapangan Golf	32,82								32,82	0,08
17	Makam	11,81	3,33	2,38	1,35	1,43	0,62	0,88	0,89	22,69	0,06
18	Pasir Pantai	2,34			2,19	3,52			1,80	9,85	0,02
19	Pelabuhan Kecil								0,11	0,11	0,00
20	Penggaraman Talise	18,63				1,29			0,68	20,60	0,05
21	Pergudangan	16,51				4,64				21,15	0,05
22	Hutan Mangrove					0,32			2,40	2,72	0,01
23	Peternakan			8,22			1,87	0,31		10,40	0,03
24	Reklamasi	6,21	1,82					3,62		11,65	0,03
25	Ruang Kegiatan Sektor Informal	10,76	5,84	0,31	0,33			1,21		18,45	0,05
26	Ruang Terbuka Hijau	82,16	1,25	0,01	8,41		0,15		0,89	92,87	0,24
27	Sarana Olahraga	11,44	2,03	1,92	1,84	5,13	4,26	1,18	5,45	33,25	0,08
28	Sarana Sosial	0,64	3,97	5,81	0,59	0,19			0,17	11,37	0,03
29	Sarana Transportasi	39,77	0,60	101,21		4,48		0,27	35,96	182,29	0,46
30	Sawah	232,58	2,86	183,91		274,45	172,24	9,66	102,53	978,23	2,48
31	Sungai Temporer	67,17	9,71	24,34	11,94	52,14	13,02	15,73	90,87	284,92	0,72
32	Tegalan	1,13							106,37	107,50	0,27
33	TPA/IPLT	14,63								14,63	0,04
34	Jasa Lainnya		0,55		0,13		0,04			0,72	0,00
Jumlah		**19.247,20**	**728,09**	**1.955,55**	**614,50**	**3.011,43**	**1.517,28**	**6.346,05**	**6.085,90**	**39.506,00**	**100,00**

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Palu Tahun 2021-2041

2.1.2 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis pada skala nasional dan skala regional dalam mendukung pengembangan wilayah di Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menetapan Kawasan Strategis Nasional yang lokasinya salah satu di Kota Palu yaitu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Palapas meliputi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kabupaten Sigi.

Peran strategis Kota Palu dalam sistem regional tercermin berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 menetapkan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang terdapat di Kota Palu terdiri atas:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan sekitarnya Kecamatan Tawaeli di Kota Palu.
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pengembangan perkotaan, yaitu BALUMBAPOLIPA yang menghubungkan Banawa, Palu, Mamboro, Bora, Pantoloan, Toboli, dan Parigi.
3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi sosial budaya yaitu Kawasan Istana Raja Palu di Kota Palu.

Kota Palu memiliki kawasan strategis yang berpotensi untuk dikembangkan. Berdasarkan strategis kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ATR Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, dapat disimpulkan bahwa kawasan strategis di Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berupa kawasan *New Town* Tondo-Talise, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

    a. Rencana Lokasi Hunian Tetap (Huntap) di Kelurahan Tondo dan Talise dengan jumlah rumah >4000 unit sebagai lokasi relokasi korban bencana di Kota Palu.
    b. Sebagaimana rencana poin 1, telah didukung rencana struktur ruang yaitu Kelurahan Tondo dan Talise direncanakan sebagai Pusat Pelayanan Kota (PPK) II dengan Fungsi Utama sebagai Central Business District skala Kota hingga Regional dan Civic Center Skala Kota.
    c. Berdasarkan hasil analisis kecenderungan arah perkembangan Kota Palu, Kecamatan Mantikulore terutama Kelurahan Tondo tertinggi kedua setelah Kecamatan Tawaeli (lokasi Kawasan Ekonomi Khusus), yang dipengaruhi oleh keberadaan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Tadulako (Negeri), Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Nusantara Palu, ketersediaan lahan kosong yang sesuai untuk permukiman paling luas,dilewati Jalan Lingkar Luar, Jalan Arteri Perimer (Jl. Trans Sulawesi), dan Jalan Kolektor Perimer K2.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan daya dukung lingkungan hidup berupa Kawasan yang memiliki Pusat Kegiatan Pada Kawasan Rawan Bencana Dan Mempunyai Resiko Bencana Alam di Kecamatan Palu Barat, Kecamatan Tatanga,Kecamatan Palu Timur, dan Kecamatan Palu Selatan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

    a. Dimensi Kota Palu berupa Teluk dan Lembah, dimana pola sebaran permukiman eksisting terjadi pemusatan pada

bagian tengah, dengan tingkat kepadatan tinggi kemudian menyebar ke kesisi barat dan kesisi timur dengan kepadatan rendah.

b. Rencana Struktur Ruang Pusat pada bagian tengah Kota Palu diarahkan Pusat Pelayanan Kota (PPK) di Kecamatan Palu Timur dan Palu Barat, Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) di Palu Barat dan Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) di Palu Timur dan Palu Selatan, serta beberapa pusat pelayanan lingkungan lainnya.
c. Peta Zona Rawan Bencana menunjukkan bahwa pada bagian tengah Kota Palu yang menjadi pemusatanpermukiman eksisting, dan rencana PPK maupun SPPK, telah dilewati sesar aktifPalu Koro dan rawan likuifaksi dengan tingkat kerawanan 3 sampai 4. Lebih jelasnya lihat dapat dilihat pada Gambar 2.4.

2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Secara Geomorfologi, Kota Palu terletak di lembah dan teluk Palu yang merupakan wilayah yang didominasi oleh dataran rendah yang dibelah oleh Sungai Palu di bagian tengah dan pesisir sepanjang garis pantai, perbukitan yang membentang di sebalah timur dan barat Kota Palu. Kondisi ini menjadikan Kota Palu memiliki multi ancaman bencana (*Multi Hazard*) baik ancaman bencana geologi maupun ancaman bencana hidro metereologi antara lain: banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran, kekeringan, longsor, ataupun Gerakan tanah dan cuaca ekstrem.

A. Sejarah Kebencanaan Kota Palu

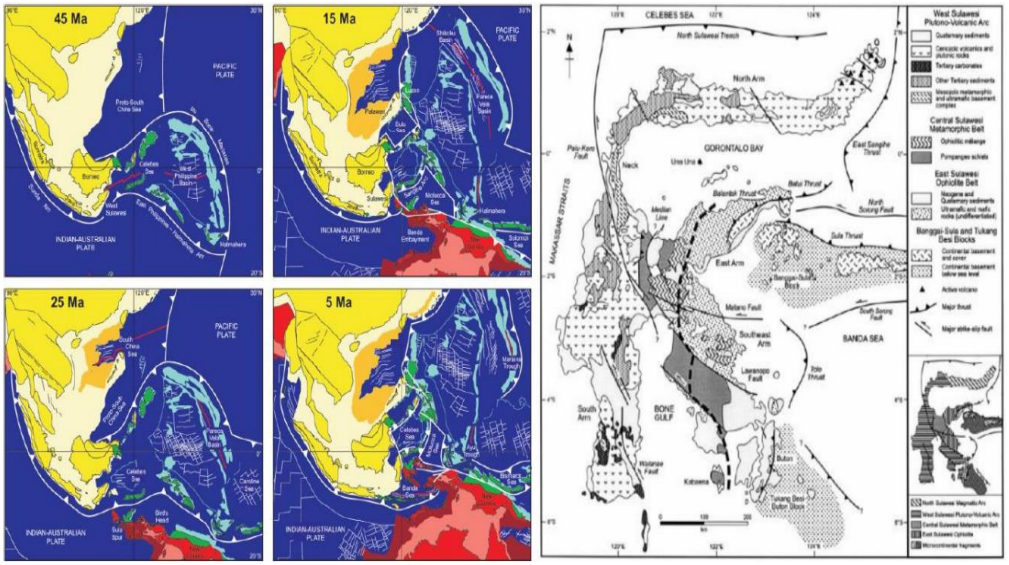
Nilai Indeks Risiko Bencana (BNPB; 2022) di Kota Palu dari Tahun 2015 hingga 2021 secara berurutan adalah sebesar 181,2; 181,2; 162,7; 162,7; 162,7; 162,7; dan 168,25 (tinggi) dengan catatan terdiri dari beberapa jenis ancaman bencana.

- **Tatanan Geotektonik Kota Palu**

Karakteristik geologi dan tektonik Pulau Sulawesi mempunyai bentuk seperti huruf "K" yang ujung kiri bagian atas memanjang dan terputar searah jarum jam sehingga memiliki arah gerak barat - timur. Bagian itu dinamai Lengan Utara, sedangkan di bawahnya memanjang dengan arah barat laut-tenggara diberi nama Lengan Timur. Kaki bagian kirinya disebut Lengan Selatan dan kaki kanan dinamai Lengan Tenggara. Daerah pertemuan keempat lengan itu dikenal sebagai bagian Tengah Sulawesi, sedangkan bagian yang melengkung, menghubungkan bagian Tengah Sulawesi dengan Lengan Utara disebut Leher Sulawesi yang letaknya di Kabupaten Donggala dan Parigi Moutong.

Berdasarkan sejarah tektonik regional, tektonik Pulau Sulawesi dan daerah sekitarnya dapat dibagi menjadi lima proses pergerakan tektonik, yaitu: tektonik ekstensional Mesozoikum, tunjaman Kapur, tunjaman Paleogen, tumbukan Neogen, dan tunjaman Ganda Kuarter. Tektonik ekstensional Mesozoikum merupakan peristiwa di mana kepingan benua yang sekarang berada di Bagian Timur Sulawesi, berpisah dari tepi utara benua Australia. Selama perjalanan ke utara, kepingan benua itu pecah menjadi beberapa kepingan yang lebih kecil. Pada Kapur, tunjaman mengalami proses miring ke barat di proto Sulawesi. Tunjaman Paleogen berhubungan dengan pergerakan kepingan benua ke arah barat-barat laut, bertubrukan dengan tunjaman di bagian timur Sulawesi dan zona akrasi Kapur Awal Benua Eurasia. Batuan gunungapi Paleogen di Lengan Selatan Sulawesi ditafsirkan

sebagai hasil subduksi kepingan benua dari Australia dengan tepi timur Kraton Sunda. Tumbukan Neogen merupakan peristiwa pengalihtempatan / dislokasi beberapa kepingan benua ke arah barat-barat laut sehingga menabrak struktur kompleks ofiolit di Bagian Timur Sulawesi. Tumbukan Paleogen ini sangat penting dalam pembentukan Pulau Sulawesi dan daerah sekitarnya. Tunjaman Kuarter terjadi di utara dan tunjaman ganda terjadi di Timur Laut Sulawesi. Di utara, Lengan Utara Sulawesi, kerak samudra Laut Sulawesi menunjam di bawah Lengan Utara Sulawesi pada Palogene akhir. Penunjaman ini menghasilkan gunungapi aktif di Lengan Utara Sulawesi. Tunjaman ganda di timur laut Sulawesi menghasilkan gunungapi aktif di ujung timur Lengan Utara Sulawesi, aktivitas subduksi yang terjadi pada antarlempeng ini berakhir pada masa Neogene yang ditandai dengan adanya zona tumbukan Eastern Sulawesi Ophiolite Belt dengan Banggai-Sula Platform di sepanjang Batui Thrust di bagian selatan (Angga Jati Widiatama; 2017 dan PusGEN; 2017).



Sumber: Struktur Geologi Sulawesi karya Armstrong F. Sompotan (2012)

Gambar 2.4
Perkembangan tektonik Sulawesi menurut Hall dan Smyth (2008) dan Peta Geologi Sulawesi menurut Hall dan Wilson (2000)

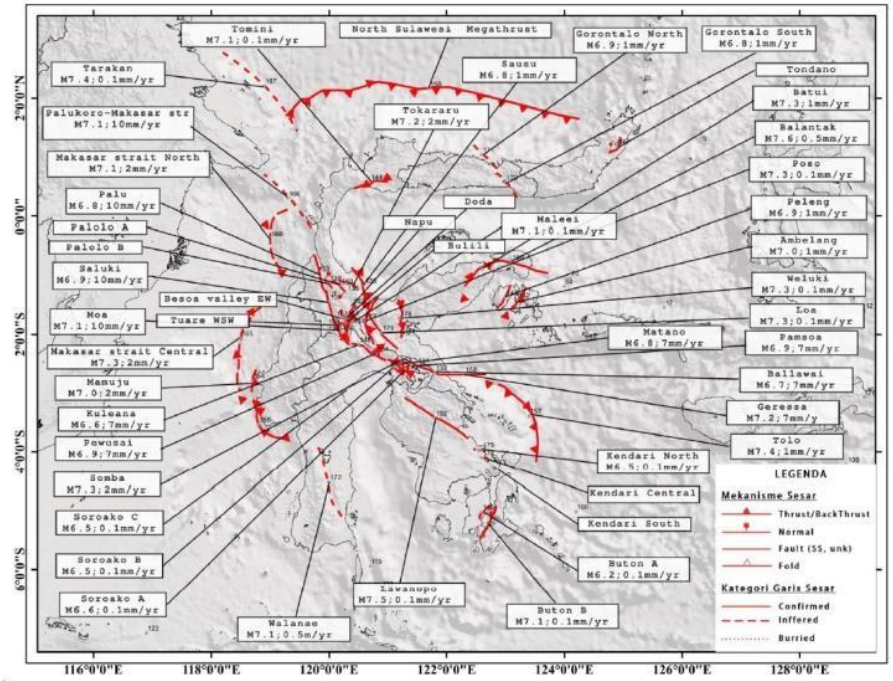
Menurut Armstrong F. Sompotan dalam bukunya Struktur Geologi Sulawesi (2012), berdasarkan struktur litotektonik maka Pulau Sulawesi dapat dibagi menjadi 4 (empat) mandala, yaitu Mandala Barat yang merupakan bagian Barat dan Utara Pulau Sulawesi yang merupakan daerah Busur Gunung Api Plutonik dengan jalur magmatik bagian ujung Paparan Sunda. Mandala Tengah yang merupakan Sabuk Metamorfik Sulawesi Bagian Tengah, tersusun dari batuan malihan yang ditumpangi batuan bancuh dari blok Australia, Mandala Timur yang dikenal sebagai Sabuk Ophiolite Sulawesi Bagian Timur tersusun dari ofiolit segmen kerak samudera yang berimbrikasi dan batuan sedimen berumur Trias-Miosen dan terakhir Fragmen Benua Banggai – Sula – Tukang Besi, di bagian Timur dan Tenggara Pulau Sulawesi yang merupakan pecahan struktur benua yang berpindah ke barat karena faktor gerak patahan strike – slip dari Pulau Papua (New Guinea).

Secara khusus untuk bagian Mandala Barat yang memanjang dari lengan bagian Utara hingga Selatan Pulau Sulawesi, terdiri dari batuan gunung api plutonik berusia Paleogen – Kuarter dengan batuan Mesozoikum – Tersier dan batuan metamorf. Secara garis besar, mandala ini terbagi atas bagian utara dari Kabupaten Buol hingga Provinsi Manado yang bersifat riodasitik sampai Andesit pada Miosen– Resen dengan batuan dasar Basaltik yang terbentuk pada Eosen – Oligosen dan bagian barat dari Kabupaten Buol hingga Kota Makassar dengan sifat kontinen yang tersusun dari batuan gunung api – sedimen berumur Mesozoikum – Kuarter dan batuan malihan Kapur, dimana batuannya diterobos oleh batuan granit (granitoid), utamanya granodiorit sampai granit yang berupa batolit, stok dan retas.

Kota Palu tersusun dari endapan sedimen kuarter dalam lingkungan pengendapan kipas alluvium, endapan sungai, pantai dan laut dangkal, serta memiliki lapisan Molasa Celebes yang tersusun atas konglomerat, batupasir, batulumpur, batuggamping koral dan napal. Ketebalan batuan dasar yang paling dangkal berada di kisaran 200 meter dari permukaan, ini berarti lapisan sedimen di lembah Palu atau tepatnya di pusat kota berkisar antara 200 – 300 meter dan masuk dalam kategori tebal.

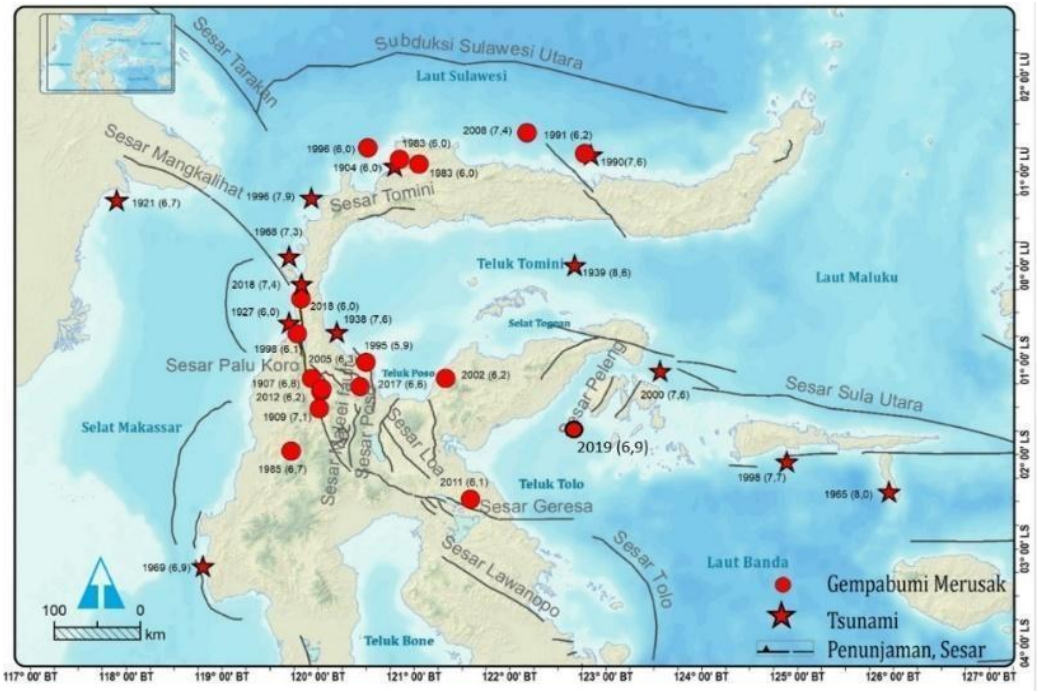
- **Sejarah Gempabumi dan Tsunami di Kota Palu**

Dengan adanya proses tektonik yang rumit, maka menurut Buku Peta Bahaya Gempa Bumi di Indonesia (PusGEN; 2017) setidaknya terdapat sekitar 48 patahan aktif pemicu gempa bumi di Sulawesi. Zona subduksi Utara Sulawesi perlu diwaspadai, sebab gempa besar diperkirakan dapat terjadi dengan kekuatan Mw 8,5 yang dapat memicu potensi tsunami di sepanjang pesisir bagian Utara Sulawesi.



Sumber: Wilayah Sulawesi (PUSGEN; 2017)

Gambar 2.5
Peta Sumber Gempa Indonesia Tahun 2017



Sumber: (Stageof Palu; 2019)

Gambar 2.6
Peta Gempabumi Merusak dan Tsunami di Sulawesi
Tahun 1904-2019

Berdasarkan sejarah kegempaan dan kejadian tsunami maka Kabupaten Toli-Toli pernah dilanda gempabumi merusak pada tahun 1983 (Mw6,0) dengan dua kejadian dan 1996 (Mw6,0), serta tsunami pada tahun 1904 (Mw6,0) di Kota Tolitoli dan 1996 (Mw7,9) di daerah Tonggolobibi – Kabupaten Donggala dan berdampak hingga di Soni – Kabupaten Toli-Toli. Sedangkan untuk tingkat guncangan gempabumi, diperkirakan dapat mencapai intensitas maksimum yang bervariatif, berkisar antara 0,6 – 1,0 g atau setara VI-VIII MMI, bergantung pada tapak lokal pada setiap daerahnya. Kabupaten Tojo Una-Una pernah dilanda gempabumi merusak pada tahun 2021 (Mw6,3) dengan tingkat guncangan di wilayah Ampana mencapai hingga VI MMI. Variatif intensitas tingkat guncangan gempa maksimum kabupaten ini, termasuk wilayah Kepulauan Wakai dan Togean diprakirakan berkisar antara 0,3 – 0,5 g atau setara VI-VIII MMI, bergantung pada tapak lokal pada

setiap daerahnya. Sedangkan untuk Kabupaten Banggai, pernah dilanda tsunami pada tahun 2000 dengan Mw7,6 dengan intensitas tingkat guncangan gempa maksimum kabupaten ini dapat mencapai 0,6 – 0,7 g atau setara VI-IX MMI. Catatan menarik terkait peluang keterpaparan tsunami di wilayah lengan timur Sulawesi bagian utara yakni dari Taopa – Pantai Timur, Parigi Moutong hingga Longkonga, Banggai yang berasal dari gempa yang terjadi di sekitaran Teluk Tomini. Sejarah gempa Mw7,6 (1938) di Pantai Timur dan Mw8,6 (1939) di Teluk Tomini (bagian selatan Gorontalo) serta kejadian gunung api Colo meletus di tahun 1983 dapat berdampak pada kejadian tsunami, namun tidak ada catatan resmi kejadian tsunami tersebut seberapa parah dampaknya dan di wilayah mana saja yang terdampak.

Untuk Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala pernah terdampak gempa merusak M6,8 (1907), M7,1 (1909), M6,1 (1998), M6,3 (2005) dan M6,2 (2012) serta gempa merusak diikuti kejadian tsunami yaitu M6,0 (1927), Tambu Mw7,3 (1968), Tonggolobibi Mw7,9 (1996) di daerah Tanah Runtuh dan Tonggolobibi dengan gelombang tsunami setinggi 4 meter (m) dan terakhir, Mw7,4 (2018) yang gelombang tsunaminya mencapai 9 meter di Teluk Palu dengan kisaran intensitas tingkat guncangan gempanya mencapai kisaran VI-IX MMI di Kota Palu, Sigi dan Donggala. Adapun berdasarkan hasil penelitian PusGEN (2017), tingkat guncangan di kota Palu dapat mencapai 0,8-0,9 g atau dengan intensitas IX-X MMI dan menurut hasil survei mikrozonasi peta indeks kerentanan gempabumi di Kota Palu yang dilaksanakan oleh Stageof Palu sebelum tanggal 28 September 2018 (BPBD Palu; 2018) mencapai nilai sebesar 0,5 g atau sebesar VII-IX MMI.

Tabel 2.8
Data kejadian gempabumi Mw > 5,7 di Palu dan sekitarnya
Tahun 1907-2018

No	Waktu	Lintang	Bujur	Kedalaman (km)	Mw	Lokasi	Keterangan
1	30/7/1907- WITA	-1.330	120.030	33	6.8	2 km arah barat Tomado (Kab. Sigi)	Sigi VI-VII MMI, **Palu V-VI MMI**
2	18/3/1909-6:53:10WITA	-1.510	120.010	33	7.1	8 km arah selatan Kulawi (Kab. Sigi)	Kulawi VII MMI, **Palu V-VI MMI**
3	1/12/1927-12:37:27WITA	-0.608	119.751	33	6.0	5 km arah barat Toaya - Donggala	**Palu VII MMI**, **Tsunami di Teluk Palu**
4	20/5/1938-1:8:21WITA	-0.700	120.300	13	7.6	19 km arah timurlaut Parigi - Parigi Moutong	Parigi VIII MMI, **Palu VI MMI**, **Tsunami di Pantai Timur – Parigi Moutong**
5	15/8/1968-6:14:20WITA	0.570	119.802	22	7.3	22 km arah baratlaut Tonggolobibi -Donggala	Donggala VII MMI, **Palu IV-V MMI**, **Tsunami di Tambu dan terjadi Tanah**
6	21/5/1998-13:34:26WITA	0.200	119.580	28	6.2	di laut, 31 Km arah Barat Sabang - Donggala	Donggala IV-V MMI, **Palu IV-V MMI**, Poso dan Toli-Toli III-IV MMI
7	10/10/1998-24:32:19WITA	0.000	119.000	33	6.1	di laut, 77 km arah barat Malei (Kab. Donggala)	Donggala dan **Palu III-IV MMI**
8	24/1/2005-4:10:12WITA	-1.190	119.930	11	6.3	di laut, 3 Km arah TimurLaut Bulubete - Sigi	**Palu V MMI**, Parigi III MMI
9	18/8/2012-17:41:51WITA	-1.302	120.037	10	6.2	darat, 45 km arah selatan Parigi - Parigi Moutong	Lindu VI-VII MMI, Kulawi VI MMI, **Palu IV-V MMI**, Parigi IV MMI
10	29/5/2017-22:35:22WITA	-1.330	120.410	10	6.6	di darat, 14 Km arah TimurLaut Wuasa - Poso	Torue dan Poso V MMI; **Palu dan Sigi III-IV MMI**; Toli-Toli, Pasang Kayu dan Tana Toraja III MMI; Palapo, Masamba, Balikpapan, Gorontalo, Bone Bolango dan Soroako II-III MMI
11	28/9/2018-14:59:56WITA	-0.350	119.820	10	6.0	di laut, 11 Km arah BaratLaut Alindau - Donggala	Donggala IV MMI, **Palu III MMI**, Poso II-III MMI
12	28/9/2018-18:2:43WITA	-0.190	119.830	10	7.4	di darat, 3 Km arah TimurLaut Tompe - Donggala	Donggala dan **Palu VIII-IX MMI**, Sigi VII-VIII MMI, Parigi, V-VII MMI, Poso V MMI, Morowali, Kendari, Kolaka, Toraja, Palopo, Makassar II-III MMI, **Tsunami di Teluk Palu, Likuifaksi dan Tanah Longsor di Serenja, Kulawi dan Kebun**

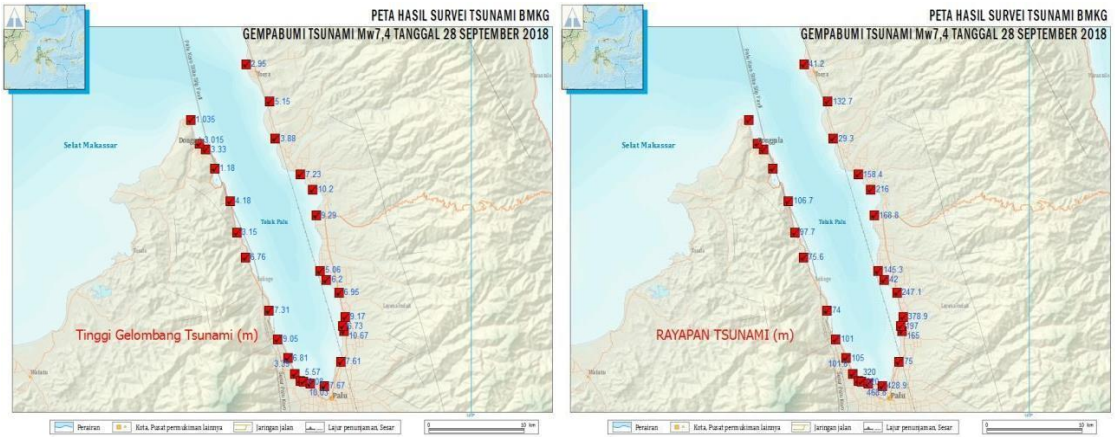
Sumber: Stasiun Geofisika Palu; 2022

- **Sejarah Tanah Longsor dan Likuifaksi Tsunami di Kota Palu**

Sejarah kejadian tanah longsor dan likuifaksi yang diakibatkan oleh faktor goncangan gempa bumi pernah terjadi pada gempa bumi 1968 di wilayah Pantai Barat – Donggala. Terdapat suatu kawasan yang dikenal sebagai Tanah Runtuh sebab waktu guncangan gempa terjadi, Kawasan tersebut bergerak turun dan pada Kawasan pesisir pantai terdapat bukti tanahnya mengalami longsoran sehingga memicu tsunami. Untuk gempa Mw7,4 tahun 2018, terdapat likuifaksi massif di kawasan Balaroa dan Petobo Kota Palu serta Kawasan Sibalaya dan Jono Oge Kabupaten Sigi. Likuifaksi skala kecil terjadi di beberapa lokasi baik di Palu maupun di Sigi, bahkan banyak jalur air bawah permukaan yang tiba-tiba muncul. Untuk kasus tanah longsor, terjadi di Sirenja, Kebun Kopi dan Kulawi serta kurang lebih beberapa lokasi kejadian longsor di sepanjang pesisir Teluk Palu yang memicu kejadian tsunami di Teluk Palu. Berdasarkan hasil survei tsunami BMKG, terdapat kasus tinggi tsunami mencapai 10 meter di Kawasan Tondo dan inundasi/rayapan tsunami maksimum terjadi sejauh 460 meter di daerah Silae.

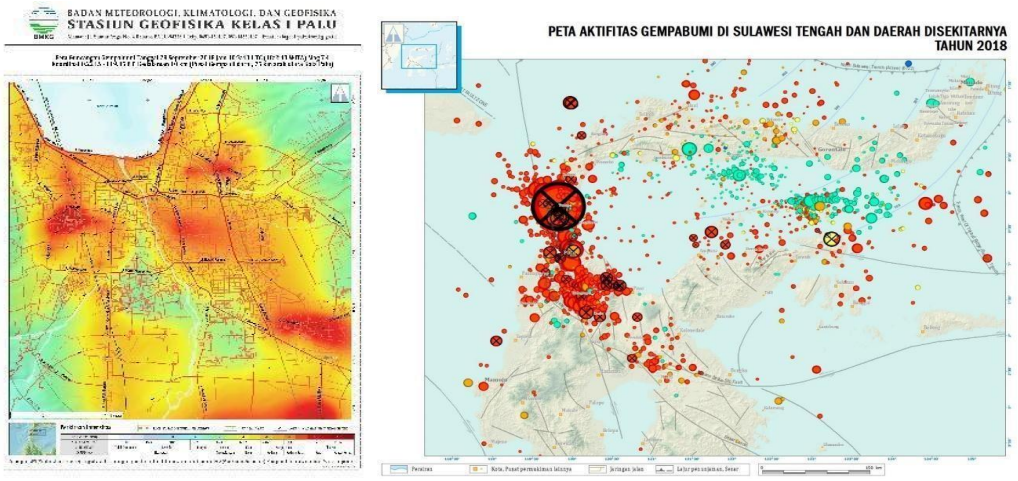
Hasil survei mikroseismik gempa bumi merusak Mw7,4 yang dilaksanakan oleh BMKG menemukan tingkat guncangan gempa di Palu sangat bervariasi dengan intensitas VI-IX MMI. Gempa Mw7,4 ini didahului oleh gempa pendahuluan sebanyak 26 gempa dengan magnitudo terbesar Mw6,0 pada pukul 14:59:56 WITA dan ternyata seminggu sebelumnya terdapat dua gempa berskala M4,8 yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 September 2018. Gempa ini dikategorikan tipe Mogi 1, yaitu gempa utama yang didahului oleh gempa pendahuluan/rintisan dan diikuti serangkaian gempa susulan. Lama energi yang terlepas hingga menuju ke keadaan normal berkisar 35 hari sejak gempa utama terjadi. Gempa ini

dikenal sebagai Gempabumi Merusak Sulawesi Tengah Mw7,4 Tanggal 28 September 2018 dan masuk dalam kategori bencana level Provinsi. Dampak kerugian yang ditimbulkan menurut BNPB (2019) ialah korban jiwa termasuk yang hilang sebanyak 4.340 jiwa, 175.000-an orang mengungsi, dan 68.451 rumah rusak dengan prakiraan total kerugian mencapai Rp. 2,9 Triliun dan dampak kerusakan mencapai Rp. 15,6 T.



Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Gambar 2.7
Peta-Peta hasil pengukuran tsunami (BMKG; 2018)



Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Gambar 2.8
Peta Hasil Survei Makroseismik Tingkat Kerusakan Gempa Mw7,4 tanggal 28 September 2018 di Kota Palu (kiri, Stageof Palu; 2018) dan Peta Sebaran Gempa Bumi di Sulawesi Tengah dan sekitarnya Tahun 2018 (kanan, Stageof Palu; 2019)

B. Risiko Bencana Kota Palu

- **Risiko Bencana Gempabumi Kota Palu**

Hasil analisis risiko bencana gempabumi di Kota Palu dijelaskan berdasarkan analisis faktor yang saling mempengaruhi, dapat dilihat wilayah yang memiliki kecenderungan ancaman tinggi terhadap gempabumi terutama di wilayah zona-zona patahan sepanjang jalur Patahan Palu-Koro lebih cenderung memiliki risiko tinggi seperti di Palu Selatan, Palu Tengah dan Palu Utara, Mantikulore dan Ulujadi yang lebih memiliki kecenderungan ancaman tinggi dan risiko bencana terhadap gempabumi juga tinggi. Wilayah yang memiliki risiko sedang – rendah berada di wilayah yang secara geologi jauh dari zona patahan-patahan Utama. Rata-rata wilayah yang memiliki risiko tinggi – sedang berada di wilayah jalur patahan, memiliki morfologi sedang – curam, karena wilayah-wilayah ini adalah bagian dari proses struktural yang bekerja. Dari hasil analisis kajian risiko bencana gempabumi di Kota Palu secara keseluruhan memiliki potensi ancaman bencana gempabumi. Secara keseluruhan Kota Palu terpapar dengan ancaman bencana gempabumi, dari hasil analisis Tim KRB Kota Palu 2022 85% wilayah Kota memiliki potensi risiko bencana gempabumi terhadap bencana gempabumi, secara luasan wilayah 50.459.991 M2 atau 5.046 hektar berada di wilayah yang berisiko tinggi, 123.814.976 M2 atau 12.381 hektar berada di zona risiko sedang dan 182.087.160 M2 atau 18.208,7 hektar berada di zona risiko rendah.

Tabel 2.9
Luasan wilayah yang memiliki risiko bencana gempabumi di Kota Palu

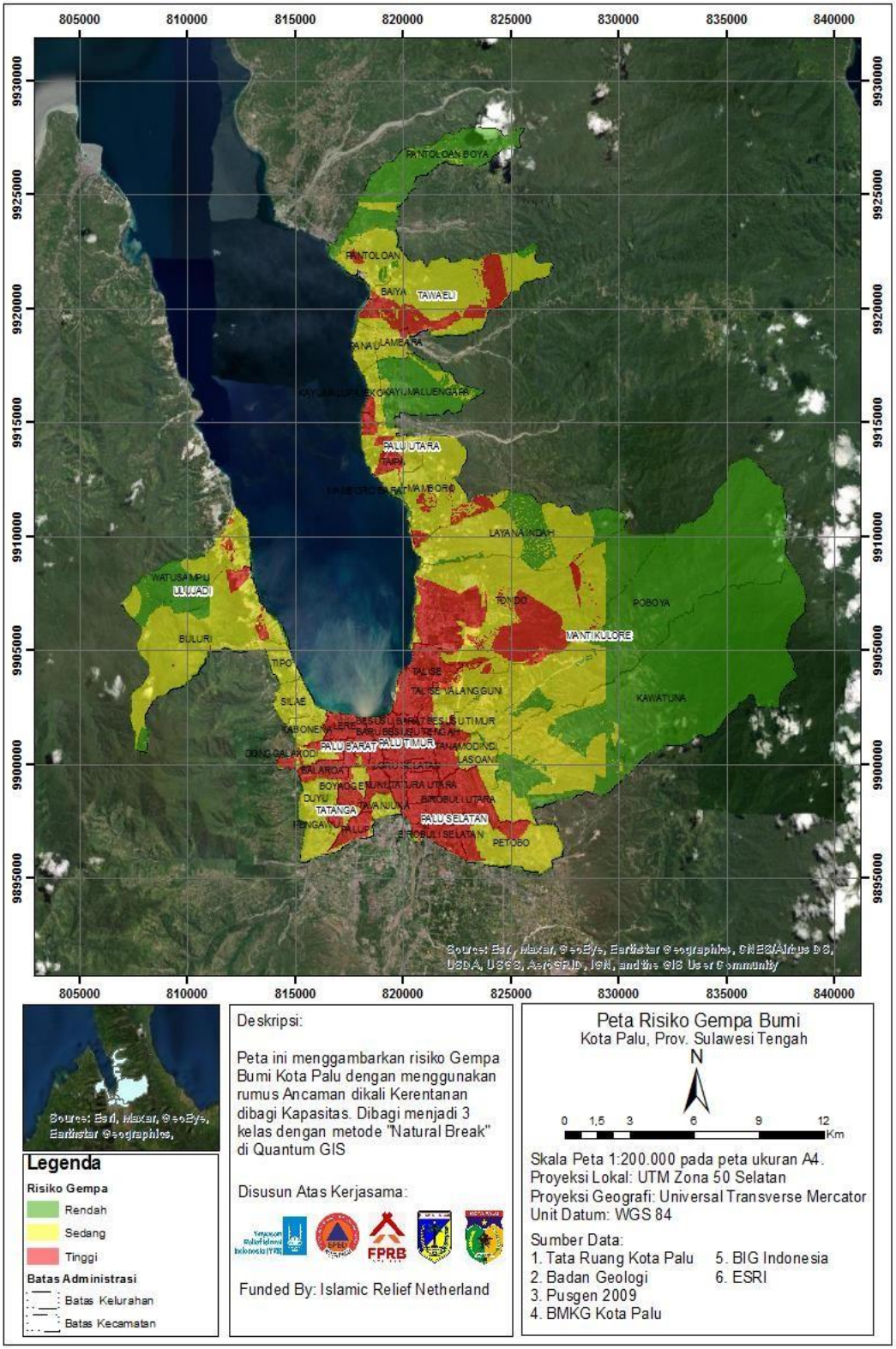
KECAMATAN	LUAS WILAYAH RISIKO GEMPA BUMI RENDAH (M^2)	LUAS WILAYAH RISIKO GEMPA BUMI RENDAH (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO GEMPA BUMI SEDANG (M^2)	LUAS WILAYAH RISIKO GEMPA BUMI SEDANG (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO GEMPA BUMI TINGGI (M^2)	LUAS WILAYAH RISIKO GEMPA BUMI TINGGI (Ha)
Montikulore	134.737.195	13.473,7	43.349.323	4.335	18.813.000	1.881
Palu Barat	27.154	2,7	97.374	10	6.022.802	602
Palu Timur	4.245	0,4	46.736	5	6.223.065	622
Palu Selatan	2.396.601	239,7	4.895.620	490	13.211.745	1.321
Palu Utara	10.390.220	1.039,0	16.537.896	1.654	1.511.403	151
Tatangga	546.798	54,7	10.681.706	1.068	1.476.437	148
Tawaeli	18.587.568	1.858,8	22.579.296	2.258	2.598.289	260
Ulujadi	15.397.379	1.539,7	25.627.025	2.563	603.250	60
TOTAL	**182.087.160**	**18.208,7**	**123.814.976**	**12.381**	**50.459.991**	**5.046**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Tabel 2.10
Nilai Indeks Risiko Bencana Gempabumi Kota Palu

TOTAL INDEKS RISIKO BENCANA GEMPABUMI	TINGKAT RISIKO
0 – 43	RENDAH
44 – 69	SEDANG
70 – 120	TINGGI

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027



Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Gambar 2.9
Peta Risiko Bencana Gempabumi Kota Palu

1. Valuasi Risiko Penduduk dan Bangunan Bencana Gempabumi Kota Palu

Valuasi risiko bencana gempabumi adalah potensi nilai risiko yang dapat ditimbulkan terhadap aset-aset penghidupan yang memiliki keterpaparan. Dalam kajian risiko bencana gempabumi aset yang memiliki keterpaparan tinggi terhadap ancaman bencana gempabumi terutama gempabumi di atas 6 – 7 SR yang berpotensi terjadi adalah jumlah manusia yang hidup dan tinggal dan memeliki penghidupan di seputar daerah rawan bencana dan jumlah bangunan yang terpapar terhadap zona-zona ancaman gempabumi yang berada di sepanjang jalur-jalur gempa dan patahan terutama yang berada di Zona Patahan Palu-Koro di sepanjang lembah Palu, Kota Palu.

Penduduk yang terpapar terhadap ancaman bencana sebagian hidup di jalur zona patahan, terutama yang berada di daerah berisiko tinggi dan risiko sedang terhadap ancaman bencana gempabumi. Secara keseluruhan berdasarkan data Kecamatan Dalam Angka, 2020 Kota Palu memiliki total jumlah penduduk 390,270 jiwa terdiri dari 196,578 jiwa penduduk laki-laki dan 194,778 jiwa penduduk perempuan jiwa, yang tersebar di 8 kecamatan, berdasarkan hasil Kajian dari Tim Kajian Risiko Bencana Kota Palu 2020, Jumlah keterpaparan penduduk di zona yang memiliki risiko bencana gempabumi adalah 105.162 jiwa atau sekitar 27% dari total jumlah penduduk Kota Palu berada di zona risiko bencana gempabumi diantaranya 78.207 jiwa memiiliki tingkat risiko tinggi karena berada di zona risiko tinggi, 23.951 jiwa memiliki risiko sedang karena berada di zona risiko sedang, dan 3.004 jiwa memiliki risiko rendah, karena berada di zona risiko rendah, namun bukan berarti jika masyarakat berada di zona risiko rendah bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki risiko,

ini sangat tergantung dari Kerentanan dan kapasitas masyarakat di wilayah tersebut.

Nilai valuasi risiko pada penduduk terpapar dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak bencana dan nilai satuan per jiwa, namun secara pasti manusia tidak dapat dinilai secara tetap dalam bentuk rupiah, namun ketika kita melakukan investasi risiko pada jumlah penduduk terpapar pendekatan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah nilai jiwa terpapar bila terdampak bencana dengan menggunakan pendekatan nilai potensi loss per jiwa di kalikan dengan jumlah keterpaparan penduduk.

Tabel 2.11
Luas risiko dari sisi permukiman dan penduduk pada ancaman gempabumi di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS KETERPAPARAN PERMUKIMAN DI ZONA RISIKO BENCANA GEMPABUMI RENDAH	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA GEMPABUMI RENDAH	LUAS KETERPAPARAN PERMUKIMAN DI ZONA RISIKO BENCANA GEMPABUMI SEDANG	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA GEMPABUMI SEDANG	LUAS KETERPAPARAN PERMUKIMAN DI ZONA RISIKO BENCANA GEMPABUMI TINGGI	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA GEMPABUMI TINGI
Montikulore	3.050.745	1.019	4.788.607	1.599	6.774.333	2.262
Palu Barat	24	0	84.035	673	4.715.044	37.746
Palu Timur		-	31.533	111	5.999.427	21.141
Palu Selatan	105.182	158	801.287	1.201	9.210.325	13.806
Palu Utara	1.102.901	926	2.579.234	2.165	450.372	378
Tatangga	71.616	232	4.404.385	14.289	824.859	2.676
Tawaeli	379.598	185	2.896.487	1.412	65.630	32
Ulujadi	703.781	484	3.637.906	2.501	241.292	166
TOTAL	**5.413.847**	**3.004**	**19.223.474**	**23.951**	**28.281.282**	**78.207**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

2. Valuasi Risiko Bencana Gempabumi Terhadap Bangunan

Bangunan yang terpapar terhadap zona risiko bencana di Kota Palu adalah jumlah dan luasan bangunan yang berada di Kawasan yang memiliki risiko bencana gempabumi Kota Palu. Analis yang dilakukan menggunakan analisis spasial dengan membuat overlay antara zonasi kawaan risiko bencana gempabumi Kota Palu dengan data bangunan yang diambil dari open streatmap di semua kelurahan dan kecamatan yang sudah terpetakan. Nilai valuasi dapat dihitung berdasarkan jumlah luasan bangunan yang dihitung per meter persegi dari jumlah total luas bangunan yang ada di kelurahan. Total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko rendah 6.368 bangunan dengan luasan 461.751 M2 , total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko sedang 20.021 bangunan dengan luas 2.841.469, dan total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko tinggi 30.155 bangunan dengan luas 5.549.119 M2. Jika nominal bangunan dihitung @ IDR 3,000,000/meter$_2$ maka nilai valuasi risiko bangunan yang berada di zona risiko tinggi adalah 5.549.119 x Rp 3.000.000 = Rp 16.647.357.000.000 nilai ini adalah nilai simulasi yang dapat dihitung sebagai nilai risiko yang harus dikelola oleh masyarakat bagaimana semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan bila terjadi bencana.

Tabel 2.12
Jumlah bangunan dan luas bangunan yan memiliki risiko bencana gempabumi di Kota Palu.

KECAMATAN	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI RENDAH	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI SEDANG	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI TINGGI	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI RENDAH	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI SEDANG	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI TINGGI
Montikulore	2.781	5.040	6.299	289.025	659.897	1.074.925
Palu Barat		192	5.304		28.581	1.072.827
Palu Timur		86	7.057		12.902	1.487.923

KECAMATAN	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI RENDAH	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI SEDANG	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI TINGGI	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI RENDAH	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI SEDANG	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI TINGGI
Palu Selatan	319	1.160	9.293	38.407	169.824	1.608.946
Palu Utara	1.269	2.337	439	212.843	451.644	66.596
Tatangga	233	4.142	1.141	22.294	620.252	161.503
Tawaeli	760	2.698	183	94.370	380.676	13.603
Ulujadi	1.006	4.366	439	93.837	517.693	62.796
TOTAL	**6.368**	**20.021**	**30.155**	**461.751**	**2.841.469**	**5.549.119**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

- **Risiko Bencana Liquifaksi Kota Palu**

Hasil analisis risiko bencana liquifaksi di Kota Palu dijelaskan berdasarkan analisis faktor yang saling mempengaruhi, dapat dilihat wilayah yang memiliki kecenderungan ancaman tinggi terhadap gempabumi terutama di wilayah zona-zona patahan dan memiliki potensi liquifaksi. Ancaman bencana liquifaksi lebih cenderung memiliki risiko tinggi seperti di Palu Selatan, Palu Tengah dan Palu Utara, Mantikulore dan Ulujadi yang lebih memiliki kecenderungan adanya kejadian liquifaksi. Wilayah yang memiliki risiko sedang – rendah berada di wilayah yang secara geologi jauh dari zona patahan- patahan Utama dan zona yang tidak berada di wilayah permukiman dan tidak memiliki potensi liquifaksi. Rata-rata wilayah yang memiliki risiko tinggi – sedang berada di wilayah yang memiliki lapisan tanah atau batuan yang kecenderungan jenuh terhadap air, memiliki morfologi sedang – curam, karena wilayah-wilayah ini adalah bagian dari liquifaksi dapat terjadi. Dari hasil analisis kajian risiko bencana liquifaksi di Kota Palu secara keseluruhan memiliki potensi ancaman bencana liquifaksi. Secara keseluruhan Kota Palu terpapar dengan ancaman bencana liquifaksi, dari hasil analisis Tim KRB Kota Palu

2022, 20 % wilayah Kota memiliki potensi risiko bencana liquifaksi, dimana secara luasan wilayah 2.248.441 M2 atau 225 hektar berada di wilayah yang berisiko tinggi, 21.843.586 M2 atau 2.184 hektar berada di zona risiko sedang dan 35.745.999 M2 atau 3.575 hektar berada di zona risiko rendah.

Tabel 2.13
Luasan wilayah yang memiliki risiko bencana liquifaksi di Kota Palu

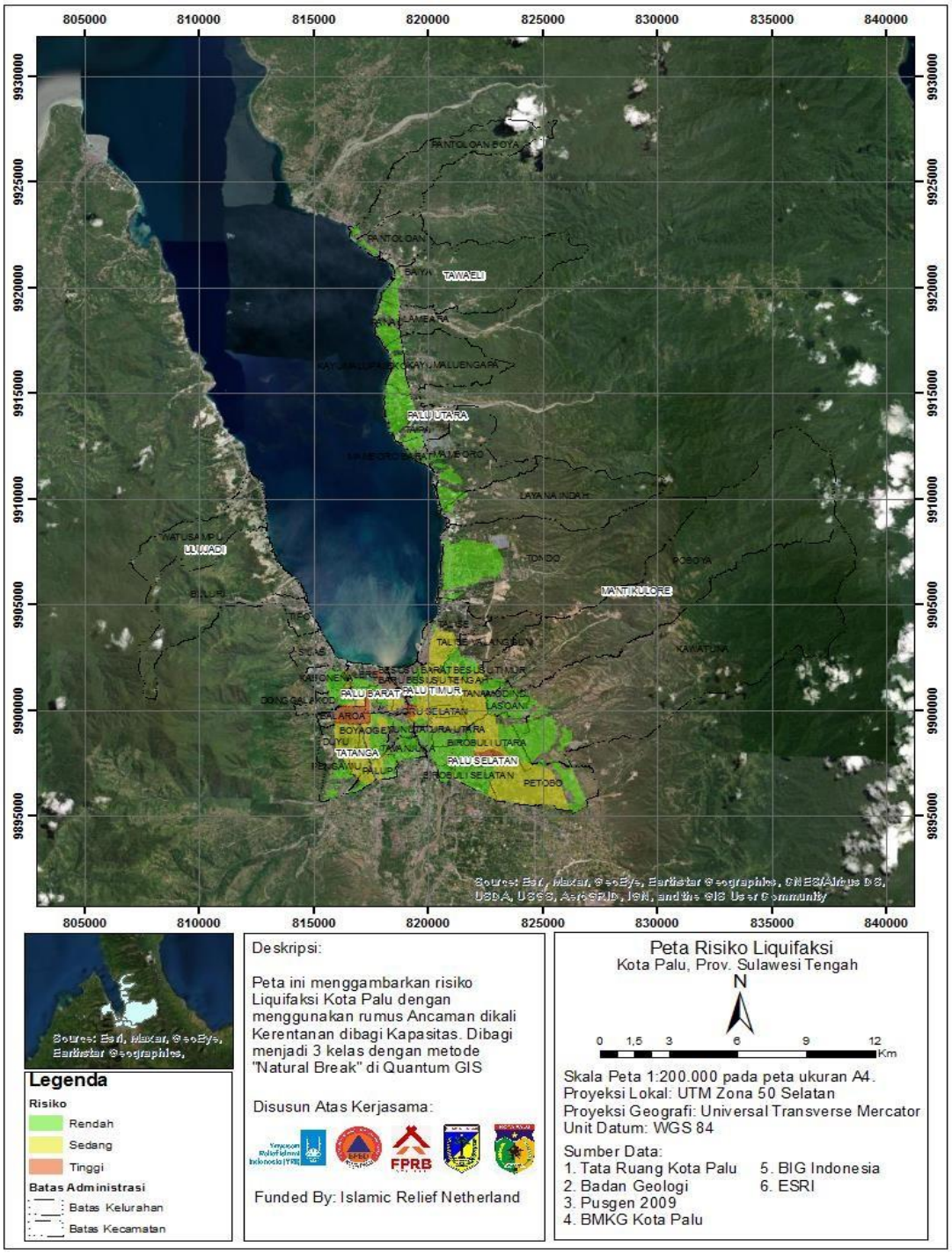
KECAMATAN	LUAS WILAYAH RISIKO LIQUIFAKSI RENDAH	LUAS WILAYAH RISIKO LIQUIFAKSI RENDAH (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO LIQUIFAKSI SEDANG	LUAS WILAYAH RISIKO LIQUIFAKSI SEDANG (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO LIQUIFAKSI TINGGI	LUAS WILAYAH RISIKO LIQUIFAKSI TINGGI (Ha)
Montikulore	12.152.467	1.215	4.312.615	431	-	-
Palu Barat	1.139.333	114	519.599	52	1.574.157	157
Palu Timur	708.136	71	3.992.519	399	194.713	19
Palu Selatan	8.409.323	841	8.615.827	862	466.452	47
Palu Utara	5.506.308	551	-	-	-	-
Tatangga	4.190.700	419	-	-	13.119	1
Tawaeli	2.267.912	227	4.126.082	413	-	-
Ulujadi	1.371.820	137	276.944	28	-	-
TOTAL	**35.745.999**	**3.575**	**21.843.586**	**2.184**	**2.248.441**	**225**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Tabel 2.14
Nilai Indeks Risiko Bencana Liquifaksi Kota Palu

TOTAL INDEKS RISIKO BENCANA LIQUIFAKSI	TINGKAT RISIKO
23 – 68	RENDAH
69 – 127	SEDANG
128 – 177	TINGGI

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027



Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Gambar 2.10
Peta Risiko Bencana Liquifaksi Kota Palu

1. Valuasi Risiko Penduduk dan Bangunan Terpapar Bencana Liquifaksi Kota Palu

Valuasi risiko bencana liquifaksi adalah potensi nilai risiko yang dapat ditimbulkan terhadap aset-aset penghidupan yang memiliki keterpaparan. Dalam kajian risiko bencana liquifaksi aset yang memiliki keterpaparan tinggi terhadap ancaman bencana liquifaksi terutama Ketika terjadi gempabumi di atas 6 – 7 SR yang berpotensi terjadi yang dapat berisiko terhadap jumlah manusia yang hidup dan tinggal dan memeliki penghidupan di seputar daerah rawan bencana dan jumlah bangunan yang memiliki keterpaparan terhadap zona-zona ancaman liquifaksi.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis data keterpaparan penduduk potensi risiko bencana liquifaksi di 4 kecamatan, berdasarkan hasil Kajian dari Tim Kajian Risiko Bencana Kota Palu 2022, Jumlah keterpaparan penduduk di zona risiko bencana didapatkan dari prosentase luas wilayah berisiko dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan. Jumlah keterpaparan penduduk di zona yang memiliki risiko bencana liquifaksi DI Kota Palu adalah 71.659 jiwa diantaranya 9.577 memiiliki tingkat risiko tinggi karena berada di zona risiko tinggi, 31.280 jiwa memiliki risiko sedang karena berada di zona risiko sedang, dan 30.803 jiwa memiliki risiko rendah, karena berada di zona risiko rendah, namun bukan berarti jika masyarakat berada di zona risiko rendah bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki risiko, ini sangat tergantung dari Kerentanan dan kapasitas masyarakat di wilayah tersebut.

Nilai valuasi risiko pada penduduk terpapar dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak bencana dan nilai satuan per jiwa, namun secara pasti manusia tidak dapat dinilai secara tetap dalam bentuk rupiah, namun ketika kita melakukan

investasi risiko pada jumlah penduduk terpapar pendekatan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah nilai jiwa terpapar bila terdampak bencana dengan menggunakan pendekatan nilai potensi loss per jiwa di kalikan dengan jumlah keterpaparan penduduk.

Tabel 2.15
Luas permukiman dan penduduk di zona risiko bencana liquifaksi di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA LIQUIFAKSI RENDAH	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA LIQUIFAKSI RENDAH	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA LIQUIFAKSI SEDANG	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA LIQUIFAKSI SEDANG	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA LIQUIFAKSI TINGGI	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA LIQUIFAKSI TINGGI
Montikulore	5.743.816	1.918	3.205.302	1.070		-
Palu Barat	1126702	9.020	519.567	4.159	1.053.505	8.434
Palu Timur	705.650	2.487	3.948.541	13.914	177.623	626
Palu Selatan	5.320.718	7.976	3.639.096	5.455	345.139	517
Palu Utara	1.872.590	1.572		-		-
Tatangga	2.100.831	6.816	2.002.503	6.497		-
Tawaeli	822.181	401		-		-
Ulujadi	893.020	614	267.933	184		-
TOTAL	**18.585.508**	**30.803**	**13.582.942**	**31.280**	**1.576.267**	**9.577**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

2. Valuasi Risiko Bencana Liquifaksi Terhadap Bangunan

Bangunan yang terpapar terhadap zona risiko bencana liquifaksi di Kota Palu adalah jumlah dan luasan bangunan yang berada di Kawasan yang memiliki risiko bencana liquifaksi Kota Palu. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis spasial dengan membuat overlay antara zonasi kawaan risiko bencana liquifaksi Kota Palu dengan data bangunan yang diambil dari open

streatmap di semua kelurahan dan kecamatan yang sudah terpetakan. Nilai valuasi dapat dihitung berdasarkan jumlah luasan bangunan yang dihitung per meter persegi dari jumlah total luas bangunan yang ada di kelurahan. Total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko rendah 36.319 bangunan dengan luasan 36.319 M2, total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko sedang 29.952 bangunan dengan luas 4.910.021 M2, dan total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko tinggi 5.317 bangunan dengan luas 731.443 M2. Jika nominal bangunan dihitung @ IDR 3,000,000/meter2 maka nilai valuasi risiko bangunan yang berada di zona risiko tinggi adalah 731.443 X Rp 3.000.000 = Rp 2.194.329.000.000 nilai ini adalah nilai simulasi yang dapat dihitung sebagai nilai risiko yang harus dikelola oleh masyarakat bagaimana semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan bila terjadi bencana.

Tabel 2.16
Jumlah bangunan dan luas bangunan yan memiliki risiko bencana liquifaksi di Kota Palu

KECAMATAN	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO LIQUIFAKSI RENDAH	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO LIQUIFAKSI SEDANG	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO LIQUIFAKSI TINGGI	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO GEMPA BUMI RENDAH	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO LIQUIFAKSI SEDANG	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO LIQUIFAKSI TINGGI
Montikulore	9387	6201		2.301.325	997.229	
Palu Barat	2562	1236	4190	423.178	246031	581.873
Palu Timur	9732	7907	422	266.349	1.636.819	59.342
Palu Selatan	1383	8663	705	1.628.836	1318567	90.228
Palu Utara	3915			514.833		
Tatangga	5385	5277		715.279	605.614	
Tawaeli	1976			226.339		
Ulujadi	1979	668		231.776	105.761	
TOTAL	**36.319**	**29.952**	**5.317**	**6.307.915**	**4.910.021**	**731.443**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

- **Risiko Bencana Tsunami Kota Palu**

Hasil analisis risiko bencana tsunami di Kota Palu dijelaskan berdasarkan analisis faktor yang saling mempengaruhi, dapat dilihat wilayah yang memiliki kecenderungan ancaman tinggi terhadap tsunami terutama di wilayah pesisir pantai dengan radius 100 – 400 meter. Wilayah yang memiliki risiko sedang – rendah berada di wilayah yang secara morfologi berada jauh dari pesisir pantai. Rata-rata wilayah yang memiliki risiko tinggi – sedang berada di wilayah yang berada di dataran rendah di sekitar pantai, memiliki morfologi datar – landai. Dari hasil analisis kajian risiko bencana Tsunami di Kota Palu secara keseluruhan Kota Palu di bagian pesisir utara, timur dan barat spenajang Teluk Palu terpapar dengan ancaman bencana tsunami. Dari hasil analisis Tim KRB Kota Palu 2022 dimana 10 % wilayah Kota memiliki potensi risiko bencana tsunami, dimana secara luasan wilayah 2.248.441 M2 atau 225 hektar berada di wilayah yang berisiko tinggi, 21.843.586 M2 atau 2.184 hektar berada di zona risiko sedang dan 35.745.999 M2 atau 3.575 hektar berada di zona risiko rendah.

Tabel 2.17
Luasan wilayah yang memiliki risiko bencana tsunami di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS WILAYAH RISIKO TSUNAMI RENDAH	LUAS WILAYAH RISIKO TSUNAMI RENDAH (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO TSUNAMI SEDANG	LUAS WILAYAH RISIKO TSUNAMI SEDANG (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO TSUNAMI TINGGI	LUAS WILAYAH RISIKO TSUNAMI TINGGI (Ha)
Montikulore	12.152.467	1.215	4.312.615	431	-	-
Palu Barat	1.139.333	114	519.599	52	1.574.157	157
Palu Timur	708.136	71	3.992.519	399	194.713	19
Palu Selatan	8.409.323	841	8.615.827	862	466.452	47
Palu Utara	5.506.308	551	-	-	-	-

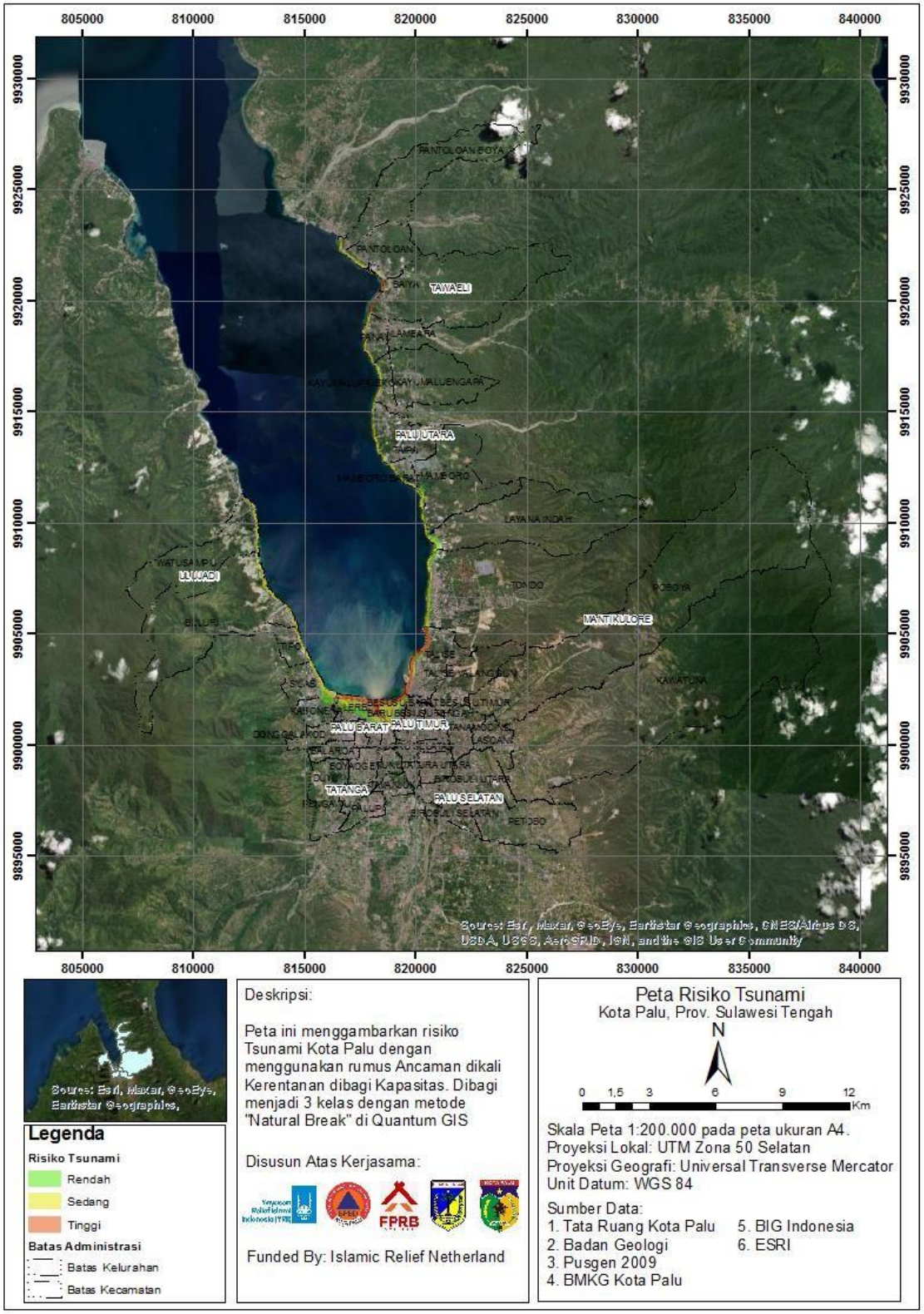
KECAMATAN	LUAS WILAYAH RISIKO TSUNAMI RENDAH	LUAS WILAYAH RISIKO TSUNAMI RENDAH (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO TSUNAMI SEDANG	LUAS WILAYAH RISIKO TSUNAMI SEDANG (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO TSUNAMI TINGGI	LUAS WILAYAH RISIKO TSUNAMI TINGGI (Ha)
Tatangga	4.190.700	419	-	-	13.119	1
Tawaeli	2.267.912	227	4.126.082	413	-	-
Ulujadi	1.371.820	137	276.944	28	-	-
TOTAL	**35.745.999**	**3.575**	**21.843.586**	**2.184**	**2.248.441**	**225**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Tabel 2.18
Nilai Indeks Risiko Bencana Tsunami Kota Palu

TOTAL INDEKS RISIKO BENCANA TSUNAMI	TINGKAT RISIKO
27 – 57	RENDAH
58 – 114	SEDANG
114 – 157	TINGGI

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027



Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Gambar 2.11
Peta Risiko Bencana Tsunami Kota Palu

1. Valuasi Risiko Penduduk dan Bangunan Bencana Tsunami Kota Palu

Valuasi risiko bencana tsunami adalah potensi nilai risiko yang dapat ditimbulkan terhadap aset-aset penghidupan yang memiliki keterpaparan, ancaman bencana tsunami dapat berisiko terhadap jumlah manusia yang hidup dan tinggal dan memeliki penghidupan di seputar daerah rawan bencana dan jumlah bangunan yang memiliki keterpaparan terhadap zona-zona ancaman tsunami terutama di sepanjang pesisir utara, timur dan barat Teluk Palu.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis data keterpaparan penduduk potensi risiko bencana tsunami berada di 4 kecamatan, berdasarkan hasil Kajian dari Tim Kajian Risiko Bencana Kota Palu 2022, Jumlah keterpaparan penduduk di zona risiko bencana didapatkan dari prosentase luas wilayah berisiko dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan. Jumlah keterpaparan penduduk di zona yang memiliki risiko bencana tsunami adalah 13.619 jiwa, yang terdiri dari 3.676 jiwa memiiliki tingkat risiko tinggi karena berada di zona risiko tinggi, 5.647 jiwa memiliki risiko sedang karena berada di zona risiko sedang, dan 4.368 jiwa memiliki risiko rendah, karena berada di zona risiko rendah, namun bukan berarti jika masyarakat berada di zona risiko rendah bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki risiko, ini sangat tergantung dari Kerentanan dan kapasitas masyarakat di wilayah tersebut.

Nilai valuasi risiko pada penduduk terpapar dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak bencana dan nilai satuan per jiwa, namun secara pasti manusia tidak dapat dinilai secara tetap dalam bentuk rupiah, namun ketika kita melakukan investasi risiko pada jumlah penduduk terpapar pendekatan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah nilai jiwa

terpapar bila terdampak bencana dengan menggunakan pendekatan nilai potensi loss per jiwa di kalikan dengan jumlah keterpaparan penduduk.

Tabel 2.19
Luas keterpaparan permukiman dan keterpaparan penduduk di zona risiko bencana tsunami di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA LIQUIFAKSI RENDAH	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA LIQUIFAKSI RENDAH	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA LIQUIFAKSI SEDANG	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA LIQUIFAKSI SEDANG	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA LIQUIFAKSI TINGGI	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA LIQUIFAKSI TINGGI
Montikulore	295.410	99	380.598	127	369.280	123
Palu Barat	446.861	3.577	385.416	3.085	328.883	2.633
Palu Timur	147.032	518	488.679	1.722	227.392	801
Palu Selatan		-		-	77.658	116
Palu Utara	64.652	54	263.503	221		-
Tatangga		-		-		-
Tawaeli	3.588	2	146.566	71	3.496	2
Ulujadi	171.492	118	610.229	419		-
TOTAL	**1.129.035**	**4.368**	**2.274.991**	**5.647**	**1.006.709**	**3.676**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

2. Valuasi Risiko Bencana Tsunami Terhadap Bangunan

Bangunan yang terpapar terhadap zona risiko bencana tsunami di Kota Palu adalah jumlah dan luasan bangunan yang berada di Kawasan yang memiliki risiko bencana tsunami di Kota Palu. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis spasial dengan membuat overlay antara zonasi kawaan risiko bencana tsunami Kota Palu dengan data bangunan yang diambil dari open streatmap di semua kelurahan dan kecamatan yang sudah terpetakan. Nilai

valuasi dapat dihitung berdasarkan jumlah luasan bangunan yang dihitung per meter persegi dari jumlah total luas bangunan yang ada di kelurahan. Total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko rendah 13.840 bangunan dengan luasan 373.614 M2 total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko sedang 15.968 bangunan dengan luas 674.630 M2, dan total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko tinggi 8.622 bangunan dengan luas 3.340.957 M2. Jika nominal bangunan dihitung @ IDR 3,000,000/meter2 maka nilai valuasi risiko bangunan yang berada di zona risiko tinggi adalah 3.340.957 X Rp 3.000.000 = Rp10.022.871.000.000 nilai ini adalah nilai simulasi yang dapat dihitung sebagai nilai risiko yang harus dikelola oleh masyarakat bagaimana semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan bila terjadi bencana.

Tabel 2.20
Jumlah bangunan dan luas bangunan yan memiliki risiko bencana tsunami di Kota Palu.

KECAMATAN	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO TSUNAMI RENDAH	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO TSUNAMI SEDANG	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO TSUNAMI TINGGI	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO TSUNAMI BUMI RENDAH	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO TSUNAMI SEDANG	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO TSUNAMI TINGGI
Montikulore	1.854	2.128	1.440	83.133	57.269	383.722
Palu Barat	4.197	4.381	3.948	146.964	116.739	1.053.505
Palu Timur	4.201	4.627	3.146	74.363	221.806	257.468
Palu Selatan						77.658
Palu Utara	690	958		17.471	66.734	
Tatangga						1.353.997
Tawaeli	37	552		1.078	56.497	
Ulujadi	2.861	3.322	88	50.605	155.585	214.607
TOTAL	**13.840**	**15.968**	**8.622**	**373.614**	**674.630**	**3.340.957**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

- **Risiko Bencana Longsor Kota Palu**

Berdasarkan hasil analisis risiko bencana longsor di Kota Palu dijelaskan bahwa ancaman longsor sangat dipengaruhi oleh kelerengan, curah hujan yang tinggi, dan adanya material rombakan yang bisa diakibatkan leh adanya gempabumi yang ada di sepanjang perbukitan dapat. dilihat wilayah yang memiliki kecenderungan ancaman tinggi terhadap ancaman longsor berada di wilayah perbukitan sisi timur di Kecamatan Mantikulore, Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli; di sisi sebelah barat di Kecamatan Ulujadi . Wilayah yang memiliki risiko sedang – rendah berada di wilayah yang secara morfologi memiliki kelerengan yang lebih rendah, dan pada daerah dataran Kota Palu berada di zona aman dari ancaman longsor. Rata-rata wilayah yang memiliki risiko tinggi – sedang berada di wilayah dengan kelerengan sedang – curam di wilayah perbukitan. Dari hasil analisis Tim KRB Kota Palu 2022 risiko bencana longsor 60 % wilayah Kota Palu berada di daerah perbukitan memiliki potensi risiko bencana longsor, dimana secara luasan wilayah 57.524.331 M_2 atau 5.752 hektar berada di wilayah yang berisiko tinggi, 57.518.827 M_2 atau 5.752 hektar berada di zona risiko sedang dan 124.523.865 M_2 atau 12.452 hektar berada di zona risiko rendah.

Tabel 2.21
Luasan wilayah yang memiliki risiko bencana longsor di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS WILAYAH RISIKO LONGSOR RENDAH (M^2)	LUAS WILAYAH RISIKO LONGSOR RENDAH (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO LONGSOR SEDANG (M^2)	LUAS WILAYAH RISIKO LONGSOR SEDANG (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO LONGSOR TINGGI (M^2)	LUAS WILAYAH RISIKO LONGSOR TINGGI (Ha)
Montikulore	110.322.585	11.032	34.258.803	3.426	20.366.589	2.037
Palu Barat	-	-	-	-	558.606	56
Palu Timur	-	-	-	-	1	0

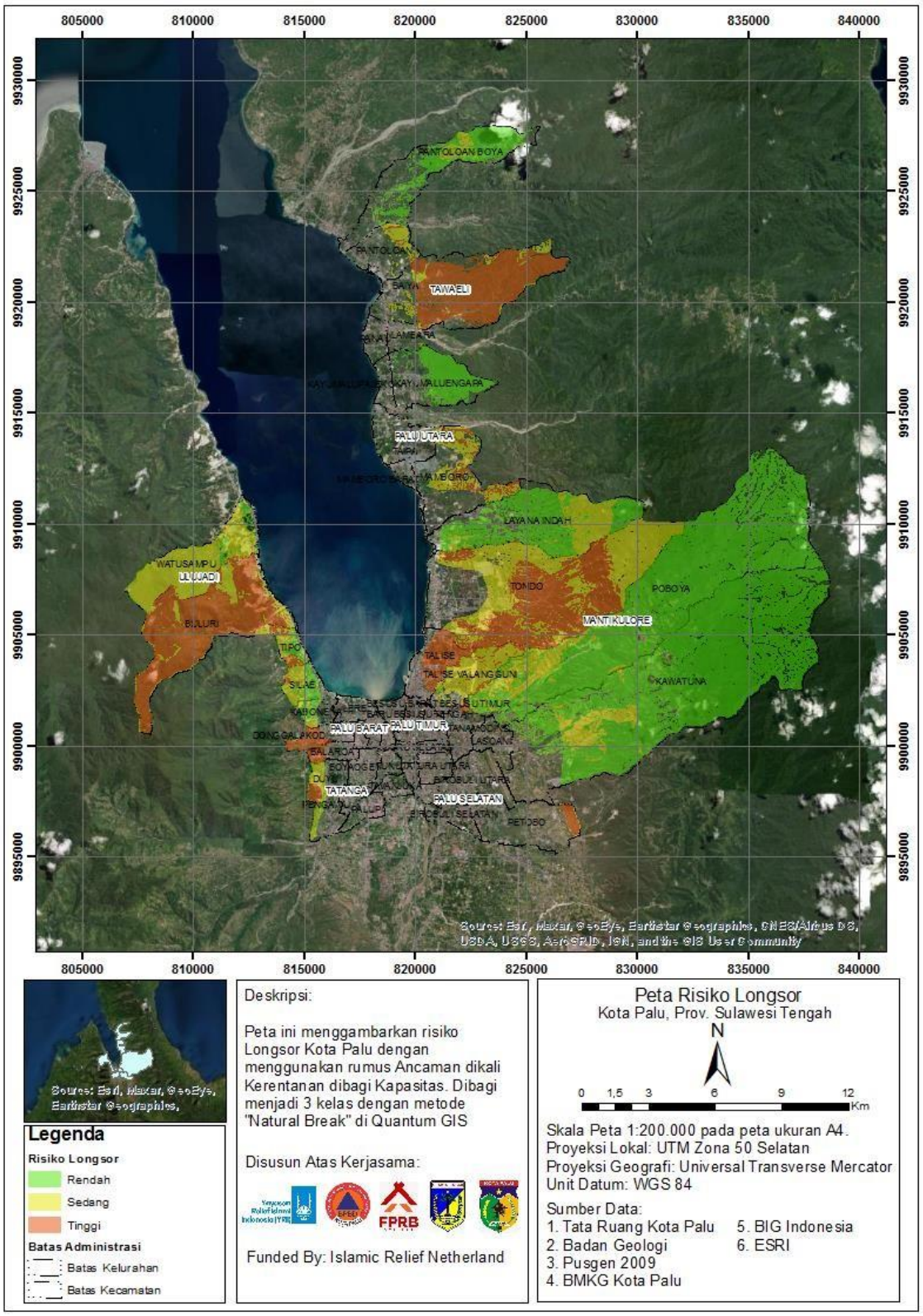
KECAMATAN	LUAS WILAYAH RISIKO LONGSOR RENDAH (M^2)	LUAS WILAYAH RISIKO LONGSOR RENDAH (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO LONGSOR SEDANG (M^2)	LUAS WILAYAH RISIKO LONGSOR SEDANG (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO LONGSOR TINGGI (M^2)	LUAS WILAYAH RISIKO LONGSOR TINGGI (Ha)
Palu Selatan	-	-	141.543	14	613.016	61
Palu Utara	4.847.957	485	3.270.084	327	1.626.449	163
Tatangga	240.930	24	1.171.291	117	449.931	45
Tawaeli	6.211.480	621	3.579.069	358	14.325.384	1.433
Ulujadi	2.900.913	290	15.098.037	1.510	19.584.355	1.958
TOTAL	**124.523.865**	**12.452**	**57.518.827**	**5.752**	**57.524.331**	**5.752**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Tabel 2.22
Nilai Indeks Risiko Bencana Longsor Kota Palu

TOTAL INDEKS RISIKO BENCANA LONGSOR	TINGKAT RISIKO
47 – 78	RENDAH
79 – 99	SEDANG
100 – 168	TINGGI

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027



Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Gambar 2.12
Peta Risiko Bencana Longsor Kota Palu

1. Valuasi Risiko Penduduk dan Bangunan Bencana Longsor Kota Palu

Valuasi risiko bencana longsor adalah potensi nilai risiko yang dapat ditimbulkan terhadap aset-aset penghidupan yang memiliki keterpaparan, ancaman bencana longsor dapat berisiko terhadap jumlah manusia yang hidup dan tinggal dan memeliki penghidupan di seputar daerah rawan bencana dan jumlah bangunan yang memiliki keterpaparan terhadap zona-zona ancaman longsor terutama di sepanjang perbukitan di bagian timur dan barat Kota Palu.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis data keterpaparan penduduk potensi risiko bencana longsor berada di 4 kecamatan, berdasarkan hasil Kajian dari Tim Kajian Risiko Bencana Kota Palu 2022, Jumlah keterpaparan penduduk di zona risiko bencana didapatkan dari prosentase luas wilayah berisiko dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan. Jumlah keterpaparan penduduk di zona yang memiliki risiko bencana longsor di Kota Palu 4.706 jiwa yang terdiri dari 1.131 jiwa memiiliki tingkat risiko tinggi karena berada di zona risiko tinggi, 2.491 jiwa memiliki risiko sedang karena berada di zona risiko sedang, dan 901 jiwa memiliki risiko rendah, karena berada di zona risiko rendah, namun bukan berarti jika masyarakat berada di zona risiko rendah bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki risiko, ini sangat tergantung dari Kerentanan dan kapasitas masyarakat di wilayah tersebut.

Nilai valuasi risiko pada penduduk terpapar dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak bencana dan nilai satuan per jiwa, namun secara pasti manusia tidak dapat dinilai secara tetap dalam bentuk rupiah, namun ketika kita melakukan investasi risiko pada jumlah penduduk terpapar pendekatan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah nilai jiwa

terpapar bila terdampak bencana dengan menggunakan pendekatan nilai potensi loss per jiwa di kalikan dengan jumlah keterpaparan penduduk.

Tabel 2.23
Luas permukiman dan penduduk di zona risiko bencana longsor di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA LONGSOR RENDAH	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA LONGSOR RENDAH	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA LONGSOR SEDANG	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA LONGSOR SEDANG	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA LONGSOR TINGGI	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA LONGSOR TINGGI
Montikulore	25.322	8	981.212	328	579.805	194
Palu Barat		-	76.221	610	86.276	691
Palu Timur		-	112.474	396		-
Palu Selatan		-		-		-
Palu Utara	14	0	111.955	94	505	0
Tatangga	32.696	106	94.769	307	196	1
Tawaeli	145.787	71	319.931	156	107.370	52
Ulujadi	1.040.236	715	872.652	600	546.691	376
TOTAL	**1.244.055**	**901**	**2.569.214**	**2.491**	**1.320.843**	**1.313**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

2. Valuasi Risiko Bencana Longsor Terhadap Bangunan

Bangunan yang terpapar terhadap zona risiko bencana longsor di Kota Palu adalah jumlah dan luasan bangunan yang berada di Kawasan yang memiliki risiko bencana longsor di Kota Palu. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis spasial dengan membuat overlay antara zonasi kawaan risiko bencana longsor Kota Palu dengan data bangunan yang diambil dari open streatmap di semua kelurahan dan kecamatan yang sudah terpetakan. Nilai valuasi dapat dihitung berdasarkan jumlah luasan bangunan yang dihitung per meter persegi dari jumlah total luas bangunan yang ada di kelurahan. Total jumlah bangunan

yang masuk dalam zona risiko rendah 9.421 bangunan dengan luasan 657.239 M2 , total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko sedang 6.478 bangunan dengan luas 2.719.965 M2. dan total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko tinggi 3.579 bangunan dengan luas 306.773 M2. Jika nominal bangunan dihitung @ IDR 3,000,000/meter2 maka nilai valuasi risiko bangunan yang berada di zona risiko tinggi adalah 306.773 x Rp 3.000.000 = Rp 92.031.900.000 nilai ini adalah nilai simulasi yang dapat dihitung sebagai nilai risiko yang harus dikelola oleh masyarakat bagaimana semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan bila terjadi bencana.

Tabel 2.24
Jumlah bangunan dan luas bangunan yan memiliki risiko bencana longsor di Kota Palu

KECAMATAN	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO LONGSOR RENDAH	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO LONGSOR SEDANG	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO LONGSOR TINGGI	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO LONGSOR RENDAH	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO LONGSOR SEDANG	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO LONGSOR TINGGI
Montikulore	5.717	3.235	1.251	341.611	253.128	143.621
Palu Barat			253			17.174
Palu Timur						
Palu Selatan						
Palu Utara	54	313	55	1.173	31.496	2.197
Tatangga	77	283	7	7.232	103.231	157
Tawaeli	559	139	177	40.169	572.203	12.056
Ulujadi	3.014	2.508	1.836	267.054	1.759.907	131.568
TOTAL	**9.421**	**6.478**	**3.579**	**657.239**	**2.719.965**	**306.773**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

3. Valuasi Risiko Bencana Longsor terhadap Luas Wilayah Yang Memiliki Perkebunan dan Ladang di Kota Palu.

Hasil kajian Tim Penyusun KRB Kota Palu, 2022 mengidentifikasi pada daerah zona kelerengan datar – sedang di kawasan perbukitan banyak digunakan sebagai lading dan perkebunan yang tersebar di zona kawasan risiko longsor. Perkebunan dan ladang yang terpapar zona risiko bencana longsor di Kota Palu adalah 5.315 hektar.

Tabel 2.25
Luas keterpaparan perkebunan dan ladang yang ada di zona risiko bencana longsor Kota Palu

KECAMATAN	LUAS KETERPAPARAN PERKEBUNAN DAN LADANG DI ZONA RISIKO LONGSOR RENDAH (Ha)	LUAS KETERPAPARAN PERKEBUNAN DAN LADANG DI ZONA RISIKO LONGSOR SEDANG (Ha)	LUAS KETERPAPARAN PERKEBUNAN DAN LADANG DI ZONA RISIKO LONGSOR TINGGI (Ha)
Montikulore	586	1.273	1.034
Palu Barat	-	8	47
Palu Timur	-	11	0
Palu Selatan	-	14	61
Palu Utara	105	10	28
Tatangga	11	99	45
Tawaeli	15	166	160
Ulujadi	99	516	1.026
TOTAL	**816**	**2.097**	**2.402**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

- **Risiko Bencana Banjir Kota Palu**

Hasil analisis risiko bencana banjir di Kota Palu dijelaskan berdasarkan analisis faktor yang saling mempengaruhi, ancaman banjir sangat dipengaruhi oleh curah hujan, kondisi daerah aliran sungai, dan cuaca extreme yang terjadi akibat La Nina yang

tinggi. Adanya material rombakan yang bisa diakibatkan oleh adanya gempabumi yang ada di sepanjang perbukitan dapat memicu terjadinya banjir bandang yang melewati lemah sungai di sepanjang alur sungai yang memiliki kelerengan curam – sedang dan membawa material rombakan yang ada di bagian hulu di wilayah perbukitan bagian timur dan barat yang pada saat terjadi *run off* yang tinggi dapat membawa material-material besar seperti pasir, batu, pohon, lumpur dan melewati sepanjang alur sungai, namun pada kondisi hujan extreme yang tidak memicu terjadinya banjir bandang beberapa wilayahyang sudah dipetakan akan memiliki potensi risiko terhadap banjir genangan. Wilayah yang memiliki kecenderungan ancaman tinggi terhadap ancaman banjir berada di wilayah sepanjang sungai Palu dan berbagai alur sungai yang melewati permukiman dan masuk ke Sungai Palu. Dari hasil analisis Tim KRB Kota Palu 2022 risiko bencana banjir berada di 10 % wilayah Kota Palu yang berada di daerah aliran sungai, dengan luasan wilayah 6.154.081 M2 atau 615 hektar berada di wilayah yang berisiko tinggi, 14.586.519 M2 atau 1.459 hektar berada di zona risiko sedang dan 13.612.568 M2 atau 1.361 hektar berada di zona risiko rendah.

Tabel 2.26
Luasan wilayah yang memiliki risiko bencana banjir di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR RENDAH	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR RENDAH (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR SEDANG	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR SEDANG (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR TINGGI	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR TINGGI (Ha)
Montikulore	6.831.297	683	4.060.270	406	303.494	30
Palu Barat	-	-	212.321	21	815.682	82
Palu Timur	-	-	343.868	34	728.707	73
Palu Selatan	17.490	2	1.389.036	139	2.417.485	242

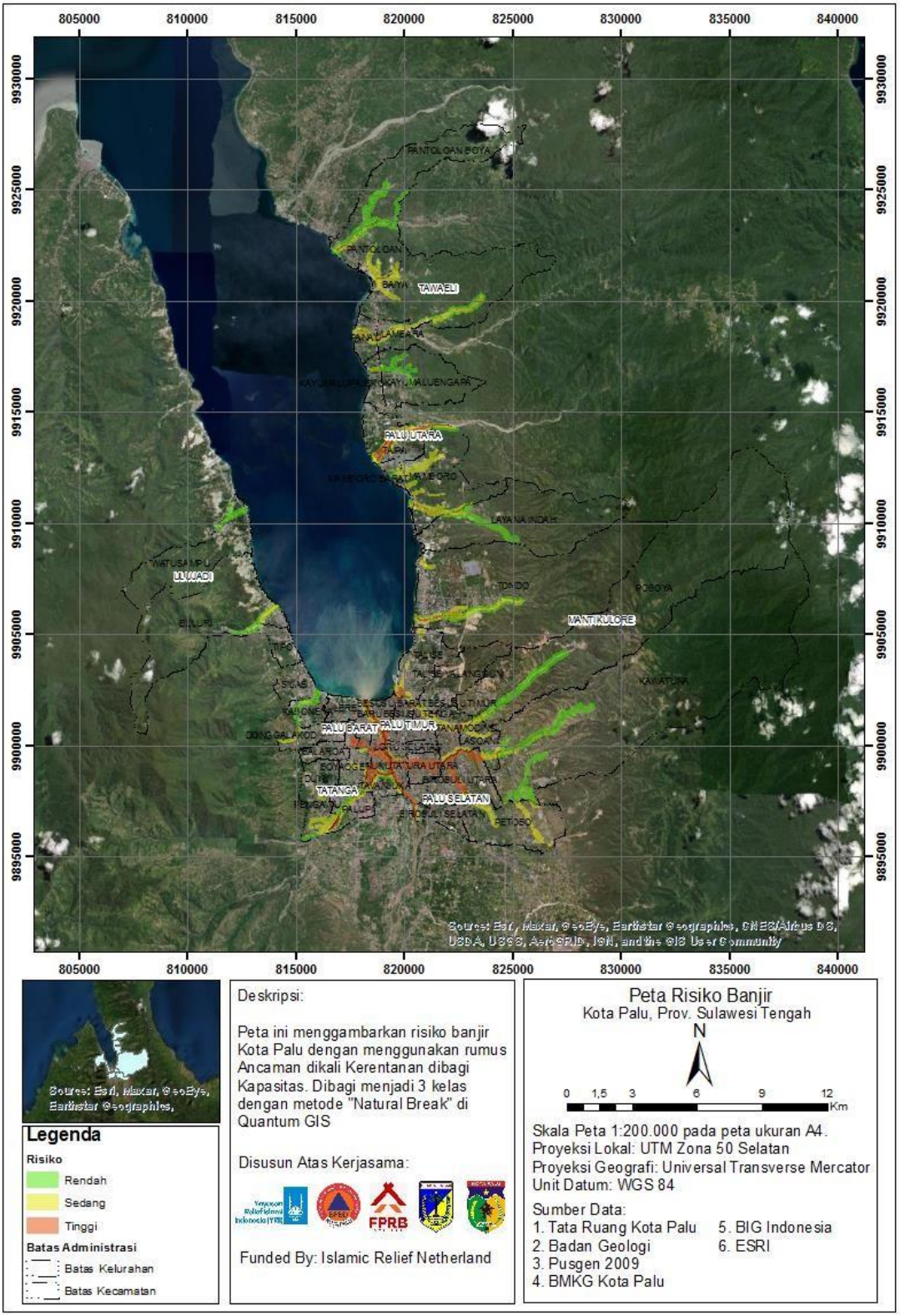
KECAMATAN	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR RENDAH	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR RENDAH (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR SEDANG	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR SEDANG (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR TINGGI	LUAS WILAYAH RISIKO BANJIR TINGGI (Ha)
Palu Utara	1.326.653	133	2.900.900	290	763.748	76
Tatangga	539.972	54	1.891.896	189	987.020	99
Tawaeli	3.054.090	305	3.253.202	325	137.945	14
Ulujadi	1.843.066	184	535.026	54	-	-
TOTAL	**13.612.568**	**1.361**	**14.586.519**	**1.459**	**6.154.081**	**615**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Tabel 2.27
Nilai Indeks Risiko Bencana Banjir Kota Palu

TOTAL INDEKS RISIKO BENCANA BANJIR	TINGKAT RISIKO
16 – 62	RENDAH
63 – 102	SEDANG
103 – 185	TINGGI

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027



Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Gambar 2.13
Peta Risiko Bencana Banjir Kota Palu

1. Valuasi Risiko Penduduk dan Bangunan Bencana Banjir Kota Palu

Valuasi risiko bencana banjir adalah potensi nilai risiko yang dapat ditimbulkan terhadap aset-aset penghidupan yang memiliki keterpaparan, ancaman bencana banjir dapat berisiko terhadap jumlah manusia yang hidup dan tinggal dan memeliki penghidupan di seputar daerah rawan bencana dan jumlah bangunan yang memiliki keterpaparan terhadap zona-zona ancaman tsunami terutama di sepanjang daerah aliran sungai.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis data keterpaparan penduduk potensi risiko bencana banjir berada di 8 kecamatan, berdasarkan hasil Kajian dari Tim Kajian Risiko Bencana Kota Palu 2022, Jumlah keterpaparan penduduk di zona risiko bencana didapatkan dari prosentase luas wilayah berisiko dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan. Jumlah keterpaparan penduduk di zona yang memiliki risiko bencana banjir adalah 20.087 jiwa yang terdiri dari 3.521 jiwa memiiliki tingkat risiko tinggi karena berada di zona risiko tinggi, 16.351 jiwa memiliki risiko sedang karena berada di zona risiko sedang, dan 215 jiwa memiliki risiko rendah, karena berada di zona risiko rendah, namun bukan berarti jika masyarakat berada di zona risiko rendah bahwa masyarakat tersebut tidak memiliki risiko, ini sangat tergantung dari Kerentanan dan kapasitas masyarakat di wilayah tersebut.

Nilai valuasi risiko pada penduduk terpapar dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak bencana dan nilai satuan per jiwa, namun secara pasti manusia tidak dapat dinilai secara tetap dalam bentuk rupiah, namun ketika kita melakukan investasi risiko pada jumlah penduduk terpapar pendekatan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah nilai jiwa terpapar bila terdampak bencana dengan menggunakan

pendekatan nilai potensi loss per jiwa di kalikan dengan jumlah keterpaparan penduduk.

Tabel 2.28
Luas permukiman dan penduduk di zona risiko bencana banjir di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA BANJIR RENDAH	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA BANJIR RENDAH	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA BANJIR SEDANG	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA BANJIR SEDANG	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA BANJIR TINGGI	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA BANJIR TINGGI
Montikulore	68.336	23	2.033.243	679	501.360	167
Palu Barat	971	8	737.096	5.901	140.058	1.121
Palu Timur	7.547	27	727.455	2.563	188.999	666
Palu Selatan	19.593	29	1.737.256	2.604	552.850	829
Palu Utara	4.083	3	612.779	514	103.492	87
Tatangga	4.357	14	1.067.532	3.463	175.211	568
Tawaeli	71.248	35	714.724	348	169.692	83
Ulujadi	110.426	76	403.032	277		-
TOTAL	**286.561**	**215**	**8.033.117**	**16.351**	**1.831.662**	**3.521**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

2. Valuasi Risiko Bencana Banjir Terhadap Bangunan

Bangunan yang terpapar terhadap zona risiko bencana banjir di Kota Palu adalah jumlah dan luasan bangunan yang berada di Kawasan yang memiliki risiko bencana banjir di Kota Palu. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis spasial dengan membuat overlay antara zonasi kawaan risiko bencana tsunami Kota Palu dengan data bangunan yang diambil dari open streatmap di semua kelurahan dan kecamatan yang sudah terpetakan. Nilai valuasi dapat dihitung berdasarkan jumlah luasan bangunan yang dihitung per meter persegi dari jumlah total luas bangunan yang ada di kelurahan. Total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko rendah 1.704 bangunan dengan luasan 64.210 M2 , total jumlah bangunan yang masuk dalam zona

risiko sedang 22.696 bangunan dengan luas 2.515.886 M2, dan total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko tinggi 5.857 bangunan dengan luas 564.535 M2. Jika nominal bangunan dihitung @ IDR 3,000,000/meter2 maka nilai valuasi risiko bangunan yang berada di zona risiko tinggi adalah 564.535 x Rp 3.000.000 = Rp 1.693.605.000.000 nilai ini adalah nilai simulasi yang dapat dihitung sebagai nilai risiko yang harus dikelola oleh masyarakat bagaimana semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan bila terjadi bencana.

Tabel 2.29
Jumlah bangunan dan luas bangunan yang memiliki risiko bencana banjir di Kota Palu

KECAMATAN	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO BANJIR RENDAH	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO BANJIR SEDANG	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO LONGSOR TINGGI	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO BANJIR RENDAH	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO BANJIR SEDANG	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO BANJIR TINGGI
Montikulore	494	6.288	1.671	24.541	636.510	147.909
Palu Barat	15	2.356	661	369	325.343	58.962
Palu Timur	13	2.230	723	8.810	520.552	165.635
Palu Selatan	124	4.454	1.574	421	287.095	77.351
Palu Utara	48	1.736	185	1.751	174.958	21.678
Tatangga	37	2.592	529	1.244	316.108	48.936
Tawaeli	458	1.739	514	24.243	154.939	44.064
Ulujadi	515	1.301		2.831	100.381	
TOTAL	**1.704**	**22.696**	**5.857**	**64.210**	**2.515.886**	**564.535**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

3. Valuasi Risiko Bencana Banjir Terhadap Sawah

Hasil kajian Tim Penyusun KRB Kota Palu, 2022 mengidentifikasi pada daerah zona kelerengan datar di sepanjang alur sungai di kawasan lembah yang digunakan untuk area persawahan. Sawah yang terpapar zona risiko bencana banjir di Kota Palu adalah 226 hektar.

Tabel 2.30
Luas sawah di zona risiko banjir di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS KETERPAPARAN BANJIR SAWAH RENDAH (Ha)	LUAS KETERPAPARAN BANJIR SAWAH SEDANG (Ha)	LUAS KETERPAPARAN BANJIR SAWAH TINGGI (Ha)
Montikulore	12	16	33
Palu Barat	-	-	-
Palu Timur	-	-	-
Palu Selatan	3	11	-
Palu Utara	5	29	31
Tatangga	11	44	16
Tawaeli	4	11	-
Ulujadi	0	-	-
TOTAL	**34**	**112**	**80**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

- **Risiko Bencana Kebakaran Permukiman Kota Palu**

Hasil analisis risiko bencana kebakaran permukiman di Kota Palu dijelaskan berdasarkan analisis faktor yang saling mempengaruhi, ancaman sangat dipengaruhi oleh tingkat kepadatan bangunan dan jenis bangunan di suatu wilayah yang memiliki aktivatis yang tinggi, risiko bencana kebakaran bisa terjadi dimanapun dan kapanpun di Kota Palu. Wilayah yang memiliki kecenderungan ancaman tinggi terhadap ancaman kebakaran permukiman adalah wilayah padat penduduk dengan kondisi insalasi listrik yang tidak baik berada di wilayah seperti pasar, rumah penduduk, komplek perkantoran dan wilayah padat lainnya. Dari hasil analisis Tim KRB Kota Palu Tahun 2022 risiko bencana kebakaran permukiman berada di 20% wilayah Kota Palu yang berada, dengan luasan wilayah 6.944.773 M2 atau 694 hektar berada di wilayah yang berisiko tinggi, 74.128.897 M2 atau 7.413 hektar berada di zona risiko sedang dan 275.081.567 M2 atau 27.508 hektar berada di zona risiko rendah.

Tabel 2.31
Luasan wilayah yang memiliki risiko bencana kebakaran permukiman di Kota Palu

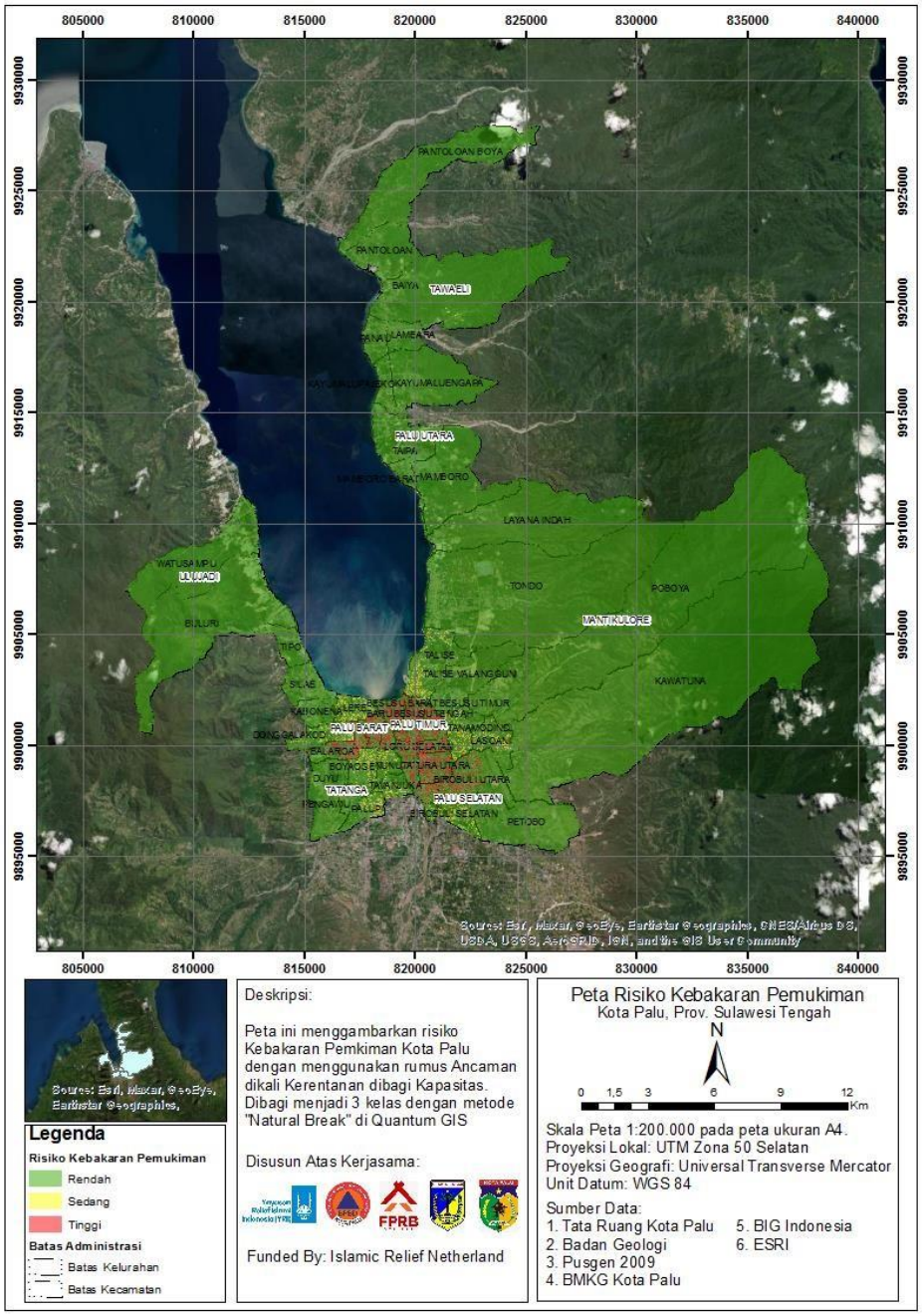
KECAMATAN	LUAS WILAYAH RISIKO KEBAKARAN PERMUKIMAN RENDAH (M^2)	LUAS WILAYAH RISIKO KEBAKARAN PERMUKIMAN RENDAH (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO KEBAKARAN PERMUKIMAN SEDANG (M^2)	LUAS WILAYAH RISIKO KEBAKARAN PERMUKIMAN SEDANG (Ha)	LUAS WILAYAH RISIKO KEBAKARAN PERMUKIMAN TINGGI (M^2)	LUAS WILAYAH RISIKO KEBAKARAN PERMUKIMAN TINGGI (Ha)
Montikulore	179.563.357	17.956	17.335.038	1.734	-	-
Palu Barat	257.121	26	3.862.884	386	1.993.693	199
Palu Timur	577.095	58	3.216.640	322	2.480.355	248
Palu Selatan	8.861.687	886	9.367.275	937	2.252.427	225
Palu Utara	21.784.912	2.178	6.654.717	665	-	-
Tatangga	10.462.311	1.046	2.007.766	201	218.298	22
Tawaeli	29.603.132	2.960	14.141.868	1.414	-	-
Ulujadi	23.971.952	2.397	17.542.709	1.754	-	-
TOTAL	**275.081.567**	**27.508**	**74.128.897**	**7.413**	**6.944.773**	**694**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Tabel 2.32
Nilai Indeks Risiko Bencana Kebakaran Permukiman Kota Palu

TOTAL INDEKS RISIKO BENCANA BANJIR	TINGKAT RISIKO
3 – 65	RENDAH
66 – 113	SEDANG
114 – 155	TINGGI

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027



Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

Gambar 2.14
Peta Risiko Bencana Kebakaran Permukiman Kota Palu

1. Valuasi Risiko Penduduk dan Bangunan Bencana Kebakaran Permukiman Kota Palu

Valuasi risiko bencana kebakaran permukiman adalah potensi nilai risiko yang dapat ditimbulkan terhadap aset-aset

penghidupan yang yang memiliki keterpaparan, ancaman bencana kebakaran permukiman dapat berisiko terhadap jumlah manusia yang hidup dan tinggal dan memeliki penghidupan di seputar daerah rawan bencana dan jumlah bangunan yang memiliki keterpaparan terhadap zona-zona ancaman tsunami terutama di sepanjang daerah aliran sungai.

Secara keseluruhan berdasarkan hasil analisis data keterpaparan penduduk potensi risiko bencana kebakaran permukiman berada di 4 kecamatan, berdasarkan hasil Kajian dari Tim Kajian Risiko Bencana Kota Palu 2022, Jumlah keterpaparan penduduk di zona risiko bencana didapatkan dari prosentase luas wilayah berisiko dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan. Jumlah keterpaparan penduduk di zona yang memiliki risiko bencana banjir adalah 136 jiwa memiiliki tingkat risiko tinggi karena berada di zona risiko tinggi, 463 jiwa memiliki risiko sedang karena berada di zona risiko sedang, kebakaran permukiman hanya dihitung berdasarkan wilayah yang memiliki risiko sedang dan tinggi, karena pembagian kelas menjadi tiga pada wilayah yang memiliki risiko rendah berada di area di luar permukiman.

Nilai valuasi risiko pada penduduk terpapar dihitung berdasarkan jumlah penduduk yang terdampak bencana dan nilai satuan per jiwa, namun secara pasti manusia tidak dapat dinilai secara tetap dalam bentuk rupiah, namun ketika kita melakukan investasi risiko pada jumlah penduduk terpapar pendekatan ini bisa digunakan untuk menghitung berapa jumlah nilai jiwa terpapar bila terdampak bencana dengan menggunakan pendekatan nilai potensi loss per jiwa di kalikan dengan jumlah keterpaparan penduduk.

Tabel 2.33
Luas permukiman dan penduduk di zona risiko bencana kebakaran permukiman di Kota Palu

KECAMATAN	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN SEDANG	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN SEDANG	LUAS PERMUKIMAN ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN TINGGI	KETERPAPARAN PENDUDUK ZONA RISIKO BENCANA KEBAKARAN PERMUKIMAN TINGGI
Montikulore	49.250	16		-
Palu Barat		-	32.250	258
Palu Timur		-	37.368	132
Palu Selatan	10.756	16	39.144	59
Palu Utara	15.916	13		-
Tatangga	21.904	71	4.344	14
Tawaeli	12.068	6		-
Ulujadi	19.774	14		-
TOTAL	**129.668**	**136**	**113.106**	**463**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

2. Valuasi Risiko Bencana Banjir Terhadap Bangunan

Bangunan yang terpapar terhadap zona risiko bencana banjir di Kota Palu adalah jumlah dan luasan bangunan yang berada di Kawasan yang memiliki risiko bencana banjir di Kota Palu. Analisis yang dilakukan menggunakan analisis spasial dengan membuat overlay antara zonasi kawaan risiko bencana tsunami Kota Palu dengan data bangunan yang diambil dari open streatmap di semua kelurahan dan kecamatan yang sudah terpetakan. Nilai valuasi dapat dihitung berdasarkan jumlah luasan bangunan yang dihitung per meter persegi dari jumlah total luas bangunan yang ada di kelurahan. Total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko rendah 831 bangunan dengan

luasan 42.209 M2 , total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko sedang 74.419 bangunan dengan luas 9.256.356 M2 dan total jumlah bangunan yang masuk dalam zona risiko tinggi 39.120 bangunan dengan luas 6.944.773 M2. Jika nominal bangunan dihitung @ IDR 3,000,000/meter2 maka nilai valuasi risiko bangunan yang berada di zona risiko tinggi adalah 6.944.773 x Rp 3.000.000 = Rp 20.834.319.000.000 nilai ini adalah nilai simulasi yang dapat dihitung sebagai nilai risiko yang harus dikelola oleh masyarakat bagaimana semua pihak dapat berkontribusi dalam mengurangi risiko dampak yang ditimbulkan bila terjadi bencana.

Tabel 2.34
Jumlah bangunan dan luas bangunan di zona risiko bencana kebakaran permukiman di Kota Palu

KECAMATAN	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO BANJIR RENDAH	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO BANJIR SEDANG	JUMLAH KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO LONGSOR TINGGI	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO BANJIR RENDAH	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO BANJIR SEDANG	LUAS KETERPAPARAN BANGUNAN RISIKO BANJIR TINGGI
Montikulore	465	28.114	-	19.799	3.642.663	
Palu Barat	-	46	12.013		2.430	1.993.693
Palu Timur	-	-	12.462			2.480.355
Palu Selatan	-	7.504	13.196		1.038.437	2.252.427
Palu Utara	363	8.934	-	22.385	1.132.738	
Tatangga	-	11.728	1.449		1.449.566	218.298
Tawaeli	1	7.345		7	811.311	
Ulujadi	2	10.748		18	1.179.211	
TOTAL	**831**	**74.419**	**39.120**	**42.209**	**9.256.356**	**6.944.773**

Sumber: KRB Kota Palu Tahun 2022-2027

2.1.4 DEMOGRAFI

A. Perkembangan Jumlah Penduduk

Perkembangan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga komponen demografi yaitu kelahiran (*birth*), kematian (*death*) dan perpindahan penduduk (*migration*). Hasil proyeksi Penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Palu Tahun 2023 mencapai 381.572 jiwa. Penduduk Kota Palu Tahun 2023 menyebar pada 8 (delapan) Kecamatan, 46 (empat puluh enam) Kelurahan, dan 127.712 Rumah Tangga (RT). Laju pertumbuhan penduduk Kota Palu tertinggi pada Tahun 2022 mencapai 1,27%. Tingkat pertumbuhan dan sebaran penduduk Kota Palu menurut kecamatan, kelurahan, dan rumah tangga serta tingkat kepadatan penduduk secara rinci diuraikan dalam Tabel 2.35.

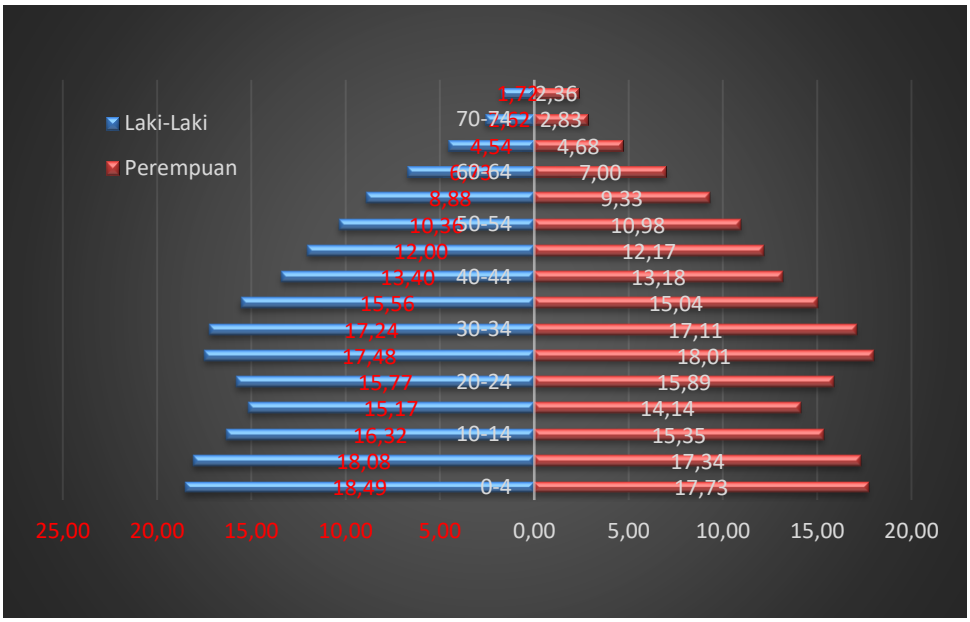
Tabel 2.35
Tingkat Pertumbuhan dan Sebaran Penduduk Kota Palu Menurut Kecamatan, Kelurahan, dan Rumah Tangga
Tahun 2019-2023

Kecamatan		Jumlah/Total			Rata-rata penduduk		Laju Pertumbuhan (%)
		Penduduk (jiwa)	Kelurahan	Rumah Tangga	PerKelurahan	Per Rumah Tangga	
Palu Barat		47.118	6	15.948	7.853	3	0,43
Tatanga		55.093	6	17.529	9.182	3	1,51
Ulujadi		36.796	6	11.769	6.133	3	1,57
Palu selatan		74.481	5	24.219	14.896	3	1,05
Palu Timur		44.021	5	15.441	8.804	3	0,48
Mantikulore		81.032	8	27.133	10.129	3	1,77
Palu Utara		25.431	5	8.122	5.086	3	1,25
Tawaeli		23.521	5	7.551	4.704	3	1,33
KotaPalu	**2023**	**387.493**	**46**	**127.712**	**8.424**	**3**	
	2022	381.572	46	122.739	8.225	3	1,27
	2021	377.030	46	121.290	8.053	3	1,22
	2020	373.218	46	24.669	8.113	3	1,05
	2019	391.383	46	23.895	8.508	3	0,47

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

B. Komposisi Umur Penduduk

Komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 26,66 persen penduduk usia kurang dari 15 tahun, 68,50 persen penduduk merupakan usia penduduk produktif berumur 15-64 tahun dan terdapat 4,84 persen penduduk berada pada kelompok umur 65 tahun ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu berada pada kelompok penduduk usia muda. Jumlah penduduk Kota Palu menurut kelompok umur secara rinci disajikan dalam Gambar 2.15 dan Tabel 2.36.



Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.15
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2023

Tabel 2.36
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Palu Tahun 2023

Kelompok umur	Jenis kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	18,49	17,73	36,22
5 - 9	18,08	17,34	35,42
10 - 14	16,32	15,35	31,68
15 - 19	15,17	14,14	29,31
20 - 24	15,77	15,89	31,66
25 - 29	17,48	18,01	35,49
30 - 34	17,24	17,11	34,35
35 - 39	15,56	15,04	30,60
40 - 44	13,40	13,18	26,58
45 - 49	12,00	12,17	24,17
50 - 54	10,36	10,98	21,34
55 - 59	8,88	9,33	18,21
60 - 64	6,73	7,00	13,73
65-69	4,54	4,68	9,21
70-74	2,62	2,83	5,45
75+	1,72	2,36	4,08
TOTAL	**194,34**	**193,15**	**387,49**

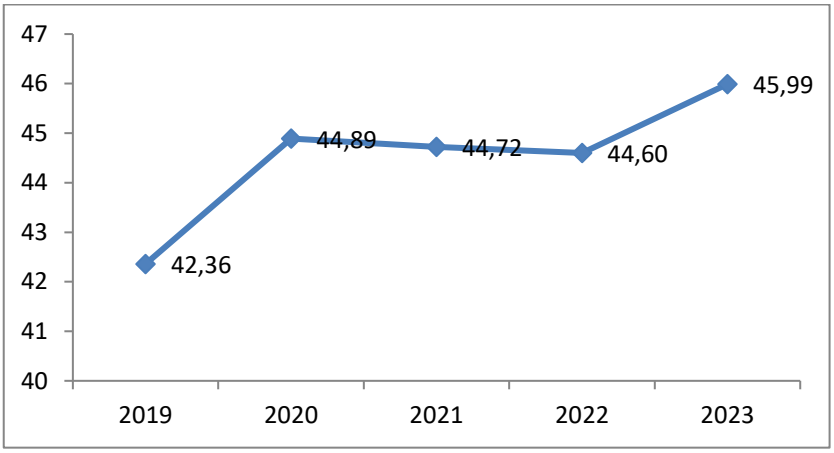
Sumber Data : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.36 memperlihatkan bahwa komposisi atau struktur umur penduduk Kota Palu pada Tahun 2023 untuk kelompok umur di bawah 15 tahun sebesar 103.310 jiwa atau 26,66 %, kelompok umur 15-64 tahun (usia penduduk produktif) sebesar 265.443 jiwa atau 68,50 %, dan kelompok umur 65 tahun ke atas sebesar 18.750 jiwa atau 4,84 %. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kota Palu didominasi oleh kelompok usia penduduk produktif yang signifikan.

Dengan melihat perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif sebanyak 122.060 jiwa atau 31,50 % dengan penduduk usia produktif sebanyak 265.433 jiwa atau 68,50 %, dapat diketahui bahwa besarnya rasio ketergantungan Kota Palu pada Tahun 2023 yaitu sebesar 45,99 %, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sebanyak kurang lebih 46 orang penduduk usia tidak produktif (0-14) tahun dan 65 tahun keatas.

Memperhatikan perbandingan jumlah penduduk yang berusia non produktif dengan penduduk usia produktif dapat diketahui besarnya angka ketergantungan. Selama kurun waktu empat tahun terakhir angka ketergantungan (rasio ketergantungan) di Kota Palu masih berkisar 45 dan 46 penduduk usia non produktif ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif.

Pada Tahun 2020 sampai dengan 2022 rasio ketergantungan di Kota Palu sebesar 44,89 sampai dengan 44,60 yang bermakna terdapat 45 penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 100 usia produktif, dan pada Tahun 2023 rasio ketergantungan ini naik menjadi 45,99 yang bermakna masih sekitar 46 penduduk usia tidak produktif ditanggung oleh 100 usia produktif. Perkembangan rasio ketergantungan di Kota Palu Tahun 2019- 2023 tertera dalam Gambar 2.16 berikut:



Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024 diolah

Gambar 2.16
Rasio Ketergantungan Penduduk di Kota Palu
Tahun 2019– 2023

C. Kepadatan Penduduk

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, tingkat kepadatan penduduk Kota Palu selama empat tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pasca Gempa Bumi di Kota Palu Tahun 2019 tingkat kepadatan penduduk Kota Palu turun hingga 940 jiwa/km2 dari tahun sebelumnya sebesar 976 jiwa/km2. Tahun 2020 sampai dengan 2023 terus mengalami kenaikan hingga mencapai 981 jiwa/km2.

Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Palu Timur dengan tingkat kepadatan 5.710 jiwa/km2, sementara Kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Mantikulore dengan kepadatan sebesar 392 jiwa/km2. Gambaran yang lebih rinci mengenai luas wilayah, kepadatan penduduk, dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan di lKota Palu Tahun 2019-2023 diuraikan dalam Tabel 2.37.

Tabel 2.37
Luas Wilayah, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kota Palu Tahun 2019-2023

Kecamatan		Luas Area (Km²)	Kepadatan Penduduk (per km²)	Rasio Jenis Kelamin
Palu Barat		8,28	5.691	101
Tatanga		14,95	3.685	104
Ulujadi		40,25	914	108
Palu selatan		27,38	2.720	99
Palu Timur		7,71	5.710	97
Mantikulore		206,8	392	97
Palu Utara		29,94	849	104
Tawaeli		59,75	394	106
Kota Palu	**2023**	**395,06**	**981**	**101**
	2022	395,06	966	100,28
	2021	395,06	954	100,6
	2020	395,06	944,71	100,9
	2019	395,06	940	101,43

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Untuk memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

2.2.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat diperlukan tingkat Pertumbuhan ekonomi tinggi yang diikuti dengan pemerataan ekonomi. Pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika pertumbuhan ekonomi yang dicapaai dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu perekonomian merupakan kontribusi dari setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian. Perkembangan perekonomian biasanya akan diikuti oleh perubahan struktur ekonomi. Dalam setiap periode kepeminpinan pemerintahan daerah, kebijakan pembangunan yang diambil akan mempengaruhi perkembangan setiap sektor/lapangan usaha dalam perekonomian.

Perkembangan harga-harga kebutuhan masyarakat ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi suatu daerah tidak terlepas dari kebijakan moneter dan fiskal yang diambil oleh pemerintah. Namun demikian pemerintah daerah dapat mengintervensi melalui ketersediaan bahan kebutuhan masyarakat serta distribusi barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok di daerah. Tekanan inflasi di suatu daerah akan memperburuk kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah dan lebih jauh akan menimbulkan keresahan dalam masyarakat jika pendapatan masyarakat di daerah tersebut tidak terdistribusi dengan merata. Oleh karena itu tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat ikut memengaruhi capaian kesejahteraan masyarakat.

1). Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto

Untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro, indikator yang umum digunakan adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) cara penilaian/pencatatan PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan pembangunan ekonomi, angka PDRB juga digunakan untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Ada beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) untuk mengetahui struktur perekonomian; (3) untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi, berdasarkan perubahan harga produsen.

Secara umum, kondisi perekonomian Kota Palu dapat tetap tumbuh di tengah perekonomian global yang belum stabil. Ketahanan ekonomi tersebut tergambar melalui pertumbuhan pada sektor produksi (supply side), maupun melalui pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (demand side). Pada sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terdapat pada kategori Konstruksi Tahun 2023 tumbuh 17,75 %, sedangkan karakteristik pertumbuhan pada sisi permintaan akhir tetap pada ciri khasnya yaitu didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang membentuk separuh lebih dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu sebesar 58,83 %.

Dari sisi produksi (supply side) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir digambarkan melalui peranan sektor ekonomi terhadap PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-

2023 seperti terlihat pada Tabel 2.38 berikut ini:

Tabel 2.38
Peranan Sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2019-2023 (Persen)

Lapangan Usaha		2019	2020	2021*	2022*	2023**
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan (A)	3,89	4,04	3,83	3,88	3,87
2.	Pertambangan dan Penggalian (B)	7,23	6,03	6,07	6,37	7,25
3.	Industri Pengolahan (C)	6,28	6,59	6,49	6,31	5,96
4.	Pengadaan Listrik dan Gas (D)	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
5.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (E)	0,27	0,29	0,30	0,29	0,28
6.	Konstruksi (F)	18,50	19,39	19,30	18,17	17,75
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor (G)	9,93	9,84	10,45	11,23	11,42
8.	Transportasi dan Pergudangan (H)	9,62	6,45	6,57	7,90	8,52
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (I)	0,95	0,87	0,95	0,98	1,00
10.	Informasi dan Komunikasi (J)	9,14	9,97	9,89	9,59	9,37
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi (K)	5,19	5,77	5,94	5,85	5,66
12.	Real Estate (L)	2,27	2,39	2,36	2,39	2,52
.13.	Jasa Perusahaan (M,N)	1,12	1,14	1,10	1,11	1,13
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (O)	13,77	14,77	14,53	14,11	13,53
15.	Jasa Pendidikan (P)	7,71	7,92	7,57	7,21	7,07
.16.	Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial (Q)	3,08	3,45	3,59	3,55	3,61
17.	Jasa lainnya (R,S,T,U)	0,93	0,96	0,93	0,92	0,93
	PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Tabel di atas di antaranya memperlihatkan bahwa dominasi pertumbuhan terbesar Tahun 2023 tetap dan terus terjadi pada

sektor Konstruksi sebesar 17,75 %, disusul oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,53 %, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor sebesar 11,42 %.

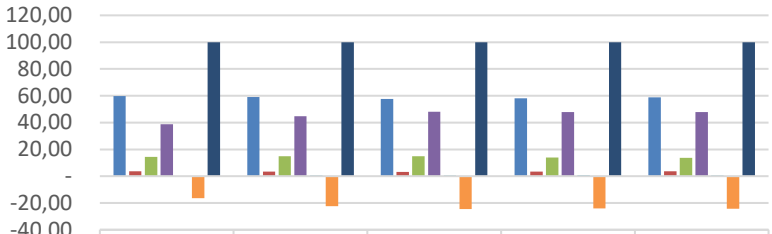
Peningkatan PDRB dari sisi nilai tambah, tentu diikuti oleh peningkatan pada sisi permintaan akhir atau pengeluaran PDRB (demand side). Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2019-2023, PDRB Kota Palu ADHB menurut Jenis Pengeluaran dapat ditunjukkan melalui Tabel 2.39 berikut ini:

Tabel 2.39
Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran
Tahun 2019-2023 (Juta Rp)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.978,21	14.266,24	15.102,65	16.527,28	18.113,00
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	905,19	798,38	836,30	968,21	1.103,66
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.589,81	3.596,88	3.880,36	3.954,03	4.212,81
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	9.702,71	10.781,08	12.588,35	13.613,69	14.706,93
5. Perubahan Inventori	-60,49	137,83	161,74	230,59	167,43
6. Net Ekspor Impor Barang dan Jasa	-4.082,37	-5.414,52	-6.398,75	-6.848,65	-7.516,59
Produk Domestik Regional Bruto	25.033,06	24.165,89	26.170,65	28.445,14	30.787,24

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palu Tahun 2019-2023

Tabel di atas menunjukkan nilai kenaikan PDRB Kota Palu ADHB khususnya pada 2 (dua) tahun terakhir terhadap hasil yang dicapai dari tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 2.274,49 (juta rupiah) di Tahun 2022, dan naik lagi sebesar 2.342,10 (juta rupiah) di Tahun 2023.



	2019	2020	2021	2022	2023
Komsumsi Rumah Tangga	59,83	59,03	57,71	58,10	58,83
Kons. LNPRT	3,62	3,30	3,20	3,40	3,58
Komsumsi Pemerintah	14,34	14,88	14,83	13,90	13,68
Pembentukan Modal Tetap Bruto	38,76	44,61	48,10	47,86	47,77
Perubahan Inventor	-0,24	0,57	0,62	0,81	0,54
Net Ekspor	-16,31	-22,41	-24,45	-24,08	-24,41
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palu Tahun 2019-2023

Gambar 2.17
Produk Domestik Regional Bruto Kota Palu ADHB
Menurut Jenis Pengeluaran Tahun 2019-2023 (persen)

Pada sisi permintaan akhir, didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang membentuk separuh lebih dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu sebesar 58,83 %, disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 47,77 %, dan selanjutnya oleh Konsumsi Pemerintah sebesar 13,68 % seperti terlihat pada Gambar 2.17 di atas.

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut jenis pengeluaran juga dinilai dengan ADHK Tahun 2010, atau atas dasar harga berbagai produk yang dievaluasi dengan harga pada Tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan itu maka PDRB untuk masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut jenis pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil.

Utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Secara tahunan, pertumbuhan Tahun 2019 sampai dengan 2023 secara berturut-turut yaitu 5,65 %; -4,43 %; 5,97 %; 4,32 %; dan 4,96 %.

Selama kurun waktu 2018-2023, gambaran tentang nilai PDRB ADHK dan pertumbuhan ekonomi Kota Palu terlihat pada tabel 2.40 berikut:

Tabel 2.40
PDRB Kota Palu ADHK Menurut Jenis Pengeluaran
Tahun 2019-2023 (juta rupiah)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.041,04	8.551,67	8.842,55	9.220,24	9.810,94
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	510,82	469,83	473,93	510,55	545,06
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2.250,67	2.112,10	2.221,24	2.236,24	2322,96
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.898,84	7.605,77	8.093,32	8.435,07	8.669,60
5. Perubahan Inventori	-15,15	81,79	92,28	125,57	84,98
6. Net Ekspor Impor Barang dan Jasa	-2.505,92	-3.358,25	-3.337,74	-3.434,86	-3.492,13
Produk Domestik Bruto	16.180,29	15.462,91	16.385,58	17.092,79	17.941,40

Sumber: PDRB Menurut Pengeluaran Kota Palu Tahun 2019-2023

Gambaran umum nilai PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan pada 2 (dua) tahun terakhir terhadap hasil yang dicapai dari tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 707,21 (juta rupiah) pada Tahun 2022, dan 848,61 (juta rupiah) pada Tahun 2023. Hal ini memberikan penjelasan bahwa terjadi kenaikan pada nilai pertumbuhan ekonomi Kota Palu Tahun Tahun 2023 sebesar 0,64 % dari tahun sebelumnya hingga mencapai 4,96 %.

Perkembangan beberapa indikator makro ekonomi Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Table 2.41 berikut:

Tabel 2.41
Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kota Palu Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun (Juta Rp)				
	2019	2020	2021	2022	2023
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (miliar Rp)	25.033,06	24.125,89	26.135,95	28.445,14	30.785,21
PDRB Atas Dasar Harga Konstan (miliar Rp)	16.180,29	15.462,91	16.385,58	17.092,79	17.941,40
Laju Pertumbuhan Ekonomi/LPE (persen)	5,65	(4,43)	5,97	4,32	4,96
PDRB Menurut Jenis Pengeluaran ADHB (miliarRp)	25.033,06	24.125,89	26.135,95	28.445,14	30.785,21

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.41 di atas memperlihatkan bahwa secara umum perkembangan indikator makro ekonomi Kota Palu periode 2019-2023 membaik. Pertumbuhan PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha dan Jenis Pengeluaran rata-rata tumbuh sebesar 5,44% per tahun, sedangkan PDRB ADHK dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) rata-rata tumbuh sebesar 2,70 % per tahun.

Pertumbuhan ekonomi Kota Palu 4 (empat) tahun terakhir mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2020 turun sebesar 10,08 % dari Tahun 2019 menjadi -4,43 %, Tahun 2021 naik sebesar 10,40 % dari Tahun 2020 menjadi 5,97 %, Tahun 2022 turun sebesar 1,65 % dari Tahun 2021 menjadi 4,32 %, dan Tahun 2023 naik sebesar 0,64 % dari Tahun 2022 menjadi 4,96 %.

Dibandingkan dengan 3 (tiga) kabupaten yang bertetangga langsung dengan Kota Palu yaitu Kabupaten Donggala, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan Kabupaten Sigi, rata-rata LPE Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir lebih tinggi yaitu sebesar 3,29 % per tahun diikuti oleh Kabupaten Sigi sebesar 2,90 % per tahun,

Kabupaten Donggala 2,67 % per tahun, dan Kabupaten Parigi Moutong sebesar 1,83 % per tahun. Sementara jika dibandingkan dengan rata-rata LPE Provinsi Sulawesi Tengah, rata-rata LPE Sulawesi Tengah umumnya lebih tinggi yaitu 10,50 % per tahun.

Tabel 2.42 di bawah ini memperlihatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo), dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023.

Tabel 2.42
Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, Kabupaten Sigi, dan Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

Tahun	Kota Palu	Kab. Donggala	Kab. Parimo	Kab. Sigi	Sulawesi Tengah
2019	**5,65**	4,45	2,21	3,64	8,83
2020	**(4,43)**	(4,26)	(4,95)	(1,50)	4,86
2021	**5,97**	4,64	4,67	5,64	11,70
2022	**4,32**	3,86	3,71	3,33	15,22
2023	**4,96**	4,68	3,50	3,37	11,91

Sumber: BPS, Sulawesi Tengah Dalam Angka, Tahun 2024

2). Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi menunjukan kontribusi dari masing-masing lapangan usaha terhadap Total PDRB yang menunjang ekonomi Kota Palu. Sepuluh lapangan usaha yang memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kota Palu pada Tahun 2023 secara konstan berturut-turut: Pertambangan dan Penggalian (17,98 %); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,18 %); Transportasi dan Pergudangan (9,08 %); Real Estate (7,47 %); Pengadaan Listrik dan Gas (7,09%); Jasa lainnya (6,15 %); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

(6,1 %); Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (6,09 %); Informasi dan Komunikasi (5,82 %); dan Jasa Perusahaan (5,78 %).

Secara keseluruhan tujuh belas lapangan usaha terjadi peningkatan kontribusi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.43 sampai dengan 2.46 berikut ini:

Tabel 2.43
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
(Miliar Rupiah) Tahun 2019 -2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	973,76	974,15	1.001,66	1.102,81	1.189,89
B	Pertambangan dan Penggalian	1.809,67	1.454,04	1.587,27	1.812,29	2.230,43
C	Industri Pengolahan	1.571,54	1.588,93	1.695,98	1.795,79	1.835,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	31,28	31,65	33,82	37,72	41,13
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	68,15	70,86	77,29	82,40	85,40
F	Konstruksi	4.631,14	4.679,05	5.045,06	5.169,76	5.465,27
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.485,64	2.374,67	2.732,33	3.193,09	3.515,10
H	Transportasi dan Pergudangan	2.407,80	1.556,08	1.717,23	2.247,61	2.623,74
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	237,58	210,95	248,75	277,39	308,58
J	Informasi dan Komunikasi	2.288,77	2.405,36	2.584,28	2.728,53	2.884,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.299,04	1.390,91	1.552,98	1.664,18	1.743,56
L	Real Estate	568,69	576,89	616,33	678,66	776,23
M	Jasa Perusahaan	279,26	275,32	288,15	315,62	347,17
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.447,84	3.563,72	3.796,79	4.014,43	4.165,93
O	Jasa Pendidikan	1.929,05	1.909,81	1.978,53	2.052,20	2.176,52
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	771,76	832,90	937,30	1.010,37	1.111,85
Q	Jasa lainnya	232,08	230,61	242,23	262,30	284,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**25.033,06**	**24.125,89**	**26.135,95**	**28.445,14**	**30.785,21**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**25.033,06**	**24.125,89**	**26.135,95**	**28.445,14**	**30.785,21**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.44
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	670,10	659,80	665,49	683,94	696,74
B	Pertambangan dan Penggalian	1.166,94	923,84	990,32	1.050,94	1.239,91
C	Industri Pengolahan	1.149,78	1.131,20	1.168,59	1.207,26	1.229,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas	31,42	31,75	33,38	36,66	39,26
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	49,00	48,57	50,92	52,59	53,96
F	Konstruksi	2.715,28	2.655,14	2.780,65	2.839,83	2887,56
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.588,90	1.488,64	1.675,81	1.828,39	1.939,85
H	Transportasi dan Pergudangan	1.420,45	910,37	990,82	1.144,11	1.247,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	148,31	127,80	148,08	163,72	178,76
J	Informasi dan Komunikasi	1.755,68	1.900,37	2.016,54	2.109,97	2.232,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	897,41	962,38	1.054,56	1.052,30	1.081,61
L	Real Estate	387,98	388,79	402,68	433,47	465,86
M	Jasa Perusahaan	188,65	182,87	187,89	199,10	210,59
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.138,07	2.169,96	2.273,12	2.301,38	2.342,27
O	Jasa Pendidikan	1.201,43	1.174,43	1.196,09	1.207,98	1.226,26
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	514,52	552,66	591,51	613,04	650,39
Q	Jasa lainnya	156,36	154,34	159,14	168,12	178,46
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**16.180,29**	**15.462,91**	**16.385,58**	**17.092,79**	**17.941,40**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**16.180,29**	**15.462,91**	**16.385,58**	**17.092,79**	**17.941,40**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka 2024

Tabel 2.45
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
1	2	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0.94	(0,86)	0.04	(1,54)	2.82	0,86	10,10	2,77	7,90	1,87
B	Pertambangan dan Penggalian	24.58	14,98	(19.65)	(20,83)	9.16	7,20	14,18	6,12	23,07	17,98
C	Industri Pengolahan	0.63	(0,57)	1.11	(1,62)	6.74	3,31	5,89	3,31	2,19	1,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.52	2,10	1.18	1,04	6.86	5,13	11,53	9,84	9,04	7,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(0.79)	(0,22)	3.98	(0,90)	9.07	4,86	6,61	3,27	3,64	2,59
F	Konstruksi	24.35	22,51	1.03	(2,21)	7.82	4,73	2,47	2,13	5,72	1,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.61	(0,40)	(4.46)	(6,31)	15.06	12,57	16,86	9,10	10,08	6,10
H	Transportasi dan Pergudangan	7.14	(1,81)	(35.37)	(35,91)	10.36	8,84	30,89	15,47	16,73	9,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(4.40)	(10,56)	(11.21)	(13,83)	17.92	15,88	11,51	10,56	11,24	9,18
J	Informasi dan Komunikasi	14.76	9,87	5.09	8,24	7.44	6,11	5,58	4,63	5,72	5,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	(1.87)	(4,82)	7.07	7,24	11.65	9,58	7,16	(0,21)	4,77	2,79
L	Real Estate	0.48	(3,20)	1.44	0,21	6.84	3,57	10,11	7,65	14,38	7,47
M	Jasa Perusahaan	5.80	5,05	(1.41)	(3,07)	4.66	2,75	9,53	5,96	10,00	5,78
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.39	4,03	3.36	1,49	6.54	4,75	5,73	1,24	3,77	1,78
O	Jasa Pendidikan	5.46	3,18	(1.00)	(2,25)	3.60	1,84	3,72	0,99	6,06	4,82
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.92	9,42	7.92	7,41	12.53	7,03	7,80	3,64	10,04	6,09
Q	Jasa lainnya	5.92	2,26	(0.63)	(1,29)	5.04	3,11	8,29	5,64	8,57	6,15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**10.15**	**5,65**	**(3.62)**	**(4,43)**	**8.32**	**5,97**	**8,84**	**4,32**	**8,23**	**4,96**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**10.15**	**5,65**	**(3.62)**	**(4,43)**	**8.32**	**5,97**	**8,84**	**4,32**	**8,23**	**4,96**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 2.46
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (2010) Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2019 -2023

No	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
1	2	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	3,89	4,14	4,04	4,27	3,83	4,06	3,88	4,00	3,87	3,88
B	Pertambangan dan Penggalian	7,23	7,21	6,03	5,97	6,07	6,04	6,37	6,15	7,25	6,91
C	Industri Pengolahan	6,28	7,11	6,59	7,32	6,49	7,13	6,31	7,06	5,96	6,85
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,19	0,13	0,21	0,13	0,20	0,13	0,21	0,13	0,22
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,30	0,29	0,31	0,3	0,31	0,29	0,31	0,28	0,30
F	Konstruksi	18,50	16,78	19,39	17,17	19,30	16,97	18,17	16,61	17,75	16,09
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,93	9,82	9,84	9,63	10,45	10,23	11,23	10,70	11,42	10,81
H	Transportasi dan Pergudangan	9,62	8,78	6,45	5,89	6,57	6,05	7,90	6,69	8,52	6,96
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,92	0,87	0,83	0,95	0,90	0,98	0,96	1,00	1,00
J	Informasi dan Komunikasi	9,14	10,85	9,97	12,29	9,89	12,31	9,59	12,34	9,37	12,45
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,19	5,55	5,77	6,22	5,94	6,44	5,85	6,16	5,66	6,03
L	Real Estate	2,27	2,40	2,39	2,51	2,36	2,46	2,39	2,54	2,52	2,60
M	Jasa Perusahaan	1,12	1,17	1,14	1,18	1,10	1,15	1,11	1,16	1,13	1,17
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,77	13,21	14,77	14,03	14,53	13,87	14,11	13,46	13,53	13,06
O	Jasa Pendidikan	7,71	7,43	7,92	7,60	7,57	7,30	7,21	7,07	7,07	6,83
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,08	3,18	3,45	3,57	3,59	3,61	3,55	3,59	3,61	3,63
Q	Jasa lainnya	0,93	0,97	0,96	1,00	0,93	0,97	0,92	0,98	0,93	0,99
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

3). Inflasi

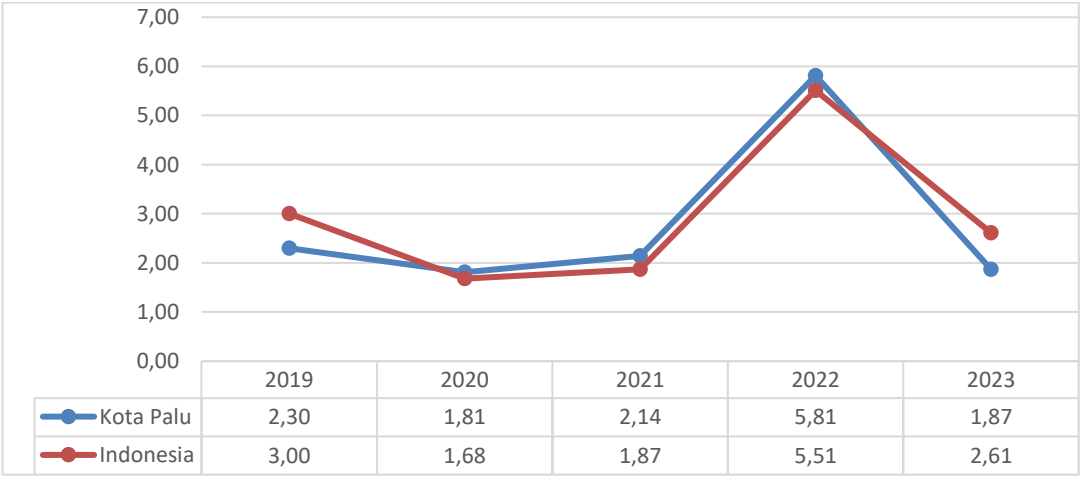
Inflasi Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir cukup fluktuatif. Inflasi paling tinggi terjadi pada Tahun 2022 sebesar 5,81 % dan inflasi paling rendah terjadi Tahun 2020 sebesar 1,81 %. Rata-rata inflasi Kota Palu selama lima tahun terakhir yaitu sebesar 2,79 % lebih kecil 0,14% dari rata-rata inflasi Indonesia yaitu sebesar 2,93 %. Rata-rata Inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2019-2023 terlihat pada Tabel 2.47 di bawah ini:

Tabel 2.47
Rata-rata Inflasi Kota Palu (%)
Tahun 2019-2023

Inflasi	Tahun					Rata-rata Inflasi
	2019	2020	2021	2022	2023	
Kota Palu	**2,30**	**1,81**	**2,14**	**5,81**	**1,87**	**2,79**
Indonesia	3,00	1,68	1,87	5,51	2,61	2,93

Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024 diolah

Secara grafik Inflasi diperlihatkan dalam gambar inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2019-2023 berikut ini:



Sumber: BPS, Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.18
Inflasi Kota Palu Tahun 2019-2023

Penyumbang inflasi terbesar di Kota Palu pada Tahun 2023 adalah sektor Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau (0,49%); Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya (0,21%); Tansportasi (0,15%); Umum (0,13%); Penyediaan Makanan dan Minuman/Restaurant (0,10%); Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan (0,04%); Rekreasi, Olahraga dan Budaya (0,03%); Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga (0,02%); Kesehatan (0,00%); Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah tangga (-0,17%) sementara sektor Pakaian dan Alas Kaki berkontribusi paling kecil sebesar (-0,19%). Perkembangan inflasi Kota Palu menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2023 tertera dalam tabel 2.48 sebagai berikut:

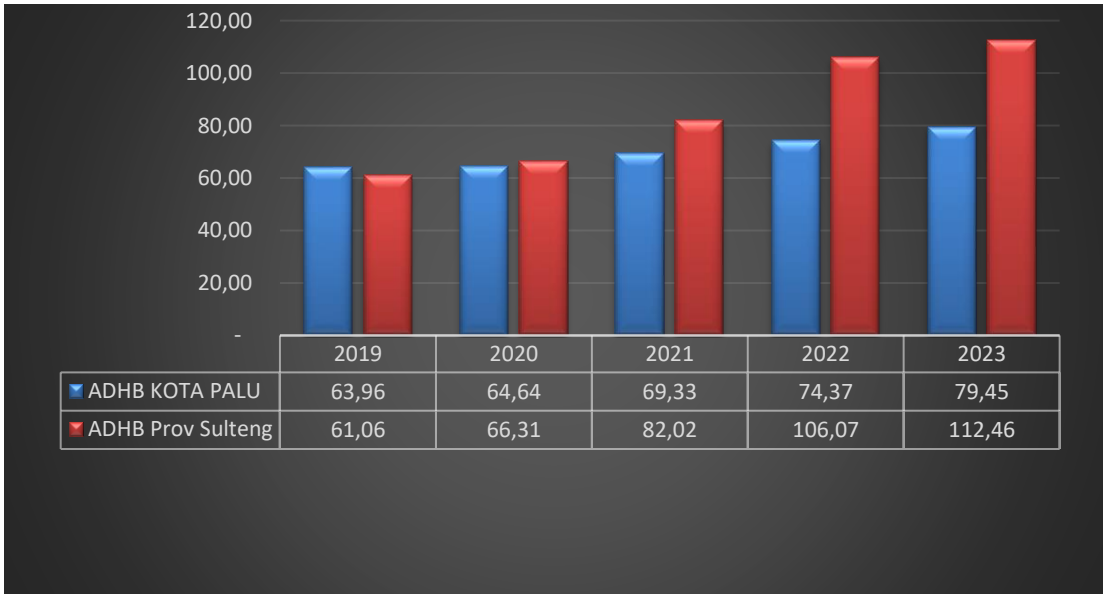
Tabel 2.48
Perkembangan Inflasi Kota Palu menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2023

No	Kelompok Pengeluaran	Desember 2023
1.	Umum	0,13
2.	Penyediaan Makanan dan Minuman/Restaurant	0,10
3.	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	0,49
4.	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah tangga	-0,17
5.	Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,02
6.	Pakaian dan Alas Kaki	-0,19
7.	Kesehatan	0,00
8.	Pendidikan	-
9.	Tansportasi	0,15
10.	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0,04
11.	Rekreasi, Olahraga dan Budaya	0,03
12.	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,21

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

4). PDRB per Kapita

Perkembangan PDRB per kapita baik menurut harga berlaku maupun menurut harga konstan Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada periode Tahun 2019-2023 laju peningkatan PDRB per kapita menurut harga berlaku lebih tinggi dari laju peningkatan PDRB per kapita menurut harga konstan. Melambatnya laju peningkatan PDRB per kapita menurut harga konstan seiring dengan meningkatnya laju inflasi Kota Palu khususnya Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya, Tansportasi serta beberapa sektor lainnya menurut kelompok pengeluaran.



	2019	2020	2021	2022	2023
ADHB KOTA PALU	63,96	64,64	69,33	74,37	79,45
ADHB Prov Sulteng	61,06	66,31	82,02	106,07	112,46

Sumber: Kota Palu Dalam Angka dan Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2024 diolah

Gambar 2.19
PDRB Per kapita Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah (Juta Rupiah) Tahun 2019 – 2023

Apabila dibandingkan PRDB per kapita Kota Palu dengan Provinsi Sulawesi Tengah pada jangka waktu tiga tahun terakhir, terlihat bahwa PDRB per kapita Kota Palu lebih rendah dibandingkan dengan PDRB per kapita Sulawesi Tengah.

5). Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

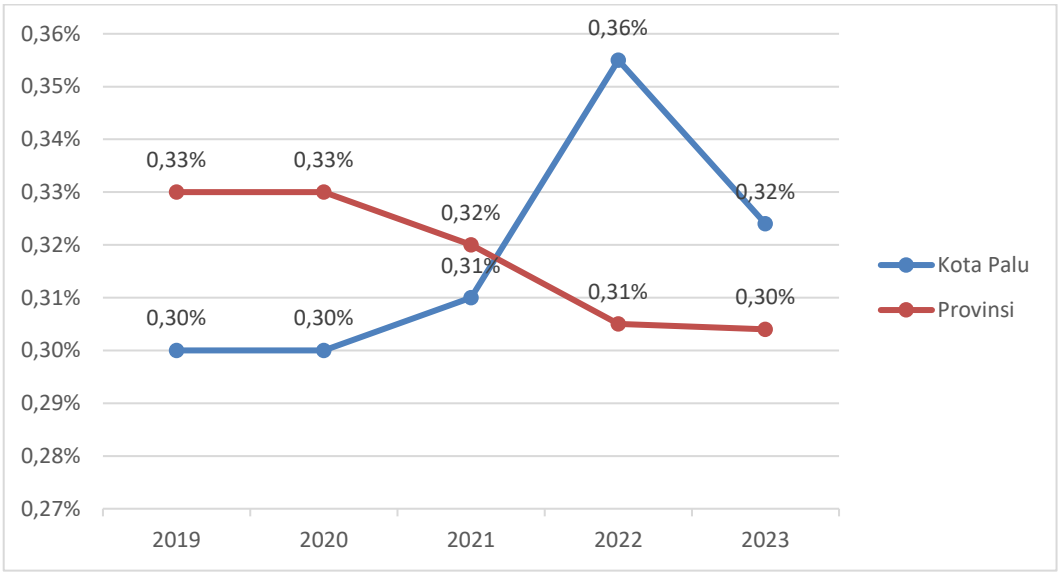
Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Tetapi pengalaman pembangunan diberbagai negara menunjukan bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia perlu memperhatikan dua aspek yakni pemerataan distribusi pendapatan dan alokasi belanja publik yang memadai untuk pendidikan dan kesehatan (UNDP, BPS, Bappenas, 2004).

Koefisien Gini (*Gini Ratio*) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Ukuran kesenjangan Indeks Gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai 0 (nol) pada indeks gini menunjukkan tingkat pemerataan yang sempurna, dan semakin besar nilai Gini maka semakin tidak sempurna tingkat pemerataan pendapatan atau semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 (nol) artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu) berarti ketimpangan sempurna.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 (lampiran I) menerangkan angka pada perhitungan rasio gini memiliki arti sebagai berikut:

- Ketimpangan rendah bila gini ratio $< 0{,}3$
- Ketimpangan sedang bila gini ratio antara $0{,}3 \leq G \leq 0{,}5$
- Ketimpangan tinggi bila gini ratio $> 0{,}5$

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah:



Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.20
Angka Gini Rasio Kota Palu Tahun 2019-2023

Berdasarkan Gambar 2.20 di atas, Indeks gini Kota Palu apabila diperbandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu lima tahun terakhir diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini dengan rata-rata 0,31% per tahun, begitu juga indeks gini di Provinsi Sulawesi Tengah dengan rata-rata pertumbuhan yang sama per tahun.

Meskipun rata-rata pertumbuhan indeks gini Kota Palu sedikit menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya namun tetap perlu mendapat perhatian karena rata-rata pertumbuhannya hanya turun sebesar 0,01% dari Tahun 2022 sebesar 0,32%. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Palu belum optimal dalam memberikan dukungan terhadap pencapaian pemerataan pendapatan masyarakatnya. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala

meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

6). Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Tingkat kesenjangan distribusi pendapatan juga dapat diukur dengan kriteria Bank Dunia. Pola pengukuran distribusi pendapatan Bank Dunia membagi jumlah populasi penduduk ke dalam tiga kelompok, yaitu 40 persen kelompok masyarakat berpendapatan terendah, 40 persen kelompok masyarakat berpendapatan menengah, dan 20 persen kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi. Kelompok yang 20 persen tertinggi umumnya dikatakan sebagai kelompok terkaya, sedangkan kelompok yang 40 persen terendah umumnya digolongkan kepada kelompok termiskin dan kelompok lainnya dimasukkan dalam kelompok menengah. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia secara rinci disajikan dalam Tabel 2.49.

Tabel 2.49
Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia untuk Kota Palu

Tahun	Kriteria Bank Dunia (%)		
	40% Bawah	40% Mengengah	20% Atas
2016	15,85	38,9	45,25
2017	15,3	39,2	45,5
2018	25	39,4	45,6
2019	29,58	39,7	45,8
2020	16,75	39,8	43,35

Sumber: BPS,Kota Palu Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.49 menunjukan bahwa selama tiga tahun terakhir, 40% penduduk kalangan bawah menikmati pendapatan sebesar lebih dari 15 % dari total pendapatan. Dengan demikian, Kota Palu berada pada ketimpangan sedang.

7). Persentase Penduduk di atas Garis Kemiskinan

Persentase penduduk di atas garis kemiskinan di Kota Palu mengalami pelambanan peningkatan disebabkan oleh penanganannya yang masih dilakukan secara parsial, yakni belum dalam satu alur rencana dan tindak yang terpadu. Hal ini berdampak pada pencapaian beberapa indikator kemiskinan yang masih terus membutuhkan kerja yang lebih keras lagi agar dapat mewujudkan *trend* kinerja yang lebih positif dan berkualitas. Startegi yang disusun atau yang direncanakan untuk penanggulangan kemiskinan secara menyeluruh diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat sasaran dengan sumberdaya yang terukur, melalui prinsip tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu penanganan. Adapun kinerja penanggulangan kemiskinan di Kota Palu, dari Tahun 2019-2023, dapat dilihat pada Tabel 2.50.

Tabel. 2.50
Kinerja Penangulangan Kemiskinan di Kota Palu
Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah penduduk miskin (org)	26.620	26.890	28.600	26.750	25.420
2	Persentase orang miskin (%)	6,83	6,80	7,17	6,63	6,56
3	Indeks kedalaman kemiskinan (P1)(%)	0,99	0,97	0,86	0,94	0,84
4	Indeks keparahan kemskinan (P2) (%)	0,22	0,22	0,20	0,25	0,19
5	Jumlah penerima Jamkesmas/jamkesda (jiwa)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6	Jumlah Kemiskian Ekstrem (ribu jiwa)	n/a	n/a	3,61	6,57	2,38

7	Tingkat Kemiskina Ekstrem (%)	n/a	n/a	0,90	1,63	0,58
8	Garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan))	522.444	559.246	571.605	604.280	632.261
9	Penduduk di bawah garis kemiskinan (jiwa)	26.620	26.890	28.600	26.750	25.420
10	Beras untuk penduduk miskin	12.478	12.478	12.478	12.478	12.478

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Table 2.50 di atas menunjukkan bahwa terjadi *trend* atau rata-rata pertumbuhan jumlah penduduk miskin setiap tahun dalam lima tahun terakhir sebesar -1,02 % per tahun sedangkan *trend* pertumbuhan persentase penduduk miskin sebesar -0,90 % per tahun. Untuk *trend* pertumbuhan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar -3,67 % per tahun dan Indeks Keparahan Kemiskinan juga sebesar -2,02 % per tahun.

Pertumbuhan penduduk miskin di Kota Palu 5 (lima) tahun terakhir sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023 mengalami fluktuasi secara jumlah, dan persentase penduduk miskin serta indeks kedalaman, dan indeks keparahan kemiskinan. Hal ini disebabkan karena terjadinya kesenjangan pertumbuhan jumlah penduduk miskin terhadap total jumlah penduduk Kota Palu yang kurang dibarengi dengan penanganan/penanggulangan kemiskinan secara optimal.

2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

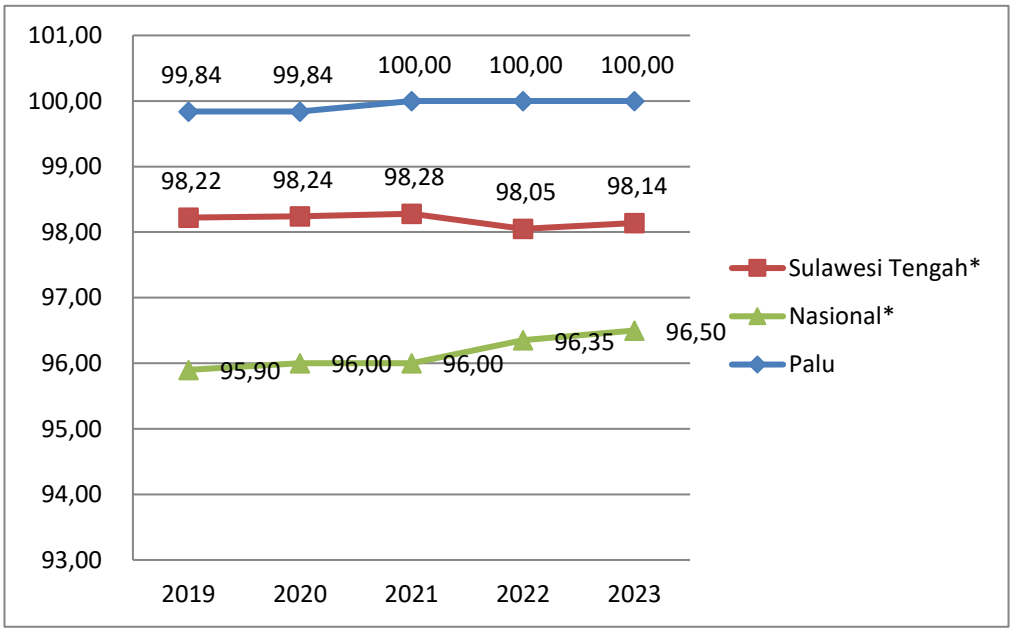
1) Aspek Pendidikan

a. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka melek huruf menunjukan kemampuan baca tulis penduduk di Kota Palu. Angka melek huruf Kota Palu terus meningkat dari Tahun 2019 hingga Tahun 2021 yaitu mencapai 100 % dan terus bertahan hingga Tahun 2023. Angka Melek Huruf Kota Palu mencapai angka yang maksimal jika dibandingkan dengan

AMH Sulawesi Tengah dan Nasional. Angka Melek Huruf menjadi tujuan penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah, dan telah berhasil memenuhi harapan bahwa tidak ada lagi penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis.

Gambaran AMH Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dan Nasional tertera pada gambar 2.21 sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kota Palu Tahun 2024

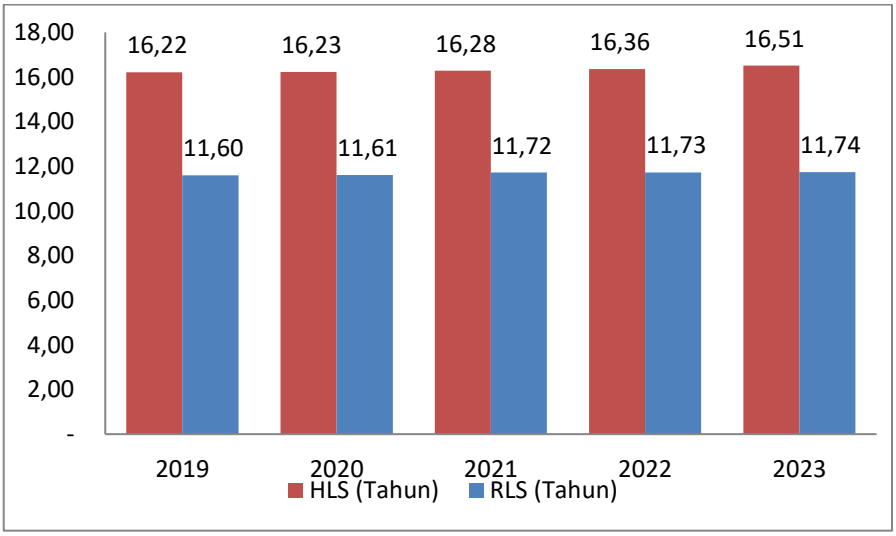
Gambar 2.21
Angka Melek Huruf Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional
Tahun 2019-2024

Gambaran AMH Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 secara rinci diuraikan dalam Gambar 2.21. AMH tertinggi Kota Palu terjadi pada Tahun 2021 dan 2022 sebesar 100 % dan terendah terjadi pada Tahun 2018 sebesar 99,68 %. AMH tertinggi Provinsi Sulawesi Tengah terjadi pada Tahun 2021 sebesar 98,28 % dan terendah terjadi pada 2019 sebesar 98,22 %. AMH tertinggi Nasional terjadi pada Tahun 2023 sebesar 96,50 % dan terendah terjadi pada Tahun 2019 sebesar 95,70 %.

Gambaran persentase AMH di atas menunjukkan bahwa program-program pemberantasan buta huruf di Kota Palu telah membuahkan hasil. Selain itu, peningkatan AMH juga membawa dampak baik bagi penduduk Kota Palu dalam menyerap informasi dari berbagai media sehingga diharapkan semua penduduk dapat berkontribusi dengan baik bagi pembangunan daerah.

b. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS)

Rata-rata lama sekolah menunjukan rata-rata lamanya setiap penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Berikut ini rata-rata lama sekolah penduduk Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera pada Gambar 2.22.



Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.22
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota PaluTahun 2019-2023

Selama kurun waktu lima tahun terakhir terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah masyarakat di Kota Palu. Tahun 2019 RLS mencapai 11,60 tahun, Tahun 2020 RLS naik menjadi 11,61

tahun. RLS tertinggi Kota Palu terjadi pada Tahun 2023 yaitu 11,74 tahun. Kenaikan angka rata-rata lama sekolah dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 membuktikan bahwa masyarakat Kota Palu terus konsisten dalam memberi perhatian yang lebih baik pada dunia pendidikan, sehingga waktu untuk mengenyam pendidikan di bangku sekolah semakin bertambah.

Indikator rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk Kota Palu yang terus meningkat dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kota Palu mampu menyelesiakan pendidikannya sampai kelas 3 (tiga) jenjang pendidikan SMA/MA/SMK.

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang terus meningkat dari tahun ke tahun pula membuktikan bahwa masyarakat Kota Palu juga terus memiliki harapan untuk bersekolah pada jenjang yang lebih baik lagi. Tahun 2022 HLS Kota Palu mencapai angka 16,36 tahun atau memiliki harapan bersekolah sampai lulus perguruan tinggi dengan kualifikasi pendidikan Strata Satu atau Sarjana S1.

c. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) dihitung berdasarkan jumlah penduduk dari berbagai usia yang sedang sekolah pada setiap jenjang pendidikan masing-masing. Adapun angka partisipasi kasar Kota Palu Tahun 2019-2023 secara rinci diuraikan dalam Tabel 2.51.

Tabel 2.51
APK SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/MK
Kota Palu (%) Tahun 2019-2023

Tahun	Kota Palu			Provinsi Sulawesi Tengah		
	SD/MI	SMP/ MTs	SMA/MA /SMK	SD/MI	SMP/ MTs	SMA/MA /SMK
2019	111	105	74,42	105,13	83,53	87,35
2020	104,81	91,85	111,55	92,50	78,81	74,94
2021	105,12	99,34	112,68	92,49	78,68	77,86
2022	105,25	96,40	104,17	n/a	n/a	n/a
2023	97,57	102,18	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber: BPS Kota Palu, dan BPS Sulawesi Tengah, Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kota Palu rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu empat tahun terakhir sejak Tahun 2019 hingga 2022.

Untuk jenjang pendidikan SD, APK SD/MI di Kota Palu rata-rata 104,75 % lebih tinggi 8,04 % dari rata-rata APK SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah. APK SMP/MTs Kota Palu dengan rata-rata 98,95 % lebih tinggi 18,61 % dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah, dan APK SMA/MA/SMK Kota Palu rata-rata 100,71 % lebih tinggi 20,66 % dari rata-rata Provinsi Sulawesi Tengah.

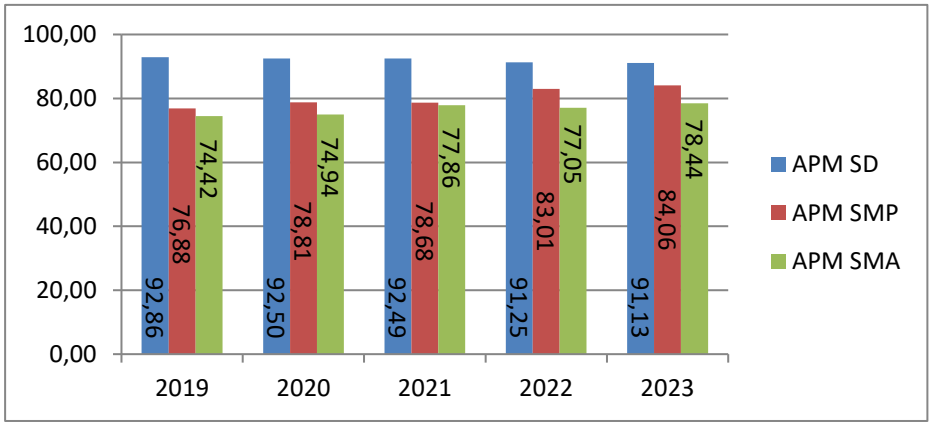
Kondisi rata-rata APK yang lebih tinggi di Kota Palu ini menunjukkan bahwa masih banyak murid/siswa di atas usia sekolah jenjang pendidikan SD/MI usia 7-12 Tahun, SMP/MTs usia 13-15 Tahun, dan SMA/MA/SMK usia 16-18 Tahun yang sedang bersekolah di Kota Palu.

Jumlah murid/siswa dari berbagai usia yang sedang bersekolah di Kota Palu yang lebih banyak jumlahnya dari jumlah usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan ini terjadi bukan karena banyaknya murid/siswa yang tinggal kelas atau tidak lulus tetapi diduga karena banyaknya murid/siswa yang berasal dari luar Kota Palu yang berusia di atas usia sekolah yang bersekolah di Kota Palu.

d. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka partisipasi murni menunjukan perbandingan jumlah usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar bersekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni merupakan indikator daya serap untuk mengetahui partisipasi penduduk kelompok usia pada jenjang pendidikan tertentu yang bersekolah sesuai jenjang pendidikan. Secara umum nilai APM akan selalu lebih rendah dari APK, karena nilai APK mencakup anak di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. Selisih antara APK dan APM menunjukkan proporsi siswa yang terlambat atau terlalu cepat bersekolah.

Perkembangan APM Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Gambar 2.23 berikut ini:



Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 2.23
Perkembangan APM SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK Kota Palu (%) Tahun 2019-2023

Gambar 2.23 menunjukan bahwa APM Kota Palu umumnya cenderung fluktuatif dari Tahun 2019 ke Tahun 2023. Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI pada Tahun 2019 sebesar 92,86% mengalami penurunan menjadi 92,49% pada Tahun 2021 dan turun lagi menjadi 91,25 pada Tahun 2022. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata tumbuh APM SD/MI adalah 0,43%. Angka Partisipasi Murni SMP/MTs pada Tahun 2020 sebesar 78,81% mengalami penurunan menjadi 78,68% pada Tahun 2021 dan kembali naik menjadi 83,21% pada Tahun 2022. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SMP/MTs adalah 1,86%. Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA pada Tahun 2020 sebesar 74,94% mengalami kenaikan menjadi 77,86% pada Tahun 2021 dan kembali turun menjadi 77,05% pada Tahun 2022. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, rata-rata kenaikan APM SMA/SMK/MA adalah 0,91%. Meskipun terdapat fluktuasi pada Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA namun secara keseluruhan perkembangan APM Kota Palu cenderung naik.

Perbandingan APM antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023 pada jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK terurai dalam Tabel 2.52.

Tabel 2.52
Perbandingan APM Kabupaten/ Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023

No.	Kabupaten/Kota	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA/SMK
1	Banggai Kepulauan	98,26	70,65	63,16
2	Banggai	91,85	72,02	60,32
3	Morowali	93,69	74,53	79,34
4	Poso	93,96	79,08	72,59
5	Donggala	93,21	79,78	57,08
6	ToliToli	90,36	67,33	67,14
7	Buol	97,48	77,21	63,14
8	Parigi Moutong	n/a	n/a	n/a
9	Tojo Una-Una	97,12	76,66	59,34
10	Sigi	94,09	73,70	53,84
11	Banggai Laut	96,45	71,90	63,29
12	Morowali Utara	93,46	79,70	72,65
13	**Kota Palu**	**91,13**	**84,06**	**78,44**
Sulawesi Tengah		**93,31**	**76,80**	**66,18**

Sumber: BPS (Kabupaten/Kota dan Provinsi) Dalam Angka Tahun 2024

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Kota Palu Tahun 2023 relatif rendah jika dibandingkan dengan Kabupaten dan Provinsi di Sulawesi masih. Terdapat 10 (sepuluh) kabupaten yang memiliki APM SD/MI lebih tinggi dibanding Kota Palu Tahun 2023 yaitu; Kabupaten Banggai Kepulauan (98,26%), Kabupaten Banggai (91,85%), Kabupaten Morowali (93,69%), Kabupaten Poso (93,96%), Kabupaten Donggala (93,21%), Kabupaten Buol (97,48%),

Kabupaten Tojo Una-Una (97,12%), Kabupaten Sigi (94,09%), Kabupaten Banggai Laut (96,45%),dan Kabupaten Morowali Utara (93,46%). Sementara APM SD/MI Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebesar 93,31%.

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs Kota Palu Tahun 2023 masih lebih tinggi dari beberapa kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah, bahkan di atas rata-rata APM Provinsi Sulawesi Tengah yaitu 84,06%. Demikian pula yang terjadi pada APM SMA/MA/SMK Kota Palu termasuk salah satu yang tertinggi dibandingkan kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu sebesar 78,44%. Hal ini dimungkinkan karena aksesibilitas penduduk usia sekolah SMP dan SMA di Kota Palu lebih baik dibandingkan kabupaten lainnya. Aksesibilitas yang dimaksudkan adalah ketersediaan sarana pendidikan SMP dan SMA yang lebih banyak serta kemampuan masyarakat dalam mendanai pendidikan anak lebih baik dari daerah lainnya. Selain aksesibilitas sarana pendidikan, faktor kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi pengembangan anak di masa akan datang sangat mempengaruhi tingginya APM pada tingkatan pendidikan SMP dan SMA.

2) Aspek Kesehatan

a. Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka Kematian Bayi (AKB) dihitung dari jumlah kematian bayi usia di bawah 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Tahun 2022 AKB Kota Palu turun 1,38 dari tahun sebelumnya yaitu 2,73 menjadi 1,35 per 1000 kelahiran hidup, sehingga hal ini perlu untuk terus secara kontinu melakukan peningkatan pelayanan kesehatan terhadap kelahiran hidup bayi. Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah

probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi).

Pertumbuhan AKHB Kota Palu dalam Periode 2019-2023 cenderung fluktuatif namun rata-rata tumbuhnya mengalami peningkatan 0,03% tiap tahunnya. Secara lebih rinci, AKHB dan AKB di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.53.

Tabel 2.53
AKHB dan AKB Kota Palu (Per 1000 Kelahiran Hidup)
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Angka Kematian Bayi (AKB)	1,48	2,01	2,73	1,35	0,99
2.	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)	998,52	997,99	997,27	998,65	999,01

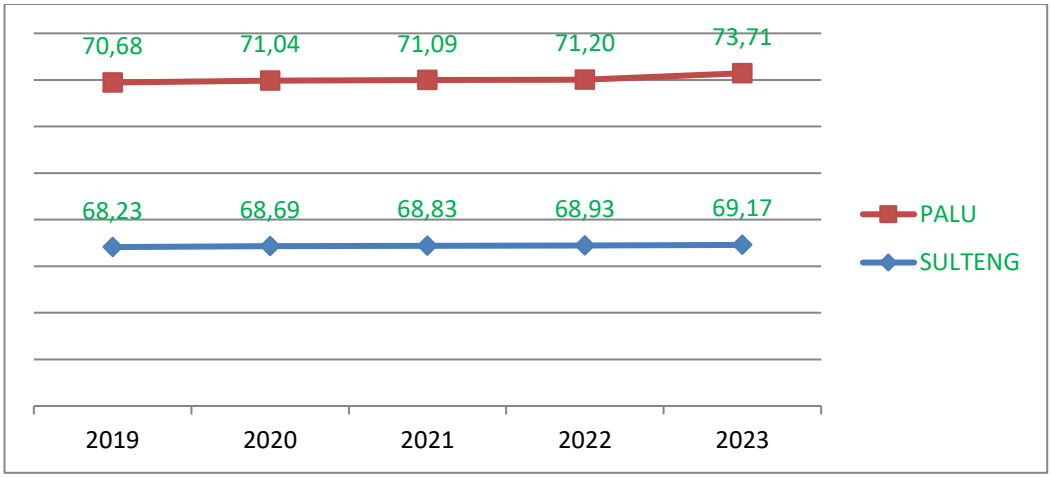
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024

b. Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat, yaitu mencerminkan "lamanya hidup" sekaligus "hidup sehat" suatu masyarakat. Kecenderungan perkembangan angka harapan hidup di Kota Palu yang terus meningkat dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Palu memiliki kualitas kesehatan atau lama hidup yang tinggi sampai pada usia 71,20 tahun.

Gambar 2.24 memperlihatkan angka harapan hidup masyarakat Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingginya angka usia harapan hidup di Kota Palu mungkin disebabkan oleh ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kesehatan, tenaga medis dan tenaga kesehatan, serta kesadaran masyarakat yang lebih baik dan memadai dari kabupaten lainnya di Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambaran angka harapan hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023 tertera pada gambar 2.24 sebagai berikut:



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.24
Angka Harapan Hidup Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023

c. Balita Gizi Buruk

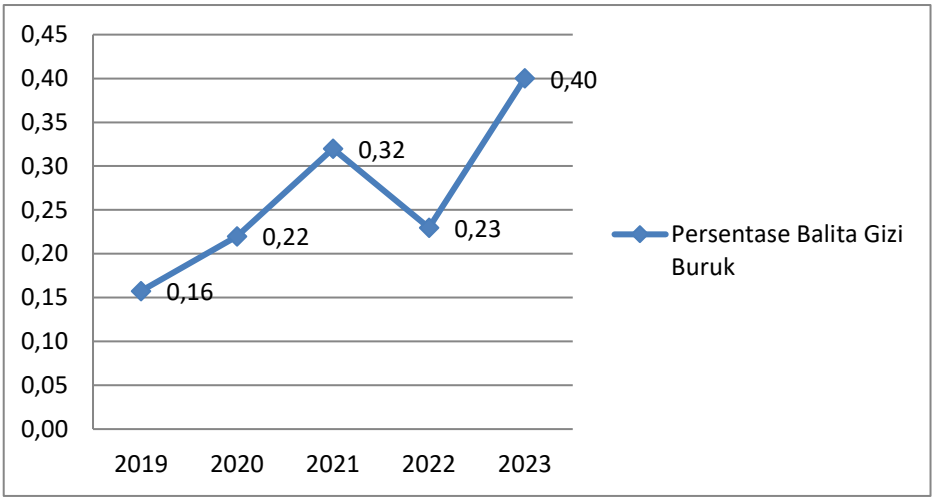
Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Status gizi balita secara sederhana dapat diketahui dengan membandingkan antara berat badan menurut umur maupun menurut panjang badannya dengan rujukan (standar) yang telah ditetapkan. Apabila berat badan menurut umur sesuai dengan standar, anak disebut gizi baik. Kalau sedikit di bawah standar disebut gizi kurang.

WHO (1999) mengelompokkan wilayah yaitu kecamatan untuk kabupaten/kota dan untuk provinsi berdasarkan prevalensi gizi kurang ke dalam 4 kelompok dari seluruh jumlah balita, yaitu :

a. rendah = di bawah 10 %
b. sedang = 10-19 %
c. tinggi = 20-29 %
d. sangat tinggi = 30 %

Perkembangan persentase balita gizi buruk Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir meningkat. Pada Tahun 2019 persentase balita gizi buruk Kota Palu mencapai 0,16%, meningkat menjadi 0,22% pada Tahun 2020. Tahun 2021 kembali naik mencapai 0,32%. Tahun 2021 naik lagi menjadi 0,32%, dan Tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 0,23%. Tahun 2023 kembali nik menjadi 0,40% dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,11% tiap tahunnya.

Gambaran ringkas persentase balita gizi buruk di Kota Palu Tahun 2019-2023 ditunjukkan dalam gambar 2.25.



Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.25
Persentase Balita Gizi Buruk Kota Palu Tahun 2019-2023

3) Ketenagakerjaan

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan. Pada Tahun 2019 tingkat pengangguran terbuka di Kota Palu sebesar 6,36%, turun menjadi 6,15% pada Tahun 2022. Tingkat Pengangguran Terbuka tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 8,38%, dan terendah pada Tahun 2023 sebesar 5,65%. Pada Tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,38%, Gambaran tingkat

pengangguran terbuka, TPAK dan angkatan kerja di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.54 berikut ini.

Tabel 2.54
Angkatan Kerja, TPAK dan Tingkat Penganggur Terbuka di Kota Palu Tahun 2019– 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
I. Angkatan Kerja	193.860	202.467	201.083	202.803	197.368
1. Bekerja/Working	181.523	185.507	185.777	190.321	186.221
2. Pengangguran/Unemployment	12.337	16.960	15.306	12.482	11.147
II. Bukan Angkatan Kerja	100.103	102.166	109.963	33.724	87.519
Total	**293.963**	**304.633**	**309.046**	**236.527**	**284.887**
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	**65,95**	**66,46**	**65,07**	**65,07**	**69,28**
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	**6,36**	**8,38**	**7,61**	**6,15**	**5,65**
Rasio Penduduk yang bekerja	**93,64**	**91,62**	**92,39**	**93,84**	**94,35**

Sumber: BPS, Kota Palu 2024

2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Perkembangan seni budaya dan olahraga di Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tidak banyak mengalami perubahan diukur dari ketersedian sarana dan prasaran seni budaya dan olahraga. Pada Tahun 2019 organisasi kepemudaan di Kota Palu sebanyak 385 organisasi kemudian menurun menjadi 356 organisasi pada Tahun 2023. Organisasi kepemudaan ini tersebar di semua Kecamatan di Kota Palu, Kecamatan yang paling banyak terdapat organisasi pemuda adalah Kecamatan Palu Selatan sebanyak 91 organisasi dan paling sedikit adalah Kecamatan Palu Utara sebanyak 29 organisasi.

Jumlah organisasi olahraga di Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir tidak mengalami perkembangan. Tercatat pada

Tahun 2019 sebanyak 205 organisasi hingga Tahun 2023 bertambah menjadi 207 organisasi. Organisasi olahraga tersebut tersebar di semua Kecamatan di Kota Palu, terbanyak di Kecamatan Palu Timur sebanyak 54 organisasi dan paling sedikit terdapat di Kecamatan Tawaeli sebanyak 10 organisasi. Jumlah organisasi pemuda dan olahraga di Kota Palu Tahun 2019 – 2023 menurut Kecamatan terurai dalam Tabel 2.55 berikut ini:

Tabel 2.55
Jumlah Organisasi Pemuda dan Olahraga di Kota Palu
Tahun 2019 – 2023

NO	KECAMATAN	2019	2020	2021	2022	2023
JUMLAH ORGANISASI PEMUDA						
1	Kecamatan Palu Selatan	91	91	91	91	
2	Kecamatan Palu Barat	62	62	62	62	
3	Kecamatan Palu Timur	46	46	46	46	
4	Kecamatan Palu Utara	29	29	29	29	
5	Kecamatan Tawaeli	65	65	65	65	
6	Kecamatan Mantikulore	32	32	32	33	
7	Kecamatan Tatanga	30	30	30	30	
8	Kecamatan Ulujadi	36	36	36	36	
	Se-Kota Palu	**385**	**385**	**385**	**385**	**356**
JUMLAH ORGANISASI OLAHRAGA						
1	Kecamatan Palu Selatan	33	33	33	33	
2	Kecamatan Palu Barat	19	19	19	19	
3	Kecamatan Palu Timur	54	54	54	54	
4	Kecamatan Palu Utara	20	20	20	20	
5	Kecamatan Tawaeli	10	10	10	10	
6	Kecamatan Mantikulore	36	36	36	36	
7	Kecamatan Tatanga	19	19	19	19	
8	Kecamatan Ulujadi	14	14	14	14	
	Se-Kota Palu	**205**	**205**	**205**	**205**	**207**

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun 2024

2.3 Aspek Pelayanan Umum

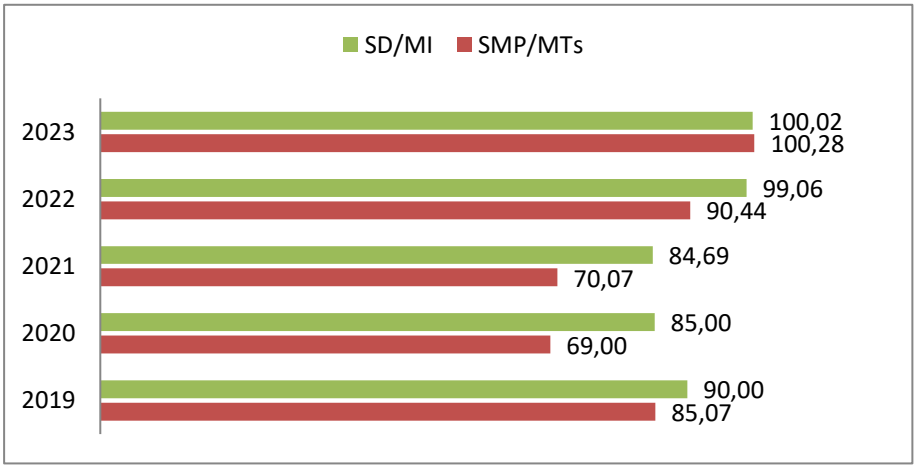
2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Dasar

1) Pendidikan

a. Angka Partisipasi Sekolah

Pendidikan merupakan aset sosial yang strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya manusia dalam pembangunan. Pembangunan sektor pendidikan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan dengan memanfaatkan secara optimal fasilitas pendidikan yang ada. Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Angka Partisipasi Sekolah jenjang pendidikan SD/MI selama 5 (lima) tahun tidak banyak mengalami perubahan. Pada Tahun 2019 APS SD/MI di Kota Palu sebesar 90,00% mengalami penurunan pada Tahun 2020 menjadi sebesar 85,00%. Pada Tahun 2021 turun lagi hingga mencapai 84,69%, dan kembali naik hingga mencapai 99,06% pada Tahun 2022. Pada Tahun 2023 meningkat signifikan mencapai 100,02%. Untuk APS SMP/MTs di Kota Palu pada Tahun 2019 sebesar 85,07% dan fluktuatif hingga mencapai 100,28% pada Tahun 2023. Gambaran secara rinci mengenai APS SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Gambar 2.26 berikut ini:



Sumber: BPS Kota Palu, dan Dinas Pendidikan Kota Palu 2024

Gambar 2.26
Perkembangan APS SD/MI, SMP/MTs di Kota Palu (persen) Tahun 2019-2023

APS jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs di Kota Palu memenuhi katagori sangat tinggi karena telah mencapai lebih dari 100%, yang bermakna di Kota Palu tidak terdapat lagi penduduk usia 7 tahun hingga 12 tahun dan penduduk usia 13 tahun hingga 15 tahun yang tidak bersekolah di SD/MI dan SMP/MTs. Apabila dikaitkan dengan program wajib belajar 9 tahun kondisi ini telah mencapai ideal karena tidak ada anak-anak yang tidak masuk sekolah pada jenjang Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayyah hingga SMP/Madrasah Tsanawiyah.

Kondisi APS Tahun 2023 untuk SD/MI sebesar 100,02% dan APS SMP/MTs sebasar 100,28% (lebih dari 100%) terindikasi bahwa terdapat jumlah murid usia 7-12 tahun, dan murid usia 13-15 tahun yang lebih banyak jumlahnya bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs yang tersedia di Kota Palu dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Palu yang berusia 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Hal ini diduga adanya murid usia 7-12 tahun dan murid usia 13-15 tahun yang datang bersekolah di Kota Palu namun belum teregistrasi sebagai penduduk Kota Palu.

b. Rasio Ketersediaan Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan tertentu per 10.000 jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Perkembangan rasio ketersedian sekolah di Kota Palu Tahun 2019-2023 terurai dalam Tabel 2.56 berikut ini:

Tabel 2.56
Rasio Ketersediaan Sekolah di Kota Palu (per 10.000)
Tahun 2019-2023

No.	Jenjang pendidikan	2019	2020	2021	2022	2023
1.	**SD/MI**					
1.1	Jumlah Sekolah	189	190	190	191	191
1.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	35.715	35.542	33.917	34.907	35.420
	Rasio Palu	**52,92**	**53,46**	**56,02**	**54,72**	**53,92**
2.	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah Sekolah	72	73	73	73	73
2.2	Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun	16.446	16.027	15.761	15.781	20.939
	Rasio Palu	**43,78**	**45,55**	**46,32**	**46,26**	**34,86**

Sumber: Disdikbud Kota Palu dan Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Rasio ketersedian sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir cenderung menurun. Pada periode 2021-2023 rasionya menurun dari 56,02 menjadi 54,72 dan kemudian menjadi 53,92 per 10.000 penduduk.

Sementara itu, Rasio Ketersedian Sekolah pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu pada Tahun 2019 sebesar 43,78

per 10.000 penduduk kemudian meningkat hingga mencapai 46,32 per 10.000 penduduk pada Tahun 2021. Meskipun Tahun 2021 naik, namun pada Tahun 2022 dan 2023 kembali turun menjadi 46,26 dan 34,86 per 10.000 penduduk.

c. Rasio Ketersediaan Guru

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru pada jenjang pendidikan tertentu per 1.000 jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar di Kota Palu di jenjang pendidikan yang disebutkan. Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata mengindikasikan ketersediaan guru per kelas rata-rata dalam Kota Palu pada setiap jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, pada Tahun 2019-2023 terurai dalam Tabel 2.57 di bawah ini:

Tabel 2.57
Rasio Guru/Murid Jenjang PendidikanSD/MI, SMP/MTs
di Kota Palu (per 1.000 Murid)
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
1. SD/MI:					
1.1 Jumlah Guru	1.975	2.009	1.985	2.120	2.614
1.2 Jumlah Murid	35.715	35.542	33.917	34.907	35.966
1.3 Jumlah Kelas	1.220	1.293	1.237	1.464	1.614
1.4 Jumlah Penduduk usia 7-12 tahun	40.266	39.793	39.916	40.563	40.832
Rasio Guru/Murid	**55,30**	**56,52**	**58,53**	**60,73**	**72,68**
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	**45,33**	**43,72**	**47,31**	**41,48**	**45,03**
Rasio Penduduk usia 7-12 tahun/kelas	**33**	**31**	**32**	**28**	**25**
2. SMP/MTs:					
2.1 Jumlah Guru	1.210	1.174	1.098	1.074	1.273
2.2 Jumlah Murid	16.446	16.027	15.761	15.781	15.838

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
2.3 Jumlah Kelas	766	795	817	806	865
2.4 Jumlah Penduduk usia 13-15 tahun	21.053	20.646	20.208	19.988	20.259
Rasio Guru/Murid	**73,57**	**73,25**	**69,67**	**68,06**	**80,38**
Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	**96,05**	**92,14**	**85,27**	**84,44**	**92,92**
Rasio Penduduk Usia 13-15 Tahun/Kelas	**27**	**26**	**25**	**25**	**23**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu 2024

Rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu pada Tahun 2019 adalah sebesar 55,30, atau sebanyak 55 guru per 1.000 murid SD/MI. Periode 2019-2023 menunjukkan trend peningkatan hingga rasio berada di titik tertinggi 72,68 pada Tahun 2023 atau 73 guru per 1.000 murid SD/MI. Rasio guru/murid per kelas rata-rata juga menunjukkan trend yang hampir sama namun fluktuatif sampai dengan Tahun 2022 yang berada pada titik 41,48 atau 41 guru per 1.000 murid per kelas rata-rata. Angka rasio ini meningkat pada Tahun 2023 hingga berada di angka 45,03 atau 45 guru per 1.000 murid per kelas rata-rata atau 1 orang guru untuk 22 murid per kelas rata-rata SD/MI.

Rasio guru terhadap murid jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2019 sebesar 73,57 atau 74 orang guru per 1.000 murid. Pada periode 2020 - 2022 rasio guru terhadap murid pada jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu terus mengalami penurunan dari rasio sebesar 73,25 Tahun 2020, turun menjadi 69,67 Tahun 2021 dan turun lagi menjadi 68,06 di Tahun 2022 namun rasio kembali meningkat menjadi 80,38 pada Tahun 2023 per 1.000 murid atau 80 orang guru per 1.000 murid atau 1 orang guru untuk 13 orang murid SMP/MTs.

d. Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Angka Melek Huruf adalah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan di Indonesia dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD. Angka Melek Huruf juga dapat menjadi ukuran kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media cetak, dan menunjukkan kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Angka melek huruf di Kota Palu bersumber dari penduduk usia di atas 15 tahun yang tidak mungkin lagi bersekolah. Perkembangan angka melek Huruf di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam tabel Tabel 2.58.

Tabel 2.58
Perkembangan Angka Melek Huruf Kota Palu
Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Melek Huruf (Persen)	99,84	99,84	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Palu 2024

Penduduk Kota Palu yang berusia di atas 15 tahun dan tidak buta aksara selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif stabil di atas angka 99%. AMH Tahun 2019 sebesar 99,84% dan terus konsisten di angka 99,84% pada Tahun 2020. Pada tahun 2021 hingga 2023 Angka Melek Huruf Kota Palu telah mencapai dan konsisten di angka 100%. Hal ini sesuai dengan harapan

Pemerintah Kota Palu untuk mencapai Angka Melek Huruf sebesar 100% di Tahun 2021 dan tahun-tahun selanjutnya.

e. Kondisi Bangunan Sekolah

Penyediaan bangunan gedung yang memadai dan memenuhi standar merupakan salah satu upaya dalam memenuhi ketentuan minimum standar sarana prasarana yang disyaratkan oleh pemerintah. Salah satu penilaian kondisi bangunan sekolah yang disyaratkan adalah kondisi sekolah dalam kondisi baik.

Bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Kota Palu pada Tahun 2018 menyebabkan kerusakan beberapa sekolah di Kota Palu. Rehabilitasi dan pembangunan terus diupayakan sejak saat itu dari kondisi bangunan baik sejumlah 143 sekolah dari 189 sekolah atau 75,66% di Tahun 2019 sampai dengan 179 sekolah dari 197 sekolah atau 90,86% di Tahun 2023 seperti tertera dalam Tabel 2.59.

Tabel 2.59
Jumlah Kondisi Baik Bangunan Sekolah (Ruang Kelas) Pada Jenjang SD/MI di Kota Palu Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sekolah Kondisi Baik*	143	145	146	148	179
Jumlah Sekolah	189	190	190	194	197
Kondisi bangunan baik	**75,66%**	**76,32%**	**76,84%**	**76,29%**	**90,86%**

Sumber: Kota Palu dalam Angka Tahun 2024

Sekolah dengan kondisi baik pada jenjang pendidikan SMP/MTs pada Tahun 2019 sejumlah 46 unit dari 72 unit sekolah atau 63,89%. Tahun 2023 bangunan sekolah dengan kondisi baik meningkat hingga mencapai 68,42% atau 52 unit dari 76 unit

sekolah SMP/MTs yang ada di Kota Palu. Hal ini tercermin dalam Tabel 2.60 yang menunjukan 100% sekolah dengan kondisi baik pada tiap tahunnya

Tabl 2.60
Jumlah Sekolah Kondisi Bangunan Baik Pada Jenjang SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Sekolah Kondisi Baik*	46	46	48	49	52
Jumlah Sekolah	72	73	73	74	76
Kondisi bangunan baik	**63,89%**	**63,01%**	**65,75%**	**67,12%**	**68,42%**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

f. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan salah satu program prioritas pembangunan pendidikan nasional yang diarahkan demi mewujudkan pendidikan yang berkeadilan, bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Kebijakan bertumpu di atas prinsip ketersediaan lembaga PAUD yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, keterjangkauan layanan PAUD sesuai dengan kemampuan masyarakat, kualitas layanan PAUD dalam mendidik anak usia 4 – 6 tahun, kesetaraan layanan PAUD untuk setiap kelompok masyarakat, dan kepastian setiap anggota masyarakat dalam memperoleh layanan PAUD.

Perkembanggan kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Palu Tahun 2019-2023 terurai dalam Tabel 2.61 berikut::

Tabel 2.61
Perkembangan Kondisi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kota Palu Tahun 2019 -2023

No.	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah Murid TK/RA/Penitipan Anak	6.661	7.258	7.587	9.039	9.353
2.	Jumlah Penduduk Usia 4 - 6 Tahun	19.313	19.477	20.021	21.447	21.853
3.	**Persentase PAUD**	**34,49**	**37,26**	**37,90**	**42,15**	**42,80**

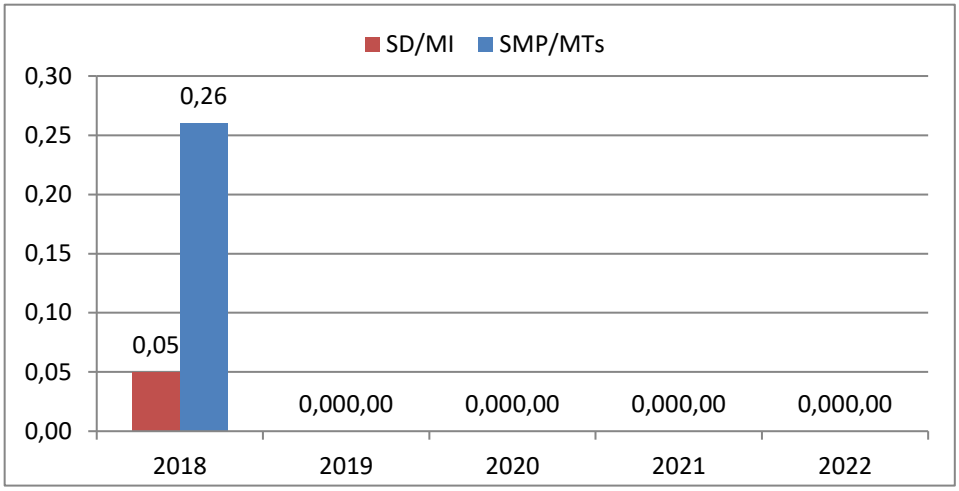
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024

Perkembangan PAUD di Kota Palu selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Tahun 2019–2021 persentase PAUD mengalami peningkatan dari 34,49% hingga menjadi 37,90%. Tahun 2022-2023 juga mengalami peningkatan dari 42,15% hingga 42,80%. Capaian persentase Tahun 2023 tersebut masih tergolong sangat rendah karena masih ada sekitar 12.500 anak usia dini 4 – 6 tahun yang belum terjangkau oleh layanan PAUD.

g. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah merupakan penduduk usia sekolah yang pernah menjadi peserta didik pada jenjang pendidikan tertentu, tidak dapat melanjutkan sekolah karena suatu alasan, tidak termasuk penduduk yang tidak pernah sekolah. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SD/MI di Kota Palu Tahun 2018 sebesar 0,05 % turun menjadi 0,00 % pada Tahun 2019 hingga 2023. Angka putus sekolah jenjang pendidikan SMP/MTs di Kota Palu Tahun 2018 sebesar 0,26 % juga turun menjadi 0,00 % pada Tahun 2019 hingga 2023. Hal ini menjelaskan bahwa sejak Tahun 2019 hingga

2023 angka putus sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Palu sudah tidak ada:



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2023

Gambar 2.27
Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs Kota Palu
Tahun 2018-2022

h. Angka Kelulusan

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah lulusan dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang tertentu yang kemudian dinyatakan dalam persentase. Angka kelulusan pada jenjang pendidikan SD dan SMP di Kota Palu Tahun 2019-2023 adalah sebesar 100%.

Gambaran perkembangan angka kelulusan SD dan SMP di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.62 sebagai berikut:

Tabel 2.62
Angka Kelulusan SD dan SMP Kota Palu (%)
Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah lulusan pada jenjang SD	6.176	6.169	6.106	5.609	5.703
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun sebelumnya	6.176	6.169	6.106	5.609	5.703
Angka Kelulusan SD	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah lulusan pada jenjang SMP	5.675	5.410	5.347	5.226	5.237
Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun sebelumnya	5.675	5.410	5.347	5.226	5.237
Angka Kelulusan SMP	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.62 memperlihatkan angka kelulusan SD dan SMP sejak Tahun 2019 sampai dengan 2023 telah mencapai angka kelulusan 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh murid SD dan SMP di Kota Palu telah mampu mengikuti seluruh proses pendidikan dengan baik pada SD dan SMP masing-masing di Kota Palu.

i. Angka Melanjutkan Pendidikan

Angka melanjutkan pendidikan merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada tingkat pertama jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah siswa yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih rendah pada tahun tersebut.

Angka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir di Kota Palu mengalami fluktuasi dan cenderung lebih rendah pada dua tahun terakhir di Tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan Tahun 2019 yang besarannya

adalah 87,8% menjadi 85,86% di Tahun 2020 dan 86,10% di Tahun 2021. Namun pada tahun 2022 dan 2023 mengalami peningkatan menjadi 94,08% di Tahun 2022 dan 95,79% di Tahun 2023.

Beda halnya dengan angka melanjutkan pendidikan dari SMP ke SMA yang terus mengalami kenaikan yang signifikan pada dua tahun terakhir di Tahun 2020 dan 2021 dibandingkan dengan Tahun 2019 yang besarannya adalah 136,2% menjadi 141,62% di Tahun 2020 dan 177,74% di Tahun 2021. Peningkatan angka melanjutkan Pendidikan dari SMP ke SMA melebihi 100% ini diduga bahwa bertambahnya lulusan SMA usia 16-18 Tahun dari luar Kota Palu datang untuk melanjutkan sekolahnya di Kota Palu.

Perkembangan angka melanjutkan pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu Tahun 2019 – 2023 tertera dalam Tabel 2.63 sebagai berikut:

Tabel 2.63
Angka Melanjutkan Pendidikan dari SD ke SMP dan SMP ke SMA/SMK di Kota Palu (%) Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SD	6.176	6.169	6.106	5.609	5.609
Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMP	5.303	5.259	5.257	5.277	5.373
Angka Melanjut SD ke SMP	**87,8%**	**85,86%**	**86,10%**	**94,08%**	**95,79%**
Jumlah Lulusan Pada Jenjang Pendidikan SMP	5.661	5.675	5.347	5.226	5.226
Jumlah Siswa Baru Tingkat I Pada Jenjang Pendidikan SMA/SMK	7.710	8.037	9.504	7.717	n/a
Angka Melanjut SMPke SMA/SMK	**136,2%**	**141,62%**	**177,74%**	**67,72%**	**n/a**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024

Angka melanjutkan sekolah SD ke SMP sebesar 95,79% dihadapkan dengan angka putus sekolah sebesar 0% dan angka kelulusan sebesar 100% pada Tahun 2023, maka didapatkan sejumlah 4,21% angka yang tidak melanjutkan sekolah dari jenjang pendidikan SD ke SMP di Kota Palu. Hal ini diduga disebabkan antara lain adanya sejumlah murid yang lebih memilih melanjutkan pendidikan di daerah lain yang memiliki akses pendidikan yang sesuai minat dan bakat, atau di daerah lain memiliki kualitas pendidikan yang lebih tinggi, atau ingin mendapatkan pengalaman baru. Selain itu, bisa jadi yang bersangkutan tidak melanjutkan sekolah di tempat yang sama dikarenakan orang tua yang pindah domisili akibat mutasi.

j. Kualifikasi Tenaga Pendidik

Salah satu faktor utama penentu kualitas pendidikan adalah kualitas tenaga pendidik. Indikator utama tercapainya kualitas tenaga pendidik adalah kualifikasi pendidikan tenaga pendidik. Pekembangan jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK di Kota Palu pada Tahun 2020 mengalami sedikit penurunan seiring dengan menurunnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV pada jenjang pendidikan secara keseluruhan. Uraian mengenai perkembangan guru memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu Tahun 2019-2023 terlihat dalam tabel Tabel 2.64.

Tabel 2.64
Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu
Tahun 2019-2023

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Guru SD/MI, SMP/MTs, Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV (belum termasuk SMA,MA,SMK)	4.335	4.184	2.909	3.240	4.608
Jumlah Guru SD/MI, SMP/MTs, (belum termasuk SMA,MA,SMK)	5.664	6.322	3.675	3.394	6.005
Rasio	**76,88**	**66,18**	**79,17**	**95,46%**	**76,74%**

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Tahun 2024

Pada Tahun 2019 rasio guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV di Kota Palu sebesar 76,88% dan mengalami penurunan 10,7% hingga menjadi 66,18% pada Tahun 2020. Tahun 2021, naik hingga mencapai 79,17% dan terus naik lagi menjadi 95,46% di Tahun 2022. Namun kembali mengalami penurunan pada Tahun 2023 menjadi 76,74%. Rasio ini dipengaruhi oleh perbandingan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV untuk SD/MI, SMP/MTs sebesar 4.608 guru terhadap jumlah guru secara keseluruhan sebesar 6.005 guru di Tahun 2023.

Peningkatan jumlah guru di Tahun 2022 secara total telah dibarengi dengan peningkatan guru yang berkualifikasi S1/D-IV di Kota Palu sehingga rasio guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1/D-IV di Kota Palu 95,46% dan telah tergolong sangat tinggi berdasarkan kriteria penilaian realisasi kinerja.

k. Evaluasi Rapor Pendidikan

Rapor Pendidikan merupakan gambaran representatif dari satuan pendidikan yang dapat digunakan sebagai referensi utama, dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan dari kualitas pendidikan. Hasil dari Rapor Pendidikan juga sudah dibuat

dan dijabarkan secara ringkas dan sederhana sehingga kepala satuan pendidikan, kepala dinas pendidikan atau tenaga kependidikan hanya perlu memiliki kemampuan statistik dasar untuk dapat melakukan analisis dari data yang disajikan

peningkatan hasil penilaian indikator dengan membuat inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan hasil penilaian di tahun berikutnya. Hasil Evaluasi Rapor Pendidikan Kota Palu Tahun 2023 dapat diliat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.65
Ringkasan Evaluasi Capaian Rapor Pendidikan Kota Palu Tahun 2023

NO	JENJANG	CAPAIAN	INDIKATOR PRIORITAS
1	**PAUD**	Peningkatan Tertinggi	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
		Capaian Terbaik	C.1 Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4
2	**SD Umum**	Peningkatan Tertinggi	A.2 Kemampuan numerasi
		Capaian Terbaik	D.8 Iklim Kebinekaan
		Capaian Terendah	A.2 Kemampuan numerasi
3	**SMP Umum**	Peningkatan Tertinggi	A.2 Kemampuan numerasi
		Capaian Terbaik	A.1 Kemampuan literasi
		Capaian Terendah	A.2 Kemampuan numerasi

2) Kesehatan

a. Rasio Posyandu Per Satuan Balita

Jumlah Posyandu sangat ditentukan oleh jumlah balita di suatu wilayah. Rasio ideal 1 unit posyandu untuk melayani balita adalah 1 unit posyandu bagi 1.250 balita (Lutfi Muta'ali, 197). Apabila 1 unit Posyandu sudah melebihi rasio ideal, maka dilakukan pemekaran unit Posyandu yang secara otomatis akan menambah jumlah unit Posyandu.

Perkembangan rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Menurut Kecamatan Tahun 2023 tertera dalam Tabel 2.65 berikut ini:

Tabel 2.66
Rasio Posyandu per 1.000 Balita di Kota Palu
Menurut Kecamatan Tahun 2023

Kecamatan		Posyandu	Balita	Rasio
Palu Barat		28	1.654	**16,93**
Tatanga		26	1.488	**17,47**
Ulujadi		29	1.234	**23,50**
Palu selatan		37	2.270	**16,30**
Palu Timur		23	1.689	**13,62**
Mantikulore		40	2.439	**16,40**
Palu Utara		21	789	**26,62**
Tawaeli		24	665	**36,09**
Kota Palu	**2023**	**228**	**12.228**	**18,65**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024

Rasio Posyandu per 1.000 balita di Kota Palu Tahun 2023 sebesar 18,65 per 1.000 balita. Ini menunjukkan bahwa rasio ketersediaan posyandu di Kota Palu adalah 1 : 54 balita yang berarti jumlah posyandu masih sangat ideal dalam menjangkau dan memenuhi pelayanan kesehatan penduduk balita di Kota Palu.

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu Per Satuan Penduduk

Rasio Puskesmas, Poliklinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu) per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah masing-masing unit Puskesmas,

Poliklinik, dan Pustu di Kota Palu dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk. Untuk kondisi ideal 1 unit puskesmas dapat melayani 120.000 penduduk, poliklinik melayani 5.000 penduduk, dan pustu 30.000 penduduk.

Perkembangan rasio ketersediaan Puskesmas, Poliklinik, dan Pustu per 100.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2019–2023 tertera dalam dalam Tabel 2.66.

Tabel 2.67
Rasio Puskesmas,Poliklinik dan Pustu di Kota Palu
(per 100.000 penduduk) Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Puskesmas	14	14	14	14	14
Jumlah Poliklinik	29	17	16	28	56
Jumlah Pustu	27	25	25	28	28
Jumlah Penduduk	391.383	373.218	377.030	381.572	387.493
Rasio Puskesmas	**3,57**	**3,75**	**3,71**	**3,67**	**3,61**
Rasio Poliklinik	**7,41**	**4,55**	**4,24**	**7,34**	**14,45**
Rasio Pustu	**6,90**	**6,70**	**6,63**	**7,34**	**7,23**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Puskesmas di Kota Palu Tahun 2023 sebesar 3,61 per 100.000 penduduk memiliki perbandingan yang sangat signifikan yaitu 1 unit puskesmas melayani 27.678 penduduk Kota Palu. Capaian ini bukan hanya memenuhi rasio puskesmas yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal sehingga dari sisi ketersediaan tidak perlu lagi membangun puskesmas tapi bagaimana meningkatkan pelayanan puskesmas kepada masyarakat secara optimal.

Untuk Rasio Poliklinik sebesar 14,45 per 100.000 penduduk Kota Palu Tahun 2023 menunjukkan perbandingan yaitu 1 unit poliklinik melayani 6.919 penduduk yang berarti kondisi ini masih kurang ideal atau belum memadai dari sisi ketersediaan poliklinik sehingga masih dibutuhkan penyediaan poliklinik yang mampu melayani jumlah masyarakat secara optimal.

Untuk Rasio Pustu sebesar 7,23 per 100.000 penduduk Kota Palu Tahun 2023 menunjukkan perbandingan yang signifikan yaitu 1 unit poliklinik melayani 13.839 penduduk yang berarti kondisi ini telah jauh memenuhi kondisi yang ideal sehingga dari sisi ketersediaannya tidak dibutuhkan lagi penyediaan pustu yang baru namun bagaimana menciptakan pelayanan pustu yang mampu melayani kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih baik.

c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah rumah sakit dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 100.000 penduduk. Untuk kondisi ideal 1 unit rumah sakit dapat melayani 240.000 penduduk.

Perkembangan rasio ketersediaan Rumah sakit per 100.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam dalam Tabel 2.67 berikut:

Tabel 2.68
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk
Di Kota Palu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Provinsi	2	2	2	2	2
Kota Palu	1	1	1	1	1

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Sakit Swasta	4	4	4	4	4
Rs Bersalin / RS Ibu Anak	4	4	4	4	4
RS Khusus (Mata)	0	0	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	2	2	2	2	2
Jumlah Seluruh Rumah Sakit	13	13	14	14	14
Jumlah Penduduk	391.383	373.218	377.030	381.572	387493
Rasio Rumah Sakit (per-100.000 Penduduk)	**3,32**	**3,48**	**3,71**	**3,67**	**3,61**

Sumber: Dinkes Kota Palu Tahun 2022, dan BPS Kota Palu Tahun 2023

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Rumah Sakit yang berada di Kota Palu Tahun 2023 sebesar 3,61 per 100.000 penduduk memiliki perbandingan yang sangat signifikan yaitu 1 unit rumah sakit melayani 27.678 penduduk Kota Palu. Capaian ini bukan hanya sekadar memenuhi rasio rumah sakit yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal sehingga dari sisi ketersediaannya sesungguhnya tidak perlu lagi membangun rumah sakit tapi bagaimana meningkatkan pelayanan rumah sakit kepada masyarakat secara teratur dan optimal.

d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Rasio Dokter per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah dokter dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 1.000 penduduk. Untuk kondisi ideal menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, bahwa 1 orang dokter dapat melayani 2.500 penduduk sedangkan menurut Badan Penyelenggara

Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Republik Indonesia bahwa 1 orang dokter dapat melayani 3.000 penduduk.

Perkembangan jumlah dan rasio dokter per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.68.

Tabel 2.69
Jumlah dan Rasio Dokter Per Satuan Penduduk
di Kota Palu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Dokter	474	462	484	496	496
Jumlah Penduduk	391.383	373.218	377.030	381.572	387.493
Rasio Dokter per satuan penduduk	**1,21**	**1,23**	**1,28**	**1,29**	**1,28**

Sumber: Dinkes Kota Palu 2024 dan BPS Kota Palu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Dokter Kota Palu Tahun 2022 sebesar 1,28 per 1.000 penduduk. Perbandingan ini menggambarkan 1 orang dokter melayani 782 penduduk Kota Palu. Realisasi atau capaian ini bukan hanya sekadar memenuhi rasio dokter yang ideal, namun telah melampaui kondisi yang ideal baik menurut organisasi kesehatan dunia WHO maupun BPJS Kesehatan Republik Indonesia.

e. Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jumlah tenaga kesehatan dengan jumlah total penduduk di Kota Palu, dan ditunjukkan dalam angka per 1.000 penduduk.

Perkembangan jumlah tenaga medis dan rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.69 berikut:

Tabel 2.70
Jumlah dan Rasio Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tenaga Kesehatan	3.476	3.497	3.528	3.478	3.478
Jumlah Penduduk	391.383	373.218	377.030	381.572	387.493
Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk	**8,88**	**9,37**	**9,36**	**9,12**	**8,97**

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Palu Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, Rasio Tenaga Kesehatan Kota Palu Tahun 2023 sebesar 8,97 per 1.000 penduduk. Perbandingan ini menggambarkan 1 orang tenaga medis melayani 112 penduduk Kota Palu.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat krusial adalah tersedianya jalur transportasi berupa jaringan jalan yang baik. Kebutuhan jalan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian. Dengan perekonomian masyarakat yang baik dan tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kota Palu secara signifikan.

a. Proporsi Jaringan Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik

Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kota Palu selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan panjang jalan di Kota Palu diikuti oleh meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik. Sementara panjang jalan rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jalan dalam kondisi baik. Panjang jalan yang dapat dilalui roda empat di Kota Palu selama 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan. Peningkatan panjang jalan di Kota Palu diikuti oleh meningkatnya panjang jalan dalam kondisi baik. Sementara panjang jalan rusak ringan dan rusak berat mengalami penurunan seiring dengan meningkatnya jalan dalam kondisi baik. Namun pada Tahun 2023 jalan dalam kondisi rusak berat mengalami peningkatan. Perkembangan proporsi jalan dalam kondisi baik di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.70 berikut ini:

Tabel 2.71
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%) Tahun 2019-2023

Keterangan	2019	2020	2021	2022	2023
Jalan Kondisi Baik (km)	347,65	262,95	263,96	310,33	600,03
Jalan Kondisi Baik Sedang (km)	183,17	162,57	279,38	279,71	101,34
Jalan Kondisi Rusak (km)	178,83	200,48	205,81	146,42	57,44
Jalan Kondisi Rusak Berat (km)	164,72	140,86	103,41	115,11	201,31
Panjang jalan (km)	851,56	851,56	851,56	851,56	960,11
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kondisi Baik	**40,83**	**30,88**	**30,99**	**36,44**	**62,50**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

Pada Tahun 2019 proporsi jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Palu sebesar 40,83%, mengalami penurunan hingga menjadi

30,88% pada Tahun 2020. Hal tersebut sejalan dengan menurunnya panjang jalan dalam kondisi baik.

Pada Tahun 2021 panjang jalan dalam kondisi baik di Kota Palu kembali meningkat sepanjang 263,96 km. Panjang jalan dengan kondisi baik pada Tahun 2022 meningkat menjadi 310,33 km dan terus meningkat di Tahun 2023 menjadi 600,03 km. Seiring dengan hal tersebut panjang jaringan jalan yang mengalami rusak pada Tahun 2019 sepanjang 178,83 km terus meningkat kerusakannya hingga mencapai 205,81 km pada Tahun 2021.

Rasio Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik pada tahun 2020 mengalami penurunan hingga menjadi 30,88% dari tahun sebelumnya yang sebesar 40,83% di Tahun 2019. Proporsi ini mulai naik kembali pada Tahun 2021 menjadi 30,99% dan terus naik menjadi 36,44% pada Tahun 2022 serta kembali meningkat pada tahun 2023 menjadi 62,50%. Pada kondisi ini, capaian tersebut sudah termasuk bagus namun tetap perlu adanya peningkatan sehingga perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kota Palu dalam meningkatkan kondisi jalan yang lebih baik dengan strategi pembangunan yang menitikberatkan pada infrastruktur jalan di Kota Palu.

a. Panjang Jalan Yang Mempunyai Trotoar dan Drainase

Trotoar adalah bagian dari jalan raya yang khusus disediakan untuk pejalan kaki yang terletak didaerah manfaat jalan, yang diberi lapisan permukaan dengan elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan. Sedangkan drainase merupakan suatu sistem pembuangan air bersih dan air limbah dari daerah pemukiman, industri, pertanian, badan jalan dan permukaan perkerasan lainnya, serta berupa penyaluran kelebihan air pada

umumnya, baik berupa air hujan, air limbah maupun air kotor lainnya yang keluar dari kawasan yang bersangkutan baik di atas maupun di bawah permukaan tanah ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

Berikut perkembangan panjang jalan yang mempunyai trotoar dan drainase di Kota Palu Tahun 2019-2023 terurai dalam Tabel 2.71 di bawah ini:

Tabel 2.72
Panjang Ruas Jalan Bertrotoar dan Berdrainase (Km)
Tahun 2019-2023

No	Ruas jalan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang Jalan (Km)	851,56	851,56	851,56	851,56	960,11
4	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	6,12	8,12	11,37	20,87	23,81
5	% Jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5)	0,72	0,95	1,34	2,45	2,48

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 2024

Tabel 2.71 menunjukkan persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase yang terus meningkat dari 0,72% di Tahun 2019 hingga mencapai 2,48% di Tahun 2023. Peningkatan ini terjadi karena bertambahnya panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase di Kota Palu setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi terjadi pada Tahun 2022 sebesar 9,5 km dari tahun sebelumnya dengan panjang jalan bertrotoar dan berdrainase sepanjang 11,37 km di Tahun 2021 menjadi 20,87 km di Tahun 2022.

b. Jaringan Irigasi

Salah satu infrastruktur yang sangat diperlukan untuk peningkatan produksi pertanian khususnya produksi beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.

Tahun 2019 saluran irigasi di Kota Palu dengan kondisi baik mengalami penurunan sepanjang 21.018,87 meter atau turun sebesar 39,39 % dari Tahun 2018 yang mencapai panjang 53.354,87 meter. Seiring dengan turunnya kondisi saluran irigasi kondisi baik, kondisi rusak berat meningkat sepanjang 20.581,62 meter atau naik 245,42 % dari Tahun 2018 yang mencapai 8.386,38 meter. Untuk Panjang saluran irigasi di Kota Palu pada Tahun 2019 seluruhnya berkurang sebesar 291,92 meter dari tahun sebelumnya sepanjang 79.915 meter. Semua kondisi ini disebabkan oleh bencana alam yang menimpa Kota Palu pada akhir Tahun 2018.

Berkurangnya panjang saluran irigasi dan meningkatnya kondisi rusak berat saluran irigasi pada Tahun 2019 mempengaruhi kontribusi sektor pertanian di Kota Palu yang turun secara signifikan. Gambaran kontribusi sektor pertanian tertera dalam gambar 2.46 pada urusan pilihan pertanian.

Perkembangan jaringan irigasi di Kota Palu Tahun 2021 – 2023 tertera dalam Tabel 2.73 berikut ini:

Tabel 2.73
Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik di Kota Palu (%)
Tahun 2021-2023

Saluran Irigasi	Panjang Saluran		
	2021	2022	2023
Luas Irigasi dalam Kondisi Baik (km^2)	357,23	357,23	542,20
Luas Irigasi (km^2)	1.001	1.001	1.001
Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	**35,69**	**35,69**	**54,17**
Panjang Saluran Irigasi (km)	66.844	66.844	73.559
Luas Lahan Budidaya Pertanian (km^2)	1.001	1.001	1.001
Rasio Jaringan Irigasi	**66,78**	**66,78**	**73,49**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.72 memperlihatkan kondisi saluran irigasi di Kota Palu Tahun 2020-2021 yang mengalami peningkatan luas irigasi dalam kondisi baik yaitu 333,23 km^2 di Tahun 2020 menjadi 345,23 km^2 di Tahun 2021 dengan peningkatan sebesar 12 km^2.

d. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Peningkatan jumlah tempat ibadah menunjukkan adanya peningkatan kualitas kehidupan beragama (iman) bagi pemeluk agama. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan beragama, stabilitas keamanan, ketertiban, dan kenyamanan dalam daerah menjadi baik sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dengan cepat.

Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 605 unit, kemudian pada Tahun 2023 naik menjadi 607 unit. Perkembangan

bangunan tempat ibadah diikuti oleh meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk. Gambaran mengenai perkembangan rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2021–2023 terurai dalam Tabel 2.74 sebagai berikut:

Tabel 2.74
Perkembangan Rasio Tempat Ibadah Per 1.000 Penduduk di Kota Palu Tahun 2021-2023

Bangunan Tempat Ibadah	2021			2022			2023		
	Jumlah (unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio	Jumlah (unit)	Jumlah Pemeluk	Rasio
Mesjid	504	329.140	1,53	479	334.089	1,4	479	341.321	1,40
Gereja	110	39.002	2,82	117	38.732	3,0	119	39.104	3,04
Pura	4	4.006	1	5	4.255	1,18	5	4.441	1,13
Wihara	4	1.705	2,93	4	1.687	2,8	4	1.688	2,37
Jumlah	**622**	**392.838**	**1,58**	**605**	**373.218**	**1,62**	**607**	**386.554**	**1,57**

Sumber: BPS, Dukcapil Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.73 memperlihatkan rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu. Pada Tahun 2022 rasionya naik 0,4 per 1.000 penduduk dari tahun sebelumnya. Tahun 2023 rasio tempat ibadah di Kota Palu turun kembali menjadi 1,57 per 1.000 penduduk. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Palu yang menurun ini salah satunya disebabkan oleh tidak adanya lagi bantuan dari berbagai daerah atau negara pasca bencana alam yang terjadi pada akhir Tahun 2018.

e. Rasio Daya Tampung Tempat Pemakaman Per Satuan Penduduk

Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat akan berdampak pada peningkatan kebutuhan lahan sebagai tempat

tinggal, termasuk ketersediaan lahan untuk tempat pemakaman umum.

Perkembangan rasio daya tamping tempat pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu Tahun 2019–2022 tertera dalam tabel 2.74 berikut ini:

Tabel 2.74
Perkembangan Rasio Daya Tampung Tempat Pemakaman per Satuan Penduduk di Kota Palu Tahun 2020-2023

Uraian	2020		2021		2022		2023	
	Luas (m^2)	Daya Tampung	Luas (m^2)	Daya Tampung	Luas (m^2)	Daya Tampung	Luas (m^2)	Daya Tampung
Tempat pemakaman umum (TPU)	330.000	8.256	330.000	8.256	330.000	8.256	330.000	8.256
Tempat Pemakaman bukan umum (TPBU)	347.500	14.526	347.500	14.526	347.500	14.526	347.500	14.526
Tempat pemakaman khusus (TPK)	30.000	1.350	30.000	1.350	30.000	1.350	30.000	1.350
Jumlah	707.500	24.132	707.500	24.132	707.500	24.132	707.500	24.132
Jumlah penduduk (jiwa)	373.218	373.218	377.030	377.030	381.572	381.572	387.493	387.493
Rasio		**64,66**		**64,01**		**63,24**		**62,28**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

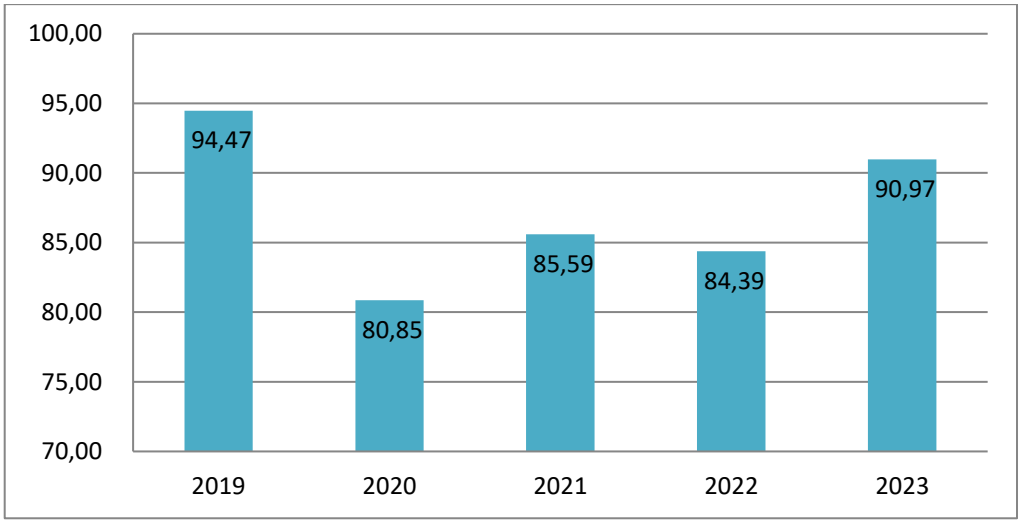
Tabel 2.74 memperlihatkan perkembangan rasio daya tampung tempat pemakaman per 1000 penduduk dari Tahun 2020–2023 mengalami penurunan. Pada Tahun 2020 rasio daya tampung tempat pemakaman per satuan penduduk di Kota Palu sebesar 64,66 per penduduk, turun menjadi 64,01 per penduduk di Tahun 2021. Pada Tahun 2022 rasio daya tampung tempat pemakaman turun menjadi 63,24 per penduduk dan terus turun di Tahun 2023

hingga menjadi 62,28 per penduduk. Menurunnya rasio ini akibat tidak bertambahnya luas pemakaman sementara jumlah penduduk setiap tahunnya selalu meningkat.

f. Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani

Persentase jumlah sampah yang tertangani dari Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 persentasenya sebesar 94,47 %, turun menjadi 80,85 % di Tahun 2020. Tahun 2021 naik menjadi 85,59 % dan turun lagi menjadi 84,39 %, dan Pada Tahun 2023 mengalami peningkatan kembali hingga menjadi 90,97 %.

Persentase jumlah sampah yang tertangani di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera pada Gambar 2.28 berikut ini:



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 2024

Gambar 2.28
Persentase Jumlah Sampah yang Tertangani
Tahun 2019-2023

g. Ruang Terbuka Hijau

Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ruang terbuka hijau kota merupakan kawasan perlindungan, yang ditetapkan dengan kriteria:

- Lahan dengan luas paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) meter persegi;
- berbentuk satu hamparan, berbentuk jalur, atau kombinasi dari bentuk satu hamparan dan jalur; dan
- Didominasi komunitas tumbuhan.

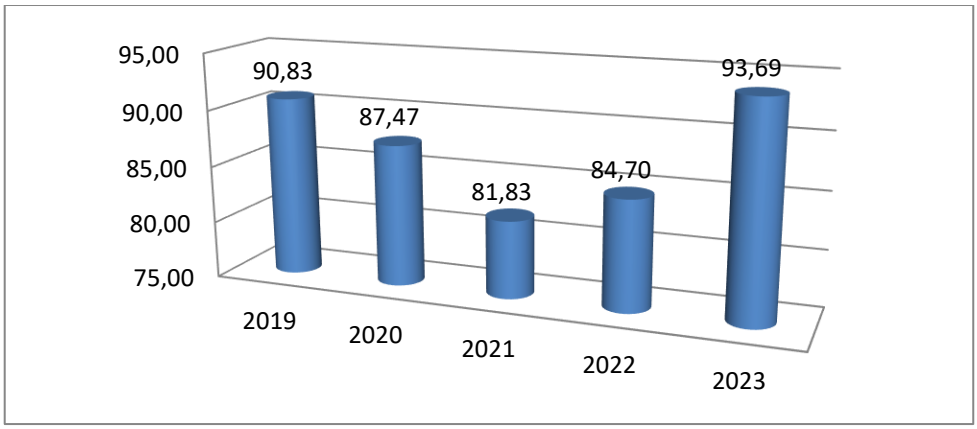
Agar kegiatan budidaya tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam pemenuhan pengembangan ruang terbuka hijau untuk Kota Palu di Tahun 2023 terdapat 2,265 Ha yang telah dilakukan, dari luas kawasan perkotaan paling sedikit 20% (tiga puluh persen).

Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Keberadaan lingkungan perumahan kumuh di Kota Palu berdasarkan hasil identifikasi/survey Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Tahun 2021 diketahui bahwa persentase luas lingkungan perumahan kumuh yang tertangani di Kota Palu sebesar 34,74% atau seluas 58,64 ha dari luas permukiman kumuh sebesar 248,47 ha.

Perkembangan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu selama Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 90,83% turun menjadi 87,47% di Tahun 2020. Tahun 2021 persentasenya mengalami penurunan hingga menjadi 81,83%. Tahun 2022 mulai naik hingga menjadi 84,70%, dan Tahun 2023 naik signifikan mencapai 93,69%. Berikut persentase rumah tangga pengguna air bersih di Kota Palu Tahun 2019-2023 yang tertera dalam Gambar 2.29 di bawah ini:



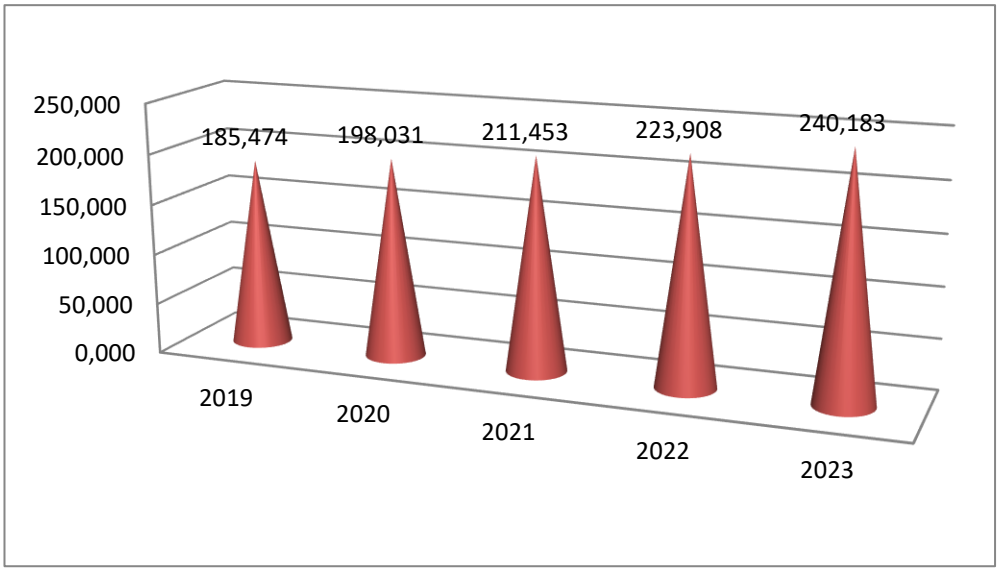
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kota Palu 2024

Gambar 2.29
Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih
di Kota Palu Tahun 2019–2023

Salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu yaitu energi listrik yang dikelola oleh PLN, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut PLN selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Secara umum dalam kurun waktu 2019-2023 produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN mengalami kenaikan. Jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Palu Tahun 2023 sebesar 240.189 pelanggan naik 16,28% dari tahun sebelumnya sebesar 223.908 pelanggan. Persentase ini diperoleh berdasarkan hasil perbandingan dari jumlah pelanggan

rumah tangga pengguna listrik terhadap total jumlah rumah tangga yang tersedia di Kota Palu. Besarnya jumlah pelanggan rumah tangga pengguna listrik mengakibatkan nilai persentase menjadi lebih besar. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa rumah tangga yang menggunakan lebih dari 1 (satu) meteran listrik untuk 1 rumah tangga. Salah satu contoh terkait dengan hal ini adalah ketersediaan rumah sewa atau kost. Untuk 1 orang pemilik atau 1 rumah tangga yang memiliki rumah sewa / kost dapat menggunakan beberapa meteran listrik sesuai dengan jumlah petak rumah sewa/kost yang disediakan.

Adapun persentase pelanggan rumah tangga pengguna listrik di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Gambar 2.30 berikut ini:

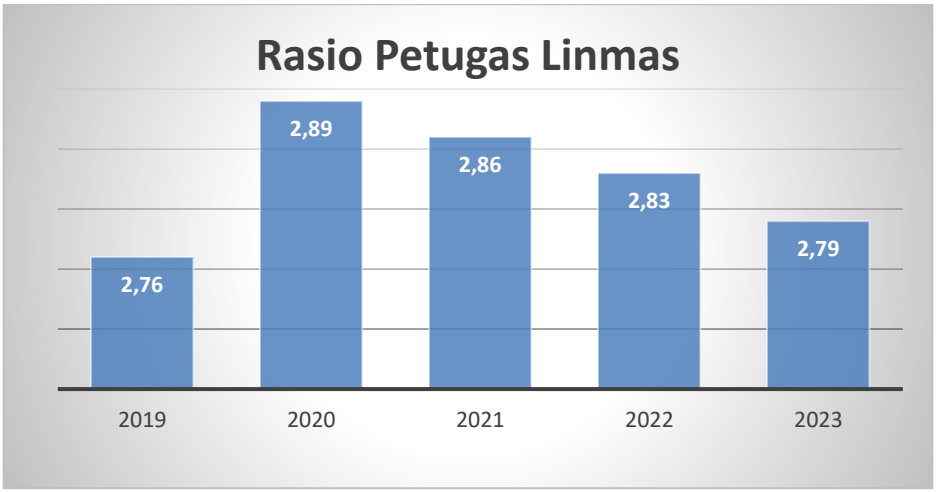


Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2023

Gambar 2.30
Jumlah Pelanggan Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Palu Tahun 2019-2023

5) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rasio jumlah linmas per 10.000 penduduk di Kota Palu Tahun 2019 – 2023 berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2019 rasio linmas sebesar 2,76 naik menjadi 2,89 di Tahun 2020, dan kemudian mengalami penurunan hingga menjadi 2,86 di Tahun 2021. Pada dua tahun terakhir terus mengalami penurunan hingga menjadi 2,83 di Tahun 2022 dan 2,83 di Tahun 2023, dan kemudian kembali turun pada Tahun 2023 menjadi 2,79%. Dengan jumlah penduduk yang fluktuatif dan menurun dari Tahun 2019 sampai dengan 2023, rasio linmas mengikuti kecenderungan jumlah penduduk.



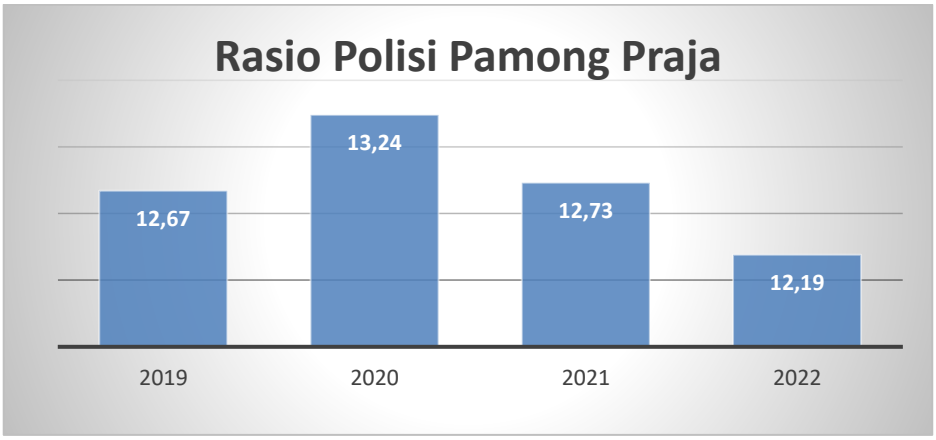
Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2024

Gambar 2.31
Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk di Kota Palu
Tahun 2019-2023

Rasio polisi pamong praja per 10.000 penduduk Kota Palu Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan di Tahun 2020 sebesar 0,57 dari tahun sebelumnya 12,67 menjadi 13,24. Kemudian pada

Tahun 2021 turun menjadi 12,73 lalu turun lagi hingga menjadi 12,19 pada Tahun 2022.

Berikut gambaran rasio polisi pamong praja di Kota Palu Tahun 2019–2022 tertera dalam gambar di bawah ini:



Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2024

Gambar 2.32
Rasio Polisi Pamong Praja di Kota Palu Tahun 2019–2022

Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palu Tahun 2019-2023 sebesar 75,83% dengan jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran sebesar 7.500 m^2. Sedangkan Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) darah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) sebesar 15 menit berdasarkan jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani.

Berikut gambaran Cakupan pelayanan bencana kebakaran, dan Tingkat Waktu Tanggap (*response time rate*) darah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Palu Tahun 2019–2023 tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.75
Cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kota Palu
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran (m^2)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Luas wilayah Kota (Km^2)	395,06	395,06	395,06	395,06	395,06
Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota (%)	**75,83**	**75,83**	**75,83**	**75,83**	**75,83**

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Tahun 2024

Tabel 2.76
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Palu
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	51	43	28	28	352
Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	51	43	28	28	352
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	**15**	**15**	**15**	**15**	**15**

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran dan Keselamatan Tahun 2024

6) Sosial

Sarana sosial di Kota Palu terdiri dari dua jenis yaitu sarana panti asuhan dan rumah singgah. Jumlah ketersediaan sarana sosial berfluktuasi mengikuti ketersediaan sarana panti asuhan di Kota Palu sejak Tahun 2019-2023. Ketersediaan rumah singgah hanya tersedia 1 unit selama kurun waktu lima tahun, sementara panti asuhan berjumlah 59 unit pada Tahun 2018 hingga turun

menjadi 41 unit pada Tahun 2019 dan 2020. Tahun 2021 naik 2 unit hingga menjadi 43 unit sebelum turun di Tahun 2022 menjadi 40 unit, kemudian pada Tahun 2023 kembali turun menjadi 36 unit. Berikut jumlah sarana sosial di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.77 di bawah ini:

Tabel 2.77
Jumlah Sarana Sosial di Kota Palu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Panti Asuhan	41	41	43	40	36
Rumah singgah	1	1	1	1	1
Jumlah	**42**	**42**	**44**	**41**	**37**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2024

Persentase PMKS di Kota Palu yang memperoleh bantuan sosial sebesar 45,67 % pada Tahun 2019. Tahun 2020 naik menjadi 56,18% lalu pada Tahun 2021 naik lagi menjadi 100,72% dan 169,25% di Tahun 2022. Namun pada Tahun 2023 turun menjadi 100,00%. Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.78 di bawah ini:

Tabel 2.78
PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial di Kota Palu Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan (jiwa)	61.487	53.256	192.304	13.399	1.666
PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	28.082	29.920	193.689	22.678	1.666
% PMKS yg memperoleh bantuan sosial	**45,67**	**56,18**	**100,72**	**169,25**	**100,00**

Sumber: Dinas Sosial Kota Palu Tahun 2024

2.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar

1) Tenaga Kerja

Jumlah angkatan kerja Tahun 2022 naik sebesar 1.730 orang dari tahun sebelumnya hingga menjadi 202.813 orang, di mana jumlah yang bekerja sebesar 190.331 orang dan yang menganggur sebasar 12.482 orang. Kemudian pada Tahun 2023 mengalami penurunan angkatan kerja menjadi 197,368 orang, dimana jumlah yang bekerja sebesar 186,221 orang dan yang menganggur sebesar 11,147 orang. Untuk tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Palu terhadap Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2019-2023 masih lebih rendah. Begitupun dengan tingkat pengangguran terbukanya yang terus lebih tinggi. Berikut Tingkat Partisipasi Angkatan kerja di Kota Palu Tahun 2018-2022 tertera dalam Tabel 2.79 di bawah ini:

Tabel 2.79
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Palu
Tahun 2019-2023

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Angkatan Kerja	193.860	202.467	201.083	202.813	197.368
	a. Bekerja	181.523	185.507	185.777	190.331	186.221
	b. Pengangguran	12.337	16.960	15.306	12.482	11.147
2	Bukan Angkatan Kerja	103.103	102.166	107.963	110.767	87.519
	Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	293.963	304.633	309.046	313.580	284.887
3	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Kota Palu	65,95	66,46	65,07	64,68	69,28
4	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Sul-Teng	69,44	69,44	68,73	66,99	69,99
5	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Kota Palu	6,36	8,38	7,61	6,15	5,65
6	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Sul-Teng	3,11	3,77	3,75	3,00	3,00

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2024

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keterlibatan perempuan menjadi syarat mutlak dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Partisipasi perempuan di lembaga swasta merupakan salah satu bentuk emansipasi yang penting bagi perempuan untuk mencapai kesetaraan gender selain keterlibatannya dalam lembaga pemerintahan.

Berikut keterlibatan pekerja perempuan di lembaga swasta dan pemerintah Kota Palu Tahun 2021 - 2023 tertera dalam tabel 2.80 di bawah ini:

Tabel 2.80
Keterlibatan Pekerja Perempuan Di Lembaga Swasta Dan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021–2023

Uraian	2021	2022	2023
Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	3.818	3.976	3.881
Pekerja perempuan di lembaga swasta	4.908*	5.934*	4.173
Jumlah pekerja perempuan	8.726	9.910	8.054
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	43,75	33	48,19
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	56,25	67	51,81
Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	4	4	4
Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	35	35	35
Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	11,43	11,43	11,43

Sumber: BKPSDMD Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.80 memperlihatkan persentase pekerja perempuan di lembaga swasta Kota Palu Tahun 2022 sebesar 67% dari total pekerja perempuan, sedangkan untuk lembaga pemerintah sebesar 33%. Pada Tahun 2023 persentase pekerja perempuan di lembaga

swasta sebesar 51,81 sedangkan, untuk lembaga pemerintah sebesar 48,19. Hal ini menunjukan bahwa jumlah pekerja perempuan lebih banyak yang bekerja pada lembaga swasta dibandingkan lembaga pemerintah.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang umumnya dilakukan di antara orang yang sudah memiliki hubungan kekeluargaan dan terjadi pada suami-istri sah atau pasangan serumah. Kekerasan ini juga dapat menimpa anak, orang tua, atau lanjut usia, dapat berupa kekerasan fisik maupun verbal serta dilatarbelakangi oleh emosi, masalah ekonomi, pertentangan agama, atau seks.

Gambaran umum Rasio KDRT di Kota Palu Tahun 2019-2023 serta cakupan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu Pemerintah Kota Palu tertera dalam table berikut ini.

Tabel 2.81
Rasio KDRT dan Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pemerintah Kota Palu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah KDRT	71	61	68	39	72
Jumlah rumah tangga	111.214	115.696	121.125	124.104	127.712
Rasio KDRT	0,064	0,053	0,056	0,031	0,04
Jumlah laporan/pengaduan kekerasan pada perempuan dan anak yang masuk ke unit pelayanan terpadu	144	148	113	50	70
Jumlah pengaduan/laporan	144	148	113	50	70

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu					
Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100

Sumber: BKPSDMD Kota Palu Tahun 2024

Tabel di atas memperlihatkan Rasio KDRT di Kota Palu pada empat tahun terakhir cenderung menurun. Namun pada Tahun 2023 kembali naik menjadi 72 kasus. Rasio KDRT tertinggi terjadi pada Tahun 2023 dengan jumlah 72 kasus KDRT dan terendah pada Tahun 2022 sejumlah 39 kasus. Sedangkan Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi pada Tahun 2020 sejumlah 148 kasus merupakan kasus tertinggi yang pernah terjadi dalam lima tahun terakhir berdasarkan jumlah laporan pengaduan yang masuk ke unit pelayanan terpadu Pemerintah Kota Palu. Kasus ini kemudian turun menjadi 70 kasus pada Tahun 2023 dengan cakupan penanganan sebesar 100% tiap tahun.

3) Pangan

Ketahanan Pangan adalah ketersediaan pangan dan kemampuan seseorang untuk mengaksesnya. Sebuah rumah tangga dikatakan memiliki ketahanan pangan jika penghuninya tidak berada dalam kondisi kelaparan atau dihantui ancaman kelaparan.

Gambaran umum terkait ketahanan pangan di antaranya dapat dilihat dari gambaran konsumsi energi dan konsumsi protein masyarakat Kota Palu dalam Tabel 2.82 berikut ini:

Tabel 2.82
Konsumsi Energi dan Protein di Kota Palu Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	2.067,80	2.093,70	2.041,50	1.860,80	2.022,00
2	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari)	66,30	64,60	60,40	58,80	61,00

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa konsumsi energi masyarakat Kota Palu Tahun 2019 sampai dengan 2020 terus mengalami peningkatan sebelum turun menjadi 2.041,5 kkal/kap/hari di Tahun 2021 dan 1.860,8 kkal/kap/hari di Tahun 2022, kemudian pada Tahun 2023 naik sebesar 2.022,00 kkal/kap/hari. Sementara konsumsi protein masyarakat Kota Palu yang lebih dahulu mengalami penurunan sejak Tahun 2020 sebesar 64,6 kkal/kap/hari dari tahun sebelumnya yaitu dari kondisi 66,3 kkal/kap/hari menjadi 64,60 kkal/kap/hari. Konsumsi protein terus mengalami penurunan hingga Tahun 2022 menjadi 58,8 kkal/kap/hari, dan meningkat pada Tahun 2023 menjadi 61,00 kkal/kap/hari.

4) Pertanahan

Luas lahan bersertifikat dalam empat tahun terakhir sejak Tahun 2019-2022 terus mengalami kenaikan dengan rata-rata sebesar 10,04 hektar tiap tahunnya. Namun pada Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,95 dari Tahun 2022. Tahun 2019

luas lahan bersertifikat sebesar 19,35 ha. Tahun 2020 luas lahan bersertifikat naik sebesar 5,33 ha menjadi 24,68 Ha. Tahun 2021 terus naik sebesar 7,42 ha hingga menjadi 32,01 ha dan Tahun 2022 naik signifikan sebesar 17,36 ha sehingga menjadi 49,37 ha. Kemudian Tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14,95 sehingga menjadi 34,42 ha.

Untuk penyelesaian permasalahan atau kasus tanah negara di Kota Palu dalam lima tahun terakhir memiliki persentase rata-rata sebesar 47,94%. Persentase penyelesaian kasus tanah negara tertinggi sebesar 75% terselesaikan pada Tahun 2019 sedangkan persentase terkecil sebesar 25% terselesaikan pada Tahun 2022.

Adapun data persentase luas lahan bersertifikat, dan penyelesaian kasus tanah negara di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.83 berikut ini:

Tabel 2.83
Persentase Luas Lahan Bersertifikat, dan Penyeslesaian Kasus Tanah Negara di Kota Palu Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase luas lahan bersertifikat (a/b) *100	4,90	6,25	8,10	12,50	8,71
a. Jumlah Luas Lahan bersertifikat (Ha)	19,35	24,68	32,01	49,37	34,42
b. Jumlah luas wilayah (Ha)	395,06	395,06	395,06	395,06	395,06
Penyelesaian kasus tanah negara (a/b) *100	75	33,33	36,36	25	70
a. Jumlah kasus yang diselesaikan	6	2	4	2	7
b. Jumlah kasus yang terdaftar	8	6	11	8	10

Sumber: Badan Pertanahan Negara Kota Palu Tahun 2021, dan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan Kota Palu Tahun 2024, diolah

5) Lingkungan Hidup

Persentase penanganan sampah di Kota Palu selama Tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan sebesar 1,2%. Persentase penanganan sampah di Tahun 2021 sebesar 85,59% sedangkan Tahun 2022 sebesar 84,39%. Tahun 2023 persentasenya meningkat menjadi 90,97% atau naik sebesar 6,58%. Peningkatan persentase ini seiring dengan bertambahnya total volume sampah yang timbul dan jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tertangani.

Persentase penanganan sampah berdasarkan jumlah volume sampah yang masuk ke TPA dan total volume sampah yang timbul di Kota Palu Tahun 2021-2023 tertera dalam Tabel 2.84 berikut ini:

Tabel 2.84
Persentase Sampah yang Tertangani di Kota Palu
Tahun 2021-2023

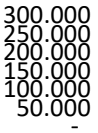
NO	Uraian	Tahun		
		2021 (ton)	**2022** (ton)	**2023** (ton)
1	Jumlah sampah yang tertangani	58.400,00	62.513,55	68.209,74
2	Total volume sampah yang timbul	68.228,90	74.073,65	74.977,39
3	Persentase	85,59	84,39	90,97

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu 2024

6) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Secara umum, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil suatu daerah menerbitkan beberapa dokumen atau surat/akta untuk masing-masing penduduk yang melakukan pengurusan administrasi pencatatan sipil di antaranya meliputi Kartu Tanda Penduduk (KTP), akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, akta cerai, dan kartu keluarga (KK).

Gambaran jumlah penduduk yang telah tercatat dan memiliki surat/akta administrasi kependudukan di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Gambar 2.33 berikut ini:



	2019	2020	2021	2022	2023
Penduduk ber KTP	193.385	263.624	269.910	244.416	278.618
Penduduk ber akta kelahiran	164.104	199.620	233.012	239.538	257.680
Penduduk ber akta kematian	1.755	1.755	3.807	1.461	3.650
Penduduk memiliki KK	111.214	115.696	121.120	118.060	127.712
Penduduk ber akta nikah	68.461	90.601	114.370	117.335	135.459
Penduduk ber akta cerai	423	597	2.759	2.902	4.470

Sumber: Dukcapil Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.33
Penduduk ber KTP, ber Akta Kelahiran, ber Akta Kematian, ber Akta Nikah, ber Akta Cerai, Memiliki KK di Kota Palu Tahun 2019-2023

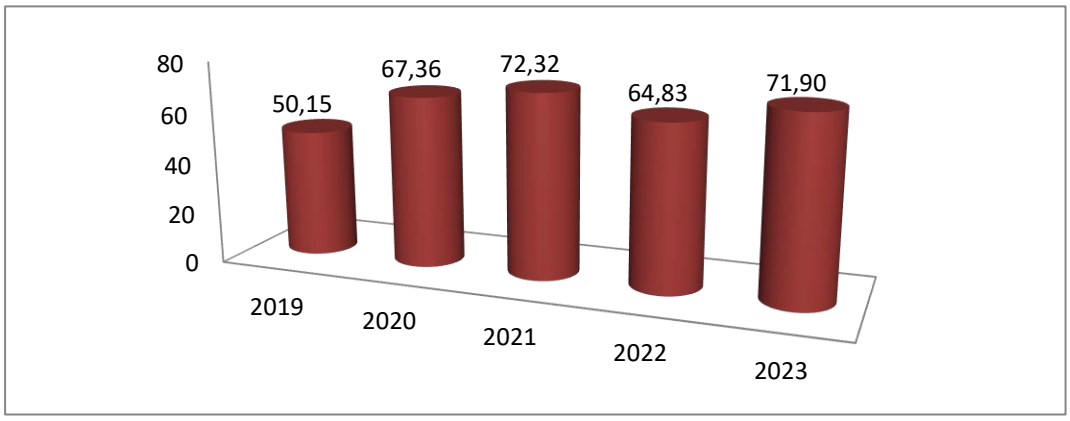
Gambar 2.33 memperlihatkan fluktuasi dan kenaikan-kenaikan jumlah penduduk yang telah tercatat dan memiliki surat/akta administrasi kependudukan di Kota Palu tiap tahunnya periode 2019-2023. Penduduk yang tercatat dan memiliki surat/akta administrasi kependudukan berfluktuasi yaitu pada katagori ber KTP, ber akta kematian, dan ber Kartu Keluarga. Sedangkan yang mengalami peningkatan atau kenaikan-kenaikan yaitu katagoori ber akta kelahiran, ber akta nikah, dan ber akta cerai.

Kepemilikan akta kelahiran terus mengalami kenaikan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Tahun 2019 penduduk berakta kelahiran sejumlah 164,104 orang menjadi 257,680 orang dengan pertumbuhan sebesar 57,02% untuk kurun waktu lima tahun. Kepemilikan akta nikah bertumbuh sebesar 97,86% dari

jumlah 68,461 orang di Tahun 2019 menjadi 135,459 di Tahun 2023. Untuk penduduk ber KTP, meskipun lima tahun terakhir mengalami jumlah yang fluktuatif namun tetap menunjukkan pertumbuhan sebesar 44,07% dari jumlah 193,385 orang di Tahun 2019 menjadi 278,618 orang di Tahun 2023.

Berdasarkan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, akta nikah, dan akta cerai seperti yang tertera dalam gambar 2.33 di atas, maka dapat diketahui rasio atau perbandingannya terhadap jumlah penduduk dengan status kepemilikan yang belum tersedia.

Berikut rasio penduduk ber KTP di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Gambar 2.34 di bawah ini:



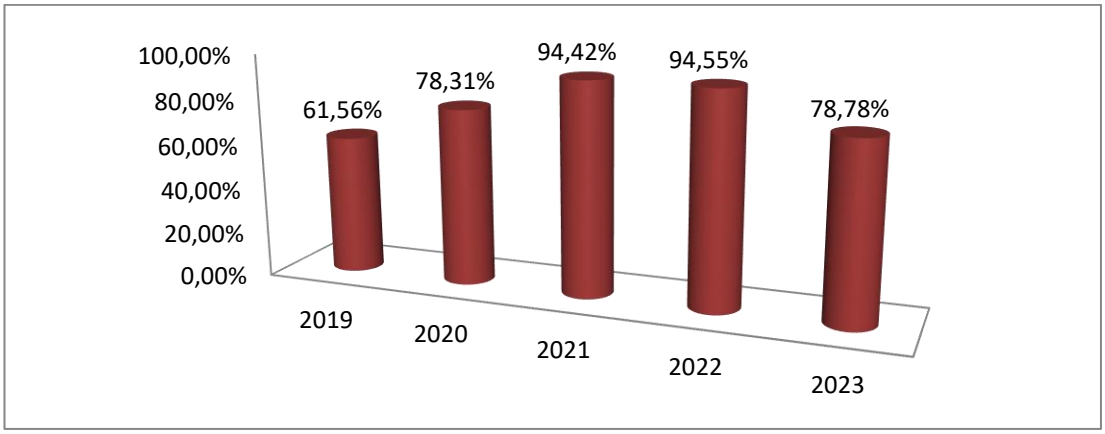
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.34
Rasio Penduduk Ber KTP di Kota Palu Tahun 2019 – 2023

Gambar 2.34 memperlihatkan rasio penduduk ber KTP di Kota Palu Tahun 2021 naik sebesar 4,96% hingga menjadi 72,32% dari tahun sebelumnya sebesar 67,36%. Kenaikan ini adalah kenaikan terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir dari Tahun 2019 sampai dengan 2023. Kenaikan tertinggi terjadi pada Tahun 2020 sebesar 17,21 % hingga menjadi 67,36% dari tahun

sebelumnya sebesar 50,15%. Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 7,49% dari Tahun 2021 hingga menjadi 64,83%.Tahum 2023 mengalami penaikan sebesar 7,07% dari tahun 2022 hingga menjadi 71,90%.

Selain penduduk ber KTP, rasio pasangan berakta nikah di Kota Palu Tahun 2019-2023 digambarkan pada diagram berikut ini:

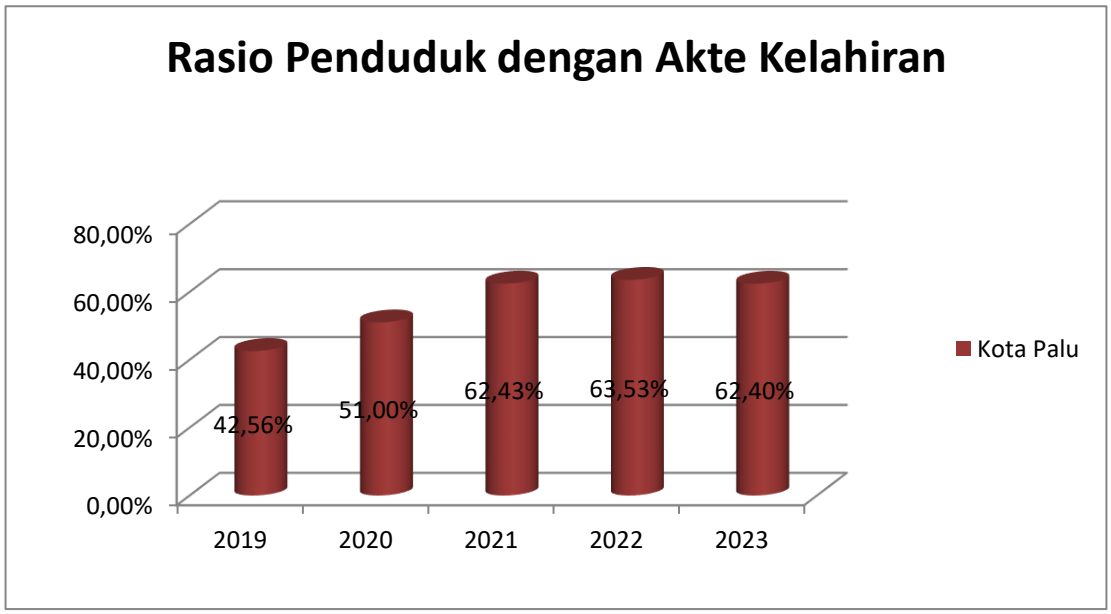


Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.35
Rasio Pasangan Berakta Nikah di Kota Palu Tahun 2019-2023

Gambar 2.35 memperlihatkan kenaikan rasio pasangan berakta nikah di Kota Palu Tahun 2019-2022 dengan rata-rata kenaikan sebesar 11% tiap tahun. Tahun 2020 naik sebesar 16,75% dari tahun sebelumnya, Tahun 2021 sebesar 16,11%, Tahun 2022 sebesar 0,13%. Pada Tahun 2023 rasio ini mengalami penurunan sebesar 15,77% dari tahun sebelumnya 94,55%. Hal ini telah menunjukkan bahwa seiring dengan rendahnya jumlah pasangan berakta nikah di Tahun 2023, rasio yang dicapai juga menjadi rendah sebesar 78,78% yang artinya bahwa masih tersisa 21,22% pasangan nikah yang belum memiliki akta nikah dari total pasangan nikah di Kota Palu Tahun 2023.

Pengukuran selanjutnya berkaitan dengan kepemilikan akta kelahiran. Rasio penduduk dengan kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam gambar sebagai berikut:



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.36
Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Palu
Tahun 2019-2023

Gambar 2.36 memperlihatkan rasio kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu yang mengalami peningkatan setiap tahunnya namun turun pada tahun 2023 untuk periode 2019-2023. Pada Tahun 2023 rasionya naik sebesar 19,84% dari Tahun 2019 yang sebesar 42,56% hingga menjadi 62,40%. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kepemilikan akta kelahiran di Kota Palu terhadap penduduk yang belum memiliki akta kelahiran mencapai rasio di atas separuh penduduk yang seharusnya memiliki akta kelahiran, sehingga sangat perlu untuk terus ditingkatkan.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jumlah kantor pemerintah kelurahan di Kota Palu sebanyak 46 unit. Keseluruhan kantor ini difungsikan sebagai kantor pelayanan utama masyarakat dengan kondisi bangunan layak pakai. Meskipun demikian, sebagian kantor kelurahan yang ada merupakan milik pemerintah Kota Palu dan sebagiannya lagi masih dalam status sewa/kontrak.

Setiap kantor kelurahan memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 1 Unit, begitu pula dengan kelompok binaan PKK aktif sebanyak 1 Unit.

Sejak Tahun 2015 sebanyak 43 Kelurahan dilakukan pembentukan Lembaga swadaya masyarakat yang difasilitasi oleh Program-program pemberdayaan masyarakat, antara lain P2KP dan Program NUSSP. Pembentukan ini dilakukan dengan pemilihan sederhana yang melibatkan paling sedikit 30% keterwakilan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah kelurahan menjadi 46 Kelurahan pada Tahun 2016 dibentuk kembali Lembaga swadaya masyarakat dengan total sebanyak 46 unit. Lembaga ini lebih dikenal dengan nama Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).

Hingga saat ini Tahun 2023 Pemerintah Kota Palu belum pernah melakukan penilaian terhadap kinerja LPM yang ada di setiap kelurahan, sehingga untuk pengukuran LPM berprestasi tidak terpenuhi.

Pembangunan wilayah kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat juga sangat didukung oleh keberadaan PKK yang aktif di tiap-tiap kelurahan di Kota Palu. Adanya PKK aktif dalam meningkatkan swadaya masyarakat telah memberikan kontribusi positif dalam mendukung program-program Pemerintah Kota Palu yang diukur melalui tingkat keterlibatan PKK dan masyarakat itu sendiri dalam membantu pelaksanaan sampai dengan penyelesaian

kegiatan program dan besaran/luas lahan yang digunakan pada lokasi sasaran program tanpa ganti rugi.

Pasca program pemberdayaan masyarakat yang ada di kelurahan, selalu dibarengi dengan pembentukan Tim Operasional dan Pemeliharaan yang berfungsi sebagai penjamin hasil konstruksi yang dibangun sesuai dengan umur rencana.

Berikut cakupan sarana dan prasarana perkantoran pemerintah kelurahan yang baik, dan persentase PKK aktif dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat kelurahan di Kota Palu Tahun 2019–2023 tertera dalam Tabel 2.85 di bawah ini:

Tabel 2.85
Cakupan Sarpras Kantor Kelurahan, dan Persentase PKK Aktif di Kota Palu Tahun 2019-2023

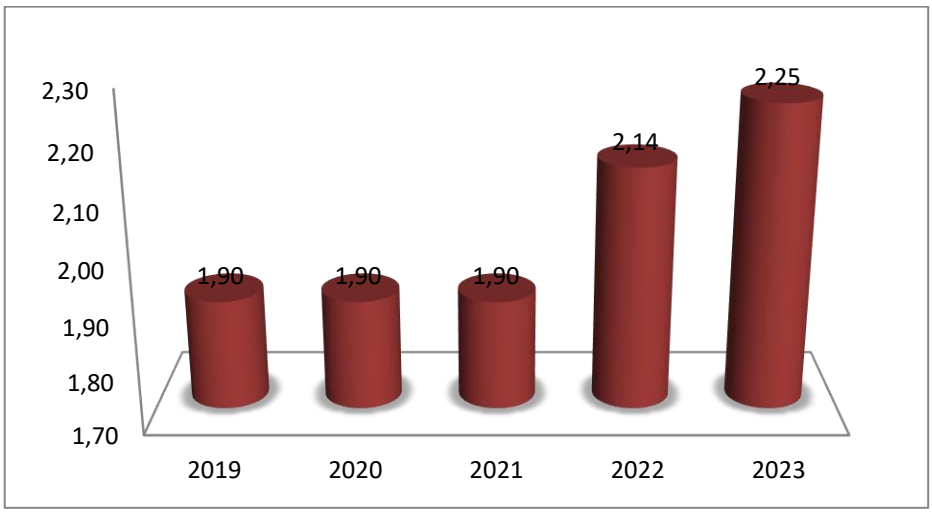
Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (a/b) *100)	94,25	94,25	94,25	94,25	94,25
a. Jumlah kantor pemerintah Kota yang baik	82	82	82	82	82
b. Jumlah seluruh pemerintah Kota	87	87	87	87	87
Persentase LPM Berprestasi (a/b) *100)	0	0	0	0	0
a. Jumlah LPM berprestasi	0	0	0	0	0
b. Jumlah LPM	46	46	46	46	46
Persentase PKK aktif (a/b) *100)	100	100	100	100	100
a. Jumlah PKK aktif	46	46	46	46	46
b. Jumlah PKK	46	46	46	46	46

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu Tahun 2024

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Peningkatan kualitas dan kesejahteraan keluarga dapat dilakukan di antaranya melalui peningkatan kesehatan reproduksi ibu dan anak.

Berikut gambaran rata-rata anak per keluarga di Kota Palu Tahun 2019– 2023 terlihat dalam gambar 2.37 di bawah ini:

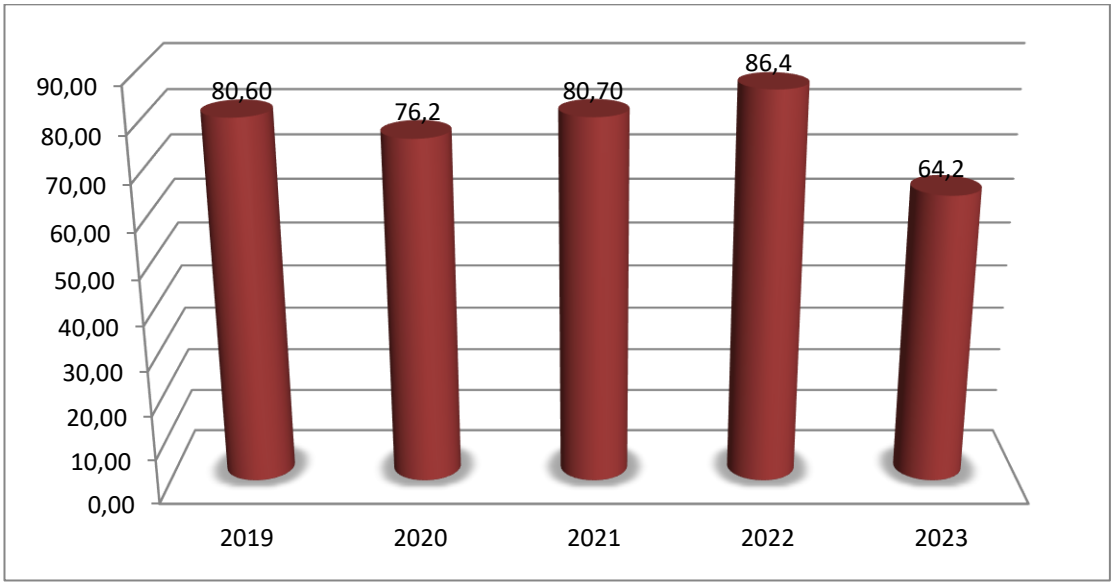


Sumber: DPPKB Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.37
Rata-rata Anak Per Keluarga di Kota Palu Tahun 2019-2023

Rata-rata jumlah anak di Kota Palu Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan. Tahun 2019 rata-rata jumlah anak sebesar 1,90 sampai di Tahun 2021. Tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,24 hingga menjadi 2,14. Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,11 hingga menjadi 2,25. Kondisi ini menjelaskankan bahwa bertambahnya jumlah anak selalu diikuti oleh bertambahnya jumlah keluarga yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga di Kota Palu hingga Tahun 2023 adalah 2 orang per keluarga.

Rasio akseptor Keluarga Berencana di Kota Palu Pada Tahun 2020 rasio akseptor ini turun sebesar 4,4% dari tahun sebelumnya hingga menjadi 76,2%. Tahun 2021 dan 2022 kembali naik dan terus naik masing-masing sebesar 4,5% dan 5,7% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 turun sebesar 22,2% dari tahun sebelumnya hingga menjadi 64,2%. Berikut Rasio Akseptor Keluarga Berencana di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Gambar 2.38 di bawah ini:



Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 2024

Gambar 2.38
Rasio Akseptor KB di Kota Palu Tahun 2019-2023

Cakupan pasangan usia subur yang istrinya berusia di bawah 20 tahun di Kota Palu Tahun 2019–2023 menunjukkan fluktuasi tiap tahunnya. Tahun 2019 sebesar 80,57% turun menjadi 76,20% di Tahun 2020. Tahun 2021 naik menjadi 80,67% dan kembali naik menjadi 86,40% di Tahun 2022. Tahun 2023 cakupan ini turun sebesar 29,87% hingga menjadi 56,53 %. Berikut Cakupan pasangan usia subur yang istrinya berusia di bawah 20 tahun di Kota Palu Tahun 2019 – 2023 tertera dalam Tabel 2.86 di bawah ini:

Tabel 2.86
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) di Kota Palu
Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (a/b) *100	80,57	76,20	80,67	86,40	56,53
a. Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	46162	45895	49746	53282	28840
b. Jumlah pasangan usia subur	57295	60232	61667	61667	51021

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 2024

9) Perhubungan

Penyelenggaraan pelayanan perhubungan kota merupakan aspek strategis yang berdampak lintas sektoral. Jumlah arus penumpang dari Tahun 2019-2022 mengalami fluktuasi, pada Tahun 2019 arus penumpang sebesar 1.726.366 penumpang turun signifikan hingga menjadi 594.344 penumpang di Tahun 2020, dan kembali meningkat mencapai 891.743 penumpang di Tahun 2021. Pada Tahun 2022 kembali mengalami penurunan terendah hingga menjadi 806.411 penumpang namun pada Tahun 2023 kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 992.371 penumpang.

Berikut jumlah arus penumpang angkutan umum di Kota Palu Tahun 2019 – 2023 tertera pada Table 2.87 di bawah ini:

Tabel 2.87
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
di Kota Palu Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penumpang Angkutan Darat melalui terminal	136.829	83.190	419.364	150.647	136.519
2	Jumlah Penumpang Kapal Laut	326.987	34.695	36.567	n/a	96.507
3	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	1.262.550	476.459	435.812	655.764	759.345
Total Jumlah Penumpang		**1.726.366**	**594.344**	**891.743**	**806.411**	**992.371**

Sumber: BPS Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2024

Rasio ijin trayek di Kota Palu mengalami fluktuasi selama Tahun 2019-2021. Pada Tahun 2019 rasionya mencapai 0,0000156 turun menjadi 0,0000153 di Tahun 2020 dan naik kembali menjadi 0,0000161 di Tahun 2021. Tahun 2022 turun menjadi 0,0000157 dan terus mengalami penurunan di Tahun 2023 hingga menjadi 0,0000155. Hal ini dipengaruhi oleh naik turunnya penumpang yang keluar dan masuk Kota Palu. Rasio izin trayek di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera pada Tabel 2.88 berikut ini:

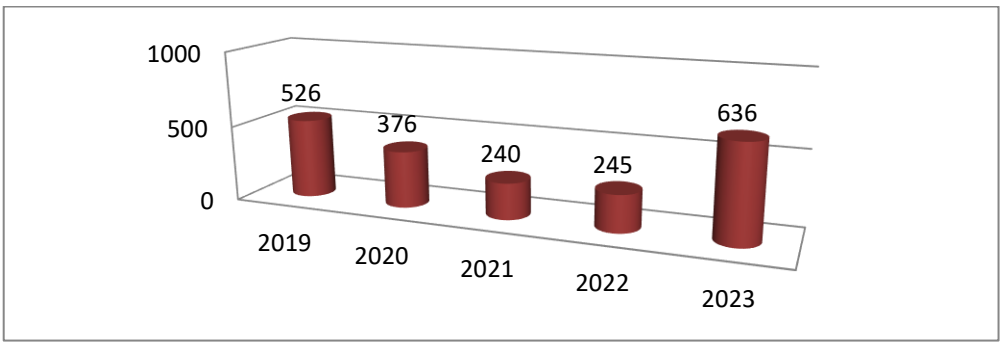
Tabel 2.88
Rasio Izin Trayek di Kota Palu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Izin Trayek	6	6	6	6	6
2	Jumlah Penduduk	391.383	373.218	377.030	381.572	387.493
Rasio izin Trayek		**0,0000156**	**0,0000153**	**0,0000161**	**0,0000157**	**0,0000155**

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu 2024

Jumlah uji Kir di Kota Palu Tahun 2019-2021 cenderung mengalami penurunan tiap tahunnya. Jumlah uji Kir mencapai 526 kali di Tahun 2019 dan terus mengalami penurunan hingga mencapai 240 kali pada Tahun 2021 dengan rata-rata penurunan sebesar 143 kali tiap tahunnya. Tahun 2022 naik menjadi 245 kali dan naik signifikan hingga mencapai 636 kali di Tahun 2023. Hal ini menunjukan bahwa meskipun pemeriksaan uji berkala pada kendaraan mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan mengalami fluktuasi di lima tahun terakhir, namun di dua tahun terakhir yaitu Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan peningkatan jumlah uji kir angkutan umum.

Jumlah uji kir angkutan umum di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam gambar 2.39 berikut ini:



Sumber: Dinas Perhubungan 2024

Gambar 2.39
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum di Kota Palu
Tahun 2019–2023

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis di Kota Palu Tahun 2019-2023 tidak mengalami peningkatan dengan total sebanyak 7 unit. Ketersediaan pelabuhan laut sejumlah 2 pelabuhan, Bandar udara sejumlah 1 bandar udara, dan terminal bis sejumlah 4 terminal tersebut masih mampu melayani kebutuhan arus keberangkatan dan kedatangan jumlah

penumpang di Kota Palu yang terus berfluktuasi sejak Tahun 2019-2023. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis di Kota Palu Tahun 2019-2023 terlihat pada Tabel 2.89 berikut ini:

Tabel 2.89
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis
Kota Palu Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Pelabuhan laut	2	2	2	2	2
2	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
3	Jumlah Terminal Bus	4	4	4	4	4
Jumlah		**7**	**7**	**7**	**7**	**7**

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2024

10) Komunikasi dan Informatika

Indikator cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat pada tingkat kecamatan di Kota Palu dalam periode 2019-2023 menunjukkan persentase fluktuatif dengan persentase cakupan terbesar terjadi di Tahun 2019 sebesar 337,5% berikutnya 37,5% di Tahun 2023, 25% di Tahun 2022, 12,5 di Tahun 2021 dan 0% di Tahun 2020. Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat pada tingkat kecamatan di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera pada Tabel 2.90 berikut:

Tabel 2.90
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat Tingkat Kecamatan di Kota Palu Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah KIM	27	0	1	2	3
2	Jumlah kecamatan yang ada dalam Kota	8	8	8	8	8
Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan		**337,5**	**0**	**12,5**	**25**	**37,5**

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palu 2024

Pada indikator jaringan komunikasi dan informatika, dalam periode 2019-2023 di Kota Palu terdapat 4 jaringan telepon genggam, namun tidak tersedia jaringan stasioner.

Tabel 2.91
Jaringan Komunikasi Propinsi/Kota Palu Tahun 2019–2023

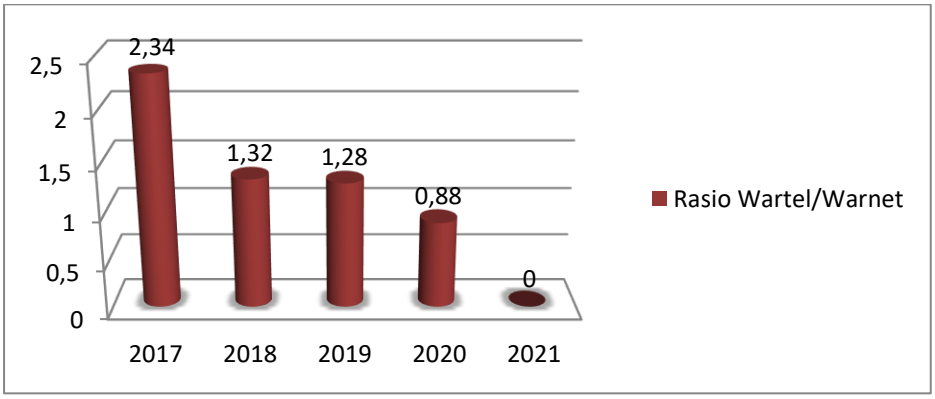
No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Jaringan Telepon Genggam	4	4	4	4	4
2	Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	0	0	0	0	0
3	Jumlah jaringan Komunikasi (1+2)	4	4	4	4	4

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk mengalami penurunan yang signifikan selama Tahun 2017-2021, khususnya pada Tahun 2018 dan Tahun 2021. Penurunan tertinggi sebesar 1,02 terjadi di Tahun 2018 dari rasio 2,34 pada tahun sebelumnya hingga menjadi menjadi 1,32. Begitupun yang terjadi di Tahun 2021

dari tahun sebelumnya sebesar 0,88 hingga menjadi 0 sampai dengan Tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa sdh tidak tersedia wartel/warnet di Kota Palu. Penurunan rasio ini diantaranya dipengaruhi oleh pemasangan jaringan internet pribadi pada rumah-rumah masyarakat Kota Palu dan berkembangnya teknologi telepon genggam dalam periode tersebut.

Berikut rasio wartel/warnet di Kota Palu Tahun 2017 – 2021 tertera dalam gambar di bawah ini:



Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.40
Rasio Wartel/Warnet di Kota Palu Tahun 2017-2021

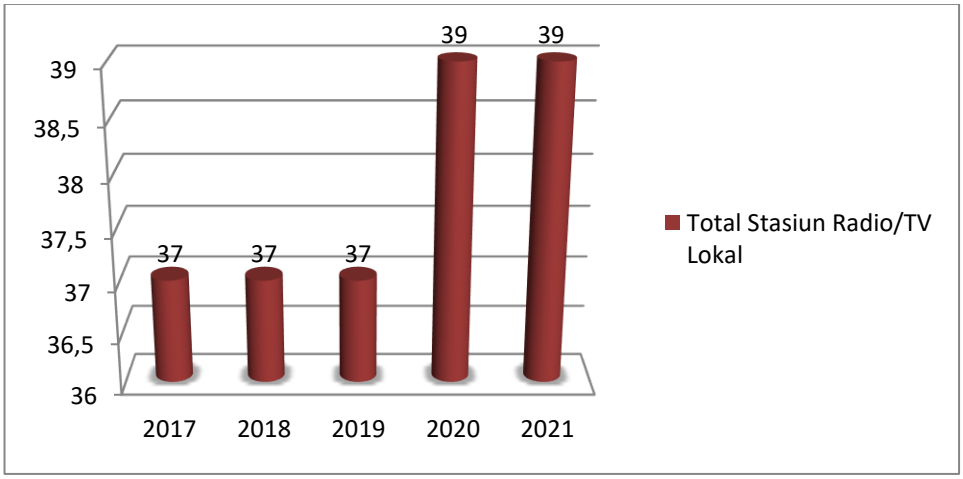
Pada Tahun 2023, terdapat total 18 jenis surat kabar nasional/lokal di Kota Palu. Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal di Kota Palu dan terbitan nasional tidak ada penambahan jumlah dari tahun ke tahun hingga Tahun 2023 hanya terdapat 5 jenis yang tersedia.

Tabel 2.92
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal di Kota Palu
Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	5	5	5	5	5
2	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	13	13	13	13	13
3	Total jenis surat kabar	18	18	18	18	18

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

Jumlah penyiaran radio/TV lokal di Kota Palu tidak mengalami peningkatan selama Tahun 2017-2019, yaitu berjumlah 37 stasiun penyiaran. Jumlah stasiun penyiaran di Kota Palu mengalami kenaikan hingga menjadi 39 stasiun penyiaran di Tahun 2020 dan 2021. Berikut jumlah stasiun radio/TV local di Kota palu Tahun 2017–2021 tertera dalam gambar di bawah ini:



Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.41
Total Stasiun Radio/TV Lokal di Kota Palu
Tahun 2017-2021

Website milik pemerintah Kota Palu adalah http://palukota.go.id, hal ini untuk mempermudah masyarakat Kota Palu untuk mengakses perkembangan Kota Palu.

Salah satu dasar daya saing daerah pada aspek komunikasi dan informatika terdapat pada penggunaan energi listrik dan alat komunikasi telepon. Energi listrik yang dikelola oleh PLN juga merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain.

Meski dalam kurun waktu lima tahun (2016-2020) produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN cenderung mengalami fluktuasi,

jumlah produksi listrik yang dihasilkan oleh PLN menunjukkan trend kenaikan dalam dua tahun terakhir.

Pada periode Tahun 2019-2023 produksi listrik yang di hasilkan oleh PLN mengalami kenaikan, dengan kenaikan terbesar 98.149.455 KWh pada Tahun 2023 dan terendah 5.415.919 KWh di Tahun 2022. Produksi listrik yang meningkat diiringi dengan nilai yang terjual akibat adanya kenaikan jumlah pelanggan yang terjadi antara Tahun 2019 sampai Tahun 2023. Sementara itu nilai yang dipakai sendiri dan susut/hilang selama Tahun 2023 menunjukkan trend positif dari 125 ribu Kwh dan 69 juta Kwh.

11) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Persentase koperasi aktif di Kota Palu Tahun 2019 sebesar 87,44%. Pada Tahun 2020 dengan terjadinya pandemic Covid 19 mengalami penurunan yg signifikan hingga mencapai 43,46% koperasi yg aktif. Tahun 2021 kembali naik sebesar 1,19% hingga mencapai 44,65%, di Tahun 2022 kembali turun sebesar 4,16% hingga menjadi 40,49% dan Kembali naik sebesar 0,61 hingga mencapai 41,10 di tahun 2023. Berikut persentase koperasi aktif di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.93 di bawah ini:

Tabel 2.93
Persentase Koperasi Aktif di Kota Palu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah koperasi aktif	188	93	96	83	90
2	Jumlah koperasi	215	214	215	205	219
Persentase		**87,44**	**43,46**	**44,65**	**40,49**	**41,10**

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2024

12) Penanaman Modal

Jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Palu Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2019 jumlah investor berjumlah 5 investor dan naik menjadi 15 investor pada Tahun

2020. Tahun 2021 jumlah ini mengalami penurunan signifikan hingga menjadi 2 investor itupun hanya dari PMDN. Tahun 2022 kembali mengalami kenaikan secara signifikan hingga menjadi 35 investor. Namun pada tahun 2023 jumlah ini kembali mengalami penurunan hingga menjadi 31 investor. Berikut jumlah investor PMDN dan PMA di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.94 di bawah ini:

Tabel 2.94
Jumlah Investor PMDN/PMA di Kota Palu Tahun 2019-2023

Tahun	Uraian	PMDN	PMA	Total
2019	Jumlah Investor	5	0	5
2020	Jumlah Investor	8	7	15
2021	Jumlah Investor	2	0	2
2022	Jumlah Investor	25	10	35
2023	Jumlah Investor	29	2	31

Sumber: Badan Administrator KEK Tahun 2024

Jumlah investor dalam negeri maupun asing yang ingin melakukan rencana investasi di Kota Palu mengalami perkembangan, yang belum sejalan dengan realisasi nilai investasi. Untuk itu masih diperlukan upaya kerja keras dari instansi yang menangani penanaman modal baik asing maupun dalam negeri. Berikut jumlah investasi PMDN dan PMA di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.95 di bawah ini:

Tabel 2.95
Jumlah Investasi PMDN/PMA Kota Palu Tahun 2019–2023

Tahun	JumlahProyek	Nilai Investasi
2019	2	114.376.074.280
2020	1	22.196.184.791
2021	2	12.602.756.572
2022	2	74.417.583.361
2023	131	682.979.363.525

Sumber: Badan Administrator KEK Tahun 2024

Jumlah investasi berskala nasional (PMDN/PMA) selama Tahun 2019-2023 di Kota Palu mengalami banyak perubahan dari segi jumlah proyek dan juga menunjukkan banyak perubahan dari sisi nilai yang diinvestasikan terutama di tahun 2023.

Jumlah proyek investasi berskala nasional di Kota Palu selama periode 2018-2022 berkisar di antara 1 hingga 2 proyek setiap tahunnya, namun ditahun 2023 mengalami kenaikan yang signifikan sebanyak 131 proyek. Sementara itu, jumlah nilai investasi yang ditanamkan untuk proyek-proyek tersebut mengalami fluktuasi selama periode 2019-2023. Nilai investasi tertinggi terjadi pada Tahun 2023 hingga mencapai 682,9 Miliar rupiah sedangkan Tahun 2021 merupakan nilai investasi terendah yaitu sebesar 12,6 Miliar rupiah. Gambaran ini menunjukkan bahwa dalam hal urusan penanaman modal khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus Kota Palu sangat perlu ditingkatkan strategi penanganan/pengelolaan dan pembangunannya secara menyeluruh dan lebih baik sehingga benar-benar dapat menimbulkan kepercayaan yang lebih luas dan lebih baik kepada para investor PMDN dan PMA untuk dapat berinvestasi di Kota Palu.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Organisasi pemuda di Kota palu Tahun 2019-2023 memiliki jumlah yang sama dari tahun ke tahun. Organisasi Pemuda yang jumlahnya paling banyak berada di Kecamatan Palu Timur yang berjumlah 56 organisasi, Kecamatan Mantikulore berjumlah 36 organisasi dan Palu Selatan memiliki 33 organisasi. Kemudian Palu Utara 20 organisasi, Palu Barat dan Kecamatan Tatanga 19 organisasi. Kecamatan Ulujuadi 14 organisasi, sedangkan yang

paling sedikit adalah Kecamatan Tawaeli dengan jumlah 10 organisasi.

Gambaran mengenai jumlah Organisasi Pemuda di Kota Palu pada periode 2018–2022 tertera dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.96
Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Palu
Tahun 2019 s/d 2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	212	215	216	210	328
2	Jumlah seluruh organisasi pemuda	385	385	386	386	356
Persentase		**55,06%**	**55,80%**	**55,90%**	**55,50%**	**89,90%**

Sumber: Sistem Informasi Pembangunan Daerah 2024

Jumlah organisasi olahraga dalam periode 2019-2023 mengalami perubahan. Dari jumlah organisasi olahraga yang sebesar 205 organisasi pada tahun 2019 bertambah 2 organisasi di tahun 2021-2022 menjadi 207 organisasi.

Jumlah organisasi olahraga yang paling banyak yaitu pada Kecamatan Palu Timur berjumlah 56 organisasi, Mantikulore dengan 36 organisasi dan Palu Selatan dengan 33 organisasi. Sedangkan yang paling sedikit yaitu Kecamatan Tawaeli dengan 10 organisasi, Kecamatan Ulujadi dengan jumlah 14 organisasi serta Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Palu Barat dengan 19 organisasi.

Gambaran mengenai jumlah organisasi olahraga di Kota Palu Tahun 2019–2023 tertera dalam tabel seperti di bawah ini:

Tabel 2.97
Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Palu
Tahun 2019 s/d 2023

No	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kecamatan Palu Selatan	33	33	33	33	33
2	Kecamatan Palu Barat	19	19	19	19	19
3	Kecamatan Palu Timur	54	54	56	56	56
4	Kecamatan Palu Utara	20	20	20	20	20
5	Kecamatan Tawaeli	10	10	10	10	10
6	Kecamatan Mantikulore	36	36	36	36	36
7	Kecamatan Tatanga	19	19	19	19	19
8	Kecamatan Ulujadi	14	14	14	14	14
Jumlah		**205**	**205**	**207**	**207**	**207**

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

Total jumlah kegiatan kepemudaan selama periode 2019-2023 sebanyak 28 kegiatan dengan jumlah 5 kegiatan di tahun 2019-2022 dan 8 kegiatan di tahun 2023. Sedangkan kegiatan olahraga selama Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari segi jumlah event yang diadakan. Pada Tahun 2019 jumlah kegiatan olahraga sebanyak 27 kegiatan, kemudian di Tahun 2020-2023 meningkat menjadi 28 kegiatan di masing-masing tahun.

Berikut jumlah kegiatan kepemudaan dan olahraga di Kota Palu Tahun 2019–2023 tertera dalam table di bawah ini:

Tabel 2.98
Jumlah Kegiatan Kepemudaan dan Kegiatan Olahraga
di Kota Palu Tahun 2019–2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	5	5	5	8
2	Jumlah kegiatan olahraga	27	28	28	28	28

Sumber: SIPD Kota Palu Tahun 2024

14) Statistik

Statistik dapat diartikan sebagai kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel (daftar) dan atau diagram yang menggambarkan (berkaitan) dengan suatu masalah tertentu. umumnya suatu data diikuti atau dilengkapi dengan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau keadaan tertentu.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, statistik dibutuhkan sebagai sarana penunjang untuk mengetahui kondisi suatu masalah dan perkembangannya dengan memperkirakan dan memproyeksikan pertumbuhannya dari tahun ke tahun sehingga kebutuhan perencanaan dapat terintegrasi secara menyeluruh sesuai dengan kondisi sebenarnya yang terjadi dari tahun-tahun sebelumnya untuk tahun-tahun rencana yang akan datang.

Ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi, buku kabupaten/kota dalam angka, dan buku PDRB dari tahun ke tahun pada suatu daerah merupakan indikator yang harus dipenuhi sebagai acuan atau bahan akurat dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota.

Kota Palu melalui Badan Pusat Statistik Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah telah menyediakan ketiga komponen indikator tersebut sebagai kebutuhan informasi yang tersusun dan tersaji dengan berbagai jenis data yang meliputi sektor pemerintahan, kependudukan, tenaga kerja, kesejahteraan, pertanian, industri, serta ekonomi dan keuangan. Buku Kota Palu Dalam Angka dan buku PDRB Kota Palu selama periode 2019-2023 telah tersedia dengan gambaran tentang kondisi makro hasil pembangunan ekonomi di Kota Palu.

15) Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di OPD Kota Palu sudah dilaksanakan oleh semua OPD, namun hanya terdapat satu OPD yang melakukan pengarsipan secara baku. Dalam rangka peningkatan SDM pengelola kearsipan, telah dilakukan peningkatan kapasitas pengelola kearsipan untuk semua OPD di Kota Palu sejak Tahun 2015.

16) Perpustakaan

Perpustakaan adalah gudang ilmu, sumber informasi yang penting yang dapatmenguak sejarah masa lalu dan dapat dijadikan dasar menyusun perencanaan dan penelitian untuk masa mendatang. Perpustakaan bersifat universal, artinya siapapun, usia berapapun, apapun pekerjaannya dapat belajar dan mencari informasi di perpustakaan. Perpustakaan ada di mana mana dan dapat dijumpai perpustakaan walupun dengan jenis, luas, dan kwalitas yang berbeda-beda

Berikut data terkait urusan perpustakaan di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertara dalam Tabel 2.99 di bawah ini:

Tabel. 2.99
Data terkait Urusan Perpustakaan di Kota Palu Tahun 2019–2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase pengunjung perpustakaan per tahun (a/b)	0.014	0,004	0,006	0,006	0,006
a. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	15	10	15	15	18
b. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	1084	2287	2576	2.471	2.930
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (a/b)	8,224	1,145	1,087	0,509	0,565
a. Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	4.112	3.619	5.578	3.806	4.953

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
b. Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	500	3.162	5.132	7.476	8.765
Rasio perpustakaan persatuan penduduk (a/b)*1000)	0,1840	0,1929	1,4959	1,585	1,753
a. Jumlah perpustakaan	72	72	564	605	680
b. Jumlah penduduk	391.303	373.218	377.030	381.572	387.493
Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	500	1.658	2576	2.471	2.930
Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	4.112	3.162	5132	3.806	4.953
Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (a/b)*100)	0	0	0	50	100
a. Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	0	0	0	2	2
b. Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	0	0	0	4	2

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palu Tahun 2024

Tabel 2.99 memperlihatkan persentase kunjungan perpustakaan dengan populasi yang harus dilayani yang terus mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar 0,01% hingga menjadi 0,004% di Tahun 2020. Kemudian mengalami kenaikan sebesar 0,002% menjadi 0,006% di tahun 2021-2023. Untuk Rasio Perpustakaan per satuan penduduk memperlihatkan kenaikan terus menerus sejak Tahun 2019 hingga 2023. Rasio Perpustakaan di Tahun 2019 sebesar 0,184 naik menjadi 0,193 di Tahun 2020, dan seterusnya menjadi 1,496 di Tahun 2021, naik lagi menjadi 1,585 di Tahun 2022, dan 1,753 di Tahun 2023. Sedangkan untuk persentase pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat mencapai 50% di Tahun 2022. Persentase ini kemudian di Tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi 100% disebabkan seluruh pustakawan telah memiliki sertifikat.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1) Pariwisata

Dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan asing maupun domestik yang datang ke Kota Palu diperlukan ketersediaan hotel yang memadai. Dari gambaran umum Kota Palu khususnya penyediaan fasilitas perhotelan, mengalami fluktuasi setiap tahunnya selama kurun waktu empat tahun terakhir yaitu dari jenis hotel berbintang maupun non berbintang. Secara keseluruhan dari jumlah hotel yang tersedia di Kota Palu pada Tahun 2019 tersedia jumlah hotel sebanyak 41 hotel dan Tahun 2023 jumlah hotel naik menjadi 54 hotel.

Berikut jumlah hotel di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.100 di bawah ini:

Tabel 2.100
Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2019-2023

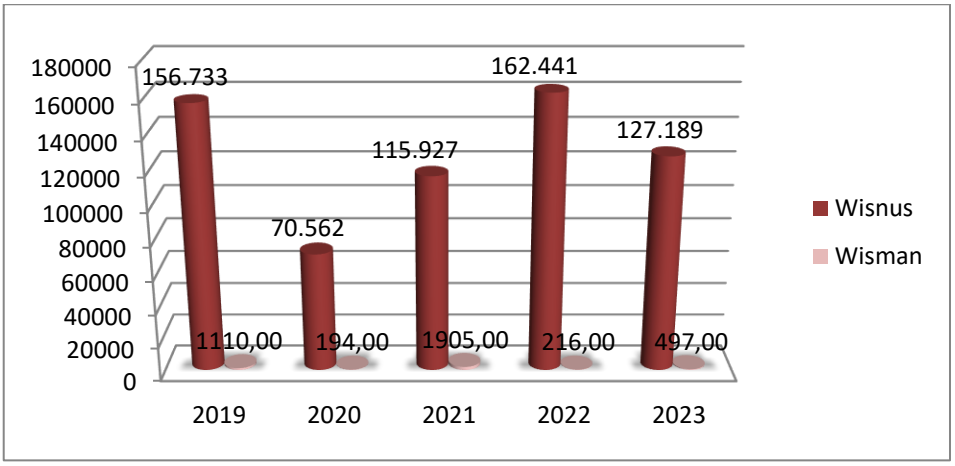
No.	Jenis	2019		2020		2021		2022		2023	
1	Hotel berbintang	8	19,5%	7	14,3%	11	21,2%	7	15,2%	9	16,67%
2	Hotel non berbintang	33	80,5%	42	85,7%	41	78,8%	39	84,8%	45	83,33%
Total		**41**	**100%**	**49**	**100%**	**52**	**100%**	**46**	**100%**	**115**	**100%**

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka, 2024

Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara di Kota Palu Tahun 2019-2023 terus mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara pada Tahun 2019 sejumlah 156.733 orang dan Tahun 2020 sejumlah 70.562 orang dan pada tahun tersebut merupakan penurunan terendah. Lain halnya dengan kunjungan wisatawan mancanegara, pada Tahun 2020 jumlah kunjungan ini sempat mengalami penurunan sebesar 916 orang dari tahun sebelumnya yang sejumlah 1.110 orang menjadi 194 orang namun tahun selanjutnya yaitu pada

Tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 1.711 orang hingga menjadi 1.905 orang dari tahun sebelumnya yang sejumlah 194 orang.

Berikut jumlah kunjungan wisatawan di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Gambar 2.42 di bawah ini:



Sumber: Dinas Pariwisata Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.42
Jumlah Kunjungan Wisatawan (orang) di Kota Palu
Tahun 2019-2023

Kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah terkenal dengan keindahan wisata baharinya. Selain itu, ada pesona budaya dan peninggalan sejarah yang layak untuk dikunjungi.

Beberapa obyek wisata di Kota Palu dengan pengelolanya tertera pada tabel berikut ini.

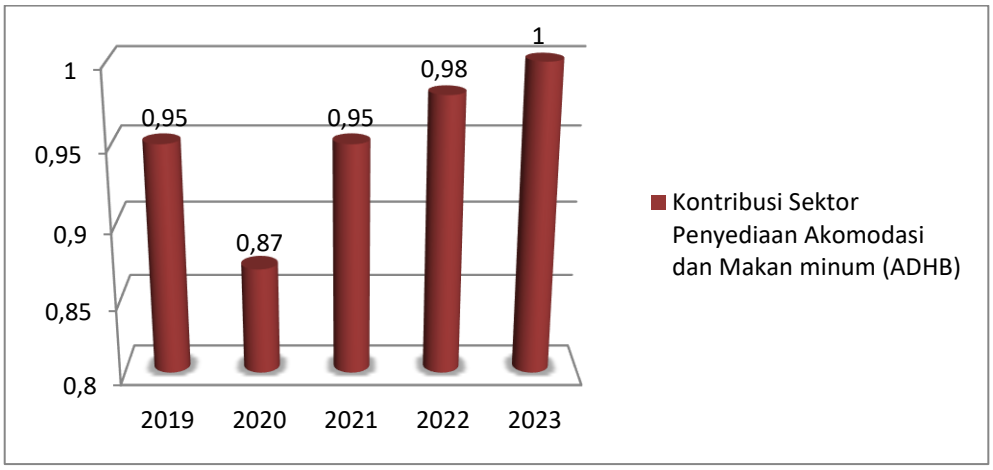
Tabel 2.101
Destinasi Wisata di Kota Palu

Jenis	Nama situs	Kelurahan	Pengelola
Gedung Bersejarah	Gedung Juang	Lolu Utara	Pemerintah
	Banua Madika	Kabonena	Pemerintah
	Sou Raja	Lere	Pemerintah
Tempat Spiritual	Makam Datokarama	Lere	Pemerintah
	Makam Pue Paso	Watusampu	Pemerintah
	Makam Pue Ndjidi	Kabonena	Pemerintah
	Makam Pue Mpoluku	Lasoani	Pemerintah
	Vatu Posambaya	Donggala Kodi	Pemerintah
	Sumur Yoga	Donggala Kodi	Pemerintah
	Masjid Jami	Baru	Pemerintah
	Makam Gala	Bayaoge	Pemerintah
	Makam SIS Al-Jufri	Siranindi	Pemerintah
Taman Rekreasi	Pantai Taman Ria	Lere	Pemerintah
	Pantai Talise	Talise	Pemerintah
	Pantai Kampung Nelayan	Talise	Pemerintah
	Pantai Mamboro	Mamboro	Pemerintah
	Danau Sibili	Paantoloan	Pemerintah
Wisata Tirta	Taipa *Beach*	Taipa	Non Pemerintah
	Pantai Tombelaka	Tipo	Non Pemerintah
	Amazing Beach	Tipo	Non Pemerintah
	Graha Tirta	Birobuli Selatan	Non Pemerintah
	Milenium Water Park	Lolu Selatan	Non Pemerintah
	Winner	Silae	Non Pemerintah
	Mandi Sauna	Kabonena	Non Pemerintah

Sumber: RTRW Kota Palu Tahun 2007

Sektor pariwisata sangat didukung oleh sektor akomodasi dan makan minum. Pada Tahun 2020, kontribusi sektor ini terhadap PDRB mengalami penurunan sebesar 0,08 % hingga menjadi 0,87 % dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,95 %. Namun pada Tahun 2021-2023 mengalami peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,04 % per tahun.

Berikut gambaran perkembangan kontribusi sektor akomodasi, makanan dan minuman bagi PDRB (ADHB) Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Gambar 2.43 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2024

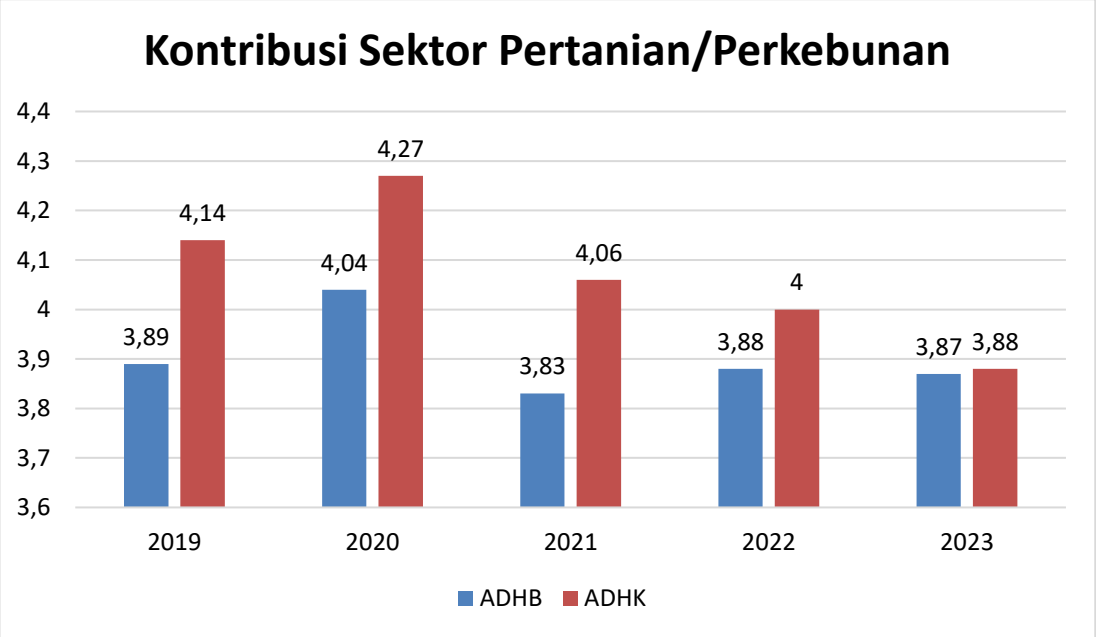
Gambar 2.43
Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makanan Minuman Terhadap PDRB (ADHB) Kota Palu Tahun 2019–2023

2) Pertanian

Kontribusi sector pertanian / perkebunan ADHB di Kota Palu Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2019 kontribusi ini sebesar 3,89 % naik 0,15 % hingga menjadi 4,04 % di Tahun 2020. Kemudian pada Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 0,21 % hingga menjadi 3,83 %. Tahun 2022 kembali naik sebesar 0,05 % hingga menjadi 3,88 % dan Tahun 2023 kembali turun sebesar 0,01 % sehingga menjadi 3,87 %.

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan ADHK ini pun juga mengalami hal yang sama yaitu terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun sejak Tahun 2019 hingga Tahun 2023. Penurunan terendah terjadi pada Tahun 2021 sebesar 0,21 % dan kenaikan tertinggi pada Tahun 2020 sebesar 0,13 %.

Berikut gambaran kecenderungan kontribusi sektor pertanian dan perkebunan di Kota palu yang fluktuatif dari tahun ke tahun sejak Tahun 2019 hingga 2023 tertera dalam Gambar 2.44 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

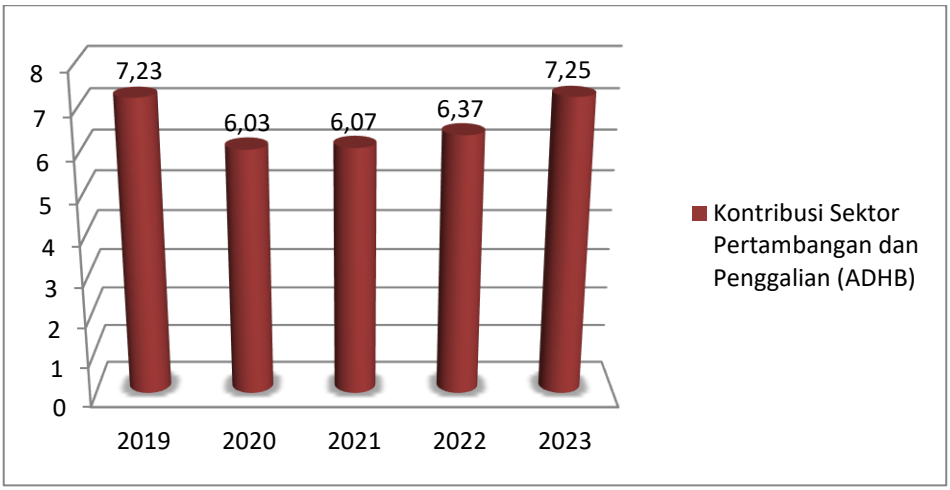
Gambar 2.44
Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan
Terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2019-2023

3) Kehutanan

Luas kawasan hutan di Kota Palu Tahun 2023 tercatat seluas 16.318 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 6,67 ribu Ha (41,26 persen), Hutan produksi terbatas seluas 4,42 ribu Ha (27,52 persen) dan Hutan Suaka Alam/Hutan Wisata seluas 5,02 ribu Ha (31,12 persen).

4) Energi dan Sumber Daya Mineral

Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Berikut gambaran perkembangan kontribusi sektor pertambangan dan penggalian ADHB di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Gambar 2.45 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2024

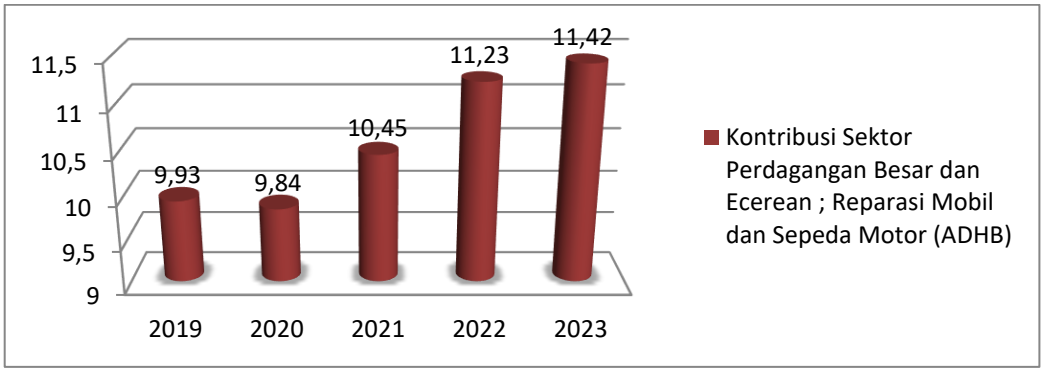
Gambar 2.45
Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB Kota Palu (%) Tahun 2019-2023

Gambar 2.45 memperlihatkan kontribusi yang diberikan sektor pertambangan dan penggalian terhadap pembentukan PDRB di Kota Palu pada Tahun 2019-2023 yang cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Perubahan signifikan terjadi pada Tahun 2020 dengan kontribusi terendah menurun sebesar 1,2 % hingga menjadi 6,03 % dari tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 7,23 %. Sedangkan kontribusi tertinggi terjadi pada Tahun 2023 sebesar 0,88 % hingga mencapai 7,25 %. Kontribusi sektor ini pada Tahun 2021 sebesar 6,07 % hanya naik 0,04 % dari tahun sebelumnya dengan kontribusi sebesar 6,03 %. Tahun 2022 mengalami peningkatan kontribusi sebesar 0,3% dari Tahun 2021 hingga menjadi 6,37%.

5) Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan sektor dengan kontribusi PDRB tertinggi ketiga setelah sektor konstruksi, dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan kontribusi. Meskipun pada Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,09 % per tahun, namun pada tiga tahun terakhir yakni Tahun 2021-2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 0,57% per tahun.

Berikut ini perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB di Kota Palu Tahun 2019-2023 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2024

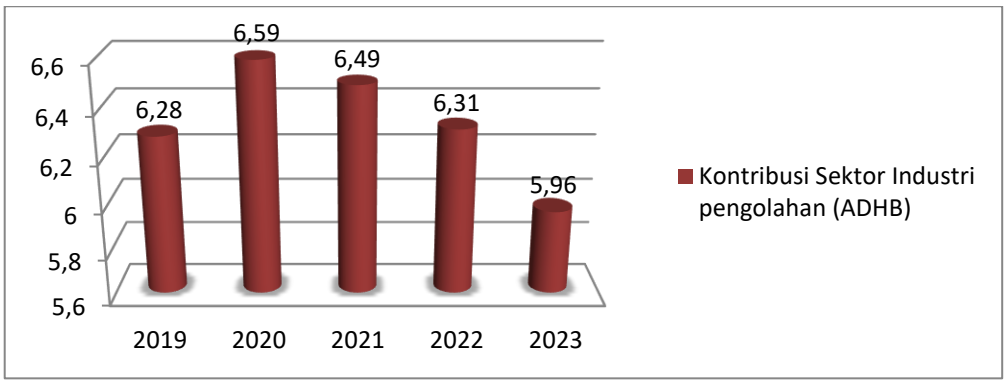
Gambar 2.46
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2019–2023

6) Perindustrian

Sektor perindustrian memiliki nilai riil yang cenderung menurun dari tahun ke tahun. Jumlah industri selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi pertumbuhan. Perkembangan industri di Kota Palu yang fluktuatif disebabkan oleh banyaknya industri berkembang masih berskala rumah tangga dan berskala

mikro, kecil, menengah yang dikelola secara formal maupun informal.

Berikut ini gambaran perkembangan kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB ADHB dari Tahun 2019 hingga Tahun 2023.



Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2024

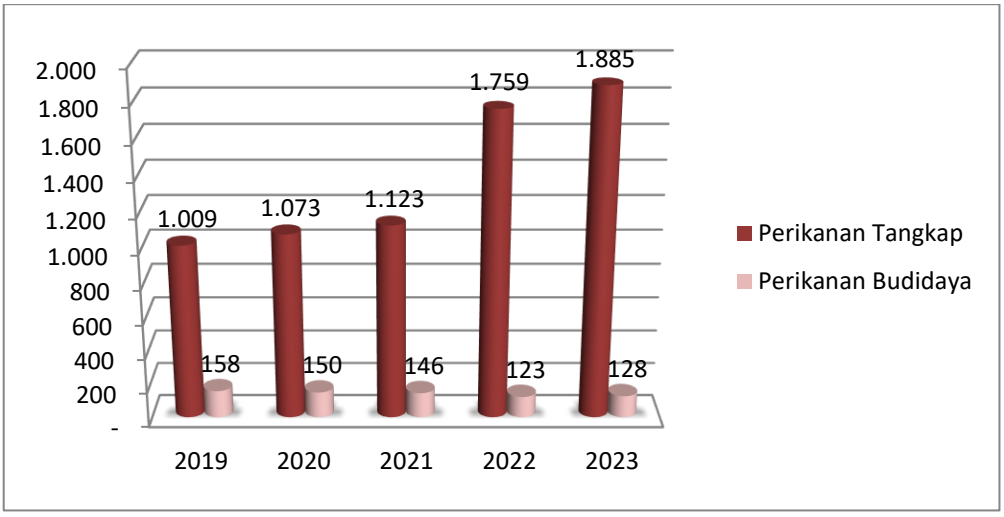
Gambar 2.47
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2019–2023

Gambar 2.47 di atas memperlihatkan kontribusi sektor industry pengolahan terhadap PDRB ADHB di Kota Palu Tahun 2019-2023 yang cenderung menurun tiap tahunnya. Meskipun pada Tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 0,31 %, namun pada tiga tahun terakhir yakni Tahun 2021-2023 mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 0,21 % per tahun, di mana penurunan persentase terbesar terjadi pada Tahun 2023 sebesar 0,35 % dan terkecil pada Tahun 2021 sebesar 0,1 %.

7) Kelautan dan Perikanan

Produksi Perikanan di Kota Palu Tahun 2023 tercatat sebesar 2.013 ton, atau naik 131 ton dari Tahun 2022. Produksi tersebut terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 1.885 ton, dan perikanan budidaya sebesar 128 ton.

Berikut produksi perikanan di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Gambar 2.48 di bawah ini:



Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.48
Produksi Ikan di Kota Palu (Ton) Tahun 2019 – 2023

2.3.4 Fokus Layanan Penunjang Urusan

1) Perencanaan Pembangunan

Diperhatikan dari aspek dokumen perencanaan, Kota Palu telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebagai payung hukum atas tersedianya dokumen perencanaan: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 (lima) tahun untuk setiap periode kepemimpinan Kota Palu yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda)/Peraturan Kepala Daerah (Perkada), yang disertai dengan tersedianya dokumen perencanaan: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Perkada.

Ketersediaan dokumen perencanaan ini juga telah ditunjang dengan ketersediaan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang telah ditetapkan dengan Perda, serta penjabaran

konsistensi dari program-program seperti program RPJMD kedalam RKPD dan program RKPD ke dalam APBD.

Tingkat Konsistensi Program dalam dokumen P-RKPD Kota Palu Triwulan IV Tahun 2023 terhadap RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 terdapat 185 program P-RKPD yang konsisten terhadap 229 program RPJMD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 80.79% (Konsistensi tinggi), terdapat 185 Program APBD yang konsisten terhadap 185 Program P-RKPD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 100.00% (Konsistensi sangat tinggi) dan terdapat 185 Program APBD yang konsisten terhadap 229 Program RPJMD dengan nilai keselarasan atau konsistensinya 80.79% (Konsistensi tinggi).

2) Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kota Palu Tahun 2019-2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kota Palu Tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi dengan rata-rata sebesar 28,35% tiap tahunnya. Hal ini terjadi di antaranya disebabkan oleh adanya sejumlah belanja daerah dari sisi anggaran yang direncanakan/ditargetkan 100% sesuai kebutuhan namun pada pelaksanaannya tidak terealisasi 100% sebagaimana yang direncanakan namun dari sisi fisiknya dan kinerja sudah mencapai 100%. Berikut Persentase Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.102
Persentase Silpa terhadap APBD Kota Palu Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Total SILPA (Rp)	1.033.071.024.850,18	602.363.096.947,52	400.643.310.355,17	206.761.525.708,40	173.615.555.692
2	Total APBD (Rp)	2.151.228.808.801,80	1.231.232.010.908,66	1.907.058.605.213,00	1.524.123.190.688,00	1.693.833.414.190
% Silpa		48,02	48,92	21,01	13,57	10,25

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2024

Persentase belanja pendidikan 20% di Kota Palu Tahun 2019-2023 masing-masing adalah 16,62%, 28,27%, 18,77%, 22,75%, dan 23,42%. Berikut Persentase belanja pendidikan 20% di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.103
Persentase Belanja Pendidikan 20% Kota Palu Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (20%) (Rp)	357.476.512.500,00	348.073.974.618,00	357.997.262.163,00	346.733.092.773,00	396.721.066.535
2	Total APBD (Rp)	2.151.228.808.801,80	1.231.232.010.908,66	1.907.058.605.213,00	1.524.123.190.688,00	1.693.833.414.190
Persentase		16,62	28,27	18,77	22,75	23,42

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2024

Persentase belanja kesehatan 10% di Kota Palu Tahun 2019-2023 masing-masing adalah 6,99%, 9,97%, 19,08%, 11,07%, dan 20,26%. Berikut Persentase belanja kesehatan 10% di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.104
Persentase Belanja Kesehatan 10% Kota Palu Tahun 2019-2023

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Belanja Bidang Urusan kesehatan (10%) (Rp)	150.476.422.214,00	122.718.012.552,00	363.856.501.748,00	168.660.427.940,00	343.210.895.824
2	Total APBD (Rp)	2.151.228.808.801,80	1.231.232.010.908,66	1.907.058.605.213,00	1.524.123.190.688,00	1.693.833.414.190
Persentase		6,99	9,97	19,08	11,07	20,26

Sumber: Sistem Informasi Pemerintah daerah Tahun 2024

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah. Daya saing *(competitiveness)* merupakan satu diantara faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan.

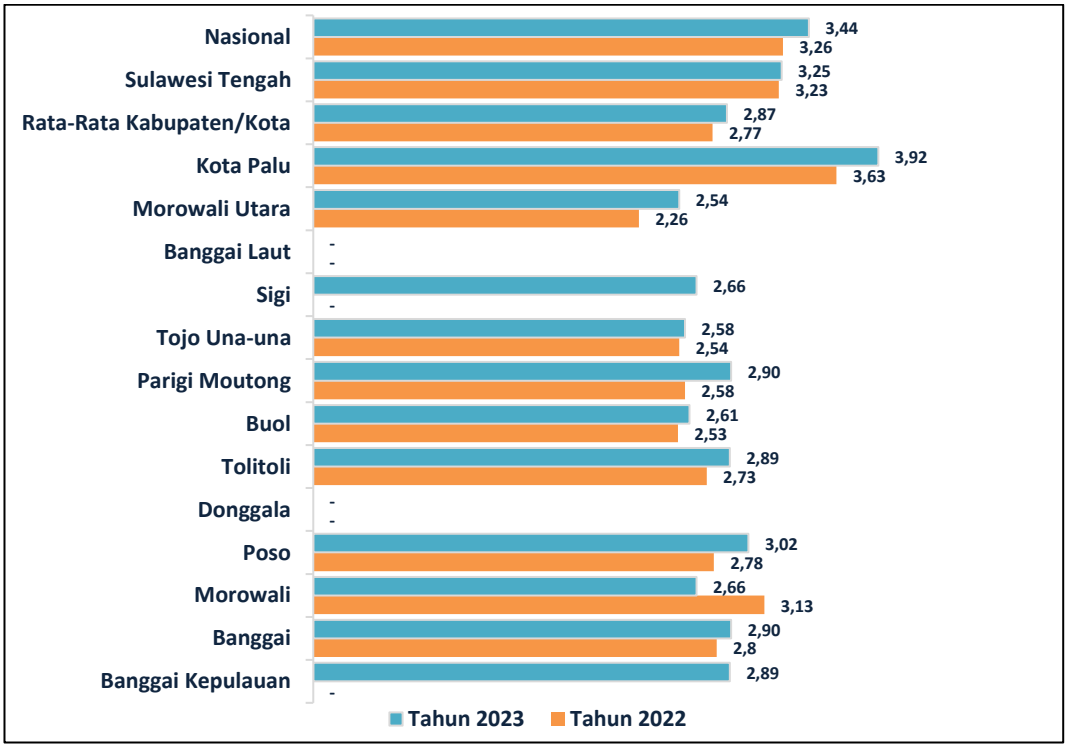
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Palu di Tahun 2023 sebesar 3,93 meningkat dari Tahun 2022 sebesar 3,63. Tahun 2023 IDSD Kota Palu menjadi yang tertinggi di kawasan timur Indonesia dan peringkat 11 nasional. IDSD merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. Seperti IDSD 2022, pengukuran pada IDSD 2023 ini mengadopsi kerangka konseptual dan metode pengukuran *Global Competitiveness Index* (GCI) 2019 dari *World Economic Forum* (WEF) yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi yang tersusun dari 12 pilar. Hasil pengukuran IDSD Tahun 2023 ditampilkan pada Tabel 2.105.

Tabel 2.105
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2023

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
PROV. SULAWESI TENGAH	3,92	1,94	2,88	3,62	3,66	3,77	3,34	3,96	2,18	4,41	2,89	2,47	3,25
RATA-RATA KAB/KOTA	4,00	1,80	3,21	3,46	3,71	3,37	2,14	3,65	0,93	4,01	2,35	1,28	2,87
BANGGAI KEPULAUAN	3,92	1,55	2,98	3,19	3,59	3,08	3,12	4,03	0,76	3,55	3,99	0,94	2,89
BANGGAI	4,30	1,53	3,23	3,53	3,91	3,39	1,18	3,77	1,13	4,42	2,25	2,14	2,90
MOROWALI	3,85	1,55	3,37	3,70	3,78	3,38	0,17	3,51	0,44	4,97	2,75	0,41	2,66
POSO	4,14	1,77	3,50	3,54	3,94	3,62	3,16	2,90	1,15	3,93	2,69	1,90	3,02
DONGGALA	-	1,93	2,94	3,43	3,66	3,09	2,00	3,54	0,55	4,05	1,51	0,63	-
TOLI-TOLI	4,07	1,55	3,31	3,34	3,56	3,23	2,31	4,09	1,61	3,88	2,05	1,73	2,89
BUOL	4,09	1,39	2,91	3,27	3,79	3,42	1,42	3,81	0,38	3,71	2,31	0,84	2,61
PARIGI MOUTONG	4,01	2,26	3,37	3,83	3,40	3,14	2,50	3,27	1,29	4,19	2,27	1,23	2,90
TOJO UNA-UNA	3,93	1,59	2,67	3,43	3,54	3,17	2,43	3,84	0,32	3,70	1,58	0,79	2,58
SIGI	3,81	2,14	2,84	3,66	3,85	3,35	2,67	3,35	0,30	3,92	1,48	0,58	2,66
BANGGAI LAUT	4,03	1,74	3,11	2,81	3,52	3,15	1,60	3,96	-	3,33	2,02	0,47	-
MOROWALI UTARA	3,80	1,79	3,14	3,69	3,82	3,43	0,86	3,15	0,09	4,19	1,96	0,52	2,54
PALU	4,04	2,68	4,32	3,53	3,93	4,30	4,41	4,26	3,11	4,34	3,66	4,44	3,92

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Hasil pengukuran IDSD Tahun 2022-2023 untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah disajikan dalam Gambar 2.49.



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2024

Gambar 2.49
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2023

Gambaran umum kondisi daerah yang berhubungan dengan aspek daya saing daerah meliputi capaian pembangunan daerah yang dapat dilihat dari capaian pemerintah daerah terhadap aspek-aspek antara lain; Kemampuan Ekonomi Daerah, Fasilitas Wilayah/Infrastruktur, Iklim Berinvestasi dan Sumber Daya Manusia yang dijelaskan lebih detail sebagaimana berikut:

2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

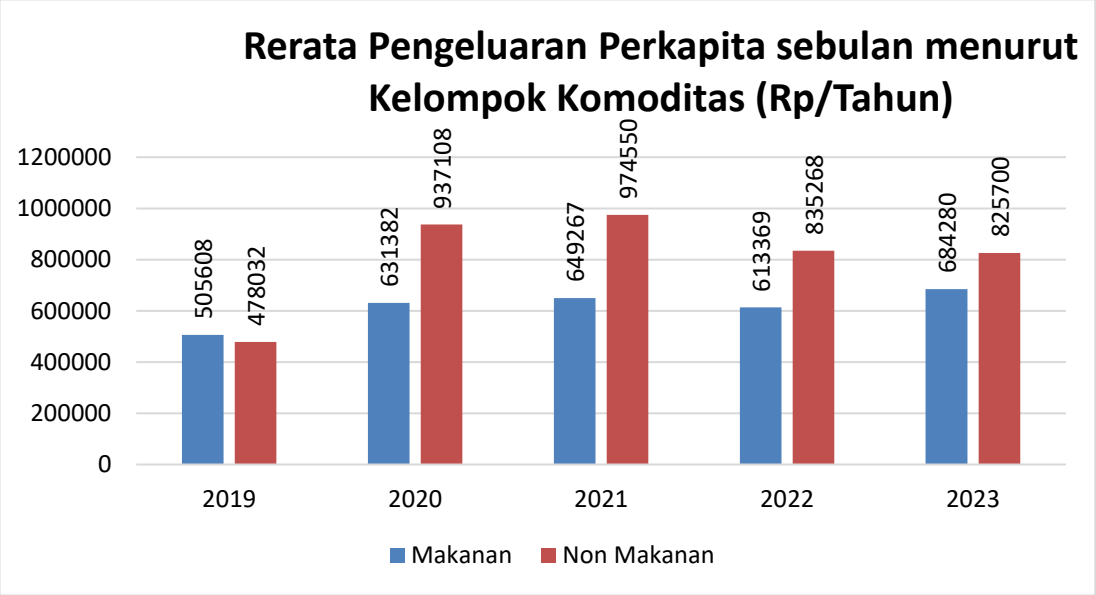
Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah, dimana kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi yang telah berada, dan akan masuk ke suatu daerah. Daya tarik investasi yang tinggi dan bergerak secara cepat aktivitas ekonomi daerah akan menciptakan terjadinya efek ganda (*multiflier effect*) dan efek menjalar (*contagious effect*)bagi peningkatan daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan kemampuan ekonomi daerah dapat dilihat dari: Pengeluaran Rata-Rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita/Angka Konsumsi Rata-Rata Rumah Tangga per Kapita Sebulan, dan Produktivitas Total Daerah.

1) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan maka porsi pengeluaran akan bergeser dari pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena

elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang bukan makanan atau ditabung. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.



Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.50
Rerata Pengeluaran Perkapita sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rp/Tahun) Tahun 2019-2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pengeluaran perkapita menurut kelompok komoditas setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun terakhir. Tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita sebulan menurut kelompok

komoditas masyarakat Kota Palu Tahun 2019-2024 dari kelompok makanan naik sebesar 24,88% di Tahun 2020 dari tahun sebelumnya kemudian naik lagi sebesar 2,83% di Tahun 2021 dan mengalami penurunan sebesar 5,53% di Tahun 2022. Kemudian mengalami kenaikan sebesar 11,56% di Tahun 2023. Kelompok non makanan juga menunjukkan kenaikan yang sangat tinggi sebesar 96,03% di tahun 2020 dan kembali naik sebesar 4,00% di tahun 2021. Kelompok ini mengalami penurunan sebesar 14,29% di Tahun 2022. Pada tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 1,15%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Kota Palu sejak pasca gempa bumi Tahun 2019 kembali mulai mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Lebih jelasnya, secara rinci ditampilkan persentase penduduk menurut golongan pengeluaran per kapita sebulan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.106
Persentase Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan Tahun 2023

Golongan Pengeluaran	Kota Palu	Sulawesi Tengah
< 150000	0,00	0,00
150.000-199.999	0,00	0,00
200.000-299.999	0,00	0,16
300.000-499.999	1,12	7,25
500.000-749.999	12,52	19,94
750.000-999.999	27,39	26,39
1.000.000-1.499.999	22,93	26,44
1.500.000+	36,04	19,81

Sumber : BPS Kota Palu, dan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2024

Tabel di atas memperlihatkan bahwa pengeluaran masyarakat Kota Palu Tahun 2023 didominasi oleh 6 (enam) golongan pengeluaran dengan persentase terbesar sebesar 27,39% yaitu golongan pengeluaran senilai Rp.750.000-Rp.999.999 kemudian golongan pengeluaran Rp.1.000.000-Rp.1.499.999+ sebesar 22,93%. Kondisi ini masih menunjukkan persentase yang lebih tinggi dibanding provinsi yang hanya mencapai 26,39% untuk golongan pengeluaran senilai Rp.750.000-Rp.999.999, dan 26,44% untuk golongan pengeluaran senilai Rp.1.000.000-Rp.1.499.999. Selain pengeluaran golongan makanan, juga terdapat pengeluaran bukan makanan di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.107
Rata-rata Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Palu Sebulan Menurut Kelompok Bukan Makanan Tahun 2022-2023

Kelompok Bukan Makanan	Tahun		Tingkat Pertumbuhan Pengeluaran per Kapita (%)
	2022 (Rp)	2023 (Rp)	
Perumahan dan Fasilitas Rumah	500.052	470.726	(5,86)
Aneka Barang dan Jasa	142.993	167.483	17,13
Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	38.763	43.437	12,06
Barang Yang Tahan Lama	83.513	34.690	(58,46)
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	54.620	65.705	20,29
Keperluan Pesta dan Upacara	15.326	43.659	184,87
Jumlah	**835.268**	**825.700**	**(1,15)**

Sumber : BPS Kota Palu Tahun 2024 (diolah)

Tabel di atas menunjukkan bahwa terjadi tingkat pertumbuhan pengeluaran per kapita tertinggi pada Tahun 2023 dari tahun sebelumnya pada kelompok bukan makanan “Keperluan Pesta dan Upacara” sebesar 184,87% sebulan, dan terendah pada “Barang Yang Tahan Lama ” sebesar -58,46% sebulan. Tingkat Pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga Kota Palu menurut kelompok bukan makanan Tahun 2023 menurun sebesar 1.15% sebulan dari 835.268 rupiah menjadi 825.700 rupiah.

Merujuk dari teori atau hasil penelitian bahwa pengaruh pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu apabila terjadi peningkatan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 1 rupiah maka akan terjadi pertambahan pertumbuhan ekonomi. Jika hal ini berlaku sebaliknya maka dengan melihat penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga Kota Palu Tahun 2023 sebesar 1.15 rupiah sebulan maka terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 1.15 rupiah sebulan.

Selanjutnya produktivitas total daerah menggambarkan besarnya tingkat produktivitas setiap sektor dalam aktivitas perekonomian suatu daerah. Sektor/Lapangan Usaha di Kota Palu yang menunjang PDRB Kota Palu terdiri dari 17 (tujuh belas) Lapangan Usaha, yaitu: pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; real estate; jasa perusahaan; administrasi

pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa pendidikan; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; serta jasa lainnya.

Berdasarkan tujuh belas lapangan usaha tersebut, yang memiliki kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Palu Tahun 2023 adalah lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (17,98%); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (9,18%); dan Transportasi dan Pergudangan (9,08%).

Tabel 2.108
Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2019-2023

No	Lapangan Usaha	2019		2020		2021		2022*		2023**	
1	2	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK	HB	HK
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	0.94	(0,86)	0.04	(1,54)	2.82	0,86	10,10	2,77	7,90	1,87
B	Pertambangan dan Penggalian	24.58	14,98	(19.65)	(20,83)	9.16	7,20	14,18	6,12	23,07	17,98
C	Industri Pengolahan	0.63	(0,57)	1.11	(1,62)	6.74	3,31	5,89	3,31	2,19	1,81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2.52	2,10	1.18	1,04	6.86	5,13	11,53	9,84	9,04	7,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(0.79)	(0,22)	3.98	(0,90)	9.07	4,86	6,61	3,27	3,64	2,59
F	Konstruksi	24.35	22,51	1.03	(2,21)	7.82	4,73	2,47	2,13	5,72	1,68
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.61	(0,40)	(4.46)	(6,31)	15.06	12,57	16,86	9,10	10,08	6,10
H	Transportasi dan Pergudangan	7.14	(1,81)	(35.37)	(35,91)	10.36	8,84	30,89	15,47	16,73	9,08
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	(4.40)	(10,56)	(11.21)	(13,83)	17.92	15,88	11,51	10,56	11,24	9,18
J	Informasi dan Komunikasi	14.76	9,87	5.09	8,24	7.44	6,11	5,58	4,63	5,72	5,82
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	(1.87)	(4,82)	7.07	7,24	11.65	9,58	7,16	(0,21)	4,77	2,79
L	Real Estate	0.48	(3,20)	1.44	0,21	6.84	3,57	10,11	7,65	14,38	7,47
M	Jasa Perusahaan	5.80	5,05	(1.41)	(3,07)	4.66	2,75	9,53	5,96	10,00	5,78
N	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6.39	4,03	3.36	1,49	6.54	4,75	5,73	1,24	3,77	1,78
O	Jasa Pendidikan	5.46	3,18	(1.00)	(2,25)	3.60	1,84	3,72	0,99	6,06	4,82
P	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.92	9,42	7.92	7,41	12.53	7,03	7,80	3,64	10,04	6,09
Q	Jasa lainnya	5.92	2,26	(0.63)	(1,29)	5.04	3,11	8,29	5,64	8,57	6,15
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		**10.15**	**5,65**	**(3.62)**	**(4,43)**	**8.32**	**5,97**	**8,84**	**4,32**	**8,23**	**4,96**
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		**10.15**	**5,65**	**(3.62)**	**(4,43)**	**8.32**	**5,97**	**8,84**	**4,32**	**8,23**	**4,96**

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Tabel di atas menujukkan bahwa secara total produktivitas total daerah Kota Palu mengalami masa fluktuatif selama lima tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019-2023 masing-masing sebesar 5,65;-4,43; 5,97 ; 4,32; dan 4,96. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas angkatan kerja dalam pengembangan lapangan usaha di Kota Palu berbeda dari tahun ke tahun.

2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fasilitas wilayah atau infrastruktur adalah penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaan (availability) fasilitas untuk mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Semakin tinggi tingkat ketersediaan fasilitas wilayah/infrastruktur, maka semakin tinggi pula daya saing daerah dalam menghadapi persaingan (competitiveness).

Gambaran umum kondisi daya saing daerah terkait dengan fasilitas wilayah/infrastruktur dapat dilihat dari: aspek perhubungan, penataan ruang, perbankan, rumah makan, hotel, lingkungan hidup, serta komunikasi dan informatika.

1) Perhubungan

Transportasi sangat penting peranannya dalam perkembangan suatu daerah karena menyediakan akses bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa sehari-hari, serta meningkatkan kehidupan sosial ekonomi. Pemerintah Kota Palu sampai dengan Tahun 2022 telah membangun jalan sepanjang 851,563 km, sementara kendaraan yang wajib uji berjumlah 1.965 unit. Berikut data panjang jalan dan jumlah kendaraan wajib uji di Kota Palu:

Tabel 2.109
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
Tahun 2019-2023

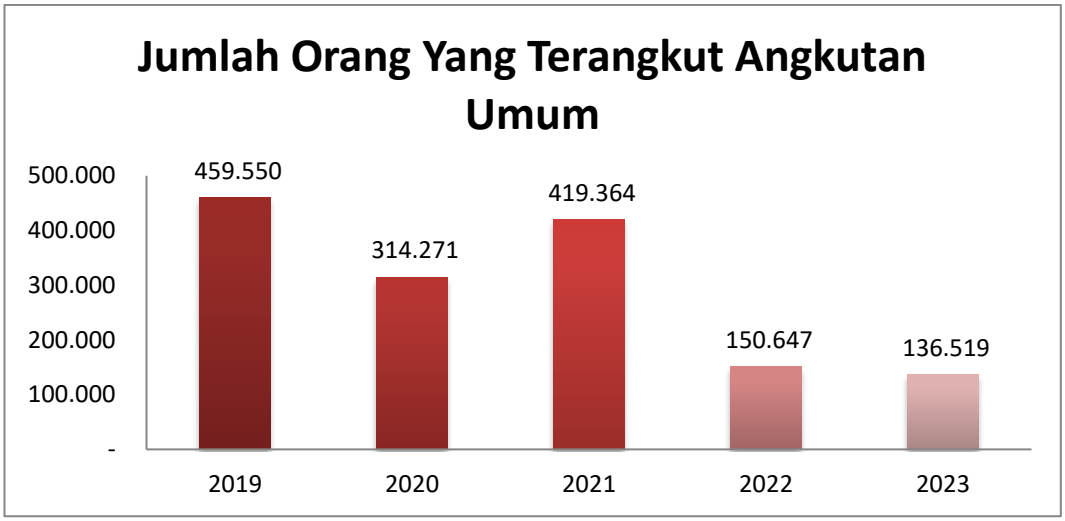
No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Panjang jalan (km)	851,558	851,563	851,563	851,563	851,563
2	Kendaraan wajib uji (unit)	1.152	534	151	1.965	298
3	Rasio Panjang Jalan/kendaraan	0,74	1,59	5,64	0,43	2,86

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kendaraan wajib uji di Kota Palu mengalami penurunan yang signifikan sebesar 383 unit di Tahun 2021 hingga menjadi 151 unit dari tahun sebelumnya sebesar 534 unit. Tahun 2023 mengalami kenaikan signifikan sebesar 1.667 unit hingga menjadi 1.965 unit dari tahun sebelumnya sebesar 298 unit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa adanya peningkatan keseimbangan antara jumlah kendaraan dengan panjang jalan yang dibangun oleh pemerintah sehingga menyebabkan rasio panjang jalan mengalami kenaikan di Tahun 2023. Kondisi ini dapat memberikan dampak yang positif dalam mengurangi jumlah kemacetan di wilayah Kota Palu.

Selanjutnya jumlah orang yang terangkut angkutan umum pada dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami fluktuatif. Ini tarjadi akibat imbas dari kejadian Bencana Alam berstatus Nasional (Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi) yang ada di Kota Palu, yang kemudian disusul dengan adanya pandemi Covid-19. Rendahnya jumlah orang yang terangkut angkutan umum disebabkan oleh tidak beraturannya trayek angkutan umum di Kota Palu, sehingga masyarakat (penumpang) lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dibanding angkutan umum.

Terlebih saat ini angkutan umum online lebih diminati oleh masyarakat umum dibandingkan dengan angkutan umum biasa. Berikut data jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kota Palu pada Gambar 2.49 di bawah ini:



Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palu, 2024

Gambar 2.51
Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Palu, Tahun 2019-2023

Selain transportasi darat, juga terdapat transportasi udara di Kota Palu yaitu Bandara Udara Mutiara Sis Aljufri yang mempunyai luas 12.511 meter persegi dengan daya tampung 800 penumpang dalam dua terminal. Bandara inilah yang menjadi pintu gerbang angkutan udara dari dan ke Kota Palu. Jumlah penumpang datang dan berangkat dari tahun 2019 hingga 2023 mengalami fluktuatif akibat adanya kejadian bencana alam dan pendemi Covid-19. Adapun jumlah penumpang yang datang, berangkat dan transit di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.110
Jumlah Penumpang Bandara Tahun 2019-2023

Tahun	Penumpang (Orang)		
	Datang	Berangkat	Transit
2019	608.820	622.957	34.773
2020	230.910	235.441	10.108
2021	217.814	217.998	0
2022	325.691	330.073	0
2023	379.431	379.914	0

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2024

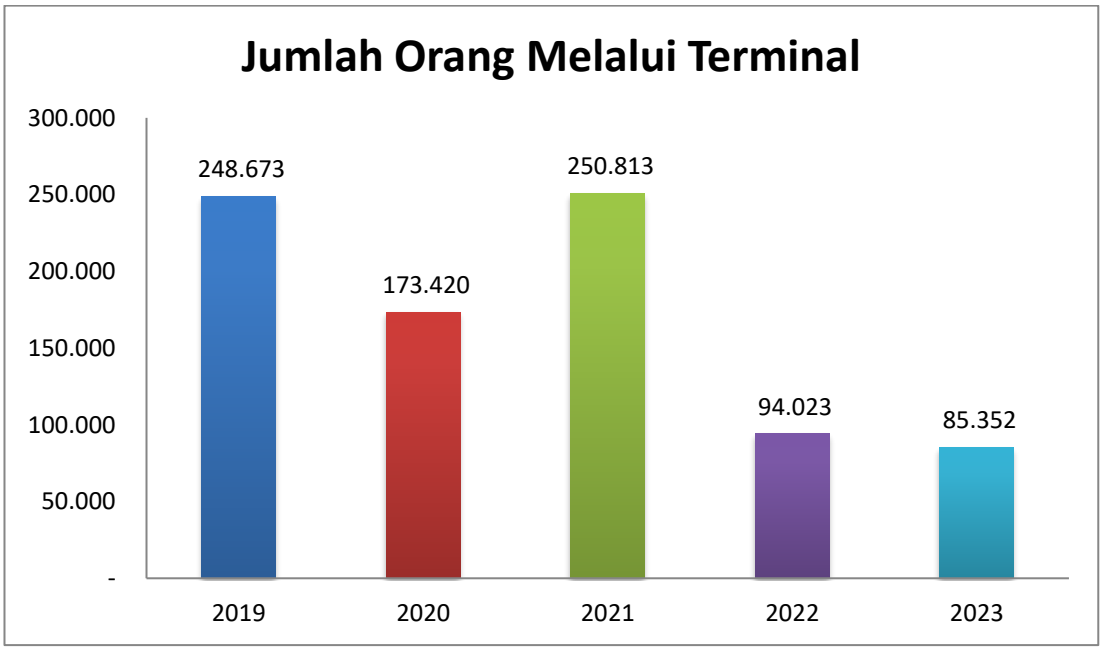
Pada transportasi laut, Kota Palu memiliki dua 2 pelabuhan yaitu Pantoloan dan Taipa. Pelabuhan Pantoloan melayani kapal yang memiliki kapasitas besar dengan rute antar pelabuhan dan antar pulau dan bahkan antar negara, sedangkan Pelabuhan Taipa melayani kapal yang berkapasitas kecil (kapal feri) dengan rute penyeberangan antar pulau. Jumlah penumpang pelabuhan cenderung mengalami penurunan, baik penumpang orang maupun barang selama kurun waktu Tahun 2017 hingga Tahun 2021. Hal ini disebabkan karena masyarakat cenderung memilih menggunakan transportasi darat dan udara. Gambaran mengenai jumlah penumpang baik orang maupun barang yang melalui Pelabuhan di Kota Palu tertera dalam Tabel 2.111 berikut ini:

Tabel 2.111
Jumlah Penumpang Pelabuhan (Pantoloan + Taipa)
Tahun 2017-2021

Tahun	Penumpang (Org)		Barang (Ton)	
	Datang	Berangkat	Dibongkar	Dimuat
2017	10.293	25.125	307.498	4.952
2018	6.668	23.419	399.191	3.615
2019	40.657	42.839	270.232	145.977
2020	16.805	17.890	255.806	29.825
2021	21.920	23.084	189.412	15.856

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Palu + PT Pelabuhan Indonesia

Sedangkan untuk transportasi darat, Kota Palu memiliki beberapa terminal angkutan umum yakni Terminal Mamboro, Terminal Tipo, Terminal Manonda dan Terminal Petobo. Adapun jumlah orang/penumpang yang melalui terminal adalah sebagai berikut:



Sumber : Dinas perhubungan Kota Palu Tahun 2024

Gambar 2.52
Jumlah Orang Yang Melalui Terminal

Berdasarkan gambar di atas, terjadi fluktuasi jumlah orang/penumpang yang melalui terminal selama lima tahun terakhir. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun 2020. Kondisi ini disebabkan pada saat itu Kota Palu mengalami Bencana Alam berstatus Nasional (Gempa Bumi, Tsunami dan Likuifaksi). Pada tahun 2021 jumlah orang/penumpang yang melalui terminal naik menjadi 250,813 setelah pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pada Tahun 2022-2023 mengalami penurun secara terus-menerus menjadi 94,023 dan 85,352.

Upaya menciptakan kelancaran dan ketertiban berlalu-lintas di Kota Palu, diperlukan ketersediaan rambu jalan. Perkembangan rambu jalan di Kota Palu diuraikan dalam Tabel 2.101. Selama 5 (lima) tahun terakhir perkembangan rambu dan marka jalan di Kota Palu mengalami fluktuatif. Pada Tahun 2019 jumlah pemasangan rambu lalu lintas di Kota Palu sebanyak 88 unit, dan terdapat 45 unit rambu lalu lintas pada Tahun 2023.

Tabel 2.112
Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan di Kota Palu Tahun 2019–2023

Tahun	Fasilitas Lalu Lintas	Jumlah	Ket
	I. Rambu Lalu Lintas :		
2019	Rambu Lalu Lintas	88	Unit
2020	Rambu Lalu Lintas	0	Unit
2021	Rambu Lalu Lintas	30	Unit
2022	Rambu Lalu Lintas	33	Unit
2023	Rambu Lalu Lintas	45	Unit

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Palu 2024

Sementara perkembangan jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Palu selama 4 (tahun) tahun terakhir diuraikan dalam Tabel 2.102. Seiring dengan meningkatnya ketersediaan rambu lalu lintas dan marka jalan di Kota Palu, perkembangan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Palu selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan. Pada Tahun 2019 jumlah kecelakaan lalu lintas di Kota Palu sebanyak 1.603 kasus terus menurun hingga menjadi 154 kasus pada Tahun 2021. Tahun 2022 jumlah kasus meningkat kembali hingga mencapai 200 kasus kecelakaan lalu lintas sebagaimana tertera pada table berikut ini:

Tabel 2.113
Jumlah Kasus Kecelakaan Lalu Lintas
di Kota Palu Tahun 2019–2023

Tahun	Jumlah Kasus
2019	1.603 Kasus
2020	1.042 Kasus
2021	154 Kasus
2022	200 Kasus
2023	157 Kasus

Sumber : Data POLRES Kota Palu 2024

2) Penataan Ruang

Penataan ruang sangat penting untuk dapat menjamin stabilitas dan keberlanjutan pembangunan Kota Palu yang berwawasan lingkungan. Data luas kawasan lindung, pemukiman, kawasan industri, hutan rakyat, ruang terbuka hijau, wilayah budidaya dan wilayah perkotaan secara rinci dijabarkan melalui Luasan Pola Ruang pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.114
Luasan Pola Ruang Kota Palu Tahun 2019-2023

NAMA KAWASAN	LUAS (HA)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kawasan Lindung	19.496,78	19.496,78	19.496,78	13.825,44	11.424,03
Kawasan Hutan Lindung	7.141,00	7.141,00	7.141,00	6.380,07	6.380,07
Perlindungan Setempat	855,66	855,66	855,66	532,38	218,15
Taman Hutan Raya	5.789,00	5.789,00	5.789,00	4.493,73	2.559
Kawasan Cagar Budaya	5.535,80	5.535,80	5.535,80	2,72	1,81
Ruang terbuka Hijau	175,32	175,32	175,32	2.416,54	2.265
Kawasan Budidaya					

NAMA KAWASAN	LUAS (HA)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kawasan Hutan Produksi Terbatas	4.239,41	4.239,41	4.239,41	3.229,57	5.136
Industri	1.534,13	1.534,14	1.534,15	1.457,00	1.395
Kawasan Pariwisata	291,51	291,51	291,51	128,12	75,82
Kawasan Permukiman	**4.981**	**4.981**	**4.981**	**11.419**	**11.376**
1 Kawasan Perumahan	4.003,10	4.003,10	4.003,10	9.044,00	9.044
2 Kawasan Perdagangan dan Jasa	430,80	430,80	430,80	1.382,00	1.382
3 Kawasan Perkantoran	148,49	148,49	148,49	251,49	236
4 Kawasan Pendidikan	328,05	328,05	328,05	362,83	403
5 Kawasan Peribadatan	45,19	45,19	45,19	34,19	12
6 Kawasan Kesehatan	25,25	25,25	25,25	42,18	37
7 Kawasan Olahraga	-	-	-	7,84	7
8 Kawasan Transportasi	-	-	-	294,03	255
Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik				16,14	18
Kawasan Pertanian	2.487,67	2.487,67	2.487,67	4.668,49	5.321
Kawasan Perkebunan	4.679,00	4.679,00	4.679,00	4.894,00	4.894
Kawasan Tanaman Pangan	557,00	557,00	557,00	427,00	427
Kawasan Pertanahanan dan Keamanan	52,20	52,20	52,20	231,76	265
Kawasan Perikanan Budidaya	10.460,00	10.460,00	10.460,00	35,00	35
Rawan Bencana	**2.326,12**	**2.326,12**	**2.326,12**	**2.326,12**	**5.774**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu Tahun 2010-2030, 2021-2041, dan Dokumen Evaluasi Pemanfaatan Ruang Kota Palu Tahun 2018

Tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar luasan dalam pola ruang Kota Palu Tahun 2023 mengalami penurunan. Luasan Kawasan lindung mengalami penurunan sejak dua tahun terakhir yaitu 13.825 Ha di Tahun 2022 dan 11.424 Ha di Tahun 2023. Begitupun dengan Kawasan Industri menjadi 1.457 Ha di Tahun 2022 dan 1.395 Ha di Tahun 2022.

Selain hal tersebut di atas, daya saing daerah ditunjang oleh fasilitas perbankan, rumah makan, dan perhotelan. Ketiga jenis fasilitas tersebut mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun sebagaimana terlihat pada tabel di bawah.

Perkembangan jumlah bank di Kota Palu mengalami peningkatan relative kecil dari Tahun 2019-2023 sebanyak 28 Bank, yakni Bank umum sebanyak 21 buah sedangkan BPR berjumlah 7 Bank. Data perkembangan perbankan di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.115
Jumlah Bank di Kota Palu Tahun 2019-2023

NO	Sektor	Jumlah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Bank Umum	22	22	23	45	21
2.	BPR	5	5	5	8	7
Total		**27**	**27**	**28**	**53**	**28**

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka 2024

Selain fasilitas perbankan, fasilitas rumah makan dan restoran juga mengalami peningkatan. Jumlah rumah makan dan restoran di Kota Palu sebanyak 55 unit pada Tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 139 unit di Tahun 2023 atau tumbuh sebesar 152,73 %. Rumah makan tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kota Palu, dengan beragam variasi masakan

dan minuman. Keberagaman kuliner yang ada di Kota Palu merupakan salah satu potensi dan daya tarik tersendiri dibandingkan dengan daerah lainnya. Adapun perkembangan jumlah rumah makan dan restoran di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.116
Jumlah Rumah Makan dan Restoran di Kota Palu
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Rumah Makan	Jumlah Restoran	Total
2019	24	31	55
2020	56	44	100
2021	91	40	131
2022	45	90	135
2023	104	35	139

Sumber : SDI Dinas Pariwisata Kota Palu, 2024

Dalam memberikan pelayanan terhadap wisatawan asing maupun domestik yang datang ke Kota Palu, diperlukan tersedianya sarana akomodasi (hotel) yang memadai. Fasilitas perhotelan mengalami peningkatan setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun terakhir, baik jenis hotel berbintang maupun non berbintang. Selama kurun waktu lima tahun, terjadi pertumbuhan hotel non berbintang sebesar 160,98% atau bertambah sebanyak 66 buah hotel. Bertambahnya jumlah hotel non berbintang, maka terjadi peningkatan jumlah kamar dan tempat tidur hotel. Untuk hotel berbintang justru mengalami penurunan sejak Tahun 2021 hingga 2023 yaitu sebesar 27,27% atau berkurang 3 buah hotel. Secara rinci jumlah hotel di Kota Palu adalah sebagai berikut:

Tabel 2.117
Jumlah Hotel di Kota Palu Tahun 2019-2023

No.	Jenis	2019		2020		2021		2022		2023	
1	Hotel berbintang	8	16,3%	7	6,03%	11	21,2	7	5,73%	8	6,96%
2	Hotel non berbintang	41	83,7%	109	93,9%	41	78,8%	115	94,3%	107	93,1%
Total		**49**	**100%**	**116**	**100%**	**52**	**100%**	**122**	**100%**	**115**	**100%**

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka, 2024

3) Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup yang baik pada suatu daerah dapat ditentukan berdasarkan beberapa indikator di antaranya ketersediaan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta pengintegrasiannya dalam dokumen perencanaan pembangunan;terselenggaranya KLHS untuk kebijakan, rencana, program; hasil pengukuran indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan; penghargaan lingkungan hidup; peran dan keterlibatan Masyarakat Hukum Adat (MHA); penanganan persampahan; dan lain-lain.

Ketersediaan dokumen RPPLH Kota Palu Tahun 2023 telah terpenuhi sehingga pengintegrasiannya dalam dokumen perencanaan dapat dijadikan acuan dalam memenuhi harapan. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kota Palu merupakan salah satu asas dalam implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam kurung waktu selama 30 (tiga puluh) tahun atau 2023-2053. Artinya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dan bersinergi dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati,

dan perubahan iklim; dengan memperhatikan karakteristik sumberdaya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Pertumbuhan kota menghadirkan tantangan baru untuk mengamankan air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ekosistem menyuplai air segar untuk minum dan penggunaan manusia lainnya mempengaruhi jumlah air yang tersedia.

Berikut data penduduk terlayani air minum bagi masyarakat Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera dalam Tabel 2.117 di bawah ini:

Tabel 2.118
penduduk terlayani Air Minum di Kota Palu
Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Non PDAM		Sambungan Rumah(SR)			Penduduk Terlayani (jiwa)	Penduduk Terlayani (KK/RT)	Jumlah Penduduk Kota Palu (jiwa)
		Jumlah Rumah	Jumlah Terlayani	PDAM Donggala	PDAM Kota Palu	Jumlah Terlayani			
1	2019	48.123	240.615	14.434	8.156	112.950	353.565	101.019	391.383
2	2020	48.124	240.620	14.434	8.285	113.595	354.215	101.204	373.218
3	2021	48.125	240.620	12.601	8.652	106.265	346.885	100.256	377.030
4	2022	93.078	279.234	11.306	9.124	102.150	361.924	103.407	381.572
5	2023	97.061	291.183	14.644	9.023	71.001	362.184	127.712	387.493

Sumber: Dinas PU Kota Palu 2024

Tabel 2.107 memperlihatkan jumlah penduduk terlayani air minum di Kota Palu, baik menggunakan sambungan rumah melalui PDAM dan Non PDAM.

Jumlah yang disajikan pada tabel menunjukkan bahwa layanan sistem penyediaan air minum yang ada di Kota Palu mencapai 93,47%. Hal ini menunjukkan bahwa sumber air minum bagi rumah tangga di Kota Palu sudah terbilang layak konsumsi. Walaupun demikian, masih terdapat sekitar 18,32% yang

menggunakan air minum yang kualitasnya aman dan sehat bagi pemakainya.

4) Komunikasi dan Informatika

Daya saing daerah pada aspek komunikasi dan informatika didasarkan pada penggunaan energi listrik dan alat komunikasi telepon. Salah satu kebutuhan yang vital bagi penduduk di Kota Palu yaitu energi listrik yang dikelola oleh PLN, baik untuk sumber penerangan maupun sumber energi lain.

Secara umum dalam kurun waktu lima tahun (2019-2023) produksi listrik yang di hasilkan oleh PLN mengalami kenaikan, dengan kenaikan terbesar 98.149.455 KWh pada Tahun 2023 dan terendah 5.415.919 KWh di Tahun 2022. Produksi listrik yang meningkat diiringi dengan nilai yang terjual akibat adanya kenaikan jumlah pelanggan yang terjadi antara Tahun 2019 sampai Tahun 2023. Sementara itu nilai yang dipakai sendiri dan susut/hilang selama Tahun 2023 menunjukkan trend positif dari 125 ribu Kwh dan 69 juta Kwh.

Tabel 2.119
Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik
Tahun 2019-2023

Tahun	Daya Terpasang (KW)	Produksi Listrik (KWh)	Listrik Terjual (KWh)	Dipakai Sendiri (KWh)	Susut/Hilang (KWh)
2019	290.189	516.135.639	453.953.681	n/a	73.764.409
2020	183.010	557.896.714	506.708.300	334.738	57.615.761
2021	201.285	594.488.027	535.914.759	124.251	58.573.267
2022	451.400	599.903.946	547.346.442	186.685	63.557.504
2023	426.466.687	698.053.401	628.207.668	125.563	69.720.170

Sumber: BPS Kota Palu Dalam Angka, 2020 s.d 2024

Rata-rata rasio pengguna listrik di Kota Palu oleh rumah tangga sekitar 181,3 persen dengan rasio tertinggi 197,14% di Tahun 2021 dan terendah 166,77% di Tahun 2019. Rasio ini terus

mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak Tahun 2019 hingga 2021, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan dan naik kembali pada tahun 2023. Berikut rasio rumah tangga yang menggunakan listrik PLN di Kota Palu Tahun 2019-2023 tertera pada tabel berikut:

Tabel 2.120
Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN)
Tahun 2019-2023

Tahun	Rumah Tangga	Rumah Tangga Pengguna Listrik	Rasio (%)
2019	111.214	185.474	166,77
2020	115.696	198.031	171,16
2021	121.120	238.781	197,14
2022	122.093	223.908	183,39
2023	127.712	240.183	188,07

Sumber: Dukcapil dan Kota Palu Dalam Angka 2024

Selain listrik, kebutuhan masyarakat akan Telepon juga sangat penting sebagai alat komunikasi. Adapun prosentase penduduk yang menggunakan telepon di Kota Palu pada Tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.121
Penduduk yang Menggunakan Telepon
Tahun 2014-2018

Tahun	Pengguna Telepon	Penduduk	Rasio (%)
2014	15.500	362.202	43.44
2015	21.689	368.086	25.75
2016	5.365	374.020	21.19
2017	4.782	379.782	17.12
2018	2.673	385.691	13.62

Sumber : BPS (data diolah) Tahun 2019

Rasio penduduk yang menggunakan telepon cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2014-2018. Penurunan rasio pengguna telepon terhadap penduduk disebabkan oleh peralihan pengguna telepon pelanggan menjadi pengguna telepon bergerak.

2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Investasi merupakan mesin pertumbuhan yang dapat meningkatkan aktivitas perekonomian daerah. Makin tinggi tingkat investasi yang masuk ke suatu daerah, makin tinggi pula pertumbuhan ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Investasi daerah yang tinggi dapat mencipatkan lapangan kerja baru dan kesempatan yang tinggi bagi daerah. Investasi yang masuk dapat menghasilkan output, pendapatan dan kesempatan kerja bagi masyarakat di daerah.

Pemerintah Kota Palu harus dapat mencipatkan iklim investasi yang kondusif dan bersahabat dengan investor. Tanpa terciptanya iklim investasi yang baik, maka akan sangat sulit untuk menarik investor untuk menanamankan investasinya di daerah. Berbagai faktor penting terkait dengan investasi di daerah harus dibenahi dan ditata dengan baik. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan iklim investasi salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja; Angka Kriminalitas, Jumlah Demonstrasi, Kemudahan Perizinan, Pengenaan Pajak Daerah, dan Peraturan Daerah (Perda) yang Mendukung Iklim Investasi.

1) Angka Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan angka kriminalitas merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan iklim investasi. Stabilitas suatu daerah dapat

meningkatkan jumlah investor yang akan berusaha di daerah tersebut. Angka kriminalitas yang tertangani di Kota Palu cenderung rendah dan fluktuatif selama kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023), hal ini dapat mempengaruhi kalangan investor untuk berinvestasi di Kota Palu. Adapun perkembangan angka kriminalitas di Kota Palu selama kurun waktu lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.122
Angka Kriminalitas yang tertangani di Kota Palu
Tahun 2019-2023

Tahun	Jumlah Tindak Kriminal	Jumlah Tindak Kriminal tertangani	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas yang tertangani
2019	868	599	391.383	15,71
2020	1063	760	373.218	20,36
2021	939	683	377.030	18,12
2022	1189	656	381.572	17,01
2023	760	270	387.493	6,97

Sumber: Kepolisian Resort Palu 2024

2) Jumlah Demonstrasi

Jumlah demonstrasi/unjuk rasa di Kota Palu Tahun 2018-2021 cenderung fluktuatif. Bidang politik dan bidang ekonomi Tahun 2019 naik dengan jumlah total sebesar 97 kali dan turun menjadi 27 kali di Tahun 2020. Untuk bidang lainnya terus mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebesar 21 kali menjadi 16 kali dan 4 kali di Tahun 2020 dan 2021. Adapun jumlah demonstrasi di Kota Palu dijabarkan secara rinci pada tabel berikut ini:

Tabel 2.123
Jumlah Demonstrasi di Kota Palu Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Bidang Politik	24	61	3	n/a	n/a
2	Bidang Ekonomi	2	36	24	n/a	n/a
3	Bidang lainnya	n/a	21	16	4	n/a
Jumlah		**26**	**118**	**40**	**4**	**n/a**

Sumber: Satpol PP Kota Palu 2022

3) Standar Waktu Pelayanan Perizinan

Waktu pelayanan perijinan sangat penting karena berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat yang akan dilayani dalam mengurus suatu ijin dokumen. Semakin cepat waktu pelayanan perijinan, maka akan semakin baik kualitas layanan publik, demikian pula dengan biaya yang akan di keluarkan dalam rangka pengurusan perizinan tersebut. Adapun lama proses pengurusan perijinan dan biaya pengurusan perizinan di Kota Palu pada Tahun 2023 untuk katagori OSS berbeda-beda berdasarkan KBLI dan tingkat resiko usaha sedangkan untuk SIUP-MB dan PBG masing-masing selama 5 dan 28 hari kerja dengan jumlah persyaratan dan biaya resmi seperti tampak pada Tabel 2.123 berikut:

Tabel 2.124
Lama Proses Perizinan, Jumlah Persyaratan dan Biaya Perizinan di Kota Palu Tahun 2023

NO	Uraian	Lama mengurus (hari)	Jumlah persyaratan (dokumen)	Biaya resmi (rata-rata maks Rph)
1	SIUP - MB	5 Hari Kerja	13	Tidak Ada
2	PBG	28 Hari Kerja	Bangunan Kompleks : 8 Bangunan sederhana : 5	Biaya Retribusi Berbeda-beda berdasarkan luas bangunan, tipe bangunan, nilai koefisien
3	OSS	Berbeda beda Berdasarkan KBLI dan Tingkat Resiko Usaha	Berbeda-beda sesuai dengan KBLI kegiatan usaha dan resiko usaha	Tidak ada

Sumber: DPMPTSP Kota Palu Tahun 2024

Upaya penciptaan iklim investasi yang kondusif, dengan memberikan kemudahan proses perizinan, dalam bentuk lamanya waktu dan besarnya biaya yang dibutuhkan akan menarik lebih banyak investor yang menanamkan modalnnya di Kota Palu.

4) Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang kemudian diturunkan menjadi Peraturan Daerah tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah, Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Selama kurun waktu lima tahun, jenis pajak di Kota Palu masih tetap sebanyak 11 objek. Sedangkan untuk jenis retribusi mengalami penambahan dari 20 jenis pada tahun 2018 menjadi 22 jenis pada tahun 2022.

Tabel 2.125
Jumlah Jenis Pajak dan Retribusi Daerah
Tahun 2019-2023

Tahun	Objek Pajak	Objek Retribusi
2019	11	25
2020	11	20
2021	11	23
2022	11	22
2023	11	22

Sumber: Badan Pendapatan Kota Palu 2024

Penerimaan pajak daerah adalah pos untuk menampung pendapatan yang berasal dari pajak daerah yang ditetapkan sesuai dengan Undang-undang No.28 Tahun 2009 yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Daerah Kota Palu No. 1 Tahun 2011, yang terdiri dari:

a. Pajak Hotel;
b. Pajak Restoran;
c. Pajak Hiburan;
d. Pajak Reklame;
e. Pajak Penerangan Jalan;
f. Pajak Pengambilan Bahan Galian C
g. Pajak Parkir
h. Pajak Air Bawah Tanah

i. Pajak Sarang Burung Walet
j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2);
k. Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

Penerimaan pajak daerah Kota Palu ditopang oleh 5 (lima jenis) obyek pajak daerah yang memiliki potensi dan kontribusi yang besar terhadap penerimaan daerah, yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak pengambilan bahan galian C, PBBP2 dan pajak parkir. Penerimaan pajak daerah Kota Palu Tahun 2022 mencapai Rp. 159.659.658.488.

Sedangkan retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Jumlah penerimaan retribusi daerah Kota Palu tahun 2022 mencapai Rp. 15.213.329.676. Jenis Retribusi yang dikelola oleh Pemerintah Kota Palu yaitu :

a. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi ini terdiri dari 8 jenis objek yang dipungut oleh daerah.
b. Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh PemerintahDaerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: (a) pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau (b) pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi ini terdiri dari 8 jenis objek yang dipungut oleh daerah.

c. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi ini terdiri dari 6 jenis objek yang dipungut oleh daerah.

2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia yang berkualitas merupakan modal utama dalam pembangunan daerah. Oleh karena itu, pembangunan SDM harus menjadi fokus dan tujuan dalam pembangunan daerah. Sumber daya manusia yang handal dicirikan dengan kemampuan dan etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin, profesional, mampu memanfaatkan dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan Kota Palu. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan sumber daya manusia dapat dilihat dari rasio lulusan S1/S2/S3 dan tingkat ketergantungan penduduk.

1) Rasio lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kota Palu, maka diharapkan semakin baik kualitas SDM yang ada. Perkembangan rasio lulusan S1/S2/S3 selama periode 2018-2022 di Kota Palu cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2022 rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Palu naik mencapai 12,08 persen.

Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Palu Tahun 2018-2022 tertera dalam tabel 2.125 sebagai berikut:

Tabel 2.126
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2019-2023

Tahun	Lulusan S1/S2/S3	Jumlah Penduduk	Rasio (%)
2019	41.471	391.383	10,60
2020	42.801	373.218	11,47
2021	44.491	377.030	11,80
2022	46.093	381.572	12,08
2023	75.832	387.493	19,57

Sumber: BPS Kota Palu Tahun 2024 (diolah)

2) Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk usia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Adapun rasio ketergantungan di Kota Palu selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tabel 2.127
Rasio Ketergantungan Kota Palu Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	94.911	100.764	100.890	101.271	101.158
2	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	15.589	14.864	15.614	16.413	17.788
3	Jumlah Penduduk Usia Tdk Produktif (1) & (2)	110.500	115.628	116.504	117.684	118.946
4	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	260.865	257.590	260.526	263.888	268.547
5	Rasio ketergantungan (3) / (4)*(%)	42,36	44,89	44,72	44,58	45,99

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palu 2024

Rasio ketergantungan Kota Palu selama Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan dari 42,36 persen menjadi 45,99 persen. Artinya bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) di Kota Palu menanggung sebanyak 46 orang belum bekerja atau tidak produktif.

TABEL 2.128
HASIL ANALISIS GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
TERHADAP CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN
KOTA PALU TAHUN 2019-2023

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2.1	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
2.1.1	Karakteristik Lokasi dan Wilayah					
	Luas Wilayah (KM2)	395,06	395,06	395,06	395,06	395,06
	-Palu Barat	8,28	8,28	8,28	8,28	8,28
	-Tatanga	14,95	14,95	14,95	14,95	14,95
	-Ulujadi	40,25	40,25	40,25	40,25	40,25
	-Palu Selatan	27,38	27,38	27,38	27,38	27,38
	-Palu Timur	7,71	7,71	7,71	7,71	7,71
	-Mantikulore	206,8	206,8	206,8	206,8	206,8
	-Palu Utara	29,94	29,94	29,94	29,94	29,94

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	-Tawaeli	59,75	59,75	59,75	59,75	59,75
	Keadaan Iklim					
	-Suhu	28,11	28,02	27,46	27,18	28,1
	-Tekanan Udara	1011,70	1010,33	1011,93	1000,43	1001,3
	-Kelembaban Udara	77,56	77,11	78,80	80,17	76,2
	-Penyinaran Matahari	69,16	69,08	59,16	52,05	5,7
	-Curah Hujan	76,91	77,91	83,00	73,28	48,96
	-Kecepatan Angin	4,16	3,25	3,91	4,13	4,8
	-Arah Angin Terbanyak	Utara	Utara	Timur Laut	Utara	-
2.1.2	Kejadian Bencana					
	Banjir	11	16	10	18	12

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Kebakaran	171	144	159	180	-
	Angin Topan	-	-	-	-	-
	Angin Puting Beliung	-	4	-	3	5
	Tanah Longsor	-	-	-	-	-
	Gempa Bumi	9	7	-	4	-
2.1.3	Demografi					
	Perkembangan Jumlah Penduduk					
	-Kelurahan	46	46	46	46	46
	-Rumah Tangga	23.895	24.669	121.120	122.739	
	-Jumlah Penduduk	391.383	373.218	377.030	381.572	387.493
	Rasio Ketergantungan	42,36	44,89	44,72	44,60	45,99

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Kepadatan Penduduk	940	945	954	966	981
2.2	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
2.2.1	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi					
A	Pertumbuhan Ekonomi Kota Palu	5,65	(4,43)	5,97	4,32	4,96
	PDRB-ADH Berlaku dengan Migas (juta)	25.033,06	24.125,89	26.135,95	28.445,14	30.785,44
	PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas (juta)	25.033,06	24.125,89	26.135,95	28.445,14	30.785,44
	PDRB-ADH Konstan dengan Migas (juta)	16.180,29	15.462,91	16.385,58	17.092,79	17.941,40
	PDRB-ADH Konstan tanpa Migas (juta)	16.180,29	15.462,91	16.385,58	17.092,79	17.941,40

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
B	Kontribusi Sektor PDRB-ADH Berlaku (persen)					
	- Pertanian	3,89	4,04	3,83	3,88	3,87
	- Pertambangan dan Penggalian	7,23	6,03	6,07	6,37	7,25
	- Industri Pengolahan	6,28	6,59	6,49	6,31	5,96
	- Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
	- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,29	0,30	0,29	0,28
	Perdagangan Besar da Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,93	9,84	10,45	11,23	11,23
	- Transportasi Dan Pergudangan	9,62	6,45	6,57	7,90	8,52
	- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,87	0,95	0,98	1,00
	Informasi dan Komunikasi	9,14	9,97	9,89	9,59	9,375,66

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	- Jasa Keuangan dan Asuransi	5,19	5,77	5,94	5,85	5,66
	- Real Estate	2,27	2,39	2,36	2,39	2,52
	Jasa Perusahaan	1,12	1,14	1,10	1,11	1,13
	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	13,77	14,77	14,53	14,11	13,53
	Jasa Pendidikan	7,71	7,92	7,57	7,21	7,07
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,08	3,45	3,59	3,55	3,61
	Jasa Lainnya	0,93	0,96	0,93	0,92	0,93
	Konstruksi	18,50	19,39	19,30	18,17	17,75
	Kontribusi Sektor PDRB-ADH Konstan					
	- Pertanian	4,14	4,27	4,06	4,00	3,88
	- Pertambangan dan Penggalian	7,20	5,97	6,04	6,15	6,91

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	- Industri Pengolahan	7,10	7,32	7,13	7,06	6,85
	- Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,21	0,20	0,21	0,22
	- Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,30	0,31	0,31	0,31	0.30
	-Perdagangan Besar da Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,81	9,63	10,23	10,70	10,81
	- Transportasi Dan Pergudangan	8,77	5,89	6,05	6,69	6,96
	- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,92	0,83	0,90	0,96	1,00
	- Informasi dan Komunikasi	10,84	12,29	12,31	12,34	12,45
	- Jasa Keuangan dan Asuransi	5,54	6,22	6,44	6,16	6,03
	-Real Estate	2,40	2,51	2,46	2,54	2,60
	-Jasa Perusahaan	1,16	1,18	1,15	1,16	1,17

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	-Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	13,20	14,03	13,87	13,46	13,06
	-Jasa Pendidikan	7,42	7,59	7,30	7,07	6,83
	-Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,18	3,57	3,61	3,59	3,63
	-Jasa Lainnya	0,97	1,00	0,97	0,98	0,99
	-konstruksi	16,88	17,17	16,97	16,61	16,09
	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku dengan Migas	10,21	(3,72)	8,34	8,84	8,23
	Pertumbuhan PDRB-ADH Berlaku tanpa Migas	10,21	(3,72)	8,34	8,84	8,23
	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan dengan Migas	5,78	(4,55)	5,97	4,32	4,96
	Pertumbuhan PDRB-ADH Konstan tanpa Migas	5,78	(4,55)	5,97	4,32	4,96

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Perkembangan PDRB Per Kapita ADH Berlaku (Pertumbuhan %)	10,21	(3,72)	8,34	8,84	8,23
	Perkembangan PDRB Per Kapita ADH Konstan (Pertumbuhan %)	5,78	(4,55)	5,97	4,32	4,96
C	Rata-Rata Pertumbuhan Inflasi -Umum	2,30	0,15	0,14	2,14	0,13
	-Bahan Makanan	3,60	0,15	0,05	0,64	0,10
	-Makan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau	3,42	0,4	0,21	2,56	0,49
	-Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar	(0,35)	(0.01)	0,22	2,46	-0,17
	-Sandang	5,06	0,81	0,19		-0,19
	-Kesehatan	3,78	0,14	0,20	2,48	0,00
	-Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	4,18	0,25	0,21	5,1	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	-Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	1,13	(0,27)	0,15	7,06	0,19
D	PDRB Per Kapita					
	Nilai PDRB Per Kapita ADH Berlaku	63,96	64,64	69,32	74,37	79,45
	Nilai PDRB Per Kapita ADH Konstan	41,34	41,43	43,46	44,80	
E	Indeks Gini	0,33	0,33	0,31	0,36	0,38
F	Indeks Pembangunan Manusia	81,5	81,47	81,70	82,02	83,71
G	Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia			N/A	99,07	99,75
	-40% Bawah	29,58	16,75	N/A	97,94	99,76
	-40% Menengah	39,7	39,8	N/A	99,69	99,60

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	-20% Atas	45,8	43,35	N/A	99,82	100
H	Kemiskinan	6,83	6,80	7,17	6,63	6,56
2.2.2	Fokus Kesejahteraan Sosial					
A	Aspek Pendidikan					
1	AMH	99,84	99,84	100,00	100,00	99,75
2	Rata-rata Lama Sekolah	11,60	11,61	11,72	11,73	11,74
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	-APK SD/MI	111	104,81	105,12	105,25	97,57
	-APK SMP/MTs	105	91,85	99,34	96,40	102,18
	-APK SMA/SMK/MA	74,42	111,55	112,68	104,17	-
4	Angka Partisipasi Murni (APM)					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	-APM SD/MI	92,86	92,50	92,49	91,25	91,13
	-APM SMP/MTs	76,88	78,81	78,86	83,01	84,06
	-APM SMA/MA	74,42	74,94	77,86	77,05	78,44
B	Kesehatan					
1	Jumlah Kematian Bayi (<1 tahun)					
	Jumlah Kelahiran Hidup	7.428	7.471	7.362	7.387	7048
	AKB/1.000 KH	1,48	2,01	2,73	1,35	0,99
	AKHB/1.000 KH	998,52	997,99	997,27	998,65	999,01
2	Jumlah Kematian Balita (<1-5 Tahun)	34	12	19	19	8
	Jumlah Kelahiran Hidup	7.428	7.471	7.362	7.387	7048
	AKABA/1.000 KH	12	15	10	1	1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	AKAHBA/1.000 KH	996,14	995,11	998,3	997,33	-
3	Jumlah Kasus Gizi Buruk	43	33	62	71	61
	Jumlah Balita ditimbang	33384	34713	29698	29698	21743
	Prevalensi Gizi Buruk	0,162	0,153	0,101	0,101	0,864
4	Ketenagakerjaan					
	-Angkatan Kerja	193.860	202.467	201.083	202.803	197.368
	-Bekerja	181.523	185.507	185.777	190.321	186.221
	-Pengangguran	12.337	16.960	15.306	12.482	11.147
	Bukan Angkatan Kerja	103.103	102.166	107.963	110.767	87.519
	-Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	65,95	66,46	65,07	64,68	69,28

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	-Tingkat Pengangguran Terbuka	6,36	8,38	7,61	6,15	5,65
	-Rasio Penduduk Yang Bekerja	93,64	91,62	92,39	93,84	94,35
2.2.3	Fokus Seni Budaya dan Olahraga					
	-Jumlah Organisasi Pemuda	385	385	385	386	356
	-Jumlah Organisasi Olahraga	205	205	205	205	207
	Kepemudaan dan Olahraga					
	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	5	5	5		8
	Jumlah Kegiatan Olahraga	27	28	28		28
2.3	ASPEK PELAYANAN UMUM					
2.3.1	Fokus Urusan Wajib Yang Terkait Pelayanan Dasar					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
A	Pendidikan					
1	Angka Partisipasi Sekolah					
	APS SD/MI	90,00	85,00	84,69	99,06	100.015
	APS SMP/MTs	85,07	69,00	70,07	90,44	100,28
	APS SMA/SMK/MA	n/a	87,03	n/a	n/a	n/a
2	Rasio Ketersediaan Sekolah					
	Jumlah Sekolah SD	189	190	190	191	191
	Jumlah Penduduk kelompok usia 7-12 tahun	35.715	35.542	33.917	34.907	35,42
	Jumlah Sekolah SMP	72	73	73	73	73
	Jumlah Penduduk kelompok usia 13-15 tahun	16.446	16.027	15.761	15.781	12.291
	Jumlah Sekolah SMA/SMK/MA	64	64	66	n/a	66

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Penduduk Kelompok usia 16-18 tahun	34.676	n/a	n/a	n/a	16.905
	Rasio SMA/SMK/MA	18.45	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Rasio Ketersediaan Guru					
	SD/MI:					
	-Jumlah Guru	1.975	2.009	1.985	2.120	2.614
	-Jumlah Murid	35.715	35.542	33.917	34.907	35.966
	-Jumlah Kelas	1.220	1.293	1.237	1.464	1.614
	-Rasio Guru/Murid	55,30	56,52	58,53	60,73	72,68
	-Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	45,33	43,72	47,31	41,48	45,03
	SMP/MTs:					
	-Jumlah Guru	1.210	1.174	1.098	1.074	1.273

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	-Jumlah Murid	16.446	16.027	15.761	15.781	15.838
	-Jumlah Kelas	766	795	817	806	865
	-Rasio Guru/Murid	73,57	73,25	69,67	68,06	80,38
	-Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	96,05	92,14	85,27	84,44	92,92
	SMA/SMK/MA:					
	-Jumlah Guru	2.078	2.006	2.006	n/a	1.962
	-Jumlah Murid	24.857	25.439	25.999	n/a	23.269
	-Jumlah Kelas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	-Rasio Guru/Murid	83,59	78,85	n/a	n/a	84,31
	-Rasio Guru/Murid Per Kelas Rata-Rata	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	Perkembangan Angka Melek Huruf	99,84	99,84	100,00	100,00	100,00

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5	Kondisi Bangunan Sekolah					
	Kondisi Bangunan SD					
	-Jumlah Sekolah Kondisi Baik	143	145	146	148	179
	-Jumlah Sekolah	189	190	190	191	197
	-Kondisi bangunan baik	75,66%	76,32%	76,84%	77,49%	90,86%
	Kondisi Bangunan SMP/MTs					
	-Jumlah Sekolah Kondisi Baik	46	46	48	49	56
	-Jumlah Sekolah	72	73	73	73	76
	-Kondisi bangunan baik	63,89%	63,01%	65,75%	67,12%	73,68%
6	Pendidikan Anak Usia DIni (PAUD)					
	Jumlah Murid TK/RA/Penitipan Anak	6.661	7.258	7.587	7.139	7.496
	Jumlah Penduduk Usia 4 - 6 Tahun	19.313	19.477	20.021	21.447	21.853

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Rasio	34,49	37,26	37,90	33,29	34,30
7	Angka Putus Sekolah					-
	Angka Putus Sekolah SD	0	0	0	0	0
	Angka Putus Sekolah SMP	0	0	0	0	0
	Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
8	Angka Kelulusan					
	Angka Kelulusan SD	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah lulusan pada jenjang SD	6.176	6.169	6.106	5.609	5.703
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD pada tahun sebelumnya	6.176	6.169	6.106	5.609	5.703
	Angka Kelulusan SMP	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP	5.675	5.410	5.347	5.226	5.703

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP pada tahun sebelumnya	5.675	5.410	5.347	5.226	5.703
9	Angka Melanjutkan SD ke SMP	87,8%	85,86%	86,10%	94,08%%	95,79%
	Jumlah siswa baru pada tingkat 1 jenjang SMP	5.303	5.259	5.257	5.277	5.373
	Jumlah lulusan pada jenjang SD tahun ajaran sebelumnya	6.176	6.169	6.106	5.609	5.609
	-Angka melanjutkan					
	Angka Melanjutkan SMP ke SMA/SMK/MA	136,2%	141,62%	177,74%	67,72%	-
	Jumlah siswa baru pada tingkat 1 jenjang SMA/SMK/MA	7.710	8.037	9.504	7.717	--
	Jumlah lulusan pada jenjang SMP tahun ajaran sebelumnya	5.661	5.675	5.347	5.226	5.703
	Angka melanjutkan					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
10	Angka Melanjutkan Pendidikan					
	Guru dengan Kualifikasi S1/D-IV	4.335	4.184	2.909	3.240	3.274
	Jumlah guru	5.664	6.322	3.675	3.394	3.638
	Guru yang memenuhi kualifikasi	76,88	66,18	79,17	95,46%	89,99%
B	Kesehatan					
	Jumlah Rumah Sakit Daerah	3	3	3	3	3
	Propinsi	2	2	2	2	2
	Kota Palu	1	1	1	1	1
	Jumlah Rumah Sakit Swasta	4	4	4	4	4
	Rs Bersalin / RS Ibu Anak	4	4	4	4	4
	Rs Khusus (Mata)	0	0	1	1	1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	2	2	2	2	2
	Jumlah Seluruh Rumah Sakit	14	14	14	14	14
	Jumlah Penduduk	391.383	373.218	377.030	381.572	387,491
	Rasio Rumah Sakit (per-100.000 Penduduk)	3,32	3,48	3,71	3,67	3,61
	Jumlah Puskesmas	14	14	14	14	14
	Jumlah Puskesmas Pembantu (Pustu)	27	25	25	28	28
	Jumlah Puskesmas Keliling (Pusling)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Jumlah Poskesdes	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Jumlah Posyandu	218	223	227	227	228
	Jumlah Klinik / Balai Kesehatan	39	28	28	28	56
	Jumlah Polindes	3	3	4	4	3

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Dokter	474	462	484	496	496
	Jumlah Dokter Umum	219	213	230	230	230
	Jumlah Dokter Spesialis	214	213	213	216	216
	Jumlah Dokter Gigi	41	36	41	50	50
	Jumlah Tenaga Paramedis	474	462	484	496	496
	Rasio Dokter per-1.000 penduduk	1,21	1,23	1,28	1,29	1,28
	Rasio Tenaga Paramedis per-1.000 penduduk	8,88	9,37	9,36	9,12	8,97
C	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Jalan Kondisi Baik (km)	324	348	263,96	310,33	600,03
	Jalan Kondisi Baik Sedang (km)	183,17	162,57	279,38	279,71	101,34

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Jalan Kondisi Rusak (km)	178,83	200,48	205,81	146,42	57,44
	Jalan Kondisi Rusak Berat (km)	164,72	140,86	103,41	115,11	201,31
	Panjang jalan (km)	851,56	851,56	851,56	851,56	960,11
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kondisi Baik	40,83	30,88	30,99	36,44	62,50
	Kondisi Jalan					
	Panjang Jalan (Km)	851,56	851,56	851,56	851,56	960,11
	- Panjang Drainase (Km)	1.114,54	1.217,99	1.573,1	1.703,12	1.920,22
	- Panjang Trotoar (Km)	1.030	872	995	n/a	n/a
	Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase (Km)	6,12	8,12	11,37	20,87	23,81
	% Panjang Jalan yang memiliki trotoar dan drainase (minimal 1,5)	0,72	0,95	1,34	2,45	2,48
	Panjang Saluran Irigasi (km)	66.844	66.844	66.844	66.844	73.559

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Saluran Irigasi dgn Kondisi Baik (km2)	333,23	345,23	357,23	357,23	542,20
	Jumlah Tempat Ibadah	589	507	507	682	712
	Masjid	384	356	356	479	479
	Surau	89	75	75	75	105
	Gereja Kristen	107	69	69	117	117
	Gereja Khatolik	2	2	2	2	2
	Pura	2	2	2	5	5
	Wihara	5	3	3	4	4
	Jumlah Penduduk	391.383	373.218	377.030	385.571	387,49
	Rasio Tempat Pemakaman Umum Penduduk	61,65	64,66	64,01	63,24	
	Rasio Tempat Pembuangan Sampah	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Rekapitulasi Luasan Pola Ruang Kota Palu					
	Kawasan Lindung					
	Kawasan Hutan Lindung	7141	7141	7141	6380	6380
	Perlindungan Setempat	855,663	855,663	855,663	532,38	532,38
	Taman Hutan Raya	5789	5789	5789	4493,73	4493,73
	Kawasan Cagar Budaya	5535,8	5535,8	5535,8	2,72	2,72
	Ruang Terbuka Hijau	175,32	175,32	175,32	2416,54	2416,54
	Kawasan Budidaya					
	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	4239,41	4239,41	4239,41	3229,57	3229,57
	Industri	1534,12	1534,13	1534,14	1457	1457
	Kawasan Pariwisata	291,51	291,51	291,51	128,12	128,12
	Kawasan Permukiman					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Kawasan Perumahan	4003,1	4003,1	4003,1	9044	9044
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	430,8	430,8	430,8	1382	1382
	Kawasan Perkantoran	148,49	148,49	148,49	251,49	251,49
	Kawasan Pendidikan	328,05	328,05	328,05	362,83	7.500
	Kawasan Peribadatan	45,19	45,19	45,19	34,19	395,06
	Kawasan Kesehatan	25,25	25,25	25,25	42,18	75,83
	Kawasan Olahraga	-	-	-	7,84	
	Kawasan Transportasi	-	-	-	294,03	
	Kawasan pembangkit Tenaga listrik				16,14	15
	Kawasan Pertanian	2487,67	2487,67	2487,67	4668,49	4668,49
	Kawasan Perkebunan	4679	4679	4679	4894	4894
	Kawasan Tanaman Pangan	557	557	557	427	427

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Kawasan Pertanahan dan Keamanan	52,2	52,2	52,2	231,76	1211
	Kawasan Perikanan Budidaya	10460	10460	10460	35	1162
	Rawan Bencana	2326,12	2326,12	2326,12	-	95,95%
D	Lingkungan Hidup					
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	94,47	90,88	85,59	44,38	-
D	Perumahan					
	Rumah Tangga Pelanggan Air Bersih	99.78	101.019	101.204	100.256	-
	Rumah Tangga Pengguna Listrik	185.474	198.031	211.453	223.908	-
F	Trantibum					
	Rasio Linmas Per 10.000 Penduduk di Kota Palu	2,76	2,89	2,86	2,83	-
	Rasio Polisi Pamong Praja di Kota Palu	12,67	13,24	12,73	12,19	-

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Jangkuan luas wilayah manajemen kebakaran (m2)	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Luas wilayah Kota (Km2)	395,06	395,06	395,06	395,06	395,06
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran Kota (%)	75,83	75,83	75,83	75,83	75,83
	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit	51	43	28	28	28
	Jumlah kasus kebakaran dalam jangkuan WMK	51	43	28	28	28
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15	15	15	15	15
G	Sosial					
	Jumlah Panti Asuhan	36	36	36	36	36
	Rumah singgah	1	1	1	1	1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	PMKS Yang Seharusnya Menerima Bantuan (jiwa)	261.545	27.659	154.973	150.104	-
	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	27.721	3.200	13.652	12.543	-
	% PMKS yg memperoleh bantuan sosial	10,60%	11,57%	8,81%	8,36%	-
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Wajib Non Dasar					
A	Tenaga Kerja					
	Angkatan Kerja	193.860	202.467	201.083	202.813	197.368
	a. Bekerja	181.523	185.507	185.777	190.331	186.221
	b. Pengangguran	12.337	16.960	15.306	12.482	11.147
	Bukan Angkatan Kerja	103.103	102.166	107.963	110.767	87.519

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah penduduk usia kerja (1) + (2)	293.963	304.633	309.046	313.580	284.887
	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Kota Palu	65,95	66,46	65,07	64,68	69,28
	TPAK (tingkat partisipasi angkatan kerja) Sul-Teng	69,44	69,44	68,73	66,99	69,99**
	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Kota Palu	6,36	8,38	7,61	6,15	5,65
	TPT (tingkat pengangguran terbuka) Sul-Teng	3,11	3,77	3,75	3,00	3,00
B	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
	Pekerja perempuan di lembaga pemerintah	4.131	n/a	3.818	3.976	3.881
	Pekerja perempuan di lembaga swasta	n/a	n/a	4.908*	5.934*	4173
	Jumlah pekerja perempuan	n/a	n/a	8.726	9.910	8.054

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	n/a	n/a	43,75	33	48,19
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	n/a	n/a	56,25	67	51,81
	Jumlah kursi DPRD yang diduduki perempuan	4	4	4	4	4
	Jumlah total kursi di keanggotaan DPRD	35	35	35	35	35
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	11,43	11,43	11,43	11,43	11,43
	Jumlah KDRT	71	61	68	39	72
	Jumlah rumah tangga	111.214	115.696	121.125	124.104	127.712
	Rasio KDRT	0,064	0,053	0,056	0,031	0,04
	Jumlah laporan/pengaduan kekerasan pada perempuan dan anak	144	148	113	50	70

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	yang masuk ke unit pelayanan terpadu					
	Jumlah pengaduan/laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	144	148	113	50	70
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100	100	100
C	Pangan					62.513,55
	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	2.067,80	2.093,70	2.041,50	1.860,80	2.022,00
	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari)	66,30	64,60	60,40	58,80	61,00
D	Pertanahan					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Persentase luas lahan bersertifikat (a/b) *100	4,90	6,25	8,10	12,50	8,71
	a. Jumlah Luas Lahan bersertifikat (Ha)	19,35	24,68	32,01	49,37	34,42
	b. Jumlah luas wilayah (Ha)	395,06	395,06	395,06	395,06	395,06
	Penyelesaian kasus tanah negara (a/b) *100	75	33,33	36,36	25	70
	a. Jumlah kasus yang diselesaikan	6	2	4	2	7
	b. Jumlah kasus yang terdaftar	8	6	11	8	10
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	32,01	30,69%	25,98%	n/a	n/a
	1). Hak Milik	341.097	301.027	297.091	n/a	n/a
	2). Hak Guna Bangunan	923.447	911.391	729.099	n/a	n/a
	3). Hak Guna Usaha	-	-	-	n/a	n/a
	4). Hak Pakai	-	-	-	n/a	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	5). Girik	-	-	-	n/a	n/a
	Jumlah	1.264.544	1.212.418	1.026.190	n/a	n/a
	Luas Wilayah (Km2)	3.950.600	3.950.600	3.950.600	3.950.600	3.950.600
E	Lingkungan Hidup					
	Jumlah sampah yang tertangani	n/a	n/a	58.400,00	62.513,55	68.209,74
	Total volume sampah yang timbul	n/a	n/a	68.228,90	74.073,65	74.977,39
	Persentase	n/a	n/a	85,59	84,39	90,97
	Jumlah sampah yang ditangani (terangkut) m3	N/A	71.209,03	63.381,16	n/a	68.209,74
	Jumlah volume produksi sampah	N/A	2.782.877	73.180,86	n/a	74.977,39
F	Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Penduduk ber KTP	193.385	263.624	269.910	244.416	278,618
	Penduduk ber Akte Kelahiran	164.104	199.620	233.012	239.538	257.680

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Penduduk ber Akte Kematian	1.755	1.755	3.807	1.461	3650
	Penduduk memiliki KK	111.214	115.696	121.120	118.060	127.712
	Penduduk ber Akte Nikah	68.461	90.601	114.370	117.335	135.459
	Penduduk ber Akte Cerai					
	Rasio penduduk ber KTP	50,15	67,36	72,32	64,83	32758
	Rasio pasangan berakta nikah	61,56	78,31	94,42	94,55	13,82
	Rasio Kepemilikan Akta Kelahiran	42,56	51,00	62,43	63,53	6618
	Jumlah Penduduk Wajib KTP	275.933	273.951	270.567	n/a	47875
	Jumlah Penduduk Yang Tidak Memiliki KTP	82548	10.327	287	27.114	-
	Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Kelahiran	n/a	n/a	n/a	n/a	-
	Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Kartu Keluarga	19375	5.390	3.800	176	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Nikah	n/a	n/a	n/a	n/a	136.519
	Jumlah Penduduk Yang Belum Memiliki Akta Perceraian	4.140	4.473	2.909	n/a	2694
						759.345
G	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik (a/b) *100)	94,25	94,25	94,25	94,25	6
	a. Jumlah kantor pemerintah Kota yang baik	82	82	82	82	387.493
	b. Jumlah seluruh pemerintah Kota	87	87	87	87	0,0000155
	Persentase LPM Berprestasi (a/b) *100)	0	0	0	0	636
	a. Jumlah LPM berprestasi	0	0	0	0	325

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	b. Jumlah LPM	46	46	46	46	46
	Persentase PKK aktif (a/b) *100)	100	100	100	100	100
	a. Jumlah PKK aktif	46	46	46	46	46
	b. Jumlah PKK	46	46	46	46	46
H	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
	Rata-rata Anak Per Keluarga	1,9	1,9	1,9	2,14	2,25
	Rasio Akseptor KB	80,60	76,20	80,70	86,40	64,2
	Cakupan Peserta KB	48,69	49,56	41,75	n/a	n/a
	Jumlah Akseptor KB	9.677	30.419	8.731	53.282	32758
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun (a/b) *100	80,57	76,20	80,67	86,40	13,82

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	a. Jumlah pasangan usia subur dengan istri di umur kurang 20 th	46162	45895	49746	53282	6618
	b. Jumlah pasangan usia subur	57295	60232	61667	61667	47875
I	Perhubungan					
	Jumlah Penumpang Bis (AKDP)	93.557	112.838	108.547	n/a	n/a
	Jumlah Penumpang Kereta api	0	0	0	n/a	n/a
	Jumlah Penumpang Angkutan Darat melalui terminal	136.829	83.190	419.364	150.647	136.519
	Jumlah Penumpang Kapal Laut	326.987	34.695	36.567	n/a	96.507
	Jumlah Penumpang Pesawat Udara	1.262.550	476.459	435.812	655.764	759.345
	Total Jumlah Penumpang	1.726.366	594.344	891.743	806.411	992.371
	Jumlah Izin Trayek	6	6	6	6	6
	Jumlah Penduduk	391.383	373.218	377.030	381.572	387.493

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Rasio izin Trayek	0,0000156	0,0000153	0,0000161	0,0000157	0,0000155
	Jumlah Uji Kir Angkutan Umum	526	376	240	245	636
	Jumlah Kendaraan Wajib Uji	n/a	1.152	534	151	325
	Mobil Penumpang Umum	n/a	15	1	2	11
	Mobil Bus Umum	n/a	152	98	3	27
	Mobil Bus Bukan Umum	0	0	0	0	0
	Truk	192	126	8	166	77
	Pickup	785	309	159	586	183
	Kendaraan Khusus Umum	0	0	0	0	0
	Kendaraan Khusus Bukan Umum	0	0	0	0	0
	Kereta Gandeng/Kereta Tempel Umum	0	0	0	0	0

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Kereta Gandeng/Kereta Tempel Bukan Umum	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
	Kendaraan Bermotor (Tiga Roda) Bukam Umum	0	0	0	0	0
	Sepeda Motor	n/a	n/a	n/a	n/a	27
	Jumlah Pelabuhan laut	2	2	2	2	2
	Jumlah Pelabuhan Udara	1	1	1	1	1
	Jumlah Terminal Bus	4	4	4	4	4
	Jumlah	7	7	7	7	7
J	Komunikasi dan Informatika					
	Jumlah KIM	27	0	1	2	3
	Jumlah kecamatan yang ada dalam Kota	8	8	8	8	8

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	337,5	0	12,5	25	37,5
	Jumlah Jaringan Telepon Genggam	4	4	4	4	4
	Jumlah Jaringan Telepon Stasioner	0	0	0	0	0
	Jumlah jaringan Komunikasi (1+2)	4	4	4	4	4
	Rasio Wartel/Warnet	1,28	0,88	0	n/a	n/a
	Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional	5	5	5	n/a	n/a
	Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal	13	13	13	n/a	n/a
	Total jenis surat kabar (1+2)	18	18	18	n/a	n/a
	Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal	37	39	39	n/a	n/a
K	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah koperasi aktif	188	93	96	83	90
	Jumlah koperasi	215	214	215	205	219
	Persentase	87,44	43,46	44,65	40,49	41,10
L	Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus					
	Jumlah Investor	5	15	2	25	31
	PMDN	5	8	2	25	29
	PMA	0	7	0	0	2
	JumlahProyek	2	1	2	2	131
	Nilai Investasi	114.376.074.280	22.196.184.791	12.602.756.572	74.417.583.361	682.979.363.525

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
M	Kepemudaan dan Olahraga					
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif di Kota Palu					
	Jumlah organisasi pemuda yang aktif	212	215	216	210	328
	Jumlah seluruh organisasi pemuda	385	385	386	386	356
	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	55,06%	55,84%	55,96%	54,40%	92,13%
	Jumlah Organisasi Olahraga di Kota Palu					
	Kecamatan Palu Selatan	33	33	33	33	33
	Kecamatan Palu Barat	19	19	19	19	19
	Kecamatan Palu Timur	54	54	56	56	56
	Kecamatan Palu Utara	20	20	20	20	20

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Kecamatan Tawaeli	10	10	10	10	10
	Kecamatan Mantikulore	36	36	36	36	36
	Kecamatan Tatanga	19	19	19	19	19
	Kecamatan Ulujadi	14	14	14	14	14
	Total	205	205	207	207	207
	Jumlah kegiatan kepemudaan	5	5	5	5	8
	Jumlah kegiatan olahraga	27	27	28	28	28
N	Perpustakaan					
	Persentase pengunjung perpustakaan per tahun (a/b)	0,014	0,004	0,006	0,006	0,006

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	a. Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 Tahun	15	10	15	15	18
	b. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	1084	2287	2576	2.471	2.930
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (a/b)	8,224	1,145	1,087	0,509	0,565
	Jumlah koleksi judul buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	4.112	3.619	5.578	3.806	4.953
	Jumlah koleksi jumlah buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	500	3.162	5.132	7.476	8.765
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk (a/b)*1000)	0,1840	0,1929	1,4959	1,585	1,753
	Jumlah perpustakaan	72	72	564	605	680
	Jumlah penduduk	391.303	373.218	377.030	381.572	387.493
	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	500	1.658	2576	2.471	2.930

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	4.112	3.162	5132	3.806	4.953
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat (a/b)*100)	0	0	0	50	100
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	0	0	0	2	2
	Jumlah seluruh pustakawan, tenaga teknis dan penilai	0	0	0	4	2
2.3.2	Fokus Layanan Urusan Pilihan					
1	Pariwisata					
	Hotel berbintang	8	7	11	7	9
	Hotel non berbintang	33	42	41	39	45
	Wisatawan Mancanegara	1110	194	1905	216	497

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Wisatawan Nusantara	156733	70562	115927	162441	127.189
	Kontribusi Sektor Akomodasi dan Makanan Minuman Terhadap PDRB (ADHB)	0,95	0,87	0,95	0,98	1,00
2	Pertanian					
	Kontribusi Sektor Pertanian dan Perkebunan Terhadap PDRB (ADHB)	3,89	4,04	3,83	3,88	3,87
3	Energi dan Sumber Daya Mineral					
	Kontribusi Sektor Pertambangan dan Penggalian Terhadap PDRB (ADHB)	7,23	6,03	6,07	6,37	7,25
4	Perdagangan					
	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (ADHB)	9,93	9,84	10,45	11,23	11,42

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
5	Perindustrian					
	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (ADHB)	6,28	6,59	6,49	6,31	5,96
6	Kelautan dan Perikanan					
	Produksi Ikan (Ton)	1.137,76	1.116,71	1.236,70	n/a	n/a
2.3.3	Fokus Layanan Penunjang Urusan					
1	Keuangan					
	Total SILPA (Rp)	1.033.071.024.850,18	602.363.096.947,52	400.643.310.355,17	206.761.525.708,40	173.615.555.692
	Total APBD (Rp)	2.151.228.808.801,80	1.231.232.010.908,66	1.907.058.605.213,00	1.524.123.190.688,00	1.693.833.414.190
	Persentase Silpa terhadap APBD Kota Palu	48,02	48,92	21,01	13,57	10,25

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Belanja Bidang Urusan Pendidikan (20%) (Rp)	357.476.512.500,00	348.073.974.618,00	357.997.262.163,00	346.733.092.773,00	396.721.066.535
	Total APBD (Rp)	2.151.228.808.801,80	1.231.232.010.908,66	1.907.058.605.213,00	1.524.123.190.688,00	1.693.833.414.190
	Persentase Belanja Pendidikan 20% Kota Palu	16,62	28,27	18,77	22,75	23,42
	Jumlah Belanja Bidang Urusan kesehatan (10%) (Rp)	150.476.422.214,00	122.718.012.552,00	363.856.501.748,00	168.660.427.940,00	343.210.895.824
	Total APBD (Rp)	2.151.228.808.801,80	1.231.232.010.908,66	1.907.058.605.213,00	1.524.123.190.688,00	1.693.833.414.190
	Persentase Belanja Kesehatan 20% Kota Palu	6,99	9,97	19,08	11,07	20.26
2.4	Aspek Daya Saing Daerah					
2.4.1	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2.4.1.1	Rerata Pengeluaran Perkapita sebulan menurut Kelompok Komoditas (Rp/Tahun)					
	Makanan	505.608	631.382	649.267	613.369	684.280
	Non Makanan	478.032	937.108	974.550	835.268	825.700
2.4.1.2	Penduduk Menurut Golongan Pengeluaran Makanan Perkapita Sebulan					
	- < 150.000	0	0	0	0	0
	- 150.000-199.999	0	0	0	0	0
	- 200.000-299.999	0	0	0	0,51	0
	- 300.000-499.999	3,81	2,25	1,80	2,42	1,12
	- 500.000-749.999	14,37	12,52	13,98	20,53	12,52
	- 750.000-999.999	13,74	18,30	15,16	18,55	27,39

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	- 1.000.000-1.499.999	20,67	22,00	21,52	29,95	22,93
	- 1.500.000+	47,41	44,92	47,53	28,04	36,04
2.4.1.3	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Masyarakat Kota Palu Sebulan Menurut kelompok Non Makanan					
	- Perumahan dan Fasilitas Rumah	247.717	470.376	538.345	500.052	470.726
	- Aneka Barang dan Jasa	100.292	217.933	211.458	142.993	167.483
	- Pakaian, Alas Kaki, dan Tutup Kepala	32.692	49.307	39.785	38.763	43.437
	- Barang Yang Tahan Lama	48.688	112.333	89.758	83.513	34.690
	- Pajak, Pungutan, dan Asuransi	30.826	54.029	75.255	54.620	65.705
	- Keperluan Pesta dan Upacara	17.817	33.131	19.950	15.326	43.659
2.4.1.4	Produktivitas Total Daerah					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,89	4,04	3,83	3,88	3,87
	- Pertambangan dan Penggalian	7,23	6,03	6,07	6,37	7,25
	- Industri Pengolahan	6,28	6,59	6,49	6,31	5,96
	- Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13
	- Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,27	0,29	0,30	0,29	0,28
	- Konstruksi	18,50	19,39	19,30	18,17	17,75
	- Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,93	9,84	10,45	11,23	11,42
	- Transportasi dan Pergudangan	9,62	6,45	6,57	7,90	8,25
	- Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,95	0,87	0,95	0,98	1,00
	- Informasi dan Komunikasi	9,14	9,97	9,89	9,59	9,37

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	- Jasa Keuangan dan Asuransi	5,19	5,77	5,94	5,85	5,66
	- Real Estate	2,27	2,39	2,36	2,39	2,52
	- Jasa Perusahaan	1,12	1,14	1,10	1,11	1,13
	- Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	13,77	14,77	14,53	14,11	13,53
	- Jasa Pendidikan	7,71	7,92	7,57	7,21	7,07
	- Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,08	3,45	3,59	3,55	3,61
	- Jasa lainnya	0,93	0,96	0,93	0,92	0,93
2.4.2	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur					
2.4.2.1	Aksesibilitas daerah					
2.4.2.1.1	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Panjang jalan (km)	851,558	851,563	851,563	851,563	851,563
	Kendaraan wajib uji (unit)	1.152	534	151	1.965	298
	Rasio Panjang Jalan/kendaraan	0,74	1,59	5,64	0,43	2,86
	Jumlah Orang Yang Terangkut Angkutan Umum	459.550	314.271	419.364	150.647	136.519
2.4.2.1.2	Jumlah Penumpang Bandara					
	Datang	608.820	230.910	217.814	325.691	379.431
	Berangkat	622.957	235.441	217.998	330.073	379.914
	Transit	34.773	10.108	n/a	n/a	n/a
2.4.2.1.3	Arus Lalulintas Pelabuhan					
	Jumlah Penumpang Datang (Org)	40.657	16.805	21.920	n/a	n/a
	Jumlah Penumpang Berangkat (Org)	42.839	17.890	23.084	n/a	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Barang Bongkar (Ton)	270.232	255.806	189.412	n/a	n/a
	Jumlah Barang Muat (Ton)	14.597	29.825	15.856	n/a	n/a
2.4.2.1.4	Jumlah Orang Melalui Terminal	136.829	83.190	419.364	150.647	136.519
2.4.2.1.5	Jumlah Pemasangan Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan	88	0	30	33	45
2.4.2.1.6	Perkembangan Jumlah Kecelakaan lalu lintas dan korban serta Nilai Kerugian daerah Polisi					
	Jumlah Kecelakaan	1.603	1.042	974	1.144	
	Banyaknya Korban Mati	403	329	317	360	
	Banyaknya Korban Luka Berat	882	490	472	430	
	Banyaknya Korban Luka Ringan	1.669	1.162	1.001	1.383	
	Kerugian Materi Material	5.322.550	3.472.020	5.012.500	5.187.050	

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2.2	Fasilitas Daerah					
2.4.2.2.1	Jumlah bank di Kota Palu	27	27	27	1.002	393
	Bank Umum	22	22	23	994	386
	BPR	5	5	5	8	7
2.4.2.2.2	Jumlah Rumah Makan dan Restauran di Kota Palu	55	100	98	102	133
	Rumah Makan	24	56	58	58	104
	Restauran	31	44	40	44	29
2.4.2.2.3	Jumlah Hotel di Kota Palu	41	49	46	41	54
	Hotel berbintang	8	8	11	8	8
	Hotel non berbintang	33	33	35	33	107
2.4.2.3	Lingkungan Hidup					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2.3.1	penduduk terlayani Air Minum di Kota Palu					
	Jumlah Rumah	48.123	48.124	48.125	93.078	97.061
	Jumlah terlayani Non PDAM	240.615	240.620	240.620	279.234	291.183
	Jumlah terlayani PDAM Donggala	14.434	14.434	12.601	11.306	14.644
	Jumlah terlayani PDAM Kota Palu	8.156	8.285	8.652	9.124	9.023
	Penduduk Terlayani (jiwa) Penduduk Terlayani (jiwa)	353.565	354.215	346.885	361.924	362.184
	Penduduk Terlayani (KK/RT)	101.019	101.204	100.256	103.407	127.712
2.4.2.3.2	Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih					
	Air Dalam Kemasan	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Leding	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Sumur Bor/Pompa	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Sumur Terlindungi	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Mata Air Terlindungi	85	85	80		
	Mata Air Tak Terlindungi	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
	Lainnya	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
2.4.2.4	Komunikasi dan Informatika					
2.4.2.4.1	Daya Terpasang, Produksi dan Distribusi Listrik					
	Daya Terpasang (KW)	290.189	183.010	201.285	451.400	426.466.687
	Produksi Listrik (KWh)	516.135.639	557.896.714	594.488.027	599.903.946	698.053.401
	Listrik Terjual (KWh)	453.953.681	506.708.300	535.914.759	547.346.442	628.207.668
	Dipakai Sendiri (KWh)	n/a	334.738	124.251	186.685	125.563
	Susut/Hilang (KWh)	73.764.409	57.615.761	58.573.267	63.557.504	69.720.170

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
2.4.2.4.2	Jumlah Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik (PLN)					
	Rumah Tangga	111.214	115.696	121.120	122.093	127.712
	Rumah Tangga Pengguna Listrik	185.474	198.031	238.781	223.908	240.183
2.4.2.4.3	Jumlah Pelanggan Manurut Pengguna Listrik					
	Indutri	139	142	142	n/a	n/a
	Instansi	946	985	1.035	n/a	n/a
	Bisnis	8.525	8.957	9.495	n/a	n/a
	Sosial	2.481	2.633	2.746	n/a	n/a
2.4.2.4.4	Jumlah Pelanggan dan Sarana Telekomunikasi Menurut STO dan Jenis Pengguna					
	(1P) Berlangganan Layanan Telepon Saja atau Internet Saja	5.365	4.782	1.986	n/a	n/a

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	(2P) Berlangganan Layanan Telepon dan Internet atau Telepon dan TV Kabel (Use TV) atau Internet dan TV Kabel (Use TV)	4.556	5.876	6.354	n/a	n/a
	(3P) Berlangganan Layanan Telepon, Internet dan Use TV	5.148	8.022	8.237	n/a	n/a
2.4.3	Fokus Iklim Berinvestasi					
2.4.3.1	Angka Kriminalitas					
	Jumlah Tindak Kriminal	868	1063	939	1189	760
	Jumlah Tindak Kriminal tertangani	599	760	683	656	270
	Penduduk	391.383	373.218	377.030	385.572	387.493
	Angka Kriminalitas yang tertangani	15,71	20,36	18,12	17,01	6,97
2.4.3.2	Jumlah Demonstrasi	118	40	4	n/a	89.051
	- Bidang Politik	61	3	n/a	n/a	387.490

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	- Bidang Ekonomi	36	24	n/a	n/a	22,98
	- Bidang Lainnya	21	16	4	n/a	
2.4.3.3	Lama Proses Perizinan					
	- SIUP	2	2	2	n/a	
	- TDP	3	3	3	n/a	
	- IUI	5	5	5	n/a	
	- TDI	3	3	3	n/a	
	- IMB	14	14	14	n/a	
	- HO	7	7	7	n/a	
2.4.3.4	Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah					
	Jumlah Jenis Pajak dan Retribusi Daerah					

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Objek Pajak	11	11	11	11	11
	Objek Retribusi	25	20	23	22	22
2.4.3.4	Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Palu Menurut Jenis Pendapatan					
	a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	235.922.540.208,83	260.179.004.254,34	341.922.999.303,75	297.245.708.755,47	352.579.469.224
	1) Pajak Daerah	107.199.060.079,28	112.880.185.945,26	125.693.437.836,27	159.761.032.300,40	199.354.300.358
	2) Retribusi Daerah	9.032.938.664,00	9.901.834.854,86	8.879.897.839,00	15.244.946.376,96	20.533.898.514
	3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.193.768.512,00	2.048.503.784,00	2.613.386.311,05	2.715.287.084,62	3.915.957.953
	4) Lain-lain PAD yang Sah	117.496.772.953,55	135.348.479.670,22	204.736.277.317,43	119.524.442.993,49	128.775.312.399
	b. Dana Perimbangan					
	1) Bagi Hasil Pajak	15.054.718.831,00	26.374.361.061,00	n/a	98.074.024.589,00	65.503.203.090

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	2) Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	15.637.777.369,00	31.092.659.938,00	n/a	n/a	n/a
	3) Dana Alokasi Umum	698.733.242.000,00	648.403.965.000,00	636.240.509.253,00	633.480.050.020,00	667.077.169.241
	4) Dana Alokasi Khusus	211.002.887.540,00	180.550.026.130,00	249.638.335.493,00	183.409.189.223,00	215.492.250.182
	1) Pendapatan Hibah	868.758.875.487,00	48.196.398.616,00	38.135.341.000,00	n/a	50.203.055.364
	3) Dana Bagi Hasil Pajak darii Pemerintah Daerah Lainnya	79.207.565.911,00	74.790.199.372,00	85.800.581.775,00	105.729.251.049,00	112.590.221.157
	4) Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah	51.780.758.000,00	31.231.328.000,00	15.485.527.000,00	n/a	5.674.436.000
	5) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya	120.000.000,00	3.505.580.000,00	n/a	300.000.000,00	n/a
2.4.4	Fokus Sumber Daya Manusia					
2.4.4.1	Rasio lulusan S1/S2/S3					
	Lulusan S1/S2/S3	41.471	42.801	44.491	46.093	47.368

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kinerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
	Jumlah Penduduk	391.383	373.218	377.030	385.572	387.493
	Rasio (%)	10,60	11,47	11,80	12,08	12,22
2.4.4.2	Rasio Ketergantungan					
	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	94.911	100.764	100.890	101.271	101.158
	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	15.589	14.864	15.614	16.413	17.788
	Jumlah Penduduk Usia Tdk Produktif (1) & (2)	110.500	115.628	116.504	117.684	118.946
	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	260.865	257.590	260.526	263.888	268.547
	Rasio ketergantungan	42,36	44,89	44,72	44,58	45,99

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD

2.5.1 Persentase dan Predikat Capaian Kinerja Pemerintahan Kota Palu Triwulan IV (empat) Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan RKPD Tahun 2023 Triwulan IV (empat) per program dari masing – masing bidang urusan dan unsur pemerintahan, diperoleh persentase dan predikat dari capaian kinerja seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2.129
Rekapan Persentase dan Predikat Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2023 Triwulan IV Per Bidang Urusan dan Unsur Pemerintahan

No.	Urusan / Program	Capaian Kinerja			
		Fisik		Keuangan	
		(%)	Predikat	(%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	96.96%	Sangat Tinggi	96.22%	Sangat Tinggii
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	97.23%	Sangat Tinggi	96.84%	Sangat Tinggi
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	97.89%	Sangat Tinggi	95.89%	Sangat Tinggi
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	95.76%	Sangat Tinggi	95.07%	Sangat Tinggi
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	97.03%	Sangat Tinggi	99.10%	Sangat Tinggi
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	95.96%	Sangat Tinggi	94.43%	Sangat Tinggi
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	97.89%	Sangat Tinggi	95.38%	Sangat Tinggi
B	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK**	95.99%	Sangat Tinggi	96.51%	Sangat Tinggi

No.	Urusan / Program	Capaian Kinerja			
		Fisik		Keuangan	
		(%)	Predikat	(%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	93.20%	Sangat Tinggi	83.71%	Tinggi
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	94.81%	Sangat Tinggi	94.44%	Sangat Tinggi
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	90.70%	Tinggi	90.63%	Tinggi
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	86.67%	Tinggi	86.05%	Tinggi
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	96.34%	Sangat Tinggi	96.53%	Sangat Tinggi
VI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	99.43%	Sangat Tinggi	97.72%	Sangat Tinggi
VII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	-	-	-	-
VIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	96.87%	Sangat Tinggi	95.49%	Sangat Tinggi
IX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	94.34%	Sangat Tinggi	93.28%	Sangat Tinggi
X	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	97.61%	Sangat Tinggi	96.69%	Sangat Tinggi
XI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	95.10%	Sangat Tinggi	95.03%	Sangat Tinggi
XII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	98.33%	Sangat Tinggi	97.18%	Sangat Tinggi
XIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	95.91%	Sangat Tinggi	86.04%	Tinggi
XIV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	99.59%	Sangat Tinggi	99.12%	Sangat Tinggi
XV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	94.19%	Sangat Tinggi	92.39%	Sangat Tinggi

No.	Urusan / Program	Capaian Kinerja			
		Fisik		Keuangan	
		(%)	Predikat	(%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
XVI	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	99.79%	Sangat Tinggi	99.18%	Sangat Tinggi
XVII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	99.60%	Sangat inggi	97.16%	Sangat Tinggi
XVIII	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	99.31%	Sangat Tinggi	97.16%	Sangat Tinggi
C	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	94.65%	Sangat Tinggi	92.45%	Sangat Tinggi
I	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	96.03%	Sangat Tinggi	94.90%	Sangat Tinggi
II	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	98.57%	Sangat Tinggi	96.59%	Sangat Tinggi
III	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	93.25%	Sangat Tinggi	90.32%	Tinggi
IV	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	93.06%	Sangat Tinggi	92.83%	Sangat Tinggi
V	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	92.34%	Sangat Tinggi	91.85%	Sangat Tinggi
D	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	97.29%	Sangat Tinggi	94.84%	Sangat Tinggi
1	SEKRETARIAT DAERAH	98.23%	Sangat Tinggi	94.32%	Sangat Tinggi
2	SEKRETARIAT DPRD	96.36%	Sangat Tinggi	95.54%	Sangat Tinggi
E	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	94.96%	Sangat Tinggi	61.34%	Tinggi
I	PERENCANAAN	97.50%	Sangat Tinggi	96.69%	Sangat Tinggi
II	KEUANGAN	91.45%	Sangat Tinggi	89.40%	Tinggi
III	KEPEGAWAIAN	97.34%	Sangat Tinggi	95.34%	Sangat Tinggi
IV	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	94.08%	Sangat Tinggi	94.84%	Sangat Tinggi
V	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	94.45%	Sangat Tinggi	92.95%	Sangat Tinggi

No.	Urusan / Program	Capaian Kinerja			
		Fisik		Keuangan	
		(%)	Predikat	(%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
F	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	96.58%	Sangat Tinggi	96.57%	Sangat Tinggi
1	INSPEKTORAT	96.58%	Sangat Tinggi	96.57%	Sangat Tinggi
G	**UNSUR KEWILAYAHAN**	98.56%	Sangat Tinggi	97.47%	Sangat Tinggi
I	KECAMATAN	98.56%	Sangat Tinggi	97.47%	Sangat Tinggi
H	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	96.29%	Sangat Tinggi	95.51%	Sangat Tinggi
I	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	96.29%	Sangat Tinggi	95.51%	Sangat Tinggi

Tabel 2.128 memperlihatkan capaian kinerja fisik dan keuangan RKPD Kota Palu Tahun 2023 berdasarkan 3 (tiga) urusan dan 5 (lima) unsur penyelenggaraan pemerintahan. Tiga unsur dan lima unsur tersebut adalah:

1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar.

Urusan pemerintahan ini terdiri dari 6 (enam) bidang urusan yang terkait dengan pelayanan dasar dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 96.96% atau capaian kategori Sangat Tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 96.22% termasuk dalam kategori sangat tinggi pada Triwulan IV Tahun 2023.

Secara fisik, terdapat 6 urusan yang pencapaian kinerja memenuhi target persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja, sebesar 100.00% dari keseluruhan bidang urusan yang masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan

pelayanan dasar ini berada pada capaian kinerja fisik kategori sangat tinggi.

Secara fisik, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja fisik sangat tinggi yaitu :

- Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan capaian realisasi sebesar 97.23%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 98.44%, Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar 95.17% dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terealisasi sebesar 98.09% yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pada Triwulan IV Tahun 2023
- Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dengan capaian realisasi sebesar 97.89%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja dari 2 Perangkat Daerah yaitu :
  1) Dinas Kesehatan dengan capaian realisasi sebesar 96.55%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 98.76%, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar 94.05%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar 94,93%, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman terealisasi sebesar 100.00% dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terealisasi sebesar 95.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pada Triwulan IV Tahun 2023U

2) Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu dengan capaian realisasi sebesar 99.23%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97.68%, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar 100.00% dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan capaian realisasi sebesar 95.76%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja dari 2 Perangkat Daerah yaitu:

1) Dinas Pekerjaan Umum dengan capaian realisasi sebesar 95.71%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 99.73%, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terealisasi sebesar 100.00%, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terealisasi sebesar 95.00%, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terealisasi sebesar 97.91%, Program Penataan Bangunan Gedung terealisasi sebesar 98.83%, Program Penyelenggaraan Jalan terealisasi sebesar 97.41% dan Program Pengembangan Jasa Konstruksi terealisasi sebesar 91.16% yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pada Triwulan IV Tahun 2023.
2) Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan dengan capaian realisasi sebesar 95.82%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 96.38%, Program Penataan Bangunan Gedung terealisasi sebesar 98.18%, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terealisasi sebesar 93.71% dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terealisasi sebesar 95.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan capaian realisasi sebesar 97.03%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 98.63% Program Kawasan Permukiman terealisasi sebesar 97.50%, , Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh terealisasi sebesar 100.00% dan Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terealisasi sebesar 99.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pada Triwulan IV Tahun 2023 .
- Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan capaian realisasi sebesar 95.96%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja dari 3 Perangkat Daerah yaitu :

  1) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan dengan capaian realisasi sebesar 99.15%. Pencapaian ini didukung Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 100.00% dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terealisasi sebesar 98.30%

yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Pada Triwulan IV Tahun 2023

2) Satuan Polisi Pamong Praja dengan capaian realisasi sebesar 94.69%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 96.05% dan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang terealisasi sebesar 93.33% yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pada Triwulan IV Tahun 2023.
3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan capaian realisasi sebesar 94.04%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 98.08% dan yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dengan capaian realisasi sebesar 97.89%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 98.32%, Program Pemberdayaan Sosial terealisasi sebesar 96.09%, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan terealisasi sebesar 98.27%, Program Rehabilitasi Sosial terealisasi sebesar 98.17%, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terealisasi sebesar 96.73% dan Program Penanganan Bencana terealisasi sebesar 99.75% yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pada Triwulan IV Tahun 2023.

Secara keuangan, terdapat 5 urusan yang pencapaian kinerja memenuhi target persyaratan minimal kelulusan. Sebesar 100.00% dari keseluruhan bidang urusan yang masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan

dasar ini berada pada capaian kinerja keuangan kategori sangat tinggi.

Secara keuangan, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja keuangan sangat tinggi yaitu:

- Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 96.84%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 96.69%, Program Pengelolaan Pendidikan terealisasi sebesar 97.39% dan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan terealisasi sebesar 99.63% yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dengan capaian realisasi sebesar 95.89%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja dari 2 Perangkat Daerah yaitu:
  1) Dinas Kesehatan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 96.55%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 98.62%, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar 94.64%, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar 84.82%, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman terealisasi sebesar 99.91% dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan terealisasi sebesar 95.11% yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Pada Triwulan IV Tahun 2023.

2) Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu dengan capaian realisasi sebesar 99.23%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 95.46%, Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat terealisasi sebesar 96.36% dan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan terealisasi sebesar 92.96% yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang dengan capaian realisasi sebesar 95.07%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja dari 2 Perangkat Daerah yaitu:

1) Dinas Pekerjaan Umum dengan capaian realisasi keuangan sebesar 95.08%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 92.78%, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) terealisasi sebesar 97.69%, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum terealisasi sebesar 94.82%, Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase terealisasi sebesar 94.85%, Program Penataan Bangunan Gedung terealisasi sebesar 98.83% dan Program Penyelenggaraan Jalan terealisasi sebesar 94.34% yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pada Triwulan IV Tahun 2023.
2) Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 94.88%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar

94.68%, Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya terealisasi sebesar 93.88% dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang terealisasi sebesar 95.74% yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Pada Triwulan IV Tahun 2023

- Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman dengan capaian realisasi keuangan sebesar 97.03%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 98.63%, Program Kawasan Permukiman terealisasi sebesar 97.50%, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh terealisasi sebesar 100.00% dan Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU) terealisasi sebesar 99.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat dengan capaian realisasi keuangan sebesar 94.43%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja dari 3 Perangkat Daerah yaitu:

  1) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan realisasi keuangan sebesar 97.56%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97.49% dan Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran terealisasi sebesar 98.04% yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Pada Triwulan IV Tahun 2023.

2) Satuan Polisi Pamong Praja Realisasi keuangan 92.99% . Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 92.42% dan Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum terealisasi sebesar 95.45% yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pada Triwulan IV Tahun2023.
3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah realisasi keuangan sebesar 93.08%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 96.58% yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Sosial dengan capaian realisasi keuangan sebesar 95.38%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 94.86%, Program Pemberdayaan Sosial terealisasi sebesar 97.11%, Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan terealisasi sebesar 98.27%, Program Rehabilitasi Sosial terealisasi sebesar 99.10% , Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terealisasi sebesar 94.96% dan Program Penanganan Bencana terealisasi sebesar 99.87% % yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Pada Triwulan IV Tahun2023.

2. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan ini terdiri dari 18 (delapan belas) bidang urusan yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 95.99% (sangat tinggi) dan

capaian realisasi anggaran sebesar 96.51% (sangat tinggi) pada Triwulan IV Tahun 2023.

Secara fisik, terdapat 17 urusan yang pencapaian kinerja memenuhi target persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sebesar 88.23% dari keseluruhan bidang urusan yang masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ini berada pada capaian kinerja fisik kategori sangat tinggi, 11.77% kategori tinggi.

Secara fisik, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil Capaian Kinerja Fisik Yang Sangat Tinggi Dan Tinggi Yaitu:

- Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dengan capaian realisasi sebesar 93.20% . Pencapaian ini didukung oleh Program Program Penempatan Tenaga Kerja terealisasi sebesar 100.00% dan Program hubungan Industrial terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Kerja Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan capaian realisasi sebesar 94.81%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 95.51%, Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan terealisasi sebesar 92.50%, Program Perlindungan Perempuan terealisasi sebesar 100.00%, Program Peningkatan Kualitas Keluarga terealisasi sebesar 97.89% dan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan capaian realisasi sebesar 96.34% . Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 98.58%, Program Perencanaan Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 94.32%, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) terealisasi sebesar 100.00%, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terealisasi sebesar 100.00%, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat terealisasi sebesar 100.00% dan Program Pengelolaan Persampahan terealisasi sebesar 97.43% yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan capaian realisasi sebesar 99.43%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97.47%,, Program Pendaftaran Penduduk terealisasi sebesar 99.69%, Program Pencatatan Sipil terealisasi sebesar 100.00%, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terealisasi sebesar 100.00% dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan capaian realisasi sebesar 96.87%.

Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 98.91%, Program Pengendalian Penduduk terealisasi sebesar 96.20%, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terealisasi sebesar 97.76% dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar 94.60% yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dengan capaian realisasi sebesar 94.34%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 92.84% , Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terealisasi sebesar 95.83% yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dengan capaian realisasi sebesar 97.61%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 96.18% , Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terealisasi sebesar 100.00% dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terealisasi sebesar 96.65% yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dengan capaian realisasi sebesar 95.10%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 99.02% Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terealisasi sebesar 94.13%, Program Penilaian Kesehatan

KSP/USP Koperasi terealisasi sebesar 93.25%, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) terealisasi sebesar 95.96% dan Program Pengembangan UMKM terealisasi sebesar 93.17% yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Kerja Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan capaian realisasi keuangan sebesar 98.33%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja dari 2 Perangkat Daerah yaitu :

  1) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan capaian realisasi sebesar 97.29%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 99.67%, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terealisasi sebesar 100.00%, Program Promosi Penanaman Modal terealisasi sebesar 100.00 %, Program Pelayanan Penanaman Modal terealisasi sebesar 100.00 % dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Triwulan IV Tahun 2023.
  2) Administrator Kawasan Ekonomi Khusus dengan capaian realisasi sebesar 99.36%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 96.81%, Program Promosi Penanaman Modal terealisasi sebesar 100.00%, Program Pelayanan Penanaman Modal terealisasi sebesar 100.00%, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terealisasi sebesar 100.00% dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terealisasi

sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga dengan capaian realisasi sebesar 95.91%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 96.88%, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terealisasi sebesar 92.39% dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan terealisasi sebesar 98.47% yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dengan capaian realisasi sebesar 99.59%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terealisasi sebesar 99.59% yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan capaian realisasi sebesar 94.19%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terealisasi sebesar 94.19% yang dilaksanakan oleh DINAS Komunikasi Dan Informatika Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan capaian realisasi sebesar 99.79%. Pencapaian ini didukung oleh Program Pengembangan Kebudayaan terealisasi sebesar 99.58% dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dengan capaian realisasi sebesar 99.60%. Pencapaian ini didukung oleh Program Pembinaan Perpustakaan terealisasi sebesar 99.19% dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dengan capaian realisasi sebesar 99.31%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97.46%, Program Pengelolaan Arsip terealisasi sebesar 99.96%, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terealisasi sebesar 99.81% dan Program Perizinan Penggunaan Arsip terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dengan capaian realisasi 90.70%. Pencapaian ini didukung oleh Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terealisasi sebesar 92.10%, Program Penanganan Kerawanan Pangan terealisasi sebesar 90.00% dan Program Pengawasan Keamanan Pangan terealisasi sebesar 90.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dengan capaian realisasi sebesar 86.67%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan terealisasi sebesar 80 .00% dan Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan terealisasi sebesar

90.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Pada Triwulan IV Tahun 2023.

Secara keuangan terdapat 17 urusan yang pencapaian kinerja memenuhi target persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sebesar 76.47% dari keseluruhan bidang urusan yang masuk dalam urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar ini berada pada capaian kinerja keuangan kategori sangat tinggi dan 23.53% termasuk kategori tinggi.

Secara keuangan, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja keuangan sangat tinggi dan tinggi yaitu:

- Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dengan capaian realisasi keuangan sebesar 94.44%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 94.58%, Program Perlindungan Perempuan 99.85%, Program Peningkatan Kualitas Keluarga terealisasi sebesar 97.06%, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak terealisasi sebesar 94.57% yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dengan capaian realisasi keuangan sebesar 96.53%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 91.32%, Program Perencanaan Lingkungan Hidup terealisasi sebesar 94.32%, Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) terealisasi sebesar 96.91%, Program Pembinaan dan

Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terealisasi sebesar 99.93%, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat 98.48% dan Program Pengelolaan Persampahan terealisasi sebesar 97.81% yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dengan capaian realisasi keuangan sebesar 97.72%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97.27%, Program Pendaftaran Penduduk terealisasi sebesar 99.62%, Program Pencatatan Sipil terealisasi sebesar 99.32%, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terealisasi sebesar 100.00% dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana dengan capaian realisasi keuangan sebesar 95.49%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97.41%, Program Pengendalian Penduduk terealisasi sebesar 94.89%, Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) terealisasi sebesar 94.98% dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) terealisasi sebesar 92.28% yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 93.28%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 92.59%, Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) terealisasi sebesar 95.15% yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika dengan capaian realisasi keuangan sebesar 96.69%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 94.57%, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terealisasi sebesar 98.90% dan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika terealisasi sebesar 98.77% yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah dengan capaian realisasi keuangan sebesar 95.03%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 94.53%, Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi terealisasi sebesar 94.13%, Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi terealisasi sebesar 93.25%,, Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) terealisasi sebesar 95.86% , Program Pengembangan UMKM terealisasi sebesar 93.17% yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Umkm Dan Tenaga Kerja Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dengan capaian realisasi keuangan sebesar 97.18%. Pencapaian ini didukung oleh terealisasi sebesar 97.36%, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terealisasi sebesar 99.85%, Program Promosi Penanaman Modal terealisasi sebesar 98.34%, Program Pelayanan Penanaman Modal terealisasi sebesar 99.64% dan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal terealisasi sebesar 99.37% yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99.12%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terealisasi sebesar 99.12% yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dengan capaian realisasi keuangan sebesar 92.39%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terealisasi sebesar 92.39% yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 99.18%. Pencapaian ini didukung oleh Program Pengembangan Kebudayaan terealisasi sebesar 99.17% dan Program Pengembangan Kesenian Tradisional terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 97.16%. Pencapaian ini didukung

oleh Program Pembinaan Perpustakaan terealisasi sebesar 97.08% dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 97.16%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97.12%, Program Pengelolaan Arsip terealisasi sebesar 99.88%, Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip terealisasi sebesar 99.81% dan Program Perizinan Penggunaan Arsip terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 90.63%. Pencapaian ini didukung oleh Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat terealisasi sebesar 91.34%, Program Penanganan Kerawanan Pangan terealisasi sebesar 88.87% dan Program Pengawasan Keamanan Pangan terealisasi sebesar 86.58% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dengan capaian realisasi keuangan sebesar 83.71%. Pencapaian ini didukung oleh Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja terealisasi sebesar 79.60%, Program Penempatan Tenaga Kerja terealisasi sebesar 100.00% dan Program hubungan Industrial terealisasi sebesar 98.66% yang dilaksanakan oleh Dinas

Koperasi, Umkm Dan Tenaga Kerja Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 86.05%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan terealisasi sebesar 78.96%, Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan terealisasi sebesar 87.85% dan Program Penatagunaan Tanah terealisasi sebesar 89.01% yang dilaksanakan oleh Dinas Penataan Ruang Dan Pertanahan Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga dengan capaian realisasi keuangan sebesar 86.04%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 96.09%, Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan terealisasi sebesar 83.20% dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan terealisasi sebesar 98.47% yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Pada Triwulan IV Tahun 2023.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan pemerintahan ini terdiri dari 5 (lima) bidang urusan pilihan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 94.65% atau capaian dengan kategori Sangat Tinggii dan capaian realisasi anggaran sebesar 92.45% atau capaian dengan kategori sangat tinggi pada Triwulan IV Tahun 2023.

Secara fisik, terdapat 5 urusan yang pencapaian kinerja memenuhi target persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sebesar 100.00% dari keseluruhan bidang urusan yang masuk

dalam urusan pilihan ini berada pada capaian kinerja fisik kategori sangat tinggi.

Secara fisik, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja fisik yang sangat tinggi dan tinggi yaitu:

- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan dengan capaian realisasi sebesar 96.03%. Pencapaian ini didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terealisasi sebesar 98.97%, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya terealisasi sebesar 92.75% dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terealisasi sebesar 96.37% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dengan capaian realisasi sebesar 98.57%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 98.17%, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terealisasi sebesar 99.71%, Program Pemasaran Pariwisata terealisasi sebesar 96.67% dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terealisasi sebesar 99.75% yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dengan capaian realisasi sebesar 93.25%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97.41%, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terealisasi sebesar 97.81%, Program Perizinan Usaha Pertanian terealisasi sebesar 100.00%

dan Program Penyuluhan Pertanian terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan capaian realisasi sebesar 93.06%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 98.83%, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terealisasi sebesar 93.98%, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terealisasi sebesar 97.50% dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terealisasi sebesar 100.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan capaian realisasi sebesar 92.34%. Pencapaian ini didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terealisasi sebesar 96.03%, Program Pengendalian Izin Usaha Industri terealisasi sebesar 90.00% dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional terealisasi sebesar 91.00% yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pada Triwulan IV Tahun 2023.

Secara keuangan, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja keuangan sangat tinggi dan tinggi yaitu:

- Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 94.90%. Pencapaian ini didukung oleh Program Pengelolaan Perikanan Tangkap terealisasi sebesar 98.97%, Program Pengelolaan Perikanan

Budidaya terealisasi sebesar 92.34% dan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan terealisasi sebesar 96.37% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Pada Triwulan IV Tahun 2023.

- Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dengan capaian realisasi keuangan sebesar 96.59%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 95.59%, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata terealisasi sebesar 99.48%, Program Pemasaran Pariwisata terealisasi sebesar 96.65% dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terealisasi sebesar 99.75% yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dengan capaian realisasi keuangan sebesar 92.83%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 94.58%, Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan terealisasi sebesar 92.05% dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen terealisasi sebesar 98.13% yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian dengan capaian realisasi keuangan sebesar 91.85%. Pencapaian ini didukung oleh Program Perencanaan dan Pembangunan Industri terealisasi sebesar 91.88% yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Pada Triwulan IV Tahun 2023.
- Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dengan capaian realisasi keuangan sebesar 90.32%. Pencapaian ini didukung oleh

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 96.71%, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian terealisasi sebesar 95.66%, Program Perizinan Usaha Pertanian terealisasi sebesar 97.65% dan Program Penyuluhan Pertanian terealisasi sebesar 97.25% yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Pada Triwulan IV Tahun 2023.

4. Unsur Pendukung

Unsur pendukung ini terdiri dari 2 (dua) unsur kesekretariatan yaitu Sekretariat Daerah Kota Palu, dan Sekretariat DPRD Kota Palu, dengan Rata- capaian kinerja fisik pada unsur pendukung sebesar 97.29% (sangat tinggi) dan capaian realisasi anggaran sebesar 94.84% (sangat tinggi).

Secara fisik, pencapaian kinerja Sekretariat Daerah sebesar 98.23% (sangat tinggi) dan Sekretariat DPRD sebesar 96.36% (sangat tinggi). Secara keuangan pencapaian kinerja Sekretariat Daerah sebesar 94.32% (sangat tinggi) dan Sekretariat DPRD sebesar 95.54% (sangat tinggi).

5. Unsur Penunjang

Unsur penunjang urusan pemerintahan terdiri dari 5 (lima) bidang unsur penunjang dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 94.96%atau capaian yang sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 91.51% atau capaian yang sangat tinggi pada Triwulan IV Tahun 2023.

Secara fisik, terdapat 5 urusan yang pencapaian kinerja memenuhi target persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sebesar 100.00% dari keseluruhan bidang urusan yang masuk dalam urusan pilihan ini berada pada capaian kinerja fisik kategori sangat tinggi.

Secara fisik, pencapaiannya telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja fisik yang sangat tinggi yaitu:

- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) dengan capaian kinerja 97.50%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 98.07% dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terealisasi sebesar 96.93% yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada triwulan IV tahun 2023.
- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) dengan capaian kinerja 97.34%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 96.62% dan Program Kepegawaian Daerah terealisasi sebesar 98.06% yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada triwulan IV tahun 2023.
- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian Dan Pengembangan) dengan capaian kinerja 94.45%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 94.97% dan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah terealisasi sebesar 93.93% yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah pada triwulan IV tahun 2023.
- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan Dan Pelatihan) dengan capaian kinerja 94.08%. Pencapaian ini didukung oleh Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terealisasi sebesar 94.08% yang dilaksanakan oleh Badan

Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada triwulan IV tahun 2023.

- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan) dengan capaian kinerja 91.45%, Terdiri dari 2 Perangkat Daerah yaitu:

  1) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dengan capaian kinerja 94.41%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 97.38%, Program Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar 89.18% dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terealisasi sebesar 96.67% yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.
  2) Badan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja 88.50%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 86.42% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 90.58% yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023

Secara Keuangan terdapat 5 urusan yang pencapaian kinerja memenuhi target persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Sebesar 80,00% dari keseluruhan bidang urusan yang masuk dalam urusan pilihan ini berada pada capaian kinerja fisik kategori sangat tinggi dan 80,00% termasuk kategori tinggi.

Secara keuangan, pencapaiannya telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja keuangan yang sangat tinggi dan tinggi yaitu:

- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Perencanaan) dengan capaian kinerja keuangan terealisasi sebesar 96.69%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 97.18% dan Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terealisasi sebesar 95.99% yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada triwulan IV tahun 2023.

- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Kepegawaian) dengan capaian kinerja keuangan terealisasi sebesar 95.34%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 95.04% dan Program Kepegawaian Daerah terealisasi sebesar 96.14% yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada triwulan IV tahun 2023.
- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Pendidikan Dan Pelatihan) dengan capaian kinerja keuangan terealisasi sebesar 94.84%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 94.84% yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah pada triwulan IV tahun 2023.
- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Penelitian Dan Pengembangan) dengan capaian kinerja keuangan terealisasi sebesar 92.95%. Pencapaian ini didukung oleh capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 94.49% yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah pada triwulan IV tahun 2023.
- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan (Keuangan) dengan capaian kinerja keuangan terealisasi sebesar 89.40%. Terdiri dari 2 Perangkat Daerah yaitu:

1) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah dengan capaian kinerja keuangan 92.53%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 96.42%, Program Pengelolaan Keuangan Daerah terealisasi sebesar 87.24% dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terealisasi sebesar 96.63% yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.
2) Badan Pendapatan Daerah dengan capaian kinerja keuangan 86.06%. Pencapaian ini didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar 86.29% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terealisasi sebesar 90.58% yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2023.

6. Unsur Pengawasan

Unsur pengawasan hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) unsur pelaksana yaitu Inspektorat dengan capaian kinerja fisik sebesar 96.58% atau capaian sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 96.57% atau capaian sangat tinggi.

7. Unsur Kewilayahan

Unsur kewilayahan diselenggarakan oleh kecamatan se-Kota Palu yang terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 98.56% atau capaian yang sangat tinggi dan capaian realisasi anggaran sebesar 97.47% atau capaian kategori sangat tinggi.

8. Unsur Pemerintahan Umum

Unsur pemerintahan umum hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) unsur pelaksana yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan capaian kinerja fisik sebesar 96.29% atau capaian sangat tinggi

dan capaian realisasi anggaran sebesar 95.51% atau capaian sangat tinggi.

2.5.2 Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palu Triwulan IV (empat) Tahun 2023

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja fisik dan keuangan RKPD Tahun 2023 Triwulan IV (empat) per bidang urusan dan unsur pemerintahan di atas, diperoleh persentase dan predikat dari capaian kinerja fisik dan keuangan penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Tabel 2.130
Rata - Rata Capaian Kinerja Fisik dan Keuangan RKPD Tahun 2022 Triwulan IV Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Palu

No.	Uraian / Urusan / Unsur	Rata-Rata Capaian Kinerja			
		Fisik		Keuangan	
		(%)	Predikat	(%)	Predikat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA PALU		**96.41%**	**Sangat Tinggi**	**94.99%**	**Sangat Tinggi**
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	96.96%	Sangat Tinggi	95.07%	Sangat Tinggi
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	95.99%	Sangat Tinggi	96.51%	Sangat Tinggi
C	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	94.65%	Sangat Tinggi	92.45%	Sangat Tinggi
D	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	97.29%	Sangat Tinggi	94.84%	Sangat Tinggi
E	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	94.96%	Sangat Tinggi	91.51%	Sangat Tinggi
F	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	96.58%	Sangat Tinggi	96.57%	Sangat Tinggi
G	UNSUR KEWILAYAHAN	98.56%	Sangat Tinggi	97.47%	Sangat Tinggi
H	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	96.29%	Sangat Tinggi	95.51%	Sangat Tinggi

Tabel 2.130 memperlihatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu yang terdiri dari 3 (tiga) urusan dan 5 (lima) unsur pemerintahan dengan rata-rata capaian kinerja fisik sebesar 96.41% atau capaian kategori sangat tinggi dan realisasi keuangan sebesar 94.99% atau capaian kategori sangat tinggi pada Triwulan IV Tahun 2023.

Secara fisik, pencapaian kinerja yang telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja fisik yang sangat tinggi yaitu:

- Unsur Kewilayahan dengan capaian kinerja sebesar 98.56% atau capaian kategori sangat tinggi.
- Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dengan capaian kinerja sebesar 97.29% atau capaian kategori sangat tinggi.
- Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan capaian kinerja sebesar 96.96% atau capaian kategori sangat tinggi.
- Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dengan capaian kinerja sebesar 96.58% atau capaian kategori sangat tinggi.
- Unsur Pemerintahan Umum dengan capaian kinerja sebesar 96.29% atau capaian kategori sangat tinggi.
- Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan capaian kinerja sebesar 95.99% atau capaian kategori sangat tinggi.
- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan capaian kinerja sebesar 94.96% atau capaian kategori sangat tinggi
- Urusan Pemerintahan Pilihan dengan capaian kinerja sebesar 94.65% atau capaian kategori sangat tinggi.

Secara keuangan, pencapaiannya telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja dengan hasil capaian kinerja keuangan sangat tinggi dan tinggi tinggi yaitu :

- Unsur Kewilayahan dengan capaian kinerja keuangan sebesar 97.47% atau capaian kategori sangat tinggi.
- Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96.57% atau capaian kategori sangat tinggi.
- Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar dengan capaian kinerja keuangan sebesar 96.51% atau capaian kategori sangat tinggi.
- Unsur pemerintahan umum dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95.51% atau capaian kategori sangat tinggi.
- Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan dengan capaian kinerja keuangan sebesar 94.84% atau capaian kategori sangat tinggi.
- Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan capaian kinerja keuangan sebesar 95.07% atau capaian kategori sangat tinggi.
- Urusan Pemerintahan Pilihan dengan capaian kinerja keuangan sebesar 92.45% atau capaian kategori sangat tinggi.
- Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dengan capaian kinerja keuangan sebesar 91.51% atau capaian kategori sangat tinggi.

Tabel 2.131 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=6/5 x100%		11=8+9		12=11/5 x100%		13
	1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100,00%	938.186.943.769	96,96%	1.052.089.068.715	100,00%	1.148.631.954.820	14,40%	106.702.204.423	14,40%	106.702.204.423	14,40%	106.702.204.423	111,36%	1.158.791.273.138	111,36%	123,51%	
	1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN		100,00%	385.933.934.770	96,96%	350.937.937.509	100,00%	449.982.221.384	14,74%	50.110.917.801	14,74%	50.110.917.801	14,74%	50.110.917.801	111,70%	401.048.855.310	111,70%	103,92%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000			DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100,00%	385.933.934.770	97,23%	350.937.937.509	100,00%	449.982.221.384	14,74%	50.110.917.801	14,74%	50.110.917.801	14,74%	50.110.917.801	111,97%	401.048.855.310	111,97%	103,92%	
	1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	5	319.817.573.543	97,23%	279.163.311.599	100,00%	340.159.710.535	14,74%	50.110.917.801	14,74%	50.110.917.801	14,74%	50.110.917.801	111,97%	329.274.229.400			
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	422.046.750	100,00%	235.648.200	25,09%	23.313.960	25,09%	23.313.960	25,09%	23.313.960	125,09%	445.360.710			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				98,33%	274.950.119.673	100,00%	335.545.898.845	25,00%	49.813.003.841	25,00%	49.813.003.841	25,00%	49.813.003.841	123,33%	324.763.123.514			
					2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100,00%	26.424.700	100,00%	28.945.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	26.424.700			
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				98,56%	61.767.200	100,00%	61.457.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,56%	61.767.200			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				99,86%	1.282.613.588	100,00%	120.919.790	21,43%	-	21,43%	-	21,43%	-	121,29%	1.282.613.588			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100,00%	180.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94,85%	1.381.805.379	100,00%	3.575.031.200	25,00%	274.600.000	25,00%	274.600.000	25,00%	274.600.000	119,85%	1.656.405.379			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97,48%	1.038.534.309	100,00%	591.630.000	6,67%	-	6,67%	-	6,67%	-	104,15%	1.038.534.309			
	1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000		02	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100,00%	64.042.070.913	95,17%	69.442.089.417	100,00%	107.022.278.324	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,17%	69.442.089.417	95,17%	108,43%	
					2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				87,48%	36.761.233.900	100,00%	53.383.295.154	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	87,48%	36.761.233.900			
					2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				99,16%	24.651.675.396	100,00%	39.063.965.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,16%	24.651.675.396			
					2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)				95,57%	5.766.122.120	100,00%	10.456.866.145	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,57%	5.766.122.120			
					2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				98,48%	2.263.058.001	100,00%	4.118.152.025	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,48%	2.263.058.001			
	1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000		03	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	100,00%	283.595.513															
	1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000		04	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	100,00%	1.790.694.801	98,09%	2.332.536.493	100,00%	2.800.232.525	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,09%	2.332.536.493	98,09%	130,26%	
					2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan				98,09%	2.332.536.493	100,00%	2.800.232.525	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,09%	2.332.536.493			
	1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN		100,00%	280.798.774.411	97,89%	349.151.392.624	100,00%	302.915.178.980	7,82%	22.300.943.868	7,82%	22.300.943.868	7,82%	22.300.943.868	105,71%	371.452.336.492	105,71%	132,28%	
	1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000			DINAS KESEHATAN		100,00%	170.863.080.179	96,55%	149.110.497.197	100,00%	128.883.889.487	10,31%	13.191.002.547	10,31%	13.191.002.547	10,31%	13.191.002.547	106,86%	162.301.499.744	106,86%	94,99%	DINAS KESEHATAN
	1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	5	98.570.200.408	98,76%	64.417.537.957	100,00%	73.558.831.103	17,36%	12.686.481.057	17,36%	12.686.481.057	17,36%	12.686.481.057	116,12%	77.104.019.014		78,22%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	534.711.032	100,00%	561.824.050	27,50%	41.957.956	27,50%	41.957.956	27,50%	41.957.956	127,50%	576.668.988			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	54.407.396.805	100,00%	62.911.439.703	16,54%	11.167.218.395	16,54%	11.167.218.395	16,54%	11.167.218.395	116,54%	65.574.615.200			
					2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100,00%	6.360.000	100,00%	48.420.000	15,00%	3.265.000	15,00%	3.265.000	15,00%	3.265.000	115,00%	9.625.000			
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				96,00%	17.875.000	100,00%	18.622.350	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96,00%	17.875.000			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				95,30%	464.793.246	100,00%	509.057.150	25,00%	-	25,00%	-	25,00%	-	120,30%	464.793.246			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100,00%	250.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=11/5 x100%		13
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	7.501.034.748	100,00%	7.608.422.650	25,00%	1.093.028.306	25,00%	1.093.028.306	25,00%	1.093.028.306	125,00%	8.594.063.054			
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	1.485.367.126	100,00%	1.900.595.200	12,50%	381.011.400	12,50%	381.011.400	12,50%	381.011.400	112,50%	1.866.378.526			
	1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100,00%	69.445.599.613	94,05%	80.387.931.734	100,00%	50.762.403.584	0,54%	240.445.000	0,54%	240.445.000	0,54%	240.445.000	94,59%	80.628.376.734	94,59%	116,10%	
				2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				99,28%	13.169.680.385	100,00%	17.750.898.434	2,00%	3.500.000	2,00%	3.500.000	2,00%	3.500.000	101,28%	13.173.180.385			
				2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				95,84%	67.097.160.239	100,00%	32.849.398.750	0,18%	236.945.000	0,18%	236.945.000	0,18%	236.945.000	96,02%	67.334.105.239			
				2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi				100,00%	113.305.860	100,00%	144.585.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	113.305.860			
				2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				81,07%	7.785.250	100,00%	17.520.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	81,07%	7.785.250			
	1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)	63,33%	367.823.099	94,93%	987.714.880	100,00%	27.775.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,93%	987.714.880	149,90%	268,53%	
						Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	100,00%												0,00%	-			
				2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota				100,00%	1.264.400	100,00%	2.799.950	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.264.400			
				2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				100,00%	1.224.800	100,00%	2.350.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.224.800			
				2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				84,79%	985.225.680	100,00%	22.625.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	84,79%	985.225.680			
	1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100,00%	767.149.412	100,00%	384.975.976	100,00%	509.820.350	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	384.975.976	100,00%	50,18%	
				2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						100,00%	2.100.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
				2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga						100,00%	2.699.750	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
				2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				100,00%	243.798.176	100,00%	274.540.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	243.798.176			
				2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				100,00%	1.925.150	100,00%	15.915.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.925.150			
				2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan				100,00%	1.869.150	100,00%	4.475.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.869.150			
				2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga				100,00%	137.383.500	100,00%	210.090.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	137.383.500			
	1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100,00%	1.712.307.647	95,00%	2.932.336.650	100,00%	4.025.059.250	23,35%	264.076.490	23,35%	264.076.490	23,35%	264.076.490	118,35%	3.196.413.140	118,35%	186,67%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		9-6-8		12=11/5 x100%		13
					2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				90,00%	2.238.900	100,00%	9.500.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	2.238.900			
					2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				95,00%	713.040.600	100,00%	377.049.250	70,04%	264.076.490	70,04%	264.076.490	70,04%	264.076.490	165,04%	977.117.090			
					2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	2.217.057.150	100,00%	3.638.510.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.217.057.150			
	1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001			RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU		100,00%	109.935.694.232	99,23%	200.040.895.427	100,00%	174.031.289.493	5,33%	9.109.941.321	5,33%	9.109.941.321	5,33%	9.109.941.321	104,56%	209.150.836.748	104,56%	190,25%	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANUTAPURA PALU
	1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/201	A	92.652.534.757	97,68%	164.313.490.714	100,00%	140.347.528.243	8,79%	7.967.619.774	8,79%	7.967.619.774	8,79%	7.967.619.774	106,46%	172.281.110.488		185,94%	
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	39.840.392.345	100,00%	45.347.528.243	17,57%	7.967.619.774	17,57%	7.967.619.774	17,57%	7.967.619.774	117,57%	47.808.012.119			
					2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				95,36%	124.473.098.369	100,00%	95.000.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,36%	124.473.098.369			
	1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	02		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pemenuhan Kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan RS	90,00%	17.148.535.093	100,00%	35.631.589.283	100,00%	33.569.978.250	7,21%	1.142.321.547	7,21%	1.142.321.547	7,21%	1.142.321.547	107,21%	36.773.890.830	119,13%	214,44%	
					2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	34.657.462.021	100,00%	25.651.345.050	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	34.657.462.021			
					2.02	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	974.107.262	100,00%	7.918.633.200	14,43%	1.142.321.547	14,43%	1.142.321.547	14,43%	1.142.321.547	114,43%	2.116.428.809			
	1	02	1.02.0.00.0.00.01.0001	03		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar	50,00%	134.624.382	100,00%	93.835.430	100,00%	113.783.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	93.835.430	200,00%	71,19%	
					2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota				100,00%	93.835.430	100,00%	113.783.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	93.835.430			
	1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		100,00%	157.961.942.699	95,76%	216.971.941.808	100,00%	256.670.910.303	9,34%	10.487.413.025	9,34%	10.487.413.025	9,34%	10.487.413.025	105,11%	227.459.354.833	105,11%	144,00%	
	1	03	1.03.1.03.0.00.02.00			DINAS PEKERJAAN UMUM		100,00%	148.617.658.255	95,71%	209.123.764.856	100,00%	249.532.771.628	4,05%	9.582.743.824	4,05%	9.582.743.824	4,05%	9.582.743.824	99,76%	218.706.508.680	99,76%	147,16%	DINAS PEKERJAAN UMUM
	1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	17.306.390.013	98,73%	13.518.791.647	100,00%	14.018.976.970	15,71%	1.629.875.399	15,71%	1.629.875.399	15,71%	1.629.875.399	115,44%	15.148.667.046		87,53%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	78.047.650	100,00%	132.913.050	20,00%	21.705.000	20,00%	21.705.000	20,00%	21.705.000	120,00%	99.752.650			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	7.094.949.204	100,00%	8.759.248.795	28,54%	1.283.136.740	28,54%	1.283.136.740	28,54%	1.283.136.740	128,54%	8.378.085.944			
					2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100,00%	304.100.660	100,00%	419.491.000	5,00%	2.400.000	5,00%	2.400.000	5,00%	2.400.000	105,00%	306.500.660			
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,00%	84.767.960	100,00%	104.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	84.767.960			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				98,15%	1.331.340.623	100,00%	904.833.575	21,43%	116.449.474	21,43%	116.449.474	21,43%	116.449.474	119,57%	1.447.790.097			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	1.436.720.000									100,00%	1.436.720.000			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	1.770.327.694	100,00%	2.236.242.250	22,50%	76.105.685	22,50%	76.105.685	22,50%	76.105.685	122,50%	1.846.433.379			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	1.418.537.856	100,00%	1.462.348.300	12,50%	130.078.500	12,50%	130.078.500	12,50%	130.078.500	112,50%	1.548.616.356			
	1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	100,00%	5.687.185.671	100,00%	2.746.278.969	100,00%	2.054.269.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.746.278.969	100,00%	48,29%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=11/5 x100%		13
					2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	610.336.675	100,00%	659.353.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	610.336.675			
					2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	2.135.942.294	100,00%	1.394.916.400	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.135.942.294			
	1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	96,92%	11.103.795.395	95,00%	4.318.082.217	100,00%	5.682.665.740	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,00%	4.318.082.217	98,02%	38,89%	
							Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	33,79%												0,00%	-			
					2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				95,00%	4.318.082.217	100,00%	5.682.665.740	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,00%	4.318.082.217			
	1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	9,23%	425.573.487	85,62%	163.500.972	100,00%	291.186.400	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	85,62%	163.500.972		38,42%	
					2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				85,62%	163.500.972	100,00%	291.186.400	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	85,62%	163.500.972			
	1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	67,68%	8.382.652.175	97,91%	5.943.686.500	100,00%	4.294.063.215	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	97,91%	5.943.686.500	144,67%	70,90%	
							Persentase jalan yang memiliki drainase	10,72%																
					2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota				97,91%	5.943.686.500	100,00%	4.294.063.215	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	97,91%	5.943.686.500			
	1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	08		Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang anda	100,00%	21.454.733.108	98,83%	41.040.003.026	100,00%	113.509.970.075	6,50%	7.112.194.925	6,50%	7.112.194.925	6,50%	7.112.194.925	105,33%	48.152.197.951	105,33%	224,44%	
					2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				98,83%	41.040.003.026	100,00%	113.509.970.075	6,50%	7.112.194.925	6,50%	7.112.194.925	6,50%	7.112.194.925	105,33%	48.152.197.951			
	1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10		Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	86,23%	83.997.318.210	97,41%	141.243.445.625	100,00%	109.335.850.128	6,14%	840.673.500	6,14%	840.673.500	6,14%	840.673.500	103,56%	142.084.119.125	120,09%	169,15%	
							Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,474												0,00%	-			
					2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota				97,41%	141.243.445.625	100,00%	109.335.850.128	6,14%	840.673.500	6,14%	840.673.500	6,14%	840.673.500	103,56%	142.084.119.125			
	1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Cakupan pengembangan jasa konstruksi	100,00%	260.010.196	91,16%	149.975.900	100,00%	345.789.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	91,16%	149.975.900	91,16%	57,68%	
					2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				82,32%	107.039.500	100,00%	286.692.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	82,32%	107.039.500			
					2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	42.936.400	100,00%	59.097.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	42.936.400			
	1	03	1.03.2.10.0.00.01.00			DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN		100,00%	9.344.284.444	95,82%	7.848.176.952	100,00%	7.138.138.675	14,64%	904.669.201	14,64%	904.669.201	14,64%	904.669.201	110,46%	8.752.846.153	110,46%	93,67%	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	6.993.345.213	96,38%	6.131.032.833	100,00%	6.310.207.125	14,64%	904.669.201	14,64%	904.669.201	14,64%	904.669.201	111,02%	7.035.702.034		100,61%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	69.786.300	100,00%	30.324.450	18,75%	-	18,75%	-	18,75%	-	118,75%	69.786.300			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	3.510.300.357	100,00%	4.223.523.105	22,50%	545.852.816	22,50%	545.852.816	22,50%	545.852.816	122,50%	4.056.153.173			
					2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100,00%	6.125.000	100,00%	7.400.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	6.125.000			
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,00%	23.954.484									100,00%	23.954.484			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2					3	4	K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								5		6		7		8		9		10		11=6/5 x100%		12=6/7 x100%		13
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	707.331.220	100,00%	378.304.500	23,73%	42.691.854	23,73%	42.691.854	23,73%	42.691.854	123,73%	750.023.074			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				89,30%	118.336.900	100,00%	3.735.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	89,30%	118.336.900			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97,65%	1.120.556.256	100,00%	1.131.519.600	25,00%	246.698.931	25,00%	246.698.931	25,00%	246.698.931	122,65%	1.367.255.187			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				87,35%	574.642.316	100,00%	535.400.070	12,50%	69.425.600	12,50%	69.425.600	12,50%	69.425.600	99,85%	644.067.916			
	1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08		Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,341	1.585.816.248	98,18%	461.607.700	100,00%	623.534.750	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,18%	461.607.700		29,11%	
					2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				98,18%	461.607.700	100,00%	623.534.750	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,18%	461.607.700			
	1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	09		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungannya	100,00%	118.587.582	93,71%	345.364.250									93,71%	345.364.250	93,71%	291,23%	
					2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota				93,71%	345.364.250								93,71%	345.364.250			
	1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100,00%	646.535.401	95,00%	910.172.169	100,00%	204.396.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,00%	910.172.169	95,00%	140,78%	
					2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota				100,00%	637.471.333	100,00%	3.150.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	637.471.333			
					2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				95,00%	149.095.871	100,00%	75.622.450	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,00%	149.095.871			
					2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				90,00%	123.604.965	100,00%	125.624.350	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	123.604.965			
	1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100,00%	63.668.850.377	97,03%	79.666.596.537	100,00%	74.188.260.250	22,44%	16.614.316.785	22,44%	16.614.316.785	22,44%	16.614.316.785	119,47%	96.280.915.322	119,47%	151,22%	
	1	04	1.04.0.00.0.00.01.00			DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		100,00%	63.668.850.377	97,03%	79.666.596.537	100,00%	74.188.260.250	22,44%	16.614.316.785	22,44%	16.614.316.785	22,44%	16.614.316.785	119,47%	96.280.915.322	119,47%	151,22%	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
	1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	4.962.596.297	98,63%	4.563.555.323	100,00%	6.774.357.250	21,19%	917.365.016	21,19%	917.365.016	21,19%	917.365.016	119,82%	5.480.920.339		110,00%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	6.610.000	100,00%	8.600.000	20,59%	1.080.000	20,59%	1.080.000	20,59%	1.080.000	120,59%	7.690.000			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	3.061.837.948	100,00%	3.674.570.742	62,50%	497.674.424	62,50%	497.674.424	62,50%	497.674.424	162,50%	3.559.512.372			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				99,29%	452.991.472	100,00%	906.979.650	14,98%	170.545.678	14,98%	170.545.678	14,98%	170.545.678	114,27%	623.537.150			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	49.889.000	100,00%	270.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	49.889.000			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97,50%	639.491.203	100,00%	979.296.800	25,00%	185.364.914	25,00%	185.364.914	25,00%	185.364.914	122,50%	824.856.117			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95,00%	352.735.700	100,00%	934.910.058	4,07%	62.700.000	4,07%	62.700.000	4,07%	62.700.000	99,07%	415.435.700			
	1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02		Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	80,47%	1.838.254.080	90,00%	393.251.000	100,00%	1.004.027.600	7,26%	50.723.100	7,26%	50.723.100	7,26%	50.723.100	97,26%	443.974.100	120,87%	24,15%	
					2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota				0,00%	-	100,00%	300.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
					2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus				100,00%	261.331.000	100,00%	348.903.100	14,02%	48.903.100	14,02%	48.903.100	14,02%	48.903.100	114,02%	310.234.100			
					2.06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan				100,00%	131.920.000	100,00%	355.124.500	0,51%	1.820.000	0,51%	1.820.000	0,51%	1.820.000	100,51%	133.740.000			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4		5		6		7		8		9		10		11=6/5 x100%		12=11/5 x100%		13
	1	04	1.04.0.00.0.00.01.0000		03	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	100,00%	30.748.000.000	97,50%	4.348.970.665	100,00%	7.526.595.000	3,57%	142.682.122	3,57%	142.682.122	3,57%	142.682.122	101,07%	4.491.652.787	101,07%	14,61%	
					2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				100,00%	2.646.437.869	100,00%	4.908.576.000	6,59%	128.117.122	6,59%	128.117.122	6,59%	128.117.122	106,59%	2.774.554.991			
					2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha				95,00%	1.702.532.796	100,00%	2.618.019.000	0,56%	14.565.000	0,56%	14.565.000	0,56%	14.565.000	95,56%	1.717.097.796			
	1	04	1.04.0.00.0.00.01.0000		04	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	8,66%	9.800.000.000	100,00%	14.580.123.196	100,00%	11.389.877.500	0,31%	22.776.322	0,31%	22.776.322	0,31%	22.776.322	100,31%	14.602.899.518	1158,26%	149,01%	
					2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota				100,00%	14.580.123.196	100,00%	11.389.877.500	0,31%	22.776.322	0,31%	22.776.322	0,31%	22.776.322	100,31%	14.602.899.518			
	1	04	1.04.0.00.0.00.01.0000		05	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100,00%	16.300.000.000	99,00%	55.780.698.353	100,00%	47.493.402.900	34,99%	15.480.770.225	34,99%	15.480.770.225	34,99%	15.480.770.225	133,99%	71.261.468.578	133,99%	437,19%	
							Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)											0,00%	-			
					2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan				99,00%	55.780.698.353	100,00%	47.493.402.900	34,99%	15.480.770.225	34,99%	15.480.770.225	34,99%	15.480.770.225	133,99%	71.261.468.578			
	1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		100,00%	35.043.944.011	95,96%	32.265.715.198	100,00%	46.061.606.535	14,10%	5.223.718.334	14,10%	5.223.718.334	14,10%	5.223.718.334	110,06%	37.489.433.532	110,06%	106,98%	
	1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000			DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN		100,00%	11.463.733.182	99,15%	10.363.218.693	100,00%	11.246.210.174	17,05%	1.553.293.004	17,05%	1.553.293.004	17,05%	1.553.293.004	116,20%	11.916.511.697	116,20%	103,95%	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	9.891.994.991	100,00%	9.098.810.297	100,00%	10.565.563.274	14,21%	1.467.713.004	14,21%	1.467.713.004	14,21%	1.467.713.004	114,21%	10.566.523.301		106,82%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	5.162.800	100,00%	9.000.250	11,25%	-	11,25%	-	11,25%	-	111,25%	5.162.800			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	4.207.596.142	100,00%	6.011.942.024	12,50%	830.791.359	12,50%	830.791.359	12,50%	830.791.359	112,50%	5.038.387.501			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	486.074.643	100,00%	604.098.100	16,72%	146.234.647	16,72%	146.234.647	16,72%	146.234.647	116,72%	632.309.290			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	127.416.000									100,00%	127.416.000			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	3.652.203.307	100,00%	3.563.784.500	25,00%	426.046.998	25,00%	426.046.998	25,00%	426.046.998	125,00%	4.078.250.305			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	620.357.405	100,00%	376.738.400	5,58%	64.640.000	5,58%	64.640.000	5,58%	64.640.000	105,58%	684.997.405			
	1	05	1.05.0.00.0.00.01.0000		04	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	100,00%	1.571.738.191	98,30%	1.264.408.396	100,00%	680.646.900	19,89%	85.580.000	19,89%	85.580.000	19,89%	85.580.000	118,20%	1.349.988.396	118,20%	85,89%	
							Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,88%												0,00%	-			
					2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	1.234.274.496	100,00%	655.516.500	19,89%	85.580.000	19,89%	85.580.000	19,89%	85.580.000	119,89%	1.319.854.496			
					2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran				93,22%	8.587.500	100,00%	5.610.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	93,22%	8.587.500			
					2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran				100,00%	1.700.000	100,00%	11.600.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.700.000			
					2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				100,00%	19.846.400	100,00%	7.920.400	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	19.846.400			
	1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000			SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		100,00%	16.299.707.628	94,69%	15.413.656.219	100,00%	28.269.723.876	13,17%	2.902.954.318	13,17%	2.902.954.318	13,17%	2.902.954.318	107,86%	18.316.610.537	107,86%	112,37%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	13.753.279.556	96,05%	12.401.148.319	100,00%	13.996.623.876	18,79%	2.571.254.318	18,79%	2.571.254.318	18,79%	2.571.254.318	114,84%	14.972.402.837		108,86%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	4.680.000	100,00%	4.418.400	18,75%	-	18,75%	-	18,75%	-	118,75%	4.680.000			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	5.230.919.421	100,00%	5.824.137.676	15,00%	821.112.798	15,00%	821.112.798	15,00%	821.112.798	115,00%	6.052.032.219			
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				42,29%	42.293.061									42,29%	42.293.061			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=11/5 x100%		13
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				90,24%	597.678.584	100,00%	533.983.150	24,17%	32.379.569	24,17%	32.379.569	24,17%	32.379.569	114,41%	630.058.153			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	886.276.000	100,00%	39.161.400	0,00%		0,00%	390.000	0,00%	390.000	100,00%	886.666.000			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	4.691.310.482	100,00%	6.282.313.200	25,00%	1.498.311.951	25,00%	1.498.311.951	25,00%	1.498.311.951	125,00%	6.189.622.433			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90,00%	947.990.771	100,00%	1.312.610.050	11,05%	219.450.000	11,05%	219.450.000	11,05%	219.450.000	101,05%	1.167.440.771			
	1	05	1.05.0.00.0.00.02.0000	02		Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100,00%	2.546.428.072	93,33%	3.012.507.900	100,00%	14.273.100.000	7,54%	331.700.000	7,54%	331.700.000	7,54%	331.700.000	100,87%	3.344.207.900	100,87%	131,33%	
							Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100,00%																
					2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				93,33%	3.012.507.900	100,00%	14.273.100.000	7,54%	331.700.000	7,54%	331.700.000	7,54%	331.700.000	100,87%	3.344.207.900			
	1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH		100,00%	7.280.503.201	94,04%	6.488.840.286	100,00%	6.545.672.485	12,07%	767.471.012	12,07%	767.471.012	12,07%	767.471.012	106,11%	7.256.311.298	12,07%	10,54%	
	1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	5	4.686.709.490	98,08%	4.399.505.329	100,00%	5.457.740.785	13,35%	657.468.473	13,35%	657.468.473	13,35%	657.468.473	111,43%	5.056.973.802		14,03%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	13.654.550	100,00%	40.421.400	18,75%	-	18,75%	-	18,75%	-	118,75%	13.654.550			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	2.996.772.478	100,00%	3.733.767.735	25,00%	473.879.504	25,00%	473.879.504	25,00%	473.879.504	125,00%	3.470.651.982			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				95,67%	448.398.948	100,00%	354.174.750	13,29%	66.934.410	13,29%	66.934.410	13,29%	66.934.410	108,96%	515.353.358			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	51.593.000	100,00%	50.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	51.593.000			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97,29%	395.040.403	100,00%	891.193.200	6,33%	92.234.559	6,33%	92.234.559	6,33%	92.234.559	103,62%	487.274.962			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95,54%	494.045.950	100,00%	388.183.700	3,38%	24.400.000	3,38%	24.400.000	3,38%	24.400.000	98,92%	518.445.950			
	1	05	1.05.0.00.0.00.03.0000	03		Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana	100,00%	2.593.793.711	90,00%	2.089.334.957	100,00%	1.087.931.700	10,79%	110.002.539	10,79%	110.002.539	10,79%	110.002.539	100,79%	2.199.337.496	100,79%	84,79%	
					2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						100,00%	79.304.550	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%				
					2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana				92,29%	778.251.755	100,00%	192.644.400	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	92,29%	778.251.755			
					2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				87,71%	899.490.452	100,00%	357.479.850	19,10%	65.354.701	19,10%	65.354.701	19,10%	65.354.701	106,81%	964.845.153			
					2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				90,00%	411.592.750	100,00%	458.502.900	13,27%	44.647.838	13,27%	44.647.838	13,27%	44.647.838	103,27%	456.240.588			
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		100,00%	14.779.497.501	97,89%	23.095.483.039	100,00%	18.813.777.368	17,98%	1.964.894.610	17,98%	1.964.894.610	17,98%	1.964.894.610	115,87%	25.060.377.649	115,87%	169,56%	
	1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000			DINAS SOSIAL		100,00%	14.779.497.501	97,89%	23.095.483.039	100,00%	18.813.777.368	17,98%	1.964.894.610	17,98%	1.964.894.610	17,98%	1.964.894.610	115,87%	25.060.377.649	115,87%	169,56%	DINAS SOSIAL
	1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	5	7.275.566.950	98,32%	5.829.958.135	100,00%	6.838.492.808	35,32%	1.287.186.206	35,32%	1.287.186.206	35,32%	1.287.186.206	133,64%	7.117.144.341		17,69%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	3.937.500	100,00%	20.376.850	75,00%	17.640.000	75,00%	17.640.000	75,00%	17.640.000	175,00%	21.577.500			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				96,74%	3.591.785.082	100,00%	4.587.293.176	9,80%	644.074.160	9,80%	644.074.160	9,80%	644.074.160	106,54%	4.235.859.242			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				99,49%	833.516.395	100,00%	600.322.550	38,09%	196.441.940	38,09%	196.441.940	38,09%	196.441.940	137,58%	1.029.958.335			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	6.550.000									100,00%	6.550.000			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95,72%	842.200.951	100,00%	1.029.050.232	21,43%	252.434.270	21,43%	252.434.270	21,43%	252.434.270	117,15%	1.094.635.221			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		9-6-8		12=11/5 x100%		13
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97,96%	551.968.207	100,00%	601.450.000	32,30%	176.595.836	32,30%	176.595.836	32,30%	176.595.836	130,26%	728.564.043			
	1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100,00%	847.899.024	96,09%	603.250.000	100,00%	616.364.750	14,59%	84.017.500	14,59%	84.017.500	14,59%	84.017.500	110,68%	687.267.500	110,68%	81,06%	
				2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	33.500.000	100,00%	32.650.000	15,00%	4.187.500	15,00%	4.187.500	15,00%	4.187.500	115,00%	37.687.500			
				2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota				92,17%	569.750.000	100,00%	583.714.750	14,19%	79.830.000	10,59%	75.080.000	10,59%	75.080.000	106,36%	644.830.000			
	1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	03	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100,00%	114.606.604	98,27%	27.516.700	100,00%	23.520.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,27%	27.516.700	98,27%	24,01%	
				2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal				98,27%	27.516.700	100,00%	23.520.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,27%	27.516.700			
	1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	Program Rehabilitasi Sosial	Presentase pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis	100,00%	2.039.023.455	98,17%	1.028.391.074	100,00%	830.239.950	17,17%	141.350.900	17,17%	141.350.900	17,17%	141.350.900	115,34%	1.169.741.974	115,34%	57,37%	
						Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	16,58%																
				2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				96,44%	1.016.689.574	100,00%	818.229.950	19,33%	140.960.900	19,33%	140.960.900	19,33%	140.960.900	115,77%	1.157.650.474			
				2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial				99,91%	11.701.500	100,00%	12.010.000	15,00%	390.000	15,00%	390.000	15,00%	390.000	114,91%	12.091.500			
	1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100,00%	2.914.646.596	96,73%	14.567.058.430	100,00%	9.569.958.250	17,81%	265.508.800	17,81%	265.508.800	17,81%	265.508.800	114,54%	14.832.567.230	114,54%	508,90%	
				2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				96,73%	14.567.058.430	100,00%	9.569.958.250	17,81%	265.508.800	17,81%	265.508.800	17,81%	265.508.800	114,54%	14.832.567.230			
	1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	Program Penanganan Bencana	Persentase capaian penanganan bencana	100,00%	1.587.754.872	99,75%	1.039.308.700	100,00%	935.201.610	22,96%	186.831.204	22,96%	186.831.204	22,96%	186.831.204	122,72%	1.226.139.904	122,72%	77,22%	
						Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat	99,85%																
				2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota				99,51%	876.323.700	100,00%	717.736.610	21,33%	133.346.204	21,33%	133.346.204	21,33%	133.346.204	120,84%	1.009.669.904			
				2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota				100,00%	162.985.000	100,00%	217.465.000	24,59%	53.485.000	24,59%	53.485.000	24,59%	53.485.000	124,59%	216.470.000			
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		100,00%	414.775.120.425	95,99%	188.046.553.630	97,75%	169.835.388.204	12,01%	19.449.249.342	12,01%	19.449.249.342	12,01%	19.449.249.342	108,00%	207.495.802.972	108,00%	50,03%	
	2	07			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA		100,00%	727.400.722	93,20%	1.034.578.663	100,00%	1.021.469.050	5,33%	4.800.000	5,33%	4.800.000	5,33%	4.800.000	98,53%	1.039.378.663	98,53%	142,89%	
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00		DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA		100,00%	727.400.722	93,20%	1.034.578.663	100,00%	1.021.469.050	5,33%	4.800.000	5,33%	4.800.000	5,33%	4.800.000	98,53%	1.039.378.663	98,53%	142,89%	DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA
	2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	02	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase pemenuhan perencanaan tenaga kerja					100,00%	91.405.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
				2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						100,00%	91.405.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
																			0,00%	-			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		8-6-8		12=11/5 x100%		13
	2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	03		Program Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3	34.393.256	79,60%	772.672.063	100,00%	538.925.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	79,60%	772.672.063	26,53%	2246,58%		
				2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				79,60%	772.672.063	100,00%	538.925.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	79,60%	772.672.063				
	2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	04		Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	8,72%	16.816.768	100,00%	18.147.500	100,00%	90.053.750	5,33%	4.800.000	5,33%	4.800.000	5,33%	4.800.000	105,33%	22.947.500	1207,91%	126,46%		
				2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				100,00%	18.147.500	100,00%	90.053.750	5,33%	4.800.000	5,33%	4.800.000	5,33%	4.800.000	105,33%	22.947.500				
	2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05		Program hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	75,00%	676.190.698	100,00%	243.759.100	100,00%	301.084.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	243.759.100	133,33%	36,05%		
							Sesaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	48,00%																	
				2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						100,00%	51.387.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-				
				2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	243.759.100	100,00%	249.697.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	243.759.100				
	2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		100,00%	5.351.844.159	94,61%	4.857.501.945	100,00%	5.399.367.974	13,47%	700.313.500	13,47%	700.313.500	13,47%	700.313.500	108,28%	5.557.815.445	108,28%	103,85%		
	2	08	2.08.0.00.0.00.01.00			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		100,00%	5.351.844.159	94,61%	4.857.501.945	100,00%	5.399.367.974	13,47%	700.313.500	13,47%	700.313.500	13,47%	700.313.500	108,28%	5.557.815.445	108,28%	103,85%	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
	2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	B	4.311.157.335	95,51%	4.294.906.445	100,00%	4.923.154.024	19,70%	590.313.500	19,70%	590.313.500	19,70%	590.313.500	115,21%	4.885.219.945		113,32%		
				2.01		Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	9.985.000	100,00%	3.090.000	18,75%	-	18,75%	-	18,75%	-	118,75%	9.985.000				
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	2.956.257.538	100,00%	3.680.559.174	25,00%	435.357.520	25,00%	435.357.520	25,00%	435.357.520	125,00%	3.391.615.058				
				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				99,29%	608.420.689	100,00%	360.501.250	25,00%	42.431.020	25,00%	42.431.020	25,00%	42.431.020	124,29%	650.851.709				
				2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93,79%	364.506.053	100,00%	524.243.600	25,00%	66.924.960	25,00%	66.924.960	25,00%	66.924.960	118,79%	431.431.013				
				2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84,45%	355.737.165	100,00%	354.760.000	4,75%	45.600.000	4,75%	45.600.000	4,75%	45.600.000	89,20%	401.337.165				
	2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,29%	100.823.160	92,50%	37.403.330	100,00%	34.753.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	92,50%	37.403.330	94,11%	37,10%		
				2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota				85,00%	22.887.030	100,00%	20.233.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	85,00%	22.887.030				
				2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota				100,00%	14.516.300	100,00%	14.519.900	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	14.516.300				
	2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03		Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,06%	179.933.534	100,00%	165.514.480	100,00%	167.535.750	39,61%	60.000.000	39,61%	60.000.000	39,61%	60.000.000	139,61%	225.514.480	#######	125,33%		
				2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	15.833.150	100,00%	16.052.900	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	15.833.150				
				2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota				100,00%	149.681.330	100,00%	151.482.850	39,61%	60.000.000	39,61%	60.000.000	39,61%	60.000.000	139,61%	209.681.330				
	2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	62,96%	174.292.718	97,89%	138.567.890	100,00%	79.158.650	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	97,89%	138.567.890	155,48%	79,50%		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=11/5 x100%		13
				2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				95,78%	64.992.490	100,00%	34.581.150	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,78%	64.992.490			
				2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas Keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak Yang wilayah Kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota				100,00%	73.575.400	100,00%	44.577.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	73.575.400			
	2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	05	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100,00%	23.895.519	100,00%	26.821.350	100,00%	28.623.850	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	26.821.350	100,00%	112,24%	
				2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	26.821.350	100,00%	28.623.850	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	26.821.350			
	2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	06	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Kota Layak Anak	Madya	539.189.920	89,00%	145.919.650	100,00%	145.355.650	35,00%	50.000.000	35,00%	50.000.000	35,00%	50.000.000	124,00%	195.919.650		36,34%	
				2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				86,75%	28.819.100	100,00%	39.220.400	5,00%	-	5,00%	-	5,00%	-	91,75%	28.819.100			
				2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota				91,25%	117.100.550	100,00%	106.135.250	30,00%	50.000.000	30,00%	50.000.000	30,00%	50.000.000	121,25%	167.100.550			
	2	08	2.08.0.00.0.00.01.0000	07	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perlindungan khusus anak	100,00%	22.551.973	88,76%	48.368.800	100,00%	20.787.050	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	88,76%	48.368.800	88,76%	214,48%	
				2.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				88,76%	48.368.800	100,00%	20.787.050	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	88,76%	48.368.800			
	2	09			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN		100,00%	1.491.484.810	90,70%	12.295.088.880	100,00%	14.597.570.619	16,67%	1.911.627.004	16,67%	1.911.627.004	16,67%	1.911.627.004	107,37%	14.206.715.884	107,37%	952,52%	
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000		DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		100,00%	1.491.484.810	90,70%	12.295.088.880	100,00%	14.597.570.619	16,67%	1.911.627.004	16,67%	1.911.627.004	16,67%	1.911.627.004	107,37%	14.206.715.884	107,37%	952,52%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				100,00%	11.661.424.068	100,00%	14.012.542.869	16,67%	1.911.627.004	16,67%	1.911.627.004	16,67%	1.911.627.004	116,67%	13.573.051.072			
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	10.880.477.378	100,00%	13.470.221.069	25,00%	1.886.366.844	25,00%	1.886.366.844	25,00%	1.886.366.844	125,00%	12.766.844.222			
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	774.546.690	100,00%	515.941.800	25,00%	25.260.160	25,00%	25.260.160	25,00%	25.260.160	125,00%	799.806.850			
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	6.400.000	100,00%	26.380.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	6.400.000			
	2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan	100,00%	552.522.393	92,10%	489.136.200	100,00%	439.886.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	92,10%	489.136.200	92,10%	88,53%	
						Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	95,86																
				2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				90,00%	381.321.200	100,00%	217.119.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	381.321.200			
				2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota						100,00%	165.200.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
				2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Indeks Ketahanan Pangan	-		94,21%	107.815.000	100,00%	57.567.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
	2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	100,00%	868.404.548	90,00%	110.925.962	100,00%	114.944.850	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	110.925.962	90,00%	12,77%	
				2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				90,00%	110.925.962	100,00%	114.944.850	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	110.925.962			
	2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	05	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase capaian pengawasan keamanan panagan	100,00%	70.557.869	90,00%	33.602.650	100,00%	30.196.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	33.602.650	90,00%	47,62%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11=6/5 x100%		12=8+10		12=11/5 x100%		13
					2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				90,00%	33.602.650	100,00%	30.196.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	33.602.650				
	2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN		100,00%	280.501.020	86,67%	286.287.005	100,00%	217.202.950	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	86,67%	286.287.005	86,67%	102,06%		
	1	03	1.03.2.10.0.00.01.00			DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN		100,00%	280.501.020	86,67%	286.287.005	100,00%	217.202.950	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	86,67%	286.287.005	86,67%	102,06%		DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN
	2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	02		Program Pengelolaan Izin Lokasi																			
	2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	04		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100,00%	50.814.787	80,00%	73.968.450	100,00%	38.862.700	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	80,00%	73.968.450	80,00%	145,56%		
					2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota				80,00%	73.968.450	100,00%	38.862.700	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	80,00%	73.968.450				
	2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	05		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100,00%	27.917.197	90,00%	33.664.500	100,00%	37.900.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	33.664.500	90,00%	120,59%		
					2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				90,00%	33.664.500	100,00%	37.900.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	33.664.500				
	2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	06		Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee														0,00%	-				
	2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	07		Program Penetapan Tanah Ulayat														0,00%	-				
	2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	08		Program Pengelolaan Tanah Kosong														0,00%	-				
	2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	09		Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah														0,00%	-				
	2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10		Program Penatagunaan Tanah	Cakupan penatagunaan tanah	100,00%	201.769.036	90,00%	178.654.055	100,00%	140.440.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	178.654.055	90,00%	88,54%		
					2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota				90,00%	178.654.055	100,00%	140.440.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	178.654.055				
	2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		100,00%	185.930.092.570	96,34%	69.351.587.327	100,00%	53.065.117.136	15,03%	7.489.905.434	15,03%	7.489.905.434	15,03%	7.489.905.434	111,37%	76.841.492.761	111,37%	41,33%		
	2	11	2.11.0.00.0.00.01.00			DINAS LINGKUNGAN HIDUP		100,00%	185.930.092.570	96,34%	69.351.587.327	100,00%	53.065.117.136	15,03%	7.489.905.434	15,03%	7.489.905.434	15,03%	7.489.905.434	111,37%	76.841.492.761	111,37%	41,33%		DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	11.811.192.881	98,58%	9.849.030.648	100,00%	12.972.052.914	19,37%	1.672.467.756	19,37%	1.672.467.756	19,37%	1.672.467.756	117,95%	11.521.498.404		97,55%		
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	32.863.850	100,00%	109.456.750	22,58%	37.698.320	22,58%	37.698.320	22,58%	37.698.320	122,58%	70.562.170				
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	6.824.591.673	100,00%	8.870.444.994	25,00%	1.194.515.796	25,00%	1.194.515.796	25,00%	1.194.515.796	125,00%	8.019.107.469				
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				92,90%	742.925.198	100,00%	512.485.850	26,97%	65.959.950	26,97%	65.959.950	26,97%	65.959.950	119,87%	808.885.148				
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	3.300.000	100,00%	26.206.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.300.000				
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	1.305.727.389	100,00%	1.968.404.800	25,00%	236.823.690	25,00%	236.823.690	25,00%	236.823.690	125,00%	1.542.551.079				
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	939.622.538	100,00%	1.485.054.320	16,67%	137.470.000	16,67%	137.470.000	16,67%	137.470.000	116,67%	1.077.092.538				
	2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	02		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	100,00%	711.527.506	94,32%	586.496.600	100,00%	440.489.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,32%	586.496.600	0,00%	0,00%		
					2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				94,32%	586.496.600	100,00%	440.489.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,32%	586.496.600				

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=11/5 x100%		13
	2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03			Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100,00%	204.222.106	84,02%	542.419.436	100,00%	766.522.912	10,83%	70.883.593	10,83%	70.883.593	10,83%	70.883.593	94,86%	613.303.029	94,86%	300,31%	
					2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				88,88%	499.537.736	100,00%	662.502.122	12,50%	69.903.593	12,50%	69.903.593	12,50%	69.903.593	101,38%	569.441.329			
					2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				100,00%	29.200.100	100,00%	51.810.860	20,00%	980.000	20,00%	980.000	20,00%	980.000	120,00%	30.180.100			
					2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				63,19%	13.681.600	100,00%	52.209.930	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	63,19%	13.681.600			
																					0,00%	-			
	2	11	2.11.0.00.0.00.02.00	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati)	100,00%	3.587.308.983	100,00%	10.084.534.260	100,00%	8.850.869.650	17,50%	843.411.700	17,50%	843.411.700	17,50%	843.411.700	117,50%	10.927.945.960	117,50%	304,63%	
					2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				100,00%	10.084.534.260	100,00%	8.850.869.650	17,50%	843.411.700	17,50%	843.411.700	17,50%	843.411.700	117,50%	10.927.945.960			
	2	11	2.11.0.00.0.00.03.00	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Cakupan pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	100,00%	46.996.556															
	2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100,00%	64.765.697	100,00%	41.547.650	100,00%	180.413.050	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	41.547.650	100,00%	64,15%	
					2.01		Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	41.547.650	100,00%	180.413.050	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	41.547.650			
	2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	07			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH																		
	2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	07			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH							2.387.639.400							0,00%	-			
																					0,00%	-			
	2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	08			Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100,00%	25.917.574	100,00%	3.150.680.522	100,00%	2.387.639.400	25,00%	495.966.520	25,00%	495.966.520	25,00%	495.966.520	125,00%	3.646.647.042	125,00%	14070,17%	
					2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	3.150.680.522	100,00%	2.387.639.400	25,00%	495.966.520	25,00%	495.966.520	25,00%	495.966.520	125,00%	3.646.647.042			
	2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	09			Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat														0,00%	-			
																					0,00%	-			
	2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup														0,00%	-			
														27.467.130.210							0,00%	-			
	2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11			Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	70,00%	16.005.873.118	97,43%	45.096.878.211	100,00%	27.467.130.210	17,50%	4.407.175.865	17,50%	4.407.175.865	17,50%	4.407.175.865	114,93%	49.504.054.076	164,18%	309,29%	
					2.01		Pengelolaan Sampah				97,43%	45.096.878.211	100,00%	27.467.130.210	17,50%	4.407.175.865	17,50%	4.407.175.865	17,50%	4.407.175.865	114,93%	49.504.054.076			
																					0,00%	-			
	2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100,00%	7.556.535.546	99,43%	6.583.553.675	100,00%	6.918.636.062	14,85%	1.002.068.997	14,85%	1.002.068.997	14,85%	1.002.068.997	114,28%	7.585.622.672	114,28%	100,38%	
	2	12	2.12.0.00.0.00.01.00				DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		100,00%	7.556.535.546	99,43%	6.583.553.675	100,00%	6.918.636.062	14,85%	1.002.068.997	14,85%	1.002.068.997	14,85%	1.002.068.997	114,28%	7.585.622.672	114,28%	100,38%	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	6.173.395.556	97,47%	5.294.615.405	100,00%	6.540.164.112	17,74%	942.121.497	17,74%	942.121.497	17,74%	942.121.497	115,21%	6.236.736.902	#VALUE!	101,03%	
					2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	104.418.010	100,00%	101.613.150	20,00%	4.500.000	20,00%	4.500.000	20,00%	4.500.000	120,00%	108.918.010			
					2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	3.137.407.602	100,00%	4.087.474.362	20,00%	523.602.374	20,00%	523.602.374	20,00%	523.602.374	120,00%	3.661.009.976			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2							5		6		7		8		9		10		11		12=11/5 x100%		13
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100,00%	10.600.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-		
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	617.199.832	100,00%	764.704.500	26,43%	82.914.600	26,43%	82.914.600	26,43%	82.914.600	126,43%	700.114.432		
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				84,85%	5.600.000	100,00%	1.500.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	84,85%	5.600.000		
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	1.153.997.944	100,00%	1.182.431.600	25,00%	273.654.523	25,00%	273.654.523	25,00%	273.654.523	125,00%	1.427.652.467		
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	275.992.017	100,00%	391.840.000	15,00%	57.450.000	15,00%	57.450.000	15,00%	57.450.000	115,00%	333.442.017		
	2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02		Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	86,90%	1.047.528.408	99,38%	957.980.760	100,00%	136.860.000	25,00%	24.750.000	25,00%	24.750.000	25,00%	24.750.000	124,38%	982.730.760	143,13%	93,81%	
							Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA																	
					2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk				99,38%	829.180.760	100,00%	136.860.000	25,00%	24.750.000	25,00%	24.750.000	25,00%	24.750.000	124,38%	853.930.760		
	2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03		Program Pencatatan Sipil	Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	100,00%	201.472.597	100,00%	190.087.500	100,00%	142.439.950	24,00%	33.010.000	24,00%	33.010.000	24,00%	33.010.000	124,00%	223.097.500	124,00%	110,73%	
					2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil				100,00%	190.087.500	100,00%	142.439.950	24,00%	33.010.000	24,00%	33.010.000	24,00%	33.010.000	124,00%	223.097.500		
	2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100,00%	113.075.806	100,00%	118.070.010	100,00%	68.752.000	7,50%	2.187.500	7,50%	2.187.500	7,50%	2.187.500	107,50%	120.257.510	107,50%	106,35%	
					2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan				100,00%	83.528.510	100,00%	42.100.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	83.528.510		
										0,00%														
					2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				100,00%	34.541.500	100,00%	26.652.000	15,00%	2.187.500	15,00%	2.187.500	15,00%	2.187.500	115,00%	36.729.000		
	2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100,00%	21.063.179	100,00%	22.800.000	100,00%	30.420.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.800.000	100,00%	108,25%	
					2.01	Penyusunan Profil Kependudukan				100,00%	22.800.000	100,00%	30.420.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.800.000		
	2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		100,00%	3.604.200.571															
	1	6	1.06.2.13.0.00.01.0000			DINAS SOSIAL		100,00%	3.604.200.571															
	2	13	1.06.2.13.0.00.01.0000	02		Program Penataan Desa	Cakupan penataan desa	100,00%	2.263.312.852															
	2	13	1.06.2.13.0.00.01.0000	03		Program Peningkatan Kerjasama Desa	Cakupan peningkatan kerjasama desa	100,00%	61.492.605															
	2	13	1.06.2.13.0.00.01.0000	04		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan administrasi pemerintahan desa	100,00%	165.528.377															
	2	13	1.06.2.13.0.00.01.0000	05		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Cakupan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	100,00%	1.113.866.737															
							Persentase PKK aktif	100,00%																
	2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		100,00%	8.530.278.889	96,87%	9.787.191.884	100,00%	12.153.613.565	16,02%	1.284.871.758	16,02%	1.284.871.758	16,02%	1.284.871.758	112,89%	11.072.063.642	112,89%	129,80%	
	2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000			DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		100,00%	8.530.278.889	96,87%	9.787.191.884	100,00%	12.153.613.565	16,02%	1.284.871.758	16,02%	1.284.871.758	16,02%	1.284.871.758	112,89%	11.072.063.642	112,89%	129,80%	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	5.433.052.156	98,91%	5.000.818.905	100,00%	6.217.663.443	27,47%	931.911.720	27,47%	931.911.720	27,47%	931.911.720	126,38%	5.932.730.625		109,20%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	3.431.000	100,00%	3.425.000	50,00%	775.000	50,00%	775.000	50,00%	775.000	150,00%	4.206.000		
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	3.304.989.153	100,00%	4.307.518.093	13,33%	573.952.773	13,33%	573.952.773	13,33%	573.952.773	113,33%	3.878.941.926		
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	437.631.082	100,00%	303.258.350	52,58%	141.926.910	52,58%	141.926.910	52,58%	141.926.910	152,58%	579.557.992		

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		8+9		12=11/5 x100%		13
				2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				99,70%	3.010.000									99,70%	3.010.000			
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95,49%	837.395.372	100,00%	1.183.008.000	14,74%	161.257.037	14,74%	161.257.037	14,74%	161.257.037	110,24%	998.652.409			
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98,28%	414.362.298	100,00%	420.454.000	6,69%	54.000.000	6,69%	54.000.000	6,69%	54.000.000	104,97%	468.362.298			
	2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	164,00%	840.060.254	96,20%	254.493.729	100,00%	288.462.500	25,03%	70.332.750	25,03%	70.332.750	25,03%	70.332.750	121,23%	324.826.479	73,92%	38,67%	
						TFR (Angka Kelahiran Total)																	
				2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk				100,00%	69.513.600	100,00%	140.000.000	45,00%	60.000.000	45,00%	60.000.000	45,00%	60.000.000	145,00%	129.513.600			
				2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				92,41%	184.980.129	100,00%	148.462.500	5,06%	10.332.750	5,06%	10.332.750	5,06%	10.332.750	97,47%	195.312.879			
	2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100,00%	1.461.244.562	97,76%	2.058.398.250	100,00%	2.968.587.762	7,61%	196.527.288	7,61%	196.527.288	7,61%	196.527.288	105,37%	2.254.925.538	105,37%	154,32%	
				2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal				96,38%	618.590.700	100,00%	577.305.250	0,05%	240.000	0,05%	240.000	0,05%	240.000	96,44%	618.830.700			
				2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)				100,00%	110.000.000	100,00%	138.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	110.000.000			
				2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota				94,66%	940.920.600	100,00%	1.233.654.182	10,17%	162.562.200	10,17%	162.562.200	10,17%	162.562.200	104,83%	1.103.482.800			
				2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketertaan Ber-KB				100,00%	388.886.950	100,00%	1.019.628.330	5,00%	33.725.088	5,00%	33.725.088	5,00%	33.725.088	105,00%	422.612.038			
	2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	100,00%	795.921.917	94,60%	2.473.481.000	100,00%	2.678.899.860	3,98%	86.100.000	3,98%	86.100.000	3,98%	86.100.000	98,58%	2.559.581.000	98,58%	321,59%	
				2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				94,60%	2.473.481.000	100,00%	2.678.899.860	3,98%	86.100.000	3,98%	86.100.000	3,98%	86.100.000	98,58%	2.559.581.000			
	2	15			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN		100,00%	18.071.532.056	94,34%	15.518.333.829	100,00%	15.710.775.130	13,89%	2.142.205.342	13,89%	2.142.205.342	13,89%	2.142.205.342	108,23%	17.660.539.171	108,23%	97,73%	
	2	15	2.15.0.00.0.00.01.00		DINAS PERHUBUNGAN		100,00%	18.071.532.056	94,34%	15.518.333.829	100,00%	15.710.775.130	13,89%	2.142.205.342	13,89%	2.142.205.342	13,89%	2.142.205.342	108,23%	17.660.539.171	108,23%	97,73%	DINAS PERHUBUNGAN
	2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	11.585.483.073	92,84%	11.262.499.099	100,00%	13.591.946.380	17,52%	1.932.377.365	17,52%	1.932.377.365	17,52%	1.932.377.365	110,36%	13.194.876.464		113,89%	
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	19.912.900	100,00%	20.382.700	18,75%	739.550	18,75%	739.550	18,75%	739.550	118,75%	20.652.450			
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	7.018.344.388	100,00%	9.370.975.880	25,00%	1.215.478.620	25,00%	1.215.478.620	25,00%	1.215.478.620	125,00%	8.233.823.008			
				2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,00%	136.001.850	100,00%	57.715.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	136.001.850			
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				94,28%	753.161.752	100,00%	539.504.500	25,00%	63.054.312	25,00%	63.054.312	25,00%	63.054.312	119,28%	816.216.064			
				2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	205.685.000	100,00%	35.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	205.685.000			
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90,60%	2.425.851.609	100,00%	2.959.592.800	25,00%	593.860.883	25,00%	593.860.883	25,00%	593.860.883	115,60%	3.019.712.492			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		9+6=8		12=11/5 x100%		13		
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				65,02%	703.541.600	100,00%	608.775.000	28,87%	59.244.000	28,87%	59.244.000	28,87%	59.244.000	93,89%	762.785.600				
	2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	100,00%	6.486.048.983	95,83%	4.255.834.730	100,00%	2.118.828.750	10,26%	209.827.977	10,26%	209.827.977	10,26%	209.827.977	106,09%	4.465.662.707	106,09%	68,85%		
																				0,00%					
					2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota				90,76%	156.811.821	100,00%	117.417.750	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,76%	156.811.821				
					2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C				100,00%	165.566.450	100,00%	41.332.400	25,00%	4.500.000	25,00%	4.500.000	25,00%	4.500.000	125,00%	170.066.450				
					2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir				97,30%	1.168.433.960	100,00%	620.631.300	20,00%	63.764.677	20,00%	63.764.677	20,00%	63.764.677	117,30%	1.232.198.637				
					2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				79,00%	455.095.829	100,00%	53.734.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	79,00%	455.095.829				
					2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				99,34%	418.209.500	100,00%	129.570.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,34%	418.209.500				
					2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota				100,00%	22.385.000	100,00%	14.836.300	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.385.000				
					2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan				100,00%	41.731.620	100,00%	17.980.000	9,34%	1.050.000	9,34%	1.050.000	9,34%	1.050.000	109,34%	42.781.620				
					2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				96,07%	836.922.100	100,00%	675.780.950	20,00%	107.017.900	20,00%	107.017.900	20,00%	107.017.900	116,07%	943.940.000				
					2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	990.678.450	100,00%	447.545.200	18,00%	33.495.400	18,00%	33.495.400	18,00%	33.495.400	118,00%	1.024.173.850				
	2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100,00%	9.023.290.513	97,61%	8.684.605.449	100,00%	10.255.858.761	16,23%	1.044.919.766	16,23%	1.044.919.766	16,23%	1.044.919.766	113,84%	9.729.525.215	113,84%	107,83%		
	2	16	2.16.2.20.2.21.01.00			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100,00%	9.023.290.513	97,61%	8.684.605.449	100,00%	10.255.858.761	16,23%	1.044.919.766	16,23%	1.044.919.766	16,23%	1.044.919.766	113,84%	9.729.525.215	113,84%	107,83%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	5.289.476.642	96,18%	4.213.802.881	100,00%	5.217.824.561	19,67%	895.943.496	19,67%	895.943.496	19,67%	895.943.496	115,85%	5.109.746.377		96,60%		
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	18.261.750	100,00%	25.825.000	6,25%	-	6,25%	-	6,25%	-	106,25%	18.261.750				
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	3.317.274.648	100,00%	4.108.085.961	12,50%	551.267.187	12,50%	551.267.187	12,50%	551.267.187	112,50%	3.868.541.835				
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	217.629.616	100,00%	224.583.500	21,95%	82.625.309	21,95%	82.625.309	21,95%	82.625.309	121,95%	300.254.925				
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	236.582.167	100,00%	359.896.100	25,00%	58.360.000	25,00%	58.360.000	25,00%	58.360.000	125,00%	294.942.167				
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80,92%	424.054.700	100,00%	499.434.000	32,65%	203.691.000	32,65%	203.691.000	32,65%	203.691.000	113,57%	627.745.700				
										0,00%															
	2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100,00%	191.206.764	100,00%	251.247.720	100,00%	952.051.200	4,20%	40.000.000	4,20%	40.000.000	4,20%	40.000.000	104,20%	291.247.720	104,20%	152,32%		
					2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	251.247.720	100,00%	952.051.200	4,20%	40.000.000	4,20%	40.000.000	4,20%	40.000.000	104,20%	291.247.720				
	2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100,00%	3.542.607.107	96,65%	4.219.554.848	100,00%	4.085.983.000	24,82%	108.976.270	24,82%	108.976.270	24,82%	108.976.270	121,47%	4.328.531.118	121,47%	122,18%		
					2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				96,65%	4.219.554.848	100,00%	4.085.983.000	24,82%	108.976.270	24,82%	108.976.270	24,82%	108.976.270	121,47%	4.328.531.118				
	2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH		100,00%	5.791.164.936	95,10%	18.503.468.699	100,00%	10.085.937.220	8,52%	758.473.565	8,52%	758.473.565	8,52%	758.473.565	103,62%	19.261.942.264	103,62%	332,61%		
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00			DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA		100,00%	5.791.164.936	95,10%	18.503.468.699	100,00%	10.085.937.220	8,52%	758.473.565	8,52%	758.473.565	8,52%	758.473.565	103,62%	19.261.942.264	103,62%	332,61%	DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA	
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	5.066.789.447	99,02%	4.631.885.189	100,00%	5.866.122.520	14,56%	747.673.565	14,56%	747.673.565	14,56%	747.673.565	113,58%	5.379.558.754		106,17%		
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	27.143.550	100,00%	23.273.500	37,18%	5.867.900	37,18%	5.867.900	37,18%	5.867.900	137,18%	33.011.450				
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	3.405.657.541	100,00%	4.275.399.920	3,87%	496.032.521	3,87%	496.032.521	3,87%	496.032.521	103,87%	3.901.690.062				
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100,00%	6.951.150	24,60%	1.709.700	24,60%	1.709.700	24,60%	1.709.700	24,60%	1.709.700				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2					3	4	K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	13
									5	6		7		8		9		10		11		12=11/5 x100%		
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	427.483.816	100,00%	675.496.350	7,48%	73.604.944	7,48%	73.604.944	7,48%	73.604.944	107,48%	501.088.760			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	394.918.682	100,00%	511.411.600	17,84%	106.676.000	17,84%	106.676.000	17,84%	106.676.000	117,84%	501.594.682			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	376.681.600	100,00%	373.590.000	6,44%	63.782.500	6,44%	63.782.500	6,44%	63.782.500	106,44%	440.464.100			
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	03		Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	99,74%	82.923.462	94,13%	99.562.900	100,00%	114.957.900	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,13%	99.562.900	94,37%	120,07%	
					2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				94,13%	99.562.900	100,00%	114.957.900	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,13%	99.562.900			
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	04		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	5,00%	83.792.689	93,25%	118.507.360	100,00%	33.525.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	93,25%	118.507.360	1864,90%	141,43%	
					2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				93,25%	118.507.360	100,00%	33.525.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	93,25%	118.507.360			
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	05		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan Latihan perkoperasian	100,00%	63.193.356			100,00%	140.276.350	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	
					2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota						100,00%	140.276.350	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	06		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Cakupan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100,00%	22.394.529															
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	07		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100,00%	140.598.684	95,96%	10.521.947.600	100,00%	550.263.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,96%	10.521.947.600	95,96%	7483,67%	
					2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				95,96%	10.521.947.600	100,00%	550.263.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,96%	10.521.947.600			
	2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	08		Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	5,10%	331.472.769	93,17%	3.131.565.650	100,00%	3.380.792.350	2,47%	10.800.000	2,47%	10.800.000	2,47%	10.800.000	95,64%	3.142.365.650	1875,38%	948,00%	
					2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil				93,17%	3.131.565.650	100,00%	3.380.792.350	2,47%	10.800.000	2,47%	10.800.000	2,47%	10.800.000	95,64%	3.142.365.650			
	2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL		100,00%	9.429.246.261	98,33%	9.564.660.245	61,67%	9.665.778.757	12,95%	1.243.541.890	12,95%	1.243.541.890	12,95%	1.243.541.890	111,27%	10.807.602.135	111,27%	114,62%	
	2	18	2.18.0.00.0.00.01.00			DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU		100,00%	6.073.890.752	97,29%	6.558.515.865	83,33%	6.550.247.580	13,53%	835.309.688	13,53%	835.309.688	13,53%	835.309.688	110,82%	7.393.825.553	110,82%	121,73%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	A	5.512.018.514	99,67%	4.982.202.670	100,00%	5.781.042.030	16,51%	826.789.688	16,51%	826.789.688	16,51%	826.789.688	116,18%	5.808.992.358		105,39%	
					01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	3.315.000	100,00%	875.000	18,75%	-	18,75%	-	18,75%	-	118,75%	3.315.000			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	3.331.986.839	100,00%	3.909.767.280	25,00%	529.544.536	25,00%	529.544.536	25,00%	529.544.536	125,00%	3.861.531.375			
					2.05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah				100,00%	11.153.480	100,00%	16.850.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	11.153.480			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,57%	678.795.168	100,00%	444.771.550	25,00%	62.487.158	25,00%	62.487.158	25,00%	62.487.158	125,57%	741.282.326			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	49.996.000	100,00%	105.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	49.996.000			
					2.08	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				97,13%	629.600.720	100,00%	903.447.200	25,00%	165.757.994	25,00%	165.757.994	25,00%	165.757.994	122,13%	795.358.714			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	277.355.463	100,00%	505.226.000	5,32%	69.000.000	5,32%	69.000.000	5,32%	69.000.000	105,32%	346.355.463			
	2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5,00%	145.985.809	100,00%	214.869.800	100,00%	1.225.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	214.869.800	2000,00%	147,19%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2					3	4	K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
								5		6		7		8		9		10		11		6+8		12=11/5 x100%		13
					2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif diBidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten / Kota				100,00%	84.895.000	100,00%	525.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	84.895.000			
					2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				100,00%	129.974.800	100,00%	700.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	129.974.800			
	2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	03		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	67	49.147.418	100,00%	128.908.330	100,00%	76.000.000	0,00%	-	0,00%		0,00%	-	100,00%	128.908.330	1,49%	262,29%	
							Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	446,70															
					2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	128.908.330	100,00%	76.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	128.908.330			
	2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	128.343.806	100,00%	770.398.425	100,00%	115.075.800	10,55%	8.520.000	10,55%	8.520.000	10,55%	8.520.000	110,55%	778.918.425	#VALUE!	606,90%	
					2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	770.398.425	100,00%	115.075.800	10,55%	8.520.000	10,55%	8.520.000	10,55%	8.520.000	110,55%	778.918.425			
	2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100,00%	95.083.921	84,06%	366.997.290	100,00%	592.729.750	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	84,06%	366.997.290	84,06%	385,97%	
					2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota				84,06%	366.997.290	100,00%	592.729.750	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	84,06%	366.997.290			
	2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100,00%	143.311.284	100,00%	95.139.350	100,00%	60.175.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	95.139.350	100,00%	66,39%	
					2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	95.139.350	100,00%	60.175.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	95.139.350			
	2	18	2.18.0.00.0.00.02.00			ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS		100,00%	3.355.355.509	99,36%	3.003.544.380	40,00%	3.115.531.177	12,36%	408.232.202	12,36%	408.232.202	12,36%	408.232.202	111,73%	3.413.776.582	111,73%	101,74%	ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS
	2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	5	3.162.164.697	96,81%	2.659.964.444	100,00%	2.878.997.177	21,43%	407.347.202	21,43%	407.347.202	21,43%	407.347.202	118,25%	3.067.311.646		97,00%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	5.300.000	100,00%	3.210.000	18,75%	-	18,75%	-	18,75%	-	118,75%	5.300.000			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	1.651.633.991	100,00%	2.038.371.627	25,00%	265.179.127	25,00%	265.179.127	25,00%	265.179.127	125,00%	1.916.813.118			
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,00%	9.000.000	100,00%	15.335.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	9.000.000			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				97,16%	334.174.685	100,00%	199.335.250	43,29%	56.587.879	43,29%	56.587.879	43,29%	56.587.879	140,45%	390.762.564			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	37.000.000	100,00%	18.500.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	37.000.000			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	193.748.068	100,00%	379.646.000	25,00%	46.148.196	25,00%	46.148.196	25,00%	46.148.196	125,00%	241.896.264			

No	Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
									K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=11/5 x100%		13
					2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				80,53%	427.187.700	100,00%	224.599.300	16,57%	39.432.000	16,57%	39.432.000	16,57%	39.432.000	97,10%	466.539.700			
	2	18	2.18.0.00.0.00.02.0000		02		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	0,57%	19.026.860															
	2	18	2.18.0.00.0.00.02.0000		03		Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	47	42.116.060	100,00%	71.936.000	100,00%	82.574.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	71.936.000	2,13%	170,80%	
								Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	38,550													-			
					2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	71.936.000	100,00%	82.574.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	71.936.000			0
	2	18	2.18.0.00.0.00.02.0000		04		Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	107.797.661	100,00%	147.683.936	100,00%	236.534.000	3,29%	885.000	3,29%	885.000	3,29%	885.000	103,29%	148.568.936	#VALUE!	137,82%	
					2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	147.683.936	100,00%	236.534.000	3,29%	885.000	3,29%	885.000	3,29%	885.000	103,29%	148.568.936			
	2	18	2.18.0.00.0.00.02.0000		05		Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100,00%	19.270.794	100,00%	22.535.000									100,00%	22.535.000	100,00%	116,94%	
					2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	22.535.000									100,00%	22.535.000			
	2	18	2.18.0.00.0.00.02.0000		06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100,00%	4.979.437	100,00%	103.425.000									100,00%	103.425.000	100,00%	2077,04%	
					2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	103.425.000									100,00%	103.425.000			
	2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA		100,00%	63.663.671.353	95,91%	18.293.821.998	100,00%	11.495.033.657	8,83%	646.525.882	8,83%	646.525.882	8,83%	646.525.882	104,74%	18.940.347.880	104,74%	29,75%	
	2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000				DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA		100,00%	63.663.671.353	95,91%	18.293.821.998	100,00%	11.495.033.657	8,83%	646.525.882	8,83%	646.525.882	8,83%	646.525.882	104,74%	18.940.347.880	104,74%	29,75%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000		01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	4.722.627.690	96,88%	3.748.835.494	100,00%	5.756.674.057	12,11%	575.371.982	12,11%	575.371.982	12,11%	575.371.982	108,99%	4.324.207.476	#VALUE!	91,56%	
					2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	16.410.000	100,00%	23.112.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	16.410.000			
					2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	2.600.622.947	100,00%	3.639.708.207	25,00%	416.106.891	25,00%	416.106.891	25,00%	416.106.891	125,00%	3.016.729.838			
					2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				98,23%	495.514.700	100,00%	362.204.150	15,09%	85.450.031	15,09%	85.450.031	15,09%	85.450.031	113,32%	580.964.731			
					2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100,00%	250.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
					2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91,15%	424.110.225	100,00%	1.199.663.200	9,24%	11.265.060	9,24%	11.265.060	9,24%	11.265.060	100,39%	435.375.285			
					2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95,00%	212.177.622	100,00%	281.986.000	11,24%	62.550.000	11,24%	62.550.000	11,24%	62.550.000	106,24%	274.727.622			
	2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000		02		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100,00%	1.698.388.521			100,00%	362.135.900	23,21%	39.078.900	23,21%	39.078.900	23,21%	39.078.900	23,21%	39.078.900	23,21%	2,30%	
					2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota						100,00%	362.135.900	23,21%	39.078.900	23,21%	39.078.900	23,21%	39.078.900	23,21%	39.078.900			
	2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000		03		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100,00%	3.761.600.623	92,39%	13.903.287.379	100,00%	5.210.772.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	92,39%	13.903.287.379	92,39%	369,61%	
					2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				97,12%	532.773.025	100,00%	806.382.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	97,12%	532.773.025			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		9+6+8		12=11/5 x100%		13		
				2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				86,20%	12.284.226.078	100,00%	2.431.702.300	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	86,20%	12.284.226.078				
				2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				93,87%	1.086.288.276	100,00%	1.972.687.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	93,87%	1.086.288.276				
	2	19	2.19.0.00.0.00.01.0000	04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	100,00%		98,47%	641.699.125	100,00%	165.451.700	0,00%	32.075.000	0,00%	32.075.000	0,00%	32.075.000	98,47%	673.774.125	98,47%			
				2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				98,47%	641.699.125	100,00%	165.451.700	0,00%	32.075.000	0,00%	32.075.000	0,00%	32.075.000	98,47%	673.774.125				
	2	20			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		100,00%	73.734.385	99,59%	280.257.700	100,00%	145.586.450	9,68%	9.350.000	9,68%	9.350.000	9,68%	9.350.000	109,28%	289.607.700	109,28%	392,77%		
	2	20	2.16.2.2.0.2.21.0.1.00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100,00%	73.734.385	99,59%	280.257.700	100,00%	145.586.450	9,68%	9.350.000	9,68%	9.350.000	9,68%	9.350.000	109,28%	289.607.700	109,28%	392,77%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
	2	20	2.16.2.2.0.2.21.0.1.00	02	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral	100,00%	73.734.385	99,59%	280.257.700	100,00%	145.586.450	9,68%	9.350.000	9,68%	9.350.000	9,68%	9.350.000	109,28%	289.607.700	109,28%	392,77%		
				2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				99,59%	280.257.700	100,00%	145.586.450	9,68%	9.350.000	9,68%	9.350.000	9,68%	9.350.000	109,28%	289.607.700				
	2	21			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		100,00%	133.735.689	94,19%	163.975.984	100,00%	132.714.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,19%	163.975.984	94,19%	122,61%		
	2	21	2.16.2.2.0.2.21.0.1.00		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		100,00%	133.735.689	94,19%	163.975.984	100,00%	132.714.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,19%	163.975.984	94,19%	122,61%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	21	2.16.2.2.0.2.21.0.1.00	02	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100,00%	115.851.728	94,19%	163.975.984	100,00%	132.714.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,19%	163.975.984	94,19%	141,54%		
				2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				94,19%	163.975.984	100,00%	132.714.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,19%	163.975.984				
	2	22			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN		100,00%	657.695.258	99,79%	16.293.667.075	100,00%	9.241.304.300	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,79%	16.293.667.075	99,79%	2477,39%		
	1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN		100,00%	657.695.258	99,79%	16.293.667.075	100,00%	9.241.304.300	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,79%	16.293.667.075	99,79%	2477,39%	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan	100,00%	202.243.339	99,58%	16.178.691.275	100,00%	8.750.395.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,58%	16.178.691.275	99,58%	7999,62%		
				2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				99,16%	16.178.691.275	100,00%	8.750.395.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,16%	16.178.691.275				
	2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	100,00%	225.083.098	100,00%	114.975.800									100,00%	114.975.800	100,00%	51,08%		
				2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	114.975.800									100,00%	114.975.800				
																			0,00%	-				
	2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	04	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan pembinaan sejarah	100,00%	149.890.748											0,00%	-				
	2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Cakupan pelestrarian dan pengelolaan cagar	100,00%	80.478.073			100,00%	324.860.900	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%		
						Terlestarikannya Cagar Budaya	90,00%												0,00%	-				
				2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						100,00%	324.341.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-				
				2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						100,00%	519.900	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-				
	2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	06	Program Pengelolaan Permuseuman			-			100,00%	166.048.400	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-				
				2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						100,00%	166.048.400	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-				
	2	23			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		100,00%	420.895.337	99,60%	208.942.600	100,00%	380.278.300	38,45%	34.805.000	38,45%	34.805.000	38,45%	34.805.000	138,04%	243.747.600	138,04%	57,91%		
	2	24	2.24.2.2.0.00.0.1.0000		DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		100,00%	313.770.386	99,60%	208.942.600	100,00%	380.278.300	38,45%	34.805.000	38,45%	34.805.000	38,45%	34.805.000	138,04%	243.747.600	138,04%	77,19%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	
	2	23	2.24.2.2.0.00.0.1.0000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	1.800.000	200,00%	3.600.000				
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	1.800.000	100,00%	1.800.000	200,00%	3.600.000				

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10=6/7 x100%		11=6+8		12=11/5 x100%		13
	2	25	5.14.1.2.5.0.0.0.0.1.0000		02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase capaian pembinaan pepustakaan	100,00%	269.924.032	99,19%	203.293.750	100,00%	373.268.300	15,34%	33.005.000	15,34%	33.005.000	15,34%	33.005.000	114,53%	236.298.750	114,53%	87,54%	
					2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				98,38%	147.701.250	100,00%	289.788.900	10,92%	6.205.000	10,92%	6.205.000	10,92%	6.205.000	109,30%	153.906.250			
					2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	55.592.500	100,00%	83.479.400	19,76%	26.800.000	19,76%	26.800.000	19,76%	26.800.000	119,76%	82.392.500			
	2	25	5.14.1.2.5.0.0.0.0.1.0000		03	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	100,00%	45.846.354	100,00%	5.648.850	100,00%	5.210.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	5.648.850	100,00%	12,32%	
					2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	5.648.850	100,00%	5.210.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	5.648.850			
	2	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN		100,00%	94.037.816.349	99,31%	5.159.486.344	100,00%	6.366.327.096	14,31%	767.609.002	14,31%	767.609.002	14,31%	767.609.002	113,62%	5.927.095.346	113,62%	6,30%	
	2	26	5.14.1.2.5.0.0.0.0.1.0000			DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN		100,00%	6.961.832.725	99,31%	5.159.486.344	100,00%	6.366.327.096	14,31%	767.609.002	14,31%	767.609.002	14,31%	767.609.002	113,62%	5.927.095.346	113,62%	85,14%	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
	2	26	5.14.1.2.5.0.0.0.0.1.0000		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	6.709.416.931	97,46%	5.081.782.929	100,00%	6.253.075.396	17,93%	750.449.402	17,93%	750.449.402	17,93%	750.449.402	115,40%	5.832.232.331		86,93%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	5.400.000	100,00%	5.400.000	33,33%	1.800.000	33,33%	1.800.000	33,33%	1.800.000	133,33%	7.200.000			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	3.621.879.845	100,00%	4.282.681.496	4,20%	539.165.694	4,20%	539.165.694	4,20%	539.165.694	104,20%	4.161.045.539			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				95,71%	483.716.858	100,00%	942.191.500	27,40%	57.817.896	27,40%	57.817.896	27,40%	57.817.896	123,11%	541.534.754			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	576.304.226	100,00%	681.132.400	18,11%	105.365.812	18,11%	105.365.812	18,11%	105.365.812	118,11%	681.670.038			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91,59%	394.482.000	100,00%	341.670.000	6,63%	46.300.000	6,63%	46.300.000	6,63%	46.300.000	98,22%	440.782.000			
	2	26	5.14.1.2.5.0.0.0.0.1.0000		02	Program Pengelolaan Arsip	Cakupan tata kelola arsip dinamis dan arsip statis	100,00%	136.981.512	99,96%	58.508.000	100,00%	96.576.100	25,00%	17.159.600	25,00%	17.159.600	25,00%	17.159.600	124,96%	75.667.600	124,96%	55,24%	
					2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota				99,87%	24.771.500	100,00%	48.272.100	50,00%	17.159.600	50,00%	17.159.600	50,00%	17.159.600	149,87%	41.931.100			
					2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	10.884.000	100,00%	26.254.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	10.884.000			
					2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota				100,00%	22.852.500	100,00%	22.050.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.852.500			
	2	26	5.14.1.2.5.0.0.0.0.1.0000		03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase pemenuhan kebutuhan perlindungan dan penyelamatan arsip	100,00%	68.104.067	99,81%	15.520.415	100,00%	12.825.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,81%	15.520.415	99,81%	22,79%	
					2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun				99,43%	5.254.565	100,00%	5.906.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,43%	5.254.565			
					2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung atau dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan				100,00%	2.643.500	100,00%	5.344.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.643.500			
					2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang				100,00%	7.622.350	100,00%	1.575.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	7.622.350			
	2	26	5.14.1.2.5.0.0.0.0.1.0000		04	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Cakupan perizinan penggunaan arsip	100,00%	47.330.215	100,00%	3.675.000	100,00%	3.850.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.675.000	100,00%	7,76%	
					2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota				100,00%	3.675.000	100,00%	3.850.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	3.675.000			
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		100,00%	114.223.014.958	94,65%	55.921.025.469	100,00%	33.389.860.637	7,78%	2.804.212.866	7,78%	2.804.212.866	7,78%	2.804.212.866	102,43%	58.725.238.335	102,43%	51,41%	
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		100,00%	6.135.417.147	96,03%	7.313.077.975	100,00%	2.937.291.050	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96,03%	7.313.077.975	96,03%	119,19%	
	3	27	5.27.2.09.3.25.01.0000			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		100,00%	6.135.417.147	96,03%	7.313.077.975	100,00%	2.937.291.050	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96,03%	7.313.077.975	96,03%	119,19%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	25	5.27.2.09.3.25.01.0000		03	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	1191	4.255.182.283	98,97%	2.792.688.400	100,00%	1.714.617.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,97%	2.792.688.400	0,08%	65,63%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan 1		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	2					3	4	K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah				98,97%	2.792.688.400	100,00%	1.714.617.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,97%	2.792.688.400			
	3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000		04	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	143	1.576.293.272	92,75%	4.265.174.175	100,00%	1.109.245.450	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	92,75%	4.265.174.175	0,65%	270,58%	
					2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				92,75%	4.265.174.175	100,00%	1.109.245.450	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	92,75%	4.265.174.175			
	3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000		06	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase capaian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	100,00%	303.941.592	96,37%	255.215.400	100,00%	113.428.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96,37%	255.215.400	96,37%	83,97%	
							Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	77,64																
					2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota				96,37%	255.215.400	100,00%	113.428.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96,37%	255.215.400			
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		100,00%	34.886.855.220	98,57%	7.789.341.732	100,00%	9.289.148.221	9,01%	825.169.276	9,01%	825.169.276	9,01%	825.169.276	107,58%	8.614.511.008	107,58%	24,69%	
	3	26	3.26.0.00.0.00.01.00			DINAS PARIWISATA		100,00%	5.572.211.809	98,57%	7.789.341.732	100,00%	9.289.148.221	9,01%	825.169.276	9,01%	825.169.276	9,01%	825.169.276	107,58%	8.614.511.008	107,58%	154,60%	DINAS PARIWISATA
	3	26	3.26.0.00.0.00.01.00		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	5.029.208.753	98,17%	4.039.442.955	100,00%	4.829.740.421	25,34%	763.063.616	25,34%	763.063.616	25,34%	763.063.616	123,51%	4.802.506.571	#VALUE!	95,49%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	50.618.238	100,00%	54.004.850	15,00%	3.043.750	15,00%	3.043.750	15,00%	3.043.750	115,00%	53.661.988			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	3.305.841.391	100,00%	3.438.787.821	56,80%	470.045.261	56,80%	470.045.261	56,80%	470.045.261	156,80%	3.775.886.652			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				95,83%	412.108.762	100,00%	364.692.930	24,93%	100.582.910	24,93%	100.582.910	24,93%	100.582.910	120,77%	512.691.672			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	47.215.064	100,00%	594.764.800	18,19%	101.191.695	18,19%	101.191.695	18,19%	101.191.695	118,19%	148.406.759			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95,00%	223.659.500	100,00%	377.490.000	11,78%	88.200.000	11,78%	88.200.000	11,78%	88.200.000	106,78%	311.859.500			
	3	26	3.26.0.00.0.00.01.00		02	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100,00%	194.661.994	99,71%	189.656.150	100,00%	398.339.550	0,11%	450.000	0,11%	450.000	0,11%	450.000	99,82%	190.106.150	99,82%	97,66%	
					2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				99,42%	170.891.950	100,00%	206.377.600	0,22%	450.000	0,22%	450.000	0,22%	450.000	99,64%	171.341.950			
					2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota						100,00%	173.197.900	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
					2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				100,00%	18.764.200	100,00%	18.764.050	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	18.764.200			
	3	26	3.26.0.00.0.00.01.00		03	Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	100,00%	149.694.918	96,67%	2.426.356.867	100,00%	3.068.529.300	1,58%	61.655.660	1,58%	61.655.660	1,58%	61.655.660	98,25%	2.488.012.527	98,25%	1662,06%	
					2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				96,67%	2.426.356.867	100,00%	3.068.529.300	1,58%	61.655.660	1,58%	61.655.660	1,58%	61.655.660	98,25%	2.488.012.527			
	3	26	3.26.0.00.0.00.01.00		04	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Cakupan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	100,00%	89.925.776																
	3	26	3.26.0.00.0.00.01.00		05	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100,00%	108.720.368	99,75%	1.133.885.760	100,00%	992.538.950	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,75%	1.133.885.760	99,75%	1042,94%	
					2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				99,75%	1.133.885.760	100,00%	917.188.950	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	99,75%	1.133.885.760			
					2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						100,00%	75.350.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
	3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN		100,00%	19.786.466.955	93,04%	11.050.009.252	100,00%	8.293.809.538	6,56%	449.245.497	6,56%	449.245.497	6,56%	449.245.497	99,60%	11.499.254.749	99,60%	58,12%	
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000			DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN		100,00%	19.786.466.955	93,04%	11.050.009.252	100,00%	8.293.809.538	6,56%	449.245.497	6,56%	449.245.497	6,56%	449.245.497	99,60%	11.499.254.749	99,60%	58,12%	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	A	14.727.830.070	96,12%	2.761.544.040	100,00%	3.145.985.650	17,19%	448.392.847	17,19%	448.392.847	17,19%	448.392.847	113,31%	3.209.936.887	#VALUE!	21,80%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		9-6-8		12=11/5 x100%		13
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	24.730.800	100,00%	24.505.150	18,75%	-	18,75%	-	18,75%	-	118,75%	24.730.800			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	15.552.100	100,00%	5.472.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	15.552.100			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93,91%	2.098.502.540	100,00%	2.447.828.500	25,00%	349.242.847	25,00%	349.242.847	25,00%	349.242.847	118,91%	2.447.745.387			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90,58%	622.758.600	100,00%	668.180.000	25,00%	99.150.000	25,00%	99.150.000	25,00%	99.150.000	115,58%	721.908.600			
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	100,00%	2.801.147.419	82,64%	4.447.960.229	100,00%	3.758.428.970	2,50%	852.650	2,50%	852.650	2,50%	852.650	85,34%	4.448.812.879	85,34%	158,82%	
							Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,80																
					2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				87,51%	1.784.712.784	100,00%	1.611.782.720	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	87,51%	1.784.712.784			
					2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain				78,18%	2.663.347.445	100,00%	2.146.646.250	5,00%	852.650	5,00%	852.650	5,00%	852.650	83,18%	2.664.100.095			
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03		Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	100,00%	1.068.137.594	97,81%	2.615.778.029	100,00%	601.347.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	97,81%	2.615.778.029	97,81%	244,89%	
					2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian				97,81%	2.615.778.029	100,00%	601.347.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	97,81%	2.615.778.029			
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	100,00%	430.945.757	81,46%	294.983.390	100,00%	258.400.138	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	81,46%	294.983.390	81,46%	68,45%	
							Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-10,00%																
					2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota				88,32%	133.792.450	100,00%	58.990.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	88,32%	133.792.450			
					2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				74,60%	161.190.940	100,00%	199.409.938	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	74,60%	161.190.940			
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	06		Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian	100,00%	46.676.744	100,00%	22.256.900	100,00%	22.442.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.256.900	100,00%	47,68%	
					2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota				100,00%	22.256.900	100,00%	22.442.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	22.256.900			
	3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07		Program Penyuluhan Pertanian	Persentase capaian pelaksanaan penyuluhan pertanian	100,00%	711.729.371	100,00%	907.486.664	100,00%	307.205.550	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	907.486.664	100,00%	127,50%	
							Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	30																
					2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian				100,00%	907.486.664	100,00%	307.205.550	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	907.486.664			
	3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN		100,00%	52.236.434.311	93,06%	12.115.655.171	100,00%	10.825.126.666	16,32%	1.397.030.213	16,32%	1.397.030.213	16,32%	1.397.030.213	109,39%	13.512.685.384	109,39%	25,87%	
	3	30				DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		100,00%	2.025.416.207	93,06%	12.115.655.171	100,00%	10.825.126.666	16,32%	1.397.030.213	16,32%	1.397.030.213	16,32%	1.397.030.213	109,39%	13.512.685.384	109,39%	667,16%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	27.150.926	98,83%	5.744.994.791	100,00%	6.875.132.505	12,36%	808.711.575	12,36%	808.711.575	12,36%	808.711.575	111,19%	6.553.706.366	#VALUE!	24138,06%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	5.963.500	100,00%	37.316.000	18,75%	-	18,75%	-	18,75%	-	118,75%	5.963.500			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	3.660.477.254	100,00%	4.410.273.788	12,50%	560.150.060	12,50%	560.150.060	12,50%	560.150.060	112,50%	4.220.627.314			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				94,17%	804.531.900	100,00%	657.067.600	14,66%	59.717.680	14,66%	59.717.680	14,66%	59.717.680	108,83%	864.249.580			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100,00%	13.800.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	789.039.037	100,00%	1.132.219.200	12,83%	149.763.835	12,83%	149.763.835	12,83%	149.763.835	112,83%	938.802.872			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		8+8		12=11/5 x100%		13		
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	484.983.100	100,00%	624.455.917	3,07%	39.080.000	3,07%	39.080.000	3,07%	39.080.000	103,07%	524.063.100				
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	02	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan	100,00%	27.150.926	75,00%	58.400.000	100,00%	47.400.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	75,00%	58.400.000	75,00%	215,09%		
						Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	100,00%																	
				2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang				90,00%	21.200.000	100,00%	24.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	21.200.000				
				2.05	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat				60,00%	37.200.000	100,00%	23.400.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	60,00%	37.200.000				
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan	100,00%	1.590.863.961	93,98%	4.001.791.420	100,00%	3.177.696.661	20,29%	588.318.638	20,29%	588.318.638	20,29%	588.318.638	114,27%	4.590.110.058	114,27%	288,53%		
				2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				92,60%	3.031.091.420	100,00%	2.335.896.661	19,38%	409.968.638	19,38%	409.968.638	19,38%	409.968.638	111,98%	3.441.060.058				
				2.02	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya				95,37%	970.700.000	100,00%	841.800.000	21,19%	178.350.000	21,19%	178.350.000	21,19%	178.350.000	116,55%	1.149.050.000				
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100,00%	181.099.858	97,50%	1.980.534.000	100,00%	439.290.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	97,50%	1.980.534.000	97,50%	1093,61%		
				2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				95,00%	1.870.730.000	100,00%	356.840.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,00%	1.870.730.000				
				2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				100,00%	109.804.000	100,00%	82.450.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	109.804.000				
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	06	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase pemenuhan standarisasi dan pertindungan konsumen	100,00%	199.150.536	100,00%	329.934.960	100,00%	285.607.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	329.934.960	100,00%	165,67%		
				2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan				100,00%	329.934.960	100,00%	285.607.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	329.934.960				
	3	31			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		100,00%	1.177.841.324	92,34%	5.997.917.271	100,00%	2.044.485.142	7,01%	132.767.880	7,01%	132.767.880	7,01%	132.767.880	99,35%	6.130.685.151	99,35%	520,50%		
	3	30	3.30.3.31.0.00.01.00		DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN		100,00%	1.177.841.324	92,34%	5.997.917.271	100,00%	2.044.485.142	7,01%	132.767.880	7,01%	132.767.880	7,01%	132.767.880	99,35%	6.130.685.151	99,35%	520,50%	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan perencanaan dan pembangunan industri	100,00%	946.234.380	96,03%	5.925.463.071	100,00%	1.916.587.942	7,01%	132.767.880	7,01%	132.767.880	7,01%	132.767.880	103,03%	6.058.230.951	103,03%	640,25%		
				2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				96,03%	5.925.463.071	100,00%	1.916.587.942	7,01%	132.767.880	7,01%	132.767.880	7,01%	132.767.880	103,03%	6.058.230.951				
																			0,00%	-				
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri	100,00%	109.478.685	90,00%	38.850.000	100,00%	103.150.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	38.850.000	90,00%	35,49%		
				2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)				90,00%	38.850.000	100,00%	103.150.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	38.850.000				
	3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	100,00%	122.128.259	91,00%	33.604.200	100,00%	24.747.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	91,00%	33.604.200	91,00%	27,52%		
				2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				91,00%	33.604.200	100,00%	24.747.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	91,00%	33.604.200				
	4				UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN		100,00%	265.036.705.936	97,29%	110.964.579.782	100,00%	104.628.646.646	15,63%	13.241.353.098	15,63%	13.241.353.098	15,63%	13.241.353.098	112,92%	124.205.932.880	112,92%	46,86%		
	4	01	4.01.0.00.0.00.01.00		SEKRETARIAT DAERAH		100,00%	219.089.763.498	98,23%	62.787.832.182	100,00%	58.197.319.264	15,16%	6.092.156.187	15,16%	6.092.156.187	15,16%	6.092.156.187	113,39%	68.879.988.369	113,39%	31,44%	SEKRETARIAT DAERAH	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11=6/5 x100%		12=8/5		13
	4	01	4.01.0.00.0.00.01.00		01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai Sakip OPD	A	26.971.601.936	96,24%	37.368.263.782	100,00%	33.889.460.480	13,52%	4.552.519.199	13,52%	4.552.519.199	13,52%	4.552.519.199	109,76%	41.920.782.981	#VALUE!	155,43%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	144.440.496	100,00%	126.237.050	20,52%	25.882.380	20,52%	25.882.380	20,52%	25.882.380	120,52%	169.522.876			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	12.260.258.080	100,00%	14.914.923.678	41,67%	1.808.901.006	41,67%	1.808.901.006	41,67%	1.808.901.006	141,67%	14.069.159.086			
					2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Sakip			96,03%	62.900.000	100,00%	53.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96,03%	62.900.000			
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,00%	2.082.400	100,00%	18.175.250	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	2.082.400			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				95,28%	7.969.572.480	100,00%	5.778.214.600	25,00%	791.250.210	25,00%	791.250.210	25,00%	791.250.210	120,28%	8.760.822.690			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	1.975.893.745	100,00%	2.880.471.964	5,00%	42.000.000	5,00%	42.000.000	5,00%	42.000.000	105,00%	2.017.893.745			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89,06%	5.215.724.231	100,00%	4.274.004.600	14,26%	837.674.432	14,26%	837.674.432	14,26%	837.674.432	103,32%	6.053.398.663			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				98,91%	3.263.391.512	100,00%	1.339.219.000	6,26%	288.677.774	6,26%	288.677.774	6,26%	288.677.774	105,17%	3.552.069.286			
					2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				95,67%	920.261.920	100,00%	1.160.268.088	7,45%	185.831.580	7,45%	185.831.580	7,45%	185.831.580	103,12%	1.106.093.500			
					2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				100,00%	1.962.109.200	100,00%	1.430.226.450	24,92%	344.742.600	24,92%	344.742.600	24,92%	344.742.600	124,92%	2.306.851.800			
					2.13	Penataan Organisasi				84,23%	937.070.718	100,00%	1.040.304.400	13,61%	195.209.217	13,61%	195.209.217	13,61%	195.209.217	97,84%	1.132.279.935			
					2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				95,67%	2.654.559.000	100,00%	874.415.400	3,59%	33.150.000	3,59%	33.150.000	3,59%	33.150.000	99,27%	2.687.709.000			
	4	01	4.01.0.00.0.00.01.00		02	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100,00%	6.231.547.825	98,45%	21.344.574.758	100,00%	21.879.475.734	12,86%	1.082.695.128	12,86%	1.082.695.128	12,86%	1.082.695.128	111,31%	22.427.269.886	111,31%	359,90%	
					2.01	Administrasi Tata Pemerintahan				100,00%	3.356.981.362	100,00%	2.789.972.800	15,06%	221.295.128	15,06%	221.295.128	15,06%	221.295.128	115,06%	3.578.256.490			
					2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				95,34%	15.788.735.024	100,00%	17.591.345.834	0,90%	384.300.000	0,90%	384.300.000	0,90%	384.300.000	96,23%	16.173.035.024			
					2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				100,00%	2.198.878.172	100,00%	1.498.157.100	22,63%	477.100.000	22,63%	477.100.000	22,63%	477.100.000	122,63%	2.675.978.172			
	4	01	4.01.0.00.0.00.01.00		03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100,00%	1.261.096.618	100,00%	4.074.993.642	100,00%	2.428.383.050	19,09%	456.941.860	19,09%	456.941.860	19,09%	456.941.860	119,09%	4.531.935.502	119,09%	359,36%	
					2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian				100,00%	337.082.190	100,00%	275.225.050	12,50%	25.720.100	12,50%	25.720.100	12,50%	25.720.100	112,50%	362.802.290			
					2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				100,00%	2.022.374.695	100,00%	1.234.242.250	20,00%	259.134.500	20,00%	259.134.500	20,00%	259.134.500	120,00%	2.281.509.195			
					2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				100,00%	1.387.396.177	100,00%	680.535.850	15,15%	107.147.260	15,15%	107.147.260	15,15%	107.147.260	115,15%	1.494.543.437			
					2.04	Pemanfaatan Kebijakan Sumber Daya Alam				100,00%	328.140.580	100,00%	238.379.900	28,71%	64.940.000	28,71%	64.940.000	28,71%	64.940.000	128,71%	393.080.580			
	4	02	4.02.0.00.0.00.01.00			SEKRETARIAT DPRD		100,00%	45.946.942.436	96,36%	48.176.747.600	100,00%	46.431.327.382	16,10%	7.149.196.911	16,10%	7.149.196.911	16,10%	7.149.196.911	112,46%	55.325.944.511	112,46%	120,41%	SEKRETARIAT DPRD
	4	02	4.02.0.00.0.00.01.00		01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Nilai SAKIP OPD	B	30.920.291.233	95,57%	27.579.368.718	100,00%	31.943.488.832	17,03%	5.308.697.450	17,03%	5.308.697.450	17,03%	5.308.697.450	112,60%	32.888.066.168		106,36%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	27.225.200	100,00%	41.980.050	18,75%	-	18,75%	-	18,75%	-	118,75%	27.225.200			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	3.951.029.147	100,00%	4.973.879.445	25,00%	662.906.331	25,00%	662.906.331	25,00%	662.906.331	125,00%	4.613.935.478			
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah				100,00%	223.204.372	100,00%	466.648.900	10,00%	28.199.805	10,00%	28.199.805	10,00%	28.199.805	110,00%	251.404.177			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				94,14%	2.260.503.309	100,00%	2.995.894.000	21,99%	230.201.172	21,99%	230.201.172	21,99%	230.201.172	116,14%	2.490.704.481			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	503.081.900	100,00%	1.169.463.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	503.081.900			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintahan Daerah				93,26%	1.743.987.762	100,00%	2.463.958.700	18,49%	330.322.275	18,49%	330.322.275	18,49%	330.322.275	111,75%	2.074.310.037			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	1.063.854.600	100,00%	624.759.300	12,50%	35.015.000	12,50%	35.015.000	12,50%	35.015.000	112,50%	1.118.869.600			
					2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				77,17%	17.786.482.428	100,00%	19.206.904.637	12,50%	4.022.052.867	12,50%	4.022.052.867	12,50%	4.022.052.867	89,67%	21.808.535.295			
	4	02	4.02.0.00.0.00.01.00		02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	100,00%	15.026.651.205	97,15%	20.597.378.882	100,00%	14.487.838.550	15,16%	1.840.499.461	15,16%	1.840.499.461	15,16%	1.840.499.461	112,31%	22.437.878.343	112,31%	149,32%	
					2.01	Pembentukan Peraturan daerah dan Peraturan DPRD				0,00%	-	100,00%	567.266.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
					2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran				100,00%	45.360.000	100,00%	117.270.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	45.360.000			
					2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan				94,84%	28.685.000	100,00%	29.700.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,84%	28.685.000			
					2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD				95,91%	869.220.000	100,00%	928.240.000	5,24%	65.000.000	5,24%	65.000.000	5,24%	65.000.000	101,15%	934.220.000			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		9-6-8		12=11/5 x100%		13
				2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat				95,00%	4.924.272.358	100,00%	2.170.683.850	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,00%	4.924.272.358			
				2.08	Fasilitasi Tugas DPRD				100,00%	14.729.841.524	100,00%	10.674.678.500	9,92%	1.773.499.461	9,92%	1.775.499.461	9,92%	1.775.499.461	109,92%	16.505.340.985			
	5				UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		100,00%	90.618.639.915	94,96%	74.336.772.748	100,00%	81.602.816.688	11,58%	7.377.327.330	11,58%	7.377.327.330	11,58%	7.377.327.330	106,55%	81.714.100.078	106,55%	90,17%	
	5	01			PERENCANAAN		100,00%	12.310.426.089	97,50%	10.867.334.113	100,00%	11.103.791.217	16,99%	1.200.440.951	16,99%	1.200.440.951	16,99%	1.200.440.951	114,50%	12.067.775.064	114,50%	98,03%	
	5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		100,00%	12.310.426.089	97,50%	10.867.334.113	100,00%	11.103.791.217	16,99%	1.200.440.951	16,99%	1.200.440.951	16,99%	1.200.440.951	114,50%	12.067.775.064	114,50%	98,03%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
	5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	A	7.050.626.060	98,07%	6.382.012.802	100,00%	7.107.981.467	20,69%	942.724.441	20,69%	942.724.441	20,69%	942.724.441	118,76%	7.324.737.243	#VALUE!	103,89%	
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	46.911.300	100,00%	50.037.100	22,50%	6.750.000	22,50%	6.750.000	22,50%	6.750.000	122,50%	53.661.300			
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	3.587.312.947	100,00%	4.599.388.323	25,00%	518.260.580	25,00%	518.260.580	25,00%	518.260.580	125,00%	4.105.573.527			
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	1.225.783.310	100,00%	706.066.750	28,39%	185.609.124	28,39%	185.609.124	28,39%	185.609.124	128,39%	1.411.392.434			
				2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	367.000.000									100,00%	367.000.000			
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95,62%	605.573.645	100,00%	955.876.750	19,25%	127.290.237	19,25%	127.290.237	19,25%	127.290.237	114,87%	732.863.882			
				2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				92,81%	549.431.600	100,00%	796.612.544	8,33%	104.814.500	8,33%	104.814.500	8,33%	104.814.500	101,14%	654.246.100			
	5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100,00%	5.259.800.029	96,93%	4.485.321.311	100,00%	3.995.809.750	13,30%	257.716.510	13,30%	257.716.510	13,30%	257.716.510	110,23%	4.743.037.821	110,23%	90,18%	
				2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				97,60%	1.531.692.977	100,00%	1.649.507.450	22,57%	227.011.510	22,57%	227.011.510	22,57%	227.011.510	120,17%	1.758.704.487			
				2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				97,08%	1.393.656.742	100,00%	1.244.588.750	0,66%	9.705.000	0,66%	9.705.000	0,66%	9.705.000	97,73%	1.403.361.742			
				2.03	Pengendalian evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan daerah				96,11%	1.559.971.592	100,00%	1.101.713.550	16,67%	21.000.000	16,67%	21.000.000	16,67%	21.000.000	112,78%	1.580.971.592			
	5	02			KEUANGAN		100,00%	58.888.563.808	91,45%	46.751.776.973	100,00%	55.905.464.611	14,03%	4.821.050.304	14,03%	4.821.050.304	14,03%	4.821.050.304	105,48%	51.572.827.277	105,48%	87,58%	
	5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH		100,00%	41.724.801.454	94,41%	24.929.945.469	100,00%	20.712.110.002	13,64%	2.595.864.378	13,64%	2.595.864.378	13,64%	2.595.864.378	106,05%	27.525.809.838	106,05%	65,97%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	A	11.174.069.850	97,38%	12.197.802.997	100,00%	11.586.737.652	18,69%	1.733.642.718	18,69%	1.733.642.718	18,69%	1.733.642.718	116,07%	13.931.445.715	#VALUE!	124,68%	
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	280.019.600	100,00%	170.258.350	37,50%	29.400.000	37,50%	29.400.000	37,50%	29.400.000	137,50%	309.419.600			
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				99,20%	6.031.088.270	100,00%	7.014.536.564	16,67%	888.335.568	16,67%	888.335.568	16,67%	888.335.568	115,87%	6.919.423.838			
				2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,00%	212.694.768	100,00%	54.572.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	212.694.768			
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				95,89%	3.082.433.861	100,00%	1.574.404.650	18,13%	271.652.362	18,13%	271.652.362	18,13%	271.652.362	114,03%	3.354.083.223			
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95,97%	1.773.862.948	100,00%	2.020.284.400	25,00%	449.290.438	25,00%	449.290.438	25,00%	449.290.438	120,97%	2.223.153.386			
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93,19%	817.706.550	100,00%	752.681.688	14,86%	94.964.350	14,86%	94.964.350	14,86%	94.964.350	108,05%	912.670.900			
	5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	28.181.362.674	89,18%	10.004.417.047	100,00%	7.509.837.200	9,15%	660.069.350	9,15%	660.069.350	9,15%	660.069.350	98,33%	10.664.486.397	#VALUE!	37,84%	
				2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah				88,28%	2.681.893.204	100,00%	2.287.823.050	8,50%	389.262.610	8,50%	389.262.610	8,50%	389.262.610	96,78%	3.071.155.814			
				2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah				92,93%	1.343.360.677	100,00%	798.735.450	18,16%	154.779.620	18,16%	154.779.620	18,16%	154.779.620	111,09%	1.498.140.297			
				2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah				93,47%	1.467.490.366	100,00%	1.423.278.700	9,95%	116.027.120	9,95%	116.027.120	9,95%	116.027.120	103,43%	1.583.517.486			
				2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah				82,03%	4.511.672.800	100,00%	3.000.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	82,03%	4.511.672.800			
	5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan aset daerah	100,00%	2.369.368.930	96,67%	2.727.725.416	100,00%	1.615.535.150	13,08%	202.152.310	13,08%	202.152.310	13,08%	202.152.310	109,75%	2.929.877.726	109,75%	123,66%	
				2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah				96,67%	2.727.725.416	100,00%	1.615.535.150	13,08%	202.152.310	13,08%	202.152.310	13,08%	202.152.310	109,75%	2.929.877.726			
	5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000		BADAN PENDAPATAN DAERAH		100,00%	17.163.762.354	88,50%	21.821.831.513	100,00%	35.193.354.609	14,41%	2.225.185.926	14,41%	2.225.185.926	14,41%	2.225.185.926	102,91%	24.047.017.439	102,91%	140,10%	BADAN PENDAPATAN DAERAH

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 – 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		9=6:8		12=11/5 x100%		13
	5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	A	14.134.082.693	86,42%	19.540.503.663	100,00%	25.811.874.459	13,50%	1.613.358.126	13,50%	1.613.358.126	13,50%	1.613.358.126	99,92%	21.153.861.789	#VALUE!	149,67%	
				2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	81.418.500	100,00%	96.356.000	18,75%	-	18,75%	-	18,75%	-	118,75%	81.418.500			
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	14.754.220.543	100,00%	21.699.017.959	12,50%	1.024.988.007	12,50%	1.024.988.007	12,50%	1.024.988.007	112,50%	15.779.208.550			
										0,00%	-									0,00%				
																				0,00%				
				2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0,00%	-	100,00%	213.006.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				94,18%	3.086.841.498	100,00%	1.305.627.100	15,58%	209.794.060	15,58%	209.794.060	15,58%	209.794.060	108,76%	3.296.635.558			
				2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	933.374.732	100,00%	1.465.277.400	25,00%	231.485.559	25,00%	231.485.559	25,00%	231.485.559	125,00%	1.164.860.291			
				2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				95,96%	684.648.390	100,00%	1.032.590.000	9,15%	147.090.500	9,15%	147.090.500	9,15%	147.090.500	105,11%	831.738.890			
	5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian pemenuhan target PAD	100,00%	3.029.679.661	90,58%	2.281.327.850	100,00%	9.381.480.150	15,32%	611.827.800	15,32%	611.827.800	15,32%	611.827.800	105,90%	2.893.155.650	105,90%	95,49%	
							Rasio PAD	7,61																
				2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah				90,58%	2.281.327.850	100,00%	9.381.480.150	15,32%	611.827.800	15,32%	611.827.800	15,32%	611.827.800	105,90%	2.893.155.650			
	5	03				KEPEGAWAIAN		100,00%	9.172.832.573	97,34%	8.664.532.296	100,00%	8.977.830.504	11,97%	755.034.688	11,97%	755.034.688	11,97%	755.034.688	109,31%	9.419.566.984	109,31%	102,69%	
	5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		100,00%	9.172.832.573	97,34%	8.664.532.296	100,00%	8.977.830.504	11,97%	755.034.688	11,97%	755.034.688	11,97%	755.034.688	109,31%	9.419.566.984	109,31%	102,69%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	A	6.025.285.683	96,62%	6.301.630.814	100,00%	7.241.911.904	11,97%	755.034.688	11,97%	755.034.688	11,97%	755.034.688	108,59%	7.056.665.502	#VALUE!	117,12%	
				2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	36.213.850	100,00%	72.566.350	15,00%	-	15,00%	-	15,00%	-	115,00%	36.213.850			
				2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	4.028.184.943	100,00%	5.239.692.592	25,00%	691.776.111	25,00%	691.776.111	25,00%	691.776.111	125,00%	4.719.961.054			
				2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				96,79%	744.985.206	100,00%	370.130.850	17,86%	50.349.383	17,86%	50.349.383	17,86%	50.349.383	114,64%	795.334.589			
				2.07		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah				100,00%	358.394.200	100,00%	22.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	358.394.200			
				2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91,81%	608.904.191	100,00%	995.315.830	1,99%	12.909.194	1,99%	12.909.194	1,99%	12.909.194	93,80%	621.813.385			
				2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91,13%	524.948.424	100,00%	542.206.282	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	91,13%	524.948.424			
	5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02		Program Kepegawaian Daerah	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah	100,00%	3.147.546.890	98,06%	2.362.901.482	100,00%	1.735.918.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,06%	2.362.901.482	98,06%	75,07%	
				2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				96,86%	761.504.657	100,00%	551.341.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96,86%	761.504.657			
				2.02		Mutasi dan Promosi ASN				98,13%	628.774.987	100,00%	489.272.050	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	98,13%	628.774.987			
																		0,00%		0,00%				
				2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				97,26%	885.280.176	100,00%	660.039.350	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	97,26%	885.280.176			
				2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				100,00%	87.341.662	100,00%	35.266.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	87.341.662			
	5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		100,00%	5.362.180.779	94,08%	2.787.291.792	100,00%	1.281.653.650	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,08%	2.787.291.792	94,08%	51,98%	
	5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000			BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH		100,00%	5.362.180.779	94,08%	2.787.291.792	100,00%	1.281.653.650	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,08%	2.787.291.792	94,08%	51,98%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
	5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02		Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah	100,00%	5.362.180.779	94,08%	2.787.291.792	100,00%	1.281.653.650	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	94,08%	2.787.291.792	94,08%	51,98%	
				2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis				91,26%	975.945.868	100,00%	281.418.550	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	91,26%	975.945.868			
				2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pungsional				96,89%	1.811.345.924	100,00%	1.000.235.100	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96,89%	1.811.345.924			
	5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN		100,00%	4.884.636.666	94,45%	5.265.837.574	100,00%	4.334.076.706	14,92%	600.801.387	14,92%	600.801.387	14,92%	600.801.387	109,37%	5.866.638.961	109,37%	120,10%	
	5	05	5.05.0.00.0.00.01.00			BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH		100,00%	4.884.636.666	94,45%	5.265.837.574	100,00%	4.334.076.706	14,92%	600.801.387	14,92%	600.801.387	14,92%	600.801.387	109,37%	5.866.638.961	109,37%	120,10%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=11/5 x100%		13
	5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	A	4.319.812.731	94,97%	3.508.393.615	100,00%	4.130.686.506	14,92%	600.801.387	14,92%	600.801.387	14,92%	600.801.387	109,89%	4.109.195.002	#VALUE!	95,12%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	1.425.000	100,00%	3.240.000	12,50%	-	12,50%	-	12,50%	-	112,50%	1.425.000			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				83,33%	2.721.069.270	100,00%	3.196.805.206	8,33%	430.739.209	8,33%	430.739.209	8,33%	430.739.209	91,67%	3.151.808.479			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				96,43%	361.592.578	100,00%	296.807.900	21,67%	53.856.820	21,67%	53.856.820	21,67%	53.856.820	118,09%	355.449.398			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	23.560.000	100,00%	66.200.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	23.560.000			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	212.191.642	100,00%	283.593.200	25,00%	59.055.358	25,00%	59.055.358	25,00%	59.055.358	125,00%	271.247.000			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90,06%	272.115.125	100,00%	284.040.000	7,12%	57.150.000	7,12%	57.150.000	7,12%	57.150.000	97,18%	329.265.125			
	5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	92,86%	564.823.935	93,93%	1.757.443.959	100,00%	203.390.400	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	93,93%	1.757.443.959	101,15%	311,15%	
					2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				98,42%	910.998.542									98,42%	910.998.542			
					2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				83,46%	427.097.267									83,46%	427.097.267			
					2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				97,24%	245.871.100									97,24%	245.871.100			
					2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi				96,60%	173.477.050	100,00%	203.390.400	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,00%	-	96,60%	173.477.050			
	6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN		100,00%	11.220.659.611	96,58%	11.923.202.453	100,00%	10.780.330.336	16,92%	1.314.768.199	16,92%	1.314.768.199	16,92%	1.314.768.199	113,50%	13.237.970.652	113,50%	117,98%	
	6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000			INSPEKTORAT		100,00%	11.220.659.611	96,58%	11.923.202.453	100,00%	10.780.330.336	16,92%	1.314.768.199	16,92%	1.314.768.199	16,92%	1.314.768.199	113,50%	13.237.970.652	113,50%	117,98%	INSPEKTORAT
	6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	A	9.198.335.938	96,81%	9.613.744.599	100,00%	10.448.374.986	16,92%	1.314.768.199	16,92%	1.314.768.199	16,92%	1.314.768.199	113,73%	10.928.512.798	#VALUE!	118,81%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	4.750.000	100,00%	5.625.000	16,67%	562.500	16,67%	562.500	16,67%	562.500	116,67%	5.312.500			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	7.302.553.079	100,00%	9.159.053.586	12,50%	955.840.144	12,50%	955.840.144	12,50%	955.840.144	112,50%	8.258.393.214			
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				92,50%	517.484.815	100,00%	45.420.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	92,50%	517.484.815			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				96,67%	553.074.171	100,00%	195.441.800	32,82%	100.868.218	32,82%	100.868.218	32,82%	100.868.218	129,48%	653.942.389			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	335.609.846	100,00%	489.384.800	25,00%	105.006.337	25,00%	105.006.337	25,00%	105.006.337	125,00%	440.616.183			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91,67%	900.272.697	100,00%	553.450.000	14,54%	152.491.000	14,54%	152.491.000	14,54%	152.491.000	106,21%	1.052.763.697			
	6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	100,00%	1.945.796.031	96,25%	2.126.357.770	100,00%	304.694.300	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96,25%	2.126.357.770	96,25%	109,28%	
							Persentase tindak lanjut temuan	82,00%																
					2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				97,50%	1.882.157.770	100,00%	282.983.950	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	97,50%	1.882.157.770			
					2.02	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				95,00%	244.200.000	100,00%	21.710.350	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,00%	244.200.000			
	6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	03		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100,00%	76.527.642	96,68%	183.100.084	100,00%	27.261.050	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96,68%	183.100.084	96,68%	239,26%	
							Persentase pelanggaran pegawai	10,00%																
					2.02	Pendampingan dan Asistensi				96,68%	183.100.084	100,00%	27.261.050	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96,68%	183.100.084			
	7					UNSUR KEWILAYAHAN		100,00%	108.424.118.480	98,56%	117.333.592.478	100,00%	132.394.143.649	16,26%	19.777.010.783	16,26%	19.777.010.783	16,26%	19.777.010.783	114,81%	137.110.603.261	114,81%	126,46%	
	7	01				KECAMATAN		100,00%	108.424.118.480	98,56%	117.333.592.478	100,00%	132.394.143.649	16,26%	19.777.010.783	16,26%	19.777.010.783	16,26%	19.777.010.783	114,81%	137.110.603.261	114,81%	126,46%	
	7	01	7.01.0.00.0.00.02.00			KECAMATAN PALU SELATAN		100,00%	14.652.735.806	97,84%	15.367.673.652	100,00%	17.277.898.248	15,68%	2.698.647.260	15,68%	2.698.647.260	15,68%	2.698.647.260	113,52%	18.066.320.912	113,52%	123,30%	KECAMATAN PALU SELATAN
	7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	8.155.801.768	98,04%	7.850.497.493	100,00%	9.403.536.698	15,35%	1.390.223.905	15,35%	1.390.223.905	15,35%	1.390.223.905	113,39%	9.240.721.398	#VALUE!	113,39%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		8+9+11		12=11/5 x100%		13
					2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	5.921.600	100,00%	20.413.250	16,67%	-	16,67%	-	16,67%	-	116,67%	5.921.600			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	6.273.422.459	100,00%	7.337.034.348	25,00%	1.141.172.355	25,00%	1.141.172.355	25,00%	1.141.172.355	125,00%	7.414.594.814			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	535.466.333	100,00%	399.878.700	21,43%	27.422.740	21,43%	27.422.740	21,43%	27.422.740	121,43%	562.889.073			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	36.437.500	100,00%	4.500.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	36.437.500			
					2.08	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91,23%	695.150.784	100,00%	1.274.300.400	18,90%	150.228.810	18,90%	150.228.810	18,90%	150.228.810	110,13%	845.379.594			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan				97,02%	304.098.817	100,00%	367.410.000	10,12%	71.400.000	10,12%	71.400.000	10,12%	71.400.000	107,13%	375.498.817			
	7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	36.036.491	100,00%	212.654.500	100,00%	5.925.350	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	212.654.500	#VALUE!	590,11%	
					2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				100,00%	212.654.500	100,00%	5.925.350	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	212.654.500			
	7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00%	6.370.806.320	93,34%	7.171.022.659	100,00%	7.766.755.200	31,68%	1.308.423.355	31,68%	1.308.423.355	31,68%	1.308.423.355	125,02%	8.479.446.014	125,02%	133,10%	
					2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						100,00%	47.266.500	100,00%	47.266.500	100,00%	47.266.500	100,00%	47.266.500	100,00%	47.266.500			
					2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				96,67%	5.924.505.306	100,00%	6.174.363.900	10,11%	1.010.436.258	10,11%	1.010.436.258	10,11%	1.010.436.258	106,78%	6.934.941.564			
					2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				90,01%	1.246.517.353	100,00%	1.509.124.800	16,61%	250.720.597	16,61%	250.720.597	16,61%	250.720.597	106,62%	1.497.237.950			
					2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						100,00%	36.000.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
	7	01	7.01.0.00.0.00.02.0000	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	90.091.227	100,00%	133.499.000	100,00%	101.681.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	133.499.000	100,00%	148,18%	
					2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100,00%	133.499.000	100,00%	101.681.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	133.499.000			
	7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000			KECAMATAN MANTIKULORE		100,00%	17.980.583.561	99,69%	20.074.953.782	100,00%	22.961.253.033	15,08%	3.426.544.957	15,08%	3.426.544.957	15,08%	3.426.544.957	114,77%	23.501.498.739	114,77%	130,70%	KECAMATAN MANTIKULORE
	7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	10.243.070.264	98,75%	10.179.024.751	100,00%	12.371.058.872	21,68%	1.719.719.661	21,68%	1.719.719.661	21,68%	1.719.719.661	120,43%	11.898.744.412	#VALUE!	116,16%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	28.147.900	100,00%	48.792.900	18,75%	-	18,75%	-	18,75%	-	118,75%	28.147.900			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	7.778.402.225	100,00%	9.073.234.972	62,50%	1.375.866.627	62,50%	1.375.866.627	62,50%	1.375.866.627	162,50%	9.154.268.852			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	929.066.933	100,00%	1.092.179.000	16,47%	102.043.177	16,47%	102.043.177	16,47%	102.043.177	116,47%	1.031.110.110			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				97,54%	186.833.650	100,00%	154.397.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	97,54%	186.833.650			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				94,94%	788.279.693	100,00%	1.434.214.400	25,00%	128.409.857	25,00%	128.409.857	25,00%	128.409.857	119,94%	916.689.550			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	468.294.350	100,00%	568.240.000	7,39%	113.400.000	7,39%	113.400.000	7,39%	113.400.000	107,39%	581.694.350			
	7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	26.713.966	100,00%	121.738.300	100,00%	23.356.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	121.738.300	#VALUE!	455,71%	
					2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				100,00%	121.738.300	100,00%	23.356.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	121.738.300			
	7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00%	7.644.014.417	100,00%	9.457.898.231	100,00%	10.334.387.361	23,55%	1.706.825.296	23,55%	1.706.825.296	23,55%	1.706.825.296	123,55%	11.164.723.527	123,55%	146,06%	
					2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100,00%	7.317.479.613	100,00%	7.838.166.361	38,80%	1.215.786.991	38,80%	1.215.786.991	38,80%	1.215.786.991	138,80%	8.533.266.604			
					2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100,00%	2.140.418.618	100,00%	2.363.361.600	20,12%	475.438.305	20,12%	475.438.305	20,12%	475.438.305	120,12%	2.615.856.923			
					2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						100,00%	132.859.400	11,74%	15.600.000	11,74%	15.600.000	11,74%	15.600.000	11,74%	15.600.000			
	7	01	7.01.0.00.0.00.03.0000	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	66.784.914	100,00%	316.292.500	100,00%	232.450.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	316.292.500	100,00%	473,60%	
					2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100,00%	316.292.500	100,00%	232.450.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	316.292.500			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		6-8-8		12=11/5 x100%		13
	7	01	7.01.0.00.0.00.04.02			KECAMATAN PALU BARAT		100,00%	12.071.637.771	98,94%	13.254.954.027	100,00%	15.452.560.540	17,24%	2.381.267.002	17,24%	2.381.267.002	17,24%	2.381.267.002	116,18%	15.636.221.029	116,18%	129,53%	KECAMATAN PALU BARAT
	7	01	7.01.0.00.0.00.04.02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	6.482.552.586	98,20%	7.328.790.850	100,00%	8.499.781.356	22,02%	1.353.150.617	22,02%	1.353.150.617	22,02%	1.353.150.617	120,23%	8.681.941.467	#VALUE!	133,93%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	7.459.000	100,00%	33.130.200	17,50%	2.370.200	17,50%	2.370.200	17,50%	2.370.200	117,50%	9.829.200			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	5.175.503.655	100,00%	6.120.601.522	62,50%	888.533.643	62,50%	888.533.643	62,50%	888.533.643	162,50%	6.064.037.298			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	760.401.569	100,00%	585.791.950	24,10%	180.417.308	24,10%	180.417.308	24,10%	180.417.308	124,10%	940.818.877			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	299.185.700	100,00%	42.301.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	299.185.700			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				96,39%	689.901.026	100,00%	1.304.797.084	16,76%	193.839.466	16,76%	193.839.466	16,76%	193.839.466	113,35%	883.740.492			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				92,62%	396.339.900	100,00%	413.158.800	11,29%	87.990.000	11,29%	87.990.000	11,29%	87.990.000	103,91%	484.329.900			
	7	01	7.01.0.00.0.00.04.02	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ndeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	37.747.423	100,00%	10.066.400	100,00%	17.208.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	10.066.400	#VALUE!	26,67%	
					2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				100,00%	10.066.400	100,00%	17.208.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	10.066.400			
	7	01	7.01.0.00.0.00.04.02	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00%	5.456.969.204	97,56%	5.645.356.777	100,00%	6.776.770.684	29,68%	1.028.116.385	29,68%	1.028.116.385	29,68%	1.028.116.385	127,24%	6.673.473.162	127,24%	122,29%	
					2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				95,12%	4.599.841.450	100,00%	5.441.899.384	40,54%	799.393.808	40,54%	799.393.808	40,54%	799.393.808	135,66%	5.399.235.258			
					2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100,00%	1.045.515.327	100,00%	1.215.024.000	18,82%	228.722.577	18,82%	228.722.577	18,82%	228.722.577	118,82%	1.274.237.904			
					2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						100,00%	119.847.300	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
	7	01	7.01.0.00.0.00.04.02	05		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	94.368.558	100,00%	270.740.000	100,00%	158.800.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	270.740.000	100,00%	286,90%	
					2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Pemagasan Kepala Daerah				100,00%	270.740.000	100,00%	158.800.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	270.740.000			
	7	01	7.01.0.00.0.00.05.02			KECAMATAN PALU TIMUR		100,00%	12.043.221.952	96,89%	12.504.736.956	100,00%	14.393.132.431	14,42%	1.987.691.240	14,42%	1.987.691.240	14,42%	1.987.691.240	111,30%	14.492.430.196	111,30%	120,34%	KECAMATAN PALU TIMUR
	7	01	7.01.0.00.0.00.05.02	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	7.076.248.292	98,89%	7.123.216.664	100,00%	8.299.584.238	18,25%	1.087.591.240	18,25%	1.087.591.240	18,25%	1.087.591.240	117,14%	8.210.807.904	#VALUE!	116,03%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	8.645.900	100,00%	21.770.900	15,00%	-	15,00%	-	15,00%	-	115,00%	8.645.900			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	5.180.082.549	100,00%	6.026.163.838	22,50%	887.741.565	22,50%	887.741.565	22,50%	887.741.565	122,50%	6.067.824.114			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	632.137.447	100,00%	551.805.300	20,00%	25.407.590	20,00%	25.407.590	20,00%	25.407.590	120,00%	657.545.037			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				93,33%	130.046.900	100,00%	177.250.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	93,33%	130.046.900			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	654.280.568	100,00%	1.154.204.200	22,50%	151.192.085	22,50%	151.192.085	22,50%	151.192.085	122,50%	805.472.653			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	518.023.300	100,00%	368.390.000	11,25%	23.250.000	11,25%	23.250.000	11,25%	23.250.000	111,25%	541.273.300			
	7	01	7.01.0.00.0.00.05.02	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	38.740.553	90,00%	56.515.150	100,00%	22.241.700	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	56.515.150	#VALUE!	145,88%	
					2.03	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				90,00%	56.515.150	100,00%	22.241.700	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	90,00%	56.515.150			
	7	01	7.01.0.00.0.00.05.02	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00%	4.831.381.724	98,66%	5.098.277.392	100,00%	5.834.752.993	25,00%	900.100.000	25,00%	900.100.000	25,00%	900.100.000	123,66%	5.998.377.392	123,66%	124,15%	
					2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				97,33%	3.953.528.474	100,00%	4.436.594.993	40,00%	647.200.000	40,00%	647.200.000	40,00%	647.200.000	137,33%	4.600.728.474			
					2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100,00%	1.144.748.918	100,00%	1.213.609.000	25,00%	246.000.000	25,00%	246.000.000	25,00%	246.000.000	125,00%	1.390.748.918			

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2				3	4			5		7		8		9		11		5-8-8		12=11/5 x100%		13
				2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						100,00%	184.349.000	10,00%	6.900.000	10,00%	6.900.000	10,00%	6.900.000	10,00%	6.900.000			
	7	01	7.01.0.00.0.00.05.0000	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	96.851.383	100,00%	226.729.750	100,00%	136.553.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	226.729.750	100,00%	234,10%	
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100,00%	226.729.750	100,00%	136.553.500	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	226.729.750			
	7	01	7.01.0.00.0.00.0.0000		KECAMATAN TATANGA		100,00%	14.145.751.313	98,98%	14.333.481.851	100,00%	16.042.823.033	16,86%	2.466.480.139	16,88%	2.466.480.139	16,88%	2.466.480.139	115,67%	16.799.961.990	115,67%	116,76%	KECAMATAN TATANGA
	7	01	7.01.0.00.0.00.0.0000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip OPD	A	7.946.129.566	98,37%	7.385.354.682	100,00%	9.009.400.813	16,83%	1.264.407.789	16,83%	1.264.407.789	16,83%	1.264.407.789	115,19%	8.649.762.471	#VALUE!	108,86%	
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	11.132.900	100,00%	43.832.900	18,75%	-	18,75%	-	18,75%	-	118,75%	11.132.900			
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	5.723.476.663	100,00%	6.466.091.589	25,00%	965.318.408	25,00%	965.318.408	25,00%	965.318.408	125,00%	6.688.795.071			
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	666.867.610	100,00%	610.489.600	25,00%	38.587.140	25,00%	38.587.140	25,00%	38.587.140	125,00%	705.454.750			
				2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	36.285.000	100,00%	53.600.700	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	36.285.000			
															0,00%		0,00%		0,00%				
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	601.690.709	100,00%	1.428.756.024	25,00%	207.282.241	25,00%	207.282.241	25,00%	207.282.241	125,00%	808.972.950			
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				90,19%	345.901.800	100,00%	406.630.000	7,20%	53.220.000	7,20%	53.220.000	7,20%	53.220.000	97,48%	399.121.800			
	7	01	7.01.0.00.0.00.0.0000	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	38.467.347	100,00%	14.721.000	100,00%	15.513.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	14.721.000			
				2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Diklasifikasikan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				100,00%	14.721.000	100,00%	15.513.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	14.721.000			
	7	01	7.01.0.00.0.00.0.0000	03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00%	6.064.986.032	97,57%	6.680.201.169	100,00%	6.874.459.040	33,82%	1.202.072.350	33,82%	1.202.072.350	33,82%	1.202.072.350	131,39%	7.882.273.519	131,39%	129,96%	
				2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				100,00%	5.347.920.062	100,00%	5.362.705.440	38,50%	785.822.350	38,50%	785.822.350	38,50%	785.822.350	138,50%	6.133.742.412			
				2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				95,13%	1.332.281.107	100,00%	1.428.633.600	29,14%	416.250.000	29,14%	416.250.000	29,14%	416.250.000	124,27%	1.748.531.107			
				2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						100,00%	83.120.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
	7	01	7.01.0.00.0.00.0.0000	05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	96.168.368	100,00%	253.205.000	100,00%	143.450.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	253.205.000	100,00%	263,29%	
				2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100,00%	253.205.000	100,00%	143.450.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	253.205.000			
	7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000		KECAMATAN TAWAELI		100,00%	12.869.553.600	98,61%	13.088.862.861	100,00%	14.385.374.295	15,54%	1.996.184.779	15,54%	1.996.184.779	15,54%	1.996.184.779	114,16%	15.085.047.640	114,16%	124,98%	KECAMATAN TAWAELI
	7	01	7.01.0.00.0.00.07.0000	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	6.244.391.908	98,33%	6.146.302.632	100,00%	7.390.965.932	13,50%	915.584.779	13,50%	915.584.779	13,50%	915.584.779	111,83%	7.061.887.411	#VALUE!	113,09%	
				2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	13.246.250	100,00%	26.391.150	18,75%	-	18,75%	-	18,75%	-	118,75%	13.246.250			
				2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	4.483.290.353	100,00%	5.159.996.032	12,50%	720.922.856	12,50%	720.922.856	12,50%	720.922.856	112,50%	5.204.213.209			
				2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				100,00%	613.779.904	100,00%	569.351.350	13,33%	32.441.923	13,33%	32.441.923	13,33%	32.441.923	113,33%	646.221.827			
				2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100,00%	227.837.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
				2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	575.312.376	100,00%	1.013.810.400	18,77%	117.900.000	18,77%	117.900.000	18,77%	117.900.000	118,77%	693.212.376			
				2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				91,67%	460.673.749	100,00%	393.579.200	4,15%	44.320.000	4,15%	44.320.000	4,15%	44.320.000	95,82%	504.993.749			
	7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	38.467.347	100,00%	20.756.800	100,00%	18.519.850	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	20.756.800	#VALUE!	53,96%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=11/5 x100%		13
					2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				100,00%	20.756.800	100,00%	18.519.850	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	20.756.800			
	7	01	7.01.0.00.0.00.07.00		03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00%	5.728.993.324	96,12%	6.687.313.429	100,00%	6.764.188.513	33,13%	1.080.600.000	33,13%	1.080.600.000	33,13%	1.080.600.000	129,25%	7.767.913.429	129,25%	135,59%	
					2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						100,00%	38.555.000	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-			
					2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				92,25%	5.919.416.579	100,00%	5.867.139.863	11,50%	922.200.000	11,50%	922.200.000	11,50%	922.200.000	103,75%	6.841.616.579			
					2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100,00%	767.896.850	100,00%	806.578.650	21,00%	158.400.000	21,00%	158.400.000	21,00%	158.400.000	121,00%	926.296.850			
					2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						100,00%	51.915.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-			
	7	01	7.01.0.00.0.00.07.00		05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	96.168.368	100,00%	234.490.000	100,00%	211.700.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	234.490.000	100,00%	243,83%	
					2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah				100,00%	234.490.000	100,00%	211.700.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	234.490.000			
	7	01	7.01.0.00.0.00.06			KECAMATAN ULUJADI		100,00%	13.637.018.240	98,26%	15.179.922.030	100,00%	16.945.091.544	17,84%	2.564.538.738	17,84%	2.564.538.738	17,84%	2.564.538.738	117,11%	17.744.460.768	117,11%	130,12%	KECAMATAN ULUJADI
	7	01	7.01.0.0.0.00.0.00		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	5	6.413.859.297	97,30%	7.085.953.181	100,00%	8.254.331.107	18,33%	1.231.008.894	18,33%	1.231.008.894	18,33%	1.231.008.894	115,64%	8.316.961.275	#VALUE!	129,67%	
					2.01	Perencanaan,Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				100,00%	18.044.900	100,00%	33.764.600	22,50%	3.655.600	22,50%	3.655.600	22,50%	3.655.600	122,50%	21.700.500			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	4.911.329.509	100,00%	5.575.915.257	25,00%	767.287.322	25,00%	767.287.322	25,00%	767.287.322	125,00%	5.678.616.831			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				99,99%	370.844.200	100,00%	631.242.650	25,00%	102.461.566	25,00%	102.461.566	25,00%	102.461.566	124,99%	673.305.766			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	417.494.790	100,00%	172.420.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	417.494.790			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93,49%	775.628.082	100,00%	1.360.708.000	25,00%	272.007.506	25,00%	272.007.506	25,00%	272.007.506	118,49%	1.047.635.588			
					2.09	Pemeliharaan Barang-Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90,32%	392.611.700	100,00%	460.280.000	12,50%	85.596.100	12,50%	85.596.100	12,50%	85.596.100	102,82%	478.207.800			
	7	01	7.01.0.0.0.00.0.00		02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	37.937.055	100,00%	37.875.800	100,00%	21.211.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	37.875.800	#VALUE!	99,84%	
					2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				100,00%	37.875.800	100,00%	21.211.600	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	37.875.800			
	7	01	7.01.0.0.0.00.0.00		03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	100,00%	7.090.379.249	99,76%	7.794.153.049	100,00%	8.410.938.837	35,20%	1.333.530.644	35,20%	1.333.530.644	35,20%	1.333.530.644	134,96%	9.127.683.693	134,96%	128,73%	
					2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				99,76%	6.690.237.595	100,00%	63.525.000	100,00%	-	100,00%	-	100,00%	-	99,76%	6.690.237.595			
					2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				99,76%	6.690.237.595	100,00%	7.040.160.587	10,00%	1.082.260.994	10,00%	1.082.260.994	10,00%	1.082.260.994	109,76%	7.772.498.589			
					2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				100,00%	1.103.915.454	100,00%	1.170.139.200	20,79%	243.284.800	20,79%	243.284.800	20,79%	243.284.800	120,79%	1.347.200.254			
					2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						100,00%	137.314.050	10,00%	7.984.850	10,00%	7.984.850	10,00%	7.984.850	10,00%	7.984.850			
	7	01	7.01.0.0.0.00.0.00		05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	94.842.639	100,00%	261.940.000	100,00%	258.610.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	261.940.000	100,00%	276,18%	
					2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100,00%	261.940.000	100,00%	258.610.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	261.940.000			
	7	01	7.01.7.01.7.01.01.00			KECAMATAN PALU UTARA		100,00%	11.823.616.237	98,22%	13.529.065.319	100,00%	15.036.010.505	17,40%	2.255.656.668	17,40%	2.255.656.668	17,40%	2.255.656.668	115,62%	15.784.661.987	115,62%	133,50%	KECAMATAN PALU UTARA
	7	01	7.01.7.01.7.01.01.00		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	5	6.050.133.999	97,57%	6.503.358.795	100,00%	7.825.570.657	9,00%	1.026.600.055	9,00%	1.026.600.055	9,00%	1.026.600.055	106,56%	7.529.958.850	#VALUE!	124,46%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	11.085.350	100,00%	17.125.900	7,50%	-	7,50%	-	7,50%	-	107,50%	11.085.350			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	4.355.352.998	100,00%	5.090.741.571	12,50%	722.525.865	12,50%	722.525.865	12,50%	722.525.865	112,50%	5.077.878.863			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				91,53%	808.480.051	100,00%	1.034.905.800	12,19%	60.095.575	12,19%	60.095.575	12,19%	60.095.575	103,73%	868.575.626			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	478.344.634	100,00%	210.250.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	478.344.634			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	543.395.962	100,00%	917.092.000	14,58%	159.678.615	14,58%	159.678.615	14,58%	159.678.615	114,58%	703.074.577			

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		9-6-8		12=11/5 x100%		13
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				93,87%	306.699.800	100,00%	555.455.386	7,21%	84.300.000	7,21%	84.300.000	7,21%	84.300.000	101,08%	390.999.800			
																				0,00%	-			
	7	01	7.01.7.01.7.01.01.00		02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik	27.456.374	100,00%	5.354.300	100,00%	7.116.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	5.354.300	#VALUE!	19,50%	
					2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan				100,00%	5.354.300	100,00%	7.116.200	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	5.354.300			
	7	01	7.01.7.01.7.01.01.00		03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan		5.677.384.929	95,32%	6.745.512.224	100,00%	6.970.923.648	25,79%	1.229.056.613	25,79%	1.229.056.613	25,79%	1.229.056.613	121,12%	7.974.568.837	#DIV/0!	140,46%	
					2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				98,71%	6.004.765.094	100,00%	6.047.628.048	30,51%	983.561.154	30,51%	983.561.154	30,51%	983.561.154	136,22%	6.988.326.248			
					2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				93,94%	740.747.130	100,00%	760.933.800	30,74%	233.915.459	30,74%	233.915.459	30,74%	233.915.459	124,68%	974.662.589			
					2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan						100,00%	162.361.800	7,13%	11.580.000	7,13%	11.580.000	7,13%	11.580.000	7,13%	11.580.000			
		01	7.01.7.01.7.01.01.00		05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100,00%	68.640.935	100,00%	274.780.000	100,00%	232.400.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	274.780.000	100,00%	400,32%	
					2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				100,00%	274.780.000	100,00%	232.400.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	274.780.000			
	8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM		100,00%	9.707.368.059	96,29%	13.119.834.787	100,00%	77.462.907.762	2,82%	630.814.197	2,82%	630.814.197	2,82%	630.814.197	99,11%	13.750.648.984	99,11%	141,65%	
	8	01	8.01.0.00.0.00.01.00			BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK		100,00%	9.707.368.059	96,29%	13.119.834.787	100,00%	77.462.907.762	2,82%	630.814.197	2,82%	630.814.197	2,82%	630.814.197	99,11%	13.750.648.984	99,11%	141,65%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	8.01.0.00.0.00.01.00		01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP OPD	B	4.069.979.407	98,53%	3.385.375.584	100,00%	4.080.250.963	13,30%	515.814.197	13,30%	515.814.197	13,30%	515.814.197	111,83%	3.901.189.781	#VALUE!	95,85%	
					2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				100,00%	192.780.291	100,00%	8.770.000	10,00%	-	10,00%	-	10,00%	-	110,00%	192.780.291			
					2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				100,00%	2.088.936.453	100,00%	2.620.707.563	8,33%	323.573.507	8,33%	323.573.507	8,33%	323.573.507	108,33%	2.412.509.960			
					2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				100,00%	1.840.800	100,00%	5.635.800	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	1.840.800			
					2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				100,00%	26.746.150	100,00%	30.808.150	32,03%	5.322.000	32,03%	5.322.000	32,03%	5.322.000	132,03%	32.068.150			
					2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				99,17%	308.610.808	100,00%	312.293.850	25,58%	47.762.673	25,58%	47.762.673	25,58%	47.762.673	124,75%	356.373.481			
					2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				100,00%	122.817.900	100,00%	175.043.900	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	122.817.900			
										0,00%	-									0,00%	-			
					2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				100,00%	440.103.234	100,00%	443.351.700	23,85%	90.977.337	23,85%	90.977.337	23,85%	90.977.337	123,85%	531.080.571			
					2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				89,10%	203.539.948	100,00%	483.640.000	6,60%	48.178.680	6,60%	48.178.680	6,60%	48.178.680	95,71%	251.718.628			
	8	01	8.01.0.00.0.00.01.00		02	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana	100,00%	3.018.275.475	98,20%	4.293.141.053	100,00%	3.810.148.195	3,65%	115.000.000	3,65%	115.000.000	3,65%	115.000.000	101,85%	4.408.141.053	101,85%	146,05%	
					2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				98,20%	4.293.141.053	100,00%	3.810.148.195	3,65%	115.000.000	3,65%	115.000.000	3,65%	115.000.000	101,85%	4.408.141.053			
	8	01	8.01.0.00.0.00.01.00		03	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dalamrangka pengembangan demokrasi Pancasil	80,00%	1.008.524.013	96,67%	3.412.112.050	100,00%	67.540.374.874	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96,67%	3.412.112.050	120,83%	338,33%	

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kabupaten/kota pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Pada Tahun 2024 Triwulan I		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/kota Tahun 2024 yang Dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/kota s/d Tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp	K	(Rp)	K	(Rp)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=11/5 x100%		13
					2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				96,67%	3.412.112.050	100,00%	67.540.374.874	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	96,67%	3.412.112.050			
	8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04		Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persasentase ormas yang ber-SKT dan Aktif	100,00%	57.025.883	100,00%	20.619.300	100,00%	45.179.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	20.619.300	0,00%	0,00%	
					2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan				100,00%	20.619.300	100,00%	45.179.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	20.619.300			
	8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05		Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	100,00%	1.319.128.950	89,33%	1.799.205.250	100,00%	1.541.769.450	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	89,33%	1.799.205.250	89,33%	136,39%	
					2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya				89,33%	1.799.205.250	100,00%	1.541.769.450	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	89,33%	1.799.205.250			
	8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan gangguan keamanan di Kota Palu	12,00%	234.434.331	95,00%	209.381.550	100,00%	445.185.280	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,00%	209.381.550	791,67%	89,31%	
					2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				95,00%	209.381.550	100,00%	445.185.280	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	95,00%	209.381.550			

Selain Evaluasi capaian probram diatas, Berikut ini ditampilkan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan Kota Palu yang dicapai melalui program prioritas RKPD Tahun 2021-2023 tertera pada tabel di bawah ini**:**

Tabel 2.132 Pencapaian Program OPD terhadap 53 Program Unggulan Pemerintah Kota Palu Tahun 2021-2023

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
BIDANG EKONOMI																												
4 Miliar Untuk Bedah Rumah + Modal Usaha																												
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																											
				1000	Rumah		47	Rumah	940.000.000	47	Rumah			68	Rumah	2.800.000.000	57	Rumah			350	Rumah	10.000.000.000	350	Rumah	10.000.000.000		
		Prg	Program Kawasan Permukiman																									
		Keg	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha																									
		Sub	Sub KegiatanPerbaikan Rumah Tidak Layak Huni																									
						Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya							Pembangunan Baru Rumah Swadaya Untuk Mayarakat Prasejahtera (DAK)																
						Kel. Pantoloan	32	Rumah	Rp640.000.000	32	Rumah	Rp640.000.000	Kelurahan Kabonena	18	Unit	Rp900.000.000	18	Unit	Rp900.000.000									
						Kel. Pantoloan Booya	15	Rumah	Rp300.000.000	15	Rumah	Rp300.000.000	Kelurahan Lambara	15	Unit	Rp750.000.000	15	Unit	Rp750.000.000									
													Kelurahan Poboya	15	Unit	Rp750.000.000	15	Unit	Rp750.000.000									
													Bantuan Bahan Bangunan Rumah Untuk Masyarakat (Kota Palu)																
													Kel. Pantoloan Boya, Kel. Baiay dan Dusun Wana	20	Unit	Rp400.000.000	9	Unit	Rp188.538.425									
		Prg	Program Perumahan Kawasan Permukiman Kumuh																									
		Keg	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota																									
		Sub	Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha																									
		-	Pembangunan Baru Rumah Swadaya (APBD)																Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (Bedah Rumah /Pembangunan Baru)	100	Rumah	Rp5.000.000.000	100	Rumah	Rp 5.000.000.000		Melengkapi dokumen persyaratan pengajuan pembayaran ke penerima bantuan dan Pembukaan Rekening Penerima Bantuan
		-	Rehabilitasi Rumah Swadaya (APBD)																Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (Bedah Rumah /Peningkatan Kualitas)	250	Rumah	Rp5.000.000.000	250	Rumah	Rp5.000.000.000		Melengkapi dokumen persyaratan pengajuan pembayaran ke penerima bantuan dan Pembukaan Rekening Penerima Bantuan
TOTAL				1000	Rumah		47	Rumah	940.000.000	47	Rumah	940.000.000		68	Rumah	2.800.000.000	57	Rumah	2.588.538.425		350		10.000.000.000	350		10.000.000.000	45,40%	
4 Miliar Untuk Bedah Rumah + Modal Usaha																												
	DINAS SOSIAL																											
		Prg	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial																									
		Keg	Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)										PPKS	1	Paket	1.658.181.750	1	Paket	Rp1.658.181.750	Dalam Rangka Pemberian Bantuan Peralatan dan Perlengkapan Kepada PPKS Rp. 2.034.337.322	3	paket	Rp2.034.337.322	3	paket	Rp2.031.354.700,00		
		Sub	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Tahun 2021 Untuk 322 Kube dan 2 UEP Rp.3.349.669.825							Tahun 2022 Untuk 127 kube	88	Kube	3.020.976.435	74	kelompok	Rp3.019.013.220	Tahun 2023 Untuk 140 Kube Rp.8.386.390.750								
		-	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1000	Rumah	Bantuan Modal Usaha/Sosial Uang (10 Juta/ Keluarga untuk 500 KK)	500	KK	5.000.000.000	499	KK	4.970.000.000	Stimulus	92	KK	Rp 230.000.000	90	KK	Rp225.000.000	Bantuan Modal Usaha/Sosial Uang (2,5 Juta/ Keluarga untuk 385 KK)	313	KK	Rp 782.500.000	312	kk	Rp 782.500.000		
																				Stimulus	85	KK	Rp 212.500.000	85	kk	Rp210.000.000,00		
																				Dana Gercep	339	KK	Rp 2.610.000.000	336	kk	Rp2.501.574.000,00		
													Bantuan Modal Usaha	392	KK	Rp3.920.000.000	392	kk	Rp3.920.000.000									
TOTAL				1000			500		Rp5.000.000.000	499		Rp4.970.000.000		573		Rp8.829.158.185	557		Rp8.822.194.970		740		Rp5.639.337.322	736		Rp5.525.428.700	179,20%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1	2	3	4		5				6				7				8				9				10				11	12
4 Miliar Untuk Bedah Rumah + Modal Usaha																														
	DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA																													
		Prg Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)												950	Orng (APBD)	Rp7.089.811.025	650	Org (APBD)	Rp3.167.032.545			1	Paket	Rp10.976.882.800	1	Paket	Rp10.521.947.600		
		Keg Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	5000	Orang / UMKM		1000	Orang	Rp283.003.625	1000	Orang	Rp220.873.775		Bantuan Modal Usaha 2 Juta/ UMKM untuk 2.950 UMKM	353	Orng (DID)		353	Org (DID)			Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu/UMKM 5,000,000 untuk 443 UMKM Dan 2000 UMKM Pemula			Rp10.976.882.800			Rp10.521.947.600			
		Sub Sub Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro												1003		Rp5.900.000.000	1003	UMKM	Rp2.006.000.000		Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu/UMKM 5,000,000 untuk 443 UMKM, 2.000.000 untuk 1853 UMKM			Rp6.497.708.000			Rp6.198.508.000			
		- Bantuan Bagi Usaha Mikro																			Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu/UMKM 5,000,000 untuk 443 UMKM, 2.000.000 untuk 1853 UMKM			Rp5.971.000.000			Rp5.676.000.000	36,31%	Bantuan Peralatan Usaha Produktif Berbasis kelompok dan Bantuan Lapak Jualan : 63 Orng (APBD) 15 Orng (PLN Peduli)
		Sub Sub Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro																						Rp4.479.174.800			Rp4.323.439.600			
																					Bantuan Jaminan Sosial Ketenegakerjaan bagi 22425 Pelaku UMKM			Rp4.369.606.400			Rp4.215.198.800			
		- Fasilitasi UMKM di 46 kelurahan																												
													Bantuan Jaminan Sosial Ketenegakerjaan bagi 22425 Pelaku UMKM dan Pendamping UMKM 46 Kelurahan (APBD)			Rp1.062.740.875			Rp1.032.023.435	Pendamping UMKM 46 Kelurahan (APBD)			Rp432.300.000			Rp430.050.000			
TOTAL			5000			1000		Rp283.003.625	1000		Rp220.873.775			2306		Rp14.052.551.900	2006		Rp6.205.055.980			1		Rp43.703.554.800	1		Rp41.887.091.600	60,14%	
INKUBATOR BISNIS DIGITAL PERKELURAHAN																														
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN																													
		Prg Program: Perencanaan dan Pembangunan Industri	46	Kelurahan																										
		Keg Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota	9202	Pelaku Usaha																										
		Sub: Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri			Publikasi usaha berbasis online dan Expo (Dekranasda) target 46 kelurahan dengan realisasi di 46 kelurahan	46	Kelurahan	Rp403.683.427	46	Kelurahan	Rp403.683.427																				
						1	Dokumen	Rp8.000.000	1	Dokumen	Rp8.000.000		Belanja Bahan Pelatihan	8	IKM	Rp8.000.000	8	IKM	Rp8.000.000	Galeri IKM di Pantoloan Boya - Suvenir/Cendera Mata Spesifikasi : Produk Kriya 17 Paket	17	paket	Rp25.500.000	8	paket	Rp12.150.000		Untuk Inkubator Bisnis, 1 Dokumen terdapat 8 IKM Binaan di masing masing Kecamatan
													Kegiatan pelatihan manajemen usaha	2	kali	Rp26.387.500	2	kali	Rp26.257.500	Kegiatan Pelatihan Peningkatan/Pengembangan IKM Kegiatan Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) IKM Bawang Goreng	5	kegiatan	Rp68.120.050	5	Kali	Rp68.120.050		
													Kegiatan pelatihan pemanfaatan market place	2	kali	Rp75.587.500	2	kali	Rp50.745.000	Pengembangan sentra IKM batik Kota Palu - Alat pendukung pembuatan batik (pasca pelatihan)	1	IKM	Rp53.809.000	1	IKM	Rp52.778.500		

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
		Prg	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	40	IKM																							
		Keg	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUMK) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA BERBASIS SISTEM INDUSTRI NASIONAL (SIINAS)	40	Izin																			
		Sub	FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN PEROLEHAN IUI,IPUI,IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN / KOTA DALAM SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL (SIINas) YANG TERINTEGRASI DENGAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERBASIS SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Penerbitan Dokumen Halal IKM Ke MUI dan Dokumen HAKI Paten Merek ke Kemenkumham					Rp174.114.680			Rp174.114.680	Fasilitasi Pembuatan NIB	1	kali	Rp9.230.000	1	kali	Rp9.230.000	Kegiatan sosialisasi fasilitasi halal	20	IKM	Rp9.675.000	20	IKM	Rp9.525.000		
																				Kegiatan sosialisasi Fasilitasi HAKI patent merk produk bagi IKM	20	IKM	Rp11.275.000	20	IKM	Rp10.225.000		
TOTAL				9282			47		Rp585.798.107	47		Rp585.798.107		13		Rp119.205.000	13		Rp94.232.500		63		Rp168.379.050	54		Rp152.798.550	95,36%	
INKUBATOR BISNIS DIGITAL PERKELURAHAN																												
	DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA																											
		Prg	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi																									
		Keg	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																									
		Sub	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Koperasi	Pelatihan Bagi 50 anggota koperasi	50	Koperasi	Rp81.006.250	45	Koperasi	Rp80.606.250	Pelatihan Digitalisasi Koperasi	50	Koperasi	Rp119.287.100	45	Koperasi	Rp119.287.100	Pelatihan Digitalisasi Koperasi dan Peluang Usaha	46	Koperasi	Rp127.092.200	46	Koperasi	Rp118.507.360		
TOTAL				200			50		Rp81.006.250	45		Rp80.606.250		50		Rp119.287.100	45		Rp119.287.100		46		Rp127.092.200	46		Rp118.507.360	97,26%	
INKUBATOR BISNIS DIGITAL PERKELURAHAN																												
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																											
		Prg	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	5	Kajian																							
		Keg	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan																									
		Sub	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah daerah			Kajian Potensi dan Strategi Manajemen Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Kota Palu	1	Kajian	Rp35.035.000	1	Kajian	Rp32.867.500	Kajian dan Penyusunan Roadmap Penerapan Inkubasi Bisnis berbasis Digital per-Kelurahan	1	Kajian	Rp134.766.400	1	Kajian	Rp112.816.300	Kajian Peningkatan Produksi Pertanian Tanaman Hortikultura Kota Palu	1	Kajian	Rp127.859.400	1	Kajian	Rp123.859.400		
													Penelitian Perakitan Varian Unggul Baru pada Bawang Merah Varietas Lembah Palu	1	Kajian	Rp171.251.200	1	Kajian	Rp169.251.200	Kajian Peningkatan Produksi Hasil Tangkapan Ikan Nelayan Kota Palu	1	Kajian	Rp124.999.700	1	Kajian	Rp122.011.700		
		Keg	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi																									
		Sub	Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi										Fasilitasi Difusi Inovasi kepada Masyarakat melalui Lomba Kelurahan Inovasi Tingkat Masyarakat	1	Laporan	Rp54.850.350	1	Laporan	Rp54.588.750	Fasilitasi Difusi Inovasi kepada Masyarakat melalui Lomba Kelurahan Inovasi Tingkat Masyarakat	1	Kegiatan	Rp57.124.100	1	Kegiatan	Rp57.024.200		
TOTAL				5			1		Rp35.035.000	1		Rp32.867.500		3		Rp360.867.950	3		Rp336.656.250		3		Rp252.859.100	3		Rp245.871.100	94,86%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
INKUBATOR BISNIS DIGITAL PERKELURAHAN																											
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																										
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika																									
		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																									
		Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah daerah	87	OPD		87	OPD/KEC/KEL		87	OPD/KEC/KEL			87	OPD/KEC/KEL		87	OPD/KEC/KEL			87	OPD/KEC/KEL							
			46	Taman Kelurahan	Belanja Sewa Bandwidth untuk OPD dan Taman Kelurahan (20 kelurahan)	20	Taman Kelurahan	Rp2.940.699.988	20	Taman Kelurahan	Rp2.940.699.988	Belanja Sewa Bandwidth untuk OPD dan Taman Kelurahan (46 kelurahan)	46	Taman Kelurahan	Rp3.422.000.000	46	Taman Kelurahan	Rp3.364.700.000	Belanja Sewa Bandwidth untuk OPD dan Taman Kelurahan (46 kelurahan)	46	Taman Kelurahan	Rp3.422.700.000	46	Taman Kelurahan	Rp3.422.700.000	100,00%	
TOTAL			46			20		Rp2.940.699.988	20		Rp2.940.699.988		46		Rp3.422.000.000	46		Rp3.364.700.000		46		Rp3.422.700.000	46		Rp3.422.700.000	99,41%	
PENGUATAN UMKM																											
	KECAMATAN PALU TIMUR																										
		PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																									
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
		Pemberdayaan Kelurahan																									
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		Bantuan KUBE-KUBE			Bantuan KUBE-KUBE	5	KUBE	Rp89.319.000	5	KUBE	Rp89.319.000	Bantuan KUBE-KUBE	8	KUBE		8	KUBE		Bantuan KUBE-KUBE	9	KUBE	181.526.204	9	KUBE	181.526.204	100,00%	
TOTAL			0			5		Rp89.319.000	5		Rp89.319.000		8		Rp0	8		Rp0		9		Rp181.526.204	9		Rp181.526.204	100,00%	
PENGUATAN UMKM																											
	KECAMATAN PALU BARAT																										
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
		Keg Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		- - Bantuan KUBE-KUBE																	Pelatihan Pengolahan Ikan dan sejenisnya Kel. Lere	1	Kegiatan	5.584.950	1	Kegiatan	5.540.500	99,20%	
																			Bantuan Kemasyarakatan Kel. Lere	1	Kegiatan	74.431.100	1	Kegiatan	69.861.500	93,86%	
																			Pelatihan Dasar Menjahit Gorden, Seprei, Dan Prakarya Ujuna	1	Kegiatan	20.902.250	1	Kegiatan	20.530.500	98,22%	
																			Pelatihan Dasar Membuat Rangka Kursi Rotan (Kel.Ujuna)	1	Kegiatan	22.695.400	1	Kegiatan	22.695.400	100,00%	
																			Bantuan Kemasyarakatan Kel. Ujuna	1	Paket	17.500.000	1	Kegiatan	17.500.000	100,00%	
																			Bantuan Kemasyarakatan Kel. Siranindi	2	Unit	6.000.000	1	Kegiatan	6.000.000	100,00%	
																			Bantuan Kemasyarakatan Kel. Baru	1	Kegiatan	8.623.500	1	Kegiatan	8.623.500	100,00%	
																			Bantuan Usaha KUBE Kel. Kamonji	2	Kelompok Usaha	18.687.500	2	Kube	16.337.500	87,42%	
TOTAL			0			0		Rp0	0		Rp0		0		Rp0	0		Rp0		10		Rp174.424.700	9		Rp167.088.900	95,79%	
PENGUATAN UMKM																											
	KECAMATAN ULUJADI																										
		Prg PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																									
		Keg Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		- - Bantuan KUBE-KUBE				9	KUBE	Rp208.501.200	9	KUBE	Rp208.501.200		5	KUBE	Rp177.000.000	5	KUBE	Rp177.000.000		6	KUBE	Rp26.025.000	6	KUBE	Rp26.025.000		
TOTAL			0			9		Rp208.501.200	9		Rp208.501.200		5		Rp177.000.000	5		Rp177.000.000		6		Rp26.025.000	6		Rp26.025.000	100,00%	
PENGUATAN UMKM																											
	KECAMATAN MANTIKULORE																										
		Prg Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																									
		Keg Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Pelatihan dan Bantuan Kube	1	Paket	Rp87.216.710	1	Paket	Rp87.216.710	Pelatihan dan Bantuan Kube	1	Paket	Rp203.293.000	1	Paket	Rp201.354.950	Pelatihan dan Bantuan Kube	1	Paket	Rp6.910.000	1	Paket	Rp6.910.000		
TOTAL			0			1		Rp87.216.710	1		Rp87.216.710		1		Rp203.293.000	1		Rp201.354.950		1		Rp6.910.000	1		Rp6.910.000	99,35%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1	2		3	4		5				6				7				8				9				10				11	12
PENGUATAN UMKM																															
	KECAMATAN TATANGA																														
		Prg	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																												
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																												
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	28	Lembaga		11	Lembaga	Rp127.000.000	7	Lembaga	Rp127.000.000			10	Lembaga	Rp408.006.125	9	Lembaga	Rp408.006.125			7	Lembaga	154.102.475	7	Lembaga	154.102.475		Anggaran Kas Bulan Oktober
																						Bantuan Usaha KUBE Jati Baru			Rp52.349.000			Rp52.349.000		
																						Pengadaan Bantuan Kegiatan Kemasyarakatan Kel. Tavanjuka			Rp18.685.000			Rp18.685.000		
																						Pelatihan UMKM			Rp7.060.000			Rp7.060.000		
																						Pemberdayaan Masyarakat Pembuatan Food Court			61.239.500			61.239.500		
																						Pemberdayaan Masyarakat dalam rang mendukung kegiatan TPK Pembuatan kue kering			Rp3.608.975			Rp3.608.975		
																						Pemberdayaan Masyarakat Penjahit			Rp6.000.000			Rp6.000.000		
																						Pelatihan UMKM			Rp5.160.000			Rp5.160.000		
TOTAL				28			11		Rp127.000.000	7		Rp127.000.000			10		Rp408.006.125	9		Rp408.006.125			7		Rp154.102.475	7		Rp154.102.475	100,00%	
PENGUATAN UMKM																															
	KECAMATAN TAWAELI																														
		Prg	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																												
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																												
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																												
			- Bantuan KUBE-KUBE				8	KUBE	Rp121.848.500	8	KUBE	Rp121.848.500			1	KUBE	Rp20.000.000	1	KUBE	Rp20.000.000			3	KUBE	25.295.000	3	KUBE	25.295.000		
TOTAL				0			8		Rp121.848.500	8		Rp121.848.500			1		Rp20.000.000	1		Rp20.000.000			3		Rp25.295.000	3		Rp25.295.000	100,00%	
PENGUATAN UMKM																															
	KECAMATAN PALU UTARA																														
		Prg	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																												
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																												
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																												
			- Bantuan KUBE-KUBE				2	KUBE	Rp43.789.300	2	KUBE	Rp43.789.300			3	KUBE	Rp47.674.771	3	KUBE	Rp47.674.771			0	KUBE	Rp0	0	KUBE	Rp0		
TOTAL				0			2		Rp43.789.300	2		Rp43.789.300			3		Rp47.674.771	3		Rp47.674.771			0		Rp0	0		Rp0	100,00%	
PENGUATAN UMKM																															
	KECAMATAN PALU SELATAN																														
		Prg	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan																												
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan															5	Kelurahan												
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			Bantuan Kube	8	KUBE	Rp135.050.600	8	KUBE	Rp135.050.600		Pelatihan dan Bantuan Kube melalui dana kelurahan 3	5	Kelurahan	Rp500.776.578	4	KUBE	Rp362.514.765		Bantuan Kube						Rp0		Revisi/ perubahan
TOTAL				0			8		Rp135.050.600	8		Rp135.050.600			5		Rp500.776.578	4		Rp362.514.765			0		Rp0	0		Rp0	78,25%	
PENGUATAN UMKM																															
	DINAS SOSIAL																														
		Prg	Perlindungan dan Jaminan Sosial																												
		Keg	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																												
		Sub	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat			Bantuan KUBE 322 Kelompok	74	Kelompok	Rp3.188.535.375	74	Kelompok	Rp3.188.535.375		Bantuan KUBE 88 Kelompok Rp.3.020.976.435	74	Kelompok	Rp3.020.976.435	74	Kelompok	Rp3.019.013.220		Bantuan KUBE Rp. 8.386.390.750	215	kelompok	##########	215	kelompok	Rp7.895.290.890,00		tersalurkan berdasarkan pengajuan proposal yang masuk tw II
TOTAL				0			74		Rp3.188.535.375	74		Rp3.188.535.375			74		Rp3.020.976.435	74		Rp3.019.013.220			215		Rp8.386.390.750	215		Rp7.895.290.890	96,62%	
PENGUATAN UMKM																															
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN																														
		Prg	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional																												
		Keg	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota																												
		-	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas			kegiatan rakornas dekranasda	1	Kegiatan	Rp403.683.427	1	Kegiatan	Rp403.683.427		kegiatan sosialisasi pengolahan data industri & fasilitasi halal ikm	1	Kegiatan	Rp7.487.500	1	Kegiatan	Rp7.487.500		Kegiatan Sosialisasi Pengolahan Data Industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	1	Kali	37.657.200	1	Kali	33.604.200	100,00%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
		Prg Program: Perencanaan dan Pembangunan Industri																									
		Keg Kegiatan : Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kota																									
		Sub 'Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri										fasilitasi perolehan dokumen halal IKM ke MUI 20 IKM	20	IKM	Rp37.500.000	20	IKM	Rp37.500.000									
												Bantuan alat ke 35 IKM	35	IKM	Rp834.848.500	35	IKM	Rp834.848.500	Pelatihan Peningkatan/Pengembangan IKM	6	kali	100.426.700	6	kali	97.270.050	100,00%	- Manajemen operasional, literasi keuangan sederhana bagi IKM Pengenalan Bisnis Model Canvas, Pengenalan dan teknik Foto Produk Menggunakan Produk, Tips Clean Desain, Beginner digital marketing untuk 20 IKM dalam 1 kali Pelatihan
		Sub Sub: Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri										Bantuan alat ke 35 IKM	35	IKM	Rp834.848.500	35	IKM	Rp834.848.500	Kegiatan Sosialisasi SNI	1	paket	Rp0	0	paket	Rp0		
		Sub Sub: Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat										Bantuan alat ke 35 IKM	35	IKM	Rp834.848.500	35	IKM	Rp834.848.500	bantuan barang dan peralatan kebutuhan kelompok/ikm	103	paket	4.292.194.619	91	paket	3.789.121.392	88,35%	
																			Pameran IKM	5	Kali	Rp55.980.000	3	Kali	Rp23.160.000	60,00%	
		Sub Sub: Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri										Bantuan alat ke 35 IKM	35	IKM	Rp834.848.500	35	IKM	Rp834.848.500	Pameran DEKRANASDA, promosi produk IKM dan STQ/MTQ	8	kali	Rp868.525.000	5	kali	Rp337.170.330	62,50%	
TOTAL			0			1		Rp403.683.427	1		Rp403.683.427		161		Rp3.384.381.500	161		Rp3.384.381.500		124		Rp5.354.783.519	106		Rp4.280.325.972	88,25%	
PENGUATAN UMKM																											
	DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA																										
		Prg Program Pengembangan UMKM																									
		Keg Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil																									
		Sub Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	23375	UMKM		46	Kelurahan	Rp188.569.725	46	Kelurahan	Rp118.430.225		52	UMKM	Rp1.447.879.650	52	UMKM	Rp1.412.620.600		1	Paket	3.361.141.364	1	Paket	3.131.565.650	67,58%	
			1509	IKM		272	UMKM		272	UMKM		Pendampingan UMKM dan Pelatihan Kegiatan Kewirausahaan bagi Usaha Pemula di 46 Kelurahan serta sertifikasi halal	132			132	IKM			1	Paket	3.361.141.364	1	Paket	3.131.565.650		
															Rp682.700.875			Rp682.700.875									
						75	IKM		75	IKM		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Untuk 50 Kelompok UMKM	50			50	UMKM		Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Untuk 27 Kelompok UMKM	1	Paket	Rp637.200.000			Rp637.200.000		
						75	UMKM		75	UMKM					Rp1.376.700.000			Rp1.376.700.000	Bantuan Kompensasi Terhadap UMKM yang direlokasi			400.000.000			400.000.000		
		Prg Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi																									
		Keg Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																									
		Sub Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	200	Koperasi				Rp90.204.075			Rp88.610.775	Kegiatan Pelatihan Penyusunan Profil Resiko dan Dokumen Pendukung Bagi Koperasi			Rp126.883.875			Rp122.373.235	Kegiatan Bimtek Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam Bagi Koperasi	1	Paket	105.538.900	1	Paket	99.324.900	52,00%	
TOTAL			23575			422		Rp278.773.800,00	422		Rp207.041.000,00		234		Rp3.634.164.400,00	234		Rp3.594.394.710,00		4		Rp7.865.021.628,00	3		Rp7.399.656.200,00	95,10%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
REVITALISASI PERPARKIRAN KOTA PALU																												
	DINAS PERHUBUNGAN																											
		Prg	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																									
		Keg	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																									
		Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	201	Titik Parkir		50	Titik Parkir		50	Titik Parkir			50	Titik Parkir		50	Titik Parkir			5	Titik Parkir			5				
						Pemetaan Lokasi Parkir Tepi Jalan dan Lokasi Khusus			Rp531.344.151			Rp400.290.614	Pengembangan Smart Parking		Titik Parkir	Rp1.020.500.000			Rp1.020.500.000	Pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan & Pembangunan Fasilitas Parkir			Rp1.200.898.700			Rp1.168.433.960			
TOTAL				201			50		Rp531.344.151,00	50		Rp400.290.614,00		50		Rp1.020.500.000,00	50		Rp1.020.500.000,00		5		Rp1.200.898.700,00	5		Rp1.168.433.960,00	94,06%	
REVITALISASI PERPARKIRAN KOTA PALU																												
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																											
		Prg	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																									Keterlambatan dalam penerbitan SK Tenaga Ahli Kajian menyebabkan terhambatnya pelaksanaan rencana aksi diawal Semester I TA. 2023, sehingga capaian kinerja fisik dan serapan anggaran menjadi rendah.
		Keg	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																									
		Sub	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	2	Kajian	-	0	-	-	0	-	-	Kajian dan Analisis Kontribusi Retribusi Parkir terhadap Peningkatan PAD Kota Palu	1	Kajian	Rp125.679.775	1	Kajian	Rp110.028.465	Kajian Pengelolaan dan Penataan Perparkiran di Pinggir Jalan Kota Palu	1	Kajian	Rp186.993.800	1	Kajian	Rp174.522.120	100,00%	
TOTAL				2			0		Rp0	0		Rp0		1		Rp125.679.775	1		Rp110.028.465		1		Rp186.993.800	1		Rp174.522.120	100,00%	
REFORMASI DAN REVITALISASI MODA TRANSPORTASI																												
	DINAS PERHUBUNGAN																											
		Prg	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)																									
		Keg	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										Aplikasi Online Angkutan Smart City; Aplikasi Online Angkutan Smart City ;	1	Aplikasi	Rp199.000.000	1	Aplikasi	Rp199.000.000	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Spesifikasi : Belanja Subsisdi Insentif Supir Angkot - Belanja Bantuan Sosial Uang	40	Orang	Rp75.600.000	40	Orang	Rp75.600.000		
		Sub	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Pengembangan Moda Angkutan Massal Manajemen	1	Paket	Rp164.457.600	1	Paket	Rp122.382.000	Hibah Pengadaan Angkutan Umum dan Upah Supir			Rp2.819.000.000	0	Unit	Rp2.819.000.000									
													Pengadaan GPS Tracker	40	Unit	Rp100.000.000	40	Unit	Rp100.000.000									
TOTAL				0			1		Rp164.457.600	1		Rp122.382.000		41		Rp3.118.000.000	41		Rp3.118.000.000		40		Rp75.600.000	40		Rp75.600.000	98,75%	
REFORMASI DAN REVITALISASI MODA TRANSPORTASI																												
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																											
		Prg	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																									
		Keg	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																									
		Sub	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	Kajian	Kajian Model Penanganan Moda Transportasi Darat di Kota Palu	1	Kajian	Rp75.960.900	1	Kajian	Rp70.960.900																100,00%	
TOTAL				1			1		Rp75.960.900	1		Rp70.960.900		0		Rp0	0		Rp0		0		Rp0	0		Rp0	100,00%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
KAWASAN EKONOMI KREATIF DAN WISATA RELIGI																											
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																										
		Prg Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																									
		Keg Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																									Pelaksanaan Kajian Peningkatan Potensi Kepariwisataan Kota Palu TA. 2023 tidak dapat direalisasikan disebabkan output dari kajian tersebut belum mendukung upaya pencapaian program prioritas daerah di tahun 2023.
		Sub Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	3	Kajian	Identifikasi Potensi Wisata Religi di kota Palu	1	Kajian	Rp29.380.000	1	Kajian	Rp29.380.000	Kajian dan Penyusunan Roadmap Pengembangan Kawasan Ekonomi Kreatif dan Wisata Religi di Kota Palu	1	Kajian	Rp140.524.400	1	Kajian	Rp139.297.146	Kajian Peningkatan Potensi Kepariwisataan Kota Palu	1	Kajian	Rp199.999.850	0	Kajian	Rp13.500.350	66,67%	
TOTAL			3			1		Rp29.380.000	1		Rp29.380.000		1		Rp140.524.400	1		Rp139.297.146		1		Rp199.999.850	0		Rp13.500.350	66,67%	
KAWASAN EKONOMI KREATIF DAN WISATA RELIGI																											
	DINAS PARIWISATA																										
		Prg Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif																									
		Keg Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar																									
		Sub Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	4	Event	Kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Palu	1	Event	Rp229.008.275	1	Event		Kegiatan Hari Ulang Tahun Kota Palu	3	Event	Rp778.262.525	3	Event			15	Paket Alat Musik	Rp891.766.760	15	Paket Alat Musik	Rp184.261.260		
										Tidak Ada		Kegiatan APEKSI Tahun 2022	4	Kali	Rp403.400.000	4	Kali	Rp403.400.000	Jasa Penyelenggara	1	Kegiatan Festival Film	Rp195.000.000	1	Kegiatan Festival Film	Rp194.846.500		Dana PAD
					Alat Musik	1	Paket	Rp229.008.275	1	Paket	Rp225.825.975	Kegiatan Penjemputan Tamu	35	Lembar	Rp15.925.000	35	Lembar	Rp15.925.000	Alat Musik Yang diserahkan Untuk Masyarakat	15	Alat Musik (Bantuan Sanggar Senin	Rp914.217.760	15	Alat Musik (Bantuan Sanggar Seni)	Rp911.864.000		Dana PAD
		Forum Komunitas Kreatif Kota Palu								Tidak Ada		Kegiatan Go Star Up (Sosialisasi dari KemenpaRekraf) Komunitas Ekonomi Kreatif	1	Kali	Rp50.000.000	1	1	Rp50.000.000	Modal Alat Musik	4	Alat Musik	Rp262.217.760	4	Berganti jenis belanja menjadi alat musik yang diserahkan untuk masyarakat	Rp262.217.760		Dana PAD
		Prg Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata																									
		Keg Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																									
		Sub Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										Pemutakhiran Data	1	Paket Kegiatan	Rp15.600.000	Pemutakhiran Data		Rp15.600.000	Penetapan, Penataan dan Peningkatan sebagai Landmark Kota Tua								Digeser tahun ke 2024
				Kali	Sosialisasi Pembinaan Kelompok Sadar Wisata 4 Kelurahan	4	Kali	Rp315.528.610	4	Kali	Rp315.528.610	Konsultasi RIPARKOT	1	Paket Kegiatan	Rp500.000.000	Konsultasi RIPARKOT		Rp500.000.000	Gazebo Kuliner Uta Rono	5	Unit	Rp49.980.000	2	Unit	Rp49.972.000	100,00%	Dari 7 unit menjadi 5 unit
		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota		Paket	Sosialisasi dan Perencanaan City Branding	1	Paket	Rp140.000.000	1	Paket	Rp140.000.000								Sou Pagape Area Wisata Likuifaksi	5	Sou pagape	Rp50.940.317	5	Sou pagape	Rp49.950.000		
																			Pembuatan dan Pemasangan Penanda/Tugu	1	Paket	Rp15.000.000	1	Unit	Rp15.000.000	100,00%	Dana PAD
		Kawasan Agrowisata - Peningkatan SDM Pelatihan POKDARWIS	3	Paket	- Kampung Ose Lambara	1	Paket	Rp265.496.940	1	Paket	Rp190.031.670																Dana Non APBD
					-Kampung Anggur Duyu	0	Paket																					
					-Budidaya Ikan Kabonena dan Tipo	0	Paket																					

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
		Prg Program Pemasaran Pariwisata																									
		Keg Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota										Kegiatan Festival Raodha	1	Paket	Rp150.000.000	1	Paket	Rp150.000.000	Kegiatan Festifal RAODHA	1	Kegiatan	Rp150.000.000	1	Kegiatan	Rp149.768.000	100,00%	Dana PAD
												Kegiatan Festival Mandura	1	Paket	Rp50.000.000	1	Paket	Rp49.987.500	Kegiatan Festifal Sahur-sahur	1	Kegiatan	Rp50.000.000	1	Kegiatan	Rp49.850.000	100,00%	Dana PAD
												Kegiatan Festival Tangga Banggo RP. 50.000.000	1	Paket	Rp50.000.000	1	Paket	Rp49.962.500									
												DUTA WISATA	1	Paket	Rp20.000.000	1	Paket	Rp20.000.000									
												Festifal DEKRANASDA Vatulemo Fast	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp100.000.000									
												Go Star Up	1	Paket	Rp50.000.000	1	Paket	Rp49.953.440									
												Rp. 420.000.000			Rp420.000.000												
TOTAL			7			8		Rp1.179.042.100	8		Rp871.386.255		51		Rp2.603.187.525	49		Rp1.404.828.440		47		Rp2.579.122.597	45		Rp1.867.729.520	65,14%	
KAWASAN EKONOMI KREATIF DAN WISATA RELIGI																											
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH																										
		Prg Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																									
			1	Kegiatan	Kegiatan Festifal RAODHA								1	Kegiatan	Rp157.950.000	1	Kegiatan	Rp157.950.000	Kegiatan Festifal RAODHA	1	Kegiatan	Rp72.000.000	1	Kegiatan	Rp72.000.000		
TOTAL			1			0		Rp0	0		Rp0		1		Rp157.950.000	1		Rp157.950.000		1		Rp72.000.000	1		Rp72.000.000	100,00%	
KAWASAN EKONOMI KREATIF DAN WISATA RELIGI																											
	DINAS PEKERJAAN UMUM																										
		Prg Program Penataan Bangunan Gedung																									
		Keg Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan																									
		Sub Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	2	Lapak UMKM								Pembangunan Lapak di Jl. Abdul Rahman Saleh Rp. 91.595.650	2	Lapak UMKM	Rp91.595.650	2	Lapak UMKM	Rp91.595.650	Penataan UMKM Ujuna	1	kegiatan	Rp600.000.000	1	kegiatan	Rp600.000.000		
												Pembangunan Lapak di Jl. Gunung Bosa Rp. 260.900.000			Rp260.900.000			Rp260.900.000	Penataan UMKM Belakang UNTAD	1	kegiatan	Rp400.000.000	1	kegiatan	397.065.000		
TOTAL			2			0		Rp0	0		Rp0		2		Rp352.495.650	2		Rp352.495.650		2		Rp1.000.000.000	2		Rp997.065.000	99,78%	
AGROWISATA LAYANA DAN PETOBO																											
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
		Sub Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	2	Kawasan Agrowisata	Pembenahan UPTD Perbenihan Petobo untuk Pioner penyediaan Bibit di Agrowisata Petobo	1	kegiatan		1	Keg		Penambahan Pohon Induk Tanaman Buah dan Perbaikan Sarana Pengairan	1	Keg	Rp49.230.180	1	Keg	Rp49.230.180	Pembibitan Tanaman Obat, Sayuran semusim dan Perbanyakan bibit tanaman mangga	1	Keg	Rp57.131.370	1	Keg	Rp56.952.070		
		Sub Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman			Pembenahan UPTD Baiya untuk Pioner penyediaan Bibit di Agrowisata Petobo	1	Keg		1	Keg		Perbaikan Lab Cultur Jaringan untuk penyediaan bibit pisang	1	Keg	Rp76.040.050	1	Keg	Rp76.040.050	Perbaikan sarana pengairan dan bahan pembibitan	1	Keg	Rp99.866.034	1	Keg	Rp99.866.034		
		Sub Pemanfaatan SDG Hewan/tanaman			Masterplan Pertanian Kota Palu			Rp600.000.000			Rp600.000.000								Desain Perencanaan Agrowisata Petobo								Status Lahan Masih Zona Merah
		Sub Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain										Pembenahan Pusyantep Layana sbg Pioner Agrowisata Peternakan	1	Keg	Rp76.755.650	1	Keg	Rp76.755.650	Pengadaan Bibit domba endemik, Kebun HMT, Perbaikan Kandang			Rp181.662.000			Rp181.662.000		Pengadaan Domba dan Perbaikan Kandang Dalam Proses pelaksanaan
																			Desain Perencanaan Agrowisata Layana								Status Lahan Belum Jelas
TOTAL			2			2		Rp600.000.000	2		Rp600.000.000		3		Rp202.025.880	3		Rp202.025.880		2		Rp338.659.404	2		Rp338.480.104	99,98%	
REVITALISASI PASAR BERBASIS SEGMENTASI																											
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN																										
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan																									
		1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																									
		- Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Pasar																								
			Talise (Unggas)			1	Paket	Rp740.400.000	1	Paket	Rp740.400.000	Pembangunan Pasar Segmentasi (Pasar Talise) Kota Palu	1	Paket		1	Paket		Lanjutan pembangunan pasar tematik tahap II - Gedung Negara Spesifikasi : Sederhana	1	Paket	Rp198.528.000	1	Paket	Rp198.200.000	100,00%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026	Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
				Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5				6				7				8				9				10			11	12
			lasoani (Pasar Bahan Bekas-Cakar)	Pemeliharaan Pasar Mamboro			Rp50.000.000			Rp50.000.000		Revitalisasi/Operasional Pasar Bambaru	1	Paket	Rp2.049.485.000	1	Paket	Rp2.049.485.000		Pembangunan Pasar Tematik Tavanjuka Kota Palu (Pasar khusus kerajinan, tanaman hias dan buah) - Gedung Negara Spesifikasi : Sederhana + Perkuatan Struktur	1	paket	Rp460.066.500		1	paket	Rp409.380.023	100,00%	
			Tavanjuka (Bunga dan Buah)	Perbaikan Pintu (Rolling Door) Kios Pasar Tavanjuka			Rp54.000.000			Rp54.000.000		Rehab Pasar Mamboro	1	Paket	Rp195.000.000	1	Paket	Rp195.000.000		Rehab gedung pasar Kota Palu Gedung Negara - Spesifikasi : Sederhana	1	paket	Rp198.734.800		1	Paket	Rp197.911.000	100,00%	
			Mamboro (Pasar Ikan) Dinas Pertanian	Renovasi Kamar Mandi Pasar Vinase			Rp45.000.000			Rp45.000.000		Rehab Pasar Vinase								Rehab pasar ikan pasar mamboro Gedung Negara - Spesifikasi : Sederhana	1	paket	Rp99.987.800		1	Paket	Rp98.529.000	100,00%	
				Rehabilitasi Pasar Rakyat Masomba			Rp195.000.000			Rp195.000.000										Rehab WC Pasar Kota Palu - Gedung Negara Spesifikasi : Sederhana	1	paket	Rp51.700.000		1	Paket	Rp49.682.000	100,00%	
				Pembuatan Embrio Pasar Buah Pasar Manonda			Rp196.700.000			Rp196.700.000										Pembangunan Pasar Tematik Tavanjuka Kota Palu (Pasar khusus kerajinan, tanaman hias dan buah)	1	paket	Rp50.000.000		1	Paket	Rp24.920.000	100,00%	
TOTAL			0		1		Rp1.281.100.000	1		Rp1.281.100.000			3		Rp2.244.485.000	3		Rp2.244.485.000			6		Rp1.059.017.100		6		Rp978.622.023	98,25%	
REVITALISASI PASAR BERBASIS SEGMENTASI																												
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																											
		Prg Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																										
		Keg Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																										
		Sub Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	Kajian	Kajian Studi Kelayakan Pasar Tematik di 10 Pasar Tradisional se-Kota Palu	1	Kajian	Rp173.715.100	1	Kajian	Rp173.715.100																100,00%	
TOTAL			1		1		Rp173.715.100	1		Rp173.715.100			0		Rp0	0		Rp0			0		Rp0		0		Rp0	100,00%	
REVITALISASI PASAR BERBASIS SEGMENTASI																												
	DINAS PEKERJAAN UMUM																											
		Prg Program Penataan Bangunan Gedung																										
		Keg Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan																										
		Sub Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	1	Gedung	Revitalisasi Pasar Bambaru Rp. 17.807.499.000	1	Gedung	Rp17.807.499.000	1	Gedung	Rp17.807.499.000																		
TOTAL			1		1		Rp17.807.499.000	1		Rp17.807.499.000			0		Rp0	0		Rp0			0		Rp0		0		Rp0	100,00%	
WISATA PASAR IKAN KOTA PALU																												
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																											
		- Penyusunan Dokumen		1 Wisata Pasar Ikan								Perencanaan Wisata Pasar Ikan Rp.100.000.000	1	Dokumen	Rp100.000.000		Masih Menunggu RIPARKOT			Fisibilty Study dan DED Tempat Pendaratan Ikan	1	Pkt	Rp100.000.000		1	Pkt	Rp99.020.000		Dokumen FS dan DED Tempat Pendaratan Ikan di Taipa
TOTAL			0		0		Rp0	0		Rp0			1		Rp100.000.000	0		Rp0			1		Rp100.000.000		1		Rp99.020.000	49,51%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
1000 PERAHU UNTUK NELAYAN KOTA PALU																											
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																										
		Sub Penjamian Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	300	Perahu	Pengadaan Bahan Gillnet Rp.123.200.000	28	Paket	Rp123.200.000	28	Paket	Rp123.200.000	5 unit Kapal 5 GT dan 63 unit perahu jukung Total Rp. 2.160.000.000 setara = 113 perahu jukung	68	Unit	Rp2.160.000.000	68	Unit	Rp2.160.000.000	Direvisi Menjadi 62 Unit Perahu Fiber Total Rp. 1.926.960.000 setara = 80 perahu jukung	62	Unit	Rp1.709.400.000	62	Unit	Rp1.709.400.000	63,33%	Sampai dengan 2023 Jumlah Perahu setara 193 Unit 64,33% (1 Kapal 5 GT setara = 10 Perahu) Kekurangan perahu 107 unit
			(Jumlah Nelayan : 1363 Orang)																								
			Nelayan Perahu : 1115 org																								
			Nelayan Non Perahu : 248 org																alat tangkap / alat bantu peangkapan Ikan : bahan gilnet 41 pkt, pancing 30 pkt, AKI 10 unit, Lampu LED 10 unit, sero ikan 6 pkt, alat penjemuran ikan (bambu) 350 btg Total Rp. 411.500.000	493	unit	Rp768.849.280	493	unit	Rp764.387.507		
			Nelayan yang belum memiliki perahu 349 Orang Nelayan yang sudah memiliki perahu 766 Orang																								
TOTAL			300			28		Rp123.200.000	28		Rp123.200.000		68		Rp2.160.000.000	68		Rp2.160.000.000		555		Rp2.478.249.280	555		Rp2.473.787.507	99,91%	
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH																											
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																										
		Prg Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																									Keterlambatan dalam penerbitan SK Tenaga Ahli Kajian menyebabkan terhambatnya pelaksanaan rencana aksi diawal Semester I TA. 2023, sehingga capaian kinerja fisik dan serapan anggaran menjadi rendah.
		Keg Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																									
		Sub Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	2	Kajian								Kajian Pengembangan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	1	Kajian	Rp268.286.500	1	Kajian	Rp262.067.200	Kajian Pengembangan KEK Kota Palu	1	Kajian	Rp95.847.100	1	Kajian	Rp93.965.750	100,00%	
TOTAL			2			0		Rp0	0		Rp0		1		Rp268.286.500	1		Rp262.067.200		1		Rp95.847.100	1		Rp93.965.750	100,00%	
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH																											
	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN																										
		Prg Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen																									
		Keg Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan																									
		Sub Sub: Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				2100	UTTP	Rp134.870.620	2500	UTTP	Rp134.870.620		2300	UTTP	Rp471.665.840	2566	UTTP	Rp400.454.840		1985	UTTP	Rp49.350.000	490	UTTP	Rp49.150.000	100,00%	
TOTAL			0			2100		Rp134.870.620	2500		Rp134.870.620		2300		Rp471.665.840	2566		Rp400.454.840		1985		Rp49.350.000	490		Rp49.150.000	87,02%	
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH																											
	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																										
		Prg Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																									
		Keg Administrasi Tata Pemerintahan																									
		Sub Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah										Kegiatan APEKSI	1	Kegiatan	Rp107.056.000	1	Kegiatan	Rp107.056.000	Kegiatan APEKSI	1	Kegiatan	Rp153.073.000	1	Kegiatan	Rp153.073.000		
TOTAL			0			0		Rp0	0		Rp0		1		Rp107.056.000	1		Rp107.056.000		1		Rp153.073.000	1		Rp153.073.000	100,00%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
FORUM KOMUNITAS KREATIF KOTA PALU																												
	DINAS PARIWISATA																											
		Prg	Program Pemasaran Pariwisata																									
		Keg	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota																									
		Sub	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	15	Paket Kegiatan														Tangga Banggo	1	Paket	Rp100.000.000,00	1	Paket	Rp99.768.000,00	100,00%	September
																				MANDURA (KAMPUNG BARU FAIR)	1	Paket	Rp175.000.000,00	1	Paket	Rp174.725.000,00	100,00%	April
																				DEKRANASDA Vatulemo Fast								anggaran diperubahan tidak ada
																				Kegiatan HUT Kota Palu								anggaran diperubahan tidak ada
																				Ramadhan Food Fast								anggaran diperubahan tidak ada
																				Festival Palu Menari	1	Paket	Rp50.000.000,00	1	Paket	Rp50.000.000,00	100,00%	Agustus
																				Festival Lembah Palu (Theater)	1	Paket	Rp50.000.000,00	1	Paket	Rp50.000.000,00	100,00%	Juli
																				Festival Burasa (tawaeli)	1	Paket	Rp50.000.000,00	1	Paket	Rp49.920.000,00	100,00%	April
																				ForKom EXPO	1	Paket	Rp174.000.000,00	1	Paket	Rp173.750.000,00	100,00%	Januari
																				Festival Raodhah	1	Paket	Rp150.000.000,00	1	Paket	Rp149.768.000,00	100,00%	April
																				Festival Sahur Sahur	1	Paket	Rp50.000.000,00	1	Paket	Rp49.850.000,00	100,00%	April
																				Festival Karampe Nosarara	1	Paket	Rp50.000.000,00	1	Paket	Rp49.800.000,00	100,00%	Oktober
																				Festival Kampung Lere	1	Paket	Rp50.000.000,00	1	Paket	Rp50.000.000,00	100,00%	Desember
																				Festival Perahu Layar	1	Paket	Rp50.000.000,00	1	Paket	Rp50.000.000,00	100,00%	Juli
																				Festival Donggala Kodi	1	Paket	Rp50.000.000,00	1	Paket	Rp50.000.000,00	100,00%	November
																				Produksi/Talent Event	30	Kali	Rp1.192.000.000,00	20	Kali	Rp1.190.481.000,00	100,00%	1 Komunitas 5.000.000
TOTAL				15			0		Rp0	0		Rp0		0		Rp0	0		Rp0		42		Rp2.191.000.000	32		Rp2.188.062.000	99,87%	
FORUM KOMUNITAS KREATIF KOTA PALU																												
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																											
		Prg	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																									
		Keg	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																									
		Sub	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1	Kajian								Kajian Model Pengembangan Forum Komunitas Kreatif Kota Palu	1	Kajian	Rp114.989.400	1	Kajian	Rp114.257.216								100,00%	
TOTAL				1			0		Rp0	0		Rp0		1		Rp114.989.400	1		Rp114.257.216		0		Rp0	0		Rp0	100,00%	
BIDANG INFRASTRUKTUR																												
BANGUN PALU TAHAN GEMPA																												
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																											
		Prg	Program Kawasan Permukiman																									
		Keg	'Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) Ha																									
		Sub	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1000	rumah	Pantoloan 32 unit Rp. 20.000.000	47	Rumah	Rp940.000.000	47	Rumah	Rp940.000.000	Kabonena 18 unit Rp. 50.000.000	48	Rumah	Rp2.400.000.000	48	Rumah	Rp2.400.000.000		450	Rumah	Rp10.000.000.000	450	Rumah	Rp10.000.000.000		
						Pantoloan Boya 15 unit Rp. 20.000.000							Poboya 15 unit Rp. 50.000.000								100	Unit	Rp50.000.000	100	Rumah	Rp5.000.000.000		
													Lambara 15 unit Rp. 50.000.000								250	Unit	Rp20.000.000	250	Rumah	Rp5.000.000.000		
TOTAL				1000			47		Rp940.000.000	47		Rp940.000.000		48		Rp2.400.000.000	48		Rp2.400.000.000		450		Rp10.000.000.000	450		Rp10.000.000.000	100,00%	
BANGUN PALU TAHAN GEMPA																												
	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																											
		Prg	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																									
		Keg	Administrasi Tata Pemerintahan																									
		Sub	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah										Workshop pengurangan resiko bencana (APEKSI)	1	Kegiatan	Rp125.620.000	1	Kegiatan	Rp125.620.000									
TOTAL				0			0		Rp0	0		Rp0		1		Rp125.620.000	1		Rp125.620.000		0		Rp0	0		Rp0	100,00%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
BANGUN PALU TAHAN GEMPA																												
	DINAS PEKERJAAN UMUM																											
		Prg	Program Penataan Bangunan Gedung																									
		Keg	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan																									
		Sub	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Tawaeli Rp. 2.114.685.048	1	Paket	Rp2.114.685.048	1	Paket	Rp2.114.685.048	Pembangunan Bantaya Kel. Mamboro Barat Rp.299.999.963	1	Paket	Rp299.999.963	1	Paket	Rp299.999.963	Kantor Dewan Kesenian Rp. 6.397.268.085								Pembangunan Gedung Dewan Kesenian Kota Palu sebesar Rp. 6.397.268.085 dialihkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan Ulujadi RP. 2.152.302.040	1	Paket	Rp2.152.302.040	1	Paket	Rp2.152.302.040	Pembangunan Kantor Kelurahan Kamonji (2 lantai) 288 m2Rp.2.419.200.000	1	Paket	Rp2.419.200.000	1	Paket	Rp2.419.200.000	Pembangunan Gedung Dewan Kesenian Kota Palu (Luncuran) Rp.225.000.000			Rp225.000.000			Rp225.000.000		
						Pembangunan Kantor Damkar dan Penyelamatan Kota Rp. 4.472.910.400	1	Paket	Rp4.472.910.400	1	Paket	Rp4.472.910.400	Pembangunan Kantor Kelurahan Ujuna (2 lantai) 119,05 m2 Rp.1.000.020.000	1	Paket	Rp1.000.020.000	1	Paket	Rp1.000.020.000	Pembangunan Kantor Kel. Baru Rp. 2.620.816.560	1	Gedung	Rp2.620.816.560	1	Gedung	Rp2.604.876.000		
						Pembangunan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Anak Rp. 4.999.956.800	1	Paket	Rp4.999.956.800	1	Paket	Rp4.999.956.800	Pembangunan Kantor Komisi Pemilihan Umum (3 lantai) 820,15 m2 Rp.7.463.365.000	1	Paket	Rp7.463.365.000	1	Paket	Rp7.463.365.000	Pembangunan Kantor Kel. Boyaoge Rp. 2.620.816.560	1	Gedung	Rp2.620.816.560	1	Gedung	Rp2.608.204.000		
						Pembangunan Kantor Kelurahan Kayumalue Ngapa Rp. 1.305.765.024	1	Paket	Rp1.305.765.024	1	Paket	Rp1.305.765.024	Pembangunan Pintu Gerbang Tawaeli Rp.1.000.000.000	1	Paket	Rp1.000.000.000	1	Paket	Rp1.000.000.000	Pembangunan Kantor Kel. Talise Rp. 2.620.816.560	1	Gedung	Rp2.620.816.560	1	Gedung	Rp2.593.306.000		
						Pembangunan Kantor Kelurahan Lolu Selatan Rp. 1.463.000.576	1	Paket	Rp1.463.000.576	1	Paket	Rp1.463.000.576	Pembangunan Pintu Gerbang Watusampu Rp.1.000.000.000	1	Paket	Rp1.000.000.000	1	Paket	Rp1.000.000.000	Pembangunan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu Rp. 6.397.268.085	1	Gedung	Rp6.397.268.085	1	Gedung	Rp6.384.496.000		
						Pembangunan Kantor Kelurahan Nunu Rp. 1.430.049.840	1	Paket	Rp1.430.049.840	1	Paket	Rp1.430.049.840	Pembangunan Tugu Mandura Rp.500.000.000	1	Paket	Rp500.000.000	1	Paket	Rp500.000.000	Rehabilitasi Kantor Kelurahan Ujuna (Luncuran) Rp. 68.247.600	1	Gedung	Rp68.247.600	1	Gedung	Rp45.835.000		
						Pembangunan Kantor Kelurahan Taipa Rp. 1.600.000.720	1	Paket	Rp1.600.000.720	1	Paket	Rp1.600.000.720								Pembangunan Bantaya Kel. Tanamodindi Rp. 400.114.236								Di pindahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembangunan Kantor Kelurahan tanamodindi Rp. 1.510.974.392	1	Paket	Rp1.510.974.392	1	Paket	Rp1.510.974.392								Pembangunan Rumah adat Kecamatan Ulujadi Rp. 400.114.236								Di pindahkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembangunan Kantor Kelurahan Mamboro Rp. 1.430.049.840	1	Paket	Rp1.430.049.840	1	Paket	Rp1.430.049.840																
TOTAL				0			10		Rp22.479.694.680	10		Rp22.479.694.680		7		Rp13.682.584.963	7		Rp13.682.584.963		5		Rp14.552.965.365	5		Rp14.461.717.000	99,82%	
BANGUN PALU TAHAN GEMPA																												
	DINAS PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN																											
		Prg	Program Penataan Bangunan Gedung				3358	Rek PBG		585	Rek PBG			550	Rek PBG	Rp436.832.225	670	Rek PBG	Rp411.854.725		605	Rek PBG	Rp477.218.700	815	Rek PBG	Rp461.720.200		
		Keg	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kab/Kota, pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				4	Dokumen	Rp422.684.800					4	Dokumen	Rp1.460.000.000	4	Dokumen	Rp1.407.835.200									
		Sub	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG																									
		-	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	11	Perda/Perwali		3	Perda/Perwali	Rp49.682.500	3	Perda/Perwali	Rp49.682.500		3	Perda/Perwali	Rp64.163.250	2	Perda/Perwali	Rp60.375.750		3	Perda/Perwali	Rp48.906.500	1	Perda/Perwali	Rp48.906.500		

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
		Prg	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang																									
		Keg	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci tata Ruang (RRTR) Kab/Kota																									
		Sub	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	5	Perwali		1	Perwali	Rp1.076.625.700	1	Perwali	Rp1.076.625.700		1	Perwali	Rp93.013.750	1	Perwali	Rp87.235.200		1	Perwali	Rp590.504.100	1	Perwali	Rp577.172.133		
			Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	5	Kegiatan		1	Kegiatan	Rp75.300.000	1	Kegiatan	Rp75.300.000		1	Kegiatan	Rp0	0	Kegiatan	Rp0		1	Kegiatan	Rp60.199.200	1	Kegiatan	Rp59.399.200		
		Keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang daerah Kab/Kota	3358	PKKPR																							
		Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				500	PKKPR	Rp13.070.000	585	PKKPR	Rp13.070.000		550	PKKPR	Rp.14.172.000	710	PKKPR	Rp13.092.500		605	PKKPR	Rp165.480.000	759	PKKPR	Rp149.095.871		
			Sistem Informasi Penataan Ruang	1	Work Shop		0	Work Shop		0	Work Shop		Tahun 2022 Rp.376.600.000	1	Work Shop	Rp20.125.000	1	Work Shop	Rp20.125.000		0	Work Shop	Rp0	0	Work Shop	Rp0		
		Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	5	Dokumen		2	Dokumen	Rp96.520.600	2	Dokumen	Rp96.520.600		1	Dokumen	Rp175.955.600	1	Dokumen	Rp172.186.075		1	Dokumen	Rp0	0	Dokumen	Rp0	Dialihkan di perubahan	
			Operasionalisasi Tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Penataan Ruang	0	Kasus				Rp28.845.000	0	Kasus			10	Kasus	Rp20.208.750	0	Kasus	Rp912.350		10	Kasus	Rp16.772.200	0	Kasus	Rp10.909.965	Masih Tahap Sosialisasi	
		Sub	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	6	Laporan		1	Laporan	Rp86.125.000	1	Laporan	Rp86.125.000		1	Laporan	Rp54.139.750	1	Laporan	Rp50.980.700		1	Laporan	Rp61.695.500	1	Laporan	Rp56.653.000		
		Keg	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang daerah kab/Kota																									
		Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	50	Kasus		0	Kasus	Rp112.777.300	0	Kasus			10	Kasus	Rp44.564.075	10	Kasus	Rp44.489.400		10	Kasus	Rp56.042.400	6	Kasus	Rp56.042.000		
		Prg	Program Penatagunaan Tanah																									
		Keg	Penggunaan Tanah yang Haprannya dalam satu Daerah kab/Kota																									
		Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	1330	Sertifikat		150	Sertifikat	Rp249.182.520	14	Sertifikat			150	Sertifikat	Rp120.875.000	5	Sertifikat	Rp103.273.520		266	Sertipikat	Rp200.708.600	0	Sertipikat	Rp179.554.055		
		Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	5	Lokasi		1	lokasi	Rp0	1	lokasi			1	lokasi	Rp89.428.600	0	lokasi	Rp32.476.100		1	Lokasi	Rp0	0	Lokasi	Rp0		
		Prg	Program Penataan bangunan dan Lingkungannya																									
		Keg	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kab/Kota																									
		Sub	Penataan Bangunan dan Lingkungan	8	Kecamatan		2	Kecamatan	Rp60.736.450	2	Kec	Rp60.736.451		2	Kecamatan	Rp32.327.125	2	Kec	Rp31.220.000		2	Kecamatan	Rp250.151.700	2	Kecamatan	Rp242.700.500		
		-	Monitoring Penataan bangunan dan Lingkungan	1604	Bangunan		300	Bangunan	Rp. 33.238.400	404	Bangunan	Rp. 33.238.401		300	Bangunan	Rp104.829.950	680	Bangunan	Rp78.634.950		300	Bangunan	Rp117.708.850	396	Bangunan	Rp102.551.250		
				750	Bangunan		150	Bangunan		400	Bangunan			150	Bangunan		802	Bangunan			150	Bangunan		388	Bangunan			
TOTAL				7138			4473		Rp2.271.549.870	1999		Rp1.458.060.251		1735		Rp2.716.463.075	2889		Rp2.514.691.470		1956		Rp2.045.387.750	2370		Rp1.944.704.674	84,13%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
BANGUN PALU TAHAN GEMPA																												
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																											
		Prg	Program Penanggulangan Bencana																									
		Keg	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana																									
		Sub	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			Simulasi Hari Kesiapsiagaan Bencana	1	Kegiatan					Hari Kesiapsiagaan Bencana			Rp22.050.000			Rp22.050.000	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	1	Kegiatan	20.599.800	1	Kegiatan	Rp20.599.800	80,00%	
		Sub	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan & Pemasangan Blue Line Tsunami	17	Buah	Rp30.600.000	17	Buah	Rp30.600.001	Pengadaan dan pemasangan titik kumpul Evakuasi (terminal Tipo, Korem, 711, KEK, mamboro) 2 Buah	2	Buah	Rp36.000.000	2	Buah	Rp36.000.000	Pengadaan dan Pemasangan Peta Jalur Evakuasi 5 Buah	20	Buah	Rp7.500.000	20	Buah	Rp7.500.000		
													Pengadaan rambu-rambu petunjuk evakuasi bangunan 50 Buah	50	Buah		50	Buah		Pengadaan dan pemasangan blue line tsunami 5 Buah								
													Pengadan dan pemasangan Peta Jalur Evakuasi 5 Buah	5	Buah		5	Buah		Papan Peringatan Daerah Rawan Risiko bencana banjir 10 Buah								
													Pengadaan dan pemasanganblue line tsunami 5 Buah	5	Buah		5	Buah											
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	4	Kegiatan								kegiatan Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	1	Kegiatan	Rp24.425.000	1	Kegiatan	Rp24.425.000	kegiatan Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	1	Kegiatan	Rp25.674.800				75,00%	
		Keg	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1	Kegiatan																							
		Sub	Sosialisasi,Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)										stand informasi dan edukasi rawan bencana	1	Kegiatan	Rp52.356.800	1	Kegiatan	Rp52.356.800								100,00%	
TOTAL				5			17		Rp30.600.000	17		Rp30.600.001		64		Rp134.831.800	64		Rp134.831.800		21		Rp33.174.800	21		Rp28.099.800	97,44%	
PEMBANGUNAN GUDANG LOGISTIK BENCANA																												
	DINAS SOSIAL																											
		Prg	Program Penanganan Bencana																									
		Keg	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Kab/Kota																									
		Sub	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	2550	orang	Penyediaan Sandang Berupa bantuan bahan bangunan rumah yang terbakar, bantuan stok gudang bencana alam, bantuan stok gudang bencana sosial senilai Rp.364.085.660	3972	jiwa	Rp466.378.160	3972	jiwa	Rp355.077.000	Penyediaan logistik bencana (sandang) Rp.462.714.376	9602	jiwa	Rp462.147.670	9602	jiwa	Rp462.147.670	Penyediaan Sandang Berupa bantuan bahan bangunan rumah yang terbakar, bantuan stok gudang bencana alam, bantuan stok gudang bencana sosial senilai Rp.282.016.210	1006	jiwa	Rp282.016.210	1006	jiwa	Rp281.956.000		Tersalurkan untuk kebencanaan sosial dan alam hingga triwulan IV
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Berupa belanja alat rumah tangga lainnya (Home Use) untuk kebutuhan tempat pengungsian Rp.102.292.500	30	Unit	Rp102.292.500	15	Unit	Rp53.937.500								Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi Berupa belanja alat rumah tangga lainnya (Home Use) untuk kebutuhan tempat pengungsian Rp.64.500.000	6	Unit	Rp67.000.000	6	Unit	Rp65.700.000		
		Sub	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	2550	orang	Bantuan logistik keluarga korban covid 19 (ODP/OTG), stok dapur umum, stok gudang bencana alam, dan stok gudang bencana sosial Rp.1.040.548.750	3972	orang	Rp1.040.548.750	3972	jiwa	Rp916.979.200	Bantuan logistik keluarga korban covid 19 (ODP/OTG), stok dapur umum, stok gudang bencana alam, dan stok gudang bencana sosial Rp.394.695.750	9602	jiwa	Rp394.695.750	9602	jiwa	Rp392.499.500	Bantuan Natura dan Pakan-Natura, stok dapur umum, stok gudang bencana alam, dan stok gudang bencana sosial Rp.285.442.700	1006	jiwa	Rp285.442.700	297	jiwa	Rp285.433.200		
TOTAL				5100			7974		Rp1.609.219.410	7959		Rp1.325.993.700		19204		Rp856.843.420	19204		Rp854.647.170		2018		Rp634.458.910	1309		Rp633.089.200	90,75%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8				9			10			11	12
PEMBANGUNAN GUDANG LOGISTIK BENCANA																												
	DINAS PEKERJAAN UMUM																											
		Prg	Program Penataan Bangunan Gedung																									
		Keg	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan																								
		Sub	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	8	Gedung	Perencanaan Gudang Logistik Bencana Alam Rp.100.000.000	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp100.000.000	Pembangunan Gudang Logistik Bencana Rp.1.890.000.000	1	Paket	Rp1.890.000.000	1	Paket	Rp1.890.000.000	Pembangunan Gudang Logistik Kota Palu (Luncuran) Rp. 348.695.200	1	Bangunan Pagar	Rp348.695.200	1	Bangunan Pagar	Rp348.695.200		
																				Pembangunan Gedung Penahan tanah Gedung Logistik Mamboro Rp. 1.499.689.988	1	Bangunan Pagar	Rp1.499.689.988	1	Bangunan Pagar	Rp1.219.474.920		
TOTAL				8			1		Rp100.000.000	1		Rp100.000.000		1		Rp1.890.000.000	1		Rp1.890.000.000		2		Rp1.848.385.188	2		Rp1.568.170.120	92,70%	
PEMBANGUNAN GUDANG LOGISTIK BENCANA																												
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																											
		Prg	Program Penanggulangan Bencana																									
		Keg	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana																									
		Sub	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	50	Jenis	Mie Instan 1 Paket, Family Kit 1 Paket , Ikan Kaleng 1 Paket dan Makanan Siap Saji .1 Paket	10	Jenis	Rp44.950.000	10	Jenis	Rp44.950.000	Penyediaan logistik bencana	7	Jenis	Rp380.877.075	7	Jenis	Rp380.877.075	Mie Instan. 100 Dos, Family Kit 150 Dos, dan Makanan Siap Saji .200 Paket	9	Jenis	Rp61.200.000	9	Jenis	Rp61.200.000	52,00%	
TOTAL				50			10		Rp44.950.000	10		Rp44.950.000		7		Rp380.877.075	7		Rp380.877.075		9		Rp61.200.000	9		Rp61.200.000	100,00%	
PEMBANGUNAN KAWASAN OLAHRAGA KOTA PALU																												
	DINAS PEKERJAAN UMUM																											
		Prg	Program Penataan Bangunan Gedung	15	Lapangan Bola		7	Lapangan		7	Lapangan			11	Lapangan		10	Lapangan			7	Lapangan						Lapangan Sepak Bola Kelurahan Baiya, Taipa, Tatura Utara, Donggala Kodi, Silae, Kelurahan Tipo, dan lainnya, diserahkan kepada Dinas Pemuda dan Olah raga dan selanjutnya lapangan Sepak Bola tersebut, pengelolaannya akan diberikan kepada pihak Sekolah Sepak Bola (SSB) di masing-masing wilayah. Dengan begitu, SSB akan bertanggungjawab penuh terhadap lapangan Sepak Bola yang telah dibangun. SSB akan dibentuk tahun 2024
		Keg	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan																									
		Sub	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Baiya Rp.400.000.000			Rp400.000.000			Rp400.000.000	Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Galara 9.500 m2 Rp.902.500.000			Rp902.500.000			Rp0									
						Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Donggala Kodi Rp.500.000.000			Rp500.000.000			Rp500.000.000	Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Baiya (Lanjutan) Rp.1.092.500.000			Rp1.092.500.000			Rp109.239.200									
						Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Pengawu Rp.500.000.000			Rp500.000.000			Rp500.000.000	Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Donggala Kodi (Lanjutan) 13.000 m2 Rp.1.235.000.000			Rp1.235.000.000			Rp1.235.000.000	Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Donggala Kodi (Luncuran) Rp. 308.475.000	1	Lapangan	Rp308.475.000	1	Lapangan	Rp308.475.000		
						Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Silae Rp.500.000.000			Rp500.000.000			Rp500.000.000	Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Pengawu (Lanjutan) 13.650 m2 Rp.1.296.750.000			Rp1.296.750.000			Rp1.296.750.000	Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Pengawu (Luncuran) Rp. . 64.799.550	1	Lapangan	Rp64.799.550	1	Lapangan	Rp64.799.550		
						Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Taipa Rp.400.000.000			Rp400.000.000			Rp400.000.000	Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Silae (Lanjutan) 9.000 m2 Rp.855.000.000			Rp855.000.000			Rp855.000.000	Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Silae (Luncuran) Rp. 85.500.000	1	Lapangan	Rp85.500.000	1	Lapangan	Rp85.500.000		
						Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tatura Utara (Lapangan KONI) Rp.500.000.000			Rp500.000.000			Rp500.000.000	Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Taipa (Lanjutan) 11.500 m2 Rp.1.092.500.000			Rp1.092.500.000			Rp1.092.500.000	Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Taipa (Luncuran) Rp. 54.618.900	1	Lapangan	Rp54.618.900	1	Lapangan	Rp54.618.900		
						Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kelurahan Tondo Rp.400.000.000			Rp400.000.000			Rp400.000.000	Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Tatura Utara (Lanjutan) 9.500 m2 Rp.902.500.000			Rp902.500.000			Rp902.500.000									
													Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Tondo (Lanjutan) 7.900 m2 Rp.750.500.000			Rp750.500.000			Rp750.500.000	Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Tondo (Luncuran) Rp. 37.515.750	1	Lapangan	Rp37.515.750	1	Lapangan	Rp37.515.750		
													Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Kawatuna 9.500 m2 Rp.902.500.000			Rp902.500.000			Rp902.500.000	Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Kawatuna (Lanjutan) Rp. 852.621.150	1	Lapangan	Rp807.500.000	1	Lapangan	Rp846.121.150		
																				Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Kawatuna (Luncuran) Rp. 45.121.150	1	Lapangan	Rp45.121.150	1	Lapangan	Rp45.121.150		

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN			TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
							Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1	2	3			4		5				6				7				8				9				10				11	12
															Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Lambara 9.500 m2 Rp.902.500.000			Rp902.500.000			Rp902.500.000		Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Lambara (Lanjutan) Rp. 807.500.000	1	Lapangan	Rp807.500.000	1	Lapangan	Rp242.142.300		
																							Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel. Lambara (Luncuran) Rp. 44.641.050	1	Lapangan	Rp44.641.050	1	Lapangan	Rp44.641.050		
															Revitalisasi Lapangan Sepak Bola Kel Tipo 4.210,53 m2 Rp.400.000.350			Rp400.000.350			Rp400.000.350									
TOTAL					15			7		Rp3.200.000.000	7		Rp3.200.000.000			11		Rp10.332.250.350	10		Rp8.446.489.550			9		Rp2.255.671.400	9		Rp1.728.934.850	173,33%	
RUANG TERBUKA HIJAU/PUBLIC AREA PER KECAMATAN																																
	DINAS PEKERJAAN UMUM																															
		Prg	Program Penataan Bangunan Gedung																													
		Keg	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan																													
		Sub	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				Perencanaan Teknis Revitalisasi Taman Vatulemo Rp.100.000.000	1	RTH/RTP	Rp100.000.000	1	RTH/RTP	Rp100.000.000		Rehabilitasi Taman Vatulemo Rp.1.500.000.000	2	RTH/RTP	Rp1.500.000.000	2	RTH/RTP	Rp1.500.000.000		Revitalisasi Lapangan dan Taman Vatulemo Rp. 9.130.200.000	1	RTH/RTP	Rp10.030.200.000	1	RTH/RTP	Rp9.997.900.000		
							Perencanaan Taman Taipa Rp.100.000.000	1	Taman	Rp100.000.000	1	Taman	Rp100.000.000		Pembangunan Taman Taipa Rp.2.250.000.000	1	Taman	Rp2.250.000.000	1	Taman	Rp2.250.000.000		Pembangunan Taman Taipa (Lanjutan) Rp. 1.125.000.000	1	Taman	Rp1.125.000.000	1	Taman	Rp1.101.690.000		
TOTAL					0			2		Rp200.000.000	2		Rp200.000.000			3		Rp3.750.000.000	3		Rp3.750.000.000			2		Rp11.155.200.000	2		Rp11.099.590.000	99,63%	
RUANG TERBUKA HIJAU/PUBLIC AREA PER KECAMATAN																																
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																															
		Prg	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																													
		Keg	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kab/Kota																													
		Sub	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya		12	TW	Pengelolaan/perawatan taman-taman kota	4	TW	Rp2.730.792.387	4	TW	Rp2.730.792.387		Pengelolaan/perawatan taman-taman kota	4	TW	Rp2.988.362.500	4	TW	Rp2.988.362.500		Operasional Pengelolaan/perawatan 26 lokasi taman kota	4	TW	Rp5.834.759.350	4	TW	Rp5.646.732.300	100,00%	
TOTAL					12			4		Rp2.730.792.387	4		Rp2.730.792.387			4		Rp2.988.362.500	4		Rp2.988.362.500			4		Rp5.834.759.350	4		Rp5.646.732.300	100,00%	
RUANG TERBUKA HIJAU/PUBLIC AREA PER KECAMATAN																																
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																															
		Prg	Program Pengelolaan Informasi Informatika																													
		Keg	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																													
		Sub	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah daerah		46	Taman Kelurahan	Belanja Sewa Bandwidth Untuk Taman Kelurahan (20 kelurahan)	20	Taman Kelurahan	Rp60.000.000	20	Taman Kelurahan	Rp60.000.000		Belanja Sewa Bandwidth untuk Taman Kelurahan (46 kelurahan)	46	Taman Kelurahan	Rp552.000.000	46	Taman Kelurahan	Rp552.000.000		Belanja Sewa Bandwidth untukTaman Kelurahan (46 kelurahan)	46	Taman Kelurahan	Rp552.000.000	46	TW	Rp552.000.000	100,00%	
TOTAL					46			20		Rp60.000.000	20		Rp60.000.000			46		Rp552.000.000	46		Rp552.000.000			46		Rp552.000.000	46		Rp552.000.000	100,00%	
RUANG TERBUKA HIJAU/PUBLIC AREA PER KECAMATAN																																
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																															
		Prg	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																													
		Keg	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																													
		Sub	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial		1	Kajian																	Kajian Penataan Ruang Terbuka Hijau (Public Area) dan Kawasan Pedagang Kreatif Lapangan	1	Kajian	Rp145.305.900	1	Kajian	Rp138.846.992		
TOTAL					1			0		Rp0	0		Rp0			0		Rp0	0		Rp0			1		Rp145.305.900	1		Rp138.846.992	95,55%	
PEMBANGUNAN GEDUNG KESENIAN																																
	DINAS PEKERJAAN UMUM																															
		Prg	Program Penataan Bangunan Gedung																													
		Keg	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah daerah Kab/Kota, Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) dan Sertifikat laik Fungsi Bangunan																													Pembangunan Gedung Dewan Kesenian Kota Palu sebesar Rp. 6.397.268.085 dialihkan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Sub	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota				Perencanaan Gedung Dewan Kesenian Kota Palu di Kelurahan Talise Rp.300.000.000	1	Gedung	Rp300.000.000	1	Gedung	Rp300.000.000		Pembangunan Gedung Dewan Kesenian Kota Palu (Tahap I) Rp.4.500.000.000	1	Gedung	Rp4.500.000.000	1	Gedung	Rp4.500.000.000		Pembangunan Gedung Dewan Kesenian Kota Palu (Luncuran) Rp.225.000.000	1	Gedung	Rp225.000.000	1	Gedung	Rp225.000.000		
TOTAL					0			1		Rp300.000.000	1		Rp300.000.000			1		Rp4.500.000.000	1		Rp4.500.000.000			1		Rp225.000.000	1		Rp225.000.000	100,00%	1

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
PEMBANGUNAN GEDUNG KESENIAN																												
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																											
		Prg	Program Pengembangan Kebudayaan																									
		Keg	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																									
		Sub	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																Pembangunan Gedung kesenian	1	Paket	Rp13.743.440.000	1	Paket	Rp13.654.720.475		
																			Pembangunan Bantaya Bantaya Lekatu Kel. Tipo, Bantaya Salena Kel. Buluri, kelurahan Tanamodindi, Donggala Kodi	4	Paket	Rp1.441.000.000	4	Paket	Rp1.400.899.200		
																			Pembangunan Rumah adat kecamatan ulujadi	1	Paket	Rp175.542.835	1	Paket	Rp173.961.000		
TOTAL				0			0		Rp0	0		Rp0		0		Rp0	0		Rp0		6		Rp15.359.982.835	6		15.229.580.675	99,15%	
BIDANG PELAYANAN DASAR (kesehatan)																												
PALU KOTA SEHAT																												
	KECAMATAN PALU BARAT																											
		Prg	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
		Keg	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																									
		-	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air Bersih																Pengerukan Drainase Kelurahan Kamonj	1	Paket	Rp32.097.000	1	Paket	Rp32.097.000		
																			Pengerukan Drainase JL. W.R Supratman Lere	1	Paket	Rp13.063.979	1	Paket	Rp13.063.979		
																			Rehab Drainase RT 02 / RW 03 Kel. Ujuna	1	Paket	Rp35.299.422	1	Paket	Rp35.299.422		
																			Pekerjaan Rahb Drainase Jl. Tompe (Kel. Lere)	1	Paket	Rp35.955.000	1	Paket	Rp35.955.000		
																			Rehab Drainase Kelurahan Lere	1	Paket	Rp87.000.000	1	Paket	Rp87.000.000		
																			Rehab Drainase Kelurahan Kamonji (PIK)	1	Paket	Rp76.736.109	1	Paket	Rp76.736.109		
		-	Penanganan dan Pencegahan Stunting																Timbangan Bayi Kel. Lere					revisi /anggaran perubahan			diperubahan diganti
																			Pengadaan Meja Posyandu Lansia Kel. Baru	2	Buah	Rp1.600.000	2	Buah	Rp1.600.000		
		-	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Masyarakat																Rehab Ringan Posyandu IV RT 02 /RW 07 Kel. Ujuna	1	Paket	Rp35.000.000	1	Paket	Rp35.000.000		
																			Pengadaan Kilometer Listrik Poskesdes	1	Paket	Rp2.000.000	1	Paket	Rp2.000.000		
TOTAL				0			0		Rp0	0		Rp0		0		Rp0	0		Rp0		10		Rp318.751.510	10		Rp318.751.510	100,00%	
PALU KOTA SEHAT																												
	KECAMATAN TATANGA																											
		Prg	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
		Keg	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																									
		-	Pembangunan dan Pemeliharaan Salauran Pembuangan Air Limbah				15	Paket	Rp622.789.200	12	Paket	Rp622.789.200		8	Paket	Rp419.013.275	8	Paket	Rp419.013.275	Kegiatan Sosialisasi Penanganan Stanting dan Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)	1	Paket	Rp5.318.700	1	Paket	Rp5.318.700		
		-	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Air Bersih				3	Paket	Rp143.158.904	2	Paket	Rp143.158.904		4	Paket	Rp252.129.000	4	Paket	Rp252.129.000	Pelatihan Pembuatan MPASI untuk Ibu dalam pencegahan Stunting	1	Paket	Rp22.300.650	1	Paket	Rp22.300.000		
		-	Penanganan dan Pencegahan Stunting											1	Paket	Rp105.565.600	1	Paket	Rp105.565.600	Pengadaan Kursi Statis Posyandu	1	Paket	Rp9.125.000	1	Paket	Rp8.750.000		
		-	Pembangunan dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Masyarakat				6	Unit	Rp173.400.000	4	Unit	Rp173.400.000		1	Paket	Rp40.000.000	0			Pengadaan Meja Pelayanan Posyandu	1	Paket	Rp8.125.000	1	Paket	Rp8.125.000		
																			Penggadaan Kursi Tunggu Ruang Pelayanan Posyandu	1	Paket	Rp10.312.000	1	Paket	Rp10.312.500		
																			Pemberian Asupan Gizi untuk penurunan stanting	1	Paket	Rp8.019.000	1	Paket	Rp8.019.000		
TOTAL				0			24		Rp939.348.104	18		Rp939.348.104		14		Rp816.707.875	13		Rp776.707.875		6		Rp63.200.350	6		Rp62.825.200	97,78%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
PALU KOTA SEHAT																												
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																											
		Prg	Program Kawasan Permukiman																									
		Keg	Kegiatan Penataan dan Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha																									
		Sub	Sub Kegiatan Pembentukan / Pembinaan Kelompok swadaya masyarakat dipermukiman kumuh																									
		-	Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan			Pembuatan Tangki Septik Indivisual Perkotaan Kelurahan Balaroa (Huntap Balaroa)	127	Unit	Rp952.500.000	127	Unit	Rp952.500.000	Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Balaroa	127	Unit	Rp889.000.000	127	Unit	Rp889.000.000									
						Pembuatan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Birobuli Selatan	83	Unit	Rp622.500.000	83	Unit	Rp622.500.000	Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Donggala Kodi	55	Unit	Rp385.000.000	55	Unit	Rp385.000.000									
													Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Duyu	55	Unit	Rp385.000.000	55	Unit	Rp385.000.000									
													Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Mamboro	55	Unit	Rp385.000.000	55	Unit	Rp385.000.000									
													Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Poboya	53	Unit	Rp371.000.000	55	Unit	Rp385.000.000									
													Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Taipa	54	Unit	Rp378.000.000	53	Unit	Rp371.000.000									
													Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Talise	55	Unit	Rp385.000.000	54	Unit	Rp378.000.000									
													Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Tanamodindi	55	Unit	Rp385.000.000	55	Unit	Rp385.000.000									
													Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kelurahan Tavanjuka	55	Unit	Rp385.000.000	55	Unit	Rp385.000.000									
		-	Pembangunan drainase lingkungan			Pembangunan Drainase di Kelurahan Tatura	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.508.000																	
						Pembangunan Drainase Jalan Basuki Rahmat Lrg Angsana	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.688.000																	
						Pembangunan Drainase Jalan Jabal Rahma (300 M)	1	Paket	Rp197.500.000	1	Paket	Rp197.192.000																	
						Pembangunan Plat Pelintas Dicker Kompleks Perumahan Citra Alif di Kelurahan Talise Valangguni	1	Paket	Rp30.000.000	1	Paket	Rp29.907.000																	
						Pembangunan Plat Pelintas Pasar Bulili di Kelurahan Petobo	1	Paket	Rp30.000.000	1	Paket	Rp29.590.000																	
						Pekerjaan Pembangunan Jalan dan Drainase Lingkungan Jl. Ponegoro Irg. Ponegoro (Shelter)	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.417.000																	
						Pekerjaan Pembangunan Drainase Jl. Bayam Lrg. IV Kel. Balaroa	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.844.000																	
		-	Pembawa Air Kotor			Pembuatan MCK di Dusun Wana Salena	1	Paket	Rp175.000.000	1	Paket	Rp174.783.000								Pembuatan Drainase Jalan Anggur 3 Kel. Boyaoge	1	Paket	Rp190.000.000			Rp94.934.840				
						Pembangunan Tangki Septik Pasar Bulili di Kelurahan Petobo	1	Paket	Rp15.000.000	1	Paket	Rp14.572.000								Pembuatan Drainase Jln. Agatis, Lrg. 1	1	Paket	Rp146.500.000			Rp0				
																				Pembuatan Drainase Jl. Sungai Lambangan	1	Paket	Rp80.150.000			Rp0				
		-	Pemeliharaan Drainase Lingkungan										Pemeliharaan Drainase Lingkungan	1	Paket	Rp500.000.000	1	Paket	Rp499.490.731	Pemeliharaan Drainase Lingkungan	1	Paket	Rp252.210.521			Rp250.403.500				
		-	Bangunan Air Irigasi Lainnya																	Perbaikan Mata Air di Pesisir Pantai Kel. Tondo	1	Paket	Rp30.000.000			Rp29.759.000				
		Keg	Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (Seouluh) Ha																									

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
		Sub	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU																								
		-	Pembangunan jalan lingkungan																								
						Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Merpati II RT 002/RW005	1	Paket	Rp150.000.000	1	Paket	Rp149.868.000	Pekerjaan Jalan Lingkungan Kel. Lambara	1	Paket	Rp500.000.000	1	Paket	Rp496.755.809	Peningkatan Jalan Rabat RT 004 RW 001 P= 167 m, L= 3 m Kel. Palupi	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.751.000		
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Penamba	1	Paket	Rp150.000.000	1	Paket	Rp149.864.000	Pekerjaan Jalan dan Drainase Lingkungan Kel. Baiya	1	Paket	Rp300.000.000	1	Paket	Rp292.655.997	Peningkatan Jalan/Pengaspalan RT 002 RW 001 P= 164 m, L= 3 m Kel. Nunu	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.823.000		
																				Pekerjaan Rabat Beton Jl. Pelita lorong Pelita 1 Kel. Tanamodindi	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp99.866.000		
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Manggis Lorong Eghasta	1	Paket	Rp450.000.000	1	Paket	Rp435.401.207	Pekerjaan Jalan dan Drainase Lingkungan Kel. Pantoloan	1	Paket	Rp300.000.000	1	Paket	Rp286.643.891	Perbaikan Jalan Untad I, Lrg. I Kel. Tondo	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp99.867.000		
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Manggis Lorong II Kel. Balaroa	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.981.000	Peningkatan Jalan Kel. Birobuli Utara	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.920.000	Perbaikan Jl. Uwe Salura Kel. Tondo	1	Paket	Rp170.000.000	1	Paket	Rp169.888.000		
						Pekerjaan Peningkatan Jalan (Paving Blok) Jalan Monginsidi Lorong III	1	Paket	Rp150.000.000	1	Paket	Rp149.377.000	Peningkatan Jalan Kel. Tatura Selatan	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.900.000	Perbaikan Jl. Sintuvu Kel. Tondo	1	Paket	Rp105.000.000	1	Paket	Rp104.891.000		
						Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Lingkungan Una-una dan Jl. Patimura	1	Paket	Rp500.000.000	1	Paket	Rp433.094.518	Pengaspalan Jl. Malonda Lrg. Seruni RT.002/RW.001	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.945.000	Rabat Beton Lrg. Mawar Kel. Tipo Kec. Ulujadi	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp99.871.000		
						Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Drainase Jalan Miangas VI	1	Paket	Rp350.000.000	1	Paket	Rp339.362.977	Pengaspalan Jalan Ranto Gau RT. 06 RW. 02 BTN Permata Indah, Kota Palu, Silae	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.905.000	Rabat Beton Lrg Asroria (jadi paving)	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp99.885.000		
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Masjid AlFalah Kelurahan Pengawu	1	Paket	Rp175.000.000	1	Paket	Rp174.875.000	Peningkatan Jl. Asam III Lrg. Masjid Nur Jumadi Kel. Kabonena	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.935.000	Rabat Beton Lrg Tata Baru (jadi paving blok)	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.863.000		
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Pelita Air II	1	Paket	Rp250.000.000	1	Paket	Rp198.834.000	Pengaspalan Jalan Boya Peramba Kel. Lambara	1	Paket	Rp167.000.000	1	Paket	Rp166.854.000	Paving Blok Lrg Siswa	1	Paket	Rp160.000.000	1	Paket	Rp159.868.000		
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Tanjung Dako Lr. Elite	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.854.000	Pemeliharaan Jalan Lingkungan/Swakelola	1	Paket	Rp500.000.000	1	Paket	Rp389.924.661	Paving Block Lrg Cemara/Libra	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp99.875.000		
						Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Jl. Palu Bangga Lr. Palupi	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp99.875.000																	
						Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Jl. M. Thamrin Lr. Islam I dan Jl. Nokilalaki Lr. Nokilalaki	1	Paket	Rp150.000.000	1	Paket	Rp149.839.000																	
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Tururuka Lr. Prima	1	Paket	Rp125.000.000	1	Paket	Rp124.838.000																	
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Lrg Perjuangan Jl Setia Budi dan Lrg Cancer Jl Kihajar Dewantara	1	Paket	Rp125.000.000	1	Paket	Rp124.878.000																	
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Lrg Mangga II Kelurahan Kamonji	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp99.879.000																	
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Abadi Kelurahan Talise	1	Paket	Rp175.000.000	1	Paket	Rp174.839.000																	
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Jambu Lrg Jambu	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.823.000																	
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Moma Kel. Mamboro Barat	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.849.000																	
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pipit Lrg I Kel. Tanamodindi	1	Paket	Rp150.000.000	1	Paket	Rp149.894.000																	
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Selar Kel. Lere	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.786.000																	
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Cemara I Lrg IV Kel. Balaroa	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.882.000																	
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Lr. Silae Kel. Silae	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp99.865.000																	
						Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkungan Jl.Bantilan Lrg SMA PGRI	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.890.000																	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
						Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kel. Besusu Barat	1	Paket	Rp195.000.000	1	Paket	Rp194.850.000																
						Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Besusu Barat	1	Paket	Rp155.000.000	1	Paket	Rp154.830.000																
						Peningkatan Jalan dan Drainase Lingkungan Kel. Besusu Timur	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.820.000																
						Pemeliharaan Drainase jalan lingkungan	1	Paket	Rp250.000.000	1	Paket	Rp180.072.500																
		Prg	Program Perumahan Kawasan Permukiman Kumuh																									
		Keg	Kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota																									
		Sub	Sub Kegiatan Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha																									
		-	Pembangunan jalan lingkungan																									
																				Peningkatan Jalan Lrg. Adila	1	Paket	Rp175.000.000	1	Paket	Rp174.885.000		
																				Peningkatan Jalan Nike Ardila Kel. Birobuli Utara	1	Paket	Rp174.906.704	1	Paket	Rp174.778.000		
																				Rabat Beton Jl. Nuri Lrg 2	1	Paket	Rp170.000.000	1	Paket	Rp169.885.000		
																				Rabat Beton Jl. Maleo Lrg	1	Paket	Rp60.000.000	1	Paket	Rp59.904.000		
																				Rabat Beton Jalan merpati lorong, Jl Merpati	1	Paket	Rp175.000.000	1	Paket	Rp174.761.000		
																				Rabat Beton Jl. Bunga Raya Lrg.II	1	Paket	Rp175.000.000	1	Paket	Rp174.815.000		
																				Rabat Beton Jl. Towua Lrg. I	1	Paket	Rp150.000.000	1	Paket	Rp149.840.000		
																				Rabat Beton Jl. Manimbaya Lrg. Pastori	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp99.817.000		
																				Pekerjaan Jalan dan Drainase Lingkungan Kel. Baiya (Luncuran)	1	Paket	Rp15.093.296	1	Paket	Rp15.093.296		
																				Peningkatan Jalan Rabat Beton Lapangan Taipa Kel. Taipa	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.864.000		
																				Paving Blok Jalan Sungai Manonda Lrg.Imam Muslim	1	Paket	Rp120.000.000	1	Paket	Rp119.887.000		
																				pengaspalan jl. Kedondong Lrg.Binte	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.879.000		
																				pengaspalan jl.agatis lrg 1 kel.nunu	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.823.000		
																				perbaikan jalan jl.puenjidi lrg 1 rt 001 rw002 kel. Kabonena	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.857.000		
																				jalan kantong produksi penggaraman talise	1	Paket	Rp35.000.000	1	Paket	Rp34.980.000		
																				perbaikan jalan jl.ngoriovala ujung kel.tanamodindi	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp98.697.000		
																				Peningkatan Jl. Jajaki Indah kel. Petobo	1	Paket	Rp75.000.000	1	Paket	Rp74.943.000		
																				rehab jalan dan drainase jl.Boya papitu	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.856.000		
																				rehabilitasi jalan jl. Angkasa 6 lrg 6 kel.Birobuli utara	1	Paket	Rp180.000.000	1	Paket	Rp179.889.000		
																				peningkatan jalan dan drainase jl.banteng 4	1	Paket	Rp170.000.000	1	Paket	Rp169.870.000		
																				pengaspalan jl.dewi sartika 3	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.864.000		
																				paving blok jl.basuki rahmat lrg cendana	1	Paket	Rp70.000.000	1	Paket	Rp69.916.000		
																				Pengaspalan Jl.Zebra Star	1	Paket	Rp200.000.000	1	Paket	Rp199.814.000		
																				pengaspalan Jalan Lingkunngan Jl.Lagarutu Lrg Torulemba	1	Paket	Rp198.000.000	1	Paket	Rp197.861.000		
																				Pengaspalan Jl.Slamet Riyadi Lrg 1 Kel.Besusu Timur	1	Paket	Rp120.000.000	1	Paket	Rp119.898.000		
TOTAL				0			246		Rp8.222.500.000	246		Rp8.002.722.202		575		Rp7.215.000.000	575		Rp7.079.930.089	jl. Malaya dalam	25		Rp100.000.000	20		Rp99.906.000	97,72%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
PALU KOTA SEHAT																												
	DINAS KESEHATAN																											
		Prg	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5	Tahun				Rp45.166.253.984							Rp13.258.187.280						Rp11.496.616.054						
		Keg	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																									
		Sub	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7815	Bumil	Rp956.405.400	7673	Bumil	Rp829.306.409	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7727	Bumil	Rp1.051.181.275	7622	Bumil	Rp969.666.275	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	7833	Bumil	Rp781.846.150	3918	Bumil	Rp734.505.670		
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7460	Bulin	Rp997.890.450	7378	Bulin	Rp375.530.022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7379	Bulin	Rp346.402.500	7386	Bulin	Rp169.836.890	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	7480	Bulin	Rp32.905.100	125	Bulin	Rp23.864.840		
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	6953	Bayi	Rp75.384.075	7233	Bayi	Rp58.884.075	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	7025	Bayi	Rp5.725.000	7378	Bayi	Rp4.150.000		7121	Bayi	Rp131.475.000	200	Bayi	Rp109.230.500		
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60256	Anak	Rp224.272.500	6857	Anak	Rp160.972.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	60256	Anak	Rp338.542.500	38590	Anak	Rp295.127.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	58571	Remaja	Rp191.735.100	235	Remaja	Rp173.643.800		
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	46150	Balita	Rp248.460.000	38327	Balita	Rp230.710.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	35796	Balita	Rp296.817.500	31569	Balita	Rp262.692.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	36286	Balita	Rp108.799.900	10004	Balita	Rp108.799.900		
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27719	Lansia	Rp537.725.000	14577	Lansia	Rp488.755.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	27364	Lansia	Rp1.029.665.000	20262	Lansia	Rp1.021.565.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	31392	Lansia	Rp733.724.850	7122	Lansia	Rp724.424.850		
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga TB			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8613	Orang	Rp129.875.000	3030	Orang	Rp73.920.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	8656	Orang	Rp423.990.000	7185	Orang	Rp402.513.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	4	TW	Rp36.300.000	4	TW	Rp36.300.000		
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi KLB			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4	TW	Rp32.739.116.411	4	TW	Rp20.250.548.325	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4	TW	Rp2.763.697.025	4	TW	Rp2.736.088.300	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	4	TW	Rp149.268.700	4	TW	Rp142.698.900		
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4	TW	Rp9.485.075	4	TW	Rp9.485.075	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4	TW	Rp26.037.500	4	TW	Rp26.037.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	4	TW	Rp26.307.500	4	TW	Rp19.880.000		
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2457	Kasus	Rp1.273.095.200	2457	Kasus	Rp1.228.365.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	TW	Rp2.491.624.005	4	TW	Rp2.272.251.324	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4	TW	Rp1.649.675.900	4	TW	Rp1.612.428.490		
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	TW	Rp84.225.000	4	TW	Rp72.517.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	4	TW	Rp114.187.450		TW	Rp45.599.950	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga			Rp43.675.150	4	TW	Rp37.275.150		
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	TW	Rp349.620.400	4	TW	Rp244.701.250	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	TW	Rp478.414.350	4	TW	Rp388.076.850	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4	TW	Rp742.218.850	4	TW	Rp738.487.989		
		-	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	4	tw	Rp294.050.375	4	tw	Rp240.834.975	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	4	tw	Rp5.324.250	4	tw	Rp3.699.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	4	tw	Rp1.668.850	4	TW	Rp606.350		Adanya selisih perbedaan Standar biaya
		-	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	4	tw	Rp1.900.712.500	4	tw	Rp983.185.620	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	4	tw	Rp925.524.650	4	tw	Rp850.954.650	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	4	tw	Rp1.372.382.450	4	TW	Rp1.343.140.837		
		-	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	4	TW	Rp1.064.053.650	4	TW	Rp983.185.620	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	4	TW	Rp954.016.500			Rp607.492.475	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	4	TW	Rp769.782.350	4	TW	Rp761.870.600		
		-	Penyelenggaraan Kota Sehat			Penyelenggaraan Kota Sehat	4	TW	Rp29.428.000	4	TW	Rp29.428.000	Penyelenggaraan Kota Sehat	4	TW	Rp14.472.225	4	TW	Rp13.972.225	Penyelenggaraan Kota Sehat	4	TW	Rp195.372.620	4	TW	Rp192.792.620		
		-	Operasional Pelayanan Puskesmas			Operasional Pelayanan Puskesmas	4	TW	Rp4.204.739.948	4	TW	Rp3.745.288.744	Operasional Pelayanan Puskesmas	4	TW	Rp2.284.431.050		TW	Rp1.418.901.915		12	TW	Rp138.179.000					Selisih anggarn BA dgn Pagu Kemenkeu
		-	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			Operasional Pelayanan Puskesmas	4	TW	Rp4.204.739.948	4	TW	Rp3.745.288.744	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	TW	Rp8.134.500	4	TW	Rp7.990.500	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	4	TW	Rp4.587.550			Rp4.587.550		
				Pembentukan Forum Kota Sehat						Pembentukan Forum Kota Sehat SK Wali Kota palu No. 440/1193.a/Dinkes/20221 TTg Forum Komunikasi Kota Sehat													8	Kec			Proses Pembuatan SK
				Pembentukan Forum Kecamatan			8	Kecamatan												Pembentukan Forum Kota Sehat di 8 Kecamatan	8	Kec						Telah terbit SK Foum Kota sehat pada 8 Kecamatan
				Pembentukan Forum Kelurahan			46	Kelurahan												Pembentukan Forum Kota Sehat di 46 Kelurahan	46	Kel						Telah terbit SK Forum Kota sehat pada 46 Kelurahan
TOTAL				5			#####		Rp94.489.532.916	87572		Rp33.750.906.559		#####		Rp26.816.374.560	#####		Rp11.496.616.054		#####		Rp18.606.521.074	21652		Rp6.764.538.046	37,17%	
PALU KOTA SEHAT																												
	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																											
		Prg	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)																									
		Keg	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			Pertahanan Keluarga Kelompok BKB di Kampung KB	12	Bulan	Rp44.597.400	12	Bulan	Rp44.597.400																

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
		Sub Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS			Honorarium (Kader BKB, Kader BKL, Kader BKR, Tim TPK)	12	Bulan	Rp696.033.200	12	Bulan	Rp696.033.200	Operasional terkait kegiatan yang mendukung untuk penanggulangan Stunting	12	Bulan	Rp1.961.433.750	12	Bulan	Rp1.015.784.750	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	12	bulan	Rp1.964.751.150	12	bulan	Rp1.833.081.150		
		Prg Program Pembinaan Keluarga (KB)																									
		Keg Pengendalian dan Pendisitribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di daerah Kab/Kota																									
		Sub Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak			Penyuluhan dan Pelayanan KB Gratis Melalui Kegiatan Baksos MUYAN di Kelurahan	12	Bulan	Rp23.487.500	12	Bulan	Rp23.487.500	Penyuluhan dan Pelayanan KB Gratis Melalui Kegiatan Baksos MUYAN di Kelurahan	12	Bulan	Rp21.950.000	12	Bulan	Rp21.950.000	Penyuluhan dan Pelayanan KB Gratis Melalui Kegiatan Baksos MUYAN di Kelurahan	12	bulan	Rp18.237.200	12	bulan	Rp17.410.200		
TOTAL			0			24		Rp764.118.100	24		Rp764.118.100		24		Rp1.983.383.750	24		Rp1.037.734.750		24		Rp1.982.988.350	24		Rp1.850.491.350	77,21%	
PALU KOTA SEHAT																											
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																										
		Prg Program Perlindungan Khusus Anak																									
		- (pendampingan dan penjangkauan warga binaan di lapas anak)			pendampingan dan penjangkauan warga binaan di lapas anak	4	kali	Rp30.563.075	4		Rp30.563.075	pendampingan dan penjangkauan warga binaan di lapas anak	1	Paket	Rp15.418.350	1	Paket	Rp13.218.350	pendampingan dan penjangkauan warga binaan di lapas anak	1	Paket	Rp54.496.300	1	paket	Rp49.559.100		
TOTAL			0			4		Rp30.563.075	4		Rp30.563.075		1		Rp15.418.350	1		Rp13.218.350		1		Rp54.496.300	1		Rp49.559.100	92,90%	
PALU KOTA SEHAT																											
	RSUD ANUTAPURA																										
		- Pelayanan Dan Penunjang BLUD	5	Tahun	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4	TW	Rp121.051.961.456	4	TW	Rp110.234.316.739	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4	TW	Rp119.567.200.629	4	TW	Rp116.366.244.967	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	4	TW	Rp130.533.036.816	4	TW	Rp124.473.098.369	73,45%	
TOTAL			5			4		Rp121.051.961.456	4		Rp110.234.316.739		4		Rp119.567.200.629	4		Rp116.366.244.967		4		Rp130.533.036.816	4		Rp124.473.098.369	94,59%	
TRANSFORMASI PUSKESMAS MENJADI KLINIK MODERN																											
	DINAS KESEHATAN																										
		- Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	14	Puskesmas								Rehab Puskesmas Bulili dan Puskesmas Pantoloan	2	Puskesmas	Rp3.339.100.000	2	Puskesmas	Rp2.753.451.230	Puskesmas Singgani	1	Puskesmas	Rp50.000.000	1	Puskesmas	Rp50.000.000		
TOTAL			14			0		Rp0	0		Rp0		2		Rp3.339.100.000	2		Rp2.753.451.230		1		Rp50.000.000	1		Rp50.000.000	82,72%	
SATU AMBULANS SATU KELURAHAN																											
	DINAS KESEHATAN																										
		- Pengadaan Kendaraan	46	kelurahan	Pengadaan Kendaraan 3.419.727.005	7	Ambulance	Rp3.419.727.005	7	Ambulance	Rp3.034.727.000	Pengadaan Kendaraan	6	Ambulance	Rp2.515.000.000	6	Ambulance	Rp2.150.000.000	Pengadaan Ambulance Kelurahan 5 Unit	5	Ambulance	Rp1.505.000.000	5	Ambulance	Rp1.505.000.000		Kelurahan Pantoloan Boya, Lambara, Watusampu, Duyu, Palupi
TOTAL			46			7		Rp3.419.727.005	7		Rp3.034.727.000		6		Rp2.515.000.000	6		Rp2.150.000.000		5		Rp1.505.000.000	5		Rp1.505.000.000	89,92%	
BPJS GRATIS WARGA TIDAK MAMPU																											
	DINAS SOSIAL																										
		Prg Perlindungan dan jaminan Sosial																									
		Keg Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota																									
		Sub Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Rp.337.763.000.	4	TW	Rp337.763.000	4	TW	Rp267.365.400	Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Rp.462.668.000	4	TW	Rp462.688.000	4	TW	Rp461.393.760	-Super Visor SIKS-NG DTKS Kota Palu '-Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) '-Tim Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH) '-Tim Koordinasi Program Sembako Rp.39.750.000	4	TW	Rp848.918.000	4	TW	Rp838.041.340		terbayarkan sesuai kebutuhan
		Prg Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																									
		Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
		Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			BPJS PHL, Tagana, PSM, Tenaga Kerja Disabilitas 770 Orang, BPJS Tenaga Kerja Kusir Dokar dan Becak 120 orang Rp.51.574.200	890	Orang	Rp26.886.651	890	Orang	Rp26.886.651	BPJS Tenaga Kerja PHL Kecelakaan Kerja (JKK) Rp.4.000.440 dan Jaminan Kematian PHL Rp. 5.000.232 Totalnya Rp. 9.000.672	53	Orang	Rp9.000.672	46	Orang	Rp8.732.601	BPJS Tenaga Kerja PHL Kecelakaan Kerja (JKK) Rp.4.000.440 dan Jaminan Kematian PHL Rp. 5.000.232 Totalnya Rp. 9.000.672	53	Orang	Rp9.000.672	53	Orang	Rp11.579.755	989,00%	terbayarkan hingga triwulan IV
												BPJS Tenaga Kerja Tagana Kecelakaan Kerja (JKK) Rp. 2.490.840 dan Jaminan Kematian Tagana Rp. 3.113.352Totalnya Rp. 5.604.192	36	Orang	Rp5.604.192	33	Orang	Rp5.519.460	BPJS Tenaga Kerja Tagana Kecelakaan Kerja (JKK) Rp. 2.490.840 dan Jaminan Kematian Tagana Rp. 3.113.352Totalnya Rp. 5.604.192	30	Orang	Rp5.604.192	30	Orang	Rp4.925.348	953,00%	terbayarkan hingga triwulan IV

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026	Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1	2	3		4	5				6				7				8				9				10				11	12
													BPJS Tenaga Kerja PSM Kecelakaan Kerja (JKK) Rp. 3.472.080 dan Jaminan Kematian PSM Rp. 4.339.824 Totalnya Rp. 7.811.904	46	Orang	Rp7.811.904	46	Orang	Rp8.463.689		BPJS Tenaga Kerja PSM Kecelakaan Kerja (JKK) Rp. 3.472.080 dan Jaminan Kematian PSM Rp. 4.339.824 Totalnya Rp. 7.811.904	46	Orang	Rp7.811.904	46	Orang	Rp6.496.373	982,00%	terbayarkan hingga triwulan IV
													BPJS Tenaga Kerja Pekerja Disabilitas Kecelakaan Kerja (JKK) Rp. 3.472.080 dan Jaminan Kematian Pekerja Disabilitas Rp. 4.339.824 Totalnya Rp. 7.811.904	770	Orang	Rp130.015.200	703	Orang	Rp130.015.200		BPJS Tenaga Kerja Pekerja Disabilitas Kecelakaan Kerja (JKK) Rp. 62.832.000 dan Jaminan Kematian Pekerja Disabilitas Rp. 78.540.000 Totalnya Rp. 141.372.200	701	Orang	Rp141.372.000	701	Orang	Rp120.775.200	1404,00%	terbayarkan hingga triwulan IV
													BPJS Tenaga Kerja Kusir dokar & becak Kecelakaan Kerja (JKK) Rp. 12.240.000. dan Jaminan Kematian Kusir dokar & becak Rp. 8.323.200 Totalnya Rp. 20.563.200	102	Orang	Rp20.563.200	102	Orang	Rp20.563.200		BPJS Tenaga Kerja Kusir dokar & becak Kecelakaan Kerja (JKK) Rp. 10.404.000. dan Jaminan Kematian Kusir dokar & becak Rp. 8.323.200 Totalnya Rp. 18.727.200	29	Orang	Rp18.727.200	29	Orang	Rp5.157.600	732,00%	terbayarkan hingga triwulan IV
TOTAL				0		894		Rp364.649.651	894		Rp294.252.051			1011		Rp635.683.168	888		Rp634.687.910			863		Rp1.031.433.968	863		Rp986.975.616	94,30%	
BPJS GRATIS WARGA TIDAK MAMPU																														
	DINAS PERHUBUNGAN																													
		Prg	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)																											
		Keg	Penertiban Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir																											
		Sub	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota			Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Bagi Non ASN Juru Parkir	556	Orang	Rp140.707.800	549	Orang	Rp79.119.764		BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan dan Kematian bagi Juru Parkir	600	Orang	Rp102.240.000	551	Orang	Rp80.835.390		juru parkir Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp.40.881.600 Belanja Iuran Jaminan Kematian Rp.51..102.000	501	Orang	Rp91.983.600	387	Orang	Rp71.063.860		realisasi juru parkir (Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja) Rp.31.583.939 Belanja Iuran Jaminan Kematian Rp.539.479.921
TOTAL				0		556		Rp140.707.800	549		Rp79.119.764			600		Rp102.240.000	551		Rp80.835.390			501		Rp91.983.600	387		Rp71.063.860		
BPJS GRATIS WARGA TIDAK MAMPU																														
	DINAS KESEHATAN																													
		Prg	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat																											
		Keg	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																											
		Sub	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	65889	Orang	Rp29.887.472.900			Rp29.877.439.400		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	41165	orang	Rp29.887.472.900	13620	Orang	Rp29.887.472.900		Belanja Iuran Jaminan Kesehatan kelas III (BPJS Kesehatan) 34.722 Orang x 9 Bulan Rp. 15.749.899.200 Iuran Jaminan Kesehatan Kelas III (Tunggakan 2022) 179087 Orang /Bulan	49645	Orang	Rp6.769.488.600	49645	Orang	Rp6.769.488.600		
		Prg	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																											
		Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		Sub	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			(Kader Lansia) Jaminan Kecelakaan Kerja Rp. 32.155.200 Jaminankematian Kerja Rp.26.899.500	708	Orang	Rp59.054.700	708	Orang	Rp59.054.700		BPJS tenaga kerja (jaminan kecelakaan dan kematian kader)	1382	Orang	Rp272.469.600	1382	Orang	Rp272.469.600		(Kader Lansia) Jaminan Kecelakaan Kerja Rp. 149.763.600 Jaminankematian Kerja Rp.187.798.800	4584	Orang	Rp337.562.400	4132	Orang	Rp232.015.520		

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
		Prg	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat																									
		Keg																										
		Sub	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			BPJS Tenaga Kerja berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi 1.135 orang Kader Posyandu di 227 Posyandu senilai	1135	Orang	Rp29.935.823.900	1135	Orang	Rp29.935.823.900															
			Pengelolaah Jaminan kesehatan Masyarakat			Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Jumlah Peserta sebanyak 67.230 orang (APBD Kota Palu), 79.708 PBI Nasional, 428 Jiwa PBI Sulteng Sudah termasuk pembayaran iuran BPJS untuk DTKS	#####	Orang	Rp29.887.472.900	#####	Orang		BPJS kesehatan warga tidak mampu	#####	Orang	Rp15.022.173.600	#####	Orang	Rp15.022.173.600	Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	#####	Orang	Rp21.649.874.400	#####	Orang	Rp15.994.907.996	73,88%	Dana 5.654.966.404. Belum terbayarkan (SP2D) sudah ada) tetapi belum masuk diRekening BPJS karena dana dari BPKAD belum tersedia (Sumber dana PAD)
TOTAL				0			#####		Rp89.769.824.400	#####		Rp59.872.318.000		#####		Rp45.182.116.100	#####		Rp45.182.116.100		#####		Rp28.756.925.400	#####		Rp22.996.412.116	78,22%	
BPJS GRATIS WARGA TIDAK MAMPU																												
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBIUDAYAAN																											
		Prg	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																									
		Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										BPJS Ketenagakerjaan Guru Honorer PAUD, SD dan SMP Negeri	531	Orang	Rp90.482.400	531	Orang	Rp90.482.400	Guru Honorer PAUD, SD dan SMP Negeri Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp.80.438.400 Iuran Jaminan Kematian Rp.100.867.200	1064	Orang	Rp181.305.600	1064	Orang	Rp170.660.847		
		Sub	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
TOTAL				0			0		Rp0	0		Rp0		531		Rp90.482.400	531		Rp90.482.400		1064		Rp181.305.600	1064		Rp170.660.847	96,08%	
BPJS GRATIS WARGA TIDAK MAMPU																												
	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN																											
		Prg	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																									
		Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
		Sub	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										BPJS Ketenagakerjaan untuk Nelayan Rp.267.523.200	#####	Orang	Rp267.523.200	#####	Orang	Rp267.523.200	Nelayan Asuransi Kecelakaan dan Asuransi Kematian Total Rp. 356.944.800	#####	Orang	Rp356.944.800	#####	Orang	Rp356.944.800		
																				Petani Asuransi Kecelakaan dan Asuransi Kematian Total Rp. 592.117.200	#####	Orang	Rp592.117.200	#####	Orang	Rp592.117.200		
TOTAL				0			0		Rp0	0		Rp0		1327		Rp267.523.200	1327		Rp267.523.200		1327		Rp356.944.800	1327		Rp356.944.800	100,00%	
BPJS GRATIS WARGA TIDAK MAMPU																												
	DINAS PENDIDIKAN																											
		Prg	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																									
		Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
		Sub	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										BPJS Ketenagakerjaan Guru Honorer PAUD, SD dan SMP Negeri	531	Orang	Rp90.482.400	531	Orang	Rp90.482.400	Guru Honorer PAUD, SD dan SMP Negeri Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp.80.438.400 Iuran Jaminan Kematian Rp.100.867.200	1064	Orang	Rp181.305.600	1064	Orang	Rp170.660.847	94,13%	
TOTAL				0			0		Rp0	0		Rp0		531		Rp90.482.400	531		Rp90.482.400		1064		Rp181.305.600	1064		Rp170.660.847	96,08%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026	Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
				Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5				6				7				8				9				10				11	12
TUNJANGAN KESEHATAN DAN SANTUNAN DUKA RT/RW DAN PETUGAS RUMAH IBADAH																													
	KECAMATAN PALU TIMUR																												
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																											
		Keg Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																											
		Sub Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																											
		- Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian RT/RW											165	orang	Rp28.022.940	165	orang	Rp28.022.940			165	orang	Rp30.294.000		165	orang	Rp26.679.018			
TOTAL			0		0		Rp0	0		Rp0			165		Rp28.022.940	165		Rp28.022.940			165		Rp30.294.000		165		Rp26.679.018	93,80%	
TUNJANGAN KESEHATAN DAN SANTUNAN DUKA RT/RW DAN PETUGAS RUMAH IBADAH																													
	KECAMATAN PALU BARAT																												
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																											
		Keg Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																											
		Sub Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																											
		- Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian RT/RW			169	orang	Rp14.398.800	169	orang	Rp14.398.800			169	orang	Rp28.797.600	169	orang	Rp28.797.600		Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian RT/RW	169	orang	Rp31.028.400		169	orang	Rp23.324.677	75,17%	
TOTAL			0		169		Rp14.398.800	169		Rp14.398.800			169		Rp28.797.600	169		Rp28.797.600			169		Rp31.028.400		169		Rp23.324.677	89,62%	
TUNJANGAN KESEHATAN DAN SANTUNAN DUKA RT/RW DAN PETUGAS RUMAH IBADAH																													
	KECAMATAN ULUJADI																												
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																											
		Keg Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																											
		Sub Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																											
		Honor RT/RW/LPM			150	orang	Rp359.100.000	150	orang	Rp359.100.000			166	orang	Rp576.000.000	166	orang	Rp576.000.000			165	orang	Rp945.600.000		165	orang	Rp939.400.000			
		- Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian RT/RW			150	orang	Rp11.340.000	150	orang	Rp11.340.000			165	orang	Rp26.241.600	165	orang	Rp26.241.600			165	orang	Rp28.274.400		165	orang	Rp25.136.304			
TOTAL			0		300		Rp370.440.000	300		Rp370.440.000			331		Rp602.241.600	331		Rp602.241.600			330		Rp973.874.400		330		Rp964.536.304	99,52%	
TUNJANGAN KESEHATAN DAN SANTUNAN DUKA RT/RW DAN PETUGAS RUMAH IBADAH																													
	KECAMATAN MANTIKULORE																												
		Prg Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																											
		Keg Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																											
		Sub Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Gaji RT/RW	307	Orang	Rp648.000.000	307	Orang	Rp662.400.000		Gaji RT/RW	309	Orang	Rp1.055.100.000	309	Orang	Rp1.055.100.000		Gaji RT/RW	313	Orang	Rp1.870.800.000		313	Orang	Rp1.869.870.000	99,95%	
				BPJS tenaga kerja RT/RW Kec. Mantikulore	307	Orang	Rp12.268.800	307	Orang	Rp12.268.800		BPJS tenaga kerja RT/RW Kec. Mantikulore	309	Orang	Rp53.164.800	309	Orang	Rp53.164.800		BPJS tenaga kerja RT/RW Kec. Mantikulore	313	Orang	Rp57.466.800		313	Orang	Rp43.971.268	76,52%	
TOTAL			0		614		Rp660.268.800	614		Rp674.668.800			618		Rp1.108.264.800	618		Rp1.108.264.800			626		Rp1.928.266.800		626		Rp1.913.841.268	100,00%	
TUNJANGAN KESEHATAN DAN SANTUNAN DUKA RT/RW DAN PETUGAS RUMAH IBADAH																													
	KECAMATAN TATANGA																												
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																											
		Keg Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																											
		Sub Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																											
		Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian RT/RW			169	orang	Rp14.398.800	169	orang	Rp14.398.800			169	orang	Rp28.797.600	169	orang	Rp28.797.600		Jaminan Kecelakaan Kerja bagi RT/RW	165	orang	Rp17.544.000		165	orang	Rp13.970.849	79,63%	
																				Jaminan Kematian bagi RT/RW			Rp21.930.000				Rp17.463.558	79,63%	
																				Belanja Jasa Kelembagaan			Rp1.239.600.000				Rp1.229.700.000	99,20%	
TOTAL			0		169		Rp14.398.800	169		Rp14.398.800			169		Rp28.797.600	169		Rp28.797.600			165		Rp1.279.074.000		165		Rp1.261.134.407	98,64%	
TUNJANGAN KESEHATAN DAN SANTUNAN DUKA RT/RW DAN PETUGAS RUMAH IBADAH																													
	KECAMATAN TAWAELI																												
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																											
		Keg Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																											
		Sub Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																											
		- Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian RT/RW					Rp0			Rp0											109	orang	Rp20.012.400		109	orang	Rp13.341.600			
TOTAL			0		0		Rp0	0		Rp0			0		Rp0	0		Rp0			109		Rp20.012.400		109		Rp13.341.600	66,67%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
TUNJANGAN KESEHATAN DAN SANTUNAN DUKA RT/RW DAN PETUGAS RUMAH IBADAH																												
	KECAMATAN PALU UTARA																											
		Prg	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
		Keg	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																									
		Sub	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																									
		-	Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian RT/RW											98	orang	Rp16.699.200	98	orang	Rp16.699.200		98	orang	Rp17.992.800	98	orang	Rp14.134.450		
TOTAL				0			0		Rp0	0		Rp0		98		Rp16.699.200	98		Rp16.699.200		98		Rp17.992.800	98		Rp14.134.450	88,88%	
TUNJANGAN KESEHATAN DAN SANTUNAN DUKA RT/RW DAN PETUGAS RUMAH IBADAH																												
	KECAMATAN PALU SELATAN																											
		Prg	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan																									
			Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				212	orang	Rp8.946.000	212	orang	Rp8.946.000	BPJS tenaga kerja RT/RW	212	Orang	Rp36.636.000	212	Orang	Rp36.636.000	BPJS tenaga kerja RT/RW	212	Orang	Rp58.293.600	212	Orang	Rp58.293.600		
													BPJS tenaga kerja RT/RW Kec. Palu Selatan			Rp36.636.000			Rp35.616.000	Palu Selatan Jaminan Kecelakaan Kerja Non ASN (RT RW) Rp.36.465.600 Jaminan Kematian Non ASN (RT RW) Rp.21.828.000	285		Rp58.293.600	285	orang	Rp32.807.401		
TOTAL				0			212		Rp8.946.000	212		Rp8.946.000		212		Rp73.272.000	212		Rp72.252.000		497		Rp116.587.200	497		Rp91.101.001	86,67%	
TUNJANGAN KESEHATAN DAN SANTUNAN DUKA RT/RW DAN PETUGAS RUMAH IBADAH																												
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH																											
		Prg	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																									
		Keg	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat																									
		-	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	2312	Orang		46	Rumah Ibadah		46	Rumah Ibadah		BPJS tenaga kerja petugas rumah ibadah (2082 pegawai syara, 230 petugas pemulsaran jenazah)	2312	Pegawai Rumah Ibadah	Rp393.964.800	2312	Pegawai Rumah Ibadah	Rp393.964.800	Pegawai Syara Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp. 143.488.800 Iuran Jaminan Kematian Rp.179.930.400 Total Rp. 323.419.200	1898	Orang	Rp323.419.200	1898	Orang	Rp307.721.691		
						Insentif untuk petugas 46 rumah ibadah			Rp276.000.000			Rp276.000.000																
																				Petugas Pemulasaran Jenasah Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp.13.041.000 Iuran Jaminan Kematian Rp.16.353.000 Total Rp. 29.394.000	230	Orang	Rp29.394.000	230	Orang	Rp27.202.694		
																				GURU MENGAJI Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp. 6.955.200 Iuran Jaminan Kematian Rp. 8.721.600 Total Rp. 15.676.800	92	Orang	Rp15.676.800	92	Orang	Rp1.089.805		Bpjs ketenagakerjaan untuk guru mengaji dananya tidak di realisasikan pada bulan Januari-November karena data fix masuk pada bagian kesra di bulan Desember
																				GURU BACA TULIS HAFAL AL QUR'AN (BTQ) Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Rp. 6.955.200 Iuran Jaminan Kematian Rp. 8.721.600 Total Rp. 15.676.800	92	Orang	Rp15.676.800	92	Orang	Rp877.505		Bpjs ketenagakerjaan untuk guru Baca Tulis hafal Al Quran (BTQ) dananya tidak di realisasikan pada bulan Januari-November karena data fix masuk pada bagian kesra di bulan Desember
TOTAL				2312			46		Rp276.000.000	46		Rp276.000.000		2312		Rp393.964.800	2312		Rp393.964.800		2128		Rp352.813.200	2128		Rp334.924.385	98,25%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1	2	3		4		5				6				7				8				9				10				11	12
BIDANG PELAYANAN DASAR (Pendidikan)																															
1.000 Beasiswa Keluarga Tidak Mampu																															
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH																														
		Prg	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																												
		Keg	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat																												
		Sub	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial											Bantuan beasiswa Rp. 6,750,000 per mahasiswa	148	Orang	Rp1.000.000.000	48	Orang	Rp324.000.000		Dana Bantuan Pelajar/Mahasiswa Rp. 722.250.000	133	Orang	Rp722.250.000	107	orang	Rp708.750.000		Dari 107 Penerima Hanya 105 Yang Di Realisasikan Berkas (1 Orang Mahasiswa Belum Bisa Melengkapi Berkas Persyaratan Dan 1 Nama Doubel)
TOTAL				0			0		Rp0	0		Rp0			148		Rp1.000.000.000	48		Rp324.000.000			133		Rp722.250.000	107		Rp708.750.000	59,97%	
REWARD SEBESAR 2 MILYAR BAGI SD DAN SMP BERPRESTASI																															
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																														
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan	15	Sekolah																										
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar											Lomba Sekolah Berprestasi Jenjang SD	3	SD	Rp1.000.000.000	3	SD	Rp1.000.000.000		Lomba Sekolah Berprestasi Jenjang SD Juara I 500.000.000 Juara II 300.000.000 Juara III 200.000.000	3	SD	Rp1.000.000.000	3	SD	Rp750.000.000		Juara 1 SD Negeri 3 Palu, juara 2 SD inpres 1 Lasoani, juara 3 SD inpres 3 Birobuli . Berdasarkan hasil rapat pimpinan Daerah bahwa pemberian reward berprestasi diberikan secara merata dan masing-masing 3 sekolah menerima 250 Juta tanpa melihat ketegori sehingga terdapat sisa anggaran 250 juta untuk SD sebagai Silpa Tahun 2023
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan	15	Sekolah																										
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama											Lomba Sekolah Berprestasi Jenjang SMP	3	SMP	Rp1.000.000.000	3	SMP	Rp1.000.000.000		Lomba Sekolah Berprestasi Jenjang SMP Juara I 500.000.000 Juara II 300.000.000 Juara III 200.000.000	3	SMP	Rp1.000.000.000	3	SMP	Rp750.000.000		Juara 1 SMP Negeri 3 Palu, Juara 2 SMP Negeri 15 Palu, Juara 3 SMP negeri 9 Palu, Berdasarkan hasil rapat pimpinan Daerah bahwa pemberian reward berprestasi diberikan secara merata dan masing-masing 3 sekolah menerima 250 Juta tanpa melihat ketegori sehingga terdapat sisa anggaran 250 juta untuk SMP sebagai Silpa Tahun 2023
TOTAL				30			0		Rp0	0		Rp0			6		Rp2.000.000.000	6		Rp2.000.000.000			6		Rp2.000.000.000	6		Rp1.500.000.000	87,50%	
PERCEPATAN PENINGKATAN PERSAMAAN KUALITAS SD DAN SMP SE-KOTA PALU																															
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																														
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																												
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																												
		Sub	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU																												
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Perencanaan Pembangunan SMP Negeri 23	1	Sekolah	Rp100.000.000	1	Sekolah	Rp100.000.000		Pembangunan Ruang Guru Beserta Perabotnya SDN 13 Palu	1	Sekolah	Rp272.399.340	1	Sekolah	Rp252.332.580										

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1	2	3		4		5				6				7				8				9				10				11	12
						Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Perencanaan Pembangunan SD satu atap di Uwentumbu	1	Sekolah	Rp35.000.000	1	Sekolah	Rp35.000.000											Pembangunan ruang guru beserta Pengadaan Perabot Ruang Guru [-] SD ISLAM IQRA PETOBO	1	Sekolah	Rp370.531.200	1	Sekolah	Rp328.279.900			
						Pembangunan ruang guru beserta pengadaan perabot ruang guru di 8 SD	8	Sekolah	Rp1.569.528.868	8	Sekolah	Rp1.569.528.868																				
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																												
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																												
		Sub	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya di SD Inpres 7 Labuan Baru	1	Sekolah	Rp101.891.133	1	Sekolah	Rp101.891.133		Pembangunan Toilet (Jamban) Beserta Sanitasinya (DAK)	4	Sekolah	Rp400.000.000	4	Sekolah	Rp399.330.000		Belanja Modal Mebel SDI AL- Akbar, SD Inp. Petobo, SDN 1 Petobo, SDN 2 Petobo	4	Sekolah	Rp196.840.000	4	Sekolah	Rp194.600.000			
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																												
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																												
		Sub	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah											Pembangunan ruang UKS beserta perabotnya (DAK)	2	Sekolah	Rp204.000.000	2	Sekolah	Rp203.455.000		Pembangunan ruang laboratorium komputer DAK SD beserta Perabot Ruang Laboratorium DAK SD [-] SD ISLAM IQRA PETOBO [-] SD KARUNA DIPA PALU [-] SD KRISTEN GPID PALU [-] SD NEGERI TATANGA	4	Sekolah	Rp1.482.124.800	4	Sekolah	Rp1.421.670.500			
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																												
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																												
		Sub	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			Pembangunan ruang perpustakaan DAK SD beserta Perabot Ruang Perpustakaan DAK SD [-] SD ISLAM IQRA PETOBO, [-] SD KRISTEN GPID PALU	2	Sekolah	Rp717.600.000	2	Sekolah	Rp666.076.000			
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																												
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																												
		Sub	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			Pembangunan ruang UKS DAK SD beserta Perabot ruang UKS DAK SD [-] SD ISLAM IQRA PETOBO	1	Sekolah	Rp135.200.000	1	Sekolah	Rp134.890.000			
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																												
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																												
		Sub	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			[#] Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) (DAK) SD ALAM AL-FATIH PALU, SD INPRES 15 WARA, SD ISLAM IQRA PETOBO,SD ISLAM TERPADU AL FAHMI PALU, SD KARUNA DIPA PALU, SD KRISTEN GPID PALU	6	Sekolah	Rp750.000.000	6	Sekolah	Rp749.770.000			
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																												
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																												
		Sub	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																			Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya DAK SD	1	Sekolah	Rp120.587.000	1	Sekolah	Rp120.365.000			
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																												
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																												
		Sub	Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya (DAK)											Pembangunan ruang laboratorium komputer beserta perabotnya (DAK) 12 Sekolah	12	Sekolah	Rp3.036.375.000	12	Sekolah	Rp2.736.238.360											

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																									
		Sub	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah										Rehab Ruang Kelas Berikut Perabotnya (DAK) 3 ruang SD Negeri Watusampu	1	Sekolah	Rp360.000.000	dikerjakan (PUPR)											
													Rehab Ruang Kelas Berikut Perabotnya (DAK) 1 paket SD IT BINA INSAN PALU	1	Sekolah	Rp100.000.000	1	Sekolah	Rp99.670.000										
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																									
		Sub	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah			Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas SD Inpres 1 Kamonji dan Rehab Ruang Perpustakaan SDN Tipo	2	Sekolah	Rp535.225.736	2	Sekolah	Rp535.225.736	Rehab Ruang Perpustakaan Berikut Perabotnya (DAK) SD Negeri 8 Palu	1	Sekolah	Rp103.891.660	1	Sekolah	Rp89.497.000										
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																									
		Sub	Pengadaan Perlengkapan Sekolah										Pengadaan peralatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) (DAK) 132 paket	135	Sekolah	Rp16.875.000.000	135	Sekolah	Rp16.874.865.000										
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar																									
		Sub	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar										Belanja Barang dan Jasa BOS (BOS Pusat)	1	Tahun	Rp30.800.700.000	1	Tahun	Rp29.893.978.257	Belanja Barang dan Jasa BOS [BOS Pusat]	1	Tahun	Rp30.937.770.895	1	Tahun	Rp30.565.609.500		Sisa Silva 372.161.395
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
		Sub	Pembangunan Laboratorium			Pembangunan laboratorium beserta pengadaan perabotnya di SMPN 11 dan SMPN 5 Palu	2	Sekolah	Rp1.017.134.490	2	Sekolah	Rp1.017.134.490	Pembangunan laboratorium komputer (DAK) 4 paket	4	Sekolah	Rp1.738.360.000	4	Sekolah	Rp1.455.127.400										
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
		Sub	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah										Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah SMP	5	Sekolah	Rp964.343.750	5	Sekolah	Rp964.343.750	Pembangunan ruang UKS DAK SMP beserta Pengadaan Perabot ruang UKS DAK SMP SMPN 18 Palu, SMPN 12 Palu, SMPN 7 Palu	3	Sekolah	Rp1.020.000.000	3	Sekolah	Rp995.510.400		
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
		Sub	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya (DAK) SMP	5	Sekolah	Rp1.030.750.000	5	Sekolah	Rp966.869.800	Pembangunan ruang laboratorium komputer DAK SMP beseta Perabot Pembangunan ruang laboratorium komputer DAK SMP SMP ISLAM TERPADU AL-FAHMI, SMP NEGERI 7 PALU	2	Sekolah	Rp1.347.355.000	2	Sekolah	Rp1.335.573.500		
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
		Sub	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah																	Pembangunan toilet (jamban) beserta sanitasinya DAK SMP SMPN 18 Palu, SMPN 2 Palu, SMPN 7 Palu	3	Sekolah	Rp750.000.000	3	Sekolah	Rp730.196.700		

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
		Sub	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																Rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) DAK SMP beserta Perabot Rehab ruang laboratorium Ilmu pengetahuan alam (IPA) DAK SMP SMPN 18 Palu & SMPN 7 Palu	2	Sekolah	Rp720.000.000	2	Sekolah	Rp711.368.700		
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
		Sub	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah																Rehabilitasi ruang perpustakaan DAK SMP beserta Perabot Rehab Ruang Perpustakaan DAK SMP SMPN 2 Palu	1	Sekolah	Rp320.000.000	1	Sekolah	Rp318.778.200		
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
		Sub	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										Pembangunan ruang pusat sumber pendidikan inklusif beserta perabotnya (DAK)	2	Sekolah	Rp271.750.000	2	Sekolah	Rp270.768.000									
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
		Sub	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah										Rehab ruang guru SMP Negeril 17 Palu	1	Sekolah	Rp244.850.000	1	Sekolah	Rp218.997.373									
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
		Sub	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah										Rehab perpustakaan SMP Negeril 17 Palu	1	Sekolah	Rp233.181.250	1	Sekolah	Rp198.157.400									
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
		Sub	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium										Rehabilitasi ruang laboratorium IPA DAK SMP	3	Sekolah	Rp595.324.450	3	Sekolah	Rp556.567.600									
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
		Sub	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah										Rehabilitasi Toilet/Jamban Siswa (DAK) SMP Negeril 17 Palu	1	Sekolah	Rp86.760.650	1	Sekolah	Rp86.500.000									
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																									
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																									
		Sub	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama										BOS [BOS Reguler] Rp. 15.631.200.000 BOS [Kinerja SD & SMP] Rp. 4.009.500.000	1	Tahun	Rp19.640.700.000	1	Tahun	Rp18.764.931.780	Belanja Barang dan Jasa BOS [BOS Pusat] Rp. 16.540.650.000 Belanja Barang dan Jasa BOS [BOS Pusat] Rp.2.460.000.000	1	Tahun	Rp19.000.650.000	1	Tahun	Rp18.920.939.246		Belanja BOS SMP Reguler 16.460.939.246 BOS Kinerja SD & SMP 2.460.000.000

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1	2	3		4		5				6				7				8				9				10				11	12
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																												
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			Pengadaan alat musik Marching Band SDN 2 Lere dan SD Inpres 1 Tatura	2	Sekolah	Rp90.000.000	2	Sekolah	Rp90.000.000		Belanja Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) fisika (DAK) SMP Alkhairat1 Palu, SMP Alkhairat2 Palu, SMP Negeri 10 Palu, SMP Negeri 13 Palu, SMP Negeri 14 Palu, SMP Negeri 17 Palu, SMP Negeri 1 Palu, SMP Negeri 21 Palu, SMP Negeri 6 Palu, SMP Negeri Model Terpadu Madani Palu	10	Sekolah	Rp265.400.000	10	Sekolah	Rp251.000.000											
		Prg	Program Pengelolaan Pendidikan																												
		Keg	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama																												
		Sub	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP											Belanja Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) biologi (DAK) SMP Alkhairat 1 Palu, SMP Alkhairat 2 Palu, SMP Negeri 10 Palu, SMP Negeri 13 Palu, SMP Negeri 14 Palu, SMP Negeri 17 Palu, SMP Negeri 1 Palu, SMP Negeri 21 Palu, SMP Negeri 6 Palu, SMP Negeri Model Terpadu Madani Palu	10	Sekolah	Rp247.700.000	10	Sekolah	Rp246.000.000											
														Belanja Pengadaan peralatan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) (DAK) SMP OTAK KANAN INDONESIA PUSAT PALU	1	Sekolah	Rp125.000.000	1	Sekolah	Rp122.671.000											
		Prg	Program Pendidik dan tenaga kependidikan																												
		Keg	Pemerataan kuantitas dan kualitas PTK PAUD dan Nonformal/Kesetaraan																												
		Sub	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan											Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dalam Komunitas Untuk Pemetaan Kompetensi Guru secara berkala dalam Program Guru Penggerak	1	Kali	Rp48.990.000	1	Kali	Rp48.990.000	Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dalam Komunitas Untuk Pemetaan Kompetensi Guru secara berkala dalam Program Guru Penggerak										
TOTAL				0			17		Rp3.448.780.227	17		Rp3.448.780.227			203		Rp77.645.476.100	202		Rp74.700.290.300			32		Rp57.868.658.895	32		Rp57.193.627.646	97,39%	
PERCEPATAN PENINGKATAN PERSAMAAN KUALITAS SD DAN SMP SE KOTA PALU																															
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																														
		Prg	Program Pembinaan Perpustakaan																												
		Keg	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota																												
		Sub	Pembudayaan Gemar membaca Tingkat Daerah			layanan informasi dan pengetahuan masyarakat	4	Sub Kegiatan	Rp30.564.275	4	Sub Kegiatan	Rp30.522.000		layanan informasi dan pengetahuan masyarakat	6	Sub Kegiatan	Rp151.264.750	6	Sub Kegiatan	Rp151.264.750		layanan informasi dan pengetahuan masyarakat	6	Sub Kegiatan	Rp152.670.000	6	Sub Kegiatan	Rp152.670.000			
						Peningkatan minat baca masyarakat	2	Sub Kegiatan	Rp23.393.050	2	Sub Kegiatan	Rp23.393.050		Peningkatan minat baca masyarakat	3	Sub Kegiatan	Rp39.392.000	3	Sub Kegiatan	Rp39.392.000		Peningkatan minat baca masyarakat	3	Sub Kegiatan	Rp56.732.500	3	Sub Kegiatan	Rp55.592.500			
		Prg	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno																												
		Keg	Pelestarian Naska Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			Layanan informasi dan ilmu penngetahuan naskah kuno	1	Sub Kegiatan	Rp7.450.000	1	Sub Kegiatan	Rp7.450.000		Layanan informasi dan ilmu penngetahuan naskah kuno	1	Sub Kegiatan	Rp11.917.700	1	Sub Kegiatan	Rp11.917.700		Layanan informasi dan ilmu pengetahuan naskah kuno	1	Sub Kegiatan	Rp5.648.850	1	Sub Kegiatan	Rp5.648.850			
TOTAL				0			7		Rp61.407.325	7		Rp61.365.050			10		Rp202.574.450	10		Rp202.574.450			10		Rp215.051.350	10		Rp213.911.350	99,75%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
PELATIHAN TENAGA KERJA BERSERTIFIKASI PERKELURAHAN																												
	DINAS KOPERASI, UMKM DAN TENAGA KERJA																											
		Prg	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja																									
		Keg	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi																									
		Sub	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi			Kegiatan Bahasa Asing Kerjasama dengan Asosiasi/ Lembaga Pelatihan Kerja Pelatihan Bahasa Jepang	1	Paket	Rp149.226.200	1	Paket	Rp148.226.200	Kegiatan Bahasa Asing (Jepang) Program Specified Skill Workers (SSW)	300	Orang	Rp176.281.000	109	Orang	Rp146.440.057	Kegiatan Bahasa Asing (Jepang) Program Specified Skill Workers (SSW) dan Pelatihan Teknik Las (Fillet Walder SMAW 3F FF LAS) di 220 Jam	200	Orang	Rp970.653.000	200	Orang	Rp772.672.063	26,00%	
TOTAL				0			1		Rp149.226.200	1		Rp148.226.200		300		Rp176.281.000	109		Rp146.440.057		200		Rp970.653.000	200		Rp772.672.063	82,35%	
PELATIHAN TENAGA KERJA BERSERTIFIKASI PERKELURAHAN																												
	DINAS PEKERJAAN UMUM																											
		Prg	Program Pengembangan Jasa Konstruksi																									
		Keg	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi																									
		Sub	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	4	Kali Kegiatan	Pelatihan Tukang	40	Orang	Rp196.748.650	40	Orang	Rp171.287.561	Pelatihan Tukang dan Pengawas Konstruksi Rp.95.449.420	1	Paket	Rp95.449.420	1	Paket	Rp95.449.420	Pelatihan Tukang dan Pengawas Konstruksi Rp. 81.539.500	90	Orang	Rp81.539.500	90	Orang	Rp81.539.500		
TOTAL				4			40		Rp196.748.650	40		Rp171.287.561		1		Rp95.449.420	1		Rp95.449.420		90		Rp81.539.500	90		Rp81.539.500	93,19%	
UPDATE BERKALA KOMPETENSI, DAN KAPASITAS GURU/ PENGAJAR																												
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																											
		Prg	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																									
		Keg	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Guru PAUD																							
		Sub	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1365	Guru SD	Penilaian Kinerja Guru (PKG)	1	Kegiatan	Rp41.598.700	1	Kegiatan	Rp41.598.700	Penilaian Kinerja Guru (PKG)	1	Kegiatan	Rp32.269.500	1	Kegiatan	Rp31.905.000	Sosialisasi Program Induksi Guru Pemula (PIPG)	1	Kegiatan	Rp62.667.200	1	Kegiatan	Rp61.767.200		
				891	Guru SMP																							
TOTAL				2268			1		Rp41.598.700	1		Rp41.598.700		1		Rp32.269.500	1		Rp31.905.000		1		Rp62.667.200	1		Rp61.767.200	99,07%	
BUS GRATIS UNTUK SISWA SEKOLAH																												
	DINAS PERHUBUNGAN																											
		Prg	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																									
		Keg	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																									
		Sub	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Operasional Bus Gratis	4	TW	Rp164.457.600	4	TW	Rp122.382.000	Operasional Bus Gratis untuk Siswa Sekolah / BBM, Stiker Branding Bus, minum air mineral, makan nasi bungkus, & Honor Supir Bus	4	TW	Rp944.309.300	4	TW	Rp815.733.400	Operasional Bus Gratis untuk Siswa Sekolah / BBM, Makan Minum Supir Bus, & Honor Supir Bus	4	TW	Rp615.615.600	3	tw	Rp588.241.700		
TOTAL				0			4		Rp164.457.600	4		Rp122.382.000		4		Rp944.309.300	4		Rp815.733.400		4		Rp615.615.600	3		Rp588.241.700	88,52%	
KEPALA SEKOLAH MAGANG																												
	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																											
		Prg	Program Pendidik dan tenaga kependidikan	156	Kepsek																							
		Keg	Pemerataan kuantitas dan kualitas PTK PAUD dan Nonformal/Kesetaraan	132	Kepsek SD																							
		Sub	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	24	Kepsek SMP								Kegiatan magang kepala sekolah	8	Orang	Rp173.000.000	8	Orang	Rp173.000.000	Program Magang Kepala Sekolah	20	Orang	Rp712.545.000	20	Orang	Rp712.461.069		
TOTAL				312			0		Rp0	0		Rp0		8		Rp173.000.000	8		Rp173.000.000		20		Rp712.545.000	20		Rp712.461.069	99,99%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
BIDANG SOSIAL KEPENDUDUKAN																												
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS KERJA PADAT KARYA																												
	KECAMATAN Palu Timur																											
		Prg	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	Pemberian jasa peserta padat karya				324	Orang	Rp1.215.000.000	324	Orang	Rp1.215.000.000		300	Orang	Rp1.827.500.000	300	Orang	Rp1.827.500.000		300	Orang	2.641.500.000	291	Orang	2.636.250.000		
		-	Pembayaran iuran Jaminan Sosial Peserta Padat Karya				324	Orang	Rp54.432.000	324	Orang	Rp54.432.000		300	Orang	Rp52.416.000	300	Orang	Rp52.416.000		300	Orang	50.268.000	291	Orang	49.791.404		
TOTAL				0			648		Rp1.269.432.000	648		Rp1.269.432.000		600		Rp1.879.916.000	600		Rp1.879.916.000		600		Rp2.691.768.000	582		Rp2.686.041.404	99,90%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS KERJA PADAT KARYA																												
	KECAMATAN Palu Barat																											
		Prg	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	Pemberian jasa peserta padat karya			peserta padat karya, pengawas, operator dan pengendali	374		Rp1.132.200.000	374	Orang	Rp1.132.200.000	peserta padat karya, pengawas, operator dan pengendali	348		Rp2.025.000.000	348	Orang	Rp2.025.000.000	peserta padat karya, pengawas, operator dan pengendali	345	orang	3.066.150.000	345	orang	3.057.800.000		
		-	Pembayaran iuran Jaminan Sosial Peserta Padat Karya & Pengawas Padat Karya			Peserta Padat Karya	360		Rp60.480.000	360	Peserta Padat Karya	Rp60.480.000	Peserta Padat Karya	334	Orang	Rp58.632.000	334	334	Rp58.632.000	Peserta Padat Karya & Pengawas	343	orang	64.260.000	343	orang	55.381.965		
TOTAL				0			734		Rp1.192.680.000	734		Rp1.192.680.000		682		Rp2.083.632.000	682		Rp2.083.632.000		688		Rp3.130.410.000	688		Rp3.113.181.965	99,73%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS KERJA PADAT KARYA																												
	KECAMATAN Ulujadi																											
		Prg	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	Pemberian jasa peserta padat karya				565	Orang	Rp1.695.000.000	565	Orang	Rp1.695.000.000		565	Orang	Rp3.390.000.000	546	Orang	Rp3.390.000.000	peserta padat karya	546	orang	4.790.250.000	540	orang	4.785.750.000		
		-	Pembayaran iuran Jaminan Sosial Peserta Padat Karya				565	Orang	Rp94.920.000	565	Orang	Rp94.920.000		565	Orang	Rp94.920.000	546	Orang	Rp94.920.000	peserta padat karya	546	orang	Rp 95.083.200	540	orang	91.133.288		
TOTAL				0			1130		Rp1.789.920.000	1130		Rp1.789.920.000		1130		Rp3.484.920.000	1092		Rp3.484.920.000		1092		Rp4.885.333.200	1080		Rp4.876.883.288	99,92%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS KERJA PADAT KARYA																												
	KECAMATAN Mantikulore																											
		Prg	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	8	Kelurahan	Honor Padat Karya Kec. Mantikulore	566	Orang	Rp2.133.150.000	566	Orang	Rp2.133.150.000	Honor Padat Karya Kec. Mantikulore	555	Orang	Rp3.282.300.000	555	Orang	Rp3.282.300.000	Honor Padat Karya Kec. Mantikulore	542	Orang	4.838.550.000	542	Orang	4.838.550.000		
						Pengadaan Kostum/Baju Peserta Padat Karya 2 Pasang/ orang	539	Orang	Rp110.000.000	539	Orang	Rp110.000.000																	
						BPJS Padat Karya Kec. Mantikulore	566	Orang	Rp95.088.000	566	Orang	Rp95.088.000	BPJS Padat Karya Kec. Mantikulore	555	Orang	Rp94.572.000	555	Orang	Rp94.572.000	BPJS Padat Karya Kec. Mantikulore	542	Orang	Rp99.511.200	542	Orang	98.482.472		
TOTAL				8			1671		Rp2.338.238.000	1671		Rp2.338.238.000		1110		Rp3.376.872.000	1110		Rp3.376.872.000		1084		Rp4.938.061.200	1084		Rp4.937.032.472	99,99%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS KERJA PADAT KARYA																												
	KECAMATAN Palu Utara																											
		Prg	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	Pemberian jasa peserta padat karya			Peserta Padat Karya	472	orang	Rp347.250.000	472	orang	Rp347.250.000	Peserta Padat Karya	457	orang	Rp1.142.500.000	457	orang	Rp1.142.500.000	Peserta Padat Karya	454	orang	4.130.700.000	446	orang Peserta Padat Karya	4.127.700.000		
		-	Pembayaran iuran Jaminan Sosial Peserta Padat Karya			Peserta Padat Karya	472	orang	Rp79.296.000	472	orang	Rp79.296.000	Peserta Padat Karya	457	orang	Rp31.990.000	457	orang	Rp31.990.000	Peserta Padat Karya	454	orang	77.361.600	446	orang Peserta Padat Karya	76.899.755		
TOTAL				0			944		Rp426.546.000	944		Rp426.546.000		914		Rp1.174.490.000	914		Rp1.174.490.000		908		Rp4.208.061.600	892		Rp4.204.599.755	99,94%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS KERJA PADAT KARYA																												
	KECAMATAN Palu Selatan																											
		Prg	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	529	orang	Honor/Jasa Tenaga Padat Karya	5	kelurahan	Rp2.633.800.000	5	kelurahan	Rp2.633.800.000		529	Orang	Rp106.128.000	511	Orang	Rp106.128.000		523	Orang		510	Orang			
						Pengadaan Kostum/Baju Peserta Padat Karya 2 Pasang/ orang	1072	lbr	Rp107.200.000	1065	lbr	Rp106.128.000																	
						Honor peserta padat karya	529	ORANG	Rp2.483.250.000	525	orang	Rp2.463.310.000	Honor Padat Karya Kec. Palu Selatan	529	Orang	Rp3.379.200.000	511	Orang	Rp3.120.510.000	Honor Padat Karya Kec. Palu Selatan	523	Orang	4.591.200.000	523	Orang	4.581.651.923		
TOTAL				529			1606		Rp5.224.250.000	1595		Rp5.203.238.000		1058		Rp3.485.328.000	1022		Rp3.226.638.000		1046		Rp4.591.200.000	1033		Rp4.581.651.923	97,83%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS KERJA PADAT KARYA																												
	KECAMATAN Tawaeli																											
		Prg	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	Pemberian jasa peserta padat karya			Peserta Padat Karya	484	orang	Rp1.803.000.000	472	orang	Rp1.790.750.000	Peserta Padat Karya	472	orang	Rp2.832.000.000	472	orang	Rp2.832.000.000	Peserta Padat Karya	462	orang	Rp 4.215.450.000	462	orang	4.212.200.000		
		-	Pembayaran iuran Jaminan Sosial Peserta Padat Karya			Peserta Padat Karya	484	orang	Rp81.312.000	472	orang	Rp81.312.000	Peserta Padat Karya	472	orang	Rp81.648.000	472	orang	Rp79.386.021	Peserta Padat Karya	462	orang	Rp 80.428.800	462	orang	77.673.458		
TOTAL				0			968		Rp1.884.312.000	944		Rp1.872.062.000		944		Rp2.913.648.000	944		Rp2.911.386.021		924		Rp4.295.878.800	924		Rp4.289.873.458	99,77%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS KERJA PADAT KARYA																												
	KECAMATAN Tatanga																											
		Prg	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	Pemberian jasa peserta padat karya			peserta padat karya, pengawas, operator dan pengendali	399	orang	Rp1.495.500.000	378	orang	Rp1.495.500.000	peserta padat karya, pengawas, operator dan pengendali	399	orang	Rp2.300.900.000	367	orang	Rp2.300.900.000	peserta padat karya, pengawas, operator dan pengendali	381	orang	3.306.900.000	381	orang	3.290.801.875		
		-	Pembayaran iuran Jaminan Sosial Peserta Padat Karya & Pengawas Padat Karya			Peserta Padat Karya	397	orang	Rp64.386.000	376	orang	Rp64.386.000	Peserta Padat Karya	397	orang	Rp64.070.400	365	orang	Rp64.070.400	Peserta Padat Karya & Pengawas	379	orang	65.545.200	379	orang	60.533.784		
TOTAL				0			796		Rp1.559.886.000	754		Rp1.559.886.000		796		Rp2.364.970.400	732		Rp2.364.970.400		760		Rp3.372.445.200	760		Rp3.351.335.659	99,71%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KUALITAS KERJA PADAT KARYA																												
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																											
		Prg	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																									
		Keg	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																									
		Sub	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	1	Kajian															Kajian Peningkatan Kinerja Program Partisipatif Padat Karya	1	Kajian	Rp104.966.200	1	Kajian	Rp56.816.588		
TOTAL				1			0		Rp0	0		Rp0		0		Rp0	0		Rp0		1		Rp104.966.200	1		Rp56.816.588	54,13%	
BADAN PELAYANAN RUMAH IBADAH																												
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH																											
		Prg	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																									
		Keg	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat																									
		Sub	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Rp.48.540.500	1	Kegiatan	Rp2.248.540.500	1	Kegiatan	Rp2.248.540.500	Pembentukan Badan Pelayanan Rumah Ibadah dan Monev Pelayanan Rumah Ibadah Rp.47.027.680	1	Kegiatan	Rp47.027.680	1	Kegiatan	Rp47.027.680	Kegiatan Penyelenggaraan Rumah Ibadah Rp. 252.445.220	1	Kegiatan	Rp252.445.220	1	Kegiatan	255.850.220		Sisa Dana Perjadin Tidak 100 % Realisasi
						Pemberian Hibah untuk 26 Rumah ibadah Rp.2.200.000.000	26	Rumah Ibadah	Rp2.200.000.000	26	Rumah Ibadah	Rp2.200.000.000								Kegiatan Focus Group Discussion Kebangsaan dan Keagamaan Dalam Pelayanan Rumah Ibadah Rp. 71.352.250	1	Kegiatan	26.752.250	1	Kegiatan	26.752.250		
TOTAL				0			27		Rp4.448.540.500	27		Rp4.448.540.500		1		Rp47.027.680	1		Rp47.027.680		2		Rp279.197.470	2		Rp282.602.470	100,07%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
PALU BERBAGI																												
	DINAS SOSIAL																											
		Prg	Rehabilitasi sosial																									
		Keg	Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan pengemis Di Luar Panti																									
		Sub	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	820	orang	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Rp.570.144.050	71	orang	Rp570.144.050	71	orang	Rp487.571.800	Kebutuhan Dasar untuk Penyandang Disabilitas Berat/ Lumpuh Layu Rp.286.620.000	150	orang	Rp248.890.000	90	orang	Rp248.890.000	kebutuhan logistik PPKS 119.033.250	558	Orang	942.554.954	558	Orang	Rp935.343.274,00		tersalurkan sesuai kebutuhan
TOTAL				820			71		Rp570.144.050	71		Rp487.571.800		150		Rp248.890.000	90		Rp248.890.000		558		Rp942.554.954	558		Rp935.343.274	94,90%	
PALU BERBAGI																												
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																											
		Prg	Program Peningkatan Kualitas Keluarga																									
		-	(Paket sembako untuk keluarga Prasejahtera)										Paket sembako untuk keluarga Prasejahtera	8	Kecamatan	Rp30.000.000	8	Kecamatan	Rp30.000.000	Paket sembako untuk keluarga Prasejahtera	4	Kecamatan	Rp30.000.000	4	Kecamatan	Rp30.000.000		
TOTAL				0			0		Rp0	0		Rp0		8		Rp30.000.000	8		Rp30.000.000		4		Rp30.000.000	4		Rp30.000.000	100,00%	
PALU RELIGI																												
	KECAMATAN Palu Timur																											
		Prg	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum																									
		Keg	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah																									
		Sub	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan Golongan lainnya				54	orang peserta MTQ	Rp83.819.000	54	orang peserta MTQ	Rp83.819.000		22	orang peserta MTQ	Rp104.410.000	22	orang peserta MTQ	Rp104.410.000		54	orang peserta MTQ	243.002.250	54	orang peserta MTQ	226.729.750		MTQ dilaksanakan bulan Oktober
TOTAL				0			54		Rp83.819.000	54		Rp83.819.000		22		Rp104.410.000	22		Rp104.410.000		54		Rp243.002.250	54		Rp226.729.750	96,23%	
PALU RELIGI																												
	KECAMATAN Palu Barat																											
		Prg	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum																									
		Keg	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah																									
		Sub	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan Golongan lainnya			jumlah peserta MTQ	54	orang	Rp89.933.000	54	orang	Rp89.933.000	jumlah peserta MTQ	22	orang	Rp102.910.000	22	orang	Rp102.910.000	Jumlah Peserta MTQ	56	orang	270.740.000	56	orang	270.740.000		
TOTAL				0			54		Rp89.933.000	54		Rp89.933.000		22		Rp102.910.000	22		Rp102.910.000		56		Rp270.740.000	56		Rp270.740.000	100,00%	
PALU RELIGI																												
	KECAMATAN Ulujadi																											
		Prg	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum																									
		Keg	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah																									
		Sub	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan Golongan lainnya				54	peserta MTQ	Rp89.425.000	54	peserta MTQ	Rp89.425.000		22	peserta MTQ	Rp92.460.000	22	peserta MTQ	Rp92.460.000		56	peserta MTQ	Rp 262.690.000	55	peserta MTQ	261.940.000		
TOTAL				0			54		Rp89.425.000	54		Rp89.425.000		22		Rp92.460.000	22		Rp92.460.000		56		Rp262.690.000	55		Rp261.940.000	99,83%	
PALU RELIGI																												
	KECAMATAN Palu Utara																											
		Prg	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum																									
		Keg	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah																									
		Sub	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan Golongan lainnya			peserta MTQ	35	orang	Rp73.990.000	35	orang	Rp73.990.000	peserta MTQ	22	orang	Rp96.390.000	22	orang	Rp96.390.000	peserta MTQ	56	orang peserta MTQ	Rp262.280.000	53	orang peserta MTQ	Rp262.280.000		
TOTAL				0			35		Rp73.990.000	35		Rp73.990.000		22		Rp96.390.000	22		Rp96.390.000		56		Rp262.280.000	53		Rp262.280.000	100,00%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
PALU RELIGI																												
	KECAMATAN Tawaeli																											
		Prg	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum																									
		Keg	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah																									
		Sub	Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan Golongan lainnya			peserta MTQ	54	orang	Rp80.845.000	54	orang	Rp80.435.000	peserta MTQ	22	orang	Rp102.950.000	22	orang	Rp98.700.000	peserta MTQ	54	orang	240.240.000	54		224.490.000		
TOTAL				0			54		Rp80.845.000	54		Rp80.435.000		22		Rp102.950.000	22		Rp98.700.000		54		Rp240.240.000	54		Rp224.490.000	95,19%	
PALU RELIGI																												
	KECAMATAN Tatanga																											
		Prg	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum																									
		Keg	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah																									
		Sub	Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan kepala Daerah			peserta MTQ	54	orang		54	orang		peserta MTQ	22	orang		22	orang		peserta MTQ	54	orang	262.480.000	54	orang	253.205.000		
			Pembinaan Kerukunan antar suku dan intrasuku, umat beragama, ras dan Golongan lainnya																									
TOTAL				0			54		Rp0	54		Rp0		22		Rp0	22		Rp0		54		Rp262.480.000	54		Rp253.205.000	96,47%	
PALU RELIGI																												
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH																											
		Prg	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																									
		Keg	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat	setiap tahun																								
		Sub	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			Pelaksanaan STQ/MTQ Rp.2.478.261.234	1	Kegiatan	Rp2.478.261.234	1	Kegiatan	Rp2.478.261.234	Pelaksanaan STQ/MTQ dan Pelaksanaan PESPARAWI Rp.2.707.952.900	1	Kegiatan	Rp2.707.952.900	1	Kegiatan	Rp2.707.952.900	Pelaksanaan STQ/MTQ Tkt. Kota Rp. 1.381.664.300	1	Kegiatan	1.381.664.300	1	Kegiatan	1.354.914.300		
																				Pelaksanaan STQ/MTQ Tingkat Kota, Provinsi Rp. 698.660.200	1	Kegiatan	698.660.200	1	Kegiatan	655.212.440		
													Pembinaan Qori Qoriah Rp.305.250.000	1	Kegiatan	Rp305.250.000	1	Kegiatan	Rp305.250.000	Kegiatan Pembinaan Qori Qoriah Rp.451.520.550	1	Kegiatan	Rp451.520.550	1	Kegiatan	Rp451.520.550		
													Silahturahim Ramadhan Rp.379.208.080	1	Kegiatan	Rp379.208.080	1	Kegiatan	Rp379.208.080	Kegiatan Silahturahim Ramadhan Rp. 782.432.500	1	Kegiatan	Rp782.432.500	1	Kegiatan	Rp769.120.000		
													Festival Raodhah Rp.157.950.000	1	Kegiatan	Rp157.950.000	1	Kegiatan	Rp157.950.000	Kegiatan Lomba Paduan Suara PSP, PSW dan Anak Rp.221.780.600	1	Kegiatan	23.420.600	1	Kegiatan	199.335.270		Sebagian anggaran kegiatan tidak direalisasikan karena kurangnya dokumen LPJ pendukung
													Pembinaan TK/TPA Kelurahan Rp.683.100.000	1	Kegiatan	Rp683.100.000	1	Kegiatan	Rp683.100.000	Kegiatan Pelatihan Dasar Pelatih dan Dirihen Paduan Suara Rp.110.266.400	1	Kegiatan	Rp110.266.400	1	Kegiatan	93.764.530		Sebagian anggaran kegiatan tidak direalisasikan
																				Kegiatan Palu Mengaji Rp. 1.340.860.000	1	Kegiatan	1.340.860.000	1	Kegiatan	882.900.000		Honorarium Guru Mengaji Dan Guru Pelatih Seni dan Hafal Alquran, terdapat Guru Mengaji Dan Guru BTQ Yang Tidak Aktif Di Beberapa Kelurahan Dan Juga Tidak Memasukan laporan Harian
TOTAL				0			1		Rp2.478.261.234	1		Rp2.478.261.234		5		Rp4.233.460.980	5		Rp4.233.460.980		6		Rp4.788.824.550	6		Rp4.406.767.090	96,68%	
PALU RELIGI																												
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																											
		Prg	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya																									
		Keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Penghayat Kepercayaan di Daerah																									

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026	Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
				Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5				6			7				8			9				10			11	12
		Sub - Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan		Kegiatan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB)	4	TW	Rp48.540.500	4	TW	Rp48.277.625															
		Sub - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kegiatan Penyusunan Materi Khotbah	4	TW	Rp66.068.500	4	TW	Rp66.000.800	Penyusunan Materi Khotbah Kerukunan Umat Beragama	4	TW	Rp38.180.900	4	TW	Rp37.697.000	Penyusunan Materi Khotbah Kerukunan Umat Beragama	4	TW	Rp35.868.650	4	TW	34.305.900		
				Kegiatan Sosialisasi Penguatan Penyelesaian Perkara/Kasus Adat							Honor Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat FKUB	4	TW	Rp74.920.000	4	TW	Rp74.920.000	Honor Dewan Penasehat, Pengurus dan Sekretariat FKUB, Tim P4GN	4	TW	Rp103.880.000	4	TW	102.000.000		
				Kegiatan silahturahmi dan dialog tokoh lintas agama	5	Kali/ Kegiatan	Rp64.402.650	5	Kali/ Kegiatan	Rp62.471.400	Dialog dan Silahturahmi Kerukunan Umat Beragama di Rumah-Rumah Ibadat	5	Kali/ Kegiatan	Rp53.438.500	5	Kali/ Kegiatan	Rp48.022.900	Dialog dan Silahturahmi Kerukunan Umat Beragama di Rumah-Rumah Ibadat	5	Kali/ Kegiatan	Rp36.023.200	5	Kali/ Kegiatan	36.023.200		
		Prg Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya									Rapat Koordinasi FKUB	1	Kegiatan	Rp3.621.750	1	Kegiatan	Rp3.115.600	Rapat Koordinasi FKUB	4	TW	Rp5.762.500	4	TW	Rp5.762.500		
		Keg Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																								
		Sub - Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah									Rapat Koordinasi FKUB	1	Kali/ Kegiatan	Rp3.621.750	1	Kali/ Kegiatan	Rp3.115.600	Rapat Koordinasi FKUB	4	TW	5.762.500	4	TW	5.762.500		
		Prg Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		-																						
		Keg Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																								
		Sub - Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		-							Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun FKUB	1	Kali/ Kegiatan	Rp1.606.800	1	Kali/ Kegiatan	Rp1.606.800	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun FKUB dan Tim Terpadu P4GN	2	Kegiatan	Rp4.761.400	2	Kegiatan	3.111.950		
TOTAL			0		13		Rp179.011.650	13		Rp176.749.825		16		Rp175.389.700	16		Rp168.477.900		23		Rp192.058.250	23		Rp186.966.050	97,39%	
PELESTARIAN SENI BUDAYA																										
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN																										
		Prg Program Pengembangan Kebudayaan																								
		Keg Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																								
		Sub Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan																Penyusunan dan pengembangan kurikulum lokal bahasa kaili berbasis prototipe	2	Kegiatan	194.483.600	2	Kegiatan	192.328.600		
																		Pembangunan Bantaya Bantaya Lekatu Kel. Tipo , Bantaya Salena Kel. Buluri, kelurahan Tanamodindi	4	Paket	1.441.000.000	4	Paket	1.400.899.200		
																		Pembangunan Gedung kesenian	1	Paket	13.743.440.000	1	Paket	13.654.720.475		
																		Pembangunan Rumah adat kecamatan ulujadi	1	Paket	Rp175.542.835	1	Paket	173.961.000		

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6				7				8				9				10			11	12
		Prg	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	25	Sanggar Seni																									
		Keg	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	Cagar Budaya																									
		Sub	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	24	Sekolah Sanggar Seni	Berupa Pengadaan Alat Musik untuk Forum Anak Besusu Timur dan komunitas Seni Bantaya	1	Paket	Rp118.956.500	1	Paket	Rp118.956.500		Belanja Pengadaan Alat Musik komunitas Sanggar Seni Simpotove	1	Paket	Rp98.899.000	1	Paket			Belanja Pengadaan Alat Musik Forum Anak BTN KORPRI KAWATUNA & Komunitas Seni Lobo	16	unit	86.145.200	16	unit	86.145.200		
														Belanja Pengadaan Alat Musik komunitas Sanggar Seni Pue Nggari	1	Paket	Rp49.790.000	1	Paket													
														Kegiatan Workshop Tarian Tradisi dan Musik Tradisi/ Dialog Seni (Menetapkan Musik, Tari, Sastra Suku Kaili yang Asli)	1	Kegiatan	Rp5.300.000	1	Kegiatan													
		Prg	Program Pengembangan Kesenian Tradisional																											
		Keg	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota																											
		Sub	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional																			Kegiatan Tarian Tradisi dan Musik Tradisi	1	Kegiatan	Rp28.830.610	1	Kegiatan	Rp28.830.610		
		Prg	Program Pengembangan Kebudayaan	25	Sanggar Seni																									
		Keg	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	24	Sekolah Sanggar Seni																									
		Sub	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya											Pembuatan film budaya	1	Kegiatan	Rp150.000.000													
		Prg	Program Pengembangan Kebudayaan																											
		Keg	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																											
		Sub	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya																			Kegiatan Ekspresi Seni Budaya	1	Kegiatan	Rp196.225.000	1	Kegiatan	196.125.000		
		Prg	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	12	Cagar Budaya																									
		Keg	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota																											
		Sub	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya											Pelatihan Sertifikasi Tim Ahli Cagar Budaya	1	Kegiatan	Rp151.095.000	1	Kegiatan	Rp140.554.400										
		Prg	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	12	Cagar Budaya																									
		Keg	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kab/Kota																											
		Sub	Pengembangan Cagar Budaya											Pemetaan Kawasan Cagar Budaya dan Kota Tua	1	Kegiatan	Rp40.717.750	1	Kegiatan	Rp40.717.750										
TOTAL				134			1		Rp118.956.500	1		Rp118.956.500			6		Rp495.801.750	5		Rp181.272.150			26		Rp15.865.667.245	26		Rp15.733.010.085	97,29%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026	Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
				Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5				6			7				8			9				10			11	12
PELESTARIAN SENI BUDAYA																										
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																									
	Prg	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya																								
	Keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																								
	Sub	- Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Kegiatan Lembaga Adat dan Honor lembaga adat/ suro adat	4	TW	Rp1.172.906.600	4	TW	Rp1.164.116.125	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Lembaga Adat dan honor lembaga adat/ suro adat	3	TW	Rp800.443.625	3	TW	Rp799.243.625	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Dewan Adat dan Lembaga Adat dan honor Dewan Adat dan lembaga adat/ suro adat	4	TW	808.072.200	4	TW	797.422.750		
				Fasilitasi Organisasi Seni Budaya (3 paket alat kesenian)	3	Paket	Rp99.900.000	3	Paket	Rp99.630.000	Fasilitasi Organisasi Seni Budaya (3 paket alat kesenian)	3	Paket	Rp99.900.000	3	Paket	Rp99.750.000	Fasilitasi Organisasi Majelis Ta'lim (7 Paket alat Kesenian Marawis)	31	Paket	967.196.300	28	Paket	760.948.800		sudah selesai (terdapat sisa/selisih belanja)
	Prg	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya																								
	Keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																								
	Sub	- Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Rapat Koordinasi Tim Terpadu P4GN dan Monitoring dan evaluasi tugas dan kinerja Lembaga Adat	4	TW	Rp24.518.750	4	TW	Rp22.358.750	Rapat Koordinasi Lembaga Adat	1	Kegiatan	Rp11.596.200	1	Kegiatan	Rp9.787.500	Rapat Koordinasi Dewan Adat bersama Lembaga Adat, dan Tim Terpadu P4GN	3	Kali/ Kegiatan	17.658.500	3	Kali/ Kegiatan	16.167.950		
	Prg	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		-																						
	Keg	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya																								
	Sub	- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan UmatBeragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		-							Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Lembaga Adat	1	Kegiatan	Rp6.114.150	1	Kegiatan	Rp5.764.750	Evaluasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun Dewan Adat bersama Lembaga Adat	4	TW	Rp5.899.500	4	TW	4.271.800		
TOTAL			0		11		Rp1.297.325.350	11		Rp1.286.104.875		8		Rp918.053.975	8		Rp914.545.875		42		Rp1.798.826.500	39		Rp1.578.811.300	94,15%	
PALU RAMAH DIFABEL																										
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																									
	Prg	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah																								
	Keg	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan																								
	Sub	Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota			100	%	Rp233.419.075	100	%	Rp232.533.723				Rp285.968.575			Rp283.416.559		100	%	355.974.150	100	%	346.852.730		
				Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	%		100	%		Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah	100	%		100	%		Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah								
				Pelaksanaan Musrenbang Inklusi dan RKPD Kota Palu	3	Berita Acara		3	Berita Acara		Pelaksanaan Musrenbang Inklusi dan RKPD Kota Palu	3	Berita Acara		3	Berita Acara		Pelaksanaan Musrenbang Inklusi dan RKPD Kota Palu								
TOTAL			0		203		Rp233.419.075	203		Rp232.533.723		103		Rp285.968.575	103		Rp283.416.559		100		Rp355.974.150	100		Rp346.852.730	98,57%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
PALU RAMAH DIFABEL																											
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																										
		Prg Program Perlindungan Perempuan																									
		- (Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan, anak dan difabel)			113 kasus (80 perempuan, 33 anak)	113	kasus	Rp51.816.101	113	kasus	Rp51.381.500	91 kasus (46 perempuan, 45 anak)	91	kasus	Rp137.096.590	91	kasus	Rp107.232.490	Target tidak bisa diprediksi karena disesuaikan dengan kasus yg tertangani	1	Keg	Rp 149.703.830	1	Keg	149.681.330		
TOTAL			0			113		Rp51.816.101	113		Rp51.381.500		91		Rp137.096.590	91		Rp107.232.490		1		Rp149.703.830	1		Rp149.681.330	91,05%	
PALU RAMAH DIFABEL																											
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																										
		Prg PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																									
		- Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Fetival dan Olahraga Rekreasi (Coffe Morning dan Pelajar Disabilitas)			coffe Morning dan PORSENI	2	Kegiatan	Rp246.938.400	2	Kegiatan	Rp185.467.750	coffe Morning dan FOT	2	Kegiatan	Rp519.538.670	2	Kegiatan	Rp434.210.170	coffe Morni,Fot, Porseni, Pelajar Disabilitas, dan Jelajah Lembah Palu	5	Kegiatan	1.157.257.710	5	Kegiatan	1.086.288.276		
TOTAL			0			2		Rp246.938.400	2		Rp185.467.750		2		Rp519.538.670	2		Rp434.210.170		5		Rp1.157.257.710	5		Rp1.086.288.276	88,68%	
PALU RAMAH DIFABEL																											
	DINAS SOSIAL																										
		Prg Rehabilitasi sosial																									
		Keg Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan pengemis Di Luar Panti																									
		- Penyediaan Permakanan	250	orang	Penyediaan Pemakaman Rp.23.507.900		orang	Rp23.507.900	5	orang	Rp22.800.000	Pelaksanaan kegiatan penyediaan pemakaman Rp.20.250.000	60	orang	Rp20.250.000	5	Jenazah	Rp8.750.000	Pelaksanaan kegiatan penyediaan pemakaman Rp.19.450.500	5	orang	Rp19.450.500	5	Jenazah	Rp17.606.300,00		
		- Penyediaan Alat Bantu	288	orang	Penyediaan alat bantu untuk penyandang disabilitas Rp.1.900.000	26	orang	Rp1.900.000	10	Unit	Rp1.900.000	26	28	orang	Rp98.050.000	28	Unit	Rp74.200.000	Alat bantu penyandang disabilitas Rp.64.025.000	47	orang	Rp64.025.000	47	unit	Rp63.740.000,00		
		- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1372	orang	Kebutuhan Dasar untuk Penyandang Disabilitas Berat/ Lumpuh Layu, belanja kebutuhan bayi terlantar, dan kebutuhan rumah singgah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial terlantar Rp.522.533.150	90	Orang	Rp522.533.150	90	Orang	Rp487.571.800	Kebutuhan Dasar untuk Penyandang Disabilitas Berat/ Lumpuh Layu Rp.286.620.000	90	Orang	Rp286.620.000	90	Orang	Rp248.890.000	Kebutuhan Dasar untuk Penyandang Disabilitas Berat/ Lumpuh Layu Rp. 187.200.000	90	orang	Rp187.200.000	90	orang	Rp187.200.000		
TOTAL			1910			116		Rp547.941.050	105		Rp512.271.800		178		Rp404.920.000	123		Rp331.840.000		142		Rp270.675.500	142		Rp268.546.300	90,94%	
EVENT TAHUNAN OLAHRAGA KOTA PALU																											
	KECAMATAN Palu Timur																										
		Prg Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		- Pemberian bonus lomba olah raga dan seni (PORSENI) tingkat Kelurahan dan Kecamatan											6	Paket	Rp12.000.000	5	Paket	Rp12.000.000		6	paket	Rp 54.000.000	6	paket	Rp 54.000.000		
TOTAL			0			0		Rp0	0		Rp0		6		Rp12.000.000	5		Rp12.000.000		6		Rp54.000.000	6		Rp54.000.000	100,00%	
EVENT TAHUNAN OLAHRAGA KOTA PALU																											
	KECAMATAN Palu Barat																										
		Prg Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		- - Pemberian bonus lomba olah raga dan seni (PORSENI) tingkat Kelurahan dan Kecamatan				6	Kelurahan	Rp144.000.000	6	Kelurahan	Rp144.000.000		6	Kelurahan	Rp144.000.000	6	Kelurahan	Rp144.000.000	Pemberian bonus lomba olah raga dan seni (PORSENI) tingkat Kelurahan dan Kecamatan	7	Kelurahan/kecamatan	218.850.000	7	Kelurahan/kecamatan	218.850.000		
																			Bantuan untuk sanggar Seni Kelurahan Balaroa	1	Paket	53.586.000	1	Paket	50.036.000		
TOTAL			0			6		Rp144.000.000	6		Rp144.000.000		6		Rp144.000.000	6		Rp144.000.000		8		Rp272.436.000	8		Rp268.886.000	99,37%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
EVENT TAHUNAN OLAHRAGA KOTA PALU																												
	KECAMATAN Ulujadi																											
		Prg	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	- Pemberian bonus lomba olah raga dan seni (PORSENI) tingkat Kelurahan dan Kecamatan				4	Paket	Rp200.000.000	4	Paket	Rp200.000.000		6	Paket	Rp161.500.000	5	Paket	Rp161.500.000		6	Paket	Rp 189.650.000	6	Paket	189.650.000		Kegiatan porseni TW 4
TOTAL				0			4		Rp200.000.000	4		Rp200.000.000		6		Rp161.500.000	5		Rp161.500.000		6		Rp189.650.000	6		Rp189.650.000	100,00%	
EVENT TAHUNAN OLAHRAGA KOTA PALU																												
	KECAMATAN Palu Utara																											
		Prg	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	Pemberian bonus lomba olah raga dan seni (PORSENI) tingkat Kelurahan dan Kecamatan				1	Paket	Rp67.100.000	1	Paket	Rp67.100.000		1	Paket	Rp78.000.000	1	Paket	Rp78.000.000		1	Paket	Rp109.000.000	1	Paket	109.000.000		
TOTAL				0			1		Rp67.100.000	1		Rp67.100.000		1		Rp78.000.000	1		Rp78.000.000		1		Rp109.000.000	1		Rp109.000.000	100,00%	
EVENT TAHUNAN OLAHRAGA KOTA PALU																												
	KECAMATAN Tawaeli																											
		Prg	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	- Pemberian bonus lomba olah raga dan seni (PORSENI) tingkat Kelurahan dan Kecamatan											2	Paket	Rp63.000.000	2	Paket	Rp53.000.000		2	Paket	Rp108.600.000	`	Paket	96.000.000		
TOTAL				0			0		Rp0	0		Rp0		2		Rp63.000.000	2		Rp53.000.000		2		Rp108.600.000	0		Rp96.000.000	86,83%	
EVENT TAHUNAN OLAHRAGA KOTA PALU																												
	KECAMATAN Tatanga																											
		Prg	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	Pemberian bonus lomba olah raga dan seni (PORSENI) tingkat Kelurahan dan Kecamatan											7	Kegiatan	Rp252.100.000	7	Kegiatan	Rp252.100.000	Pemberian bonus lomba olah raga dan seni (PORSENI) tingkat Kelurahan dan Kecamatan	7	Kegiatan	Rp215.537.500	7	Kegiatan	Rp215.537.500		
																				Bantuan untuk sanggar Seni Kelurahan Pengawu	1	Kegiatan	Rp20.700.000	1	Kegiatan	Rp20.700.000		
TOTAL				0			0		Rp0	0		Rp0		7		Rp252.100.000	7		Rp252.100.000		8		Rp236.237.500	8		Rp236.237.500	100,00%	
EVENT TAHUNAN OLAHRAGA KOTA PALU																												
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																											
		Prg	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN																									
		Keg	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota																									
		Sub	- Koordinasi ,sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi oleh satuan pendidikan dasar			Kompetisi U-14 dan U16	1	keg	Rp129.783.380	1	keg	Rp122.554.060	Kompetisi U-14 dan U16	1	keg	Rp164.255.120	1	keg	Rp162.855.120									
		Prg	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN																									
		Keg	Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah Kabupaten/kota																									
		Sub	- Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			seleksi POPDA	6	cabor	Rp767.843.700	6	cabor	Rp654.086.504								Palu Sport event	6	cabor	11.139.830.200	6	Cabor	8.642.314.550		Palu Sport Event telah dilaksanakan bulan november 2023

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1	2	3		4		5				6				7				8				9				10				11	12
		Sub	- Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota						-					seleksi POPDA dan Kontingen POPDA	7	cabor	Rp1.353.285.380	7	cabor	Rp1.258.739.780		seleksi popda	4	cabor	215.625.840		4	Cabor	185.764.540			Seleksi POPDA dilaksanakan pada Bulan Mei Tahun 2023
		Sub	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan			kontingen POPDA	6	cabor	Rp666.361.330	6	cabor	Rp471.008.410										kontingen POPDA	4	cabor	3.643.613.714		4	Cabor	3.456.146.988			tahun 2023 dilaksanakan Bulan Juli di Kabupaten Parigi Moutong
TOTAL				0			13		Rp1.563.988.410	13		Rp1.247.648.974			8		Rp1.517.540.500	8		Rp1.421.594.900			14		Rp14.999.069.754		14		Rp12.284.226.078		82,70%	
EVENT TAHUNAN KOMUNITAS ANAK MUDA KOTA PALU																															
	KECAMATAN Palu Timur																														
		Prg	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan																												
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																												
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																												
		-	Lomba Kesenian Pemuda tangguh dan mandiri serta Lomba Saritilawah (Piala dan Bonus)												12	Paket	Rp21.000.000	12	Paket	Rp21.000.000			12	Paket	Rp 7.500.000		12	Paket	2.250.000			
TOTAL				0			0		Rp0	0		Rp0			12		Rp21.000.000	12		Rp21.000.000			12		Rp7.500.000		12		Rp2.250.000		81,58%	
EVENT TAHUNAN KOMUNITAS ANAK MUDA KOTA PALU																															
	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH																														
		Prg	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat																												
		Keg	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Masyarakat																												
		Sub	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial											Kegiatan Kemah Pemuda Rp.140.342.050	1	Kegiatan	Rp140.342.050	1	Kegiatan	Rp140.342.050		Kegiatan Kemah Pemuda Rp.131.559.500	1	Kegiatan	131.559.500		1	Kegiatan	124.856.500			Kegiatan akan dilaksanakan pada TW IV
														Dana Bantuan Pelajar/Mahasiswa Rp. 1. 000.000.000	1	Kegiatan	1.000.000.000			324.000.000		Dana Bantuan Pelajar/Mahasiswa Rp. 722.250.000	1	Kegiatan	722.250.000		1	Kegiatan	708.750.000			Dari 107 Penerima Hanya 105 Yang Di Realisasikan Berkas (1 Orang Mahasiswa Belum Bisa Melengkapi Berkas Persyaratan Dan 1 Nama Doubel)
TOTAL				0			0		Rp0	0		Rp0			1		Rp1.140.342.050	1		324.000.000			1		Rp853.809.500		1		Rp833.606.500		41,80%	
EVENT TAHUNAN KOMUNITAS ANAK MUDA KOTA PALU																															
	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA																														
		Prg	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan																												
		Keg	Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula,dan Pemuda Kader Kabupaten Kota																												
		Sub	- Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda			Kegiatan Paskibraka dan Pemuda Perintis	2	Kegiatan	Rp866.476.640	2	Kegiatan	Rp841.793.850		Kegiatan Paskibraka dan Pemuda Perintis	2	Kegiatan	Rp1.536.214.040	2	Kegiatan	Rp1.469.550.532					Rp0				Rp0			
		Prg	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN																												
		Keg	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah																				Kegiatan Kemah Pramuka, Temu Pemuda	2	Kegiatan	Rp651.659.125		2	Kegiatan	641.699.125			Temu Pemuda Di laksanakan dari Bulan Januari sampai Maret dan Kemah Pramuka Di laksanakan Pada Bulan September 2023
TOTAL				0			2		Rp866.476.640	2		Rp841.793.850			2		Rp1.536.214.040	2		Rp1.469.550.532			2		Rp651.659.125		2		Rp641.699.125		96,68%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
BIDANG BIROKRASI DAN KEUANGAN																												
AUDIT APBD OLEH AUDITOR INDEPENDENT																												
	INSPEKTORAT																											
		Prg	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN																									
		Keg	1. Penyelenggaran Pengawasan dengan Tujuan tertentu																									
		Sub	- Pengawasan dengan Tujuan tertentu			Kegiatan Probity Audit	1	Keg	Rp227.674.400	1	Keg	Rp227.674.400	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemsus)/Kegiatan Probity Audit Rp.89.210.400	6	Kegiatan	Rp89.210.400	6	Kegiatan	Rp89.210.400	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (Pemsus)/ Kegiatan Probity Audit	12	Laporan Pemsus	Rp235.010.350	8	Laporan	Rp139.650.000		
																					3	Laporan Probity						
		Keg	2. Penyelenggaraan Pengawasan Internal													Rp440.368.000												
		Sub	- Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah										Kegiatan Ekspose Temuan Secara Internal, Audit Kinerja OPD dan Kecamatan/ Kelurahan	2	Kegiatan	Rp340.368.000	2	Kegiatan	Rp340.368.000	Kegiatan Audit Kinerja Berbasis Risiko, Audit Kinerja Bid. Disiplin, Audit Kinerja Program Prioritas dan Audit Pendapatm	6	Laporan	Rp573.118.000	6	Laporan	Rp565.281.350		
													Sistem Informasi Pengawasan	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp100.000.000									
		Sub	- Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah										Kegiatan Ekspose Temuan Secara Internal, Pengujian Laboratorium Jalan, Beton, dll, dan Pemeriksaan Keuangan pada OPD Berbasis Resiko	3	Kegiatan	Rp151.741.000	3	Kegiatan	Rp151.741.000	Kegiatan Ekspose Temuan Secara Internal, Pengujian Laboratorium Jalan, Beton, dll, dan Audit BMD, Audit Dana BOS, Pemeriksaan PBJ dan Pemeriksaan Vaksinasi Covid 19	4	Laporan	Rp173.538.000	4	Laporan	Rp153.244.250		
			- Reviu Laporan Kinerja																	Reviu KUA/PPAS, Reviu LAKIP Pemda, Reviu Manajemen Risiko, Reviu Penerapan SPM, Reviu Pengawasan P3DN, Reviu RKPD, Reviu SSH/ASB/HSPK, Reviu Tata Kelola Pelayanan Publik, Reviu Zona Integritas, Pendampingan Penyusunan LAKIP OPD.	12	Laporan	Rp242.401.150	12	Laporan	Rp235.471.100		
			- Reviu Laporan Keuangan																	Reviu DAK Fisik, Reviu LKPD, Reviu Penyerapan Anggran & PBJ, Reviu RKA, Reviu Bantuan Pemda, Reviu Dana Transfer, Reviu Tata Kelola Barang Milik Daerah.	12	Laporan	Rp353.605.228	12	Laporan	Rp309.630.178		
			- Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan APIP																	Evaluasi LAKIP OPD, Evaluasi LPPD, Evaluasi Rencana Aksi SPIP, Evaluasi Tindak Lanjut	13	Laporan	Rp449.707.300	13	Laporan	Rp447.653.792		
			- Kerjasama Pengawasan Internal																	Penyelesaian Tindak lanjut hasil pengawasan	6	Kali	Rp173.469.250	6	Kali	Rp159.728.000		
		Prg	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI																									
		Keg	1. Pendampingan dan Asistensi																									
		Sub	- Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi																	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	1	Laporan	Rp26.890.000	1	Laporan	Rp24.439.040		
		Sub	- Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi																	MCP, LHKPN/LHKASN, SPI, dan UPG	4	Triwulan	Rp164.120.200	4	Triwulan	Rp24.439.040		
		Prg	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																									
		Keg	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																									
		Sub	- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) Perpajakan	1	Kegiatan	Rp377.165.800	1	Kegiatan	Rp377.165.800	Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) dan Diklat Substansi (Eselon dan Fungsional)	1	Kegiatan	Rp98.313.000	1	Kegiatan	Rp98.313.000	Pelatihan Kantor Sendiri	3	kali	Rp572.209.000	2	Kali	Rp17.500.000		
																				Diklat Pengawasan	6	Org (Diklat Subtansi)	Rp572.209.000	6	Orang	Rp86.190.000		

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4		5			6			7				8			9				10			11	12	
																		Diklat Penjenjangan Fungsional	4	Org	Rp572.209.000	4	Orang	Rp68.717.230		
																		Diklat Peningkatan Kabapilitas APIP	52	Orang	Rp572.209.000	52	Orang	Rp319.077.585		
TOTAL			0			2		Rp604.840.200	2		Rp604.840.200		13		Rp1.220.000.400	13		Rp779.632.400		138		Rp4.680.695.478	130		Rp2.551.021.565	60,49%	
AUDIT APBD OLEH AUDITOR INDEPENDENT																											
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA PALU																										
		Prg	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH																								
		Keg	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah (Penyusunan Laporan Keuangan Daerah)			1	WTP	Rp1.579.054.030	1	WTP	Rp1.315.764.712		1	WTP	Rp83.983.500	1	WTP	Rp83.983.500		1	WTP	Rp106.926.000	1	WTP	Rp105.785.955		Penilaian BPK Tahun 2023 dilaksanakan Bulan Maret-April 2024
TOTAL			0			1		Rp1.579.054.030	1		Rp1.315.764.712		1		Rp83.983.500	1		Rp83.983.500		1		Rp106.926.000	1		Rp105.785.955	85,06%	
E-GOVERNMENT (PALU SMART CITY)																											
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																										
		Prg	Program Pengelolaan Informasi Informatika																								Belanja bandwith dan internet masyarakat sudah terealisasi 100%
		Keg	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																								
		Sub	Penyelenggaraan sistem komunikasi intra Pemerintah daerah	46	Taman Kelurahan	Belanja Sewa Bandwidth untuk OPD dan Taman Kelurahan (20 kelurahan)	46	Taman Kelurahan	Rp2.940.699.988	20	Taman Kelurahan	Rp2.940.699.988	Belanja Sewa Bandwidth untuk OPD dan Taman Kelurahan (46 kelurahan)	46	Taman Kelurahan	Rp3.422.000.000	46	Taman Kelurahan	Rp3.364.700.000	Belanja Sewa Bandwidth untuk OPD dan Taman Kelurahan (46 kelurahan)	46	Taman Kelurahan	Rp3.422.700.000	46	Taman Kelurahan	Rp3.422.700.000	100,00%	
TOTAL			46			46		Rp2.940.699.988	20		Rp2.940.699.988		46		Rp3.422.000.000	46		Rp3.364.700.000		46		Rp3.422.700.000	46		Rp3.422.700.000	99,41%	
E-GOVERNMENT (PALU SMART CITY)																											
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																										
		Prg	Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	%		100	%	Rp316.864.175	100	%	Rp316.269.975		100	%	Rp386.812.000	100	%	Rp385.261.268				Rp369.829.950			Rp368.703.676	99,70%	E-Planning, E-database, Satu Data Indonesia (SDI)
		Keg	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah			Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan							Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan							Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan								
		Sub	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah			Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah							Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah							Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah								
		Prg	Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	%		100	%	Rp640.416.200	100	%	Rp594.177.498		100	%	Rp532.435.050	100	%	Rp444.924.312		100	%	Rp802.490.600	100	%	Rp747.211.926	93,11%	Percepatan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan daerah
		Keg	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah			Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	100	%		100	%		Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan							Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan								
		Sub	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD			Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	41	Orang		41	Orang		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan							Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan								
		Prg	Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	%				Rp515.250.650			Rp495.471.778		100	%	Rp351.739.300	100	%	Rp339.651.100				Rp282.167.700			Rp277.741.140	98,43%	Analisis ketimpangan wilayah dan analisis tingkat pembangunan aksebilitas infrastruktur
		Keg	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah			Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	100	%		100	%		Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	100	%		100	%		Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan								
		Sub	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota			Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Buku		1	Buku		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Buku		1	Buku		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
TOTAL			300			442		Rp1.472.531.025	442		Rp1.405.919.251		401		Rp1.270.986.350	401		Rp1.169.836.680		100		Rp1.454.488.250	100		Rp1.393.656.742	94,55%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
E-GOVERNMENT (PALU SMART CITY)																												
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																											
		Prg	Program Pengelolaan Arsip																									
		Keg	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			Layanan informasi dan arsip dinamis Kota Palu	1	Sub Kegiatan	Rp66.874.950	1	Sub Kegiatan	Rp66.874.950	Layanan informasi dan arsip dinamis Kota Palu	2	Sub Kegiatan	Rp63.897.000	2	Sub Kegiatan	Rp63.707.680	Layanan informasi dan arsip dinamis Kota Palu	2	Sub Kegiatan	Rp24.801.500	2	Sub Kegiatan	Rp24.771.500		
		Sub	Pengelolaan Arsip Statis daerah Kabupaten/Kota			layanan dan daftar arsip statis Kota Palu	1	Sub Kegiatan	Rp6.765.500	1	Sub Kegiatan	Rp6.765.500	layanan dan daftar arsip statis Kota Palu	2	Sub Kegiatan	Rp35.211.000	2	Sub Kegiatan	Rp35.192.320	layanan dan daftar arsip statis Kota Palu	2	Sub Kegiatan	Rp10.924.000	2	Sub Kegiatan	Rp10.884.000		
		Sub	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			Jaringan informasi kearsipan (JIKN)	0	Sub Kegiatan	Rp0	0	Sub Kegiatan		Jaringan informasi kearsipan (JIKN)	2	Sub Kegiatan	Rp60.120.500	2	Sub Kegiatan	Rp58.707.880	Jaringan informasi kearsipan (JIKN)	2	Sub Kegiatan	Rp22.852.500	2	Sub Kegiatan	Rp22.852.500		
		Prg	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip																									
		Keg	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi dibawah 10 tahun			Penyelamatan arsip akibat bencana (restorasi)	0		Rp0			Rp0	Penyelamatan arsip akibat bencana (restorasi)	1	Sub Kegiatan	Rp4.410.200	1	Sub Kegiatan	Rp4.410.200	Penyelamatan arsip akibat bencana (restorasi)	1	Sub Kegiatan	Rp5.284.765	1	Sub Kegiatan	Rp5.254.565		
		Sub	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabungdan/atau Dibubarkan,dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			Pennyelamatan arsip pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan	1	Sub Kegiatan	Rp1.373.000	1	Sub Kegiatan	Rp1.354.000	Pennyelamatan arsip pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan	1	Sub Kegiatan	Rp1.336.900	1	Sub Kegiatan	Rp1.327.900	Pennyelamatan arsip pemekaran daerah kecamatan dan kelurahan	1	Sub Kegiatan	Rp2.643.500	1	Sub Kegiatan	Rp2.643.500		
		Sub	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota Yang Dinyatakan Hilang			Layanan arsip statis Kota Palu	1	Sub Kegiatan	Rp6.764.000	1	Sub Kegiatan	Rp6.764.000	Layanan arsip statis Kota Palu	1	Sub Kegiatan	Rp5.294.000	1	Sub Kegiatan	Rp5.294.000	Layanan arsip statis Kota Palu	1	Sub Kegiatan	Rp7.622.350	1	Sub Kegiatan	Rp7.622.350		
		Prg	Program Perizinan Penggunaan Arsip																									
		Keg	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota										Penyusunan dan penetapan SOP	1	Sub Kegiatan	Rp3.450.000	1	Sub Kegiatan	Rp3.450.000	Penyusunan dan penetapan SOP	1	Sub Kegiatan	Rp3.675.000	1	Sub Kegiatan	Rp3.675.000		
TOTAL				0			4		Rp81.777.450	4		Rp81.758.450		10		Rp173.719.600	10		Rp172.089.980		10		Rp77.803.615	10		Rp77.703.415	99,48%	
PENERAPAN QSL (Quick Service License = Pelayanan Perizinan Cepat)																												
	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																											
		Prg	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL																									
		Keg	1. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota																									
		Sub	- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	10000	Pelaku Usaha		12	Laporan	Rp149.691.275	12	Laporan	Rp149.691.275	Operasional pelayanan perizinan	2915	Pelaku Usaha	Rp50.205.000	2915	Pelaku Usaha	Rp49.165.525	Operasional pelayanan perizinan	3218	Pelaku Usaha	Rp773.173.550	3218	Pelaku Usaha	Rp770.398.425	61,33%	
		Prg	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL																									
		Keg	1. Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																									
		Sub	- Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	60	Dokumen	Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik	12	Laporan	Rp71.992.000	12	Laporan	Rp71.992.000	Pengembangan Sistem Informasi pengendalian dan Pelayanan Perizinan secara Elektronik (Rekomendasi perizinan OPD Tekhnis), Pembuatan Aplikasi Peta Potensi dan Peluang Investasi. (1 Aplikasi)	12	Dokumen	Rp167.727.500	12	Dokumen	Rp146.344.500	Pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik	12	Dokumen	Rp95.742.500	9	Dokumen	Rp47.835.000	35,00%	
TOTAL				10060			24		Rp221.683.275	24		Rp221.683.275		2927		Rp217.932.500	2927		Rp195.510.025		3230		Rp868.916.050	3227		Rp818.233.425	94,41%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
PENERAPAN QSL (Quick Service License = Pelayanan Perizinan Cepat)																											
	ADMINISTRATOR KEK																										
		Prg PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL.				100	%	Rp316.864.175	100	%	Rp316.269.975		100	%	Rp385.261.268	100	%	Rp385.261.268				Rp129.621.000	yg sdh terealisasi di TW. III		Rp69.519.014	80,35%	Adanya Deregulasi Perizinan PP.5 Tahun2021 Berusaha Berbasis resiko (OSS RB) Sehingga utuk Tahun2022 datanya kosong.
		Keg Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten kota.																								
		Sub Penyediaan Pelayanan terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegritas Secara Elektronik.			18 izin yang di keluarkan dengan Rincian :	18	izin yang di keluarkan dengan Rincian :	Rp72.921.400	18	izin yang di keluarkan dengan Rincian :	Rp72.921.400	tidak ada target yg di berikan			Rp168.726.300	6 pelaku usaha beriinvenstasi	untuk izin tidak bisa di targetkan karena itu tergantung pelaku usaha yg masuk di KEK.		Tidak ada target yang di tentukan	1	Izin	Rp129.621.000	1	Izin	Rp129.621.000	19 izin	Tahun 2023 mengeluarkan 3 izin NIB, dengan skala usaha besar 1, skala kecil 0 dan berskala mikro 1. berdasarkan risiko rendah 2 dan 1 beresiko rendah. (bersumber dari list Sistem OSS).
					1 izin lingkungan, 1 SLF,MIB,SNI. 2 izin Oprasional, 3 izin perdanggangan, 1 izin usaha Industri, 2 persetujuan import, 2 NIB, 2 RPL-RKL, 2 UKL-UPL, 4 izin Prinsip.				1 izin lingkungan, 1 SLF,MIB,SNI. 2 izin Oprasional, 3 izin perdanggangan, 1 izin usaha Industri, 2 persetujuan import, 2 NIB, 2 RPL-RKL, 2 UKL-UPL, 4 izin Prinsip.															untuk Non Perizinan memiliki 10 surat keterangan Asa (Ekspor)
TOTAL			0			118		Rp389.785.575	118		Rp389.191.375		100		Rp553.987.568	100		Rp385.261.268		1		Rp259.242.000	1		Rp199.140.014	80,93%	
ONE TOUCH INFO KOTA PALU																											
	DINAS PENCATATAN SIPIL & KEPENDUDUKAN DAN KECAMATAN																										
		Prg Progam Pengelolaaan Informasi Admninistrasi Data Kependudukan																								
		Keg Kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan																								
		Sub Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	2	Data agregat		1	data agregat	Rp42.943.725	1	data agregat	Rp42.943.725		1	data agregat	Rp23.587.500	1	data agregat	Rp23.587.500		2	Data Agregat	Rp34.225.000	2	Data Agregat	Rp34.225.000		
		Prg Progam Pengelolaaan Profil Kependudukan																								
		Keg Penyusunan Profil Kependudukan																								
		Sub Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	75	buku		75	buku	Rp18.660.000	75	buku	Rp18.660.000		100	buku	Rp12.000.000	100	buku	Rp12.000.000		100	buku	Rp22.800.000	100		Rp22.800.000		
TOTAL			77			76		Rp61.603.725	76		Rp61.603.725		101		Rp35.587.500	101		Rp35.587.500		102		Rp57.025.000	102		Rp57.025.000	100,00%	
ONE TOUCH INFO KOTA PALU																											
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																										
		Prg Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral																								
		Keg Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																								
		Sub Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			Data Statistik OPD Sekota Palu dan Tim Forum Satu Data	1	Keg	Rp70.908.750	1	Keg	Rp64.777.500	Penyediaan data dan informasi statistik	2	Dokumen	Rp123.481.450	2	Dokumen	Rp96.388.220	Penyediaan data dan informasi statistik	2	Dokumen	Rp175.385.500	2	Dokumen	Rp175.385.500	98,57%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
		Prg	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral																									
		Keg	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																									
		Sub	Membangun Metadata Statistik Sektoral			Sub kegiatan belum dilaksanakan tahun 2021							Pelatihan Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral Kota Palu	1	Kegiatan	Rp11.662.500	1	Kegiatan	Rp11.662.501	Pelatihan Pengelolaan Metadata Statistik Sektoral Kota Palu	1	Kegiatan	Rp5.367.500	1	Kegiatan	Rp5.367.500	100,00%	
TOTAL				0			1		Rp70.908.750	1		Rp64.777.500		3		Rp135.143.950	3		Rp108.050.721		3		Rp180.753.000	3		Rp180.753.000	91,41%	
ONE TOUCH INFO KOTA PALU																												
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																											
		Prg	Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah																									
		Keg	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah																									
		Sub	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	100	%		100	%	Rp316.864.175	100	%	Rp316.269.975		100	%	Rp386.812.000	100	%	Rp385.261.268				Rp369.829.950			Rp368.703.676	99,70%	*E-Planning, E-database* , Satu Data Indonesia (SDI)
						Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan							Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan							Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan								
						Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah							Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah							Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah								
		Prg	Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah																									
		Keg	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah																									
		Sub	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	100	%				Rp640.416.200			Rp594.177.498				Rp532.435.050			Rp444.924.312				Rp802.490.600			Rp747.211.926		Percepatan penurunan stunting dan penanggulangan kemiskinan daerah
						Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan							Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan							Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah								
						Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	41	Orang		41	Orang		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	41	Orang		41	Orang		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	41	Orang		41	Orang			
		Prg	Program Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100	%																							
		Keg	Analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah																									
		Sub	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	100	%				Rp515.250.650			Rp495.471.778				Rp351.739.300			Rp339.651.100				Rp282.167.700			Rp277.741.140	98,43%	Analisis ketimpangan wilayah dan analisis tingkat pembangunan aksebilitas infrastruktur
						Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	100	%		100	%		Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan	100	%		100	%		Tersedianya basis data dan informasi yang valid untuk digunakan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan								
						Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Buku		1	Buku		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	1	Buku		1	Buku		Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
TOTAL				400			242		Rp1.472.531.025	242		Rp1.405.919.251		242		Rp1.270.986.350	242		Rp1.169.836.680		41		Rp1.454.488.250	41		Rp1.393.656.742	94,55%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
PENERAPAN ISO ATAS PELAYANAN PUBLIK DI SEMUA INSTANSI																											
	KECAMATAN MANTIKULORE																										
		Prg Program Penyelenggaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik																									
		Keg Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di Laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan																									
		Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan										Survey Kepuasan Masyarakat	1	kegiatan	Rp15.537.950	1	kegiatan	Rp15.537.950	Survey Kepuasan Masyarakat	1	kegiatan	Rp121.738.300	1	kegiatan	Rp121.738.300	100,00%	
TOTAL			0			0		Rp0	0		Rp0		1		Rp15.537.950	1		Rp15.537.950		1		Rp121.738.300	1		Rp121.738.300	100,00%	
PENERAPAN ISO ATAS PELAYANAN PUBLIK DI SEMUA INSTANSI																											
	BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH																										
		Prg Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kab/Kota																									
		Keg Penataan Organisasi																									
		Sub Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						Rp0			Rp0	Pelatihan, Pendampingan dan sertifikasi ISO 2 OPD Rp.416.002.000	2	OPD	Rp416.002.000	2	OPD	Rp335.876.996	Pelatihan, Pendampingan dan sertifikasi ISO 2 OPD Rp.330.332.000	2	OPD	Rp330.332.000	2	OPD	Rp137.300.000	41,56%	
TOTAL			0			0		Rp0	0		Rp0		2		Rp416.002.000	2		Rp335.876.996		2		Rp330.332.000	2		Rp137.300.000	63,40%	
PENERAPAN ISO ATAS PELAYANAN PUBLIK DI SEMUA INSTANSI																											
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																										
		Prg Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	25	Inovasi																							
		Keg Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi																									
		Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi										Fasilitasi Perangkat Daerah dalam Penerapan Inovasi Daerah	11	Inovasi	Rp159.929.700	11	Inovasi	Rp154.387.280	Fasilitasi Perangkat Daerah dalam Penerapan Inovasi Daerah	13	Inovasi	Rp124.716.200	13	Inovasi	Rp116.452.850		
		Sub Kegiatan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi										Fasilitasi Difusi Inovasi kepada Masyarakat melalui Lomba Kelurahan Inovasi Tingkat Masyarakat	1	Kegiatan	Rp54.850.350	1	Kegiatan	Rp54.588.750	Fasilitasi Difusi Inovasi kepada Masyarakat melalui Lomba Kelurahan Inovasi Tingkat Masyarakat	1	Kegiatan	Rp57.124.100	1	Kegiatan	Rp7.112.500		
		Keg Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																									
		Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan																	Kajian Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Palu	1	Kajian	Rp128.797.950	1	Kajian	Rp128.657.691		
TOTAL			25			0		Rp0	0		Rp0		11		Rp214.780.050	11		Rp208.976.030		13		Rp181.840.300	13		Rp123.565.350	83,84%	
PENERAPAN ISO ATAS PELAYANAN PUBLIK DI SEMUA INSTANSI																											
	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN																										
		Prg Program Perizinan Penggunaan Arsip																									
		Keg Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota						-			Rp0	Penyusunan dan penetapan SOP	1	Sub Kegiatan	Rp3.450.000	1	Sub Kegiatan	Rp3.450.000	Penyusunan dan penetapan SOP	1	Sub Kegiatan	Rp3.675.000	1	Sub Kegiatan	Rp3.675.000		
TOTAL			0			0		Rp0	0		Rp0		1		Rp3.450.000	1		Rp3.450.000		1		Rp3.675.000	1		Rp3.675.000	100,00%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI HONORER																											
	KECAMATAN PALU TIMUR																										
		Prg PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																									
		Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																									
		Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																									
		- Pembayaran Gaji bagi Pegawai Honorer				64	orang	Rp239.500.000	64	orang	Rp239.500.000		59	orang	Rp356.500.000	59	orang	Rp356.500.000		59	orang	Rp377.400.000	59	orang	Rp183.700.000	48,68%	
		- Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Pegawai Honorer				64	orang	Rp12.507.360	64	orang	Rp12.507.360		59	orang	Rp10.479.600	59	orang	Rp10.479.600		59	orang	Rp11.934.000	59	orang	Rp10.699.902	89,66%	
TOTAL			0			128		Rp252.007.360	128		Rp252.007.360		118		Rp366.979.600	118		Rp366.979.600		118		Rp389.334.000	118		Rp194.399.902	80,67%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026	Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
				Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5				6				7				8				9				10				11	12
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI HONORER																													
	KECAMATAN PALU BARAT																												
		Prg PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																											
		Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
		- Pembayaran Gaji bagi Pegawai Honorer			84	orang	Rp264.600.000	81	orang	Rp264.600.000			80	orang	Rp526.000.000	80	orang	Rp526.000.000		Pembayaran Gaji bagi Pegawai Honorer	80	orang	Rp569.400.000		80	orang	Rp527.619.000	92,66%	
		- Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Pegawai Honorer			84	orang	Rp7.348.074	81	orang	Rp7.348.074			80	orang	Rp13.802.400	80	orang	Rp13.802.400		Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Pegawai Honorer	80	orang	Rp14.688.000		80	orang	Rp12.879.519	87,69%	
TOTAL			0		168		Rp271.948.074	162		Rp271.948.074			160		Rp539.802.400	160		Rp539.802.400			160		Rp584.088.000		160		Rp540.498.519	96,88%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI HONORER																													
	KECAMATAN ULUJADI																												
		Prg PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																											
		Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
		- Pembayaran Gaji bagi Pegawai Honorer			86	orang	Rp258.000.000	86	orang	Rp258.000.000			74	orang	Rp444.000.000	74	orang	Rp444.000.000			77	orang	Rp508.200.000		75	orang	Rp502.150.000	98,81%	
		Pembayaran Jasa Tenaga Keamanan			7	orang	Rp66.000.000	7	orang	Rp66.000.000			7	orang	Rp84.000.000	7	orang	Rp84.000.000			7	orang	Rp84.000.000		7	orang	Rp84.000.000	100,00%	
		- Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Pegawai Honorer			93	orang	Rp13.972.800	93	orang	Rp13.972.800			82	orang	Rp14.661.600	82	orang	Rp14.661.600			85	orang	Rp15.606.000		83	orang	Rp13.417.344	85,98%	
TOTAL			0		186		Rp337.972.800	186		Rp337.972.800			163		Rp542.661.600	163		Rp542.661.600			169		Rp607.806.000		165		Rp599.567.344	99,45%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI HONORER																													
	KECAMATAN MANTIKULORE																												
		Prg PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																											
		Keg Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Honor PHL Kec. Mantikulore dan Kelurahan 69 orang	12	Bulan	Rp345.000.000	12	Bulan	Rp345.000.000		Honor PHL Kec. Mantikulore dan Kelurahan 69 orang	12	Bulan	Rp481.500.000	12	Bulan	Rp480.500.000		Honor PHL Kec. Mantikulore dan Kelurahan 69 orang	12	bulan	Rp505.800.000		12	bulan	Rp505.800.000	100,00%	
		Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Honor PHL Kecamatan dan Kelurahan Rp.500.000 sebelumnya 250.000																											
		BPJS PHL		BPJS PHL Kec. Mantikulore	12	Bulan	Rp11.309.100	12	Bulan	Rp11.309.100		BPJS PHL Kec. Mantikulore dan Kelurahan 69 Orang	12	Bulan	Rp11.757.600	12	Bulan	Rp11.757.600		BPJS PHL Kec. Mantikulore dan Kelurahan 69 Orang	12	bulan	Rp12.668.400		12	bulan	Rp12.668.400	100,00%	
TOTAL			0		24		Rp356.309.100	24		Rp356.309.100			24		Rp493.257.600	24		Rp492.257.600			24		Rp518.468.400		24		Rp518.468.400	99,93%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI HONORER																													
	KECAMATAN PALU UTARA																												
		Prg PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																											
		Keg Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		Sub Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
		- Pembayaran Gaji bagi Pegawai Honorer			44	orang	Rp206.250.000	44	orang	Rp206.250.000			45		Rp315.000.000	45	orang	Rp315.000.000			12	bulan	Rp350.400.000		12	bulan	Rp347.400.000	99,14%	
		- Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Pegawai Honorer			44	orang	Rp8.262.000	44	orang	Rp8.262.000			45		Rp11.934.000	45	orang	Rp11.934.000			12	bulan	Rp8.262.000		12	bulan	Rp7.303.104	88,39%	
TOTAL			0		88		Rp214.512.000	88		Rp214.512.000			90		Rp326.934.000	90		Rp326.934.000			24		Rp358.662.000		24		Rp354.703.104	99,56%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI HONORER																													
	KECAMATAN PALU SELATAN																												
		Prg PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																											
		Keg Administrasi Umum perangkat Daerah																											
		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Honor PHL Kecamatan dan Kelurahan			12	Bulan	Rp331.650.000	12	Bulan	Rp329.950.000		Honor PHL Kec. Palu Selatan dan Kelurahan 72 orang	12	Bulan	Rp548.500.000	12	Bulan	Rp512.500.000		Honor PHL Kec. Palu Selatan dan Kelurahan 78 orang	12	Bulan	Rp618.600.000		12	Bulan	Rp566.800.000	91,63%	
TOTAL			0		12		Rp331.650.000	12		Rp329.950.000			12		Rp548.500.000	12		Rp512.500.000			12		Rp618.600.000		12		Rp566.800.000	94,03%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026	Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1	2		3	4	5				6				7				8				9				10				11	12
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI HONORER																														
	KECAMATAN TAWAELI																													
		Prg	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																											
		Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		Sub	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
		-	- Pembayaran Gaji bagi Pegawai Honorer			55	orang	Rp235.800.000	55	orang	Rp235.800.000			56	orang	Rp373.500.000	56	orang	Rp336.250.000			60	orang	Rp349.200.000	60	orang	Rp244.800.000	70,10%	
		-	- Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Pegawai Honorer			55	orang	Rp8.598.810	55	orang				56	orang	Rp9.372.000	56	orang	Rp9.171.336			55	orang	Rp10.098.000	55	orang	Rp2.524.500	25,00%	
TOTAL				0		110		Rp244.398.810	110		Rp235.800.000			112		Rp382.872.000	112		Rp345.421.336			115		Rp359.298.000	115		Rp247.324.500	83,98%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI HONORER																														
	KECAMATAN TATANGA																													
		Prg	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA																											
		Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		Sub	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
		-	- Pembayaran Gaji bagi Pegawai Honorer			80	orang	Rp310.000.000	80	orang	Rp310.000.000			72	orang	Rp492.000.000	72	orang	Rp492.000.000		Pembayaran Gaji bagi Pegawai Honorer	82	orang	Rp587.850.000	82	orang	Rp514.800.000	87,57%	
		-	- Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Pegawai Honorer			80	orang	Rp12.507.360	80	orang	Rp12.507.360			72	orang	Rp14.143.200	72	orang	Rp14.143.200		Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian bagi Pegawai Honorer	82	orang	Rp15.055.200	82	orang	Rp11.846.327	78,69%	
TOTAL				0		160		Rp322.507.360	160		Rp322.507.360			144		Rp506.143.200	144		Rp506.143.200			164		Rp602.905.200	164		Rp526.646.327	94,67%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI HONORER																														
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH																													
		Prg	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																											
		Keg	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																											
		Sub	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 3.753.600, luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 4.692.000 Total Rp. 8.445.600	46	Orang	Rp8.445.600	45	Orang	Rp8.445.600		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 3.753.600, luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 4.692.000 Total Rp. 8.445.600	46	Orang	Rp8.445.600	43	Orang	Rp8.445.600		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN Rp. 3.753.600, luran Jaminan Kematian bagi Non ASN Rp. 4.692.000 Total Rp. 8.445.600	46	orang	Rp8.445.600	35	Orang	Rp6.496.368	76,92%	
TOTAL				0		46		Rp8.445.600	45		Rp8.445.600			46		Rp8.445.600	43		Rp8.445.600			46		Rp8.445.600	35		Rp6.496.368	92,31%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI HONORER																														
	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PALU																													
		Prg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																											
		Keg	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																											
		-	Belanja luran Jaminan/Asuransi		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	492	Orang/Bulan	Rp3.260.061	492	Orang/Bulan	Rp2.308.561		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	552	Orang/Bulan	Rp3.477.600	552	Orang/Bulan	Rp3.402.000		Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Non ASN	564	Orang/Bulan	Rp3.835.200	564	Orang/Bulan	Rp3.465.990	90,37%	
					Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	492	Orang/Bulan	Rp4.088.013	492	Orang/Bulan	Rp2.885.705		Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	552	Orang/Bulan	Rp4.360.800	552	Orang/Bulan	Rp3.352.763		Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	564	Orang/Bulan	Rp4.794.000	564	Orang/Bulan	Rp4.332.492	90,37%	
TOTAL				0		492		Rp7.348.074	492		Rp5.194.266			552		Rp7.838.400	552		Rp6.754.763			564		Rp8.629.200	564		Rp7.798.482	82,92%	
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI HONORER																														
	SEKRETARIAT DPRD																													
		Prg	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																											
		Keg	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor																											
		-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor - Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			1	Keg	Rp7.144.389	1	Keg	Rp7.144.389			1	Keg	Rp7.786.800	1	Keg	Rp7.512.952			1	Keg	Rp7.786.800	1	Keg	Rp7.397.471	95,00%	
TOTAL				0		1		Rp7.144.389	1		Rp7.144.389			1		Rp7.786.800	1		Rp7.512.952			1		Rp7.786.800	1		Rp7.397.471	97,08%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
ASN MAGANG NASIONAL																												
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH																											
		Prg	Program Kepegawaian Daerah	80	Orang									16	Orang	Rp336.000.000	12	Orang	Rp336.000.000									
		Keg	Pengembangan Kompetensi ASN										Belanja Bantuan Dukungan Biaya Pembelajaran dan Penginapan Bagi ASN Magang di BAPPENAS Direvisi Ke Kementrian Kominfo Rp.42.000.000	4	Orang		4	Orang		Belanja Bantuan Dukungan Biaya Pembelajaran Bagi ASN Magang (Penginapan, Tiket Peswat dan Uang Harian) Rp.181.356.000	4	Orang	Rp181.356.000	4	Orang	Rp150.018.610		Pelaksanaan ASN Magang sudah Terealisasi sebanyak 4 Orang di Kementerian Lingkungan Hidup
		-	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat										Belanja Bantuan Dukungan Biaya Pembelajaran dan Penginapan Bagi ASN Magang di Badan Kepegawaian Negara Rp.42.000.000	2	Orang		2	Orang											
													Belanja Bantuan Dukungan Biaya Pembelajaran dan Penginapan Bagi ASN Magang di Balai Pengembangan Kompetensi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp.42.000.000	6	Orang		6	Orang											
													Belanja Bantuan Dukungan Biaya Pembelajaran dan Penginapan Bagi ASN Magang di Kementerian Dalam Negeri Rp.42.000.000	2	Orang		2	Orang											
													Belanja Bantuan Dukungan Biaya Pembelajaran dan Penginapan Bagi ASN Magang di Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil) Rp.42.000.000	2	Orang		2	Orang											
													Belanja Bantuan Dukungan Biaya Pembelajaran dan Penginapan Bagi ASN Magang di Kementrian Keuangan Rp.42.000.000	2	Orang		0	Orang											
													Belanja Bantuan Dukungan Biaya Pembelajaran dan Penginapan Bagi ASN Magang di Kementrian Lingkungan Hidup Rp.42.000.000	2	Orang		2	Orang											
													Belanja Bantuan Dukungan Biaya Pembelajaran dan Penginapan Bagi ASN Magang di Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum) Rp.42.000.000	2	Orang		0	Orang											
																				Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi (Bendahara Pengeluaran) Rp.231.650.000	41	Orang	Rp231.650.000	41	Orang	Rp231.445.000	99,91%	Pelaksanaan Diklat B. Pengeluaran sudah Terealisasi sebanyak 41 Orang di BPK Goa
																				Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan, Diklat Teknis Peningkatan Kompetensi (Lurah) Rp.152.550.000	27	Orang	Rp152.550.000	27	Orang	Rp152.415.000	99,91%	Pelaksanaan Diklat Peningkatan Kompetensi Lurah sudah Terealisasi sebanyak 27 Orang di BPK Goa

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1	2	3		4		5				6				7				8				9				10				11	12
		Prg	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia																												
		Keg	Pengembangan Kompetensi Teknis																												
		Sub	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan urusan Pemerintahan Umum																			Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan Administrator)	25	Orang	Rp99.880.000	25	Orang	Rp79.245.000	79,34%	Pelaksanaan Diklat Peningkatan Kompetensi Administrator/Sekretaris sudah Terealisasi sebanyak 25 Orang di BPK Goa
		Keg	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional																												
		Sub	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah,Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan																			Diklat PIM II	3	Orang	Rp165.000.000	3	Orang	Rp165.000.000	100,00%	
																						Diklat PIM III	18	Orang	Rp459.000.000	18	Orang	Rp459.000.000	100,00%	
																						Diklat PIM IV	30	Orang	Rp791.977.000	30	Orang	Rp677.676.803	85,57%	
TOTAL				80			0		Rp0	0		Rp0			38		Rp336.000.000	30		Rp336.000.000			144		Rp665.436.000	144		Rp613.123.610	94,78%	
PELAYANAN PEMBUATAN KTP, KK, & AKTE LAHIR DI KANTOR KELURAHAN DINAS PENCATATAN SIPIL & KEPENDUDUKAN DAN KECAMATAN																															
		Prg	Program pendaftaran penduduk																												
		Keg	Pelayanan pendaftaran penduduk			Kegiatan Pelayanan Kartu keluarga, KTP, KIA, AktaLahir, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Perceraian dan SKPWNI Pindah/Datang								Kegiatan Pelayanan Kartu keluarga, KTP, KIA, AktaLahir, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Perceraian dan SKPWNI Pindah/Datang (Inovasi Pelayanan Simaleo Bergerak)								Kegiatan Pelayanan Kartu keluarga, KTP, KIA, AktaLahir, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Perceraian dan SKPWNI Pindah/Datang (Inovasi Pelayanan Simaleo Bergerak)									
		Sub	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	2400	Dokumen		698	Dokumen	Rp25.000.000	698	Dokumen	Rp25.000.000			698	Dokumen	Rp28.800.000	698	Dokumen	Rp28.800.000			840	Dokumen	Rp20.400.000	840	Dokumen	Rp20.400.000			
		Sub	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	72000	Dokumen KK		2400	Dokumen KK	Rp1.072.278.430	2400	Dokumen KK	Rp1.048.578.900			2400	Dokumen KK	Rp875.490.375	2400	Dokumen KK	Rp875.490.375			500	Dokumen KK	Rp524.974.460	500	Dokumen KK	Rp524.974.460			
		Sub	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	2400	Dokumen		800	Dos	Rp204.677.500	800	Dos	Rp204.677.500			800	Dos	Rp114.990.000	800	Dos	Rp114.990.000			5265	Dos	Rp111.360.000	5265	Dos	Rp107.929.000			
						Pelayanan keliling Pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil (Akta Kelahiran, Kematian dan perkawinan)								Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil								Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil									
		Sub	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12000	Dokumen		400	Dokumen	Rp111.900.000	400	Dokumen	Rp111.900.000			400	Dokumen	Rp130.410.000	400	Dokumen	Rp130.410.000			4415	dokumen	Rp170.824.850	4415	dokumen	Rp170.824.850			
		Sub	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	2400	Dokumen	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Berupa pencatatan pernikahan massal	`	Dokumen	Rp4.433.750			Rp4.433.700		Perekaman dan Penerbitan KTP-EL bagi Pelajar, penyandang disabilitas, orang sakit,Jansia dan kegiatan hari besar (Inovasi Kaledo Gratis dan Pelayan Seksi)	1200	Dokumen	Rp4.729.725	1200	Dokumen	Rp4.644.350		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting Berupa pencatatan pernikahan massal Rp.5.052.450	13533	dokumen	Rp5.052.450	13533	dokumen	Rp5.052.450			
		Keg	Penataan Pendaftaran Penduduk																												
		Sub	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	11	jenis		6	jenis	Rp96.025.000	6	jenis	Rp96.025.000			5	jenis	Rp279.763.200	5	jenis	Rp279.750.000		113.548.000	5	jenis	Rp129.043.200	5	jenis	Rp128.800.000			
		Keg	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk																												
		Sub	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat dipertanggungjawabkan terkait Pendaftaran Penduduk	1500	Jumlah data kependudukan										1500		Rp9.172.500	1500		Rp9.172.500											

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
		Prg	Program Pencatatan Sipil																									
		Keg	Pelayanan Pencatatan Sipil			Sosialisasi Akta kelahiran kepada pengurus PKK dalam rangka pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-18 Tahun							Bimtek Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-17 Tahun (Inovasi Layanan Alpukat)							Bimtek Lintas Sektor Pencapaian Target Nasional Cakupan Akta Kelahiran 0-17 Tahun (Inovasi Layanan Alpukat)								
		Sub	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	9000	Dokumen		1152	Dokumen	Rp13.387.500	1152	Dokumen	Rp13.237.500		4500	Dokumen	Rp8.940.000	4500	Dokumen	Rp8.940.000		1152	org/bln	Rp23.340.000	1152	org/bln	Rp23.340.000		
		Sub	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	20000	Dokumen		20000	Dokumen	Rp191.871.250	20000	Dokumen	Rp191.671.250		20000	Dokumen	Rp154.307.200	20000	Dokumen	Rp154.307.200		70919	Dokumen	Rp167.637.500	70919	Dokumen	Rp166.747.500		
		Keg	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil																								
		Sub	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	12	Laporan		6	Laporan	Rp2.142.000	6	Laporan	Rp2.142.000		6	Laporan	Rp1.596.000	6	Laporan	Rp1.596.000		12	liter	Rp96.000					
TOTAL				#####			25462		Rp1.721.715.430	25462		Rp1.697.665.850		31509		Rp1.608.199.000	31509		Rp1.608.100.425		96641		Rp1.152.728.460	96629		Rp1.148.068.260	99,36%	
BIDANG LINGKUNGAN																												
PALU ADIPURA																												
	KECAMATAN PALU TIMUR																											
			PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
			Pemberdayaan Kelurahan																									
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
			- lomba Kebersihan				-	-	Rp -					5	Kelurahan	Rp50.000.000	5	Kelurahan	Rp50.000.000		5	Kelurahan	Rp50.000.000	5	Kelurahan	Rp50.000.000		
			- Alat Perlengkapan Padat Karya				1	Paket	Rp15.477.750	1	Paket	Rp15.477.750		2	Kelurahan	Rp31.062.000	2	Kelurahan	Rp31.062.000		1	Kelurahan	Rp19.099.300	1	Kelurahan	Rp19.099.300		
TOTAL				0			1		Rp15.477.750	1		Rp15.477.750		7		Rp81.062.000	7		Rp81.062.000		6		Rp69.099.300	6		Rp69.099.300	100,00%	
PALU ADIPURA																												
	KECAMATAN PALU BARAT																											
		Prg	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	- lomba Kebersihan						Rp0					6	Kelurahan	Rp60.024.000	6	Kelurahan	Rp60.024.000	Lomba Kebersihan Tingkat RT	6	Kelurahan	Rp60.000.000	6	Kelurahan	Rp59.400.000		revisi / anggaran perubahan
		-	- Pelatihan Pengolahan Kompos			Kelurahan Ujuna	1	Paket	Rp33.774.500	1	Paket	Rp33.774.500																
		-	- Alat Kebersihan Padat Karya											54	buah	Rp2.250.000	54	buah	Rp2.250.000	- Alat Kebersihan Padat Karya	6	Kelurahan	Rp20.970.000	6	Kelurahan	Rp20.130.000		
		-	- Pelatihan Pemanfaatan Sampah																	Pelatihan Pemanfaatan Limbah Sampah (Kel. Siranindi)	1	Kegiatan	Rp6.105.000	1	Keg	Rp6.105.000		
TOTAL				0			1		Rp33.774.500	1		Rp33.774.500		60		Rp2.250.000	60		Rp2.250.000		13		Rp27.075.000	13		Rp26.235.000	98,67%	
PALU ADIPURA																												
	KECAMATAN ULUJADI																											
		Prg	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	- lomba Kebersihan				6	Kelurahan	Rp47.400.000	6	Kelurahan	Rp47.400.000			0	Rp0					6	Kelurahan	Rp60.000.000	6	Kelurahan	Rp60.000.000		
TOTAL				0			6		Rp47.400.000	6		Rp47.400.000		0		Rp0	0		Rp0		6		Rp60.000.000	6		Rp60.000.000	100,00%	
PALU ADIPURA																												
	KECAMATAN TATANGA																											
		Prg	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		-	lomba Kebersihan						-					6	Kelurahan		6	Kelurahan		Pelaihan TPS3R Kel. Duyu	1		Rp7.136.650	1		Rp7.136.650		
		-	Pengadaan Tempat Sampah				1213	buah	Rp221.761.080	1213	buah	Rp221.761.080								Pelaihan TPS3R Kel. Palupi	1		Rp7.060.000	1		Rp7.060.000		

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
		- Pengadaan Armada Pengangkut Sampah Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga				7	Unit	Rp280.000.000	7	Unit	Rp280.000.000																
		- Pengadaan Pengeras Suara untuk Penyuluh Sistim pembuangan Sampah (Dana Kelurahan Boyaoge)				1	Unit	Rp1.320.000	1	Unit	Rp1.320.000							Kegiatan Lomba Kebersihan	1		Rp63.000.000	1		Rp63.000.000		
		- Pengadaan Alat Pembersih untuk Padat Karya Kelurahan Tavanjuka				1	Paket	Rp24.130.000	1	Paket	Rp24.130.000		1	Paket		1	Paket										
		- Pembuatan Pos Jaga untuk Tempat Pembuangan Sampah sementara (Dana Kelurahan Tavanjuka)				2	Unit	Rp10.000.000	2	Unit	Rp10.000.000																
		- Pagar Tempat Pembangunan Sampah Sementara (Dana Kelurahan Boyaoge)				1	Paket	Rp2.822.325																			
		- Pelatihan TPS3R																									
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
		Keg Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Tingkat Kecamatan																									
TOTAL			0			1225		Rp540.033.405	1224		Rp537.211.080		7		Rp0	7		Rp0		3		Rp77.196.650	3		Rp77.196.650	99,54%	
PALU ADIPURA																											
	KECAMATAN PALU UTARA																										
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
		Keg Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		- lomba Kebersihan				5	Kelurahan	Rp50.020.000	5	Kelurahan	Rp50.020.000		5	Kelurahan	Rp44.045.000	5	Kelurahan	Rp44.045.000		5	Kelurahan	Rp115.000.000	5	Kelurahan	Rp115.000.000		
		- Alat Perlengkapan Padat Karya				1	Kelurahan	Rp30.390.000	1	Kelurahan	Rp30.390.000		3	Kelurahan	Rp112.720.500	3	Kelurahan	Rp112.720.500		0	Kelurahan	Rp0					
TOTAL			0			6		Rp80.410.000	6		Rp80.410.000		8		Rp156.765.500	8		Rp156.765.500		5		Rp115.000.000	5		Rp115.000.000	100,00%	
PALU ADIPURA																											
	KECAMATAN TAWAELI																										
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																									
		Keg Pemberdayaan Kelurahan																									
		Sub Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																									
		- Lomba Mosintuvu-Morambanga dan Kebersihan Tingkat Kelurahan/RT (Bonus)				6	paket	Rp80.750.000	6	paket	Rp80.750.000		5	Kelurahan	Rp63.000.000	5	Kelurahan	Rp53.000.000		5	Kelurahan	Rp50.000.000	5	Kelurahan	Rp50.000.000		
		- Alat Perlengkapan Padat Karya				1	Paket	Rp26.395.000	1	Paket	Rp26.395.000		5	Kelurahan	Rp62.153.000	5	Kelurahan	Rp62.153.000		1	Kelurahan	Rp4.363.400	1	Kelurahan	Rp4.363.400		
TOTAL			0			7		Rp107.145.000	7		Rp107.145.000		10		Rp125.153.000	10		Rp115.153.000		6		Rp54.363.400	6		Rp54.363.400	96,51%	
PALU ADIPURA																											
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																										
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	600	Kg	Pupuk Organik Rp.1.860.000																						
		1 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kab/Kota																									
		- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Operasional, Perlengkapan, Peralatan, Fasilitasi Rapat, Honorarium, Pemeliharaan Peralatan untuk Penyiraman Taman dan Penangkaran Bibit Tanaman Rp.2.726.143.887	4	TW	Rp2.758.003.887	4	TW	Rp2.758.003.887	Perawatan dan Penanaman Pohon (JL. Dr. Wahidin, Diponegoro, Kemiri, Gajahmada/ Imam Bonjol, Basuki Rahmat, dan pantai anjungan)	6	Ruas Jalan	Rp.3.892.929.000	6	Ruas Jalan	Rp.3.892.929.000	Bahan-Bahan/Bibit Tanaman, berupa Pohon Bintaro Tinggi 1 Meter Rp.54.323.500	820	Batang	Rp206.005.000	820	Batang	Rp203.787.500		
					Hadiah Sayembara Desain Ruang Terbuka Hijau Rp.30.000.000	2	Kali		2	Kali		Pemangkasan, dekorasi taman, kebersihan TPU dan Bola Cor Trotoar	4	TW		4	TW		Jasa Tenaga Pelayanan Umum berupa Upah Petugas Penertiban Reklame dan Dekorasi Hari-Hari Besar Nasional dan Kegiatan Daerah, Upah Petugas Penebangan /Pemangkasan, dan Upah Petugas TPU	4	TW	Rp1.500.000.000	4	TW	Rp1.451.912.500		

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026	Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
				Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5				6			7				8			9				10			11	12
																		Kendaraan Bermotor Khusus (Pemangkas Pohon) berupa Mobil Crane Penebangan/Pemangkasan	1	Unit	Rp1.600.000.000	1	Unit	Rp1.600.000.000		
																		Operasional berupa BBM TPU, Mesin Potong Rumput, Pengawas TPU, Truck Crane Dinas/Operasional Penebangan/Pemangkasan, Truck Pengangkut Sisa Penebangan/Pemangkasan Pohon	4	TW	Rp282.102.950	4	tw	Rp252.800.600		
																		Fasilitasi Rapat dan Perlengkapan Kegiatan Pemangkasan Pohon dan Pemeliharaan TPU R	4	TW	Rp555.524.600	4	TW	Rp502.752.000		
		Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya					Rp4.069.781.210			Rp4.069.781.210				Rp.2.988.362.500			Rp.2.988.362.500									
				Perlengkapan, Operasional, Peralatan, Pemeliharaan Peeralatan, dan Fasilitasi Rapat terkait Penebangan/Pemangkasan Pohon dan Pemeliharaan/Penanganan TPU	4	TW		4	TW			4	TW		4	TW		Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa Mesin Potong Rumput Rp.22.000.000	4	Unit	Rp34.250.000	4	Unit	Rp34.250.000		
				Jasa apresial pembebasan lahan	1	Paket		1	Paket		Pengelolaan/perawatan taman-taman kota Rp.2.988.362.500							Jasa Tenaga Pelayanan Umum berupa Upah sopir mobil truk penyiram taman, Upah pembantu sopir mobil truk penyiram taman, Upah sopir pengangkut sampah taman, Upah Pengabdi /petugas taman kota, dan Upah pembantu sopir pengangkut sampah taman Rp.2.136.000.000	4	TW	Rp2.153.400.000	4	TW	Rp2.138.147.400		
				Pembebasan Lahan untuk Pemakaman Umum di Kel. Tavanjuka Kec. Tatanga	1	Paket		1	Paket									Pemeliharaan Taman	18	Lokasi	Rp39.564.000	18	Lokasi	Rp39.500.000		
				Kendaraan Bermotor Khusus, Crane Pemangkas/Penebang Pohon	1	Unit		1	Unit									Kendaraan Bermotor Khusus berupa Kendaraan Roda 4 Penyiram Taman	2	Unit	Rp547.000.000	2	Unit	Rp547.000.000		
																		Operasional, Pengadaan Perlengkapan, Peralatan dan Fasilitasi Rapat terkait Pemeliharaan dan Penghijauan Taman	4	TW	Rp645.414.550	4	tw	Rp600.635.200		
		Program Pengelolaan Persampahan																								
		1 Pengelolaan Sampah		Biaya operasional Palu Adipura (Upah Sopir, Buruh, Operator Alat Berat, Pengawas, Penyapu Jalan, Bahan Bakar Minyak (BBM)), Peralatan dan Pemeliharaan Peralatan Pengangkutan Sampah, Fasilitasi Rapat dan Makan Minum terkait Palu Adipura, Perlengkapan Lapangan untuk Satgas Adipura	4	TW		4	TW		Operasional Pengangkutan Sampah dan pengadaan Sarpras Pendukung Rp.14.568.912.650	4	TW	Rp.14.568.912.650	4	TW	Rp.14.568.912.650	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas untuk Mobil Penyapu Jalan, Motor Pengangkutan Sampah, Operasional TRC Adipura, Kendaraan Satgas Adipura Kecamatan dan Kelurahan, Pick Up Pengangkut Sampah, Wheel Loader Mini, dan Truck Sampah	4	TW	Rp4.720.370.800	4	TW	Rp4.707.313.000		
		Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		Swakelola Penanganan Kebersihan Kota	1	Paket	Rp32.009.941.470	1	Paket	Rp32.009.941.470	Peralatan TPS3R 10 unit, Reaktor Bio Kompos yang ditempatkan di pasar 6 unit Rp.527.500.000	16	Unit	Rp.15.956.412.650	16	Unit	Rp.15.956.412.650	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya berupa Alat Kebersihan Pengangkutan Pick Up Kelurahan, Alat Pendukung Adipura, Peralatan kebersihan Kegiatan Kebersihan Jalan dan TRC	4	TW	Rp269.718.500	4	tw	Rp265.196.250		
				Wheel Loader Mini	2	Unit		2	Unit		Perencanaan Revitalisasi TPS3R Rp.60.000.000	1	Dokumen	Rp.60.000.000	1	Dokumen	Rp.60.000.000	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa Tong Bin	7	Unit	Rp45.150.000	7	unit	Rp45.150.000		

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6			7				8			9				10			11	12
						Mobil Doubel Cabin DLH untuk SATGAS Adipura	1	Unit		1	Unit		Pengadaan Bak Kontainer Amroll Rp.200.000.000	8	Unit	Rp.200.000.000	8	Unit	Rp.200.000.000	Jasa Tenaga Pelayanan Umum berupa Honorarium Penagih Retribusi, Insentif Pengangkutan Sampah, dan Upah Petugas Pengangkutan Sampah Tiga Roda	4	TW	Rp1.206.850.000	4	TW	Rp1.205.490.000		
						Mobil Pengangkut Sampah Pick Up DLH	48	Unit		48	Unit		Revitalisasi TPS3R dan Bank Sampah Duyu, Palupi, Pengawu, Petobo, Silae, Valangguni. Masing-Masing 1 Unit Rp.600.000.001	6	Unit	Rp.600.000.001	6	Unit	Rp.600.000.001	Jasa Tenaga Kebersihan berupa Upah Buruh Pengangkutan Sampah Pick Up dan Pick Up 22 unit, Upah Sopir Pengangkutan Sampah Pick Up dan Pick Up 22 Unit, Upah Pengawas Satgas Adipura Kelurahan dan Kota Palu, Upah Petugas Penyapu Jalan	4	TW	Rp15.681.435.000	4	TW	Rp15.680.770.000		
						Sepeda Motor untuk SATGAS Adipura dan Pengawas Penyapu Jalan	18	Unit		18	Unit									Kursus Singkat/Pelatihan Pengelolaan TPS3R	4	Lokasi							
						Truck Amroll Pengangkut Sampah	10	Unit		10	Unit									Insidensial Penanganan Kebersihan	4	TW	Rp1.000.000.000	4	TW	Rp999.355.000		
																				Bak Kontainer Sampah	19	Unit	Rp760.000.000	19	unit	Rp759.050.000		
																				Kendaraan Bermotor Angkutan Barang berupa Pick Up Pengangkut Sampah	22	Unit	Rp6.160.550.000	22	unit	Rp6.154.060.000		
																				Kendaraan Bermotor Beroda Dua TRC Adipura berupa Sepeda Motor	4	Unit	Rp88.000.000	4	unit	Rp78.480.000		
																				Kendaraan Bermotor Khusus berupa Quick Truk	6	Unit	Rp450.000.000	6	unit	Rp418.806.000		
																				GPS untuk Pick Up	48	Unit	Rp182.875.200	48	unit	Rp182.200.000		
																				Alat Komunikasi Radio HF/FM berupa Handy Talky	30	Unit	Rp37.500.000	30	unit	Rp37.500.000		
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				Pengadaan mobil opeasional pengangkut sampah Rp.12.000.000.000	48	Unit		48	Unit		Operasional dan pemeliharaan sarana pengolahan sampah di TPA Rp.4.597.702.860	4	TW	Rp.6.297.702.860	4	TW	Rp.6.297.702.860	Operasional, Pemeliharaan Peralatan, Penyediaan Peralatan, Honorarium untuk Pelaksanaan Kegiatan, Pemeliharaan, dan Penanganan TPA	4	TW	Rp14.168.873.186	4	TW	Rp13.439.364.458		
													Pembangunan Garasi Alat Berat Rp.900.000.000	1	Gedung	Rp900.000.000	1	Gedung	Rp900.000.000	Pembebasan Lahan TPA	80000	Meter	Rp9.900.000.000	80000	meter	Rp9.817.833.524		
													Pembangunan Jembatan Timbang Rp.800.000.000	1	Paket	Rp800.000.000	1	Paket	Rp800.000.000									
TOTAL				600			145		Rp38.837.726.567	145		Rp38.837.726.567		55		Rp1.700.000.000	55		Rp1.700.000.000		81029		Rp62.234.583.786	81025		Rp61.161.353.432	98,96%	
PALU ADIPURA																												
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																											
		Prg	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																									
		Keg	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan																									
		Sub	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	Kajian														Kajian Pengelolaan Persampahan Kota Palu	1	Kajian	Rp216.828.100	1	Kajian	Rp216.663.400		
TOTAL				1			0		Rp0	0		Rp0		0		Rp0	0		Rp0		1		Rp216.828.100	1		Rp216.663.400	99,92%	
PALU ADIPURA																												
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																											
		Prg	Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan Perempuan (Tim Perempuan Adipura)			8 Kecamatan 46 Kelurahan	8	Kecamatan 46 Kelurahan	Rp24.274.175	8	Kecamatan 46 Kelurahan	Rp22.316.000	8 Kecamatan 46 Kelurahan dan tingkat RT SE-Kota Palu	8	Kecamatan	Rp8.509.005	8	Kecamatan 46 Kelurahan dan tingkat RT SE-Kota Palu	Rp8.487.825		8	Kecamatan	Rp14.519.900	8	Kecamatan	Rp14.516.300		
TOTAL				0			8		Rp24.274.175	8		Rp22.316.000		8		Rp8.509.005	8		Rp8.487.825		8		Rp14.519.900	8		Rp14.516.300	95,81%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026	Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
				Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5				6			7				8			9				10			11	12
PALU ADIPURA																										
	DINAS PEKERJAAN UMUM																									
		Program Penyelenggaraan Jalan					Rp26.837.828.200			Rp20.941.975.660				Rp31.328.410.980			Rp30.086.532.680				Rp0			Rp0		
		Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota												Rp0							Rp0					
		Pembangunan Jalan			4	Paket	Rp26.837.828.200			Rp20.941.975.660		8	Paket	Rp31.328.410.980	1	Paket	Rp30.086.532.680									
				Kawasan WALIKOTA			Rp10.537.932.000	1	Paket	Rp7.903.449.000	Peningkatan Jalan Tombolotutu Rp. 15.032.136.693			Rp14.438.144.910	1	Paket	Rp13.716.204.500	Peningkatan Jalan Tombolotutu (Lanjutan)	1	kegiatan	Rp2.335.105.400	1	kegiatan	Rp2.101.594.860		
				Kawasan MASOMBA			Rp7.162.046.800	1	Paket	Rp4.297.228.080	Peningkatan Jalan Kartini Rp. 3.570.180.000			Rp3.570.180.000	1	Paket	Rp3.050.242.110	Peningkatan Jalan Kartini (Lanjutan)	1	kegiatan	Rp1.382.598.000	1	kegiatan	Rp1.246.790.070		
				Kawasan NUNU Tahap I Rp. 8.042.598.200			Rp7.931.016.400	1	Paket	Rp7.534.465.580	Peningkatan Jalan Suprapto Rp. 703.382.400			Rp7.020.065.710	1	Paket	Rp7.020.065.710									
				Peningkatan Jalan Kabonena Rp. 1.299.748.961			Rp1.206.833.000	1	Paket	Rp1.206.833.000	Peningkatan Jalan kawasan Birobuli Utara/ Birobuli Selatan (Lanjutan) Rp. 6.308.748.000			Rp6.300.020.360			Rp6.300.020.360									
		Rehabilitasi Jalan			7	Paket	Rp20.006.764.500		Paket	Rp14.843.592.553	Rehabilitasi Jalan Kawasan Kel.Nunu Rp. 396.550.820			Rp396.550.820	1	Paket	Rp396.550.820									
				Rehabilitasi Jalan Kawasan Kel. Lasoani Rp. 579.284.886			Rp564.439.000	1	Paket	Rp564.439.000	Kawasan WALIKOTA			Rp2.391.689.960	1	Paket	Rp2.332.916.000									
				Rehabilitasi Jalan Kawasan Kel. Tatura Utara Rp. 1.969.774.071			Rp1.666.710.975	1	Paket	Rp1.666.710.975	Kawasan MASOMBA			Rp2.864.818.720	1	Paket	Rp2.864.818.720									
				Rehabilitasi Jalan Kawasan Kel. Lolu Utara Rp. 7.787.145.778			Rp7.787.145.775	1	Paket	Rp7.397.788.487	Rehabilitasi Jalan Kawasan Kel. Lolu Utara Rp. 242.793.040			Rp242.793.040	1	Paket	Rp242.793.040									
				Rehabilitasi Jalan Kawasan Kel. Besusu Barat Rp. 6.240.280.600			Rp6.240.280.600	1	Paket	Rp1.466.465.941	Rehabilitasi Jalan Kawasan Besusu Barat Rp. 4.773.814.659			Rp4.773.814.659			Rp4.766.915.000									
				Rehabilitasi Jalan Kawasan Kel. Siranindi Rp. 1.385.647.956			Rp1.379.106.775	1	Paket	Rp1.379.106.775	Rehabilitasi Jalan Kawasan Kel. Besteng - Bestim Rp. 518.932.500			Rp518.932.500			Rp518.932.500									
				Rehabilitasi Jalan kawasan Birobuli Utara/ Birobuli Selatan Rp. 2.006.692.685			Rp1.355.819.000	1	Paket	Rp1.355.819.000	Kawasan NUNU Tahap I Rp. 8.042.598.200			Rp938.712.440			Rp938.712.440									
				Rehabilitasi Jalan Kawasan Kel. Bayoge Rp. 1.066.979.750			Rp1.013.262.375	1		Rp1.013.262.375																
TOTAL			0		11		Rp119.513.751.225	11		Rp91.499.849.711		8		Rp106.112.545.079	8		Rp102.321.236.560		2		Rp3.717.703.400	2		Rp3.348.384.930	85,97%	
PALU TERANG																										
	KECAMATAN PALU TIMUR																									
		PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																								
		Pemberdayaan Kelurahan																								
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																								
		- Pengadaan Penerangan jalan umum				0						7	Titik	Rp242.500.000	7	titik	Rp242.500.000		1	Titik	Rp17.500.000	1	Titik	Rp17.500.000		
TOTAL							Rp0	0		Rp0		7		Rp242.500.000	7		Rp242.500.000		1		Rp17.500.000	1		Rp17.500.000	100,00%	
PALU TERANG																										
	KECAMATAN PALU BARAT																									
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																								
		Keg Pemberdayaan Kelurahan																								
		Sub Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																								
		- - Pengadaan Penerangan jalan umum					Rp0					7	Titik	Rp47.500.000	7	Titik	Rp47.500.000									
TOTAL			0		0		Rp0	0		Rp0		7		Rp47.500.000	7		Rp47.500.000		0		Rp0	0		Rp0	100,00%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026	Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1	2		3	4	5				6				7				8				9				10				11	12
PALU TERANG																														
	KECAMATAN ULUJADI																													
		Prg	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																											
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																											
		Sub	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																											
		-	- Pengadaan Penerangan jalan umum																			3	Titik	Rp47.937.246	2	1 Kelurahan tdk laksanakan	Rp27.370.986			
		-				5	Titik	Rp195.734.800	5	Titik	Rp195.734.800			14	Titik	Rp389.695.375	14	Titik	Rp389.695.375			7	Titik	Rp263.445.795	7	sudah mencapai 100%	Rp263.200.000			
TOTAL				0		5		Rp195.734.800	5		Rp195.734.800			14		Rp389.695.375	14		Rp389.695.375			10		Rp311.383.041	9		Rp290.570.986	97,68%	
PALU TERANG																														
	KECAMATAN TAWAELI																													
		Prg	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																											
		Keg																												
		Sub	Pemberdayaan Kelurahan																											
		-	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			5	Kelurahan	Rp1.884.629.790	5	Kelurahan	Rp1.884.629.790			5	kel	Rp1.319.695.000	5	kel	Rp1.264.195.000			5	kelurahan	Rp1.350.269.413	5	kelurahan	Rp1.306.333.798			
		-	- Pengadaan Penerangan jalan umum																											
TOTAL				0		5		Rp1.884.629.790	5		Rp1.884.629.790			5		Rp1.319.695.000	5		Rp1.264.195.000			5		Rp1.350.269.413	5		Rp1.306.333.798	97,82%	
PALU TERANG																														
	KECAMATAN PALU UTARA																													
		Prg	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																											
		Keg	Pemberdayaan Kelurahan																											
		Sub	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																											
		-	Pengadaan Penerangan jalan umum					Rp0													Lampu Hias Kel. Taipa	58	Buah	Rp23.200.000	58	Buah	Rp23.200.000			
TOTAL				0		0		Rp0	0		Rp0			0		Rp0	0		Rp0			58		Rp23.200.000	58		Rp23.200.000	100,00%	
PALU TERANG																														
	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																													
		Prg	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)			11468	Mata Lampu	Rp33.950.000.000	11468	Mata Lampu	Rp33.950.000.000			15128	Mata Lampu	Rp53.773.490.010	15128	Mata Lampu	Rp53.773.490.010			15488	Kwh	Rp53.468.106.271	15488	Mata lampu	Rp53.468.106.271			
		Keg	Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman																											
		Sub	Sub Kegiatan Kerja Sama Penyediaan / Pengelolaan PSU Permukiman																											
		-	Pembayaran Tagihan Rekening Listrik PJU			######	Kwh	Rp33.000.000.000	######	Kwh	Rp33.000.000.000			######	Kwh	Rp27.759.990.010	######	Kwh	Rp27.759.990.010		Pembayaran Tagihan Rekening Listrik PJU	######	Kwh	Rp18.000.000.000	######	Kwh	Rp17.957.740.888			
		-	Pemeliharaan Lampu dan Perlengkapan Penerangan Jalan Umum (PJU)			1	Paket	Rp500.000.000	1	Paket	Rp500.000.000			1	Paket	Rp401.689.000	1	Paket	Rp401.689.000		Pemeliharaan Penerangan Fasum dan Fasos	1	Paket	Rp421.192.000	1	Paket	Rp421.133.560			
		-	Penerangan Listrik Jembatan Lalove			1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp100.000.000																			
		-	Pengadaan Lampu LED untuk Revitalisasi PJU Kota Palu			1	Paket	Rp250.000.000	1	Paket	Rp250.000.000																			
		-	Jaringan Listrik Tugu Nol Kilometer			1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp100.000.000																			
		-	Pembayaran Revitalsiasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Palu tahap I											1	Paket	Rp25.536.511.000	1	Paket	Rp25.536.511.000											
		-	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Taman											1	Paket	Rp75.300.000	1	Paket	Rp75.300.000											
		-	Pembayaran Revitalsiasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Palu tahap II																		Pembayaran Revitalsiasi Penerangan Jalan Umum (PJU) Kota Palu tahap II	1	Paket	Rp34.378.000.000	1	Paket	Rp34.378.000.000			
		-	Pemasangan lampu PJU Bantaran Sungai Pondo																		Pemasangan lampu PJU Bantaran Sungai Pondo	1	Paket	Rp100.000.000	1	Paket	Rp99.824.000			
		-	Pemasangan lampu PJU Jl. Andudana																		Pemasangan lampu PJU Jl. Andudana	1	Paket	Rp50.000.000	1	Paket	Rp49.888.000			
		-	Pengadaan KWH Meter																		Pengadaan KWH Meter	1	Paket	Rp147.000.000	1	Paket	Rp125.223.880			
TOTAL				0		11468		Rp67.900.000.000	11468		Rp67.900.000.000			15128		Rp107.546.980.020	15128		Rp107.546.980.020			15488		Rp106.417.298.271	15488		Rp106.374.692.719	100,00%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2		3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
PALU HIJAU																												
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																											
		Prg	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)																									
		Keg	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kab/Kota			Penanaman dan Pemeliharaan Pohon	4	TW	Rp2.760.792.387	4	TW	Rp2.760.792.387	Perawatan Pohon dan Penanaman Pohon (JL. Dr. Wahidin, Diponegoro, Kemiri, Gajahmada/ Imam Bonjol, Basuki Rahmat, dan pantai anjungan)							Bahan-Bahan/Bibit Tanaman, berupa Pohon Bintaro Tinggi 1 Meter	820	Batang	Rp206.005.000	820	Batang	Rp203.787.500		
		Sub	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Penataan Pohon Kota	4	TW	Rp4.069.781.210	4	TW	Rp4.069.781.210	Pemangkasan, dekorasi taman, kebersihan TPU dan Bola Cor Trotoar							Jasa Tenaga Pelayanan Umum berupa Upah Petugas Penertiban Reklame dan Dekorasi Hari-Hari Besar Nasional dan Kegiatan Daerah, Upah Petugas Penebangan /Pemangkasan, dan Upah Petugas TPU	4	TW	Rp1.500.000.000	4	TW	Rp1.451.912.500		
																				Kendaraan Bermotor Khusus (Pemangkas Pohon) berupa Mobil Crane Penebangan/Pemangkasan	1	unit	Rp1.600.000.000	1	unit	Rp1.600.000.000		
TOTAL				0			8		Rp6.830.573.597	8		Rp6.830.573.597		0		Rp0	0		Rp0		825		Rp3.306.005.000	825		Rp3.255.700.000	91,67% 99,50%	
PALU RAMAH, AMAN, DAN TERTIB																												
	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH																											
		Prg	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah																									
		Keg	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan																									
		Sub	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1	Kajian															Kajian Pengembangan Karakter dan Akhlak Peserta Didik berdasarkan nilai-nilai Agama dan Pancasila	1	Kajian	Rp134.219.000	1	Kajian	Rp125.666.637		
TOTAL				1			0		Rp0	0		Rp0		0		Rp0	0		Rp0		1		Rp134.219.000	1		Rp125.666.637	93,63%	
PALU RAMAH, AMAN, DAN TERTIB																												
	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																											
		Prg	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)			Perda	1		Rp24.128.600	(Perda no.1 tahun 2021 ttg Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak)		Rp22.316.000	Perwali	1	Perwali	Rp23.817.725	(Perwali no .41 thn 2022 ttg Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak)		Rp22.567.725	Kota Layak Anak	1	kegiatan	Rp33.220.400	1	kegiatan	Rp28.819.100		
TOTAL				0			1		Rp24.128.600	#REF!		Rp22.316.000		1		Rp23.817.725	#REF!		Rp22.567.725		1		Rp33.220.400	1		Rp28.819.100	90,80%	
CSR FORUM																												
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH																											
		Prg	Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	100	%		-		-			-		2	Kerjasama	Rp101.034.125	2	Kerjasama	Rp88.796.535		2	Kerjasama	Rp114.837.800	2	Kerjasama	Rp109.713.600		
		Keg	Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Daerah										Tersedianya Doukmen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah							Tersedianya Doukmen Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah								
		Sub	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah										Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah				Keputusan Wali Kota Palu No.050/1423/ Bappeda/2022 Tentang Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kota Palu Tahun 2023			Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah				Keputusan Walikota Palu nomor 050/19/Bappeda/2023 tentang Tim Fasilitasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Di Kota Palu Tahun 2024				
TOTAL				100			0		Rp0	0		Rp0		2		Rp101.034.125	2		Rp88.796.535		2		Rp114.837.800	2		Rp109.713.600	91,96%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026	Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
				Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4	5				6				7				8				9				10			11	12
SATGAS CEPAT TANGGAP (Quick Respons/ Command Center)																												
	KECAMATAN PALU TIMUR																											
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																										
		Keg Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Tingkat Kecamatan																										
		Sub Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																										
		Dukungan terhadap pelaksanaan Satgas tanggap Cepat Kelurahan			1	Paket	Rp34.298.500	1	Paket	Rp34.298.500			1	Paket	Rp21.943.000	1	Paket	Rp21.943.000			3	Paket	Rp48.320.000	3	Paket	Rp32.530.000		
TOTAL			0		1		Rp34.298.500	1		Rp34.298.500			1		Rp21.943.000	1		Rp21.943.000			3		Rp48.320.000	3		Rp32.530.000	84,90%	
SATGAS CEPAT TANGGAP (Quick Respons/ Command Center)																												
	KECAMATAN PALU BARAT																											
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																										
		Keg Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Tingkat Kecamatan																										
		Sub Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		Bimtek Peningkatan Ketua RT dan RW	4	Kelurahan	Rp17.536.850	2	Kelurahan	Rp13.608.150		
		- Dukungan terhadap pelaksanaan Satgas tanggap Cepat Kelurahan			1	Paket	Rp23.776.750	1	Paket	Rp23.776.750			1	Paket	Rp11.799.675	1	Paket	Rp11.799.675		Dukungan terhadap Tugas Satgas K 5	6	Kelurahan	Rp27.156.000	6	Kelurahan	Rp26.433.500	55,98%	
TOTAL			0		1		Rp23.776.750	1		Rp23.776.750			1		Rp11.799.675	1		Rp11.799.675			10		Rp44.692.850	8		Rp40.041.650	94,21%	
SATGAS CEPAT TANGGAP (Quick Respons/ Command Center)																												
	KECAMATAN ULUJADI																											
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																										
		Keg Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Tingkat Kecamatan																										
		Sub Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																										
		- Dukungan terhadap pelaksanaan Satgas tanggap Cepat Kelurahan			1	Paket	Rp36.363.600	1	Paket	Rp36.363.600			1	Paket	Rp65.167.500	1	Paket	Rp65.167.500			1	Paket	Rp35.727.000	1	Paket	Rp35.727.000		
TOTAL			0		1		Rp36.363.600	1		Rp36.363.600			1		Rp65.167.500	1		Rp65.167.500			1		Rp35.727.000	1		Rp35.727.000	100,00%	
SATGAS CEPAT TANGGAP (Quick Respons/ Command Center)																												
	KECAMATAN PALU UTARA																											
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																										
		Keg Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Tingkat Kecamatan																										
		Sub Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																										
		- Dukungan terhadap pelaksanaan Satgas tanggap Cepat Kelurahan			1	Paket	Rp17.678.000	1	Paket	Rp17.678.000			1	Paket	Rp32.948.000	1	Paket	Rp32.948.000			1	Paket	Rp27.017.500	1	Paket	Rp27.017.500		
TOTAL			0		1		Rp17.678.000	1		Rp17.678.000			1		Rp32.948.000	1		Rp32.948.000			1		Rp27.017.500	1		Rp27.017.500	100,00%	
SATGAS CEPAT TANGGAP (Quick Respons/ Command Center)																												
	KECAMATAN TAWAELI																											
		Prg PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																										
		Keg Pemberdayaan Lembaga Kemasyaratan Tingkat Kecamatan																										
		Sub Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																										
		- Dukungan terhadap pelaksanaan Satgas tanggap Cepat Kelurahan			1	Paket	Rp15.418.125	1	Paket	Rp15.418.125			1	Paket	Rp24.793.125	1	Paket	Rp24.793.125			1	Paket	Rp27.106.200	1	Paket	Rp27.106.200		
TOTAL			0		1		Rp15.418.125	1		Rp15.418.125			1		Rp24.793.125	1		Rp24.793.125			1		Rp27.106.200	1		Rp27.106.200	100,00%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021			Target 2022				Realisasi 2022			Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
					Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3	4		5				6			7				8			9				10			11	12
SATGAS CEPAT TANGGAP (Quick Respons/ Command Center)																											
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN																										
		Prg Program Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100	%		100	%		100	%			100	%		76	%			97	%		97	%			
		Keg Pencegahan ,Pengendalian,Pemadaman,Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota			Cakupan layanan bencana kebakaran kabupaten/kota							Cakupan layanan bencana kebakaran kabupaten/kota							Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran								
		Sub Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota				88	%	Rp609.620.646	88	%	Rp534.454.420		88		Rp594.357.507	88	%	Rp521.370.405		98	%	Rp582.528.600	98	%	Rp568.809.396		Realisasi Fisik Belanja sampai TW 4, mencapai 100% , Namun ada deviasi sebesar 13.719.204, yang merupakan Sisa dri Belanja Oli Pelumas Seluruh Armada Damkar, yg di SPJ kan sesuai Invoice.
		Sub Penyelamatan dan Evaluasi Korban Kebakaran dan Non Kebalaran				96	%	Rp99.935.000	96	%	Rp96.097.496		95		Rp204.814.128	95	%	Rp194.511.977		100	%	Rp127.578.600	100	%	Rp127.472.800		Realisasi Fisik Belanja sampai TW 4, mencapai 100% , Namun ada deviasi sebesar 105.800,- yang merupakan Sisa dri Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering, yg di SPJ kan sesuai HPS (Harga Perkiraan Sendiri) oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
TOTAL			100			284		Rp709.555.646	284		Rp630.551.916		283		Rp799.171.635	259		Rp715.882.383		295		Rp710.107.200	295		Rp696.282.196	92,06%	
SATGAS CEPAT TANGGAP (Quick Respons/ Command Center)																											
	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																										
		Prg Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				12	Bulan		12	Bulan			12	Bulan		9	Bulan			12	Bulan		12	Bulan			
		Keg Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			Satgas cepat tanggap Satuan Polisi Pamong Praja							Kegiatan Pengawasan, Penertiban dan Pengamanan Dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum (Respon Cepat 24 Jam)							Operasional dan Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Aset Statis, Kegiatan Pengamanan Rumah Jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu, Penjagaan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Respon Cepat 24 Jam), dan Bekerjasama dengan POLRI, TNI dan Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Pengamanan								
		Sub Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah						Rp3.817.276.575			Rp3.817.276.575				Rp2.022.640.960			Rp1.917.135.974				Rp2.688.081.000			Rp2.333.805.000		
		Sub Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						Rp324.000.000			Rp324.000.000	Perlindungan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	12	Bulan	Rp336.450.000	12	Bulan	Rp244.700.000	Perlengkapan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS)	107	Buah		107	Buah			
																			Fasilitasi Rapat, Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Peningkatan Kapasitas Teknis Anggota Linmas dan Pelaksanaan Keamanan Perlindungan Masyarakat di Kec. Dan Kelurahan	12	Bulan	Rp380.507.600	12	Bulan	Rp221.692.900		Direalisasikan berdasarkan Laporan dari Kelurahan dan Kecamatan (Linmas)
TOTAL			0			12		Rp4.141.276.575	12		Rp4.141.276.575		24		Rp2.359.090.960	21		Rp2.161.835.974		119		Rp2.688.081.000	119		Rp2.333.805.000	94,00%	

3 Program	OPD		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023				CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)			
1	2		3	4		5				6				7				8				9				10				11	12
SATGAS CEPAT TANGGAP (Quick Respons/ Command Center)																															
	Dinas Sosial																														
		Prg	Program Penanganan Bencana																												
		Keg	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota																			Fasilitasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	4	TW	Rp1.225.000	4	tw	Rp1.225.000			
		Sub	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana																			Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa Sepatu Boot	40	Pasang	Rp7.560.000	40	buah	Rp7.560.000			
																						Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat berupa Jas Hujan	40	Buah	Rp10.200.000	40	buah	Rp10.200.000			
				237	orang	Satgas Cepat Tanggap Dinas Sosial Rp.165.600.000	4	TW	Rp62.587.500	4	TW	Rp62.587.500		Peralatan dan Honorarium Taruna Siaga Bencana Rp.122.695.300	30	orang	Rp108.000.000	30	orang	Rp108.000.000		Jasa Tenaga Penanganan Bencana atau Tim Reaksi Cepat jaga Palu	40	orang	Rp144.000.000	40	orang	Rp144.000.000			
TOTAL				237			4		Rp62.587.500	4		Rp62.587.500			30		Rp108.000.000	30		Rp108.000.000			124		Rp162.985.000	124		Rp162.985.000	100,00%	
SATGAS CEPAT TANGGAP (Quick Respons/ Command Center)																															
	DINAS PERHUBUNGAN																														
		Prg	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)																												
		Keg	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																												
		Sub	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				1	tahun	Rp1.889.166.500	1	tahun	Rp1.785.870.400		Sweping dan rekayasa jalan	1	tahun	Rp498.139.225	1	tahun	Rp491.103.675		Operasional Kegiatan Car Free Day, Penertiban dan Pengawasan Lalu Lintas (Sweeping), Pengawasan Rekayasa Jalur, Tindak Reaksi Cepat (TRC), Penertiban Angkutan Barang Khusus dan Alat, Pendampingan Pejabat dan Tamu Daerah, dan Tim Sidang Tindak Pidana Ringan	4	tw	Rp995.974.100	4	tw	Rp990.678.450			
TOTAL				0			1		Rp1.889.166.500	1		Rp1.785.870.400			1		Rp498.139.225	1		Rp491.103.675			4		Rp995.974.100	4		Rp990.678.450	96,58%	
SATGAS CEPAT TANGGAP (Quick Respons/ Command Center)																															
	DINAS PEKERJAAN UMUM																														
			Program Penyelenggaraan Jalan	5	Tahun																										
		1	Penyelenggaraan Jalan Kab/Kota			Satgas Cepat Tanggap Dinas Pekerjaan Umum Rp.6.256.743.589	1	Tahun	Rp6.206.298.704			Rp6.206.298.704					Rp7.936.924.446			Rp7.566.317.507		Satgas Cepat Tanggap Dinas Pekerjaan Umum	1	Tahun	Rp10.317.008.720	1	Tahun	Rp10.250.577.140			
			Pemeliharaan Rutin Jalan						Rp6.206.298.704	1	Tahun	Rp6.206.298.704		Pemeliharaan Jalan dalam Kota Palu Rp.6.632.453.946	1	Tahun	Rp7.354.914.946	1	Tahun	Rp6.986.269.307		Pekerjaan Swakelola untuk Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Kota Palu Contoh Kegiatan yaitu : Galian Tanah, Pengkerikilan, dan Laston Lapis Aus (AC WC)	1	Tahun	Rp8.960.406.720	1	Tahun	Rp8.898.123.930			
			Pemeliharaan Rutin Jembatan						Rp0			Rp0		Pemeliharaan Jembatan dalam Kota Palu Rp.457.009.500	1	Tahun	Rp582.009.500	1	Tahun	Rp580.048.200		Pekerjaan Swakelola untuk Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan Kota Palu	1	Tahun	Rp1.356.602.000	1	Tahun	Rp1.352.453.210			
TOTAL				5			1		Rp12.412.597.408	1		Rp12.412.597.408			2		Rp15.873.848.892	2		Rp15.132.635.014			3		Rp20.634.017.440	3		Rp20.501.154.280	98,21%	
SATGAS CEPAT TANGGAP (Quick Respons/ Command Center)																															
	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																														
		Prg	Program Penanggulangan Bencana	100	%																										
		Keg	Pelayanan penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			Tim Pusdalops Rp.386.289.200	4	TW		4	SK Walikota No. 360/1946/BPBD/2022tentang pembentukan Satgas TRC No Tahun 2021											Operasional dan Perlengkapan, Fasilitasi Pelaksanaan dan Rapat Tim Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB)	4	TW	Rp353.756.200	4	tw	Rp353.756.200			
		Sub	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						Rp386.289.200			Rp386.289.200					Rp442.558.200			Rp440.551.800							tw		75,00%	
			Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	46	Kelurahan				Rp51.815.550	8	Kelurahan	Rp51.815.550			5	Kelurahan	Rp25.250.000	5	Kelurahan			5	Kelurahan	Rp. 34.974.800	5	Kelurahan	Rp. 34.974.800	39,00%	

3 Program	OPD	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		TARGET 2021-2026		Target 2021				Realisasi 2021				Target 2022				Realisasi 2022				Target 2023				Realisasi 2023			CAPAIAN 2021-2023	KET
						Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		Uraian	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)	Volume	Satuan	Anggaran (Rp)		
1	2	3		4		5				6				7				8				9				10			11	12
		-				Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) di 8 kelurahan	8	Kelurahan		Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) di 8 kelurahan				Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) di 5 kelurahan				Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) di 5 kelurahan				Pelatihan Tim Reaksi Cepat (TRC) di 5 kelurahan	5	Kelurahan		5	Kelurahan			
						Talise, Talise Valangguni, Baru, Lere, Tondo, Besbar, Silae dan Tipo				Talise, Talise Valangguni, Baru, Lere, Tondo, Besbar, Silae dan Tipo				Tanamodindi, Besbar, Birobuli Selatan, Birobuli Utara, Layana				Tanamodindi, Besbar, Birobuli Selatan, Birobuli Utara, Layana				Layana Indah, Mamboro Barat, Tatura Selatan, Nunu, Ujuna								
TOTAL				146			12		Rp438.104.750	12		Rp438.104.750			5		Rp467.808.200	5		Rp440.551.800			14		Rp353.756.200	14		Rp353.756.200	97,84%	
SATGAS CEPAT TANGGAP (Quick Respons/ Command Center)																														
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP																													
		Prg	Program Pengelolaan Persampahan																											
		Keg	Pengelolaan Sampah																											
		Sub	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			Operasional, Honorarium, Peralatan dan Perlengkapan Tim Reaksi Cepat Adipura dan Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah Rp. 56.447.555.420	4	TW	Rp56.447.555.420	4	TW	Rp56.447.555.420		Operasional dan Honorarium Tim Reaksi Cepat Adipura Rp.1.421.319.000	4	TW	Rp1.421.319.000	4	TW	Rp1.421.319.000		Operasional, Honorarium, Peralatan dan Perlengkapan Tim Reaksi Cepat Adipura	4	TW	Rp31.935.727.360	4	TW	Rp31.657.513.753	58,33%	
TOTAL				0			4		Rp56.447.555.420	4		Rp56.447.555.420			4		Rp1.421.319.000	4		Rp1.421.319.000			4		Rp31.935.727.360	4		Rp31.657.513.753	99,69%	
SATGAS CEPAT TANGGAP (Quick Respons/ Command Center)																														
	Dinas Kesehatan																													
		Prg	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5	TAHUN	Satgas Cepat Tanggap Dinas Kesehatan	12	Bulan	Rp34.317.779.855	12	Bulan	Rp34.317.779.855		Penanganan Covid 19	1	Tahun	Rp3.539.726.300	1	Tahun	Rp3.539.726.300					Operasional Kegiatan TGC							
		Keg	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																			Operasional Kegiatan TGC	10	Buah	Perlengkapan TGC berupa Rompi Kerja	10	Buah			
		Sub																												
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)																			Seragam Lapangan Tim Surveilnas dan Imunisasi	100	Lembar		100	Lembar			
																						Insentif Penanggulanan Covid, Pengolah Data Covid dan Transport Petugas Vaksinasi Covid-19 di Kawasan	12	Bulan		12	Bulan			Dilakukan Perubahan karena sudah tidak ada pasien Covid
TOTAL				5			12		Rp34.317.779.855	12		Rp34.317.779.855			1		Rp3.539.726.300	1		Rp3.539.726.300			122		Rp0	122		Rp0	100,00%	
KELURAHAN MANTAP 2 MILYAR																														
	BAGIAN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH																													
		Prg	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	46	Kelurahan				Rp0																						Dalam Proses Penentuan Juara, Pengumuman Pemenang di bulan november
		Keg	Administrasi tata Pemerintahan						Rp0																					
		Sub	Penataan Administrasi Pemerintahan											Hadiah Kelurahan Mantap 2 Milyar Rp.2.000.000.000	3	Kelurahan	Rp2.000.000.000	3	Kelurahan	Rp1.461.390.625		Hadiah Kelurahan Mantap 2 Milyar Rp.2.000.000.000	3	Kelurahan	Rp2.000.000.000	3	Kelurahan	Rp2.000.000.000		
TOTAL				46			0		Rp0	0		Rp0			3		Rp2.000.000.000	3		Rp1.461.390.625			3		Rp2.000.000.000	3		Rp2.000.000.000	86,53%	

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1 Identifikasi Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

1) Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif, dan Merata

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimaknai sebagai pertumbuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antar penduduk.

Secara umum, kondisi perekonomian Kota Palu dapat tetap tumbuh di tengah perekonomian global yang belum stabil. Ketahanan ekonomi tersebut tergambar melalui pertumbuhan pada sektor produksi (supply side), maupun melalui pertumbuhan pada komponen permintaan akhir (demand side). Pada sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terdapat pada kategori Konstruksi Tahun 2023 tumbuh 17,75 %, disusul oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 13,53%, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Sepeda Motor sebesar 11,42%, sedangkan karakteristik pertumbuhan pada sisi permintaan akhir tetap pada ciri khasnya yaitu didominasi oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang membentuk separuh lebih dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Palu sebesar 58,83 %, disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 47,77 %, dan selanjutnya oleh Konsumsi Pemerintah sebesar 13,68 %.

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut jenis pengeluaran juga dinilai dengan ADHK Tahun 2010, atau atas dasar harga berbagai produk yang dievaluasi dengan harga pada Tahun 2010. Melalui pendekatan penghitungan itu maka PDRB untuk masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB

secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB menurut jenis pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil. Utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir. Secara tahunan, pertumbuhan Tahun 2019 sampai dengan 2023 secara berturut-turut yaitu 5,65%; -4,43%; 5,97%; 4,32%; dan 4,96%.

Nilai PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2019-2023 menunjukkan peningkatan pada 2 (dua) tahun terakhir terhadap hasil yang dicapai dari tahun sebelumnya yaitu naik sebesar 707,21 (juta rupiah) pada Tahun 2022, dan 848,61 (juta rupiah) pada Tahun 2023. Hal ini memberikan penjelasan bahwa terjadi kenaikan pada nilai pertumbuhan ekonomi Kota Palu Tahun Tahun 2023 sebesar 0,64 % dari tahun sebelumnya hingga mencapai 4,96 %.

Data penduduk miskin Kota Palu, terus berfluktuasi mengikuti dinamika perkotaan, Tahun 2023, persentase penduduk miskin Kota Palu menurun dari 6,63 persen (Tahun 2022) menjdi 6,56 (Tahun 2023). Secara absolut, jumlah penduduk miskin Tahun 2023 mengalami penurunan dari Tahun 2022 yakni dari 26.750 jiwa menjadi 25.420 jiwa. Raihan angka kemiskinan ini secara konsisiten terus berada di bawah angka kemiskinan Propinsi Sulawesi Tengah yang berada diangka 12,41 persen, dan angka kemiskinan nasional yang berada diangka 9,36 persen pada September Tahun 2023. Fakta ini juga mengambarkan bahwa 1 dari 15 penduduk Kota Palu termaksud dalam kategori penduduk miskin.

Adapun tingkat kedalaman kemiskinan atau P1 yang mengambarkan ukuran rata rata kesenjangan pengeluaran masing masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, menunjukan

penurunan di Tahun 2023 yaitu 0,84, sedangkan tingkat keparahan kemiskinan atau P2, yang mengambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin, angkanya juga turun dari 0,25 di Tahun 2022, menjadi 0,19 di Tahun 2023.

2) SDM Unggul, Tangguh, dan Berdaya Saing.

Keberadaan sumberdaya manusia, unggul, tangguh dan berdaya saing, adalah isyu mendesak, mutlak dan serta urgen, sebab SDM merupakan faktor sumberdaya yang srategis, yang harus terus dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keberadaan SDM menjadi faktor penting disamping faktor sumberdaya alam, infrastruktur, sosial budaya serta modal kestabilan politik, SDM yang ungul akan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi daerah, meningkatnya etos kerja serta kemampuan mengelola sumberdaya yang adauntuk kemajuan daerah.

SDM yang tangguh digambarkan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi serta memitigasi kebencanaan dan perubahan iklim. SDM yang tangguh dilakukan melalui meningkatkan efektivitas pelayanan dan kecepatan penangulangan dimasa tanggap darurat. Pencapaian pembangunan sumber daya manusia, ditujukkan dengan angka Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, yang menjelaskan kemampuan penduduk dalam mengakses hasil pembangunan khususnya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan serta kesempatan kerja. Capaian IPM Kota Palu dalam dua tahun terakhir (Tahun 2022 dan 2023) kategori “sangat tinggi”, yaitu angka 83,26 di Tahun 2022 dan 83,71 di Tahun 2023, dan Raihan ini adalah tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah.

Indeks Kesehatan, digambarkan dengan instrumen Umur Harapan Hidup, angka tersebut di Kota Palu menunjukan peningkatan dari 73,56 tahun di Tahun 2022 menjadi 73,71 tahun pada Tahun 2023.

Indeks Pendidikan, digambarkan oleh angka harapan lama sekolah dan rata rata lama sekolah, untuk angka harapan sekolah, di Kota Palu meningkat dari 16,36 tahun di Tahun 2022, naik menjadi 16,51 tahun pada Tahun 2023, demikian juga pada angka rata rata lama sekolah, meningkat diangka 11,73 tahun pada Tahun 2022 menjadi 11,74 tahun di Tahun 2023.

Angka partisipasi angkatan kerja Kota Palu Tahun 2023 sebesar 197.386 jiwa sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 202.803 jiwa dengan rasio penduduk yang bekerja sebesar 94,35% pada Tahun 2023. Tingginya rasio penduduk yang bekerja disebabkan oleh turunnya angka atau jumlah pengangguran menjadi dari Tahun 2022 sebesar 12.482 jiwa menjadi 11.147 jiwa di Tahun 2023 dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,15% di Tahun 2022 dan 5,65% di Tahun 2023.

3) Infrastruktur Kota yang Aman, Nyaman, Tangguh, dan Inklusif

Perencanaan masa depan perkotaan, yaitu membangun perkotaan yang berketahanan bencana, cerdas dan modern, yang pelaksanaannya haruslah bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang ditunjukan dengan ketersediaan layanan dasar dan perumahan yang aman dan terjangkau serta mempromosikan pembangunan ekonomi lokal. Perwujuduan kota yang nyaman dan inklusif ditandai dengan kota yang tanpa limbah, rendah karbon dan tersedia ruang hijau publik, dengan sistem transportasi yang terjangkau dan menjamin keselamatan jalan.

Masalah perkotaan yang dicirikan oleh kawasan kumuh, penyediaan sanitasi yang buruk dan transportasi yang tidak lancar, perlu ditangani secara berkelanjutan, smart dan inovatif. Kota tangguh bencana bukan sekedar infrastruktur tapi juga kesiapan kelembagaan dan sumberdaya pembiayaan yang mendukung dalam kategotri mantap.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pasca bencana di Kota Palu, sebagai bagian dari mitigasi haruslah menghasilkan prasarana dan sarana publik yang tangguh bencana, secara teknis bangunan untuk fasilitas umum haruslah memilki derajat yang lebih kuat dan aman, dengan menjadikan histori kebencanaan sebagai bagian dari bahan pembuatan perencanaan yang utuh. Oleh karena itu, kepatuhan atas penerapan standar bangunan dan zonasi daerah rawan bencana menjadi suatu hal yang penting.

4) Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim, serta Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

Kota Palu merupakan kota dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi diindikasikan dari tingginya nilai indeks risiko bencana yakni sebesar 162,7 point (BNPB, 2019) memiliki ketangguhan terhadap bencana kategori sedang yakni 263 point dari 590 skor tertinggi (Yayasan Care, Lingkar, BPBD Kota Palu, 2020) sesuai indikator penilaian yang dikembangkan UNDDR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction).

Adanya fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan memicu perubahan iklim dunia. Fenomena pemanasan global terjadi secara menyeluruh sehingga dapat mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca hampir di semua wilayah, termasuk di area Kota Palu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memproyeksi perubahan rata-rata suhu maksimum Kota Palu periode 2032 - 2040 terjadi penambahan suhu dengan proyeksi rata-rata suhu maksimum yang dapat mencapai 2.25 - 2.5 derajat Celsius.

5) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih, akan memberikan rasa nyaman dan menentramkan bagi semu pihak, yang dijalankan dengansuasana kepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat yang diharapkan dalam visi pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaanya pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan produktif kepada masyarakat, mendorong dan meningkatkan otonomi menajerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparan, akuntabilitas publik dan disiapkan pengelolaan manajerial yang bersih dan bebas dari korupsi. Kosep ini mengedepankan partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mengadopsi prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, etika dan budaya organisasi serta visi strategis.

2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Pemerintah Kota Palu telah melaksanakan pembangunan pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan hasil yang cukup menggembirakan. Hal ini terlihat dari semakin membaiknya

berbagai indikator pembangunan yang tercapai. Namun demikian, sebagai kota yang multifungsi, sampai saat ini Kota Palu tetap menyandang banyak permasalahan, baik dari eksternal maupun internal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita, lingkungan hidup serta infrastruktur daerah yang merupakan gambaran permasalahan daerah dalam skala makro.

Permasalahan daerah juga dapat ditinjau dalam skala mikro, yaitu identifikasi permasalahan berdasarkan urusan kepemerintahan seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, mengenai pembagian urusan dan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Terkait hal ini, urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan dan penunjang. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut gambaran permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kota Palu

Secara keseluruhan dari 3 (tiga) urusan dan 5 (lima) unsur pemerintahan yang bergerak menyelenggarakan pemerintahan di Kota Palu Triwulan IV tahun 2023 memiliki permasalahan umum yaitu:

1) Perlu pencermatan program dan kegiatan terkait jadwal pelaksanaan, sehingga terealisasi sesuai waktu yang telah ditetapkan.
2) Adanya kenaikan beberapa harga barang sehingga kegiatan tidak dapat terealisasi.

3) Semua pekerjaan fisik (pembangunan sarana dan prasarana) dikoordinasikan dengan OPD terkait sehingga pada saat penyusunan RAB tidak terjadi perbedaan harga dan sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.
4) Perlu dilakukan survey awal terhadap ketersediaan barang sehingga dapat direalisasikan sesuai anggaran.

Berikut gambaran permasalahan pada masing-masing urusan pemerintahan di Kota Palu.

1) Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu

Urusan pemerintahan wajib, menurut Undang-Undang 23 Tahun 2014 adalah urusan pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat di daerah tersebut. Berikut beberapa permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di Kota Palu

Tabel 2.133
Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan
Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

No	Urusan	Data	Permasalahan
1	**Pendidikan**	Guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan 2018 : 15,65% 2021 : • untuk SD adalah sebanyak 163 orang (7,21%) dimana yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan adalah sebanyak 2.099 (92,79%) dari 2.262 jumlah total guru SD	Masih terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi : ➢ Tahun 2021 1. SD : 163 Guru 2. SMP : 35 ➢ Tahun 2022 1. SD : 134 Guru 2. SMP : 29 Guru

No	Urusan	Data	Permasalahan
		• Untuk SMP adalah sebanyak 35 orang (2,29%) dimana yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan sebanyak 1.494 (97,71%) dari 1.529 Jumlah Total Guru SMP 2022 : • untuk SD adalah sebanyak 134 orang (5,03%) dimana yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan adalah sebanyak 2.530(94,97%) dari 2.664 jumlah total guru SD • Untuk SMP adalah sebanyak 29 orang (0,01%) dimana yang telah memenuhi kualifikasi pendidikan sebanyak 2.266 (98,74%) dari 2.295 Jumlah Total Guru SMP Tahun 2023 : Guru memenuhi kualifikasi S1/D4 : • Paud : sebanyak 699 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-4 dari total guru Paud sebanyak 801 Guru dengan capaian 87,27% orang (87,80%) • SD : sebanyak 2.124 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-4 dari total guru SD sebanyak 2.419 Guru dengan capaian 87,80% • SMP : sebanyak 1.150 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-4 dari total guru SMP sebanyak 1.219 Guru dengan capaian 94,34%	Masih terdapat tenaga pendidik yang belum memenuhi kualifikasi : ➢ Tahun 2023 3. Paud : 102 Guru 4. SD : 295 Guru 5. SMP : 69 Guru

No	Urusan	Data	Permasalahan
		Jumlah sekolah terakreditasi (SD): 2021: • SD akreditasi A sejumlah 68 sekolah, Akreditasi B sejumlah 85 sekolah dan akreditasi C sejumlah 13 Sekolah dari total SD 170 Satuan Pendidik 2022: • SD akreditasi A sejumlah 65 sekolah, Akreditasi B sejumlah 89 sekolah dan akreditasi C sejumlah 12 Sekolah dari total SD 175 Satuan Pendidik 2023 : • SD akreditasi A sejumlah 66 sekolah, Akreditasi B sejumlah 89 sekolah dan akreditasi C sejumlah 12 Sekolah dari total keseluruhan akreditasi 167 Satuan Pendidik 2023: • Paud Akreditasi A sejumlah 37 Sekolah, Akreditasi B sejumlah 78, Akreditasi C sejumlah 25 sekolah dengan total keseluruhan akreditasi 140 Satuan Pendidik **Jumlah sekolah terakreditasi (SMP):** 2020 : • SMP akreditasi A sejumlah 21 sekolah, B sejumlah 19	Masih terdapat sekolah yang terakreditasi standar (C) Tahun 2020 : 1. SD : Sekolah 2. SMP : 5 Sekolah Tahun 2021: 1. SD : 13 Sekolah 2. SMP : 4 Sekolah Tahun 2022 : 1. SD : 12 Sekolah 2. SMP : 5 Sekolah Tahun 2023 : 3. Paud : 25 Sekolah 4. SD : 12 Sekolah 5. SMP : 6 Sekolah

No	Urusan	Data	Permasalahan
		sekolah, dan C sejumlah 5 sekolah. 2021 : • SMP akreditasi A sejumlah 21 sekolah, Akreditasi B sejumlah 19 sekolah dan akreditasi C sejumlah 4 Sekolah dari total SMP 48 Satuan Pendidik 2022: • SMP akreditasi A sejumlah 20 sekolah, Akreditasi B sejumlah 16 sekolah dan akreditasi C sejumlah 5 Sekolah dari total SMP 52 Satuan Pendidik 2023: • SMP akreditasi A sejumlah 24 sekolah, Akreditasi B sejumlah 18 sekolah dan akreditasi C sejumlah 6 Sekolah dari total kesleuruhan akreditasi 48 Satuan Pendidik	
		Jumlah kerusakan SMP Pasca Bencana yang sudah terlaksana yang dianggarkan melalui Dana DAK, PUPR, BPBD,Kemedikbud, Sumber Dana NGO,(Wahana Visi Indonesia,PMI/Turki, UNDP, YSTC, Islamic Development, Yayasan Plan dan Kabupaten Sragen), yaitu: Tahun 2022: 1. SMP : Dana PUPR : SMP 4	Kerusakan sarana dan prasarana pendidikan pasca bencana atau yang belum teranggarkan : 1. SMP : 3 Sekolah yaitu SMP 10 (akan dilaksanakan

No	Urusan	Data	Permasalahan
		Dana UNDP : SMP 14 (sementara masih proses pengerjaan) Dana DAK : 1. SMP 21 (rehab Lab.Ipa) 2. SMP Alkhairat 1 (Rehab Lab. Ipa) SMP 17 (Rehab lab ipa,ruang guru, ruang perpustakaan, jamban) Tahun 2023 : 1. SMP : • Melalui Dana DAK Rehab 3 sekolah yaitu SMP 18 (Rehab Lab.Ipa), SMP 7 (Rehab Lab. Ipa) dan SMP 2 (rehab Perpustakaan) 2. SD : • Melalui PUPR yang prosesnya masih sementara dilaksanakan terkait rekonstruksi (Bongkar bangun ulang) : 1. SDN Balaroa 2. SD Inpres Balaroa 3. SD inpres Perumnas 4. SD Inpres Kecil salena 5. SD Inpres Donggala Kodi 6. SD Inpres 3 Birobuli 7. SD Inpres 2 Kawatuna	oleh BPBD tetapi tidak keseluruhan atau 1 sekolah hanya 4 ruang), SMP 18 (rencananya akan dibangun 2 ruang kelas) dan SMP 14 (gedung aula yang belum dianggarkan) Rencana Tahun 2024 melalui Dana BPBD akan dianggarkan untum SMP 18 dan SMP 10 2. SD : Sekolah • Tahun 2021 melalui UNDP (belum selesai untuk pengerjaanya karna sempat putus kontrak): SDN Pengawu, SDN 21,SDN 14 dan SD Advent
		• APM Pendidikan Dasar Tahun 2019: - SD : 92,86% - SMP : 76,88% - PAUD : 19,95%	APM 2019 ke 2020 dan 2021 ke Tahun 2022 untuk SD dan SMP mengalami penurunan dimana Pada

No	Urusan	Data	Permasalahan
		• Angka Putus Sekolah Tahun 2019 : - SD : 18 % - SMP : 12% • APM Pendidikan Dasar Tahun 2020 : - SD : 80,40% - SMP : 64,16% - PAUD : % • Angka Putus Sekolah Tahun 2020 - SD : 21 Orang - SMP : 10 Orang • APM Pendidikan Dasar Tahun 2021 : - SD : 89,40 % - SMP : 91,01 % - PAUD : 62,48 % • Angka Putus Sekolah Tahun 2021 : - SD : 10 Orang - SMP : 25 Orang • APM Pendidikan Dasar Tahun 2022 : - SD : 87,81% - SMP : 76,14% - PAUD : 63,66 % • Angka Putus Sekolah Tahun 2022 : - SD : 0 Orang - SMP : 0 Orang • Angka Putus Sekolah Tahun 2023 : - SD : 0,00 % - SMP : 0.00%	Tahun 2020 APM untuk SD sebesar (12,46%) dan SMP sebesar (12,72%), di Tahun 2022 untuk SD (1,59%) dan SMP (14,87%) hal ini di karenakan sesuai juknis Permendikbud nomor 51 Tahun 2018 di pasal 7 ayat (3) dan Juknis Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB dimana di pasal 4 terkait sekolah wajib menerima Peserta Didik yang berusia 7 Tahun dengan pengecualian syarat usia paling rendah 5 Tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli Tahun berjalan dengan persyaratan yang memiliki kecerdasan, bakat istimewa dan kesiapan psykiis. APK Paud: Pada Tahun 2023 APK Paud sebesar 69,49% dengan

No	Urusan	Data	Permasalahan
		2023 : APM Pendidikan Tahun 2023: - PAUD 55,36% - SD : 91,18% - SMP : 87.85% APK Pendidikan Tahun 2023 - PAUD : 69,49% - SD : 97,74% - SMP : 102,82% APS Pendidikan tahun 2023 - Paud : 68,68% - SD/MI/Paket A : 96,94% - SMP/MTS/Paket B : 104.00% - Keseteraan : 100%	Jumlah siswa sebesar 10.032 dan jumlah penduduk 14.437 . Tahun 2022 APK Paud sebesar 70,42% dengan jumlah siswa sebanyak 8.207 dan jumlah penduduk sebesar 13.136 penurunan ini disebabkan bertambahnya jumlah siswa sebesar 1.825 dan jumlah penduduk 1.301 di Tahun 2023. Jika menganalisa Data BPS terkait APK Paud Tahun 2023 menurut Provinsi untuk Sulawesi Tengah persentasenya 36,95%, APK tertinggi di Provinsi DI Yogyakarta sebesar 63,06& dan terendah di Papua dengan persentase 11,94% sedangkan Rata-rata persentase seluruh Indonesia adalah 36,36%
2	**Kesehatan**	2020 : Jumlah dokter umum : 20 Dokter gigi : 6	Ketersediaan dokter spesialis

No	Urusan	Data	Permasalahan
		dokter spesialis : 39 2021 : Jumlah dokter umum : 17 Dokter gigi : 6 Dokter Spesialis : 42 2022 : Jumlah dokter umum : 16 Dokter gigi : 6 Dokter spesialis : 40 2023 : Jumlah dokter umum : 16 Dokter gigi : 7 Dokter Spesialis : 40 (Berdasarkan hasil analisa kebutuhan, kekurangan dokter spesialis sebanyak 40 orang, dokter umum 30 orang)	RSUD Anutapura Kota Palu
		2020 : Jumlah Puskesmas terakreditasi Dasar :4, Madya : 8, tidak terakreditasi : 2 Tahun 2021 : belum ada Puskesmas yang re akreditasi Tahun 2022 : belum ada Puskesmas yang re akreditasi Status akreditasi : 1. PKM Pantoloan (Madya) 2. PKM Tawaeli (Madya) 3. PKM Mamboro (Madya) 4. PKM Talise (Dasar) 5. PKM Singgani (Dasar) 6. PKM Kawatuna (Madya) 7. PKM Birobuli (Dasar)	Peningkatan akreditasi puskesmas Tahun 2021 dan 2022 belum ada Puskesmas yang re akreditasi karena menunggu perubahan PMK dari 9 bab ke 5 bab... rencana survey tahun 2023 dengan sasaran 14 Puskesmas

No	Urusan	Data	Permasalahan
		8. PKM Bulili (Dasar) 9. PKM Mabelopura (dasar) 10. PKM Sangurara (madya) 11. PKM Tipo (madya) 12. PKM Kamonji (dasar) 13. PKM Lere (belum survey) 14. PKM Nosarara (belum survey) 2023 : Jumlah Puskesmas Terakreditasi Utama :2, Paripurna : 12 Status akreditasi : 1. PKM Pantoloan (Paripurna) 2. PKM Tawaeli (Paripurna) 3. PKM Mamboro (Paripurna) 4. PKM Talise (Paripurna) 5. PKM Singgani (Paripurna) 6. PKM Kawatuna (Paripurna) 7. PKM Birobuli (Paripurna) 8. PKM Bulili (Paripurna) 9. PKM Mabelopura (Paripurna) 10. PKM Sangurara (Paripurna) 11. PKM Tipo (Paripurna) 12. PKM Kamonji (Paripurna) 13. PKM Lere (Utama) 14. PKM Nosarara (Utama)	Tahun 2023 , sebanyak 12 Puskesmas sdh terakreditasi paripurna, 2 puskesmas (lere dan nosarara masih terakreditasi utama
		2019 : Prevalensi wasting Kota Palu : 12% Sulteng : 9,6% 2021 : Prevalensi wasting Kota Palu : 3,95 % Sulteng : 9,4 % 2022 : Prevalensi wasting Kota Palu : 3,29 %	Prevalensi wasting (kurus) pada anak balita

No	Urusan	Data	Permasalahan
		2023 : Prevalensi wasting Kota Palu : 4,32 % Sulteng : 5,9 %	Jumlah balita yang diukur /Sasarannya bertambah
3	**Pekerjaan Umum**	2020 : Panjang drainase :1703,116 km Kondisi baik : 903,6 km Kondisi sedang : 78,2 km Kondisi Rusak Ringan : 101,91 km Kondisi Rusak Berat : 237,79 Km 2021 : Panjang drainase : 1703,116 km Kondisi baik : 833,24 km Kondisi sedang : 156,83 km Kondisi Rusak Ringan : 88,16 km Kondisi Rusak Berat : 624,88 Km 2022 : Panjang drainase : 1703,116 Km Kondisi baik : 764,92 Km Kondisi sedang : 216,63 Km Kondisi Rusak Ringan : 89,65 km Kondisi Rusak Berat : 631,92 Km 2023 : Panjang drainase : 1920,22 Km Kondisi baik : 708,02 Km Kondisi sedang : 260,63 Km Kondisi Rusak Ringan : 164,86 Km Kondisi Rusak Berat : 786,71 Km	Sistem drainase perkotaan belum berfungsi optimal Sistem drainase perkotaan belum semua terbangun Sistem drainase perkotaan belum berfungsi optimal
		2020 : PDAM Donggala kapasitas terpasang 185,62 l/dt Kapasitas produksi 154,42 l/dt Sambungan rumah 14527 Tingkat layanan 19,55% PDAM Palu	Akses layanan air bersih perkotaan belum optimal.

No	Urusan	Data	Permasalahan
		kapasitas terpasang 60 l/dt Kapasitas produksi 47 l/dt Sambungan rumah 7123 Tingkat layanan 9,6% **2022 :** **PDAM Donggala** Kapasitas Terpasang 110 l/d Kapasitas Produksi 110 l/dt Sambungan Rumah 11306 SR Tingkat Layanan 55,11 % PDAM Palu Kapasitas Terpasang 60 l/dt Kapasitas Produksi 36,13 l/dt Sambungan Rumah 10265 SR Tingkat Layanan 34,85 % **2023 :** PDAM Donggala Kapasitas Terpasang 110 l/d Kapasitas Produksi 110 l/dt Sambungan Rumah 14.644SR Tingkat Layanan 55,11 % PDAM Palu Kapasitas Terpasang 60 l/dt Kapasitas Produksi 36,13 l/dt Sambungan Rumah 9.023 SR Tingkat Layanan 34,85 **2020:** Target 100% air bersih perpipaan, capaiannya 29,15% **2021:** Target Air Bersih 80,43 % Capaian 114,38 % **2022:** Target Air Bersih 95,31 % Capaian 97,09 % **2023:** Target Air Bersih 95.71 %	Kapasitas produksi berkurang terhadap kapasitas terpasang karena terjadinya kecoboran jaringan perpipaan

No	Urusan	Data	Permasalahan
		Capaian 97,97 %	
		2020 : Rasio panjang jalan : 2,248 % (capaian : 65,91%) 2021 : Rasio Panjang Jalan : 2.282 % Capaian : 70.66 % 2022 : Rasio Panjang Jalan : 2.246 % Capaian : 102.72 % 2023 : Rasio Panjang Jalan : 2.513 % Capaian : 102,08 %	Belum optimalnya rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk
4	**Perumahan dan Kawasan Permukiman**	2020: Rumah tangga kumuh : 11.725 KK Luasan kawasan kumuh : 335,63 Ha 2021: Rumah tangga kumuh : 9.814 KK Luasan kawasan kumuh : 202,76 Ha 2023: Rumah tangga kumuh : 9.771 KK Luasan kawasan kumuh : 108.93 Ha	Tingginya persentase rumah tangga kumuh perkotaan. (kelompok penduduk 40% terbawah)
		2019 : Rumah tidak layak huni : 11,4% (8.316 rumah) 2021 : Rumah tidak layak huni : 1,59% (1.177 rumah)	Belum optimalnya proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian

No	Urusan	Data	Permasalahan
		2022 : Rumah tidak layak huni : 1,73% (1.284 rumah) 2023 : Rumah tidak layak huni : 1,77% (1.290 rumah)	yang layak dan terjangkau.
5	**Penataan ruang dan pertanahan**	2020 : Target RTH 30% dari luas wilayah Kota Palu, capaiannya 18,48% 2021 : Target RTH 30% dari luas wilayah Kota Palu, capaiannya 32,83% Target RTH Publik 20% dari luas kawasan Perkotaan, capaiannya 9,56% 2022 : Target RTH 30% dari luas wilayah Kota Palu, capaiannya 32,83% Target RTH Publik 20% dari luas kawasan Perkotaan, capaiannya 9,56% 2023 : Target RTH 30% dari luas wilayah Kota Palu, capaiannya 32,83% Target RTH Publik 20% dari luas kawasan Perkotaan, capaiannya 9,56%	Cakupan persentase luas RTH dari luas wilayah kota belum terpenuhi
		2019 : Ketaatan terhadap RTRW :65,62% 2021 : Ketaatan terhadap RTRW :81,86%	Kurangnya ketaatan terhadap RTRW (%)

No	Urusan	Data	Permasalahan
		2022 : Ketaatan terhadap RTRW :96,15 2023 Ketaatan terhadap RTRW :95,48%	Terjadi indikasi simpangan terhadap pemanfaatan ruang
		2020 : Aset daerah yang sudah tersertifikasi : 62,42% 2021 : Aset daerah yang sudah tersertifikasi : 68,88 % 2022 : Aset daerah yang sudah tersertifikasi : 71,06 % 2023 : Aset daerah yang sudah tersertifikasi : 71,06 %	Belum optimalnya sertifikasi pertanahan aset daerah Sebagian besar Aset Pemda Kota Palu belum memiliki alas hak (Sertifikat Tanah) sehingga rawan terjadi kasus akuisi oleh masyarakat
6	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat (Satpol PP, BPBD, Damkar)**	Satpol PP: Tahun 2022: Jumlah Pol PP : 466 orang Jumlah Linmas : 108 orang 2023: Jumlah Pol PP : 363 Jumlah linmas : 97 Rasio jumlah Satpol PP di bagi 10.000 jumlah penduduk 3,68 Rasio Linmas 1,08 sedangkan target 2 org per kelurahan	Masih rendahnya ratio Linmas dan Pol PP terhadap jumlah penduduk Diperlukan Penguatan Peran Satpol PP dan Linmas melalui penataan kelembagaan yang profesional

No	Urusan	Data	Permasalahan
		BPBD : 2020 : Kerusakan bangunan : Rusak berat : 11.643 unit Sedang : 16.050 unit Ringan : 21.354 unit Hilang : 6.522 unit 2022 : • Huntap - Tondo 2 : 1.055 unit - Talise : 599 unit - Mandiri : 308 unit - Petobo : 648 unit - Lere : 39 unit 2023: • Huntap - Tondo 2 : 961unit - Talise : 599 + 94 unit - Panau : 53 unit - Petobo : 655 unit - Lere : 39 unit	Belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi hunian pasca bencana Belum optimalnya pelaporan data pemohon huntap hingga penyediaannya melalui bank dunia Komitmen penghuni yang tidak sesuai perjanjian Huntap Tondo2 dari 961 yang terbangun 855 sisa 106 unit (on progres) - Huntap Talise sisa 94 unit (on progres) - Huntap Talise sisa 94 unit (on progres) - Huntap Petobo sisa 7 unit (on progres)

No	Urusan	Data	Permasalahan
		Damkar: 2020 : Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palu : 75,94 % Respon Time Rate : 60% 2021: Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palu : 75,94 % Respon Time Rate : 65,63% 2022 : Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palu : 75,94 % Respon Time Rate : 53,84% 2023 : Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kota Palu : 75,94 % Respon Time Rate : 182,31%	- Huntap Panau sisa 27 unit (on progres) Belum terbangunnya sistem pencegahan kebakaran Wilayah Managemen Kebakaran Belum dapat ditentukan karena Kota Palu belum memiliki Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK)
7	**Sosial**	Tahun 2020 : Jumlah data terpadu kesejahteraan sosial : 19.848 jiwa Jumlah penduduk miskin : 26.731 jiwa Tahun 2021 : Jumlah data terpadu kesejahteraan sosial : 17.192 jiwa Jumlah penduduk miskin : 154.991 Jiwa Tahun 2022 : Jumlah data terpadu kesejahteraan sosial : 152.608 jiwa Jumlah penduduk miskin : Jiwa18.947 kpm Tahun 2023 :	Belum optimalnya program pemberdayaan dan penanganan kemiskinan di perkotaan Belum optimalnya program pemberdayaan di karenakan belum adanya penetapan BNBA DTKS terbaru dari Kementrian Sosial RI

No	Urusan	Data	Permasalahan
		Jumlah data terpadu kesejahteraan sosial : 146.664 jiwa Jumlah penduduk miskin : Jiwa 17.989 kpm	
		Tahun 2020 : Penduduk korban penyalahgunaan NAPZA : 50 jiwa Tahun 2021 : Penduduk korban penyalahgunaan NAPZA : 6 jiwa Tahun 2022 : Penduduk korban penyalahgunaan NAPZA : 16 jiwa Tahun 2023 : Penduduk korban penyalahgunaan NAPZA : 16 jiwa	Pembinaan penyalahgunaan Napza sudah melakukan Kerjasama dgn Balai rehabilitasi sentra Pangurangi (Takalar) dan Balai rehabilitasi BNN Tanahmerah (Samarinda)
		Tahun 2020 : Orang dengan HIV/AIDS : 112 jiwa Tahun 2021 : Orang dengan HIV/AIDS : 8 jiwa Tahun 2022 : Orang dengan HIV/AIDS : 20 jiwa Tahun 2023 : Orang dengan HIV/AIDS : 13 jiwa	Belum optimalnya penanganan penderita ODHA
		Tahun 2020 : Orang dengan gangguan jiwa : 51 jiwa Tahun 2021 : Orang dengan gangguan jiwa : 24 jiwa	Belum optimalnya penanganan ODGJ (sudah dilakukan Kerjasama dgn RS Madani)

No	Urusan	Data	Permasalahan
		Tahun 2022 : Orang dengan gangguan jiwa : 34 jiwa Tahun 2023 : Orang dengan gangguan jiwa : 37 jiwa	
		Tahun 2020 : Penyandang tuna netra : 113 jiwa Penyandang tuna rungu : 35 jiwa Penyandang tuna wicara : 72 jiwa Penyandang tuna rungu wicara 34 jiwa Penyandang tuna grahita : 128 jiwa Penyandang tuna daksa : 155 jiwa Penyandang cacat ganda : 151 jiwa	Belum optimalnya pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar kepada tuna netra, rungu, wicara, rungu wicara, grahita, daksa dan cacat ganda
		Tahun 2021 : Penyandang tuna netra : 55 jiwa Penyandang tuna rungu : 40 jiwa Penyandang tuna wicara : 1 jiwa Penyandang tuna rungu wicara1 jiwa Penyandang tuna grahita : 3 jiwa Penyandang tuna daksa : 102 jiwa Penyandang cacat ganda : 1 jiwa Tahun 2022 : Penyandang tuna netra : 140 jiwa Penyandang tuna rungu : 103 jiwa Penyandang tuna wicara : 79 jiwa Penyandang tuna rungu wicara 39 jiwa Penyandang tuna grahita : 2 jiwa Penyandang tuna daksa : 343 jiwa Penyandang cacat ganda :1 jiwa Tahun 2023 :	

No	Urusan	Data	Permasalahan
		Penyandang tuna netra : 141 jiwa Penyandang tuna rungu : 103 jiwa Penyandang tuna wicara : 79 jiwa Penyandang tuna rungu wicara 39 jiwa Penyandang tuna grahita : 2 jiwa Penyandang tuna daksa : 329 jiwa Penyandang cacat ganda : 1 jiwa	
		Tahun 2020 : Gelandangan dan pengemis : 59 jiwa Anak jalanan : 12 jiwa Anak terlantar : 0 kasus Lansia terlantar : 25 jiwa Disabilitas terlantar : 2 kasus Orang terlantar : 8 jiwa Mantan narapidana : 0 kasus Tuna susila : 186 jiwa Bayi terlantar : 0 kasus Tahun 2021 : Gelandangan dan pengemis : 122 jiwa	Belum optimalnya pembinaan pemberian layanan rehabilitasi sosial dasar kepada gelandang dan pengemis serta anak jalanan
		Anak jalanan : 21 jiwa Anak terlantar : 4 kasus Lansia terlantar : 122 jiwa Disabilitas terlantar : 184 kasus Orang terlantar : 0 jiwa Mantan narapidana : 0 kasus Tuna susila : 187 jiwa Bayi terlantar : 1 kasus	

No	Urusan	Data	Permasalahan
		Tahun 2022 : Gelandangan 0 dan pengemis : 150 jiwa Anak jalanan : 21 jiwa Anak terlantar : 4 kasus Lansia terlantar : 122 jiwa Disabilitas terlantar : 100 kasus Orang terlantar : 0 jiwa Mantan narapidana : 0 kasus Tuna susila : 0 jiwa Bayi terlantar : 1 kasus Tahun 2023 : Gelandangan 18 dan pengemis : 18 jiwa Anak jalanan : 0 jiwa Anak terlantar : 7 kasus Lansia terlantar : 258 jiwa Disabilitas terlantar : 137 kasus Orang terlantar : 0 jiwa Mantan narapidana : 0 kasus Tuna susila : 0 jiwa Bayi terlantar : 5 kasus	

2) Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kota Palu

Permasalahan daerah yang berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdapat di Kota Palu dijabarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.134
Permasalahan Kota Palu Berhubungan Dengan
Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

No.	Urusan	Data	Permasalahan
1	**Tenaga Kerja**	Tingkat pengganguran terbuka kota palu	Banyaknya pengangguran dan kurangnya tenaga profesional

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		Tahun 2018 : 5,81%, Tahun 2019 : 6,32% Tahun 2020 : 8,38% Tahun 2022 : 3.67 % Tahun 2023 : 3,49 % Tingkat pengganguran terbuka kota palu tahun 2023, adalah 3,49 %, Turun 0,18 di banding tahun 2022	
2	**Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**	2017 : 92 kasus 2018 : 79 kasus 2019 : 85 kasus 2020 : 70 kasus 2021 : 103 kasus 2022 : 78 kasus 2023 : 72 kasu	Masih terjadi Kekerasan terhadap perempuan
		2014-2019 : 5 orang 2019-2024 : 4 orang Standar 30% dari 35 kursi DPRD Kota Palu	Rendahnya keterwakilan perempuan dalam parlemen
		2017 : 35 kasus 2018 : 33 kasus 2019 : 59 kasus 2020 : 63 kasus 2021 : 33 kasus 2022 : 45 kasus 2023 : 65 kasus	Tingginya tingkat kekerasan terhadap anak
		2017 : 35 kasus 2018 : 32 kasus 2019 : 30 kasus 2020 : 20 kasus 2021 : 32 kasus 2022 : 25 kasus	Masih tingginya anak yang berhadapan dengan hukum

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		2023 : 24 kasus	
		2020 : Jumlah pernikahan dini : 179 2021 : Perempuan : 14 Laki – laki : 1 2022 : Perempuan : 20 Laki-laki : 5	Masih tingginya angka pernikahan dini
3	**Pangan**	Nilai skor Pola Pangan Harapan : Tahun 2018 : 82.80 % Tahun 2019 : 90,40 % Tahun 2020 : 80,60 % Tahun 2021 : 79, 20 % Tahun 2022 : 80.03 % Tahun 2023 : 82.00 %	Belum optimalnya peningkatan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Nilai skor nasional 100 %
		Capaian rata-rata konsumsi energy (Kkal/kapita/hari) Tahun 2018 : 1.959,8 Tahun 2019 : 2.067,8 Tahun 2020 : 2.093,7 Tahun 2021 : 2.041,5 Tahun 2022 : 1.860,8	Belum optimalnya konsumsi energi penduduk per kapita per hari.

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		Tahun 2023 : 2. 022,0 Rata-rata konsumsi protein (gram/kapita/hari) Tahun 2018 : 59.7 Tahun 2019 : 66.3 Tahun 2020 : 64.6 Tahun 2021 : 60.4 Tahun 2022 : 58.8 Tahun 2023 : 61.0	
4	**Lingkungan Hidup dan kehutanan**	Persentase sampah yang tertangani : Tahun 2018 : sebesar 37,18% Tahun 2021 : Sebesar 85.59 % Tahun 2022 : Sebesar 44.38%	Pengelolaan persampahan Kota belum optimal
		Terdapat 44 unit RTH dengan Luas 51,899 KM^2 pada tahun 2018 Tahun 2022 : Luas RTH 2.53% 9,98 KM^2 2023 : Target RTH 30% dari luas wilayah Kota Palu, capaiannya 32,83%	Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum Terpenuhi

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		Target RTH Publik 20% dari luas kawasan Perkotaan, capaiannya 9,56%	
5	**Kependudukan dan catatan sipil**	Tahun 2019 : Masih terdapat 1.334 yang belum memiliki E-KTP Tahun 2022 : Kepemilikan KTP : 99,50% (Jumlah penduduk yang memiliki KTP 264.910 : Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau sudah pernah menikah 266.263) Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk : 65,51% (Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran 245.535 : jumlah penduduk 374.779) Tahun 2023 : Masih terdapat 1.342 yang belum memiliki E-KTP Tahun 2023 : Kepemilikan KTP : 100.04%	Masih terdapat Penduduk Belum memiliki identitas kependudukan Masih terdapat Penduduk Belum memiliki identitas kependudukan (Berdasarkan data Semester Satu, per Juni tahun 2023. Untuk semester

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		(Jumlah penduduk yang memiliki KTP 271.169 : Jumlah penduduk wajib KTP > 17 atau sudah pernah menikah 271.074) Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk : 95,68% (Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran 108.752 : jumlah penduduk (382.017)	dua masih sementara dalam pengolahan data dan akan rilis dibulan februari 2024)
		Tahun 2018 : Rasio anak (0-18 Tahun) yang ber Akte Kelahiran sebesar 30,1% Tahun 2023 : Rasio anak (0-18 Tahun) yang ber Akte Kelahiran sebesar 95,68%	Masih rendanya Rasio anak (0-18 Tahun) yang belum ber Akte kelahiran (Berdasarkan data Semester Satu, per Juni tahun 2023. Untuk semester dua masih sementara dalam pengolahan data dan akan rilis dibulan februari 2024)
6	**Pemberdayaan Masyarakat**	Tahun 2020 sebanyak 46 LPM Tahun 2023 sebanyak 46 LPM	LPM Belum berfungsi secara optimal

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		Tahun 2021: Presentase PKK Aktif sebesar 100%	PKK belum ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai
7	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	Tahun 2018: Rasio akseptor KB sebesar 79,68% Tahun 2021: Rasio akseptor KB sebesar 80,70% Tahun 2022: Rasio akseptor KB sebesar 41,8% Tahun 2023 : Rasio Akseptor KB sebesar 60,4 %	Masih terdapat pasangan usia subur yang belum menjadi akseptor KB jumlah menurun karena kurangnya penginputan pada Faskes, data diperoleh dari aplikasi new siga yang diinput masing-masing faskes
		2020 : Akseptor KB : 2.375 2021 : Akseptor KB : 49.746 2022 : Akseptor KB : 52.674 2023 : Akseptor KB : 32.758	Belum optimalnya pelayanan kontrasepsi Masih data sementara. Data thn 2023 blm semua terinput (aplikasi siga) masih dalam proses . Data update pada bulan april tahun 2024.
8	**Perhubungan**	2020 : Jumlah angkutan kota : 468	Belum optimalnya sistem transportasi Kota Palu

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		2021 : Jumlah angkutan kota : 64	
		2022 : Jumlah angkutan kota : 49 2023: Jumlah angkutan kota : 43	- Masih banyak angkutan kota yang belum terdata di Organda - Angkutan Kota beroperasi tidak sesuai Trayek yang ditetapkan. - Angkutan Kota tidak melaksanakan Uji Kir. - Angkutan kota yang berbadan hukum pada Tahun 2023 berjumlah 43 Unit.
		2018 : Jumlah titik parkir : 704	Belum optimalnya manajemen perpakiran di Kota Palu
		2021 : Jumlah titik parkir : 210	
		2022 : Jumlah titik parkir : 203 2023 Jumlah titik parkir : 136 titik	Masih lemahnya regulasi terkait pengelolaan parkir Hasil revisi regulasi terkait sanksi masih dalam tahap sosialisasi

No.	Urusan	Data	Permasalahan
9	**Komunikasi dan Informatika**	2019 : Jumlah OPD yang terintegrasi dalam sisteminformasi (Website) : 39 OPD 2023 : Jumlah OPD yang terintegrasi dalam sisteminformasi (Website) : 24 OPD,dan 46 kelurahan	Belum optimalnya pemanfaatan TIK dalam mencapai *Good Governance*
		2018 : Terdapat 44 unit RTH	Belum tersedianya untuk pemanfaatan TIK di Ruang Terbuka Hijau (Ruang Publik)
10	**Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**	Tahun 2018 Jumlah Koperasi Primer sebanyak 270 Buah dan dinyatakan tidak aktif sebanyak 100 Buah. Tahun 2022 Jumlah Koperasi Primer sebanyak 217 Buah dan dinyatakan tidak aktif sebanyak 129 Buah. Tahun 2023 Jumlah Koperasi Primer sebanyak 215 Buah dan dinyatakan tidak aktif sebanyak 134 Buah. Tahun 2023: Jumlah Koperasi :	Menurunnya status koperasi aktif Menurunnya status koperasi aktif karena ada beberapa koperasi yang pindah wilayah ke provinsi Sudah konfirmasi rapat anggota

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		219 koperasi yang tersebar di 8 kecamatan yang terdiri dari: a. Koperasi Aktif : 90 b. Koperasi kurang Aktif: 21 Kriteria : masih jalan usaha koperasi, namun tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan c. Koperasi tidak aktif: 30 koperasi Kreteria : 1. Tidak aktif kelembagaannya, usaha dan organisasi, namun masih ada keinginan pengurus dan anggota untuk mengaktifkan Kembali koperasinya. 2. Koperasi terkait kewajiban koperasi yang belum selesai (hutang piutang) dana bergulir dan LPDB d. Koperasi yang tidak aktif akan diusulkan pembubarannya (beku) : 78 Kriteria :	pembubaran namun tidak ada berita acara pembubaran Tidak adanya anggaran pembinaan dan penataan Lembaga usaha koperasi di wilayah kota Palu Tidak adanya Anggaran pembubaran koperasi bagi koperasi yang beku

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		1. Tidak aktif kelembagaannya, usaha dan organisasi 2. tidak ditemukan lagi pengurus, anggota dan alamat tempat kedudukan koperasi	
		2020 : Jumlah UMKM : 1.488 2021-2022 : Jumlah UMKM : 19.058 2023 : Jumlah UMKM : 32.833	UMKM Belum berkembang dengan baik.
11	**Penanaman Modal dan Perizinan**	2019 : Jumlah Investor Berskala dan Nasional (PMDN/PMA) : 45 Jumlah Investor : PMA 25 investor, PMDN 276 investor (data rilis kemen investasi /BKPM s/d TW 3 tahun 2022) 2023 :	1. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM 2. Belum optimalnya system informasi dan data penunjang pelayanan 3. Belum optimalnya data dan peta potensi investasi Kota Palu 4. Kurangnya kesadaran investor memenuhi kewajiban untuk mentaati peraturan

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		Jumlah Investor Berskala dan Nasional (PMDN/PMA) : 576	perundang-undangan yang berlaku
12	**Pemuda dan Olah Raga**	Jumlah organisasi pemuda sebanyak 378 organisasi di Tahun 2018 Jumlah organisasi pemuda sebanyak 386 organisasi di Tahun 2021 – 2022 Tahun 2023 : Jumlah organisasi pemuda sebanyak 356 organisasi di Tahun 2023	Belum optimalnya pembinaan terhadap organisasi pemuda dalam peningkatan peran pemuda di masyarakat
		Jumlah organisasi olahraga Tahun 2019 sebanyak 205 organisasi. Organisasi yang melakukan pembinaan sebanyak 62 organisasi atau sekitar 30% dari jumlah organisasi yang ada. Jumlah organisasi olahraga Tahun 2023 sebanyak 35	Belum optimalnya pembinaan yang di lakukan oleh organisasi olahraga dalam menciptakan atlet berprestasi

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		organisasi. Organisasi yang melakukan pembinaan sebanyak 35 organisasi .	
		Tahun 2020 – 2022 : Lapangan Voly sebanyak 70 unit. Lapangan Basket sebanyak 14 unit. Lapangan Tenis sebanyak 15 unit. Lapangan futsal sebanyak 33 unit. Stadion Sepak Bola sebanyak 2 unit. Stadion Atletik 1 unit. Lapangan Bulu tangkis sebanyak 37 unit. Gedung olahraga sebanyak 3 unit. Rumah Biliar sebanyak 12 unit. Lapangan olahraga terbuka sebanyak 6 unit.	Sarana dan prasarana olahraga masih sangat terbatas
13	**Statistik**	Persentase keterisian data : 75%	Belum optimal keterisian data OPD
14	**Persandian**	Kategori pemilahan kerahasiaan dokumen negara : cukup	Belum optimalnya tugas dan fungsi kelembagaan persandian

No.	Urusan	Data	Permasalahan
15	**Perpustakaan**	Jumlah perpustakaan di Kota Palu Tahun 2019 : Sebanyak 60 unit Tahun 2020 : Sebanyak 72 unit Tahun 2021: Sebanyak 72 unit Tahun 2022: Sebanyak 318 unit Tahun 2023: Sebanyak 318 unit (Diperoleh dari pendataan perpustakaan untuk wilayah kota Palu)	Rendahnya minat baca dan koleksi bahan pustaka
16	**Kearsipan**	Jumlah pengelola arsip : Tahun 2020: Sebanyak 13 Orang (13 OPD) Tahun 2020 -2021: Sebanyak 41 orang (41 OPD) Tahun 2022 : Sebanyak 123 orang (terdiri dari 1 opd 3 orang) Tahun 2023 : Sebanyak 123 orang (terdiri dari 1 opd 3 orang)	Masih terbatasnya SDM ahli dan trampil di bidang kearsipan.

No.	Urusan	Data	Permasalahan
		Sebanyak 9 orang (hanya di bidang kearsipan) Jumlah arsip statis : 2020 - 2021 Jumlah arsip=1400 terdiri dari 17 eksemplar,1380 lembar ,3 dokumen Tahun 2022 : Jumlah arsip =1458 terdiri dari 1451 lembar, 2 dokumen, 5 buku Tahun 2023 : Jumlah arsip = 582 terdiri dari 57 dokumen, 16 eksemplar, 3 buku Jumlah arsip dinamis Tahun 2023 Arsip Aktif = 8.140 Arsip In Aktif = 5.981 total jumlah Arsip =14.121.	

3) Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Pilihan Pemerintah Kota Palu.

Permasalahan pembangunan daerah terkait urusan pilihan Pemerintah Kota Palu teridentifikasi sebagai berikut.

Tabel 2.135
Permasalahan Kota Palu
Berkaitan Urusan Pemerintahan Pilihan

No.	Bidang	Data	Permasalahan
1	**Perikanan dan Kelautan**	Luas kawasan perikanan (Ha) : Tahun 2021 : 20,00 Tahun 2022 : 20,00 Tahun 2023 : 20,00 Produksi perikanan budidaya (ton) : Tahun 2021 : 146 Tahun 2022 : 123 Tahun 2023 : 127,73 Produksi perikanan tangkap (ton) : Tahun 2021 : 1.123 Tahun 2022 : 1.759 Tahun 2023 : 1.885 Jumlah Pembudidaya Ikan (orang): Tahun 2021 : 587 Tahun 2022 : 536 Tahun 2023 : 536 Jumlah Rumah Tangga Nelayan (KK) : Tahun 2021 : 1.257 Tahun 2022 : 1.443 Tahun 2023 : 1.421	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pada budidaya perikanan.
		Jumlah Balai Benih Ikan UPTD tersedia 1 unit	Belum optimalnya fungsi UPTD Balai Benih Ikan (BBI) untuk mensuplai kebutuhan benih ikan air tawar

No.	Bidang	Data	Permasalahan
2	**Kebudayaan dan Pariwisata**	Jumlah kunjungan wisata : Tahun 2019 Wisnus : 120.593 Wisman : 444 Total :121.037 Tahun 2020 Wisnus : 158.361 Wisman : 225 Total : 158.586 Tahun 2021 Wisnus : 116.134 Wisman : 3.166 Total : 119.300 Tahun 2022 Wisnus : 178.643 Wisman : 202 Total : 178.845 Tahun 2023 Wisnus : 362.483 Wisman : 2.514 Total : 364.997	Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata/agrowisata
		PP No.50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2011 - 2025	Sudah tersedia Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kota Palu (RIPARKOT), namun belum dimanfaatkan secara maksimal
	Kebudayaan	Masih kurangnya SDM pelaku kebudayaan yang terlatih.	Peningkatan *Skill* pelaku kebudayaan Hal-hal yang perlu dilakukan : 1. Perlu adanya diskusi budaya

No.	Bidang	Data	Permasalahan
			2. Perlu adanya Bimbingan teknis kepada Staf terkait DAPOBUD 3. Adanya ruang ruang ekspresi kepada Senima, Budaywan dan sejarawan 4. Memfasilitasi Pegawai bidang Kebudayaan untuk mengikuti kopetensi Pamong 5. Belum adanya Tim Ahli Warisan Budaya 6. Perlu Sosialisasi Undang Undang Pemajuan Kebudayaan No. 5 Tahun 2017 dan Undang Undang Cagar Budaya No 11 Tahun 2010. 7. Adanya sebuah Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah dan Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya. 8. Harus ada Pemutahiran Data Kebudayaan 9. Belum adanya Tim Penyusun Pemutakhiran Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) 10. Belum adanya bimbingan teknis

No.	Bidang	Data	Permasalahan
			Juru Pelihara Cagar Budaya 11. Belum adanya bimbingan teknis Penetapan Warisan Budaya Kota Palu
		Tahun 2023 : 1. Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi) Dipelihara = 4 Terkait jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah a. makam Pue Njidi, b. Makam Pue Mpoloku /Mantikulore, c. Makam Datokarama dan Banua oge Cagar budaya yang terdata adalah makam Pue Njidi, Makam Pue Mpoloku/Mantikulore, Makam Datokarama dan Banua oge. Dipublikasi = 9 + 4 = 13 2.Perlindungan Cagar Budaya Kota Palu (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran sebanyak 4 Cagar budaya	Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya bahwa penetapan cagar budaya adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). TACB di Kota Palu sudah ditetapkan berdasarkan SK Wali Kota Palu Nomor 420/1188/Dikbud/2022 tetapi belum dilakukan penelitian dan pengkajian secara ilmiah dan untuk penetapannya menjadi cagarbudaya belum ditetapkan secara resmi oleh tim ahli cagar budaya di karenakan keterbatasan penganggaran di Tahun 2023 sehingga tindaklanjutnya akan

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		3.Pengembangan cagar budaya kota palu (penelitian,revitalisasi,adaptasi) sebanyak 3 pengembangan cagar budaya kota palu 4. Penyelenggaraan festival seni dan budaya Target :10 Realisasi : 10 Capaian : 100% 5. Benda, Situs dan kawasan Cagar budaya yang dilestarikan Target :15 Realisasi :15 Capaian : 100% 6. Jumlah karya budaya yang di Revitalisasi dan Inventarisasi Target :6 Realisasi :6 Capaian: 100% 7. Jumlah cagar budaya yang di kelola secara terpadu Target :6 Realisasi :4 Capaian : 67% 8.Terlestarinya Cagar Budaya Target :75 Realisasi :75 Capaian: 100%	dilaksanakan di Tahun 2024

No.	Bidang	Data	Permasalahan
3	**Pertanian**	Luas Kawasan Perkebunan (Ha): Tahun 2021 : 134,00 Tahun 2022 : 958,50 Tahun 2023 : 958,50 Luas Kawasan Pertanian (sawah,tegalan) (Ha): Tahun 2021 : 397 Tahun 2022 : 1.221,5 Tahun 2023 : 1.221,5 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Kota Palu (Ton) Tahun 2022 : Padi : 45,74 Jagung : 48,90 Kacang tanah : 9,17 Ubi Kayu : 184,16 Ubi Jalar : 0,00 Jumlah Produksi Tanaman Pangan Kota Palu (Ton) Tahun 2023 : Padi : 45,20 Jagung : 46,50 Kacang tanah : 15,70 Ubi Kayu : 260,70 Ubi Jalar : 127,08	Belum Optimalnya penyediaan dan pengelolaan pertanian perkotaan (Agrowisata).
4	**Energi dan Sumber Daya Mineral**	Jumlah izin dan produksi sumber daya mineral	Belum optimalnya koordinasi dan singkronisasi penanganan terhadap dampak lingkungan
5	**Perdagangan dan Perindustrian**	2022 : Jumlah Pasar Harian sebanyak 5 pasar Jumlah Pasar Mingguan sebanyak 4 pasar.	Pasar silae tidak beroperasi sejak 28 september 2018, karena terkena dampak tsunami /bangunan rusak

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		2019 : Persentase retribusi pasar Tahun 2019 adalah 86%. 2022: Persentase retribusi jasa usaha (retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan) 75 % 2023: 1. Persentase retribusi jasa umum pelayanan pasar mencapai 97,9 % 2. Pengelolaan pasar Manonda penarikan sewa tempat usaha ruko masih dilaksanakan pihak PT. Sari Dewi.	Belum optimal pengelolaan retribusi pasar Disebabkan karena belum optimal pengelolaan retribusi pasar, bea retribusi harian Rp. 3.000 baru diberlakukan bulan mei , perubahan kenaikan harga sewa tempat diberlakukan di bulan juni 2022 1. Persentase retribusi belum tercapai 100 %, disebabkan antara lain : a. Pasar Tematik Talise yang telah terbangun sebagai pasar unggas/burung belum terisi, hal ini masyarakat sekitar dan pedagang lebih menginginkan perdagangan sembako,masih adanya pedagang diluar wilayah pasar yang berdagang. b. Pasar Tavanjuka untuk sarananya berdasarkan potensinya belum terisi semuanya, kemudian ditambah dengan tunggakan

No.	Bidang	Data	Permasalahan
			atau piutang dari pedagang pasar. c. Pasar Bambaru untuk lantai 1 pedagang yang eksis sekarang Sebagian masih memiliki piutang 2. Terkait Pengelolaan pasar Manonda ,Langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Palu adalah telah mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI. 3. Revitalisasi Pasar berbasis segmentasi / pasar Tematik untuk tahun 2024 belum dilaksanakan (anggaran belum tersedia)
		Jumlah IKM yang masuk dalam kelurahan Inovasi sejumlah 33 IKM. Kontribusi sektor industry terhadap PDRB (%) ADHB : Tahun 2021 : 6.49% Tahun 2022 : 6.31%	Belum optimalnya penanganan sektor industri khususnya IKM dibidang SDM, produksi dan pemasaran.

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		Tahun 2023 : Jumlah IKM yang terdata pada Bidang Industri sejumlah : 1.616	Bentuk Pembinaan dan Pengawasan terhadap IKM belum optimal Alasannya : - Berdasarkan Permenperin No. 25 Tahun 2021 Pasal 17, Segala bentuk pengawasan harus terintegritas dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), maka hal ini yang menjadi salah satu penyebab bentuk pengawasan belum berjalan optimal pada tahun 2023 karena Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) baru mulai di perkenalkan pada dinas dan IKM Kota Palu Pada tahun 2023. - Alokasi Dana Pembinaan dan Pengawasan terhadap IKM masih terbatas. - Keterbatasan Jumlah SDM yang berada pada bidang industry (hanya terdapat 1 Kepala Bidang, 1 Penyuluh Perindag, 2 staf ASN dan 8 PHL. Sementara jumlah industri yang ada di Kota Palu yang terdata 1616). - Beberapa IKM berpindah lokasi dan No kontak yang tercatat pada dinas sudah tidak aktif

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		Pengenalan Penggunaan Aplikasi Sistim Informasi Industri Nasional (SIINas) terhadap Pelaku Usaha	Sosialisasi terkait SIINas terhadap Pelaku Usaha Industri belum Optimal Alasannya : - Sistim Informasi Industri Nasional (SIINas) Baru di perkenalkan pada tahun 2023 - Alokasi anggaran terkait Sosialisasi SIINas tahun 2023 belum ada karena himbauan terkait pentingnya SIINas dan pelaksanaan sosialisasi baru ada di bulan maret 2023 - Operator SIINas di bidang Industri Dinas, masih belum sepenuhnya menguasai Sistem SIINas karena belum pernah mendapatkan pelatihan teknis terkait fitur-fitur SIINas dan verifikasi teknisnya
		Pengenalan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terhadap Pelaku Usaha	Sosialisasi terkait TKDN terhadap Pelaku Usaha Industri belum Optimal Alasannya : - Pentingnya TKDN baru diperkenalkan pada tahun 2023

No.	Bidang	Data	Permasalahan
			- Alokasi anggaran terkait Sosialisasi TKDN tahun 2023 belum ada karena himbauan terkait pentingnya TKDN dan pelaksanaan sosialisasi baru ada di bulan maret 2023 - Tenaga operator di bidang Industri Dinas, masih belum sepenuhnya menguasai prosedur pendaftaran TKDN
		Penetapan Perda Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Palu 2023-2043	Implementasi dokumen rencana pembangunan industri Kota Palu belum berjalan optimal Alasannya : - Dokumen perencanaan pembangunan industri Kota Palu baru disahkan menjadi peraturan daerah pada akhir TW 2 tahun 2023 - Masih menunggu peraturan walikota untuk menindaklanjuti Perda RPIK tersebut
		Laporan Audit Kinerja KEK (Diisi Oleh Tim Teknis)	Belum optimalnya manajemen dan kewirausahaan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

4) Identifikasi Permasalahan Pembangunan Daerah Terkait Urusan Penunjang Pemerintah Kota Palu

Urusan penunjang berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berikut beberapa permasalahanberkaitan urusan penunjang Pemerintah Kota Palu dengan sebagai berikut.

Tabel 2.136
Permasalahan Kota Palu
Berkaitan Urusan Pemerintahan Penunjang

No.	Bidang	Data	Permasalahan
1	**Perencanaan**	Jumlah program dalam RPJMD 2021-2026 sebanyak 229 program **Tahun 2023 :** Jumlah program dalam P-RKPD Tahun 2023 sejumlah 185 program. Jumlah program dalam penjabaran APBD sejumlah 185 program, dengan tingkat konsistensi : - Konsistensi program P-RKPD terhadap RPJMD sebesar 80.79% - Konsistensi program APBD terhadap P-RKPD sebesar 100.00% - Konsistensi program APBD terhadap RPJMD sebesar 80.79%	Belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan perencanaan.

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		Seluruh OPD se-Kota Palu kurang memiliki tenaga teknis dengan kualifikasi pendidikan khusus terkait pengelola data.	Belum tersedianya kompetensi SDM spesifik pengelola data Belum optimalnya penyediaan *updating* data sebagai basis perencanaan
2	**Keuangan**	Data Aset Daerah	Belum optimalnya pengelolaan *e_budgeting* 1. Sebagian besar OPD belum memahami kedudukannya dalam pengelolaan aset 2. Perencanaan BMD yang belum sesuai prosedur 3. Kurangnya SDM pengelola Barang Milik Daerah (BMD) 4. Masih simpang siurnya aplikasi (dari SIMDA ke SIPD) 5. Penerapan regulasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) belum maksimal dilakukan 6. Pemanfaatan penggunaan ,pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan BMD belum optimal 7. Belum optimalnya tata kelola asset daerah

No.	Bidang	Data	Permasalahan
	Pendapatan	Penerimaan Retribusi daerah kota palu, tahun 2019 hanya tercapai 62,64 persen, Kontribusi PAD tahun 2018 terhadap pendapatan daerah sebesar 19,09 persen.	Belum optimalnya kinerja pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu Belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi teknologi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah
		Penerimaan Retribusi daerah kota palu, tahun 2022 tercapai 115,30 persen, Kontribusi PAD tahun 2022 terhadap pendapatan daerah sebesar 15,59 persen	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang Mengelola Retibusi Daerah
		Penerimaan Retribusi Daerah Kota Palu Tahun 2023 Hanya Tercapai Sebesar 64,55%	Data Wajib Pajak Retribusi Daerah Belum Valid
		Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2023 Sebesar 24,22 %	Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola retribusi daerah Belum Optimalnya Infomasi Layanan Retribusi Daerah Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem Informasi Tekhnologi dalam Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

No.	Bidang	Data	Permasalahan
	Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Jumlah Pegawai yang mendapat bantuan biaya Pendidikan : Tahun 2015 : 12 Orang Tahun 2016 : 69 Orang Tahun 2017 : 68 Orang Tahun 2018 : 77 Orang Tahun 2019 : 78 Orang Tahun 2020 : 3 Orang Tahun 2021 : 0 Orang Tahun 2022 : 7 Orang Tahun 2023 : 7 orang Persentase PNS yang telah mengikuti diklat structural dan fungsional : Tahun 2015 : 0.48% Tahun 2016 : 0.55% Tahun 2017 : 5.52% Tahun 2018 : PKN TK. II : 33% PKA : 5,6% Prajabatan : 100% Tahun 2019 : - PKN TK II : 46,3% - PKA : 8,4% Tahun 2020 : - PKN TK II : 33,3% - PKA : 6,6% Tahun 2021 : - PKN TKT II : 50% - PKA : 5,1% - Latsar : 100%	Relatif Kecilnya Proporsi Pendanaan untuk Pendidikan Aparatur Sipil Daerah Masih Timpangnya Proporsi Sumberdaya Aparatur Daerah yang Telah Mengikuti Bimbingan Teknis dan Non Teknis Rendahnya Proporsi Jumlah Pegawai yang Bekerja Sesuai Kompetensi

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		- Pelatihan Barang dan Jasa Tingkat Dasar : 34 Orang - BPIP : 100% Tahun 2022 : - PKN TK II : 5 Orang - PKA : 22 Orang - Pelatihan Barang dan Jasa Lanjutan : 74% - BPIP Lanjutan : 38 Tahun 2023 : - PKN TK II : 3 Orang - PKA : 18 Orang - PKP : 30 Orang Bimtek penyusunan Naskah Kebijakan Bagi Analis Kebijakan :100%	
	Penelitian dan Pengembangan	Perwali no. 32 tahun 2017 Kualitas Riset (Litbangjirap) masih rendah Belum ada Pusat Kolaborasi Riset Daerah	Belum tersedianya Rencana Induk Riset Daerah Kota Palu Belum optimalnya kompetensi SDM bidang penelitian Belum terbentuknya Dewan Riset Daerah Kota Palu

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		Tahun 2022 : Inovasi yang terdaftar di kementerian dalam negeri sejumlah 11 inovasi yang diampuh oleh 5 OPD	Masih rendahnya proporsi jumlah inovasi yang dilakukan oleh OPD yang memenuhi syarat untuk menjadi inovasi daerah
		Tahun 2023 : Inovasi yang terdaftar di kementerian dalam negeri sejumlah 13 inovasi yang diampuh oleh 5 OPD	Masih rendahnya proporsi jumlah inovasi yang diterapkan oleh OPD yang memenuhi syarat untuk menjadi inovasi daerah
	Pemerintahan Umum	Penghargaan yang diterima pemerintah Kota Palu : Tahun 2018: 8 penghargaan Tahun 2019 : 8 penghargaan Tahun 2023 : 10 penghargaan	Masih rendahnya jumlah penghargaan yang diterima oleh pemerintah sebagai wujud apresiasi pencapaian kinerja pembangunan
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2019 : - Kota Palu 90,31 poin (hijau) - Pendidikan dasar 81,52 poin (baik) - Puskesmas 78,35 poin (baik) - RSUD Anutapura 75,64 poin (baik) - Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu 82,56 (baik)	Belum optimalnya capaian standar indeks kepuasan masyarakat

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 78,30 poin(baik) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2022 - Kota Palu (kriteria hijau) 2023 Puskesmas : 81,03 point (kriteria baik) RSUD Anutapura : 77,78 point (kriteria baik 2024 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu : 99,78 point (kriteria sangat baik) 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil : 80,42 point (kriteria baik)	
	Inspektorat	Realisasi Level Kapabilitas APIP thn 2019 : Level 2 (penuh)	Belum optimalnya dampak hasil pemeriksaan APIP terhadap kinerja perangkat daerah Sudah tercapai sesuai target

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		Realisasi Level Kapabilitas APIP thn 2023 : Level 3	
		Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tahun 2020 : 46 % Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti tahun 2023 : - BPK RI : 1039 (77,71%) - APIP : 44 (18,11%)	Belum efektifnya Sistem Pengendalian Internal OPD dalam upaya preventif setiap temuan Lambatnya proses tindak lanjut oleh OPD
		Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP / Pejabat fungsional) thn 2020 : Auditor : 22 orang Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) : 10 orang 2022 : Auditor : 33 orang Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) : 14 Jumlah Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP / Pejabat fungsional) thn 2023 : Auditor : - Madya : 3 - Muda : 13 - Pertama : 14 - Pelaksana : 1	Masih kurangnya SDM APIP

No.	Bidang	Data	Permasalahan
		Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) : - Madya : 5 - Muda : 9 - Pertama : 1	
		Jumlah anggaran Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat tahun 2022 : Rp. 1,678,233,900 Jumlah hasil pemeriksaan inspektorat daerah kota palu tahun 2020 : 29 OPD Jumlah anggaran Penyelenggaraan Pengawasan Inspektorat tahun 2023 : Rp. 2.432.219.478,- Jumlah hasil pemeriksaan inspektorat daerah kota palu tahun 2023 : 41 OPD	Belum proporsional jumlah anggaran dengan kinerja APIP Jumlah anggaran belum memenuhi amanah Permendagri No. 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, menyebutkan Anggaran Pengawasan Daerah Kab/Kota sebesar 0,75% dari Total belanja daerah.
	Kesbangpol	Data kelembagaan masyarakat dan ormas : 2020 : 253 2021 : 245 2022 : 245 2023 : 252	- Belum optimalnya peran kelembagaan masyarakat untuk antisipasi dini berbagai konflik SARA dan penyebaran paham radikalisme - Belum optimalnya monitoring terhadap aktivitas dan keberadaan ormas



BAB 3

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi makro Kota Palu merupakan evaluasi dan proyeksi mengenai: (1) pendapatan per kapita yang mengukur daya beli masyarakat, (2) pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan produktivitas sektor-sektor dalam perekonomian, (3) struktur ekonomi yang menjelaskan kontribusi masing-masing sektor ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), serta(4) perkembangan inflasi untuk menjelaskan bias kenaikan harga bagi pertumbuhan ekonomi. Selain empat indikator ekonomi tersebut, juga akan disertakan indikator-indikator lain sebagai penunjang dalam menyusun kerangka ekonomi makro daerah.

Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, lebih tepatnya pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, perlu diperhatikan bahwa hasil proyeksi tersebut lebih berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana-rencana pembangunan ekonomi, daripada sebagai suatu target kinerja yang harus dicapai.

Sistem perekonomian senantiasa melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat. Sejalan dengan semangat partisipasi dalam pembangunan, maka pemerintah kota berupaya menarik minat investasi pelaku usaha di Kota Palu, antara lain melalui penciptaan peluang-peluang usaha di berbagai sektor ekonomi. Serangkaian kebijakan ekonomi yang dijabarkan melalui program/kegiatan

pembangunan, diharapkan memperoleh apresiasi positif dari pelaku usaha yang ditandai dengan meningkatnya investasi daerah, sebagai salah satu indikator membaiknya kinerja ekonomi daerah.

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2022 dan Tahun 2023

a. Struktur Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Palu pada Tahun 2023 meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di sebagian besar lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Palu atas dasar harga konstan 2010 pada Tahun 2023 berada pada level 17,94 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 17,09 triliun rupiah pada Tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama Tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 4,96 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh kategori Pertambangan dan Penggalian sebesar 17,98 persen. Pada Tahun 2023, semua kategori mengalami pertumbuhan positif. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara agregat. Pertumbuhan PDRB per lapangan usaha Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Pertumbuhan PDRB per Lapangan Usaha Tahun 2023

No	Lapangan Usaha	ADHK	ADHB
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	1,87	7,90
2	Pertambangan dan Penggalian	17,98	22,46
3	Industri Pengolahan	1,81	2,19
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,09	9,04
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,61	3,64
6	Konstruksi	1,68	5,72
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,10	10,08
8	Transportasi dan Pergudangan	9,08	16,73
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,19	11,24
10	Informasi dan Komunikasi	5,82	5,72
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	4,77
12	Real Estate	7,47	14,38
13	Jasa Perusahaan	5,77	10,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,78	3,77
15	Jasa Pendidikan	4,82	6,06
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,09	10,04
17	Jasa lainnya	6,15	8,57

Sumber : Berita Resmi Statistik Tahun 2023

Percepatan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2023 didorong oleh beberapa kategori yang menjadi penggerak sumber pertumbuhan. Tiga kategori yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi, yaitu Pertambangan dan Penggalian, Informasi dan Komunikasi, serta Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, masing-masing sebesar 1,11 persen, 0,72 persen, dan 0,65 persen. Sedangkan di Tahun 2022, tiga kategori yang menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, serta Informasi dan Komunikasi, masing-masing sebesar 0,94 persen, 0,93 persen, dan 0,57 persen. Terlihat bahwa

selama kurun waktu dua tahun terakhir kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Informasi dan Komunikasi masih menjadi penggerak ekonomi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi di Kota Palu. Data time series PDRB Kota Palu ADHK dan ADHB Tahun 2019 hingga 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2
PDRB Kota Palu Atas Dasar Harga Konstan dan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023
(Jutaan Rupiah)

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	670.096	659.801	665.490	683.940	696.740
		973.764	974.147	1.001.660	1.102.810	1.189.890
2	Pertambangan dan Penggalian	1.166.936	923.844	990.320	1.050.940	1.239.910
		1.808.869	1.472.082	1.587.270	1.821.290	2.230.430
3	Industri Pengolahan	1.149.779	1.131.203	1.168.590	1.207.260	1.229.130
		1.571.544	1.588.989	1.695.980	1.795.790	1.835.130
4	Pengadaan Listrik dan Gas	31.424	31.750	33.380	36.660	39.260
		31.276	31.852	33.820	37.720	41.130
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	49.004	48.565	50.920	52.590	53.960
		68.152	71.860	77.290	82.400	85.400
6	Konstruksi	2.735.278	2.655.143	2.780.650	2.839.830	2.887.560
		4.665.252	4.692.048	5.045.060	5.169.760	5.465.270
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.590.899	1.473.641	1.675.810	1.828.390	1.939.850
		2.485.642	2.344.665	2.732.330	3.193.090	3.515.100
8	Transportasi dan Pergudangan	1.420.453	914.367	990.820	1.144.110	1.247.960
		2.407.804	1.556.080	1.717.230	2.247.610	2.623.740
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	148.315	127.796	148.080	163.720	178.760
		237.578	208.652	248.750	277.390	308.580
10	Informasi dan Komunikasi	1.755.683	1.915.374	2.016.540	2.109.970	2.232.830
		2.288.772	2.465.361	2.584.280	2.728.530	2.884.510
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	897.408	962.382	1.054.560	1.052.300	1.081.610
		1.299.037	1.390.908	1.552.980	1.664.180	1.743.560
12	Real Estate	387.980	389.356	402.680	433.470	465.860
		568.689	576.888	616.330	678.660	776.230
13	Jasa Perusahaan	188.654	182.865	187.890	199.100	210.590
		279.259	275.318	288.150	315.620	347.170
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.138.074	2.169.956	2.273.120	2.301.380	2.342.270
		3.447.844	3.563.721	3.796.790	4.014.430	4.165.930
15	Jasa Pendidikan	1.201.432	1.174.433	1.196.090	1.207.980	1.266.260
		1.929.051	1.909.814	1.978.530	2.052.200	2.176.520

No	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	514.517	552.662	591.510	613.040	650.390
		751.762	822.901	937.300	1.010.370	1.111.850
17	Jasa lainnya	156.358	154.339	159.140	168.120	178.460
		232.077	230.605	242.230	262.300	284.770
PDRB	**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**	**16.202.288**	**15.467.476**	**16.385.590**	**17.092.800**	**17.941.400**
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	**25.046.371**	**24.175.890**	**26.135.980**	**28.454.150**	**30.785.210**

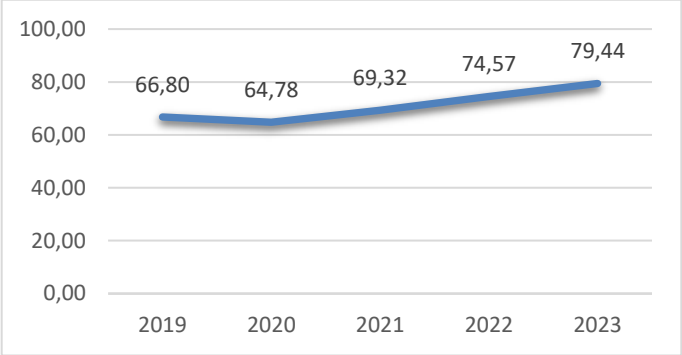
Sumber : Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Keterangan : Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

b. Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Palu atas dasar harga berlaku sejak Tahun 2019 hingga 2023 senantiasa mengalami kenaikan. Pada Tahun 2019 PDRB per kapita tercatat sebesar 63,96 juta rupiah. Angka tersebut terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2023 mencapai 79,45 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi. Perkembangan PDRB perkapita Kota Palu Tahun 2019-2023 secara terinci dapat dilihat pada Gambar 3.2 di bawah ini :



Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Gambar 3.1
PDRB Perkapita Kota Palu Tahun 2019 – 2023
(dalam juta Rupiah)

c. Laju Inflasi

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023, secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan pada Desember 2023 terjadi inflasi y-on-y sebesar 1,87 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,78 pada Desember 2022 menjadi 117,94 pada Desember 2023. Tingkat inflasi m-to-m sebesar 0,13 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 114,86 pada November 2023 menjadi 117,94 pada Desember 2023. Sedangkan hingga Desember 2023 tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,87 persen. Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi y-on-y (Desember 2023 terhadap Desember 2022) antara lain: beras (1,03 persen); cabai rawit (0,43 persen); rokok kretek filter (0,20 persen); kontrak rumah (0,19 persen); tarif parkir (0,12 persen); cabai merah (0,09 persen); rokok putih (0,08 persen); emas perhiasan (0,08 persen); sepeda motor (0,07 persen); serta buku tulis bergaris (0,06 persen).

Sementara itu, beberapa komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y (Desember 2023 terhadap

Desember 2022) antara lain: ikan selar/ikan tude (0,39 persen); bahan bakar rumah tangga (0,18 persen); ikan cakalang/sisik (0,12 persen); angkutan udara (0,12 persen); bawang merah (0,12 persen); pepaya (0,09 persen); kangkung (0,05); handbody lotion (0,04 persen); ikan bandeng/ikan bolu (0,04 persen); serta semen (0,04 persen). Secara lengkap inflasi Kota Palu dan Indonesia Tahun 2019 – 2023 ditunjukkan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.3
Rata-rata Pertumbuhan Inflasi Kota Palu (%)
Tahun 2019-2023

Inflasi	Tahun					Rata-rata Pertumbuhan
	2019	2020	2021	2022	2023	
Kota Palu	2,3	1,81	2,14	5,81	1,87	2,79
Indonesia	2,72	1,68	1,87	5,51	2,61	2,88

Sumber: Kota Palu Dalam Angka Tahun 2024

Beberapa komoditas yang memiliki andil terhadap inflasi Desember 2023 antara lain: cabai rawit (0,25 persen); ikan selar/ikan tude (0,13 persen); bawang merah (0,03 persen); angkutan udara (0,03 persen); emas perhiasan (0,02 persen); wortel (0,02 persen); cabai merah (0,02 persen); jagung manis (0,01 persen); tomat (0,01 persen); serta ayam goreng (0,01 persen).

Sementara itu, beberapa komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi Desember 2023 antara lain: ikan cakalang/ikan sisik (0,11 persen); beras (0,04 persen); pepaya (0,04 persen); ikan ekor kuning (0,04 persen); ikan teri (0,03 persen); bayam (0,03 persen); bahan bakar rumah tangga (0,03 persen); ikan bandeng/ikan bolu (0,02 persen); kangkung (0,02 persen); serta ikan asin teri (0,02 persen). Inflasi Kota Palu Menurut Kelompok

Pengeluaran Tahun 2023 diuraikan dalam Tabel 3.3 sebagai berikut:

Tabel 3.4
Inflasi Kota Palu Menurut Kelokpok Pengeluaran
Tahun 2023 (dalam %)

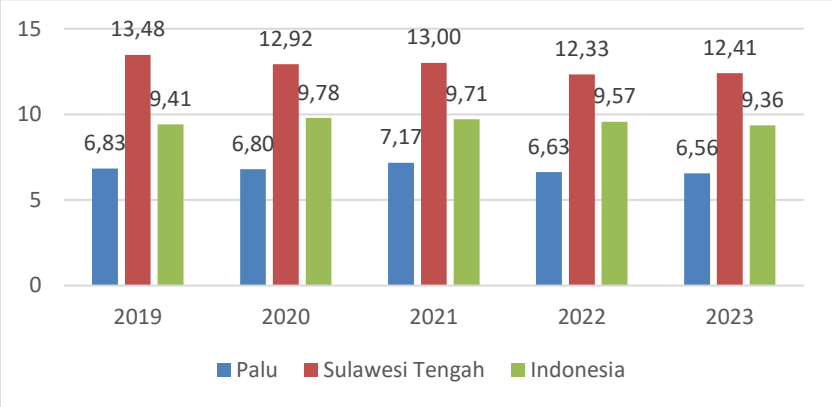
No.	Sumber Inflasi	Tahun
		2023
	Umum	1,87
1	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau	5,45
2	Pakaian dan Alas Kaki	-0,34
3	Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0,16
4	Perlengkapan, Peralatan, dan pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	1,94
5	Kesehatan	0,04
6	Transportasi	0,48
7	Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	0,14
8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	4,05
9	Pendidikan	0,25
10	Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran	1,08
11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,21

Sumber : Berita Resmi Statistik 2024

d. Kemiskinan

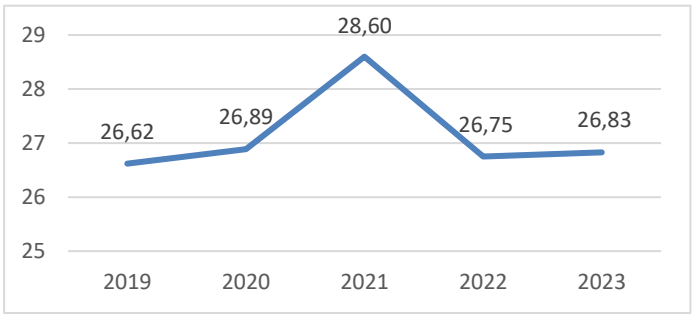
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik Sulawesi Tahun Tahun 2019 sebesar 26.731 jiwa dan terjadi penurunan pada tahun selanjutnya menjadi 26.890 jiwa, dengan persentase sebesar 6,80%. Berdasarkan survey Tahun 2021, kemiskinan Kota Palu kembali mengalami kenaikan 0,37% menjadi 28.600 jiwa. Tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Palu meningkat ditandai dengan penurunan jumlah masyarakat miskin berkisar 1.850 jiwa atau 6,63% ditahun 2022 kemudian tren penurunan berlanjut pada Tahun 2023 menjadi 6,56%Meskipun terjadi fluktuasi namun kemiskinan Kota Palu berada dibawah tingkat kemiskinan Provinsi

Sulawesi Tengah dan Nasional. Perbandingan tersebut dapat dilihat secara grafik dapat dilihat pada Gambar 3.3 di bawah ini :



Gambar 3.2
Tingkat Kemiskinan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah,
Dan Kota Palu Tahun 2019-2023

Selanjutnya, fluktuasi jumlah penduduk miskin Kota Palu Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat Gambar 3.4 di bawah ini :

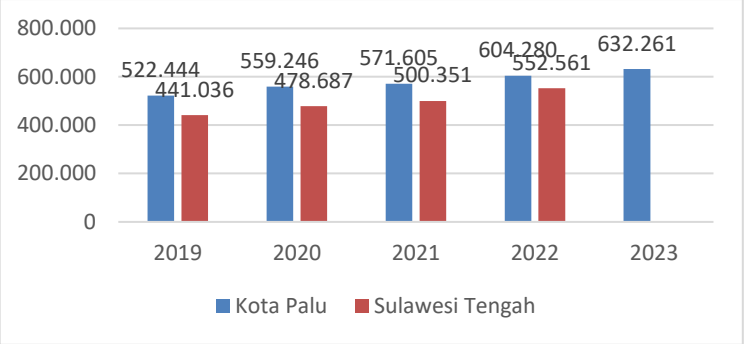


Gambar 3.3
Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2019-2023
(dalam ribu jiwa)

e. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum yang harus dikeluarkan baik dari aspek makanan yang disetarakan 2.100 kalori per jiwa per hari maupun pengeluaran non makanan. Sehingga ketika pendapatan di bawah garis kemiskinan yang

ditetapkan, maka dinyatakan masuk kategori miskin. Berdasarkan data statistik garis kemiskinan Kota Palu terus meningkat yang mana berbanding lurus dengan kenaikan harga untuk memenuhi kebutuhan kalori harian masyarakat dengan data perbandingan garis kemiskinan antara Kota Palu dan Sulawesi Tengah dari Tahun 2019-2023 dapat dilihat secara grafik pada Gambar 3.5 di bawah ini :



Gambar 3.4
Garis Kemiskinan Antara Kota Palu Dan Sulawesi Tengah
Tahun 2019-2023

Berdasarkan data perbandingan di atas, garis kemiskinan Kota Palu lebih tinggi dibandingkan dengan garis kemiskinan Provinsi Sulawesi Tengah.

f. Ketimpangan Pendapatan (*Gini Ratio*)

Peningkatan kesejahteraan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan setiap daerah. Koefisien Gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Jadi, Indeks Gini bernilai 0 artinya terjadi kemerataan sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Berdasarkan hasil perhitungan pemerataan pendapatan oleh Pemerintah Kota Palu, berikut ini perkembangan gini rasio di Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah :

Tabel 3.5
Gini Ratio Kota Palu Tahun 2019-2023

Gini Ratio	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Palu	0,304	0,304	0,308	0,355	0,324
Sulawesi Tengah	0,327	0,326	0,316	0,308	0,304

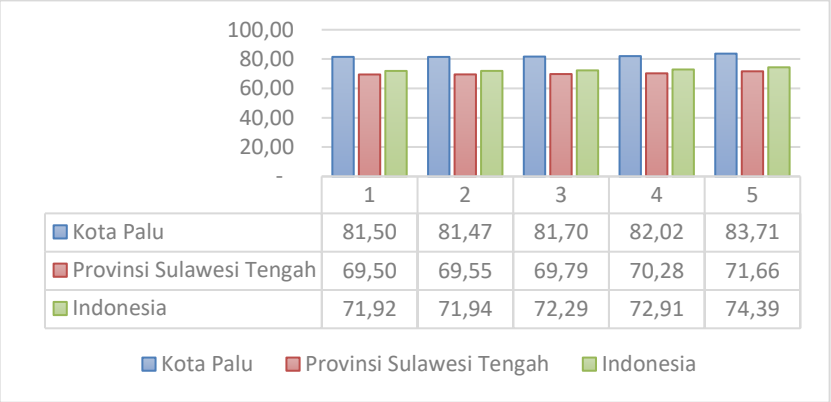
Sumber : BPS, 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa Kota Palu berada pada ketimpangan sedang karena memiliki koefisien gini di atas angka 0,3 dan di bawah 0,4, dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini perlu mendapat perhatian khusus karena pertumbuhan angka rasio gini yang cenderung meningkat di Kota Palu. Peningkatan kesejahteraan ekonomi akan dapat tercapai manakala meningkatnya PDRB dan PDRB perkapita perlu dibarengi dengan adanya pemerataan hasil-hasil pembangunan, yang indikator umumnya adalah menurunnya tingkat ketimpangan.

g. Indeks Pembangunan Manusia

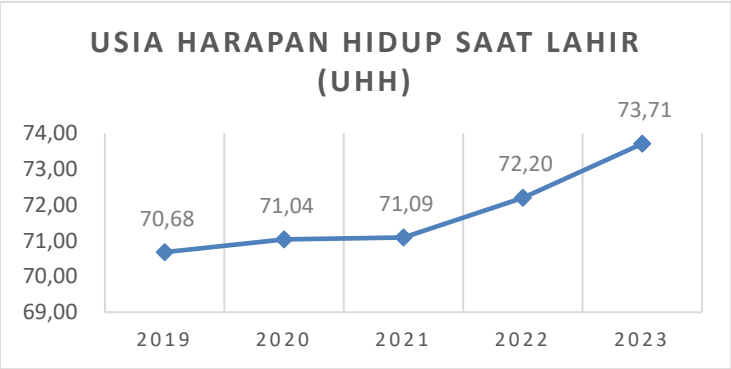
Capaian IPM Kota Palu pada Tahun 2019 sebesar 81,50. Walaupun terkoreksi menjadi 81,47 ditahun 2020 namun tren peningkatan IPM berlanjut pada Tahun 2021 dengan capaian 81,70 serta 82,02 untuk Tahun 2022 dan 83,71 pada Tahun 2023. Peningkatan nunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Palu dari tahun ke tahun semakin baik bahkan disaat Kota Palu diterpa bencana alam pada Tahun 2018 dan bencana non alam pada Tahun 2019 hingga saat ini, peningkatan IPM berhasil

terjaga. Capaian IPM tersebut, menempatkan Kota Palu di peringkat 1 IPM di Provinsi Sulawesi Tengah. Kondisi peningkatan yang sama juga terjadi pada tingkat nasional dan provinsi, Tahun 2023 dengan capaian Nasional 74,39 dan Provinsi Sulawesi Tengah 71,66. Perbandingan antara IPM Nasional, Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada Gambar 3.6 di bawah ini :



Gambar 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Indonesia,
Sulawesi Tengah, dan Kota Palu Tahun 2019-2023

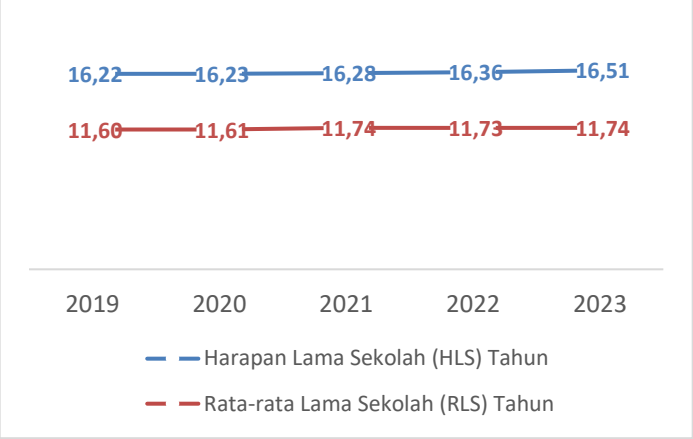
Terkait dengan komposit pembentuk IPM yang terdiri dari Usia Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan daya beli masyarakat dalam Pengeluaran Per Kapita yang secara grafik dapat dilihat dalam Gambar 3.7, Gambar 3.8, dan Gambar 3.9 :



Gambar 3.6
Usia Harapan Hidup
Kota Palu Tahun 2019-2023

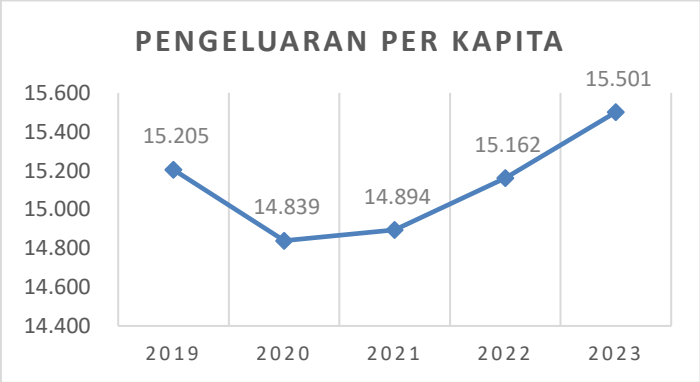
Tahun 2019 UHH Kota Palu 70,68 tahun dan terus mengalami kenaikan hingga Tahun 2023 menjadi 73,71 Tahun.

Selanjutnya, dimensi pendidikan menunjukkan adanya eskalasi positif baik rata-rata lama sekolah maupun harapan lama sekolah. Rata-rata lama sekolah Tahun 2019 menunjukkan 11,61 tahun terus mengalami kenaikan hingga 11,74 tahun di Tahun 2021, walaupun sempat terkoreksi menjadi 11,73 tahun ditahun 2022 namun bisa kembali pada 11,74 tahun pada Tahun 2023. Dengan demikian, rata-rata penduduk Kota Palu berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan hingga kelas XI. Selanjutnya harapan lama sekolah pada Tahun 2019 sebesar 16,20 tahun terus mengalami tren positif hingga pada Tahun 2023 sebesar 16,51 tahun.



Gambar 3.7
Dimensi Pendidikan

Dimensi standar hidup layak diukur dari pengeluran per kapita disesuaikan. Tahun 2019 rata-rata pengeluaran tahunan per jiwa penduduk Kota Palu sebesar Rp 15.205.000. Pertumbuhan tersebut terkoreksi saat pandemi Covid-19 sehingga di Tahun 2020 pengeluaran per kapita menjadi Rp 14.839.000 kemudian merangkak naik pada Tahun 2021 sebesar Rp 14.894.000 dan terus meningkat hingga Tahun 2023 menjadi sebesar Rp 15.501.000. peningkatan tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi Kota Palu.



Gambar 3.8
Dimensi Daya Beli Masyarakat

h. Tingkat Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Palu diuraikan pada Tabel 3.5 di bawah ini :

Tabel 3.6
Tingkat Pengangguran Terbuka

Uraian	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Palu	6,36	8,38	7,61	6,15	5,65
Sulawesi Tengah	3,54	3,77	3,75	3,00	2,95

Sumber : BRS Sulteng, 2023

Data TPT Kota Palu Tahun 2019 6,36% dan pasca bencana alam yang berlanjut dengan bencana non alam TPT meningkat 8,38% pada Tahun 2020 dan kondisi tersebut membaik menjadi 7,61% pada Tahun 2021 dan terus membaik menjadi masing-masing menjadi 6,15% dan 5,65% pada dua tahun selanjutnya. Angka tersebut masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Sulawesi Tengah, penyebabnya adalah Kota Palu sebagai pusat pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah yang mana lulusan SMA sederajat dari kabupaten lain berbondong-bondong melanjutkan pendidikan kejenjang perguruan tinggi yang ada di Kota Palu. Selanjutnya, sebagian besar lulusan perguruan tinggi tersebut enggan untuk kembali ke daerahnya. Alasan lain yakni bencana alam yang terjadi, sektor jasa yang merupakan salah satu tumpuan PDRB Kota Palu sangat terdampak dengan bencana tersebut yang telah merusak hotel, pusat perbelanjaan, dan pelayanan jasa-jasa lainnya. Selanjutnya bencana non alam melanda seluruh penjuru dunia, tak luput juga pada Kota Palu mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat penurunan aktivitas perkonomian di masyarakat.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kota Palu Tahun 2024 dan Tahun 2025

Proyeksi ekonomi Kota Palu untuk Tahun 2024 menunjukkan beberapa tren positif berdasarkan data yang tersedia. Pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada Tahun 2023 mencapai 4,96%, yang didorong oleh sektor-sektor seperti pertambangan dan penggalian serta pengeluaran konsumsi rumah tangga.

Untuk Tahun 2024, beberapa faktor utama yang kemungkinan besar akan mempengaruhi perekonomian Palu antara lain: (1) Pertumbuhan Sektor Konstruksi dan Pertambangan: Sektor konstruksi terus mendominasi struktur ekonomi Kota Palu, menyumbang 17,75% dari PDRB pada tahun 2023, sementara sektor pertambangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 17,98% pada tahun yang sama; (2) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga: Konsumsi rumah tangga tetap menjadi pendorong utama perekonomian, dengan kontribusi sebesar 58,83% pada Tahun 2023. Tren ini diperkirakan akan terus berlanjut, mengingat pentingnya konsumsi dalam ekonomi lokal; (3) Investasi dan Kebijakan Pemerintah: Peningkatan investasi di sektor-sektor utama dan kebijakan pemerintah yang mendukung pembangunan infrastruktur diharapkan akan memperkuat perekonomian Palu. Upaya pemerintah dalam pemulihan pasca-bencana juga berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan tren pertumbuhan saat ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi, ekonomi Kota Palu diproyeksikan akan terus tumbuh pada tahun 2024, didorong oleh sektor konstruksi, pertambangan, dan pengeluaran konsumsi rumah tangga yang kuat.

Untuk tahun 2025, Pemerintah Kota Palu melalui Musrenbang RKPD menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan peningkatan ketangguhan daerah. Fokus ini diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi melalui pembangunan yang lebih berkelanjutan dan resilient. Selain itu, pengembangan infrastruktur dan peningkatan layanan publik juga menjadi prioritas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Inflasi di Kota Palu diproyeksikan tetap terjaga dengan baik. Pada tahun 2024, inflasi year-on-year di Kota Palu tercatat sebesar 2,24%, yang menunjukkan stabilitas harga yang diharapkan terus berlanjut hingga 2025. Secara keseluruhan, dengan fondasi ekonomi yang kuat, fokus pada pembangunan berkelanjutan, dan pengendalian inflasi yang baik, ekonomi Kota Palu diproyeksikan terus tumbuh positif di tahun 2025, mendukung kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah yang lebih inklusif dan resilient. Perkiraan kondisi perekonomian Kota Palu Tahun 2023 dan proyeksi Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.6:

Tabel 3.7
Perkiraan Kondisi Ekonomian Kota Palu Tahun 2024 dan Proyeksi Tahun 2025

No	Lapangan Usaha	2024	2025
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perkebunan	680.099	710.494
		1.084.797	1.133.280
2	Pertambangan dan Penggalian	1.077.859	1.126.031
		1.719.248	1.796.086
3	Industri Pengolahan	1.152.439	1.203.944
		1.838.208	1.920.362
4	Pengadaan Listrik dan Gas	23.084	24.116
		36.821	38.466
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	53.271	55.652
		84.971	88.769
6	Konstruksi	3.427.129	3.580.296
		5.466.473	5.710.783
7		1.855.622	1.938.554

No	Lapangan Usaha	2024	2025
	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.959.826	3.092.108
8	Transportasi dan Pergudangan	1.166.644	1.218.785
		1.860.867	1.944.033
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	168.693	176.232
		269.075	281.101
10	Informasi dan Komunikasi	1.756.182	1.834.670
		2.801.213	2.926.407
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.054.774	1.101.915
		1.682.427	1.757.619
12	Real Estate	419.069	437.798
		668.439	698.313
13	Jasa Perusahaan	195.329	204.058
		311.561	325.485
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.580.113	2.695.425
		4.115.432	4.299.362
15	Jasa Pendidikan	1.344.216	1.404.292
		2.144.103	2.239.929
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	637.482	665.972
		1.016.821	1.062.265
17	Jasa lainnya	165.141	172.522
		263.410	275.183
PDRB	**Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**	**17.757.146**	**18.550.758**
	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	**28.323.692**	**29.589.551**

Sumber: RPJMD Kota Palu tahun 2021-2026

3.1.3. Perkembangan Ekonomi Global

Terdapat beberapa pandangan atas prospek perekonomian global pada Tahun 2024 namun tetap optimis. Pertama, diasumsikan Pertumbuhan Ekonomi Global Moderat, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global sebesar 3,1% pada Tahun 2024, konsisten dengan pertumbuhan yang terlihat pada Tahun 2023. Pertumbuhan ini diperkirakan akan sedikit disokong oleh percepatan di negara-negara maju dan perlambatan yang moderat di negara emerging market dan negara berkembang. Perekonomian negara maju diperkirakan akan tumbuh sebesar 1,7%, sementara negara

emerging market dan negara berkembang diperkirakan akan mengalami tingkat pertumbuhan sekitar 4,2%.

Selanjutnya penurunan inflasi global diperkirakan akan menurun dari 6,8% pada Tahun 2023 menjadi 5,9% pada Tahun 2024. Penurunan ini terutama didorong oleh negara-negara maju, yang diperkirakan akan mencapai target inflasi mereka lebih cepat dibandingkan negara-negara berkembang. Namun inflasi inti diperkirakan akan menurun secara bertahap.

Disisi lain, negara-negara Afrika diperkirakan akan mengalami pemulihan pertumbuhan, dengan pertumbuhan PDB meningkat hingga 3,5% pada tahun 2024, didorong oleh peningkatan konsumsi swasta dan investasi seiring dengan menurunnya inflasi, kemudian negara maju di Asia terus menjadi memimpin pertumbuhan, meskipun tantangan seperti gesekan struktural di pasar modal dan tenaga kerja dapat melemahkan kinerja ini. Sedangkan di negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara maju lainnya diperkirakan akan mengalami sedikit perbaikan pertumbuhan, didukung oleh inflasi yang lebih rendah dan kondisi keuangan yang lebih akomodatif.

Perekonomian global telah menunjukkan ketahanan yang mengejutkan meskipun bank sentral menaikkan suku bunga secara signifikan untuk memulihkan stabilitas harga. Ketahanan ini disebabkan oleh perubahan struktural di pasar seperti perumahan dan hipotek selama dekade terakhir, meski begitu risiko yang terus-menerus seperti ketegangan geopolitik, terutama di Timur Tengah, potensi perlambatan ekonomi di negara-negara besar seperti Tiongkok, dan tantangan terkait iklim terus menimbulkan ancaman terhadap prospek perekonomian global.

3.1.4. Perkembangan Perekonomian Indonesia

Proyeksi ekonomi Indonesia Tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan yang stabil namun menghadapi beberapa tantangan. Berikut adalah beberapa poin utama terkait perkembangan ekonomi Indonesia pada tahun tersebut:

1. Pertumbuhan Ekonomi

   Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai sekitar 5%. Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan sedikit menurun menjadi rata-rata 4,9% selama periode 2024-2026, terutama karena melemahnya harga komoditas yang sebelumnya mendorong ekonomi.

2. Faktor Pendorong

   Konsumsi swasta diperkirakan tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, bersama dengan peningkatan investasi bisnis dan belanja publik yang didorong oleh berbagai proyek pemerintah dan reformasi yang sedang berlangsung.

3. Inflasi

   Inflasi di Indonesia diperkirakan menurun menjadi sekitar 3,2% pada tahun 2024 dari rata-rata 3,7% pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan melemahnya harga komoditas dan pertumbuhan permintaan domestik yang kembali normal setelah pemulihan pasca pandemi.

4. Ekspor dan Sektor Pariwisata

   Ekspor jasa, khususnya sektor pariwisata, diperkirakan akan pulih dengan baik. Namun, ekspor barang mungkin menghadapi hambatan karena harga komoditas yang lebih rendah dan pertumbuhan global yang melemah

5. Risiko dan Tantangan

   Indonesia menghadapi beberapa risiko negatif, termasuk potensi kenaikan suku bunga global yang dapat membebani

permintaan global, meningkatkan biaya pinjaman, dan mengganggu rantai pasokan global. Ketidakpastian geopolitik juga dapat mempengaruhi perekonomian.

Secara umum, meskipun ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan dan proyeksi yang stabil untuk Tahun 2024, terdapat beberapa tantangan eksternal yang perlu diantisipasi untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

a. Proyeksi Kebijakan Makro Ekonomi Kota Palu Tahun 2025

Berdasarkan kondisi makro global, nasional, regional Sulawesi Tengah, dan Kota Palu ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Kota Palu pada Tahun 2025 adalah 5,0 – 5,12%. Laju inflasi kurang dari 2-35 – 3,0% . PDRB per kapita riil sebesar Rp 89 – 96,12 Juta dan penduduk miskin sebesar 6,43% dari penduduk Kota Palu, tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,74 – 5,50%, indeks pembangunan manusia sebesar 83,90, dan rasio gini diproyeksi 0,293 – 0,330.

b. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Kota Palu

Berdasarkan pada kondisi perekonomian global, nasional, dan Sulawesi Tengah tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa selain beberapa hambatan yang akan dihadapi, terdapat banyak peluang yang akan menjadi daya dorong bagi perekonomian Kota Palu dalam tahun mendatang. Ekspor impor Sulawesi Tengah yang selama ini lewat pelabuhan Pantoloan dan bandara Mutiara membuka berbagai peluang usaha di Kota Palu, demikian pula dengan investasi di Sulawesi Tengah, walaupun lokus investasi bukan di wilayah Palu, namun tingginya laju investasi memberikan banyak peluang berusaha di Kota Palu sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan usaha, ditambah lagi dengan telah ditetapkannya

Kawasan Ekonomi Khusus Palu. Berbagai peluang ini perlu untuk segera disikapi dengan cermat.

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi, sehingga kelompok rentan relatif memiliki ketahanan untuk menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dijalankan untuk melindungi, menjamin pelayanan dasar dan keberlangsungan usaha produktif kelompok rentan. Langkah-langkah pengamanan yang perlu dilakukan untuk meredam laju inflasi di daerah antara lain dengan menjamin ketersedian pasokan barang kebutuhan masyarakat serta dengan menjaga harga berbagai komoditas vital agar tetap stabil, terutama menghadapi *shock* musiman seperti bulan Juni sebagai tahun ajaran baru, bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha demikian juga dengan Natal, dan Tahun Baru.

Seiring dengan perkembangan kondisi tersebut di atas, maka kebijakan ekonomi daerah tetap diarahkan dan diupayakan dengan cara-cara: (1) meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (2) menekan laju inflasi, (3) mengatur laju pertumbuhan penduduk, (4). Pengurangan angka kemiskinan, (4). Menurunkan tingkat pengangguran, (5) Peningkatan PDRB per kapita riil, dan (6) Penurunan indeks gini ratio. Sebagai upaya agar pertumbuhan perekonomian daerah berjalan pada jalur yang benar perlu dijaga terciptanya kondisi keuangan yang mantap, yaitu dengan mengupayakan terciptanya pelaksanaan pembangunan yang aman secara politis dan layak secara ekonomis.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, APBD harus benar-benar dapat mencerminkan dan mampu menjawab tuntutan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan dalam upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa publik, seperti pendidikan, kesehatan, kebersihan, keamanan, ketertiban dan lain sebagainya dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Struktur APBD terdiri dari pendapatan, belanja daerah dan pembiayaan. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan dan kemampuan pendapatan daerah dan selaras dengan RPJMD, semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang maupun jasa dianggarkan secara tertib dalam APBD. Jumlah pendapatan dan belanja pemerintah yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur dan dapat dicapai sesuai target yang ditetapkan.

Kebijakan anggaran didasarkan pada pendekatan program prioritas dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Agenda pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024 Kota Palu sebagai pelaksanaan agenda di tahun ketiga dalam periode RPJMD Tahun 2021 – 2026 mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau *output, outcome, dan impact* dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah meliputi keseluruhan kegiatan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan

daerah. Pengelolaan keuangan daerah secara umum mengacu pada paket reformasi keuangan negara, yang dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sebagai subsistem dari pengelolaan keuangan negara dan merupakan kewenangan pemerintah daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini telah dijabarkan secara lebih rinci dan teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 memuat berbagai kebijakan terkait perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Isu-isu strategis tentang penerimaan daerah (pendapatan daerah) dan pengeluaran daerah (belanja daerah) adalah berkaitan dengan bagaimana meningkatkan ruang gerak fiskal (*fiscal space*) pemerintah daerah, sehingga meningkatkan kapabilitas

penerimaan daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan. Selain itu, dari sisi pengeluaran adalah bagaimana meningkatkan kondisi pengeluaran daerah (belanja daerah) untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan dasar lainnya.

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang urusan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai melalui APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dibiayai melalui APBN.

Pengalokasian ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan sebagai berikut:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.

4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara umum, anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kota Palu sampai dengan Tahun 2025 masih bertumpu pada Pendapatan Transfer, yaitu 62,85% dan PAD berkontribusi sebesar 35,96% terhadap pendapatan daerah. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kota Palu masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah merupakan elemen yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah merupakan pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pembangunan, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah berbanding lurus dengan peningkatan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar yang berlaku, peningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah secara optimal, peningkatkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik. Akan tetapi dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah tersebut dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Dilain pihak untuk mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah, hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah terletak pada peningkatkan peran OPD penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan, peningkatan pengelolaan asset dan keuangan daerah, peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi terkini maupun pada peningkatan kinerja pengelolaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang lebih efektif dan efisien.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan PAD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada dan tidak memberatkan msyarakat dan dunia usaha;
2. Menggali potensi sumber Pendapatan Asli Daerah yang masih memungkinkan dioptimalkan;
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki;
4. Memberikan penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran;

5. Memberikan penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar;
6. Meningkatkan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Pendapatan Transfer;
7. Mengoptimalkan Pendapatan Daerah dengan pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha;
8. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya;
9. Menegakkan peraturan dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
10. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

Kontribusi pendapatan daerah berdasarkan data Realisasi Pendapatan Tahun 2022-2023, Tahun Berjalan 2024 serta Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2026, disajikan pada Tabel 3.7 berikut ini:

Tabel 3.8
Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2021 dan 2022, Rencana Tahun 2023, Tahun Berjalan 2024, serta Proyeksi Tahun 2025

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi	Realisasi	Tahun Bejalan	Proyeksi	Proyeksi
1	**PENDAPATAN**	**1.384.205.147.673**	**1.469.308.277.706**	**1.651.716.535.354**	**1.647.628.052.299**	**1.681.560.613.345**
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	297.245.708.755	352.767.942.672	493.680.808.034	601.817.254.315	623.546.911.762
4.1.01.	Pajak Daerah	159.761.032.300	199.354.300.359	301.400.000.000	380.403.719.516	396.987.590.160
4.1.02.	Retribusi Daerah	15.244.946.377	20.592.836.614	47.487.308.034	45.987.308.034	45.987.308.034
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.715.287.085	3.915.957.953	3.900.000.000	3.900.000.000	3.900.000.000
4.1.04.	Lain-lain PAD Yang Sah	119.524.442.993	128.904.847.747	140.893.500.000	171.526.226.765	176.672.013.568
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	1.038.000.528.881	1.066.337.279.670	1.138.314.313.827	1.043.944.797.984	1.056.147.701.583
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	932.271.277.832	953.747.058.513	1.041.553.286.000	984.385.816.000	995.578.702.704
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	105.729.251.049	112.590.221.157	96.761.027.827	59.558.981.984	60.568.998.879
4.2.03.	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	-		-	-	-
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	48.958.910.037	50.203.055.364	19.721.413.493	1.866.000.000	1.866.000.000
4.3.01.	Pendapatan Hibah	-	504.106.618	1.866.000.000	1.866.000.000	1.866.000.000
4.3.02.	Dana Darurat	300.000.000	-	-	-	-

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi	Realisasi	Tahun Bejalan	Proyeksi	Proyeksi
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	48.658.910.037	49.698.948.746	17.855.413.493	-	

Sumber : BPKAD Kota Palu dan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Berdasarkan tabel 3.8, realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 sebesar Rp 1.337.102.449.228, terdapat penurunan target pendapatan terhadapan realisasi tahun sebelumnya sebesar -1,09%. Tahun 2023 direncanakan pendapatan daerah sebesar Rp 1.529.217.858.498 dengan capaian realisasi sebesar 96,08%, serta proyeksi pendapatan daerah pada Tahun 2024 sebesar Rp 1.651.716.535.354

Tahun 2021 realisasi PAD sebesar Rp. 337.212.652.538 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 24,94%, peningkatan terbesar diperoleh dari lain-lain PAD yang sah khususnya pendapatan BLUD dimana terdapat penerimaan dari pemerintah pusat atas jasa pelayanan Covid-19 sehingga penerimaan BLUD menjadi sekitar Rp. 160 Milyar. Target PAD Tahun 2022 sebesar Rp. 269.724.388.611 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 20,40%. Atas target tersebut, realisasi PAD mencapai 110% atau sebesar Rp 297.245.708.755 dimana pelampauan realisasi pajak daerah sebesar Rp 30 Milyar dan pendapatab BLUD sebesar Rp 20 Milyar, namun realisasi retribusi daerah belum mencapai target dengan deviasi sebesar sekitar Rp 13 Milyar. Pencapaian pajak daerah tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang ditempuh seperti relaksasi denda pajak daerah guna menstimulasi penerimaan dari masyarakat.

Proyeksi PAD Tahun 2023 sebesar Rp 402.579.311.439, dengan realisasai atas target tersebut berjumlah Rp 352.767.942.672. Target PAD berkontribusi 26,33% terhadap pendapatan daerah. Target pajak daerah dan retribusi daerah meningkat masing-masing sekitar Rp 70 Milyar dan Rp 15 Milyar peningkatan tersebut didasari oleh analisis potensi yang dilakukan OPD pengampuh PAD tersebut, lain-lain PAD yang sah berkontribusi 3,21% atau sebesar Rp 136.786.332.240.

Pada Tahun 2024 target pajak daerah diproyeksi sebesar Rp 301.400.000.000, retribusi daerah sebesar Rp 47.487.308.034, dan lain-lain PAD yang sah meningkat Rp 4 Milyar dari target tahun sebelumnya. Dengan diberlakukannya pajak opsen maka penetapan target PAD khususnys pajak daerah perlu penyesuaian berdasarkan data proyeksi jumlah kendaraan baru dan potensi kendaraan di Kota Palu, serta rasionalisasi DBH Provinsi karena sebelum

pemberlakuannya pajak opsen masuk dalam perhitungan DBH Provinsi. Target pajak daerah Tahun 2025 sebesar Rp 380.403.719.516 dengan pajak opsen didalamnya sebesar Rp 81 Milyar, retribusi daerah ditargetkan Rp 45.987.308.034 berkurang Rp 1.500.000.000 yang merupakan target retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas. Dengan perubahan pengelolaan Puskesmas menjadi BLUD maka retribusi tersebut pindah rekening ke Lain-lain PAD yang Sah dengan peningkatan secara keseluruhan pada rekening tersebut sebesar Rp 30,6 Milyar termasuk penambahan target penerimaan BLUD RSU Anutapura yang berjumlah Rp 12,7 Milyar serta pindah rekening atas pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan Rp 17,8 Milyar, sehingga total PAD Tahun 2025 sebesar Rp 597.395.016.306. Kenaikan tersebut sesuai dengan tujuan pemberlakuan pajak opsen yakni meningkatkan kemandirian dan fleksibiltas daerah dalam pembangunan dan optimalisasi pelayanan publik sehingga indeks kemandirian Kota Palu meningkat menjadi 36,53%.

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun Anggaran 2025, meliputi:

1. Penyempurnaan regulasi tentang Pajak/Retribusi Daerah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan serta tidak menghambat iklim investasi.
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerahserta peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah demi terciptanya efektivitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan dalam rangka meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah.
3. Peningkatan mutu melalui pelayanan prima yang didukung sarana dan prasarana serta teknologi informasi yang memadai untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, kecepatan, ketepatan dan keamanan bagi pembayar pajak/retribusi daerah.

4. Perluasan basis Pendapatan Asli Daerah secara proporsional rasional dan realistis, sesuai dengan kewenangan daerah dan potensi riil, dengan memperhitungkan capaian penerimaan tahun berjalan, perkembangan kekinian yang berpengaruh langsung terhadap penerimaan daerah, objek pendapatan serta rincian objek penerimaanmelalui penyempurnaan serta peningkatan *(i)* proses perhitungan, *(ii)* penetapan regulasi dan besaran, *(iii)* peningkatan akurasi data, *(iv)* efektivitas koordinasi dan pengawasan di lapangan dan ketepatan waktu penerimaan.
5. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menambah kontribusi terhadap penerimaan pendapatan.
6. Dalam merencanakan pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
7. Peningkatan prestasi kinerja keuangan daerah yaitu dalam ketepatan atas rencana alokasi pemanfaatan anggaran, waktu penyampaian, waktu pelaksanaan serta opini WTP atas hasil pemeriksaaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam rangka mengeleminir sanksi dari pemerintah serta untuk lebih meningkatkan penerimaan dana perimbangan serta dana insentif daerah lainnya.

Selain itu, melalui pokok-pokok kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pemerintah Kota Palu akan melakukan peningkatan pencapaian PAD dengan langkah-langkah: *(i)* Perluasan basis PDRD sesuai dengan potensi ekonomi dan kewenangan daerah; *(ii)* Peningkatan diskresi penetapan tarif PDRD; *(iii)* Peningkatan efektivitas pengawasan PDRD.

B. Arah Kebijakan Pendapatan Transfer

Rencana pendapatan transfer Tahun 2022 sebesar Rp. 965.015.920.244. Peningkatan pendapatan transfer skitar Rp 50

Milyar terjadi pada Tahun 2023 dimana peningkatan tersebut dari DAK Fisik bidang jalan untuk mendukung kawasan sentral produksi daerah, dengan total pendapatan transfer Rp 1.076.415.440.441 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 70,39%. Proyeksi untuk Tahun 2024 sebesar Rp 1.138.314.313.827 dengan kontribusi terhadap pendapatan transfer sebesar 68,92%. Tahun 2025 diproyeksi berdasarkan transfer Tahun 2024 dengan beberapa penyesuaian sehingga menjadi Rp 1.043.944.797.984, dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 63,36% yang merupakan rasio terendah terhadap pendapatan daerah dalam kurun beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan Pendapatan Transfer Tahun 2025 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai perkiraan alokasi DBH Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2024, 2023, dan 2022; atau (2) Informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Pertimbangan penetapan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT Tahun Anggaran 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-CHT Tahun Anggaran 2025 belum ditetapkan, perkiraan alokasi DBH-CHT didasarkan pada (1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu Tahun Anggaran 2024, 2023, dan 2021; atau (2) Informasi resmi dari

Kementerian Keuangan mengenai daftar alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2025;

3. Alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2025 sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Kota Tahun 2025 yang diinformasikan resmi oleh Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024;
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2025. Dalam hal Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAK didasarkan pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan; dan
5. Dalam rangka menjamin terpenuhinya kebutuhan belanja pegawai yang meliputi gaji pokok dan tunjangan Pegawai negeri Sipil Daerah (PNSD), penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, pemberian gaji ketiga belas, dan gaji keempat belas.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah yang bersumber dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya serta dana insentif daerah. Melihat perkembangan pendapatan daerah yang bersumber dari lain-lain pendapatan daerah yang sah berdasarkan Tabel 3.8 cenderung mengalami fluktuasi kontribusi dalam total pendapatan. Realisasi lain-lain pendapatan

daerah yang sah Tahun 2021 sebesar Rp 27.513.296.411 berkontribusi 2,04% terhadap pendapatan daerah. Rencana Tahun 2022 sebesar Rp 50.741.400.000 dengan pencapaian realisasi sebesar 96,49% atau Rp 48.958.910.037. Tahun 2023 realisasinya sebesar Rp 50.203.055.364 dengan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 3,42 %. Proyeksi lain-lain pendapatan daerah yang sah Tahun 2024 telah disesuaikan dengan pedoman penyusunan APBD Tahun 2024 berjumlah Rp 19.721.413.493, dimana anggaran Belanja Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp 56,4 Milyar pindah ke rekening pendapatan transfer khususnya DAK Non Fisik. Proyeksi lain-lain pendapatan daerah Tahun 2025 menjadi Rp 1,86 Milyar berkurang Rp 17,8 Milyar yang merupakan Alokasi BOK yang pindah ke rekening Lain-lain PAD yang Sah.

Berdasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan Pemerintah Pusat serta Provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana penyesuaian dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Lainnya Tahun Anggaran 2025;
2. Dana Otonomi Khusus dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2025;
3. Target Pendapatan Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Yang Diterima Pemerintah Provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2025. Dalam hal penetapan APBD Kota Tahun Anggaran 2025 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024 dengan

memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023;

4. Bantuan Keuangan baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dianggarkan sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan; dan
5. Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat atau perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang berpihak pada kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan, maka belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas, yang diharapkan dapat memberikan dukungan terhadap program-program strategis maupun prioritas daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan untuk melakukan penyesuaian klasifikasi belanja pada APBD sebagaimana tertuang pada pasal 55 yakni klasifikasi belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sehingga atas dasar tersebut proyeksi belanja daerah Tahun 2025 disesuaikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan

pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan. Penetapan standar harga satuan daerah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, yang selanjutnya diturunkan pada Peraturan Kepala Daerah tentang Standar Satuan Harga.

Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan Kota Palu. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kota Palu menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas

utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Realisasi Tahun 2022 belanja operasi sebesar Rp 1.218.513.125.022, realisasi belanja modal sebesar Rp 289.914.401.250, realisasi belanja tidak terduga sebesar Rp 84.897.047.923 yang mana sekitar Rp 76 Milyar merupakan pengembalian dana stimulan perbaikan rumah korban bencana alam yang tidak tersalurkan kepada pemerintah pusat. Tahun 2023 realisasi belanja operasi sebesar Rp 1.263.765.807.569, belanja modal sebesar Rp 345.215.809.464 dengan proporsi terbesar yaitu belanja jalan, irigasi, dan jaringan sebesar 55,8% atau Rp 171.059.130.387, realisasi belanja tidak terduga Rp 4.511.672.800. Alokasi belanja Tahun 2024 sebesar Rp 1.783.558.483.271 dengan rincian belanja operasi Rp 1.433.474.248.521, belanja modal Rp 227.985.880.794, belanja tidak terduga Rp 19.330.813.413.

Proyeksi anggaran belanja Tahun 2025 sebesar Rp 1.646.628.052.299 dengan rincian belanja operasi Rp 1.412.744.533.576, belanja modal Rp 227.985.880.794, serta belanja tidak terduga Rp 5.897.637.929. Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 juga mengedepankan inklusifitas dimana dialokasikan sekitar Rp 1,3 Milyar untuk mengakomodir usulan Musrenbang Inklusi untuk. Kebijakan belanja daerah Tahun 2025 diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap publik dan pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya dalam upaya membangun Kota Palu yang lebih infklusif. Kebijakan lain dalam upaya akselesari pembangunan Kota Palu yang Mantap Bergerak, dialokasikan penambahan anggaran Dana Kelurahan yang diharapkan sebesar Rp 1 Milyar per Kelurahan secara bertahap dalam beberapa tahun kedepan dimulai Tahun 2015.

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022-2023, Tahun Berjalan 2024, dan Proyeksi Tahun 2025-2026 dapat dilihat pada tabel 3.8 :

Tabel 3.9
Realisasi Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023, Tahun Berjalan 2024, serta Proyeksi Tahun 2025-2026

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi	Realisasi	Tahun Bejalan	Proyeksi	Proyeksi
2	**BELANJA DAERAH**	**1.593.624.574.195**	**1.613.493.289.833**	**1.783.558.483.271**	**1.646.628.052.299**	**1.679.560.613.345**
5.1.	BELANJA OPERASI	1.218.513.125.022	1.263.765.807.569	1.433.474.248.521	1.412.744.533.576	1.440.999.424.248
5.1.1.	Belanja Pegawai	580.664.272.607	579.099.587.136	701.487.061.418	709.541.341.475	723.732.168.305
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	552.143.368.163	656.637.017.074	644.900.996.329	693.117.001.327	706.979.341.354
5.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
5.1.5.	Belanja Hibah	79.230.484.252	17.777.379.359	84.003.690.774	7.003.690.774	7.143.764.589
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	6.475.000.000	10.251.824.000	3.082.500.000	3.082.500.000	3.144.150.000
5.2.	BELANJA MODAL	289.914.401.250	345.215.809.464	347.084.234.750	227.985.880.794	232.545.598.410
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	19.797.188.747	18.868.111.923	9.000.000.000	6.003.287.346	6.123.353.093
5.2.2.	Belanja Peralatan dan Mesin	58.478.670.322	87.099.001.895	65.464.568.613	46.472.491.598	47.401.941.430
5.2.3.	Belanja Gedung dan Bangunan	58.930.857.977	67.107.036.999	123.147.951.707	74.239.335.536	75.724.122.247
5.2.4.	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	152.306.618.574	171.059.130.387	145.804.541.430	99.203.593.313	101.187.665.180
5.2.5.	Belanja Aset Tetap Lainnya	401.065.630	283.733.260	3.000.866.000	1.400.866.000	1.428.883.320
5.2.6.	Belanja Aset Lainnya	-	798.795.000	666.307.000	666.307.000	679.633.140
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	84.897.047.923	4.511.672.800	3.000.000.000	5.897.637.929	6.015.590.687

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi	Realisasi	Tahun Bejalan	Proyeksi	Proyeksi
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	84.897.047.923	4.511.672.800	3.000.000.000	5.897.637.929	6.015.590.687
5.4.	BELANJA TRANSFER	300.000.000	-	-	-	-
5.4.1.	Belanja Bagi Hasil	-	-	-	-	-
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	300.000.000	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kota Palu, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Agar pemanfaatan anggaran belanja efisien dan efektif, dalam perencanaannya perlu memperhatikan dua hal, yaitu :

1. Tujuan, sasaran, hasil, manfaat dan indikator kinerja perlu ditetapkan secara jelas; Sehingga setiap pengeluaran belanja dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.
2. Penetapan prioritas kegiatan, perhitungan beban kerja dan penetapan harga satuan harus dilakukan secara rasional, realistis, dan proporsional.

1. Arah Kebijakan Belanja Operasi

a. Arah Kebijakan Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

1. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
2. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2025;
3. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
4. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

b. Arah Kebijakan Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Arah Kebijakan Belanja Bunga

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

d. Arah Kebijakan Belanja Subsidi

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

e. Arah Kebijakan Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.

f. Arah Kebijakan Belanja Bantuan Sosial

Alokasi Belanja Bantuan Sosial mempedomani ketentuan Permendagri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Arah Kebijakan Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

a. Arah Kebijakan Belanja Modal Tanah

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Arah Kebijakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifkan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Arah Kebijakan Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasioal Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Arah Kebijakan Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Arah Kebijakan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Arah Kebijakan Belanja Aset Lainnya

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3. Arah Kebijakan Kebijakan Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

4. Arah Kebijakan Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan daerah terdiri atas sumber penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah dan optimalisasi pemberdayaan aset daerah sebagai sumber pembiayaan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 adalah bersumber dari Silpa tahun sebelumnya yang digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi serta pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya harus secara selektif dan merupakan pilihan akhir apabila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya tidak mampu untuk menutup defisit anggaran. Pinjaman daerah dan obligasi daerah, dapat dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, apabila anggaran yang tersedia dalam APBD atau Perubahan APBD tidak mencukupi.

Proyeksi keuangan daerah pada Tahun 2025 bagi kebutuhan penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit anggaran sangat memungkinkan berasal dari kekuatan APBD sendiri. Sumber sisa lebih anggaran tahun berjalan berasal dari beberapa komponen yang meliputi:

1. Efisiensi belanja daerah, komponen belanja daerah merupakan pagu atas batas pengeluaran tertinggi dari belanja daerah sehingga sangat dimungkinkan penyerapan atas komponen belanja tidak mencapai 100%; dan
2. Realisasi pendapatan daerah yang lebih besar dari anggaran pendapatan daerah, dalam konteks proyeksi keuangan daerah/proyeksi pendapatan daerah dengan asumsi sebagaimana di atas (kebijakan pendapatan daerah) memberikan peluang terlampauinya target pendapatan daerah tersebut.

Dalam pembiayaan terdapat rekening penyertaan modal (investas) daerah yang mana investasi pemerintah merupakan penempatan sejumlah dana dan/atau barang dalam jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. Olehnya Pemerintah Kota Palu mengalokasikan anggaran untuk investasi langsung di Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk penyertaan modal.

Dalam upaya mewujudkan Kota Palu meraih Adipura maka dibutuhkan penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana persampahan yang akan dibiayai dengan skema pinjaman.

Hasil analisis proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam tiga tahun terakhir, proyeksi, dan target tahun rencana serta satu tahun setelah tahun rencana 2025 dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah dapat dilihat dalam tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.10
Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan 2023, Tahun Berjalan 2024, serta Proyeksi Tahun 2025-2026

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi	Realisasi	Tahun Bejalan	Proyeksi	Proyeksi
	PEMBIAYAAN DAERAH	**383.034.982.213,17**	**165.615.555.691,95**	**131.841.947.917,00**	**(1.000.000.000,00)**	**(2.000.000.000,00)**
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	383.034.982.213	173.615.555.692	132.841.947.917	-	-
6.1.1.	SiLPa	383.034.982.213	173.615.555.692	132.841.947.917	-	-
6.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
6.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	-	-	-	-	-
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	8.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000

No.	Uraian	2022	2023	2024	2025	2026
		Realisasi	Realisasi	Tahun Bejalan	Proyeksi	Proyeksi
6.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
6.2.2.	Penyertaan Modal	-	8.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	2.000.000.000
6.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
6.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	-

Sumber : BPKAD Kota Palu, RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026



BAB 4

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1. Isu Strategis Pembangunan Daerah Kota Palu

Pembangunan pada hakikatnya dilaksanakan oleh pemerintah bersama rakyat dengan tujuan memberikan kemakmuran dan kesejahteraan pada rakyat. Sehingga pembangunan harus direncanakan secara matang dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004). Oleh karena itu, pembangunan sesungguhnya menyelesaikan masalah bukan memperbanyak masalah. Berdasarkan masalah yang terjadi melahirkan isu strategis pembangunan di Kota Palu.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Beberapa isu strategis yang akan berdampak dan mempengaruhi pembangunan Kota Palu selama periode Tahun 2021-2026. Rumusan isu strategis Kota Palu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif dan merata.

   Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dimaknai sebagai pertumbuhan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan menurunnya angka

kemiskinan, menurunnya tingkat pengangguran terbuka, menurunnya kesenjangan pendapatan dan pengeluaran antar penduduk.

2. SDM unggul, tangguh, dan berdaya saing.

   Keberadaan sumber daya manusia, unggul, tangguh dan berdaya saing, adalah isu mendesak, mutlak dan serta urgen, sebab SDM merupakan faktor sumberdaya yang strategis, yang harus terus dibina dan dikembangkan secara berkelanjutan. Keberadaan SDM menjadi faktor penting disamping faktor sumber daya alam, infrastruktur, sosial budaya serta modal kestabilan politik, SDM yang unggul akan mendorong terciptanya kesejahteraan bagi daerah, meningkatnya etos kerja serta kemampuan mengelola sumber daya yang ada untuk kemajuan daerah.

   SDM yang tangguh digambarkan sebagai kemampuan untuk mengantisipasi serta memitigasi kebencanaan dan perubahan iklim. SDM yang tangguh dilakukan melalui meningkatkan efektivitas pelayanan dan kecepatan penangulangan dimasa tanggap darurat.

3. Infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif berbasis budaya.

   Perencanaan masa depan perkotaan, yaitu membangun perkotaan yang berketahanan bencana, cerdas dan modern, yang pelaksanaannya haruslah bersifat inklusif dan berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan ketersediaan layanan dasar dan perumahan yang aman dan terjangkau serta mempromosikan pembangunan ekonomi lokal. Perwujudan kota yang nyaman dan inklusif ditandai dengan kota yang tanpa limbah, rendah karbon dan tersedia ruang hijau publik, dengan

sistem transportasi yang terjangkau dan menjamin keselamatan jalan.

Masalah perkotaan yang dicirikan oleh kawasan kumuh, penyediaan sanitasi yang buruk dan transportasi yang tidak lancar, perlu ditangani secara berkelanjutan, *smart* dan inovatif. Kota tangguh bencana bukan sekedar infrastruktur tapi juga kesiapan kelembagaan dan sumber daya pembiayaan yang mendukung dalam kategotri mantap.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan pasca bencana di Kota Palu, sebagai bagian dari mitigasi haruslah menghasilkan prasarana dan sarana publik yang tangguh bencana, secara teknis bangunan untuk fasilitas umum haruslah memilki derajat yang lebih kuat dan aman, dengan menjadikan histori kebencanaan sebagai bagian dari bahan pembuatan perencanaan yang utuh. Oleh karena itu, kepatuhan atas penerapan standar bangunan dan zonasi daerah rawan bencana menjadi suatu hal yang penting.

4. Mitigasi Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

   Kota Palu merupakan kota dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi diindikasikan dari tingginya nilai indeks risiko bencana yakni sebesar 132,3 point pada Tahun 2023 (InaRisk, 2024), selain itu Kota Palu memiliki ketangguhan terhadap bencana kategori sedang yakni 263 point dari 590 skor tertinggi (Yayasan Care, Lingkar, BPBD Kota Palu, 2020) sesuai indikator penilaian yang dikembangkan UNDDR (*United Nations Office for Disaster Risk Reduction*).

   Adanya fenomena pemanasan global yang disebabkan oleh kenaikan gas rumah kaca dari aktivitas manusia menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global, dan memicu

perubahan iklim dunia. Fenomena pemanasan global terjadi secara menyeluruh sehingga dapat mempengaruhi kondisi iklim dan cuaca hampir di semua wilayah, termasuk di area Kota Palu.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memproyeksi perubahan rata-rata suhu maksimum Kota Palu periode 2032 - 2040 terjadi penambahan suhu dengan proyeksi rata-rata suhu maksimum yang dapat mencapai 2.25 - 2.5 derajat Celsius.

5. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Tata Kelola pemerintah yang baik dan bersih, akan memberikan rasa nyaman dan menentramkan bagi semua pihak, yang dijalankan dengan suasana kepemimpinan yang demokratis menuju masyarakat yang diharapkan dalam visi pemerintah daerah.

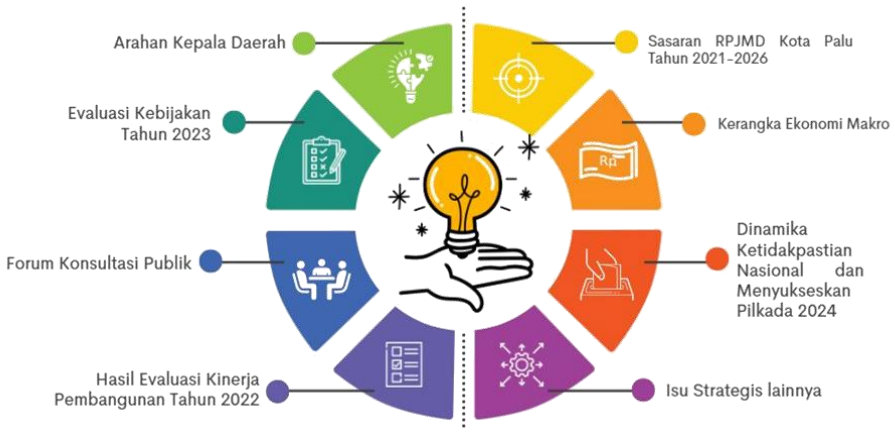
Dalam pelaksanaannya pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mendorong dan meningkatkan otonomi menejerial terutama sekali mengurangi campur tangan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat, transparan, akuntabilitas publik dan disiapkan pengelolaan menejerial yang bersih dan bebas dari korupsi. Konsep ini mengedepankan partisipasi rakyat, hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, mengadopsi prinsip partisipasi, penegakkan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efesiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

6. Pencapaian target dan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

   Prinsip pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan terdiri dari 17 tujuan, 169 target dan 240 indikator. Secara umum terdiri atas 4 pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan, dan pilar pembangunan hukum dan tata kelola.

4.1.2 Tema Pembangunan

Tema pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2025 disusun dengan mempertimbangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Palu Tahun 2005-2025, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu Tahun 2021-2026. Internalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Jangka Menengah Daerah dengan Tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2025 yaitu Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan dan Peningkatan Ketangguhan Daerah.



Gambar 4.1
Penyusunan Tema Pembangunan RKPD Tahun 2025
Memperhatikan

Saat ini Kota Palu telah memasuki tahap keempat dari sasaran pembangunan jangka panjang dalam RPJPD Kota Palu

2005-2025, yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Sasaran pokok yang akan dicapai dalam tahap ketiga pembangunan jangka panjang Kota Palu yaitu meningkatnya kualitas Infrastruktur Perdagangan dan industri, pariwisata, serta pelayanan publik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Pencapaian visi tahapan ketiga perlu didukung oleh arah dan sasaran pembangunan jangka menengah dan sasaran pembangunan tahunan Kota Palu. Sehingga setiap tahapan pembangunan jangka panjang harus memiliki tema agar lebih fokus dan pedoman untuk mencapainya.

Tema pembangunan Kota Palu dalam lima tahun merupakan gambaran pencapaian arah pembangunan berdasarkan arah pembangunan prioritas yang ingin di capai oleh pemerintah Kota Palu. Tema dapat juga dipandang sebagai tahap pembangunan, sesunguhnya memberikan pedoman pelaksanaan misi, tujuan, sasaran berdasarkan prioritas pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan.



Gambar 4.2
Tema Pembangunan kota Palu

Tema pembangunan Kota Palu untuk Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Peningkatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat didorong secara sistematis dan terpadu sebagai upaya peningkatan peran masyarakat untuk turut andil dalam pembangunan kota dimana partisipasi dapat diberikan dalam berbagai bentuk seperti partisipasi untuk mendukung pelaksanaan regulasi yang berlaku, partisipasi buah pikiran dengan menyampaikan kepada pemerintah melalui berbagai ruang komunikasi yang dibuka, dan partisipasi sosial dengan melalui program yang dicanangkan. Partisipasi masyakat juga dilaksanakan dalam bentum pemberdayaan masyarakat dimana konsep ini terus dikembangkan dengan berbagai program, metode, dan skema untuk mengefektifkan manfaat yang dapat diterima masyarakat.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan

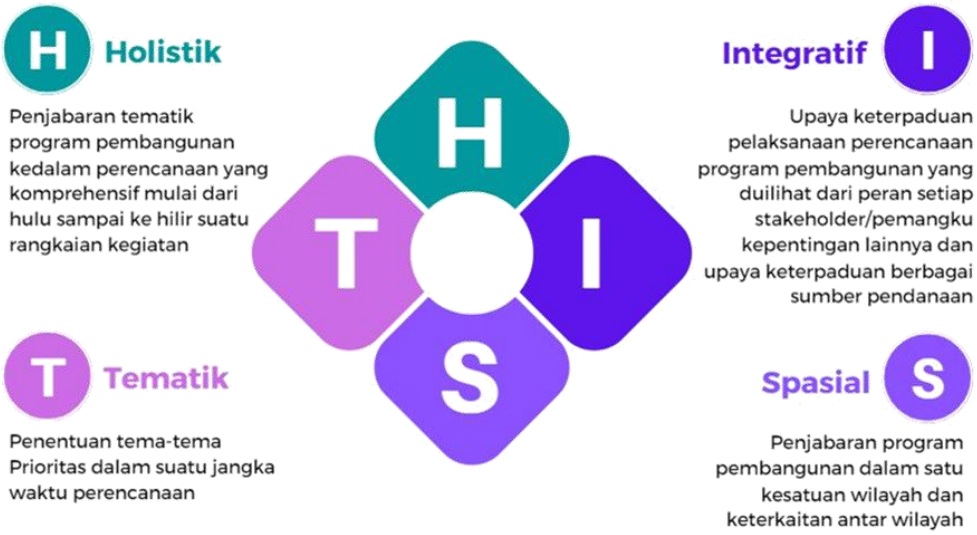
Pada Tahun 2024 Kota Palu berhasil meraih penghargaan Adipura dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia pada kategori kota sedang atas upaya pengeloaan lingkungan dengan penerasan sistem pengelolaan sampah secara terpadu dan berkelanjutan dari hulu hingga hilir. Atas pencapaian tersebut, Kota Palu masih terus menyelesaikan “pekerjaan rumah” yang belum pelaksanaannya belum optimal, oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan lingkungan dengan melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan.

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Peningkatan Ketangguhan Daerah

Kota Palu merupakan satu-satunya wilayah di dunia yang terdampak 3 bencana alam besar secara bersamaan yakni gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September 2018, serta lokasi Kota Palu berada diatas sesar palu koro yang merupakan lempeng besar yang berpotensi memicu bencana alam. Dalam menghadapi kondisi tersebut maka ketangguhan masyarakat dalam hal kebencanaan menjadi modal utama dalam menghadapi bencana. Upaya peningkatan ketangguhan daerah terus dilakukan dengan mengejar target Indek Ketangguhan Daerah dimana pada Tahun 2025 ditargetkan mencapai poin 500. Dari sisi masyarakat, dilaksanakan kegiatan ketangguhan masyarakat melalui pelatihan kebencanaan, simulasi, dan sosialisasi dengan harapan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana akan terbangun dengan baik, dan tingkat kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana pun bisa terkondisikan dengan optimal. Kesiapsiagaan harus dilakukan dengan terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh, mulai dari tahap pra-bencana, pada saat terjadi bencana, sampai dengan pasca-bencana, termasuk dengan menambah dan memperkuat kelurahan Siaga Bencana, sehingga dampak risiko dapat diminimalisir secara swadaya.

Melalui perencanaan yang baik di Tahun 2025, Kota Palu berkomitmen untuk memberikan arahan pelaksanaan pembangunan melalui Kebijakan prioritas daerah yang komprehensif dan sistemati, Kerangka pendanaan, Kerangka kelembagaan, Kerangka regulasi serta Kerangka evaluasi dan pengandalian, dalam melaksanakan pembangunan.

Untuk menjamin sinergitas perencanaan, Perencanaan Pembangunan Daerah disusun berdasarkan pendekatan yang Partisipatif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*, dengan berorientasi secara Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (***THIS***) serta tanpa meninggalkan unsur Koordinasi, Integrasi, Sinergi dan Sinkronisasi (***KISS***) antar pemangku kepentingan, yang tetap mengacu pada regulasi nasional yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional.



Gambar 4.3
Pendekatan Perencanaan Pembangunan

Tematik Pembangunan Kota Palu Tahun 2024 ini tidak lepas dalam mendukung Visi Pembangunan kota Palu yaitu Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh serta Profesional dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan. Berdasarkan hal tersebut ditarik nilai pembangunan Kota Palu yang meliputi :

Mandiri – Aman – Nyaman – Tangguh – Profesional – Berkelanjutan – Kearifan Lokal – Keagamaan

yang digaungkan dengan

PALU MANTAP BERGERAK

Palu Mantap Bergerak merupakan perwujudan dari visi Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan kota berkelanjutan (*sustainable development*) didukung dengan penerapan konsep pengembangan kota, yaitu:

1. **Kota cerdas (*smart city*)**

   Kota cerdas (*smart city*) merupakan kota yang mampu menciptakan kualitas hidup yang baik didukung dengan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan, yang partisipatif, responsif, inovatif, dan kompetitif dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Ikhwan, 2018). Menurut BAPPENAS, *smart city* merupakan konsep pembangunan perkotaan yang pengelolaannya memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi untuk mengoptimalkan penggunaan infrastruktur dan pelayanan kota sehingga lebih "cerdas", saling berhubungan, dan efisien, yang meliputi pelayanan administrasi publik, pendidikan, kesehatan, keamanan publik, perumahan, transportasi, dan utilitas.

2. **Kota tangguh (*resilience city*)**

   Kota tangguh (*resilience city*) merupakan kota yang mampu menahan, menyerap, beradaptasi dengan dan memulihkan diri dari akibat bencana secara tepat waktu dan efisien, sambil tetap

mempertahankan struktur-struktur dan fungsi-fungsi dasarnya (BNPB, 2015). Kota yang tangguh mampu menahan guncangan dan tekanan-tekanan dari ancaman bencana alam dan ancaman terkait iklim.

3. **Kota hijau (*green city*)**

   Kota hijau (*green city*) merupakan kota yang terencana dengan baik, bercirikan ramah lingkungan dan mampu memanfaatkan sumber daya alam secara seimbang sehingga tercipta kesejahteraan bagi penduduknya (Kementerian PUPR, 2015).

4. **Kota inklusif (*inclusive city*)**

   Kota inklusi (*inclusive city*) merupakan kota dimana semua masyarakat mampu hidup bersama-sama dengan aman dan nyaman, serta mempuntai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi penuh dalam dimensi spasial,sosial dan ekonomi tanpa adanya diskriminasi

4.1.3. Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Pembangunan

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kota Palu 2021–2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki poin kritis dalam penyusunan RPJMD.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2025 didasarkan pada arah kebijakan yang tercantum pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palu 2021-2026. Ranwal RKPD Tahun 2025 disandarkan pada pedoman RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025, yang dirancang berdasarkan penyelarasan antara arah kebijakan umum nasional yang terdapat dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan arah kebijakan Provinsi Sulawesi Tengah

yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Berikut ini merupakan penyelarasan arah kebijakan yang menjadi landasan dalam merencanakan pembangunan Kota Palu Tahun 2025.

Tabel. 4.1

Dasar Kebijakan Bagi Pembangunan Kota Palu Tahun 2025

5 Arahan Utama RPJMN 2020-2025	Arah Kebijakan Umum RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026	Sasaran Pokok RPJP Kota Palu 2005-2025	Arah Pembangunan RPJP Kota Palu, Tahap IV (2021-2025)
Penyederhanaan Regulasi	Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat secara konsisten guna menurunkan angka stunting, penderita gizi buruk, layanan kesehatan, germas, dll)	Persamaan hak, kedudukan dan penegakan hukum	Perwujudan kondisi yang aman dan damai dengan menitik beratkan pada prinsip toleransi dan non diskriminasi
Penyederhanaan Birokrasi		Menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efesien dan transparan	
		Penyediaan pelayanan publik yang layak dan terjangkau	
Pembangunan Infrastruktur	Mewujudkan pemerataan penyediaan air bersih terutama pada daerah terdampak bencana	Penyediaan kebutuhan dasar masyarakat	Peningkatan kualitas infastruktur perdagangan, industri serta pelayan publik yang berkualitas dan menjaga keseimbagan lingkungan
Pembangunan SDM	Meningkatkan kualitas pendidikan melalui program pendidikan vokasi	Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia (SDM) yang bertumpu pada potensi lokal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya	Pelaksanaan pembangunan yang semakin mantap menju kota ekologis.
	Meningkatkan sarana prasarana pendukung pelayanan pendidikan dan kesehatan		
Transformasi Ekonomi	Meningkatkan ketahanan dan keamanan pangan daerah	Mengelola sumberdaya alam (SDA) yang berkelanjutan serta meminimalkan resiko bencana.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial dan kualitas sumberdaya

5 Arahan Utama RPJMN 2020-2025	Arah Kebijakan Umum RPJMD Provinsi Sulteng 2021-2026	Sasaran Pokok RPJP Kota Palu 2005-2025	Arah Pembangunan RPJP Kota Palu, Tahap IV (2021-2025)
		Mendorong pertumbuhan ekonomi perkotaan	manusia yang semakin membaik

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026, dan RPJPD Kota Palu Tahun 2005-2025

Kebijakan tersebut dijadikan dasar dalam penetapan prioritas, sasaran, strategi dan kebijakan RKPD Kota Palu Tahun 2025, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengatur bahwa pencanaan prioritas dan sasaran pembangunan nasional perlu disinergikan antar perencanan tahunan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tujuan dan sasaran disusun dalam kerangka yang jelas di setiap misi, sehingga menggambarkan dampak keberhasilan pembangunan daerah. Berikut uraian tujuan, sasaran pembangunan untuk periode lima tahun kedepan pada tiap misi dan sub misi yang telah ditetapkan, dan dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2025	Kondisi Akhir
VISI : MEMBANGUN KOTA PALU YANG MANDIRI, AMAN, DAN NYAMAN, TANGGUH, SERTA PROFESIONAL DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL DAN KEAGAMAAN						
MISI 1: MEMBANGUN PEREKONOMIAN YANG MANDIRI DAN SIAP BERSAING DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI REGIONAL DAN GLOBAL						
1. Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen (%)	-4,54	4,32	4,42
	1.1 Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	Persen (%)	26,41	28,36	28,4
		Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	Persen (%)	63,47	65,94	66,1
MISI 2 : MEMBANGUN KEMBALI TATANAN LINGKUNGAN YANG AMAN DAN NYAMAN DENGAN DUKUNGAN INFRASTRUKTUR YANG BERKETAHANAN TERHADAP BENCANA						
2. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana		Indeks Kota Layak Huni	Poin	NA	63,5	64
		Indeks Risiko Bencana	Poin	150,16	100	100
	2.1 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	73,92	75,28	75,62
	2.2 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Indeks ketentraman dan ketertiban	Poin	100	100	100
	2.3 Meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan	Persentase jalan yang berkeselamatan	Persen (%)	1,34	8,38	10,72
		Persentase Layanan Angkutan Darat	Persen (%)	17,99	25,92	29.51
		Persentase luas kawasan kumuh	Persen (%)	0,67	0,03	0,00
		Persentase rumah tidak layak huni	Persen (%)	11,40	9,21	8,66
	2.4 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan	Persentase kesesuaian pemanfaatan	Persen (%)	75	95	100

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2025	Kondisi Akhir
	ruang berbasis mitigasi bencana	ruang dengan RTRW				
	2.5 Meningkatnya ketangguhan kota	Indeks ketangguhan kota	Poin	263	500	550
MISI 3 MENGEMBANGKAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH MENGHADAPI PERKEMBANGAN GLOBAL DAN MAMPU BERADAPTASI TERHADAP BENCANA DAN COVID – 19						
3. Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	Poin	81,47	82,40	82,60
	3.1 Meningkatnya kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	Tahun	16,23	17,60	18,00
		Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	11,61	11,81	12,00
	3.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	71,04	72,00	72,20
		Case Fatality Rate Covid-19	Persen (%)	2,89	1,00	< 1,00
	3.3 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan	Persen (%)	50	90	100
		Indeks Pembangunan Gender	Persen (%)	97,96	98,21	98,29
		Indeks Kota Layak Anak	Level	NA	Madya	Madya
	3.4 Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Indeks kerukunan umat beragama	Persen (%)	82	84	84,5
		Indeks Aktualisasi Pancasila	Poin	NA	71	72
		Indeks pembangunan kebudayaan	Persen (%)	48,11	54,14	55
MISI 4 : MENCIPTAKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL DAN SELALU HADIR MELAYANI						
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan		Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	50,07	90	92
		Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP

Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target 2025	Kondisi Akhir
dan kualitas pelayanan publik	4.1 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan					
		Nilai Evaluasi AKIP	Level	B	A	A
		Tingkat Maturitas SPIP	Level	LEVEL II	LEVEL III	LEVEL III
	4.2 Meningkatnya mutu aparatur sipil negara	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	NA	85	90
	4.3 Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Poin	C-	B	B
	4.4 Meningkatnya pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Inovasi Daerah	Skor	23	70	80
		Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	poin	1,54	2,8	3
	4.5 Meningkatnya penataan regulasi daerah	Indeks Kualitas Kebijakan)	Poin	NA	85	90

Sumber: RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026

4.1.4. Strategi dan Kebijakan Pembangunan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, namun juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Perumusan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Palu juga

mempertimbangkan penciptaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi dan inovasi.

Berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD yang terinci sebagai berikut:

Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi



Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global

Pembangunan ekonomi Kota Palu dalam lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah yang ditunjukkan dengan Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sector ekonomi potensial daerah.

Sektor sekunder yang akan didorong pertumbuhannya adalah sektor konstruksi dan sektor industri pengolahan yang bersinergi dengan sektor pertanian dan perikanan. Sedangkan sektor tersier yang akan didorong sektor perdagangan, sektor transportasi, sektor akomodasi, sektor komunikasi, sektor real estat, serta sektor jasa-jasa dan sektor jasa lainnya. Pelaksanaan pembangunan ekonomi Kota Palu didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan dalam pemantauan dan evaluasi capaian target pembangunan daerah, serta perbaikan kualitas kebijakan daerah.

Strategi pembangunan dan arah kebijakan dalam rangka Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan pengembangan industri pengolahan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan klaster industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi;
   b. meningkatkan pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal; dan
   c. meningkatkan pengembangan industri kreatif.
2. **Meningkatkan pengembangan pasar perdagangan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan pengembangan pasar dalam dan luar negeri;
   b. Mengembangkan pasar berbasis segmentasi.
3. **Mempercepat pengembangan pariwisata** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. mengembangkan destinasi pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, atraksi wisata, amenitas, dan akomodasi;
   b. mengembangkan industri wisata yang tersegmentasi dan inklusif;
   c. meningkatkan promosi pariwisata melalui pelaksanaan *event* dan pemanfaatan tekonologi informasi;
   d. meningkatkan penataan kelembagaan pariwisata dan pelibatan masyarakat; dan
   e. Mengembangkan desa wisata.
4. **Mempercepat peningkatan investasi daerah,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan iklim usaha dan kemudahan izin investasi; dan
   b. meningkatkan pengembangan kawasan ekonomi khusus.
5. **Meningkatkan penguatan pada kelompok usaha,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. melakukan penguatan pada kelompok usaha;

b. meningkatkan jangkauan pemasaran produk usaha berbasis digital; dan
c. mengembangkan inkubator bisnis berbasis digital.

6. **Mengembangkan kerjasama ekonomi** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. mengembangkan kerjasama ekonomi antar daerah dan badan usaha;
   b. Meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Pembangunan Lingkungan dan Infrastruktur



Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana

Tahun 2018, Kota Palu dihantam dengan bencana gempa bumi yang cukup dahsyat yang mengakibatkan terjadinya gelombang tsunami dan likuifaksi. Bencana tersebut berdampak sangat fatal bagi kawasan pesisir dan kawasan permukiman, serta infrastruktur kota. Ditambah pada tahun 2019 hingga saat ini, Kota Palu juga terdampak oleh pandemic Covid-19. Oleh karena itu, pada lima tahun mendatang, Kota Palu ingin membangun kembali tatanan lingkungan kotanya dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan bencana.

Pembangunan Kota Palu dilakukan melalui pendekatan pengembangan kawasan berbasiskan mitigasi bencana dengan dukungn infrastruktur berketahanan. Kawasan yang akan dikembangkan merupakan pusat kegiatan kota dan kawasan strategis (baik KSN dan KSP yang ada di Kota Palu maupun KSK Kota Palu), meliputi Pusat Pelayanan Kota (PPK) Lolu-Besusu dan Tondo-Talise, Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Pantoloan-

Lambara-Panau, Tatura Utara-Tatura Selatan-Lolu Selatan, dan Siranindi-Kamonji, serta Pusat Lingkungan (PL) Taipa, Mamboro, Lasoani, Petobo, Tavanjuka, dan Tipo. PPK Tondo-Talise menjadi pusat kota baru yang diarahkan menjadi kota satelit dengan fungsi utama sebagai *central business district* kota dan *civic center* skala kota dan regional, kawasan pemerintahan, dan kawasan pedidikan.

Pembangunan lingkungan Kota Palu dalam lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana yang ditunjukkan dengan (i) meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup, (ii) meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan, (iii) meningkatnya konektivitas wilayah dan infrastruktur yang berketahanan, (iv) meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana; serta (v) meningkatnya ketangguhan kota.

Strategi pembangunan dan arah kebijakan dalam rangka Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan Terhadap Bencana adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan pemantauan dan penegakan aturan tentang pengendalian dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan
   b. meningkatkan pengendalian pencemaran limbah di perumahan dan kawasan permukiman.
2. **Meningkatkan kualitas tutupan lahan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau; dan
   b. meningkatkan luasan ruang terbuka hijau

3. **Mengembangkan sistem pengelolaan persampahan terpadu,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan;
   b. membentuk unit pelaksana teknis pengelolaan sampah di kecamatan; dan
   c. meningkatkan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat kelurahan dan RT/RW.
4. **Meningkatkan pengendalian keamanan dan pengawasan ketertiban lingkungan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. Meningkatkan pengendalian keamanan lingkungan;
   b. Meningkatkan pengawasan ketertiban lingkungan kota dan penanganan pelanggaran Perda; dan
   c. Meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat.
5. **Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem dan jaringan infrastruktur transportasi yang terpadu dan ramah lingkungan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. membangun dan meningkatkan kualitas prasarana jalan yang terpadu dengan simpul-simpul kegiatan; dan
   b. mengembangkan sistem jaringan transportasi perkotaan berbasis jalan yang terpadu, aman dan ramah lingkungan.
6. **Meningkatkan pengelolaan sumber daya air (SDA),** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas sistem jaringan sumber daya air (SDA).
7. **Meningkatkan kualitas infrastruktur berbasis kawasan dan lingkungan permukiman** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan penyediaan rumah layak huni;
   b. meningkatkan cakupan layanan air minum;

c. meningkatkan pengelolaan air limbah domestik;
d. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman; dan
e. meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh.

8. **Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur kota,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan mengembangkan infrastruktur kota yang aman berbasiskan kawasan dengan memperhatikan pusat-pusat kegiatan kota.
9. **Mengembangkan pusat kegiatan kota sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. menetapkan seluruh rencana rinci tata ruang berbasis mitigasi bencana;
   b. mengembangkan pusat kegiatan baru sesuai dengan rencana tata ruang; dan
   c. mengembangkan sistem perencanaan tata ruang berbasis teknologi informasi.
10. **Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
    a. mengembangkan sistem inovatif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pembangunan; dan
    b. meningkatkan pemenuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
11. **Meningkatkan ketangguhan kota untuk mengurangi risiko bencana,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
    a. meningkatkan kapasitas masyarakat dan petugas dalam penganggulangan bencana;
    b. meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi bencana;
    c. mengembangkan sistem penanggulangan bencana dengan memanfaatkan tekonologi informasi;

d. membentuk satuan respon cepat terhadap kejadian bencana; dan
e. Meningkatkan ketahanan pangan daerah.

Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Pengembangan Sumber Daya manusia



Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan Covid-19

Pembangunan sumber daya manusia Kota Palu dalam lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat yang ditunjukkan dengan (i) meningkatnya kualitas pendidikan, (ii) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, (iii) meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial, serta (iv) meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal dan kebangsaan.

Strategi pembangunan dan arah kebijakan dalam rangka Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19 adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing, merata, dan terjangkau,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan penguatan akhlak, budi pekerti, dan karakter;
   b. mempercepat pemerataan kualitas sekolah;
   c. meningkatkan prestasi pendidikan; dan
   d. memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu.

2. **Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dengan memanfaatkan teknologi,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan;
   b. mengembangkan ruang kelas dengan memanfaatkan tekonologi informasi; dan
   c. mengembangkan sistem penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi.
3. **Meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidik; dan
   b. meningkatan jumlah pendidik bersertifikat.
4. **Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. menerapkan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; dan
   b. meningkatkan jumlah sekolah berakreditasi A.
5. **Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing;
   b. meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan;
   c. memberikan iuran jaminan layanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan;
   d. meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak;
   e. Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga; dan

f. meningkatkan penanggulangan *stunting*.

6. **Melakukan percepatan penanganan Covid-19,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19;
   b. meningkatkan pelaksanaan protokol Covid-19;
   c. mempercepat penyelesaian pemberian vaksin Covid-19; dan
   d. Meningkatkan kualitas pelayanan rujukan pasien Covid-19.
7. **Mendorong peran serta dunia usaha dalam pemberdayaan masyarakat,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan memberi ruang khusus bagi dunia usaha untuk melakukan pemberdayaan masyarakat.
8. **Melakukan pemberdayaan masyarakat, perempuan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta perlindungan dan pemenuhan hak anak,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. memberikan pelatihan dan modal usaha bagi masyarakat;
   b. Mendorong pemberdayaan masyarakat kelurahan dan desa;
   c. Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga;
   d. memberi ruang bagi peran serta perempuan dan PPKS dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan kota;
   e. meningkatkan upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial;
   f. mewujudkan kota layak anak;
   g. mengembangkan ruang khusus anak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas publik; dan
   h. meningkatkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

9. **Melakukan percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dan kesempatan kerja,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. memberikan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja;
   b. melakukan kerjasama ketenagakerjaan antar daerah; dan
   c. mendorong hubungan industrial yang lebih harmonis.
10. **Meningkatkan pengembangan dan penerapan nilai-nilai keagamaan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan pelayanan terhadap rumah ibadah;
   b. meningkatkan peran rumah ibadah dalam pengembangan umat; dan
   c. meningkatkan peran tokoh agama dan forum kerukunan antarumat beragama.
11. **Meningkatkan pengembangan dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dan kebangsaan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. meningkatkan peran tokoh adat dan forum pembauran kebangsaan;
   b. meningkatkan promosi budaya dan penguatan kearifan lokal dan nilai kebangsaan;
   c. mengembangkan kurikulum muatan lokal; dan
   d. mendorong kesadaran minat baca masyarakat.

Strategi Pembangunan dan Arah Kebijakan Peningkatan Kinerja Pemerintah



Menciptakan pemerintahan yang profesional dan selalu hadir melayani

Pengelolaan Pemerintahan Kota Palu dalam lima tahun ke depan ditujukan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang ditunjukkan dengan (i)

meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintahan, (ii) meningkatnya mutu aparatur sipil negara, (iii) meningkatnya kinerja pelayanan publik, (iv) Pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan tenologi informasi, serta (v) meningkatnya penataan regulasi daerah.

Strategi pembangunan dan arah kebijakan dalam rangka Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani adalah sebagai berikut:

1. **Mengembangkan sistem pemerintahan yang akuntabel dan transparan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. menerapkan sistem perencanaan, pemprograman, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terpadu;
   b. mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien, dan rasional;
   c. melakukan penataan organisasi pemerintah daerah;
   d. meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal pemerintah;
   e. meningkatkan pengelolaan aset daerah;
   f. meningkatkan penerimaan sektor PAD; dan
   g. meningkatkan pengelolaan arsip daerah.
2. **Melakukan percepatan peningkatan mutu aparatur sipil negara,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. melakukan pendidikan dan pelatihan kepada ASN;
   b. melakukan magang ASN pada skala nasional; dan
   c. melakukan penataan pada sistem tenaga kontrak daerah di lingkungan pemerintah kota.
3. **Melakukan percepatan peningkatan kinerja pelayanan publik dan hadir melayani,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:

a. menerapkan standar pelayanan berkualitas dan berstandar internasional;
b. mengembangkan sistem pelayanan publik yang cepat dan akurat; dan
c. ,embentuk desa untuk menjamin hadirnya pelayanan pemerintah di pelosok wilayah.

4. **Mendorong hadirnya inovasi pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan menghadirkan inovasi pada setiap OPD (Satu OPD Lima Inovasi).
5. **Melakukan percepatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan menerapkan konsep *smart city* pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya.
6. **Mempercepat penataan regulasi daerah,** yang dilaksanakan dengan arah kebijakan:
   a. melakukan penataan regulasi daerah; dan

meningkatkan pembangunan hukum.

Tabel 4.3
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Palu

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Misi 1: Membangun Perekonomian yang Mandiri dan Siap Bersaing dalam Perkembangan Ekonomi Regional dan Global			
T.1 Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing ekonomi daerah	S.1 Meningkatnya pertumbuhan dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan	Meningkatkan klaster industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi
			Meningkatkan pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal
			Meningkatkan pengembangan industri kreatif
		Meningkatkan pengembangan pasar perdagangan	Meningkatkan pengembangan pasar dalam dan luar negeri
			Mengembangkan pasar berbasis segmentasi
		Mempercepat pengembangan pariwisata	Mengembangkan destinasi pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, atraksi wisata, amenitas, dan akomodasi
			Mengembangkan industri wisata yang tersegmentasi dan inklusif
			Meningkatkan promosi pariwisata melalui pelaksanaan *event* dan pemanfaatan tekonologi informasi
			Meningkatkan penataan kelembagaan pariwisata dan pelibatan masyarakat
			Mengembangkan desa wisata
		Mempercepat peningkatan investasi daerah	Meningkatkan iklim usaha dan kemudahan izin investasi
			Meningkatkan pengembangan kawasan ekonomi khusus
			Melakukan penguatan pada kelompok usaha

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		Meningkatkan penguatan pada kelompok usaha	Meningkatkan jangkauan pemasaran produk usaha berbasis digital
			Mengembangkan inkubator bisnis berbasis digital
		Mengembangkan kerjasama ekonomi	Mengembangkan kerjasama ekonomi antar daerah dan badan usaha
			Meningkatkan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Misi 2: Membangun Kembali Tatanan Lingkungan yang Aman dan Nyaman dengan Dukungan Infrastruktur yang Berketahanan terhadap Bencana			
T.2 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang aman, nyaman, dan berketahanan bencana	S.2 Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan dan menjaga kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan pemantauan, penegakan aturan tentang pengendalian dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			Meningkatkan pengendalian pencemaran limbah di perumahan dan kawasan permukiman
		Meningkatkan kualitas tutupan lahan	Optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau
			Meningkatkan luasan ruang terbuka hijau
		Mengembangan sistem pengelolaan persampahan terpadu	Memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan
			Membentuk unit pelaksana teknis pengelolaan sampah di kecamatan
			Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat kelurahan dan RT/RW
	S.3 Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	Meningkatkan pengendalian keamanan dan pengawasan ketertiban lingkungan	Meningkatkan pengendalian keamanan lingkungan
			Meningkatkan pengawasan ketertiban lingkungan kota dan penanganan pelanggaran Perda
			Meningkatkan Kewaspadaan dini masyarakat
	S.4 Meningkatnya konektivitas	Meningkatkan kapasitas dan kualitas sistem dan	Membangun dan meningkatkan kualitas prasarana jalan yang terpadu dengan simpul-simpul kegiatan

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	wilayah dan infrastruktur yang berketahanan	jaringan infrastruktur transportasi yang terpadu dan ramah lingkungan	Mengembangkan sistem jaringan transportasi perkotaan berbasis jalan yang terpadu, aman dan ramah lingkungan
		Meningkatkan pengelolaan sumber daya air (SDA)	Meningkatkan kualitas system jaringan sumber daya air
		Meningkatkan kualitas infrastruktur berbasis kawasan dan lingkungan permukiman	Meningkatkan penyediaan rumah layak huni
			Meningkatkan cakupan layanan air minum
			Meningkatkan pengelolaan air limbah domestik
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman
			Meningkatkan penanganan kawasan permukiman kumuh
		Meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur kota	Mengembangkan infrastruktur kota yang aman berbasiskan kawasan dengan memperhatikan pusat-pusat kegiatan kota
	S.5 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang berbasis mitigasi bencana	Mengembangkan pusat kegiatan kota sesuai dengan peruntukannya dalam rencana tata ruang	Menetapkan seluruh rencana rinci tata ruang berbasis mitigasi bencana
			Mengembangkan pusat kegiatan baru sesuai dengan rencana tata ruang
			Mengembangkan sistem perencanaan tata ruang berbasis teknologi informasi
		Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	Mengembangkan sistem inovatif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pembangunan
			Meningkatkan pemenuhan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan umum

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	S.6 Meningkatnya ketangguhan kota	Meningkatkan ketangguhan kota untuk mengurangi risiko bencana	Meningkatkan kapasitas masyarakat dan petugas dalam penganggulangan bencana
			Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi bencana
			Mengembangkan sistem penanggulangan bencana dengan memanfaatkan tekonologi informasi
			Membentuk satuan respon cepat terhadap kejadian bencana
			Meningkatkan ketahanan pangan daerah
Misi 3: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Tangguh Menghadapi Perkembangan Global dan Mampu Beradaptasi terhadap Bencana dan Covid-19			
T.3 Meningkatkan kualitas dan ketangguhan sumber daya manusia, serta pemberdayaan masyarakat	S.7 Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan yang berdaya saing, merata, dan terjangkau	Meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan penguatan akhlak, budi pekerti, dan karakter
			Mempercepat pemerataan kualitas sekolah
			Meningkatkan prestasi pendidikan
			Memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan dengan memanfaatkan teknologi	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas prasarana dan sarana pendidikan
			Mengembangkan ruang kelas dengan memanfaatkan tekonologi informasi
			Mengembangkan sistem penerimaan dan penilaian peserta didik berbasis teknologi informasi
		Meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik	Memberikan pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga pendidik
			Meningkatkan jumlah pendidik bersertifikat
		Meningkatkan manajemen pengelolaan pendidikan	Menerapkan manajemen pengelolaan berbasis perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan
			Meningkatkan jumlah sekolah berakreditasi A

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	S.8 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang berdaya saing
			Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
			Memberikan iuran jaminan layanan kesehatan penduduk miskin dan kelompok rentan
			Meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi ibu dan anak
			Meningkatkan kualitas dan kesejahteraan keluarga
			Meningkatkan penanggulangan *stunting*
		Melakukan percepatan penanganan Covid-19	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan penularan Covid-19
			Meningkatkan pelaksanaan protokol Covid-19
			Mempercepat penyelesaian pemberian vaksin Covid-19
			Meningkatkan kualitas pelayanan rujukan pasien Covid-19
	S.9 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan perlindungan sosial	Mendorong peran serta dunia usaha dalam pemberdayaan masyarakat	Memberi ruang khusus bagi dunia usaha untuk melakukan pemberdayaan masyarakat
		Melakukan pemberdayaan masyarakat, perempuan, Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), serta	Memberikan pelatihan dan modal usaha bagi masyarakat
			Mendorong pemberdayaan masyarakat kelurahan dan desa
			Meningkatkan daya saing pemuda dan olahraga
			Memberi ruang bagi peran serta perempuan dan PPKS dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan kota

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
		perlindungan dan pemenuhan hak anak	Meningkatkan upaya pemberdayaan dan perlindungan sosial
			Mewujudkan Kota Layak Anak
			Mengembangkan ruang khusus anak dan kemudahan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas publik
			Meningkatka Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
		Melakukan percepatan peningkatan kualitas tenaga kerja dan Kesempatan kerja	Memberikan pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja
			Melakukan kerjasama ketenagakerjaan antar daerah
			Mendorong hubungan industrial yang lebih harmonis
	S.10 Meningkatnya pengembangan karakter berdasarkan nilai keagamaan, kearifan lokal, dan kebangsaan	Meningkatkan pengembangan dan penerapan nilai-nilai keagamaan	Meningkatkan pelayanan terhadap rumah ibadah
			Meningkatkan peran rumah ibadah dalam pengembangan umat
			Meningkatkan peran tokoh agama dan forum kerukunan antarumat beragama
		Meningkatkan pengembangan dan penerapan nilai-nilai kearifan lokal dan kebangsaan	Meningkatkan peran tokoh adat dan forum pembauran kebangsaan
			Meningkatkan promosi budaya dan penguatan kearifan lokal dan nilai kebangsaan
			Mengembangkan kurikulum muatan lokal
			Mendorong kesadaran minat baca masyarakat
Misi 4: Menciptakan Pemerintahan yang Profesional dan Selalu Hadir Melayani			
T.4 Meningkatkan kinerja pemerintahan dan	S.11 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi, dan	Mengembangkan sistem pemerintahan yang	Menerapkan sistem perencanaan, pemprograman, pendanaan dan pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi yang terpadu

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
kualitas pelayanan publik	kinerja pemerintahan	akuntabel dan transparan	Mengembangkan sistem manajemen pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, efektif, efisien, dan rasional
			Melakukan penataan organisasi pemerintah daerah
			Meningkatkan sistem pengendalian dan pengawasan internal pemerintah
			Meningkatkan pengelolaan aset daerah
			Meningkatkan penerimaan sektor PAD
			Meningkatkan pengelolaan arsip daerah
	S.12 Meningkatnya mutu aparatur sipil negara	Melakukan percepatan peningkatan mutu aparatur sipil negara	Melakukan pendidikan dan pelatihan kepada ASN
			Melakukan magang ASN pada skala nasional
			Melakukan penataan pada sistem tenaga Kontrak Daerah di lingkungan pemerintah kota
	S.13 Meningkatnya kinerja pelayanan publik	Melakukan percepatan peningkatan kinerja pelayanan publik dan hadir melayani	Menerapkan standar pelayanan berkualitas dan berstandar internasional
			Mengembangkan sistem pelayanan publik yang cepat dan akurat
			Membentuk desa untuk menjamin hadirnya pelayanan pemerintah di pelosok wilayah
	S.14 Pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi	Mendorong hadirnya inovasi pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya	Menghadirkan inovasi pada setiap OPD (Satu OPD Lima Inovasi)
		Melakukan percepatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintahan	Menerapkan konsep *smart city* pada tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan sektor lainnya

Membangun Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
	S.15 Meningkatnya penataan regulasi daerah	Mempercepat penataan regulasi daerah	Melakukan penataan regulasi daerah
			Meningkatkan pembangunan hukum

Untuk mencapai kesesuaian antara kebijakan ekonomi nasional dan daerah, diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti forum koordinasi pembangunan, penyusunan rencana pembangunan yang partisipatif, serta monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang diterapkan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Kesesuaian arah kebijakan ekonomi nasional dan daerah tidak hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. Dengan adanya sinergi yang baik, setiap daerah dapat berkembang sesuai dengan potensinya, sambil tetap berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional

Di tingkat daerah, kebijakan ekonomi harus disesuaikan dengan kondisi spesifik masing-masing wilayah. Setiap daerah memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda, sehingga kebijakan yang diterapkan harus mampu mengakomodasi perbedaan tersebut. Kesesuaian Arah kebijakan Ekonomi Nasional dengan Provisi Sulawesi Tengah dan Kota Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.4
Kesesuaian Arah Kebijakan Ekonomi Nasional, Sulawesi Tengah dan Kota Palu 2025

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
Swasembada Pangan	Menjalankan agenda reformasi agraria untuk memperbaiki kesejahteraan petani dalam arti luas sekaligus mendukung peningkatan produksi di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan;	Melaksanakan agenda Reformasi Agraria untuk meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas unggulan daerah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan	Meningkatkan ketahanan pangan daerah
	Memperkuat industri pupuk dalam negeri dan mempercepat pengembangan industri pupuk bio;	Meningkatkan produksi tanaman pangan, hortikultura perkebunan organik, pupuk organik dan pengembangan industri produksi berwawasan ramah lingkungan	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal
	Meningkatkan produktivitas pertanian melalui peningkatan sarana prasarana pendukung pertanian rakyat, teknologi pangan terpadu, mekanisasi pertanian, inovasi digital (digital farming), memperbaiki tata kelola dan rantai nilai hasil pertanian;	Meningkatkan produktivitas dan produksi hasil pertanian melalui mekanisasi, pengawasan sarana dan prasarana, smart farming/smart village serta teknologi pangan dan penataan tata niaga hasil-hasil pertanian, pemanfaatan dan pengelolaan limbah hasil pertanian.	Meningkatkan klaster industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	Memperkuat tata kelola sistem pangan melalui penguatan satu data pangan yang terintegrasi dengan satu data Indonesia, stabilisasi rantai pasok dan rantai nilai, serta peningkatan pengelolaan susut dan sisa/limbah pangan.	Meningkatkan produktivitas dan produksi hasil pertanian melalui mekanisasi, pengawasan sarana dan prasarana, smart farming/smart village serta teknologi pangan dan penataan tata niaga hasil-hasil pertanian, pemanfaatan dan pengelolaan limbah hasil pertanian.	Meningkatkan klaster industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi
	Mengutamakan produksi pangan pokok dalam negeri dan mengendalikan impor untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga di tingkat petani, terutama di saat panen raya;	Mengendalikan persentase daerah rawan pangan melalui distribusi merata hasil produksi pangan daerah, mengendalikan alih fungsi lahan, menjaga harga komoditas di tingkat petani dan mengendalikan inflasi	Meningkatkan ketahanan pangan daerah
	Merevitalisasi lahan rusak menjadi lahan produktif untuk mendukung kemandirian dan ketahanan pangan nasional;	Mengendalikan persentase daerah rawan pangan melalui distribusi merata hasil produksi pangan daerah, mengendalikan alih fungsi lahan, menjaga harga komoditas di tingkat petani dan mengendalikan inflasi	Meningkatkan ketahanan pangan daerah

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	Memberdayakan dan memperkuat peran dan fungsi Badan Pangan Nasional, Badan Urusan Logistik, bersama Badan Usaha Milik Negara holding pangan ID Food sebagai regulator dan produsen pangan pokok yang strategis, baik untuk peningkatan produksi berkesinambungan, pertumbuhan ekspor, dan upaya stabilisasi harga kebutuhan pokok dan komoditas pertanian strategis lainnya;	Meningkatkan fungsi kelembagaan pangan daerah Satgas Pangan, koperasi pangan, kios pangan dan BUMDES untuk membantu peningkatan produksi berkesinambungan, meningkatkan nilai tambah produk serta meningkatkan nilai ekspor komoditas.	Meningkatkan klaster industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi
	Menjamin pembiayaan untuk petani, peternak dan nelayan melalui bank, koperasi, dan lembaga pembiayaan non-bank lainnya, termasuk start-up untuk mendukung akses dengan mudah dan cepat dalam memperkuat struktur permodalan, menjamin keberlangsungan usaha, pengembangan usaha, dan memperluas cakupan asuransi untuk petani, peternak dan nelayan;	Memberikan penjaminan (asuransi) beresiko iklim terhadap petani, pekebun, peternak dan nelayan dengan bekerja sama kepada off taker, bank, koperasi, bumdes serta pembiayaan non-bank lainnya serta mendukung usaha start-up melalui program petani milenial untuk memperkuat pemodalan dan keberlanjutan usaha	Meningkatkan klaster industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	Melanjutkan dan menyempurnakan program kawasan sentra produksi pangan atau food estate secara berkelanjutan, terutama untuk komoditas padi, jagung, singkong, kedelai, dan tebu;	Membangun Kawasan Pangan Nusantara (KPN) sesuai kluster AGROPOLITAN BOLIPAMUSO (Kabupaten Buol, Tolitoli, Parigi Moutong, Poso) dan KPN di Kabupaten Buol, Toli-Toli, Sigi dan Donggala untuk komoditas padi, jagung, kelapa dalam dan kakao dengan memanfaatkan lahan terbengkalai, lahan rusak dan fungsionalisasi LP2B (Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan)	Meningkatkan klaster industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi
	Merevitalisasi dan membangun sebagian besar hutan rusak untuk dimanfaatkan menjadi lahan untuk aren untuk bioetanol untuk mendukung pencapaian kedaulatan energi nasional. Diantaranya akan ditanam pula ubi kayu, ubi jalar, sagu, sorgum, dan kelapa dengan sistem tumpang sari untuk tambahan pangan nasional	Membangun Kawasan Pangan Nusantara (KPN) sesuai kluster AGROPOLITAN BOLIPAMUSO (Kabupaten Buol, Tolitoli, Parigi Moutong, Poso) dan KPN di Kabupaten Buol, Toli-Toli, Sigi dan Donggala untuk komoditas padi, jagung, kelapa dalam dan kakao dengan memanfaatkan lahan terbengkalai, lahan rusak dan fungsionalisasi LP2B (Lahan Pangan dan Pertanian Berkelanjutan)	Meningkatkan klaster industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	Memastikan kedaulatan pangan berbasis protein ikan (blue food) melalui peningkatan kualitas dan kuantitas input produksi (antara lain benih, bibit, pupuk, pakan, dan bahan bakar minyak), sarana prasarana produksi, sarana prasarana pascapanen, sistem rantai dingin dan pengolahan, serta pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal dan/atau unggulan serta penerapan perikanan berkelanjutan (perikanan berbasis kuota dan transformasi akuakultur)	Membangun pelabuhan perikanan pantai (PPP), Industri perikanan halal, Mengembangan kluster wisata bahari dan perikanan BALATOJU (Banggai, Banggai Laut, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una) mendukung pengembangan kawasan berbasis komoditas lokal, penerapan sistem rantai dingin dan pengelolaan perikanan terukur	Meningkatkan klaster industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi
	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penganekaragaman konsumsi pangan, biofortifikasi dan fortifikasi pangan, dan pangan lokal;	Meningkatan aksesibilitas dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) melalui peningkatan diversifikasi pangan lokal, biofortifikasi dan fortifikasi pangan.	Meningkatkan ketahanan pangan daerah
	Menjamin mutu, keamanan dan ketelusuran pangan melalui	Meningkatan aksesibilitas dari aspek ketersediaan, keterjangkauan dan	Meningkatkan ketahanan pangan daerah

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	penguatan infrastruktur pengawasan-pengujian pangan;	pemanfaatan pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman) melalui peningkatan diversifikasi pangan lokal, biofortifikasi dan fortifikasi pangan.	
	Mempercepat transisi energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia (super power) dalam bidang energi baru dan terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy)	Melakukan transisi energi dengan mencari sumber-sumber energi baru terbarukan (renewables) dan energi berbasis bahan baku nabati (bioenergy)	Memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan
	Mengembalikan tata kelola migas dan pertambangan nasional sesuai amanat konstitusi, terutama Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;	Melakukan upaya pemanfaatan sumber-sumber cadangan energi sumber baru dalam rangka ketahanan energi sesuai dengan kewenangan daerah provinsi	Memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan
	Memperbaiki skema insentif untuk mendorong aktivitas temuan cadangan sumber energi baru untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional;	Melakukan upaya pemanfaatan sumber-sumber cadangan energi sumber baru dalam rangka ketahanan energi sesuai dengan kewenangan daerah provinsi	Memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	Mendirikan kilang minyak bumi, pabrik etanol, serta infrastruktur terminal penerima gas dan jaringan transmisi/distribusi gas, baik oleh Badan Usaha Milik Negara atau swasta.	Melakukan upaya pemanfaatan sumber-sumber cadangan energi sumber baru dalam rangka ketahanan energi sesuai dengan kewenangan daerah provinsi	Memanfaatkan fasilitas pengolahan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan
Swasembada Air	Penyediaan tampungan dan pasokan air berkelanjutan untuk kegiatan sosial ekonomi produktif sebagai bagian dari pengelolaan air sehingga tidak menjadi bencana pada saat musim hujan dan kekurangan pada saat musim kemarau.	Penyediaan embung, peningkatan fungsionalisasi irigasi dan bendungan serta pompanisasi sebagai langkah mengantisipasi kemarau panjang dan bencana banjir yang dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan	Meningkatkan kualitas system jaringan sumber daya air
	Peningkatan kinerja layanan irigasi multikomoditas untuk mendukung ketahanan pangan lokal, peningkatan produktivitas, dan swasembada pangan yang ditempuh dengan pengembangan dan pengelolaan irigasi serta inisiasi modernisasi irigasi.	Penyediaan embung, peningkatan fungsionalisasi irigasi dan bendungan serta pompanisasi sebagai langkah mengantisipasi kemarau panjang dan bencana banjir yang dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi pertanian, perkebunan dan kehutanan	Meningkatkan kualitas system jaringan sumber daya air
	Penyempurnaan tata kelola infrastruktur sumber daya air	Perbaikan tata kelola air dari hulu ke hilir yang terintegrasi, normalisasi aliran sungai,	Meningkatkan kualitas system jaringan sumber daya air

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	yang terintegrasi dari hulu ke hilir; serta	pengelolaan sampah sungai dan laut serta mengendalikan pencemaran air dari limbah industri dan rumah tangga	
	Revitalisasi daerah aliran sungai, menjaga kebersihan sungai, dan sekaligus mengamankan kualitas air permukaan dari polusi yang salah satunya bersumber dari air limbah domestik rumah tangga.	Perbaikan tata kelola air dari hulu ke hilir yang terintegrasi, normalisasi aliran sungai, pengelolaan sampah sungai dan laut serta mengendalikan pencemaran air dari limbah industri dan rumah tangga	Meningkatkan kualitas system jaringan sumber daya air
Ekonomi Syariah	Penguatan industri halal, diantaranya dengan peningkatan halal value chain, penguatan promosi industri halal, dan pengembangan pariwisata ramah muslim	Penjaminan produk halal melaui labelisasi halal, industri perikanan halal, promosi produk dan pariwisata halal (hotel, restauran)	Mengembangkan destinasi pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, atraksi wisata, amenitas, dan akomodasi
	Penguatan ekspor halal dan kerja sama ekonomi syariah internasional	Penjaminan produk halal melaui labelisasi halal, industri perikanan halal, promosi produk dan pariwisata halal (hotel, restauran)	Mengembangkan destinasi pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, atraksi wisata, amenitas, dan akomodasi
	Penguatan ekosistem usaha mikro kecil menengah halal melalui dukungan fasilitasi sertifikasi halal untuk pelaku usaha mikro kecil menengah	Peningkatan skala UMKM halal melalui penerbitan sertifikasi bagi pelaku UMKM, peningkatan industri pengolahan yang halal, saniter	Mengembangkan destinasi pariwisata melalui peningkatan aksesibilitas, atraksi wisata, amenitas, dan akomodasi

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	dan penguatan infrastruktur pendukung usaha mikro kecil menengah halal;	dan hiegienis dalam rangka proses pengolahan halal	
	Penguatan keuangan syariah, meliputi penguatan lembaga keuangan syariah (perbankan syariah, industri keuangan nonbank syariah termasuk penyempurnaan peran bank wakaf), dan penguatan pasar modal syariah	Meningkatkan kerjasama dengan Bank Keuangan Syariah dalam pengelolaan modal-modal daerah, meningkatkan peran BAZNAS daerah, penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penguatan regulasi dan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah daerah dan dukungan pelaku ekonomi syariah.	Mengembangkan kerjasama ekonomi antar daerah dan badan usaha
	Penguatan dana sosial syariah (zakat, infaq, sedekah dan wakaf). Keseluruhan upaya di atas didukung oleh penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penyediaan insentif yang diperlukan, penguatan regulasi dan kelembagaan terkait ekonomi dan keuangan syariah baik di tingkat pusat dan daerah, serta penguatan dukungan bagi pelaku ekonomi syariah baik	Meningkatkan kerjasama dengan Bank Keuangan Syariah dalam pengelolaan modal-modal daerah, meningkatkan peran BAZNAS daerah, penguatan pendidikan dan penelitian ekonomi syariah, penguatan regulasi dan kelembagaan ekonomi dan keuangan syariah daerah dan dukungan pelaku ekonomi syariah.	Mengembangkan kerjasama ekonomi antar daerah dan badan usaha

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	dari badan usaha milik negara dan swasta nasional.		
Ekonomi Digital	Melakukan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai salah satu jalan utama dalam memperkuat perekonomian Indonesia dan menghasilkan manfaat sosio ekonomi yang lebih luas bagi komunitas dan masyarakat.	Melakukan program smart village dalam rangka digitalisasi tingkat desa untuk pemanfaatan teknologi informasi bagi masyarakat pedesaan untuk memberikan manfaat kemudahan dalam peningkatan usaha ekonomi dan sosial	Mengembangkan inkubator bisnis berbasis digital
	Mengembangkan sistem pembiayaan alternatif usaha mikro, kecil, dan menengah melalui digitalisasi keuangan serta program pembiayaan ultra mikro	Melakukan program smart economy yang berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan usaha mikro menengah dan kemampuan mencapai pasar yang didukung oleh regulasi pasar (pengaturan off-taker) dan pemberian insentif bagi off-taker/investor yang memiliki kinerja yang baik	Mengembangkan inkubator bisnis berbasis digital
	Menciptakan iklim investasi yang kondusif di bidang ekonomi digital. Hal ini dapat dilakukan dengan menyederhanakan regulasi dan	Melakukan program smart economy yang berbasis teknologi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan usaha mikro menengah dan kemampuan	Mengembangkan inkubator bisnis berbasis digital

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	memberikan insentif bagi investor asing,	mencapai pasar yang didukung oleh regulasi pasar (pengaturan off-taker) dan pemberian insentif bagi off-taker/investor yang memiliki kinerja yang baik	
Ekonomi Hijau	Mendorong pendidikan yang membantu peningkatan literasi digital untuk mendukung digitalisasi ekonomi.	Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi yang memanfaatkan SDA dengan mempertimbangkan SDA yang berkelanjutan	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal
		Menerapkan efisiensi pemanfaatan SDA; mengembangkan produk ramah lingkungan; menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; menguatkan ekosistem daur ulang; mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan.	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal
	Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi berputar (circular economy) dan menerapkan ekonomi sirkular industry.	Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal (local wisdom), peningkatan pengelolaan sampah di sungai dan laut; meningkatkan fasilitas	Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat kelurahan dan RT/RW

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
		pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle.	
	Menerapkan efisiensi sumber daya, mengembangkan produk ramah lingkungan, menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material, menguatkan ekosistem daur ulang, mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan;	Peningkatan pengelolaan sampah di sungai dan laut, optimalisasi TPST, perbaikan tata kelola persampahan, mengampanyekan budaya ramah lingkungan dan sampah daur ulang.	Meningkatkan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat kelurahan dan RT/RW
	Melindungi keanekaragaman hayati flora dan fauna berdasarkan kearifan lokal sebagai bagian dari aset bangsa, peningkatan pengelolaan sampah di hulu dengan mengurangi dan memilah sampah di sumber, meningkatkan fasilitas pengolahan berbasis reduce, reuse, dan recycle.	Pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarakat, pemanfaatan hutan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat dan pemanfaatan skema kerjasama pelaku usaha ekonomi yang dapat memanfaatkan produk hasil hutan	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal
	Peningkatan pengelolaan sampah di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, optimalisasi tempat pengolahan sampah	Mendorong dan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi yang memanfaatkan SDA	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	terpadu, konservasi tempat pembuangan akhir dan landfill mining, perbaikan tata kelola persampahan, mengampanyekan budaya ramah lingkungan seperti mengganti penggunaan kantong plastik dengan bahan yang ramah lingkungan dan bisa daur ulang.	dengan mempertimbangkan SDA yang berkelanjutan	
	Meningkatkan pemanfaatan kawasan hutan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dengan melibatkan kelompok masyarakat (skema Perhutanan Sosial) dan badan usaha (skema Multi Usaha Kehutanan).	Menerapkan efisiensi pemanfaatan SDA; mengembangkan produk ramah lingkungan; menerapkan guna ulang dan perpanjangan masa pakai produk dan material; menguatkan ekosistem daur ulang; mencegah dan menindak tegas pelaku pencemaran, perusakan lingkungan, dan pembakaran hutan.	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal
Ekonomi Biru	Menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru dan diplomasi maritim, melalui antara lain penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan,	Menguatkan tata kelola ekosistem ekonomi biru melalui penyederhanaan perizinan, fasilitasi akses pendanaan, penguatan kelembagaan pelaku usaha kelautan dan perikanan, pengembangan kawasan strategis dan mina bahari	Mengembangkan sistem inovatif dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan perizinan pembangunan

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	pengembangan kawasan strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi maritim, blue finance dan good neighbor policy;	sebagai pusat pertumbuhan ekonomi maritim.	
	Meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan, penanganan sampah laut, dan rehabilitasi pesisir, melalui identifikasi dan pencadangan kawasan konservasi perairan baru di daerah, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, penyadartahuan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil terkait dampak sampah laut, serta rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun.	Meningkatkan kesehatan laut yang mencakup pengelolaan ekosistem dan kawasan konservasi perairan dan rehabilitasi pesisir, peningkatan kapasitas kompetensi pengelola kawasan konservasi dengan jejaring dan kemitraan, pembangunan sarana prasarana pengolahan dan penanganan sampah laut di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan rehabilitasi ekosistem mangrove, terumbu karang, dan lamun.	Meningkatkan pemantauan, penegakan aturan tentang pengendalian dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	Mengembangkan industrialisasi perikanan yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan, mencakup antara lain peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya, rumput laut, dan garam melalui pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi;	Mengembangkan industrialisasi perikanan modern dan terpadu melalui upaya peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan hilirisasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan termasuk perikanan tangkap, perikanan budidaya dan rumput laut, pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing serta penguatan sistem rantai dingin dan efisiensi rantai pasok produksi.	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal
	Menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, terutama industri perkapalan dan garam, antara lain melalui penguatan sarana dan prasarana industri garam, pengembangan industri galangan kapal, dan penguatan rantai pasok bahan baku industri perkapalan;	Menguatkan industri manufaktur berbasis kelautan, industri rumput laut (carageenan), industri ikan beku dan pengelolaan cumi dan gurita yang berkelanjutan	Meningkatkan pengembangan industri pengolahan berbasis potensi lokal
	Menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan,	Menguatkan sistem transportasi, logistik, dan perdagangan jalur perairan,	Mengembangkan sistem jaringan transportasi perkotaan berbasis jalan yang

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	termasuk untuk peningkatan konektivitas di sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan, pulau-pulau kecil dan terluar;	melalui peningkatan konektivitas sentra-sentra produksi kelautan dan perikanan terhadap pasar	terpadu, aman dan ramah lingkungan
	Mengembangkan destinasi pariwisata berbasis bahari dan danau serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan melalui peningkatan perkuatan sarana dan prasarana pariwisata bahari, penguatan keterampilan dan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan usaha dan investasi, memperkuat pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan, meningkatkan investasi pariwisata berkelanjutan, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat keberlanjutan dan ketahanan rantai pasok pariwisata.	Mengembangkan Wisata Bahari dan Danau (Lindu, Poso) serta pemanfaatan jasa kelautan berkelanjutan, peningkatan keterampilan dan kapasitas SDM Wisata, peningkatan usaha dan investasi, mengembangkan pariwisata bahari berbasis masyarakat berkelanjutan, dan memperkuat rantai nilai pariwisata bahari dan danau.	Mengembangkan industri wisata yang tersegmentasi dan inklusif
	Meningkatkan kapasitas dan optimalisasi pemanfaatan iptek dan inovasi untuk peningkatan produktivitas ekonomi biru,	Meningkatkan kemampuan pemanfaatan iptek dan inovasi untuk tujuan ekonomi biru, peningkatan SDM maritim,	Meningkatkan klaster industri, kemitraan, dan pemanfaatan teknologi

ARAH KEBIJAKAN EKONOMI	NASIONAL	SULAWESI TENGAH	KOTA PALU
	serta peningkatan sumber daya manusia maritim, melalui perbaikan sistem pendidikan terutama terkait science, technology, engineering, art, and mathematics, penyusunan rencana terpadu dan fasilitasi pelaksanaan untuk pengembangan, alih teknologi dan adopsi teknologi, meningkatkan investasi untuk pendidikan dan riset berkualitas, serta penguatan faktor-faktor pendukung pembangkitan energi terbarukan dan lepas pantai, perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan, serta penguatan konektivitas maritim untuk mendukung rantai pasok nasional dan global.	dengan perbaikan sarana dan prasarana sekolah vokasional kemaritiman, adopsi teknologi kemaritiman, investasi pendidikan dan riset berkualitas, peningkatan produksi perikanan tangkap dan budi daya, rumput laut dan hilirisasinya, konservasi dan kelestarian biodiversitas kelautan serta penguatan rantai nilainya.	

1.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Kota Palu Tahun 2025 diselaraskan sesuai kewenangan Pemerintah Kota Palu untuk mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 Undang-Undang, pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM);
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



Gambar 4.4
Arahan Utama Presiden

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam 8 (delapan) Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM: Memperkuat nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara: Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan Lapangan kerja yang berkualitas, mendorong keweirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmkur.

Adapun Prioritas Nasional Tahun 2025 memilliki sasaran Pembangunan dengan indikator sasaran sebagai berikut :

PN 1 Memiliki sasaran Pembangunan

Indeks Demokrasi Indonesia

PN 2 Memiliki sasaran Pembangunan :

1. Asia Power Index (Military Capability)
2. Asia Power Index (Diplomatic Influence)
3. Proporsi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)
4. Prevelensi ketidakcukupan konsumsi pangan (PoU) (%)
5. Indeks ketahan energi
6. Kapasitas tampungan air (m3/kapita)
7. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)
8. Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)

9. Indeks daya saing digital di Tingkat global
10. Indeks ekonomi hijau
11. Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)
12. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)
13. Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati
14. Indeks kualitas lingkungan hidup
15. Presentase penurunan emisi GRK
    - Tahunan (%)
    - Kumulatif (%)

PN 3 Memiliki sasaran Pembangunan :

1. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)
2. Rasio kewirausahaan (%)
3. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)
4. Rasio PDB pariwisata (%)
5. Devisa pariwisata (miliar USD)
6. Proporsi PDB ekonomi kreatif (%)
7. Aset perbankan/PDB (%)
8. Aset dana pension/PDB (%)
9. Aset asuransi/PDB (%)
10. Kapitalis pasar modal/PDB (%)
11. Total kredit/PDB (%)
12. Inklusi keuangan (%)

PN 4 Memiliki sasaran Pembangunan

1. Hasil Pembelajaran :
    a. Rata – rata nilai PISA
        - Membaca
        - Matematika
        - Sains
    b. Rata – rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)
    c. Harapan lama sekolah (tahun)

2. Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)
3. Presentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)
4. Tingkat penguasaan iptek :
   a. Pengeluaraan iptek dan inovasi (% PDB)
   b. Peringkat indeks inovasi global
5. Tingkat pengangguran terbuka (%)
6. Tingkat partisipasi Angkatan kerja Perempuan (%)
7. Usia harapan hidup (tahun)
8. Kesehatan ibu dan anak
   a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
   b. Prevelensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
9. Insidensi tuberculosis (per 100.000 penduduk)
10. Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)
11. Indeks Pembangunan kualitas keluarga (IPKK)
12. Indeks ketimpangan gender (IKG)

PN 5 Memiliki sasaran Pembangunan :

1. Rasio PDB industri pengolahan (%)
2. Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)
3. Ekspor barang dan jasa (% PDB)
4. Biaya logistic (% PDB)

PN 6 Memiliki sasaran Pembangunan :

1. Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk (%)
2. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)
3. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)
4. Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)
5. Persentase desa mandiri (%)

6. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%)

PN 7 Memiliki sasaran Pembangunan :

1. Return On Asset (ROA) BUMN (%)
2. Indeks integritas nasional
3. Indeks Materi hukum
4. Indeks pelayanan public
5. Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik
6. Indeks persepsi korupsi
7. Indeks pembanguna hukum
8. Rasio perpajakan terhadap PDB (%)
9. Tingkat inflansi (%)

PN 8 Memiliki sasaran Pembangunan :

1. Indeks Pembangunan kebudayaan (IPK)
2. Indeks kerukunan umat beragama (IKUB)
3. Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relative terhadap PDB (%)

4.2.2. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005–2025 disebutkan bahwa visi Provinsi Sulawesi Tengah adalah Sulawesi Tengah Yang Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berkeadilan.

Rangkaian kata–kata kunci dalam visi ini dapat dibentuk menjadi satu akronim Juri Teradil. Juri Teradil memberi makna bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang memberi maslahat bagi masyarakat Sulawesi Tengah dibutuhkan tidak hanya sekedar kecerdasan tetapi kearifan dan sifat bijaksana. Dengan demikian menunjukan bahwa pembangunan di Sulawesi Tengah harus dituntun oleh kemampuan dan

kejernihan hati nurani atau moralitas yang prima dari setiap individu dan masyarakat Sulawesi Tengah.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan serangkaian misi pembangunan jangka panjang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
3. Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah;
4. Meningkatkan kualitas kelembagaan pemerintah, kelembagaan politik, sosial budaya, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya;
5. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;

Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD Tahap Pertama dan Kedua, maka RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 mengusung Visi “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”. Untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar;
2. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM;
3. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;
4. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah;
5. Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan;
6. Menjaga Harmonisasi Manusia dan Alam, antar Sesama Manusia sebagai Wujud Pembangunan Berkelanjutan;

7. Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi Bertetangga;
8. Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital; dan
9. Mendorong pembentukan Daerah Otonom Baru agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.

Sinkronisasi serta keterkaitan antar berbagai prioritas dan hierarki pembangunan diperlukan agar, arah penanganan dapat fokus pada hasil (*outcome*). Keterkaitan antara agenda RPJMN 2020-2024 dan prioritas pembangunan Provinsi Sulawei Tengah, hubungannya dengan prioritas pembangunan Kota Palu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 4.5
Keterkaitan Agenda Pembangunan Nasional dengan Prioritas Pembangunan Kota Palu dan Provinsi Sulawesi Tengah

No	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2021-2026
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan daya saing produk dan komoditas unggulan daerah yang berdampak pada peningkatan nilai tambah dan pendapatan masyarakat	Ekonomi Mantap Berdaya Saing
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah.	Infrastruktur Mantap Berketahanan Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Penguatan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing	SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter Pemerintahan Mantap Melayani

No	Agenda Pembangunan Nasional 2020-2024	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Palu 2021-2026
		sebagai motor penggerak utama perekonomian	
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Pemerintahan Mantap Melayani SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Memperkuat konektivitas antar wilayah dan infrastruktur dasar untuk mengurangi kesenjangan wilayah.	Infrastruktur Mantap Berketahanan Ekonomi Mantap Berdaya Saing Lingkungan Mantap Berkelanjutan
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Lingkungan Mantap Berkelanjutan Infrastruktur Mantap Berketahanan
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Percepatan Reformasi Birokrasi	Pemerintahan Mantap Melayani Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter

Sumber: RPJMN 2020-2024, RKPD Provinsi Sulawesi Tengah 2024, dan RPJMD Kota Palu 2021-2026

Prioritas pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus sangat mempengaruhi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan mempunyai daya ungkit bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Dengan demikian, tema pembangunan adalah "Percepatan Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan Berbasis Komoditas Unggulan Yang Didukung Sumber Daya Manusia Yang

Berdaya Saing" atau "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan Yang Ditunjang Oleh SDM Yang Berdaya Saing" dengan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketertiban hukum dan demokrasi yang substansial ;

   Pembangunan Demokrasi diarahkan pada terwujudnya demokrasi substansial yang mengemban amanat rakyat. Demokrasi substansial akan dilaksanakan melalui arah kebijakan berikut:

   a. Peningkatan kualitas kesetaraan dan kebebasan dalam masyarakat;
   b. Pengarusutamaan pengamalan nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
   c. Penguatan dan pencegahan pemanfaatan politik identifas;
   d. penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi melalui penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi regulasi, serta penguatan kajian urgensi regulasi dengan menggunakan metode analisis dalam pembentukan regulasi, dan peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi melalui pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, penataan proses bisnis regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu dalam setiap proses pembentukan regulasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan regulasi, serta pembentukan basis data tunggal sebagai referensi utama statistik regulasi;
   e. Penguatan komunikasi publik yang merata, adil, berdaulat, dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat; dan
   f. Peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, di antaranya melalui perluasan dan perlindungan ruang sipil untuk memperkuat keberlanjutan peran masyarakat sipil dalam advokasi, pemberdayaan, dan kontrol sosial.

2. Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya;

   Penerapan transformasi ekonomi ditujukan agar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan agar berkelanjutan. Penerapan ekonomi hijau juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru melalui peningkatan peluang kerja, investasi hijau dan pengembangan produk-produk hijau. Arah kebijakan penerapan ekonomi hijau berlandaskan pada pelaksanaan Pembangunan Rendah Karbon yang meliputi:

   a. Peningkatan efisiensi energi dan percepatan transisi energi menuju pemanfaatan energi baru terbarukan;
   b. Transisi energi secara berkeadilan dengan menyiapkan keahlian dan kesempatan kerja baru, termasuk pengembangan ekosistem dan insentif, khususnya untuk daerah penghasil energi fosil;
   c. Pengembangan smart grid termasuk jaringan interkoneksi dalam dan antar pulau serta sistem terisolasi (isolated grid);
   d. Pengembangan eknologi sistem penyimpanan energi (battery/energy storage system);
   e. Pengembangan transportasi ramah lingkungan;
   f. Penerapan ekonomi sirkular;
   g. Pengelolaan hutan lestari dan lahan pertanian serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan;
   h. Perkuatan implementasi sistem insentif dan disinsentif fiskal ataupun non fiskal untuk mendorong produk-produk hijau, melalui pengembangan green financing dan penerapan carbon pnctng untuk mendukung investasi hijau, serta
   i. Penerapan prinsip ekonomi hijau di setiap sektor.

3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah.

Dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kelompok pendapatan, serta kelompok rentan melalui kebijakan:

a. Mendukung pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang;
b. Sulawesi Tengah bebagai Penopang IKN;
c. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah PASIGALA (Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi): (i) Pengembangan kawasan pemukiman penyangga disebagian Kabupaten Sigi dan sebagian Kabupaten Donggala, (ii) Peningkatan sistem jaringan pergerakan regional, (iii) Pengembangan sarana dan parasarana pemukiman regional di Kabupaten Donggala, (iv) Pengembangan jaringan sumberdaya air sebagai pengurangan resiko bencana likuifaksi;
d. Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Klaster Agropolitan Bolipamuso dan KPN: (i) Hulu pengembangan pertanian berada di Kabupaten Buol, Kabupaten Tolitoli, sebagian Kabupaten Sigi, sebagian Kabupaten Parigi Moutong, dan sebagian Kabupaten Donggala; (ii) Hilir produksi pertanian berupa pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan serta pemasaran berada di pusat kegiatan yaitu Parigi Moutong sebagai agroindustri; dan Poso sebagai sentra agribisnis dan sentra agrowisata;
e. Peningkatan aksesibilitas jalur Agropolitan Bolipamuso dan Agropolitan Kawasan Pangan Nusantara;
f. Pengembangan infrastruktur pendukung agropolitan, agroindustri, agribisnis dan agrowisata;
g. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah;

h. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan dalam proses penyediaan perumahan;

i. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan;

j. Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting.

4. Peningkatan produktifitas UMKM dan koperasi.

Peningkatan produktifitas UMKM dan Koperasi sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang berdaya, sehingga arah kebijakan untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah :

a. Peningkatan daya saing sektor tradisional untuk pertumbuhan berkelanjutan (sektor pertanian, perkebunan, perikanan budidaya, perikanan tangkap, dan pariwisata).

b. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.perkebunan, perikanan, pertanian, dan pariwisata.

c. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.

d. Peningkatan pengembangan IPTEKIN menuju komersialisasi oleh industry;

e. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan.

5. Peningkatan SDM yang berdaya Saing.

Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah mampu bersaing secara Nasional. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2023 baru mencapai 71,66, sedangkan target pada tahun 2025 yaitu 72,12 - 75,50 sehingga memerlukan upaya peningkatan diantaranya pada

aspek kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan. Kualitas pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah ditunjukkan oleh Angka Rata- Rata Lama Sekolah pada tahun 2023 yaitu 8,96 tahun, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 13,33 tahun. Permasalahan utama pendidikan ditandai dengan belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.

Menguatkan peran Perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, mencakup (a) penguatan kapasitas dan keterampilan kelyarga dalam melaksanakan fungsinya, termasuk pengasuhan dan perawatan, (b) penyediaan fasilitas pendukung keluarga, (c) penguatan hak sipil, hukum dan ekonomi keluarga, serta afirmasi bagi keluarga rentan, (d) pemenuhan hak anak secara universal, (e) perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan, termasuk perkawinan anak, (f) peningkatan partisipasi anak secara bermakna dan pewujudan lingkungan yang ramah anak; (g) penguatan resiliensi anak dan karakter pemuda untuk mencegah timbulnya perilaku berisiko; (h) penguatan kapasitas, kemandirian, serta kepemimpinan pemuda dan perempuan; (i) peningkatan partisipasi aktif perempuan dan pemuda di ketenagakerjaan, politik, dan ekonomi; (j) penguatan penyelenggaraan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial di proses pembangunan; (k) penghormatan dan perlindungan terhadap penyandang disabilitas dan lansia; (l) mempercepat penerbitan peraturan pemerintah yang belum lengkap, petunjuk pelaksana, dan petunjuk teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; (m) mengintensifkan dan memperluas program peningkatan kesadaran publik untuk tidak memarjinalkan dan merendahkan serta memberikan kesempatan yang sama untuk dapat maju dan berkembang bagi kelompok penyandang disabilitas; (n) mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum; (o) memperluas program pendidikan

formal maupun nonformal yang bersifat inklusif, aplikatif, dan humanis agar segenap potensi diri setiap individu penyandang disabilitas dapat dikembangkan; (p) meningkatkan dan memperluas akses pelayanan pendidikan, pekerjaan, kesehatan, transportasi, mendapatkan informasi, berkomunikasi, dan berpartisipasi politik penyandang disabilitas dalam setiap aspek kehidupan dalam masyarakat; (q) mendorong perusahaan-perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara untuk memberikan kuota lowongan pekerjaan bagi penyandang disabilitas; (r) membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur yang ramah bagi penyandang disabilitas; serta (s) memperluas program-program perlindungan kelompok difabel dari berbagai macam bentuk stereotype, pelecehan, kekerasan, dan perlakuan yang tidak semestinya di masyarakat.

6. Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

   Pengembangan wilayah sebagai pusat pertembuhan ekonomi diperlukan investasi yang tinggi dan berkualitas dimulai dari Kawasan perkotaan dan perdesaan. Peningkatan produktivitas perekonomian yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan, yang diarahkan pada :

   a. Peningkatan peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif;
   b. Pengembangan kawasan perdesaan dan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan meperhatikan daya dukung dan daya tampung;
   c. investasi berorientasi ekspor yang dapat mengembangkan keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif serta meningkatkan partisipasi dalam rantai produksi.

7. Meningkatkan Tata kelola pemerintahan

Permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundangundangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Arah kebijakan difokuskan pada :

a. Penyederhanaan regulasi dan peningkatan kualitas regulasi melalui penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi regulasi, serta penguatan kajian urgensi regulasi dengan menggunakan metode analisis dalam pembentukan regulasi, dan peningkatan kualitas kelembagaan regulasi dan tata kelola pembentukan regulasi berbasis teknologi informasi melalui pembentukan lembaga tunggal pengelola regulasi, penataan proses bisnis regulasi dan pemanfaatan teknologi informasi secara terpadu dalam setiap proses pembentukan regulasi mulai dari perencanaan hingga evaluasi pelaksanaan regulasi, serta pembentukan basis data tunggal sebagai referensi utama statistik regulasi.;
b. Pemetaan proses bisnis tematik berdasarkan isu prioritas dan pengembangan sistem manajemen kinerja pembangunan yang berdasarkan shared outcomes. Dalam mewujudkan manajemen talenta, arah kebijakan difokuskan pada penguatan manajemen talenta ASN di seluruh perangkat daerah melalui pembangunan talent pool dengan pembangunan sistem informasi manajemen talenta dan satu data manajemen talenta, penuntasan asesmen kompetensi, penguatan manajemen kinerja dan pengembangan kompetensi ASN, serta perbaikan kebijakan penghargaan bagi ASN;
c. Mewujudkan manajemen ASN untuk mendukung sektor/bidang strategis difokuskan pada penataan manajemen ASN sektor pelayanan dasar melalui restrukturisasi kewenangan pengelolaan

guru serta tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk mewujudkan pemerataan kualitas pelayanan;

d. Mewujudkan layanan publik yang berkualitas dan inklusif difokuskan pada peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu (fisik dan non fisik) melalui pengembangan portal dan/atau platform pelayanan publik Sulawesi Tengah;

e. Mewujudkan transformasi digital pemerintahan, arah kebijakan difokuskan pada transformasi layanan pemerintahan berbasis digital melalui akselerasi pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai, percepatan pembangunan pusat data nasional, percepatan penerapan satu data Indonesiadan percepatan kesiapan digital (digital readiness) melalui penguatan talenta digital ASN, peningkatan literasi digital masyarakat, percepatan pembentukan regulasi yang adaptif, dan pembentukan lembaga publik pelaksana percepatan transformasi digital pemerintahan.

8. Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan

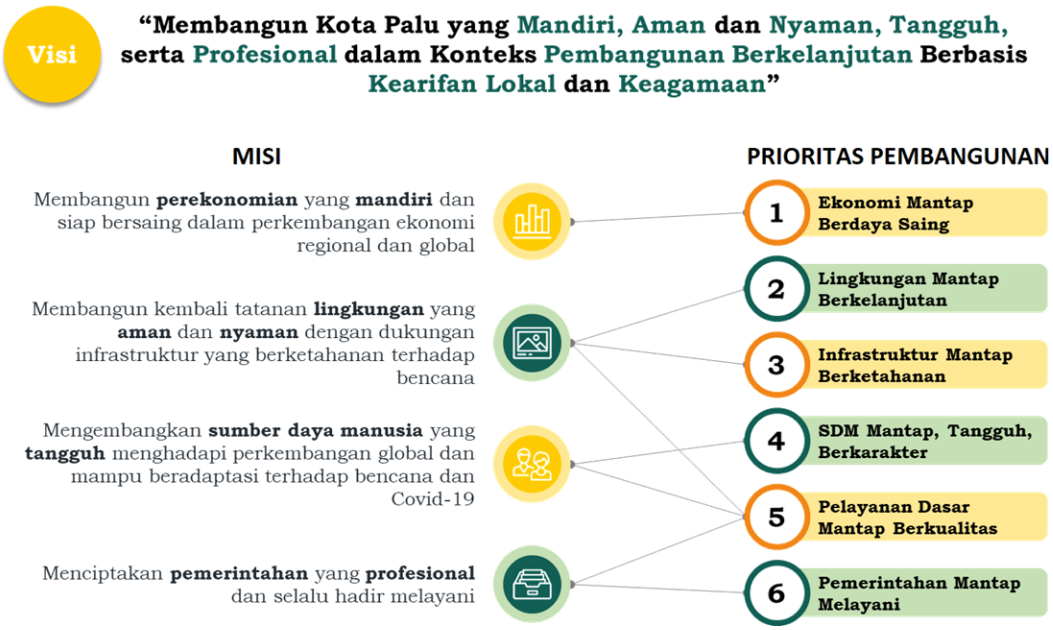
Pembangunan rendah karbon dilakukan untuk mencapai penurunan emisi GRK. Penerapan jalur pembangunan yang rendah karbon. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau. Pencemaran air, udara dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas Pembangunan yang tidak berkelanjutan (brown economy). Tantangan lainnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta meningkatnya penggunaaan lahan untuk pertanian dan Perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan, deforestasi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

a. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan non struktural, ke siapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan pasca bencana;

b. Penguatan dan pemanfaatan teknologi untuk mitigasi dan resiko bencana;
c. Pengurangan risiko abrasi di pesisir dan kepulauan;
d. Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim;
e. Pembatasan Pengembangan kawasan budidaya di kawasan rawan bencana tinggi dan sangat tinggi.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Palu

Pembangunan daerah Kota Palu yang mengacu pada visi dan misi pemerintahan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, perlu di operasionalkan melalui menjabarkan prioritas pembangunan daerah pada tiap-tiap misi. Tujuan prioritas pembangunan adalah memberi arah dan fokus pembangunan Kota Palu dalam kurun waktu lima tahun yang akan datang. Prioritas pembangunan diharapkan akan menjadi agenda utama pembangunan yang akan diimplementasikan dan terukur dalam upaya mewujudkan Kota Palu yang Mandiri, Aman dan Nyaman, Tangguh, serta Profesional dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Kearifan Lokal dan Keagamaan. Berdasarkan visi dan misi pembangunan Kota Palu Tahun 2021-2026 di atas, maka prioritas pembangunan Kota Palu adalah sebagai berikut:



Gambar 4.5
Keterkaitan Misi Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan

Prioritas pembangunan daerah disajikan berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya diutamakan. Penentuan prioritas pembangunan daerah Kota Palu juga merupakan bentuk pelaksanaan program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu Tahun 2021-2026.



Gambar 4.6
Alur Pikir Prioritas Pembangunan



Ekonomi Mantap Berdaya Saing

1. Rp 4 Miliar untuk Bedah Rumah + Modal Usaha
2. Inkubator Bisnis Berbasis Digital per Kelurahan
3. Penguatan UMKM dan Palu Market Place
4. Revitalisasi Perparkiran Kota Palu
5. Reformasi dan Revitalisasi Moda Transportasi
6. Kawasan Ekonomi Kreatif dan Wisata Religi
7. Kawasan Agrowisata Layana dan Petobo
8. Revitalisasi Pasar Berbasis Segmentasi
9. Wisata Pasar Ikan Kota Palu
10. 1.000 Perahu untuk Nelayan Kota Palu
11. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
12. Forum Komunitas Kreatif Kota Palu (Palu Creative Hub)



Lingkungan Mantap Berkelanjutan

1. Palu Adipura
2. Palu Terang
3. Palu Hijau
4. Palu Ramah, Aman, dan Tertib
5. CSR Forum
6. Satgas Cepat Tanggap
7. Kelurahan Mantap 2 Miliar



Infrastruktur Mantap Berketahanan

1. Bangun Palu Tahan Gempa (Palu Tangguh Bencana)
2. Pembangunan Gudang Logistik Bencana
3. Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami)
4. Pembangunan Kawasan Olahraga Kota Palu
5. Ruang Terbuka Hijau/Publik per Kecamatan
6. Pembangunan Gedung Kesenian Kota Palu



SDM Mantap, Tangguh, Berkarakter

1. Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Kerja Masyarakat Padat Karya
2. Badan Pelayanan Rumah Ibadah
3. Palu Berbagi
4. Palu Religi
5. Pelestarian Seni Budaya
6. Palu Ramah Difable
7. Event Tahunan Olahraga Kota Palu
8. Event Tahunan Komunitas Anak Muda Kota Palu



Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas

Kesehatan
1. Palu Kota Sehat
2. Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern
3. Satu Ambulans Satu Kelurahan
4. BPJS Gratis Warga Tidak Mampu
5. Tunjangan Kesehatan dan Santunan Duka RT/RW dan Petugas Rumah Ibadah

Pendidikan
1. 1.000 Beasiswa Keluarga Tidak Mampu
2. Reward 2 Miliar Prestasi SD dan SMP
3. Persamaan Kualitas SD dan SMP se-Kota Palu
4. Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat per Kelurahan
5. Update Berkala Kompetensi & Kapasitas Guru/Pengajar
6. Bus Gratis untuk Siswa Sekolah
7. Kepala Sekolah Magang Nasional



Pemerintahan Mantap Melayani

1. Audit APBD oleh Auditor Independen
2. E-Government (Palu Smart City)
3. Penerapan QSL (Quick Service License)
4. One Touch Info Kota Palu
5. Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di Semua Instansi
6. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Honorer
7. ASN Magang Nasional
8. Pelayanan Pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Dokumen Kependudukan Lainnya di Kelurahan

Gambar 4.7
Program Prioritas Kota Palu

Untuk menjamin konsistensinya maka dibuat persandingan dengan prioritas pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tercantum dalam RPJMD provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016-2021. Adapun hasil persandingan prioritas berdasarkan tingkatan pemerintahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel. 4.6
Prioritas Pembangunan Nasional 2025
Prioritas Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2025, Prioritas Pembangunan Kota Palu Tahun 2025,

NO	NASIONAL	PROVINSI	KOTA PALU
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan HAM: Memperkuat nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	Meningkatkan ketertiban hukum dan demokrasi yang substansial	Pemerintahan Mantap Melayani
2	Memantapkan Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara: Mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, serta pengembangan ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru.	Mendorong Peningkatan Produktivitas Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan dan Komoditi Pertanian lainnya;	Ekonomi Mantap Berdaya Saing
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan meningkatkan Lapangan kerja yang berkualitas, mendorong keweirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah.	Infrastruktur Mantap Berketahanan
4	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) : Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, sains, teknologi, pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. serta penguatan karakter dan jati diri bangsa.	Peningkatan SDM yang berdaya Saing	1. Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas; dan 2. SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pengembangan wilayah sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Ekonomi Mantap Berdaya Saing
6	Membangun dari desa dan dari	Peningkatan produktifitas UMKM	Ekonomi Mantap

NO	NASIONAL	PROVINSI	KOTA PALU
	bawah untuk pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan	dan koperasi	Berdaya Saing
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan	Meningkatkan Tata kelola pemerintahan	Pemerintahan Mantap Melayani
8	Memperkuat penyelarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmkur	Meningkatkan Ketahanan Bencana, Perubahan Iklim dan Meningkatkan Daya Dukung Lingkungan	Lingkungan Mantap Berkelanjutan

Sumber: Data diolah Tahun 2024

Prioritas Pembangunan Kota Palu disusun untuk menyelesaikan permasalahan strategis Kota Palu yang telah tertuang dalam RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026, sebagai Kota yang multifungsi, Kota Palu terus menghadapi permasalahan, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kota Palu berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, budaya, adat, daya saing ekonomi, lingkungan dan sumberdaya alam infrastruktur daerah.

Berdasarkan Program Prioritas Pembangunan pada tiap-tiap Prioritas Pembangunan yang mengacu pada misi pembangunan Kota Palu yang tetlah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disusun Isu-Isu Strategis Pembangunan Kota Palu adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif;
2. Mewujudkan SDM unggul, tangguh dan berdaya saing;
3. Mewujudkan infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif;
4. Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;

6. Pencapaian target dan sasaran SDGs.

Isu-Isu Strategis pembangunan yang ada tersebut, kemudian dijadikan acuan untuk membuat prioritas tahunan, walaupun jumlah dan arahnya cenderung identik, hal tersebut didasarkan karena permasalahan strategis yang disasar cenderung membutuhkan penanganan yang berkelanjutan, diharapkan dapat diselesaikan secara komprehensif dengan pendekatan menyeluruh. Relevansi isu strategis pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Kota Palu dan Program prioritas pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2025, tertera pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Relevansi Isu Strategis Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah, Isu Strategis Pembangunan Kota Palu dan Program Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025

NO	ISU STRATEGIS PROVINSI SULAWESI TENGAH	ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA PALU	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2025
1.	Kemiskinan	Pencapaian target dan sasaran SDGs	Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas
2.	Kualitas dan daya saing SDM	Mewujudkan SDM unggul, tangguh dan berdaya saing	SDM Mantap, Tangguh dan Berkarakter
3.	Ketahanan Bencana, Antisipasi Perubahan Iklim, dan Daya Dukung Lingkungan	Pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim serta percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	Lingkungan Mantap Berkelanjutan; dan Infrastruktur Mantap Berkelanjutan
4.	Tata Kelola Pemerintahan dan pelayanan publik	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Pemerintahan Mantap Melayani
5.	Kemandirian Fiskal Daerah	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Ekonomi Mantap Berdayasaing
6.	Produktivitas sektor unggulan daerah	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Ekonomi Mantap Berdayasaing
7.	Infrastruktur dan Konektivitas wilayah	Mewujudkan infrastruktur kota yang aman, nyaman, tangguh dan inklusif	Infrastruktur Mantap Berketahanan
8.	Kontribusi UMKM dan Koperasi terhadap Perekonomian	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif	Ekonomi Mantap Berdayasaing

Sumber: RKPD Provinsi Sulawesi Tengah 2025, RPJMD Kota Palu 2021-2026

Pembuatan prioritas dilaksanakan untuk mempermudah dalam pemberian arah dan fokus pembangunan secara tahunan, serta dimanfaatkan untuk menjawab sejumlah tantangan dan isu yang dihadapi oleh pemerintah Kota Palu dimasa mendatang. Adapun penjabaran program prioritas Kota Palu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 beserta PD penanggung jawab pelaksana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.8
Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kota Palu Tahun 2025 serta PD Penanggung Jawab

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PALU	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PALU	PAGU (RP)	PD PENANGGUNG JAWAB
Ekonomi Mantap Berdaya Saing	4 Miliar untuk bedah rumah plus modal usaha perkelurahan	22.743.231.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman; Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
	Inkubator bisnis berbasis digital perkelurahan	4.189.297.900	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
	Penguatan UMKM	11.930.838.700	Dinas Sosial
	Revitalisasi perparkiran Kota Palu	1.296.412.250	Dinas Perhubungan
	Reformasi dan revitalisasi moda transportasi	675.780.950	Dinas Perhubungan
	Kawasan ekonomi kreatif dan wisata religi	765.099.249	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja; Dinas Pariwisata
	Kawasan agrowisata Layana dan Petobo	2.251.542.570	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; Dinas Pariwisata
	Revitalisasi pasar berbasis segmentasi	467.999.761	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	Wisata pasar ikan Kota Palu		Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	1.000 perahu untuk nelayan Kota Palu	1.575.000.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PALU	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PALU	PAGU (RP)	PD PENANGGUNG JAWAB
	Kerjasama antar pemerintah daerah	710.616.800	Sekretariat Daerah
	Forum komunitas kreatif Kota Palu	4.370.890.850	Dinas Perdagangan dan Perindustrian; Dinas Pariwisata
Infrastruktur Mantap Berketahanan	Bangun Palu tahan gempa	66.182.180.605	Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Pembangunan gudang logistik bencana	2.395.337.598	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Waterfront Park Talise (Monumen Tsunami)	-	Dinas Pekerjaan Umum
	Pembangunan kawasan olahraga Kota Palu	9.176.020.466	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Ruang terbuka hijau/*public area* per kecamatan	33.799.565.333	Dinas Lingkungan Hidup
	Pembangunan gedung kesenian Kota Palu	7.699.997.846	Dinas Pekerjaan Umum
Lingkungan Mantap Berkelanjutan	Palu Adipura	94.817.733.038	Dinas Lingkungan Hidup
	Palu Terang	20.310.163.600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Palu Hijau	3.805.950.450	Dinas Lingkungan Hidup
	Palu Ramah, Aman, Dan Tertib	39.220.400	Dinas Sosial; Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
	CSR Forum	12.600.000	Sekretariat Daerah
	Satgas Cepat Tanggap	11.878.395.990	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Kelurahan Mantap 2 Milyar	23.000.000.000	Sekretariat Daerah
SDM Mantap, Tangguh, dan Berkarakter	Peningkatan Kesejahteraan dan Kualitas Kerja Masyarakat Padat	40.937.268.800	Dinas Sosial; 8 Kecamatan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PALU	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PALU	PAGU (RP)	PD PENANGGUNG JAWAB
	Karya		
	Badan Pelayanan Rumah Ibadah	24.000.000	Sekretariat Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Palu Berbagi	204.910.000	Dinas Sosial
	Palu Religi	6.601.215.684	Sekretariat Daerah; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	Palu Ramah Difabel	1.593.301.350	Dinas Sosial
	Pembangunan Prasarana dan Pelestarian Seni Budaya	1.208.229.050	Dinas Pariwisata
	Event Olahraga Tahunan	8.684.202.300	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Event Komunitas Anak Muda	277.942.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
Pelayanan Dasar Mantap Berkualitas	Palu Kota Sehat	110.941.752.353	Dinas Kesehatan
	Transformasi Puskesmas menjadi Klinik Modern	26.442.000	Dinas Kesehatan
	Satu Ambulans Satu Kelurahan	1.248.749.319	Dinas Kesehatan; 46 Kelurahan
	BPJS Gratis Warga Tidak Mampu	22.634.717.200	Dinas Sosial
	Tunjangan Kesehatan dan Santunan Duka RT/RW dan Petugas Rumah Ibadah	607.855.200	Sekretariat Daerah
	1.000 Beasiswa Keluarga Tidak Mampu	432.600.000	Sekretariat Daerah
	Reward Prestasi SD dan SMP 2 Miliar	2.000.000.000	Dinas Pendidikan
	Percepatan Peningkatan Persamaan Kualitas Sekolah SD dan SMP se-Kota Palu	30.454.432.565	Dinas Pendidikan
	Pelatihan Tenaga Kerja Bersertifikat per Kelurahan	825.617.000	Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja
	Update Berkala Kompetensi dan Kapasitas Guru/Pengajar	61.457.500	Dinas Pendidikan
	Bus Gratis untuk	488.488.200	Dinas Perhubungan

PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PALU	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA PALU	PAGU (RP)	PD PENANGGUNG JAWAB
	Siswa Sekolah		
	Kepala Sekolah Magang	1.391.095.000	Dinas Pendidikan
Pemerintahan Mantap Melayani	Audit APBD oleh Auditor Independen	163.351.950	Inspektorat
	E-Government	1.338.018.250	41 PD
	Quick Service Lisence	351.745.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	One Touch Info Kota Palu	1.049.033.250	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Penerapan ISO atas Pelayanan Publik di Semua Instansi	461.252.400	41 PD
	Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Honor	53.284.120.542	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	PNS Magang Nasional	444.739.100	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Pelayanan Pembuatan KTP, KK, dan Akte Lahir di Kantor Kelurahan	279.299.950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sumber: Data diolah Tahun 2024



Gambar 4.8
Indikasi Pendanaan Prioritas Pembangunan Daerah

Tahun 2025 merupakan periode yang sangat menentukan dikarenakan merupakan tahun awal pelaksanaan pembangunan dari Kepala Daerah Terpilih hasil Pemilu Kepala Daerah secara serentak 2024. Untuk itu, dengan ketersediaan anggaran yang terbatas, pemerintah Kota Palu berupaya seoptimal mungkin menargetkan sasaran dari Prioritas Pembangunan daerah dalam RKPD Tahun 2025 dengan fokus pada penyelesaian prioritas. Pencapaian tersebut menjadi barometer penting untuk memastikan sasaran utama pembangunan dapat menjadi basis pembangunan pada periode berikutnya.

Transportasi massal juga menjadi fokus pembangunan di tahun 2025 karena bukan hanya mempengaruhi cara orang bergerak di dalam Kota tetapi juga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang besar. Program *Bus Rapid Transit* (BRT) yang dilaksanakan diharapkan menjadikan transportasi umum di Kota Palu lebih efektif, pekerja dapat mencapai tempat kerja dengan lebih cepat, pelajar dapat sampai ke Sekolah atau Universitas/Perguruan Tinggi dengan aman, dan semua orang dapat menikmati kota dengan lebih leluasa, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kebijakan "Satu Kelurahan Satu Miliar" juga merupakan kebijakan yang dirancang untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di wilayah Kelurahan dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, serta fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Dengan adanya kebijakan "Satu Kelurahan Satu Miliar", diharapkan setiap kelurahan di Kota Palu dapat mengalami transformasi yang signifikan, baik dari segi infrastruktur maupun kualitas hidup masyarakatnya. Program ini merupakan langkah maju dalam upaya pemerintah Kota Palu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan di setiap Kelurahan dan Kecamatan, serta mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Palu yang Mantap dan berkelanjutan.

Kebijakan prioritas lainnya yang menjadi prioritas dalam pembangunan tahun 2025 yaitu Kebijakan transformasi Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Palu. Dengan status BLUD, Puskesmas memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, yang memungkinkan mereka untuk menggunakan pendapatan secara langsung untuk operasional tanpa harus disetor ke Pemerintah Daerah.

Penerapan BLUD di Puskesmas juga mendukung transparansi dan akuntabilitas. Puskesmas diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang dapat diaudit, memastikan penggunaan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Ini menciptakan sistem yang lebih terbuka, di mana masyarakat dapat memantau dan mengevaluasi kinerja Puskesmas.

Selain itu, BLUD memberikan kesempatan bagi Puskesmas untuk mengembangkan inovasi dalam pelayanan kesehatan. Dengan kemandirian finansial yang lebih besar, Puskesmas dapat mengalokasikan dana untuk program-program kesehatan yang lebih spesifik dan terfokus, seperti program penanggulangan penyakit kronis atau promosi kesehatan di komunitas lokal. Sehingga kebijakan BLUD diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam sistem kesehatan di tingkat dasar. Dengan peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi operasional, Puskesmas dapat lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesehatan nasional.

4.2.4. Harmonisasi Perencanaan Nasional, Perencanaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Pemerintah Kota Palu

Pembangunan di daerah tidak boleh parsial dan berdiri sendiri tapi harus komprehensif dan sejalan dengan tujuan pembangunan nasional, pembangunan pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2025 Pemerintah Kota Palu tetap berperdoman pada Arahan Presiden, Misi Pemerintah Republik Indonesia, begitupun harus selaras dengan tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Keterkaitan antara Arahan Presiden**,** misi Pemerintah Republik Indonesia, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu dapat dilihat pada Tabel 4.10 berikut ini:

Tabel 4.9
Matriks Keterkaitan Arahan Presiden, Misi Pemerintah, Misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Misi Pemerintah Kota Palu

Arahan Presiden	Misi RPJMN 2020–2024	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026	Misi RPJMD Kota Palu 2021-2026
1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun Sumber Daya Manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global; 2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat; 3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 UndangUndang.	**Misi 1** Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	**Misi 1** Meningkatkan Kualitas Manusia Provinsi Sulawesi Tengah melalui Reformasi Sistem Pendidikan dan Kesehatan Dasar.	**Misi 3** Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19
	Misi 2 Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing	**Misi 3** Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan.	**Misi 1** Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global
	Misi 3 Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan	**Misi 4** Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.	**Misi 2** Membangun kembali tatanan lingkungan yang aman dan nyaman dengan dukungan infrastruktur yang berketahanan terhadap bencana (Arahan Presiden ke 2)
	Misi 4 Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan	**Misi 6** Menjaga harmonisasi manusia dan alam, antar sesama manusia sebagai wujud pembangunan berkelanjutan.	
	Misi 5 Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa	**Misi 5** Menjalankan Pembangunan Masyarakat dan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan	**Misi 3** Mengembangkan sumber daya manusia yang tangguh menghadapi perkembangan global dan mampu beradaptasi terhadap bencana dan covid-19

Arahan Presiden	Misi RPJMN 2020–2024	Misi RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026	Misi RPJMD Kota Palu 2021-2026
pertama Undang-Undang Cipta Kerja dan kedua Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM); 4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan 5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.	**Misi 6** Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya	**Misi 2** Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM.	**Misi 4** Menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani (Arahan Presiden ke 4)
	Misi 7 Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga	**Misi 8** Meningkatkan Pelayanan Publik bidang pendidikan dan kesehatan berbasis pada Teknologi Informasi yang integrasi dan dijalankan secara sistimatis dan digital.	
	Misi 8 Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya		
	Misi 9 Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan	**Misi 7** Melakukan Sinergitas Kerjasama Pembangunan Antar Daerah Bertetangga Sekawasan maupun di dalam Provinsi Sulawesi Tengah dan di luar Provinsi bertetangga.	**Misi 4** Menciptakan pemerintahan yang professional dan selalu hadir melayani (Arahan Presiden ke 4)
		Misi 9 Mendorong pembentukan daerah otonom baru (DOB) agar terjadi percepatan desentralisasi pelayanan dan Peningkatan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah.	**Misi 1** Membangun perekonomian yang mandiri dan siap bersaing dalam perkembangan ekonomi regional dan global

Sumber: RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Prov. Sulteng 2021-2026, dan RPJMD Kota Palu 2021-2026



Gambar 4.9
Kerangka Prioritas Nasional RKP 2025

Dukungan program daerah RKPD 2025 terhadap kegiatan prioritas pada prioritas nasional disajikan pada Tabel dibawah ini:

Tabel 4.10
Dukungan Program Daerah pada RKPD 2025 terhadap Program Prioritas pada Prioritas Nasional

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
1	memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)	Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memperkukuh Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa yang Maju, Modern, dan Berkarakter	Revolusi Mental dalam Sistem Pendidikan untuk Memperkuat Nilai Integritas, Etos Kerja, Gotong Royong, dan Budi Pekerti	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100%	113.900.909.861	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Revolusi Mental dalam Tata Kelola Pemerintahan untuk Penguatan Budaya Birokrasi yang Bersih, Melayani, dan Responsif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kota Palu	A	32.386.745.216	Sekretariat Daerah
					Indeks Reformasi Birokrasi	90		
					Nilai SAKIP OPD	BB		
			Revolusi Mental dalam Sistem Sosial untuk Memperkuat Ketahanan, Kualitas dan Peran Keluarga dan Masyarakat dalam Pembentukan Karakter	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	68,89	79.158.650	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	8.908.849.650	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	479.442.600	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
				Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	5,00%	5.529.719.850	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	51%	1.916.587.942	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan Berlandaskan Pancasila	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	90,67%	114.957.900	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	5,20%	33.525.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	51%	1.916.587.942	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Pembinaan Ideologi Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara untuk Menumbuhkan Jiwa Nasionalisme dan Patriotisme	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana	98%	3.810.148.195	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Konsolidasi Demokrasi	Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila	95%	828.870.090	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,21	34.753.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,06%	167.535.750	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	68,89	79.158.650	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	28.623.850	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	952.051.200	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100%	4.085.983.000	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
2	memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	2.273.100.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase penurunan gangguan keamanan di Kota Palu	9%	445.185.280	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	100%	132.714.250	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Penyediaan Air untuk Pertanian	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	40,48	2.054.269.600	Dinas Pekerjaan Umum
					Rasio jaringan irigasi	8014%		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
			Penyediaan Air Baku untuk kawasan Prioritas	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	96,51%	5.682.665.740	Dinas Pekerjaan Umum
					Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	33,12%		
			Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya temasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	766.522.912	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Ketersediaan, Akses, dan Kualitas Konsumsi Pangan	Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,91	439.886.100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase capaian pengawasan keamanan panagan	100%	30.196.800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian	100%	22.442.250	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
			Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian dan pangan hasil laut secara berkelanjutan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga kebutuhan pokok	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	100%	114.944.850	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,74	3.758.428.970	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDMI Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	25%	507.205.550	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,74	3.758.428.970	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan Tata Kelola Sistem Pangan Nasional	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,91	439.886.100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase capaian pengawasan keamanan panagan	100%	30.196.800	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	100%	114.944.850	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan	Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang taut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	1156	1.714.617.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	138	1.109.245.450	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan, dan Kelautan	Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	1156	1.714.617.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	138	1.109.245.450	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Peningkatan Fasilitasi Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	76,87	113.428.600	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	479.442.600	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	51%	1.916.587.942	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Peningkatan Kapasitas Usaha dan Akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	5,00%	5.529.719.850	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	51%	1.916.587.942	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Peningkatan Kapasitas, Jangkauan, dan Inovasi Koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	90,67%	114.957.900	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	5,20%	33.525.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
			Peningkatan Penciptaan Start-Up dan Peluang Usaha	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	51%	1.916.587.942	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
		Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	51%	1.916.587.942	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, Termasuk Melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan Promosi Penanaman Modal	45 investor	82.574.000	Administrator KEK

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
			Terutama di Luar Jawa					
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	195.799.000	Administrator KEK
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal	100%	18.950.000	Administrator KEK
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	21.785.000	Administrator KEK
			Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, Termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	398.339.550	Dinas Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	100%	3.068.529.300	Dinas Pariwisata
			Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk dan Usaha Kreatif dan Digital	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	992.538.950	Dinas Pariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	952.051.200	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100%	4.085.983.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, temasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5%	1.225.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	425,4	76.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	115.075.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	592.729.750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	60.175.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Pengembangan Industri Halal	Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	78%	301.084.500	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
				Program Hubungan Industrial	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	78%	301.084.500	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
			Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwista Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	398.339.550	Dinas Pariwisata
				Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	100%	3.068.529.300	Dinas Pariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	100%	992.538.950	Dinas Pariwisata
		Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	952.051.200	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100%	4.085.983.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	51%	1.916.587.942	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan	100%	3.177.696.661	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	100%	439.290.000	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	100%	2.428.383.050	Sekretariat Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
			Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	51%	1.916.587.942	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	398.339.550	Dinas Pariwisata
			Reformasi Fiskal	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian pemenuhan target PAD	100%	9.381.480.150	Badan Pendapatan Daerah
			Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan lnformasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase pemenuhan data statistik sektoral	100%	145.586.450	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Infrastruktur Pelayanan Dasar	Penyediaan Akses Perumahan dan Pemukiman Layak, Aman, dan Terjangkau	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	79,40%	1.004.027.600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Cakupan pelayanan rusunawa	20,67%		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	0,903	7.526.595.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	94,85%		
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	0,903	11.389.877.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	21.710.402.900	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	34,10%	603.534.750	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
					Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung	19,82%		
					Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu	20%		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
			Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	96,51%	5.682.665.740	Dinas Pekerjaan Umum
					Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	33,12%		
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	8,16%	291.186.400	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	66,18%	4.294.063.215	Dinas Pekerjaan Umum
					Persentase jalan yang memiliki drainase	8,38%		
				Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	0,903	7.526.595.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	94,85%		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	0,903	11.389.877.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	21.710.402.900	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	70%	27.467.130.210	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	2.387.639.400	Dinas Lingkungan Hidup
			Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	40,48	2.054.269.600	Dinas Pekerjaan Umum
					Rasio jaringan irigasi	8014%		
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	96,51%	5.682.665.740	Dinas Pekerjaan Umum

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
					Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	33,12%		
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	766.522.912	Dinas Lingkungan Hidup
			Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	66,18%	4.294.063.215	Dinas Pekerjaan Umum
					Persentase jalan yang memiliki drainase	8,38%		
		Infrastruktur Ekonomi	Konektivitas Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	81,07%	56.335.850.128	Dinas Pekerjaan Umum
			Konektivitas Darat	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	26%	18.572.164.350	Dinas Perhubungan
		Infrastruktur Perkotaan	Transportasi Perkotaan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	26%	18.572.164.350	Dinas Perhubungan
			Infrastruktur dan Ekosistem TIK Perkotaan	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	952.051.200	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
			Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi layak dan Aman di Perkotaan	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	96,51%	5.682.665.740	Dinas Pekerjaan Umum
					Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	33,12%		
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	8,16%	291.186.400	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	66,18%	4.294.063.215	Dinas Pekerjaan Umum
					Persentase jalan yang memiliki drainase	8,38%		
				Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	0,903	7.526.595.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	94,85%		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	0,903	11.389.877.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	21.710.402.900	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	70%	27.467.130.210	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	2.387.639.400	Dinas Lingkungan Hidup
			Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman, dan Terjangkau di Perkotaan	Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	79,40%	1.004.027.600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Cakupan pelayanan rusunawa	20,67%		
				Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	0,903	7.526.595.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
					Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	94,85%		
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	0,903	11.389.877.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	21.710.402.900	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	34,10%	603.534.750	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
					Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung	19,82%		
					Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu	20%		
		Transformasi Digital	Penuntasan Infrastruktur TIK	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	952.051.200	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
			Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	100%	952.051.200	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Program Aplikasi Informatika	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	100%	4.085.983.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	51%	1.916.587.942	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
4	memperkuat sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan Z), dan penyandang disabilitas.	Perlindungan Sosial dan Tata Kelola Kependudukan	Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	66,20%	136.860.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pencatatan Sipil	Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	100%	142.439.950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
		Pengendalian Penduduk dan Penguatan Tata Kelola Kependudukan	Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	68.752.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100%	30.420.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Pendampingan dan Iayanan Terpadu	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	100%	3.995.809.750	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	8.908.849.650	Dinas Sosial
			Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,65	288.462.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	2.968.587.762	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Sistem Jaminan Sosial Nasional	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	8.908.849.650	Dinas Sosial
			Bantuan Sosial dan Subsidi Tepat Sasaran	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	616.364.750	Dinas Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Presentase pelayanan rehabiltasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis	100%	830.239.950	Dinas Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	8.908.849.650	Dinas Sosial
			Perlindungan Sosial Adaptif	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	75%	1.087.931.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	99,70%	935.201.610	Dinas Sosial
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,51%	680.646.900	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
			Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	616.364.750	Dinas Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Presentase pelayanan rehabiltasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis	100%	830.239.950	Dinas Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	8.908.849.650	Dinas Sosial
				Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	23.520.000	Dinas Sosial

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
		Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Peningkatan Kesehatan [bu, Anak, Keluarga Berencana (KB), dan Kesehatan Reproduksi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	50.224.850.303	Dinas Kesehatan
				Program Pengendalian Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,65	288.462.500	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	100%	2.968.587.762	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	79%	2.678.899.860	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	50.224.850.303	Dinas Kesehatan
			Peningkatan Pengendalian Penyakit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	50.224.850.303	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Upaya Kesehatan Masyarakat				
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	100%	27.775.200	Dinas Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	509.820.350	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	4.025.059.250	Dinas Kesehatan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016	A	158.090.020.557	RSU Anutapura
			Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	4.025.059.250	Dinas Kesehatan
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	50.224.850.303	Dinas Kesehatan
			Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	100%	50.224.850.303	Dinas Kesehatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	100%	27.775.200	Dinas Kesehatan
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100%	509.820.350	Dinas Kesehatan
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	100%	4.025.059.250	Dinas Kesehatan
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016	A	158.090.020.557	RSU Anutapura
		Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100%	113.900.909.861	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Afirmasi Akses dan Percepatan Wajib Belajar 12 Tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100%	113.900.909.861	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	100%	2.198.833.638	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
			Penjaminan Mutu Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100%	113.900.909.861	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	100%	2.198.833.638	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	100%	113.900.909.861	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perlindungan khusus anak	100%	20.787.050	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Indeks Kota Layak Anak	Madya	145.355.650	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
			Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan, dan Perlindungan Perempuan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,21	34.753.000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Perempuan	Rasio KDRT	0,06%	167.535.750	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	68,89	79.158.650	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	100%	28.623.850	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Kualitas Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100%	362.135.900	Dinas Pemuda dan Olahraga

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	100%	415.451.700	Dinas Pemuda dan Olahraga
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3%	538.925.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	8,72%	90.053.750	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	52,06%	345.789.500	Dinas Pekerjaan Umum
					Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0,63%		
		Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3%	538.925.000	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	8,72%	90.053.750	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
			Peningkatan Kapabilitas. Iptek dan Penciptaan Inovasi	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	90,91	903.390.400	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Prestasi Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	100%	11.960.772.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
5	melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Pembangunan Wilayah Sulawesi	Pengembangan Kawasan Strategis	Program Promosi Penanaman Modal	Cakupan Promosi Penanaman Modal	45 investor	82.574.000	Administrator KEK
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	195.799.000	Administrator KEK
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal	100%	18.950.000	Administrator KEK
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	100%	21.785.000	Administrator KEK
				Program Peningkatan Daya	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	100%	398.339.550	Dinas Pariwisata

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Tarik Destinasi Pariwisata				
				Program Pemasaran Pariwisata	Cakupan pemasaran pariwisata	100%	3.068.529.300	Dinas Pariwisata
			Pengembangan Sektor Unggulan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,74	3.758.428.970	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	25%	507.205.550	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap (ton)	1156	1.714.617.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi perikanan budidaya (ton)	138	1.109.245.450	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Pengembangan Kawasan Perkotaan	Program Penataan Bangunan Gedung	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	34,10%	603.534.750	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
					Persentase Bangunan yang ditargetkan memenuhi standar teknis bangunan Gedung	19,82%		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
					Persentase Regulasi penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu	20%		
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	95,08%	224.396.800	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
				Program Pengembangan Perumahan	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	79,40%	1.004.027.600	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Cakupan pelayanan rusunawa	20,67%		
				Program Kawasan Permukiman	Rasio rumah layak huni	0,903	7.526.595.000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	94,85%		
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rasio rumah layak huni	0,903	11.389.877.500	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum (PSU)	100%	21.710.402.900	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	81,07%	56.335.850.128	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal	100%	64.509.970.075	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase drainase dalam kondisi baik	66,18%	4.294.063.215	Dinas Pekerjaan Umum
					Persentase jalan yang memiliki drainase	8,38%		
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	8,16%	291.186.400	Dinas Pekerjaan Umum
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	96,51%	5.682.665.740	Dinas Pekerjaan Umum
					Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan	33,12%		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
			Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	21.879.475.734	Sekretariat Daerah
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	90,91	903.390.400	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian pemenuhan target PAD	100%	9.381.480.150	Badan Pendapatan Daerah
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	25.238.611.684	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan aset daerah	100%	1.615.535.150	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	115.075.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik	195.799.000	Administrator KEK

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	95,08%	224.396.800	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah Pemda Kota Palu	20%	140.440.000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
					Persentase kawasan pemetaan	20%		
6	upaya membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, serta pemberantasan kemiskinan.	Pengentasan Kemiskinan	Akselerasi Penguatan Ekonomi Keluarga	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	100%	8.908.849.650	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	100%	479.442.600	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja
				Program Pengembangan UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	5,00%	5.529.719.850	Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Cakupan Bina IKM	51%	1.916.587.942	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
			Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	100%	616.364.750	Dinas Sosial
			Reforma Agraria	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	80%	38.862.700	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
				Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	100%	37.900.250	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
				Program Penatagunaan Tanah	Persentase pemilikan, penggunaan dan pemanfataan tanah Pemda Kota Palu	20%	140.440.000	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
					Persentase kawasan pemetaan	20%		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
7	pemerintahan baru akan fokus memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Penguatan Implementasi Manajemen ASN Berbasis Sistem Merit	Program Kepegawaian Daerah	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah	100%	1.735.918.600	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah	100%	1.281.653.650	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
			Transformasi Pelayanan Publik	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	5%	1.225.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)	425,4	76.000.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	115.075.800	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	592.729.750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	100%	60.175.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Administrator KEK
				Program Pendaftaran Penduduk	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	66,20%	136.860.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pencatatan Sipil	Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	100%	142.439.950	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	68.752.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	100%	30.420.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
			Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kota Palu	A	32.386.745.216	Sekretariat Daerah
					Indeks Reformasi Birokrasi	90		
					Nilai SAKIP OPD	BB		
			Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP	25.238.611.684	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan aset daerah	100%	1.615.535.150	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Capaian pemenuhan target PAD	100%	9.381.480.150	Badan Pendapatan Daerah
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	100%	2.061.677.850	Inspektorat
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	100%	205.060.200	Inspektorat

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
		Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai Budaya dan Kearifan tokal	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan	100%	396.466.525	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	100%	115.439.260	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	87%	546.125.236	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	98%	1.583.997.450	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk Memperkuat Karakter Bangsa dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan	100%	396.466.525	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	100%	115.439.260	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Terlestarikannya Cagar Budaya	87%	546.125.236	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	98%	1.583.997.450	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk Memperkuat Kebudayaan yang Inklusif	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan	100%	396.466.525	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	98%	1.583.997.450	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Pengembangan Tata Kelola Pembangunan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan pengembangan kebudayaan	100%	396.466.525	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
		Memperkuat Moderasi beragama untuk Mengukuhkan Toleransi Kerukunan dan Harmoni Sosial	Penguatan Cara Pandang, Sikap, dan Praktik Beragama dalam Perspektif Jalan Tengah untuk Memantapkan Persaudaraan dan Kebersamaan di Kalangan Umat Beragama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	21.879.475.734	Sekretariat Daerah
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	98%	1.583.997.450	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	21.879.475.734	Sekretariat Daerah
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	98%	1.583.997.450	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	21.879.475.734	Sekretariat Daerah
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	98%	1.583.997.450	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
			Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	21.879.475.734	Sekretariat Daerah
			Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	100%	21.879.475.734	Sekretariat Daerah
		Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi dan Kreativitas bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan dan Berkarakter	Peningkatan Budaya Literasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase capaian pembinaan pepustakaan	100%	373.268.300	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, Bahasa dan Aksara Daerah, serta Sastra	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	100%	5.210.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Pengembangan Budaya Iptek, Inovasi, Kreativitas, dan Daya Cipta	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil penelitian, pengkajian dan pengembangan yang ditindaklanjuti	90,91	903.390.400	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
			Penguatan Institusi Sosial Penggerak Literasi dan Inovasi	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase capaian pembinaan pepustakaan	100%	373.268.300	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
6	memperkuat penjelasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	766.522.912	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	100%	240.489.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100%	7.250.869.650	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	180.413.050	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	100%	2.387.639.400	Dinas Lingkungan Hidup
			Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	70%	27.467.130.210	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	766.522.912	Dinas Lingkungan Hidup

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
				Kerusakan Lingkungan Hidup				
			Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	766.522.912	Dinas Lingkungan Hidup
			Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100%	180.413.050	Dinas Lingkungan Hidup
		Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	75%	1.087.931.700	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Program Penanganan Bencana	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	99,70%	935.201.610	Dinas Sosial
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,51%	680.646.900	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL	PROGRAM	KEGIATAN	PROGRAM DAERAH	INDIKATOR	TARGET	PAGU ANGGARAN Rp.	OPD PELAKSANA
			Peningkatan Ketahanan Iklim	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	100%	240.489.000	Dinas Lingkungan Hidup
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	100%	7.250.869.650	Dinas Lingkungan Hidup
		Pembangunan Rendah Karbon	Pengelolaan Limbah	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase jumlah sampah yang tertangani	70%	27.467.130.210	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Data diolah Tahun 2024

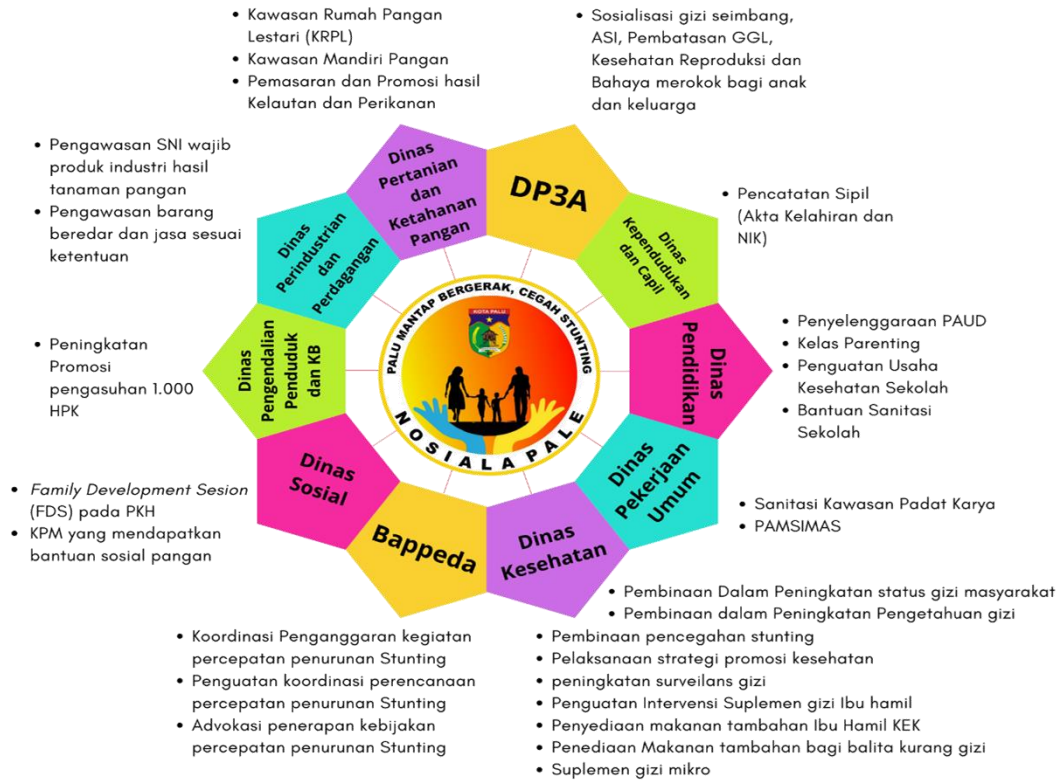
Salah satu dari *Major Project* Nasional Tahun 2025 dalam meningkatkan Sumber Daya Manusi Berkualitas dan Berdaya Saing, yaitu Penurunan angka prevalensi Stunting. Dalam Strategi Nasional (Stranas) Penurunan Stunting ditegaskan bahwa untuk memastikan tercapainya target prevalensi stunting World Health Assembly (WHA) yaitu menurunkan jumlah total anak-anak yang mengalami stunting di bawah usia 5 tahun sebesar 40% pada tahun 2025, dengan menggunakan perkiraan global tahun 2010 yaitu 171 juta anak-anak yang mengalami stunting sebagai dasar yaitu prevalensi 26,7%. Terdapat tiga skenario permodelan pencegahan stunting untuk anak Indonesia hingga tahun 2025 yaitu Skenario pertama, (pesimis) dengan upaya yang dilakukan saat ini angka stunting baduta akan turun sekitar 1-1,5%. Skenario kedua (moderat) dengan peningkatan upaya, angka stunting pada baduta akan turun sebesar 1,5 – 2%, per tahun dan dapat mengatasi target WJA dan TPB . Skenario ketiga, (optimis) dengan peningkatan upaya yang lebih optimis, angka stunting pada baduta akan turun 2-2,5% per tahun.

Berdasarkan Perpres 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting, intervensi gizi spesifik, yakni intervensi yang berhubungan dengan peningkatan gizi dan kesehatan. Mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah agar mendukung pencapaian Nasional dalam percepatan penurunan angka prevalesi stunting.

Untuk mendukung Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam Upaya penurunan angka prevalesi stunting, Pemerintah Kota Palu berdasarkan Keputusan Wali Kota Palu Nomor 050/200/BAPPEDA/2022 tentang Inovasi Daerah Aksi Konvergensi Nosiala Pale Penurunan Stunting di Kota Palu,

menetapkan satu Inovasi daerah benama NOSIALA PALE yang bertujuan untuk :

1) Memberikan Nutrisi Pangan di Usia Subur, Wajib melaksanakan skrening serta edukasi Kesehatan bagi Pasangan sebelum menikah;
2) Memberikan obat cacing dan Vitamin A pada anak setiap bulan Februari dan Agustus;
3) Pemenuhan syarat Kesehatan untuk Sanitasi lingkungan, air bersih dan jamban sehat;
4) Mencegah penyakit Anemia bagi Ibu hamil, remaja putri dan Wanita usia subur dengan wajib mengkonsumsi tablet tambah darah
5) Advokasi masyarakat dengan Literasi Stunting;
6) Melakukan edukasi Gizi keluarga melalui kearifan local;
7) Mewajibkan ASI Eksklusif dan imunisasi dasar lengkap;
8) Memantau tumbuh kembang bayi secara berkala;
9) Mengatasi Ibu hamil KEK, kurang gizi dan gizi buruk secara komprehensif;
10) Melengkapi asupan gizi ibu hamil dan balita dengan mengkonsumsi ikan dan telur secara bergantian; dan
11) Mengefektifkan layanan Kesehatan masyarakat melalui program Unggulan Daerah NAKES NONGGAYA.



Gambar 4.10
Cross Cutting Penurunan Stunting Kota Palu Tahun 2025

4.2.5. Sasaran Pembangunan

Sasaran pembangunan Kota Palu Tahun 2025, mengacu pada sasaran pembangunan nasional kemudian dijabarkan kedalam target-target pokok pembangunan daerah sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan pada Tahun 2025, adapun sasaran target kinerja pembangunan Kota Palu Tahun 2025, disandingkan dengan target pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 serta target pembangunan nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11
Sasaran Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah
dan Kota Palu Tahun 2025

NO	INDIKATOR	SASARAN RKP 2025 NASIONAL	SASARAN RKPD 2025 PROVINSI SULAWESI TENGAH	SASARAN RKPD 2025 KOTA PALU
1	PDRB Perkapita	81,96 – 82,08	154,17 – 154,25	89,0 – 96,12
2	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	19,34	40,97 – 41,45	6,8 – 9,36
3	Tingkat Kemiskinan	6,0 – 7,0	9,54 – 12,20	5,90
4	Rasio Gini	0,379 – 0,382	0,298 – 0,302	0,293 – 0,330
5	Kontribusi PDRB	0	2,09	7,2 – 7,88
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	0	0,56	*0,56
7	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	0	59,87	19,66
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK	0	77,96	*77,96
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	43,19	30,33 – 33,86	*30,33 – 33,86
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,30 – 5,60	9,11 – 11,11	5,00 – 5,12
11	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	22	20	*20
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,50 – 5,00	2,2 – 2,9	4,74 – 5,50
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,30	58,3	56,37
14	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0	0,32 – 0,45	0,94
15	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)	0	4,07 – 8,38	3,0 – 4,0
16	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	7,92	1,2T – 2T	360,1 M
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	6,1	5,7	*5,7
18	Ekspor Barang Jasa	26,00	26,00 – 38,36	Indikator Hanya Tingkat Provinsi
19	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Na	7,36	7 – 10
20	Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,8	42,4	49,07
21	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	0	50,55 – 62,00	*50,55 – 62,00
22	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,68	3,54 – 3,60	3,54
23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,12	3,15	3,15

NO	INDIKATOR	SASARAN RKP 2025 NASIONAL	SASARAN RKPD 2025 PROVINSI SULAWESI TENGAH	SASARAN RKPD 2025 KOTA PALU
24	Indeks Integritas Nasional	74,52	70,58	7,00
25	Indeks Demokrasi Indonesia	83,05	Tinggi	Indikator Hanya Tingkat Provinsi
26	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	1,5	0,3 – 0,97	0,84
27	Tingkat Inflasi	1,5 – 3,5	2,35 – 3,8	2,35 – 3,00
28	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	70,29	60,00 – 66,33	*60,00 – 66,33
29	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,43	0,42 – 0,44	0,32
30	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.356	588 – 2.250	*588 – 2.250
31	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	7,21	9,05	5,44

Sumber: Data diolah Tahun 2024



BAB 5

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2025 disusun dalam rangka mencapai target periode keempat RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026. Penyajian program, kegiatan, dan sub kegiatan disusun berdasarkan urutan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang terakhir dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 dan berpedoman pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palu terdiri dari:

1. Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; dan sosial.
2. Urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi: tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil dan menengah; penanaman modal; kepemudaan dan olahraga; statistik; persandian; kebudayaan; perpustakaan; dan kearsipan.

3. Urusan pilihan, meliputi: kelautan dan perikanan; pariwisata; pertanian; perdagangan; dan perindustrian.
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan, meliputi: Sekretariat Daerah; dan Sekretariat DPRD.
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan, meliputi: perencanaan; keuangan; kepegawaian; pendidikan dan pelatihan; penelitian dan pengembangan.
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan yaitu inspektorat daerah
7. Unsur kewilayahan yaitu kecamatan.
8. Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik.

Pagu indikatif Tahun 2025 untuk masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan urusan pemerintahan disajikan dalam Tabel 5.1, sedangkan rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai pagu indikatif dapat dilihat pada Buku 2 RKPD Tahun 2025.

Tabel 5.1
Pagu Indikatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2025 Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2025
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.055.618.079.976
1	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	444.027.182.992
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	444.027.182.992
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	355.247.442.161
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	74.497.572.032
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	Puskesmas Pantoloan	6.419.413.866
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	Puskesmas Tawaeli	5.809.135.354
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	Puskesmas Mamboro	5.265.544.283
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	Puskesmas Talise	8.451.173.027
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	Puskesmas Singgani	7.154.198.781

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2025
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	Puskesmas Kawatuna	5.708.184.881
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	Puskesmas Birobuli	7.243.586.697
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	Puskesmas Bulili	6.119.385.723
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	Puskesmas Mabelopura	6.244.900.604
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	Puskesmas Sangurara	7.512.285.693
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	Puskesmas Kamonji	7.984.206.611
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	Puskesmas Anuntodea Tipo	4.525.084.165
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	Puskesmas Nosarara	5.199.648.172
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	Puskesmas Lere	5.339.340.465
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura Palu	191.773.781.807
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	155.306.376.837
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	Dinas Pekerjaan Umum	148.069.090.286
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	7.237.286.551
1	04		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	48.219.506.046
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	48.219.506.046
1	05		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	34.664.903.558
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.765.261.630
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.629.918.052
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	Satuan Polisi Pamong Praja	16.269.723.876
1	06		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	18.152.668.382
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	Dinas Sosial	18.152.668.382
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	168.592.259.693
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	389.405.850
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	389.405.850

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2025
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	5.399.367.974
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.399.367.974
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	666.434.350
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	666.434.350
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	202.300.800
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan	202.300.800
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	51.265.117.116
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	Dinas Lingkungan Hidup	51.265.117.116
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.918.636.062
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.918.636.062
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	12.153.613.414
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.153.613.414
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	32.163.911.530
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	Dinas Perhubungan	32.163.911.530
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	10.360.000.815
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.360.000.815
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	12.838.230.256
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja	12.838.230.256
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	9.824.352.657
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.626.247.580
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	3.198.105.077

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2025
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	18.245.033.657
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	Dinas Pemuda dan Olahraga	18.245.033.657
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	148.435.950
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	148.435.950
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	152.091.350
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	Dinas Komunikasi dan Informatika	152.091.350
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	1.034.476.720
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.034.476.720
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	371.559.700
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	371.559.700
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	6.459.291.492
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.459.291.492
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	48.002.961.959
3	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.380.232.900
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.380.232.900
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	9.289.148.221
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	Dinas Pariwisata	9.289.148.221
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	22.337.600.336
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	22.337.600.336
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	10.772.958.436
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	10.772.958.436
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2.223.022.066
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.223.022.066
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	103.125.931.235
4	01		SEKRETARIAT DAERAH	56.694.603.854
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	Sekretariat Daerah	56.694.603.854
4	02		SEKRETARIAT DPRD	46.431.327.381
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	Sekretariat DPRD	46.431.327.381

Kode			Urusan Pemerintahan Daerah/Perangkat Daerah	Pagu Indikatif Tahun 2025
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	90.688.012.786
5	01		PERENCANAAN	11.314.405.689
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.314.405.689
5	02		KEUANGAN	63.827.309.361
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24.012.110.002
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	39.815.199.359
5	03		KEPEGAWAIAN	9.239.307.630
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	9.239.307.630
5	04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.272.913.400
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	1.272.913.400
5	05		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.034.076.706
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	Badan Riset dan Inovasi Daerah	5.034.076.706
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	12.822.453.234
6	01		INSPEKTORAT DAERAH	12.822.453.234
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	Inspektorat	12.822.453.234
7			UNSUR KEWILAYAHAN	156.934.048.863
7	01		KECAMATAN	156.934.048.863
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	Kecamatan Palu Selatan	20.437.675.431
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	Kecamatan Mantikulore	27.004.002.204
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	Kecamatan Palu Barat	18.322.523.114
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	Kecamatan Palu Timur	16.796.782.694
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	Kecamatan Tatanga	19.128.317.261
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	Kecamatan Tawaeli	17.201.944.631
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	Kecamatan Ulujadi	20.336.226.507
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	Kecamatan Palu Utara	17.706.577.021
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	10.844.304.553
8	01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	10.844.304.553
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.844.304.553
Total				**1.646.628.052.299**



BAB 6

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah ditetapkan untuk mengetahui keberhasilan pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu. Hal ini berdasarkan pada aspek dan fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Besaran capaian indikator pembangunan daerah Kota Palu Tahun 2025 ditetapkan berdasarkan perkiraan capaian hasil dan dampak program pembangunan daerah sesuai tahapan tahunan pada RPJMD Tahun 2021-2026. Penetapan kinerja capaian indikator pembangunan daerah Kota Palu bertujuan mengukur tingkat pencapaian visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu yang telah dijanjikan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Palu selama periode Tahun 2025.

Indikator kinerja pembangunan daerah Kota Palu yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Palu periode Tahun 2025 dijadikan dasar oleh seluruh perangkat daerah yang ada di Kota Palu dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode Tahun 2025. Dengan demikian, indikator capaian pembangunan daerah dalam RKPD menjadi dasar bagi PD dalam pencapaian indikator sasaran program dan kegiatan. Oleh karena itu, capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) PD ditetapakan untuk mendukung tercapainya indikator kinerja pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RKPD. Keberhasilan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD yang diukur dari capaian indikator kinerja program kegiatan merupakan keberhasilan pemerintah Kota Palu dalam pembangunan daerah yang diukur dari capaian indikator pembangunan daerah dalam RKPD periode yang bersesuaian. Oleh

karena itu, suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome/impact*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) hingga akhir periode masa jabatan.

Penetapan indikator kinerja utama berdasarkan RPJMD Kota Palu Tahun 2021-2026 disajikan dalam Tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kota Palu Tahun 2025

No.	Indikator	Target IKU Tahun 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,0 – 5,12
2	Kontribusi sektor sekunder terhadap PDRB	28,36
3	Kontribusi sektor tersier terhadap PDRB	65,94
4	Indeks Kota Layak Huni	63,5
5	Indeks Risiko Bencana	100
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,28
7	Indeks ketentraman dan ketertiban	100
8	Persentase jalan yang berkeselamatan	8,38
9	Persentase Layanan Angkuntan Darat	25.92
10	Persentase luas kawasan kumuh	0,03
11	Persentase rumah tidak layak huni	9,21
12	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	95
13	Indeks ketangguhan kota	500

No.	Indikator	Target IKU Tahun 2025
14	Indeks Pembangunan Manusia	83,90
15	Harapan Lama Sekolah	17,60
16	Rata-rata Lama Sekolah	11,81
17	Angka Harapan Hidup	73,80
18	Case Fatality Rate Covid-19	1
19	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan	90
20	Indeks Pembangunan Gender	98,21
21	Indeks Kota Layak Anak	Madya
22	Indeks kerukunan umat beragama	84
23	Indeks Aktualisasi Pancasila	71
24	Indeks pembangunan kebudayaan	54,14
25	Indeks Reformasi Birokrasi	90
26	Opini BPK	WTP
27	Nilai Evaluasi AKIP	A
28	Tingkat Maturitas SPIP	LEVEL III
29	Indeks Profesionalitas ASN	85
30	Indeks Pelayanan Publik	B
31	Indeks Inovasi Daerah	70
32	Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,15
33	Indeks Kualitas Kebijakan	85

Berdasarkan hasil kesepakatan Rakortegrenbang 2024 terdapat 31 indikator kinerja utama beserta targetnya yang ditampilkan pada Tabel 6.2 sebagai berikut:

Tabel 6.2
Kesepakatan Target 31 Indikator Kinerja Utama Kota Palu
Tahun 2025

No	Indikator Makro	Target Tahun 2025
1	PDRB per kapita (Jt Rp)	89,00 – 96,12
2	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	6,80 - 9,36
3	Tingkat Kemiskinan	5,90
4	Rasio Gini	0,293 – 0,330
5	Kontribusi PDRB Provinsi	7,20 - 7,88
6	Indeks Modal Manusia	Na
7	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	19,66
8	Penurunan intensitas emisi GRK	Na
9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Na
10	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00 - 5,12
11	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Na
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,74 – 5,50
13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	56,37
14	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	0,94
15	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	3,00 – 4,00
16	PDRB Nilai Tambah Akomodasi dan Makan Minum (Harga Berlaku)	360,1 M
17	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Na
18	Ekspor Barang dan Jasa	Hanya di tingkat provinsi
19	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	7 - 10
20	Pembentukan Modal Tetap Bruto	49,07
21	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Na
22	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	3,54
23	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,15
24	Indeks Integritas Nasional	70
25	Indeks Demokrasi Indonesia	Hanya di tingkat provinsi
26	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,84

No	Indikator Makro	Target Tahun 2025
27	Tingkat Inflasi	2,35 - 3,0
28	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Na
29	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,32
30	Konsumsi Listrik per Kapita	Na
31	Prevalensi ketidak cukupan konsumsi pangan	5,44

Selanjutnya, penetapan Indikator Kinerja Kunci dapat dilihat pada Tabel 6.3 di bawah ini :

Tabel 6.3
Penetapan Indikator Kinerja Kunci Kota Palu Tahun 2025

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	
1	Pertumbuhan PDRB	5,0 – 5,12%
2	Laju inflasi	2,35 – 3,00%
3	PDRB per kapita ADHK (2010)	47.348.345
4	PDRB per kapita ADHB	89.000.000 – 96.120.000
5	Indeks Gini	0,293 - 0,330
6	Indeks Wiliamson	< 0,255
7	Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia	
	a. 40% Penduduk Berpenghasilan Rendah	24
	b. 40% Penduduk Berpenghasilan Menengah	37,75
	c. 20% Penduduk Berpenghasilan Tinggi	38
6	Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan	94,1
	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,85
	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,19
7	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	83,9
8	Harapan Lama Sekolah (tahun)	17,6
9	Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,81
10	Angka harapan hidup	73,80
11	Pengeluaran Perkapita/tahun (ribu rupiah)	16.250
12	Prevalensi balita gizi buruk (%)	0,42
13	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	56,37
14	Tingkat pengangguran terbuka	4,74 – 5,50
15	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) ADHB	1,25

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
16	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB (%) ADHB	10,7
17	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB (%) ADHB	7,9
	Aspek Daya Saing Daerah	
1	Rasio Ekspor + Impor terhadap PDB (indikator keterbukaan ekonomi)	-11,35%
2	Angka kriminalitas (per 10.000 penduduk)	11,5
3	Rasio ketergantungan	37,35
4	*Incremental Capital Output Ratio* (ICOR)	3,5-3
	Aspek Pelayanan Umum	
	Pelayanan Urusan Wajib	
	Terkait Pelayanan Dasar	
1	Pendidikan	
1.1	Harapan Lama Sekolah (tahun)	17,6
	Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,81
1.2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	64,68
1.3	Angka Partisipasi Kasar	
	1.3.1 Angka Partisipasi Kasar SD	97
	1.3.2 Angka Partisipasi Kasar SMP	96
1.4	Angka Partisipasi Murni	
	1.4.1 Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	96,08
	1.4.2 Angka Partisipasi Murni SMP/MTS/Paket B	92,832
1.5	Angka Partisipasi Sekolah	
	1.5.1 Angka Partisipasi Sekolah SD/MI/Paket A	97
	1.5.2 Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTS/ Paket B	93,8
1.6	Angka Putus Sekolah	
	1.6.1 Angka Putus Sekolah SD/MI/Paket A	4
	1.6.2 Angka Putus Sekolah SMP/MTS/Paket B	6
1.7	Angka Kelulusan (AL)	
	1.7.1 Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100
	1.7.2 Angka Kelulusan SMP/MTS/Paket B	100
1.8	Angka Melanjutkan (AM)	
	1.8.1 Angka Melanjutkan SD/MI/Paket A	97,17
	1.8.2 Angka Melanjutkan SMP/MTS/Paket B	108,32
1.9	Fasilitas Pendidikan	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
	1.9.1 Sekolah Pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	93,80%
	1.9.2 Sekolah Pendidikan SMP/MTS kondisi bangunan baik	90,60%
1.1	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	
	SD	49,34
	SMP	33,07
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	
	SD	25,8
	SMP	28,4
1.12	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,88
1.13	Kualifikasi S1 / D-IV	
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV SD	97,2
1.15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1 / D-IV SMP	99
1.16	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	65,49
1.17	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	97,5
1.18	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	94,83
2	Kesehatan	
2.1	Angka kelangsungan hidup bayi	0,9968
2.2	Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup	15
2.3	Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup	10
2.4	Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup	177,64
2.5	Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk)	3,8
2.6	Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)	62,33
2.7	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100
2.8	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan	100
2.9	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	100
2.1	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100
2.11	AFP Rate per 100.000 penduduk	2

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
2.12	Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani	100
2.13	Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD	100
2.14	Penderita Diare yang ditangani	100
2.15	Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	100
2.16	Cakupan kunjungan bayi	100
2.17	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	100
2.18	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100
2.19	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100
2.2	Persentase Ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil	100
2.21	Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100
2.22	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100
2.23	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
2.24	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
2.25	Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
2.26	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100
2.27	Persentase penderita Hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	100
2.28	Persentase penyandang DM mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100
2.29	Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat yang mendapatkan pelayanan	100
2.3	Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	100
2.31	Persentase orang beresiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	100
2.32	Indeks pelayanan kesehatan puskesmas	88
2.33	Prevalensi balita Stunting	0,1
2.34	Persentase penanggulangan kejadian luar biasa	100

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
2.35	Persentase penanggulangan kasus kejadian Covid-19	<1
2.36	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,531
2.37	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100
2.41	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
3.1	Pekerjaan Umum	
3.1.1	Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam kondisi baik	81,07
3.1.2	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah penduduk	0,467
3.1.3	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	100
3.1.4	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5)	8,38
3.1.5	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	66,18
3.1.6	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	42,65
3.1.7	Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik	40,48
3.1.8	Rasio jaringan irigasi	80,14
3.1.9	Persentase penduduk berakses air minum	96,51
3.1.10	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak. perkotaan dan pedesaan	33,12
3.1.11	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	80,14
3.1.12	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	96,51
3.1.13	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	8,16
3.1.14	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	81,07
3.1.15	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	52,06
3.1.16	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0,63
3.2	Penataan Ruang:	

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
3.2.1	Persentase luas RTH dari luas wilayah kota	20,00%
3.2.2	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,3402
3.2.3	Ketaatan terhadap RTRW (%)	95,08%
3.2.4	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	76,02%
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	
4.1	Rasio rumah layak huni	0,908
4.2	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	90,79%
4.3	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,03%
4.4	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	100,00%
4.5	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100,00%
4.6	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100,00%
4.7	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	94,85%
4.8	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	9,21%
4.9	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum)	100,00%
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
5.1	Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	2,9
5.2	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	13,86
5.3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	100%
5.4	Persentase Penegakan PERDA	100%
5.5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	101,25%
5.6	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	15 menit
5.7	Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana	85%
5.8	Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana	85%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
5.9	persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan	100%
5.1	Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	75%
5.11	Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	75%
5.12	Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	85%
5.13	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	97,88%
5.14	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%
5.15	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%
6	Sosial	
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	69,91
6.2	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	77,5
6.3	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	97,8
6.4	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	100
6.5	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100
6.6	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100
6.7	Persentase penyandang cacat fisik dan mental. serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	80,34
6.8	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	16,45%
6.9	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	99,70%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
	Urusan Wajib	
	Tidak Terkait Pelayanan Dasar	
1	Tenaga Kerja	
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	78%
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	46%
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	20,07%
1.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	15,97%
1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	91,00%
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	
1.8	Prosentase terfasilitasi BPJS Ketanagakerjaan	0,6
1.9	Prosentase Pekerja yang terfasiltasi penyelesaian Perselisihan	0,3
1.1	Prosentase tenaga kerja yang dilatih kopetensi keahlian dan keterampilan Tenaga kerja yang ditempatkan	0,7842
1.11	Tenaga kerja yang ditempatkan	0,7703
1.12	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100
1.13	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	3
1.14	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	18,89
1.15	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan),	2,4
1.16	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	8,72
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	3,04
2.2	Proporsi kursi yang dididuduki perempuan di DPRD	14
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	89,29
2.4	Rasio KDRT	0,06

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
2.5	Partisipasi angkatan kerja perempuan	31,38
2.6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100
2.8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu,	100
2.9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	35,44
2.1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100
2.11	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%
2.12	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100
2.13	Rasio APM perempuan/laki-laki di SD	0,96
2.14	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP	0,93
2.15	Rasio APM perempuan/laki-laki di SMA	1,11
2.16	Jumlah Organisasi Perempuan yang dibina	175
2.17	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	98,21%
2.18	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	64,94
2.19	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	33,12
2.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	0,041
2.21	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,071
3	Pangan	
3.1	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/Hari)	3,1
3.2	Konsumsi protein (Gram/Kap/Hari	72,9
3.3	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,91

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
3.4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	150
4	Pertanahan	
4.1	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	95%
4.2	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	80%
5	Lingkungan Hidup	
5.1	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	19
5.2	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	84%
5.3	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH yang di terbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di daerah kabupaten/kota,	24,9
5.4	Persentase sampah yang terangkut	100
5.5	Jumlah sampah yang dikelola oleh masyarakat	872,2
5.6	Persentase jumlah sampah yang tertangani	70
5.7	Operasionalisasi TPA/TPST/ SPA di kabupaten/kota	68,86%
5.8	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang diterbitkan	0
5.9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	75,28
5.1	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	75,28
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
6.1	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	0,662
6.2	Rasio anak (0-18 tahun) beraktekelahiran	100
6.3	Ketersediaan database kependudukan skala kota	Ada
6.4	Cakupan penerbitan akta kelahiran	736%
6.5	Perekaman KTP elektronik	100%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
6.6	Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	50%
6.7	Kepemilikan akta kelahiran	100%
6.8	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	22
6.9	Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian	100%
6.1	Rasio anak (0-17 tahun kurang satu hari) ber-KIA	50%
6.11	Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah	100%
6.12	Cakupan Penerbitan Akta Perceraian	100%
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
7.1	Persentase PKK aktif	100%
7.2	Persentase pengentasan desa tertinggal	50%
7.3	Persentase peningkatan status desa mandiri	0%
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
8.1	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	1,65
8.2	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	100%
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100
8.4	Jumlahkebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1
8.5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	32
8.6	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,15
8.7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,12
8.8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya di bawah 20 tahun	9%
8.9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	40%
8.1	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	63%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
8.11	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	90%
8.12	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	79%
8.13	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	43%
8.14	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	100%
8.15	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100%
8.16	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100%
8.17	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	54,07
8.18	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100%
8.19	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	57%
8.2	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	79%
8.21	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap kelurahan	1,77
8.22	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	79%
8.23	Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun	22%
8.24	TFR (Angka Kelahiran Total)	33,12%
8.25	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	4,10%
8.26	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,10%
9	Perhubungan	
9.1	Jumlah penumpang angkutan darat melalui terminal	163,359
9.2	Jumlah trayek angkutan umum	10 trayek

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	122 unit
9.4	Persentase layanan angkutan darat	25,92%
9.5	Persentase Pemenuhan Uji Kendaraan (KIR)	2,90%
9.6	Pemasangan Rambu-rambu	86,32%
9.8	Tingkat pelayanan ruas jalan Kota Palu	22 ruas Jalan
9.9	Jumlah Titik Parkir yang direvitalisasi	229 titik Parkir
9.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,72
9.11	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	22 ruas Jalan
10	Komunikasi dan Informatika	
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	100%
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	100%
10.3	Jumlah Staf IT yang terlatih	193 org
10.4	Jumlah Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem informasi (Website)	45
10.5	Rasio Perangkat Daerah yang terintegrasi dalam sistem informasi (Website)	100%
10.6	Jumlah sarana pengaduan dan pelayanan informasi masyarakat (media)	7 media
10.7	Jumlah terlaksananya diseminasi informasi kegiatan pemerintah kota	4
10.8	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100
10.9	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	66,66%
11	Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	
11.1	Persentase koperasi aktif	90,67%
11.3	Persentase Usaha Mikro	1,14%
11.4	Persentase usaha mikro Yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas produk	0,79
11.5	Presentase koperasi aktif yang menjalankan RAT	0,848

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
11.6	Prosentase koperasi RAT yang ditingkatkan kapasitas dan kualitas usaha	4
11.7	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	46
11.8	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	14,4
12	Penanaman Modal	
12.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik
12.2	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	338 Investor
12.3	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/ PMA) (Miliar Rupiah)	38,925 M
12.4	Kenaikan / Penurunan Nilai realisasi PMDN (Miliar Rupiah)	0,44%
12.5	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	10,06
13	Kepemudaan dan Olah Raga	
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	56
13.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	67,3
13.3	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	27,2
13.4	Peningkatan prestasi olahraga	2
14	Statistik	
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	tersedia
14.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100
14.3	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100
15	Persandian	
15.1	Jumlah Sandiman yang tersedia	7
16	Kebudayaan	
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	11

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	6
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	6
16.5	Terlestarikannya Cagar Budaya	87
17	Perpustakaan	
17.1	Rasio pengunjung perpustakaan per tahun	1,03
17.2	Rasio judul buku dengan koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	35,33
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	3,09
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/bulan	296
17.5	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	7
17.6	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71,86
17.7	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	15
18	Kearsipan	
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	49
18.2	Jumlah SDM Pengelola kearsipan	50
18.3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	100
18.4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	100
	Urusan Pilihan	
1	Pariwisata	
1.1	Kunjungan wisata	153,344
1.2	Lama kunjungan Wisata	2,12
1.3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	15
1.4	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	15

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
1.5	Tingkat hunian akomodasi	6,25
1.6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	1,25%
1.7	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	9,80%
2	Pertanian	
2.1	Produksi tanaman pangan utama	
	1. Padi (ton)	5,74
	2. Jagung (ton)	4,87
2.3	Produksi peternakan utama	
	1. Sapi (ekor)	6,928
	2. Kambing/domba (ekor)	28,585
	3. Unggas (ekor)	4,938,161
2.5	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	25
2.6	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,74
2.7	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-10
5	Perdagangan	
5.1	Jumlah pasar yang tersegmentasi	3
5.2	Tipe pasar yang ditingkatkan	3
5.3	Pasar Tematik	1
5.4	Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	85%
5.5	Pengawasan UTTP dan BDKT	24
6	Perindustrian	
6.1	Cakupan Bina IKM	51%
6.2	Persentase industri yang telah menerapkan standarisasi halal dan HAKI	32%
6.3	Persentase pertumbuhan sektor industri mikro dan kecil	32%
6.4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kota Palu	2,08
6.5	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	20,00%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
6.6	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	1,25%
6.7	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	3,40%
6.8	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	50
7	Kelautan dan Perikanan	
7.1	Produksi perikanan	
	1. Perikanan tangkap (ton)	1,156
	2. Perikanan budi daya (ton)	138
7.3	Konsumsi ikan (Kg/Kap/ Tahun)	76,87
7.4	Cakupan bina kelompok nelayan (%)	25
7.5	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	1,294,57
	Penunjang Urusan	
1	Perencanaan Pembangunan	
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	ada
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	ada
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan Perda	ada
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	Konsisten
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	Konsisten
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	Sesuai
1.8	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	20,68%
1.9	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	20,01%

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
1.1	Opini Laporan Keuangan	WTP
1.11	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	20,01%
1.12	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	20,01%
1.13	Manajemen Aset :	
	1.13.1 Apakah ada daftar aset tetap?	Ya
	1.13.2 Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap?	Ya
	1.13.3 Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan?	Ya
	1.13.4 Apakah nilai aset tercantum dalam laporan keuangan?	Ya
2	Keuangan	
2.1	Persentase SILPA terhadap APBD	2,75%
2.2	Persentase belanja pendidikan (20%)	24,02%
2.3	Persentase belanja kesehatan (10%)	27,37
2.5	Bagi hasil Kabupaten/Kota dan Desa	0,05%
2.6	Penetapan APBD	Tepat Waktu
3	Pendapatan	
3.1	Rasio Pendapatan Pajak Daerah terhadap PAD	45,3
3.2	Rasio Hasil Retribusi Daerah terhadap PAD	9,39
3.3	Rasio Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terhadap PAD	0,91
3.4	Rasio Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap PAD	44,4
3.5	Rasio PAD	7,99
4	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	
4.1	Rata-Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan	20 JP
4.2	Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal	8
4.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural	90,55

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
4.4	Jumlah jabatan Pimpinan Tinggi pada instansi pemerintah	39
4.5	Jumlah Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah	3
4.6	Jumlah Pemangku Jabatan Fungsional tertentu pada instansi pemerintah	5,25
4.7	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,1542
4.8	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	0,06
4.9	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100,00%
5	Penelitian dan pengembangan	
5.1	Persentase implementasi rencana Kelitbangan,	78,50%
5.2	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan,	93,64%
5.3	Penerapan SIDa:	
	5.3.1 Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah,	60,98%
	5.3.2 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah,	80,00%
6	Pengawasan	
6.1	Persentase tindak lanjut temuan	82%
6.2	Persentase pelanggaran pegawai	15,00%
6.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3
6.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3
7	Sekretariat Dewan	
7.1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/ Kab/Kota	Tersedia
7.2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	Tersedia

No.	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target IKK Tahun 2025
7.3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	Terintegrasi
8	Pengadaan	
8.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya, yang ditandatangani pada kuartal pertama	67,00%
8.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	67,00%
8.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	67,00%
9	Transparansi dan Partisipasi Publik	
9.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	100
9.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100

Selain pencapaian kedua indikator kinerja tersebut, prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewenangan kota berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dalam diwujudkan dalam program, kegiatan, sub kegiatan perangkat daerah yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar. Target penerapan SPM dalam RKPD Kota Palu Tahun 2025 disajikan dalam Tabel 6.4.

Tabel 6.4
Penerapan Standar Pelayanan Minimal
Pemerintah Kota Palu Tahun 2025

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil Asesmen Nasional - Kemampuan Literasi SD - Kemampuan Literasi SMP - Kemampuan Numerasi SD - Kemampuan Numerasi SMP	61,39 71,07 43,25 69,84	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan diabetes mellitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
13	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
14	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
15	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Jumlah Warga dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
16	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	90%	Dinas Pekerjaan Umum
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	Dinas Pekerjaan Umum
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperolah fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
20	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Capaian Tahun 2025	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota		
21	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
22	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
23	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
25	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial
26	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial
27	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial
28	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100%	Dinas Sosial
29	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana daerah kabupaten/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial



BAB 7

PENUTUP

BAB VII
PENUTUP

RKPD Kota Palu Tahun 2025 merupakan dokumen rencana operasional pembangunan di Tahun 2025, memusatkan pada pencapaian tujuan, sasaran, dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek Tahun 2025. Penetapan prioritas rencana pembangunan Tahun 2025, mengacu pada isu-isu strategis yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan bagi pencapaian prioritas rencana pembangunan daerah Kota Palu, prioritas pembangunan Sulawesi Tengah, serta program dan kegiatan prioritas pembangunan nasional.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2025, organisasi perangkat daerah wajib menerapkan prinsip–prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dengan pendekatan rasional, realistis, dan proporsional. Selain itu, pelaksanaan program dan kegiatan mengisyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas dan fungsi yang melekat pada masing–masing organisasi perangkat daerah.

Perwujudan keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang diprogramkan, telah dilaksanakan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah yang dimulai dari Pra Musrenbang atau Musrenbang Tingkat RT/RW, Musrenbang Tingkat Kelurahan, Kecamatan, Musrenbang Inklusi dan Musrenbang Tingkat Kota Palu. RKPD Tahun 2025 merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam

pelaksanaan program pembangunan. Untuk menjamin terlaksananya dan terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan bagi semua pihak terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah di Kota Palu serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program–program RKPD Tahun 2025 dengan sebaik–baiknya. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta dan kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
2. RKPD Tahun 2025 menjadi acuan dan pedoman bagi PD dalam menyusun kebijakan publik terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu Tahun 2025.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan pembangunan.
4. Pada akhir Tahun Anggaran 2024 setiap PD wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang ditetapkan.
5. Setiap PD wajib menjaga efektivitas pelaksanaan program dengan melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Wali Kota Palu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

RKPD Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Langkah persiapan dimulai

sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergi, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian untuk pelaksanaannya.

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID

BUKU II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

RKPD

KOTA PALU

2025

BUKU 2
MATRIKS RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN
RKPD TAHUN 2025

Buku 2 Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Palu Tahun 2025 memuat tentang rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas Perangkat Daerah untuk Tahun Rencana 2025 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026. Buku ini memuat uraian rinci yang menjelaskan nama program, kegiatan, dan sub kegiatan, indikator kinerja program, kegiatan, dan sub kegiatan, tahun rencana yang meliputi lokasi, target capaian kinerja dan pagu indikatif, klasifikasi program, kegiatan, dan sub kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas daerah Kota Palu. Pagu indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Pagu Indikatif Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu Indikatif 2025
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	445.061.659.712
2	Dinas Kesehatan	74.497.572.032
	Puskesmas Pantoloan	6.419.413.866
	Puskesmas Tawaeli	5.809.135.354
	Puskesmas Mamboro	5.265.544.283
	Puskesmas Talise	8.451.173.027
	Puskesmas Singgani	7.154.198.781
	Puskesmas Kawatuna	5.708.184.881
	Puskesmas Birobuli	7.243.586.697
	Puskesmas Bulili	6.119.385.723
	Puskesmas Mabelopura	6.244.900.604
	Puskesmas Sangurara	7.512.285.693
	Puskesmas Kamonji	7.984.206.611
	Puskesmas Anuntodea Tipo	4.525.084.165
	Puskesmas Nosarara	5.199.648.172
	Puskesmas Lere	5.339.340.465

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu Indikatif 2025
3	RSU. Anutapura	191.773.781.807
4	Dinas Pekerjaan Umum	148.069.090.286
5	Dinas Penataan Ruangdan Pertanahan	7.439.587.351
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	48.219.506.046
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	11.765.261.630
8	Satuan Polisi Pamong Praja	16.269.723.876
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.629.918.052
10	Dinas Sosial	18.152.668.382
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	5.399.367.974
12	Dinas Lingkungan Hidup	51.265.117.116
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.918.636.062
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.153.613.414
15	Dinas Perhubungan	32.163.911.530
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	10.660.528.115
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dan Tenaga Kerja	13.227.636.106
18	DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.626.247.580
19	Administrator Kawasan Ekonomi Khusus	3.198.105.077
20	Dinas Pemuda dan Olahraga	18.245.033.657
21	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.830.851.192
22	Dinas Pariwisata	9.289.148.221
23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	26.384.267.586
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	12.995.980.502
25	Sekretariat Daerah	56.694.603.854
26	Sekretariat DPRD	46.431.327.381
27	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.314.405.689
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	24.012.110.002
29	Badan Pendapatan Daerah	39.815.199.359
30	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	10.512.221.030
31	BadanRiset dan Inovasi Daerah	5.034.076.706

No.	Organisasi Perangkat Daerah	Pagu Indikatif 2025
32	Inspektorat	12.822.453.234
33	Kecamatan Palu Selatan	20.437.675.431
34	Kecamatan Mantikulore	27.004.002.204
35	Kecamatan Palu Barat	18.322.523.114
36	Kecamatan Palu Timur	16.796.782.694
37	Kecamatan Tatanga	19.128.317.261
38	Kecamatan Tawaeli	17.201.944.631
39	Kecamatan Ulujadi	20.336.226.507
40	Kecamatan Palu Utara	17.706.577.021
41	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	10.844.304.553
Total		**1.646.628.052.299**

Rincian rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD Kota Palu Tahun 2025 serta perkiraan maju Tahun 2026 disajikan pada Tabel 2.

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				1.050.601.623.976		1.071.613.656.456
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				439.010.726.992		447.790.941.532
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				439.010.726.992		447.790.941.532
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	328.696.234.079	BB	335.270.158.761
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 Dokumen	405.044.798	4 Dokumen	413.145.694
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	118.520.950	3 Dokumen	120.891.369
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	77.116.250	1 dokumen	78.658.575
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	68.704.548	1 dokumen	70.078.639
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	140.703.050	1 laporan	143.517.111
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100	321.395.392.573	100	327.823.300.424

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	2714 org/bulan	321.269.047.873	2714 org/bulan	327.694.428.830
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	4 laporan	126.344.700	4 laporan	128.871.594
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	315.162.360	100%	321.465.607
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	2 Laporan	315.162.360	2 Laporan	321.465.607
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	265.037.500	100%	270.338.250
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	184 dokumen	265.037.500	184 dokumen	270.338.250
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	2.021.986.994	100%	2.062.426.734
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	2.423.250	4 paket	2.471.715
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	8 paket	1.197.231.650	8 paket	1.221.176.283
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	20 paket	197.160.162	20 paket	201.103.365
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	50 paket	35.225.932	50 paket	35.930.451

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	50 dokumen	40.700.000	50 dokumen	41.514.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	60 laporan	54.570.000	60 laporan	55.661.400
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	22 laporan	494.676.000	22 laporan	504.569.520
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	195.937.902	100%	199.856.660
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	100 unit	39.690.000	100 unit	40.483.800
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	3 unit	156.247.902	3 unit	159.372.860
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	3.163.531.200	100%	3.226.801.824
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	539.640.000	12 laporan	550.432.800
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	2.623.891.200	12 laporan	2.676.369.024
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	934.140.752	100%	952.823.567
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	23 unit	621.340.000	23 unit	633.766.800

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	74 unit	32.700.000	74 unit	33.354.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	280.100.752	1 unit	285.702.767
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan	Kota Palu	100%	108.875.365.313	100%	111.052.872.619
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Kota Palu	100	54.803.421.034	100	55.899.489.455
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kota Palu	1 unit	493.000.000	1 unit	502.860.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kota Palu	3 ruang	985.426.800	3 ruang	1.005.135.336
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	5 ruang	416.925.000	5 ruang	425.263.500
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	4 ruang	1.020.125.000	4 ruang	1.040.527.500
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	8 unit	5.731.896.309	8 unit	5.846.534.235
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	8 ruang	313.590.000	8 ruang	319.861.800
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	11	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	6 ruang	1.417.590.000	6 ruang	1.445.941.800
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Kota Palu	5 paket	1.962.016.353	5 paket	2.001.256.680
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Kota Palu	5 paket	300.000.000	5 paket	306.000.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Palu	500 peserta didik	416.554.250	500 peserta didik	424.885.335

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Kota Palu	210 satuan pendidikan	1.917.907.645	210 satuan pendidikan	1.956.265.798
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Kota Palu	249 Satuan Pendidikan	31.312.764.387	249 Satuan Pendidikan	31.939.019.675
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	36	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kota Palu	2 konten digital	657.365.000	2 konten digital	670.512.300
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	37	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Palu	50 orang	497.880.400	50 orang	507.838.008
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	38	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Palu	5 dokumen	156.106.500	5 dokumen	159.228.630
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	39	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Palu	5 dokumen	47.831.000	5 dokumen	48.787.620
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	41	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kota Palu	5 komunitas	501.743.800	5 komunitas	511.778.676
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	43	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Palu	5 kegiatan	653.527.000	5 kegiatan	666.597.540
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	46	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Palu	10 paket	512.719.965	10 paket	522.974.364

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	47	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Palu	6 ruang	4.572.604.370	2 ruang	4.664.056.457
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	48	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	8 unit	317.590.000	8 unit	323.941.800
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	50	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Palu	179 satuan pendidikan	111.355.125	172 satuan pendidikan	113.582.228
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.01	51	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	10 ruang	486.902.130	4 ruang	496.640.173
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Kota Palu	100	38.609.490.388	100	39.381.680.196
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Kota Palu	1 unit	1.800.000	1 unit	1.836.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Kota Palu	5 ruang	460.046.337	5 ruang	469.247.264
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	5 ruang	1.284.244.200	5 ruang	1.309.929.084
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	1 ruang	100.000	1 ruang	102.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Kota Palu	1 ruang	100.000	1 ruang	102.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Kota Palu	6 unit	3.687.507.000	6 unit	3.761.257.140
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	3 ruang	1.755.364.290	3 ruang	1.790.471.576
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	6 ruang	878.864.251	6 ruang	896.441.536
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	3 ruang	458.129.505	3 ruang	467.292.095

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	21	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	1 unit	130.000	1 unit	132.600
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	3 unit	1.313.214.434	3 unit	1.339.478.723
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Kota Palu	8 paket	1.464.855.064	8 paket	1.494.152.165
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Kota Palu	500 peserta didik	547.147.400	500 peserta didik	558.090.348
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Palu	76 orang	243.840.100	76 orang	248.716.902
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Kota Palu	52 satuan pendidikan	446.730.000	52 satuan pendidikan	455.664.600
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Kota Palu	53 satuan pendidikan	20.476.726.151	53 satuan pendidikan	20.886.260.674
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	48	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Kota Palu	52 orang	41.100.000	52 orang	41.922.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	49	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kota Palu	2 konten digital	73.671.000	2 konten digital	75.144.420

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	50	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Palu	52 orang	113.878.000	52 orang	116.155.560
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	51	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Palu	5 dokumen	698.400.000	5 dokumen	712.368.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	54	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kota Palu	5 komunitas	296.820.000	5 komunitas	302.756.400
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	55	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kota Palu	5 kegiatan	2.043.881.037	5 kegiatan	2.084.758.658
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	58	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Palu	5218 satuan pendidikan	77.668.500	5218 satuan pendidikan	79.221.870
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	59	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Palu	7 ruang	100.000	7 ruang	102.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	60	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Palu	50 orang	1.739.752.500	50 orang	1.774.547.550
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	61	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Kota Palu	200 buku	55.353.819	200 buku	56.460.895
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	62	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Kota Palu	200 paket	118.774.050	200 paket	121.149.531

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	64	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	5 ruang	152.036.956	5 ruang	155.077.695
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	67	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Kota Palu	2 paket	179.255.794	2 paket	182.840.910
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Kota Palu	100	10.210.031.053	100	10.414.231.674
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	02	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Kota Palu	8 unit	1.270.085.809	8 unit	1.295.487.525
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	11	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Palu	9353 peserta didik	26.065.954	9353 peserta didik	26.587.273
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Kota Palu	50 orang	539.321.000	50 orang	550.107.420
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Palu	249 satuan pendidikan	350.610.172	249 satuan pendidikan	357.622.375
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Kota Palu	249 satuan pendidikan	6.087.898.000	249 satuan pendidikan	6.209.655.960
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	23	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Kota Palu	2 konten digital	100.000	2 konten digital	102.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	24	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Kota Palu	50 orang	455.106.000	50 orang	464.208.120

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	26	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Palu	5 dokumen	53.445.000	5 dokumen	54.513.900
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	29	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Kota Palu	10 komunitas	208.800.000	10 komunitas	212.976.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	39	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Palu	50 orang	105.090.000	50 orang	107.191.800
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	41	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD yang tersedia	Kota Palu	100 paket	97.452.365	100 paket	99.401.412
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	46	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Kota Palu	2 Paket	953.417.103	2 Paket	972.485.445
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.03	47	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Kota Palu	3465 Satuan Pendidikan	62.639.650	3465 Satuan Pendidikan	63.892.443
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Kota Palu	100	5.252.422.838	100	5.357.471.295
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Non Formal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Kota Palu	3465 peserta didik	243.900.400	3465 peserta didik	248.778.408
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04	16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Kota Palu	22 satuan pendidikan	13.206.000	22 satuan pendidikan	13.470.120
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Non Formal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Kota Palu	22 satuan pendidikan	3.386.400.000	22 satuan pendidikan	3.454.128.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04	27	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Kota Palu	3 dokumen	40.365.000	3 dokumen	41.172.300
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04	28	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Kota Palu	3 dokumen	19.713.000	3 dokumen	20.107.260
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04	39	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Kota Palu	4 Ruang	1.447.887.556	4 Ruang	1.476.845.307
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04	41	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Kota Palu	3 Unit	100.000	3 Unit	102.000
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.04	46	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Kota Palu	463 satuan pendidikan	100.850.882	463 satuan pendidikan	102.867.900
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase pemenuhan pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Kota Palu	100%	1.439.127.600	100%	1.467.910.152
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terpenuhinya Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan	Kota Palu	100	1.439.127.600	100	1.467.910.152
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	04	2.01	01	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kota Palu	2 dokumen	1.391.095.000	2 dokumen	1.418.916.900

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000	04	2.01	02	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Kota Palu	2 Laporan	48.032.600	2 Laporan	48.993.252
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				355.247.442.161		362.352.391.004
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000				Dinas Kesehatan				74.497.572.032		75.987.523.473
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	19.267.787.482	BB	19.653.143.232
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	14 Dok	588.877.900	14 Dok	600.655.458
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 dokumen	250.715.200	3 dokumen	255.729.504
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	183.392.300	1 dokumen	187.060.146
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	44.993.900		45.893.778
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	52.464.100	1 laporan	53.513.382

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	Kota Palu	2 laporan	57.312.400	2 laporan	58.458.648
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	9.101.803.232	100%	9.283.839.297
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	147 orang/ bulan	9.028.758.332	147 orang/ bulan	9.209.333.499
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kota Palu	12 dokumen	23.064.400	12 dokumen	23.525.688
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 laporan	9.025.500	1 laporan	9.206.010
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Palu	1 dokumen	7.990.000	1 dokumen	8.149.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Palu	4 laporan	12.930.000	4 laporan	13.188.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kota Palu	1 Dokumen	20.035.000	1 Dokumen	20.435.700
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	62.820.000	100%	64.076.400

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1 Laporan	62.820.000	1 Laporan	64.076.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	4.200.000	100%	4.284.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	1 dokumen	4.200.000	1 dokumen	4.284.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	543.569.550	100%	554.440.941
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	1.800.000	1 paket	1.836.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	19.387.100	1 paket	19.774.842
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	12.868.900	1 paket	13.126.278
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	128.851.550	1 paket	131.428.581
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	63.940.000	1 paket	65.218.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	4 Dokumen	2.000.000	4 Dokumen	2.040.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	6.750.000	12 laporan	6.885.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	24 laporan	307.972.000	24 laporan	314.131.440

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	6.935.331.600	100%	7.074.038.232
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	280.763.650	12 laporan	286.378.923
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	6.654.567.950	12 laporan	6.787.659.309
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	2.031.185.200	100%	2.071.808.904
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	20 unit	616.000.000	20 unit	628.320.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	338 unit	1.337.135.200	338 unit	1.363.877.904
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	48 unit	24.750.000	48 unit	25.245.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	96 unit	53.300.000	96 unit	54.366.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	50.680.086.600	100%	51.693.688.332
							Angka kelangsungan hidup bayi		0,9968		0,9965	

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
		Angka kematian Balita per-1.000 Kelahiran Hidup		15,00		15,00	
		Angka kematian Neonatal per-1.000 Kelahiran Hidup		10,00		10,00	
		Angka kematian Ibu per-100.000 Kelahiran Hidup		177,64		175,59	
		Rasio Puskesmas per satuan penduduk (100.000 pddk)		3,80		3,80	
		Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani		100,00		100,00	
		Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi kebidanan		100,00		100,00	
		Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)		100,00		100,00	
		Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan		100,00		100,00	
		AFP Rate per 100.000 penduduk		2,00		2,00	
		Cakupan Balita Pneumonia yang ditangani		100,00		100,00	
		Cakupan penemuan & penanganan penderita penyakit DBD		100,00		100,00	
		Penderita Diare yang ditangani		100,00		100,00	
		Cakupan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan		100,00		100,00	
		Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani		100,00		100,00	
		Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin		100,00		100,00	

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
							Indeks pelayanan kesehatan puskesmas		88,00		88,00	
							Prevalensi balita Stunting		0,10		0,10	
							Persentase penanggulangan kejadian luar biasa		100,00		100,00	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	14 Puskesmas	19.100.252.500	14 Puskesmas	19.482.257.550
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Kota Palu	1 unit	81.447.000	1 unit	83.075.940
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Kota Palu	2 unit	16.800.000	2 unit	17.136.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Palu	500 unit	15.068.226.000	500 unit	15.369.590.520
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Kota Palu	369 unit	211.554.550	369 unit	215.785.641
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	23	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Media Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Kota Palu	1 paket	3.643.424.950	1 paket	3.716.293.449
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	26	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Media Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Kota Palu	1 paket	78.800.000	1 paket	80.376.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	14 Puskesmas	31.389.342.400	14 Pkm	32.017.129.248
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	7.770 bumil	274.603.000	8.547 bumil	280.095.060
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	7.416 bulin	358.120.000	8.158 bulin	365.282.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	6.837 bayi	11.308.000	7.521 bayi	11.534.160
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	45.158 balita	15.595.000	49.674 balita	15.906.900
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	41.744 murid	11.024.750	45.918 murid	11.245.245
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	251.188 jiwa	354.700.000	275.422 jiwa	361.794.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	30.512 orang	763.300.000	29.115 jiwa	778.566.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	68.126 jiwa	2.000.000	31.063 jiwa	2.040.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Kota Palu	23.830 jiwa	4.000.000	10.051 jiwa	4.080.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Kota Palu	785 kasus	54.900.000	795 kasus	55.998.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Palu	8.657 orang	5.400.000	16.385 jiwa	5.508.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Palu	8.804 kasus	45.900.000	7.284 kasus	46.818.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Kota Palu	1 Dokumen	29.453.500	1 Dokumen	30.042.570
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Kota Palu	1 Dokumen	17.975.000	1 Dokumen	18.334.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Kota Palu	1 Dokumen	976.977.750	1 Dokumen	996.517.305
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Kota Palu	1 Dokumen	16.431.700	1 Dokumen	16.760.334
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Kota Palu	1 Dokumen	186.056.000	1 Dokumen	189.777.120
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Kota Palu	1 Dokumen	42.930.700	1 Dokumen	43.789.314

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Kota Palu	1 Dokumen	24.649.500	1 Dokumen	25.142.490
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Kota Palu	1 Dokumen	20.688.100	1 Dokumen	21.101.862
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	21	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Kota Palu	150 orang	2.000.000	175 orang	2.040.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Kota Palu	1 Dokumen	332.126.700	1 Dokumen	338.769.234
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Kota Palu	70.000 jiwa	20.554.168.950	70.000 jiwa Jamkesda	20.965.252.329
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Kota Palu	75 orang	114.600.000	75 orang	116.892.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Kota Palu	8 paket	7.475.000	8 paket	7.624.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Kota Palu	1 Dokumen	15.025.000	1 Dokumen	15.325.500
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 Dokumen	6.686.325.850	1 Dokumen	6.820.052.367

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Kota Palu	1 Dokumen	10.490.000	1 Dokumen	10.699.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 unit	97.058.950	2 unit	99.000.129
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Kota Palu	1 Laporan	3.755.800	1 Laporan	3.830.916
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	38	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kota Palu	1 unit	73.698.400	1 unit	75.172.368
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	40	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkolosis	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Palu	50 Orang	4.200.000	65 Orang	4.284.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	41	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	Jumlah Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Palu	30 Orang	209.000.000	35 Orang	213.180.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	42	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah Orang dengan Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Kota Palu	29 Orang	8.400.000	30 Orang	8.568.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	50	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haj	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haj	Kota Palu	1 dokumen	55.004.750	1 dokumen	56.104.845
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Terlaksananya penyelenggaraan sistem informasi kesehatan	Kota Palu	1 Dinas, 14 Puskesmas	128.362.700	1 Dinas, 14 Puskesmas	130.929.954

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kota Palu	2 dokumen	128.362.700	2 dokumen	130.929.954
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin RS yang dkeluarkan	Kota Palu	13 RS	62.129.000	10 RS	63.371.580
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Kota Palu	13 unit	32.137.000	13 unit	32.779.740
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	02	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Kota Palu	93 unit	29.992.000	93 unit	30.591.840
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase pemenuhan kapasitas SDM kesehatan	Kota Palu	100%	83.011.450	100%	84.671.679
							Rasio Dokter per (1:2500 penduduk)		62,33		63,33	
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kab/Kota	Kota Palu	256 Sarana Praktek Swasta	5.400.000	256 Sarana Praktek Swasta	5.508.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta tindak lanjut perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Kota Palu	1 dokumen	5.400.000	1 dokumen	5.508.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Keb & Pendayagunaan SDM Kesehatan	Kota Palu	14 Puskesmas, 13 RS	21.219.000	14 Puskesmas, 13 RS	21.643.380
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	03	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Kota Palu	2 dokumen	21.219.000	2 dokumen	21.643.380
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	2754 nakes	56.392.450	99 nakes	57.520.299
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	Pengembangan Mutu dan peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Kab/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Kota Palu	403 Orang	56.392.450	403 Orang	57.520.299
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase pemenuhan perizinan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Kota Palu	100%	459.096.700	100%	468.278.634
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Palu	75 unit	33.000.000	75 unit	33.660.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Kota Palu	3 Dokumen	33.000.000	1 dokumen	33.660.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas I Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Tertibnya penerbitan sertifikat PKRT	Kota Palu	28 PKRT	12.000.000	29 PKRT	12.240.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.02	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan sertifikat Produksi Alkes Kelas I Tertentu dan PKRT Kelas I Tertentu dan Perusahaan Rumah Tangga.	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Kota Palu	1 dokumen	12.000.000	1 dokumen	12.240.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Tertibnya penerbitan sertifikat PIRT	Kota Palu	265 PIRT	240.580.000	265 PIRT	245.391.600
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.03	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kota Palu	1 dokumen	240.580.000	1 dokumen	245.391.600

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Tertibnya penerbitan sertifikat laik sehat sanitasi TPM	Kota Palu	1.225 TPM	3.127.150	1.225 TPM	3.189.693
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.04	01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Kota Palu	1 dokumen	3.127.150	1 dokumen	3.189.693
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Tertibnya penerbitan stiker pembinaaan makanan jajanan	Kota Palu	336 stiker	5.399.650	1.650 stiker	5.507.643
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.05	01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Kota Palu	1 dokumen	5.399.650	1 dokumen	5.507.643
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06		Pemeriksaan dan tIndak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya pemeriksaan & tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman IRT	Kota Palu	135 sarana PIRT	164.989.900	135 sarana PIRT	168.289.698
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	04	2.06	01	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Kota Palu	135 unit	164.989.900	135 unit	168.289.698

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Kota Palu	100%	4.007.589.800	100%	4.087.741.596
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terjalin kerjasama antar dunia usaha/swasta/LSM dengan pihak kesehatan	Kota Palu	100%	5.320.000	100%	5.426.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.01	01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Kota Palu	2 Dokumen	5.320.000	2 Dokumen	5.426.400
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya kesadaran masyarakat untuk melakukan PHBS	Kota Palu	100%	341.919.800	100%	348.758.196
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.02	01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Kota Palu	1 Dokumen	341.919.800	1 Dokumen	348.758.196
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat pengembangan dan pemanfaatan UKBM	Kota Palu	100%	3.660.350.000	100%	3.733.557.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0000	05	2.03	01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Kota Palu	20 Dokumen	3.660.350.000	20 Dokumen	3.733.557.000
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002				Puskesmas Pantoloan				6.419.413.866		6.547.802.143
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	5.568.781.866	BB	5.680.157.503
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	4.499.027.015	100%	4.589.007.555

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	73 orang/bulan	4.499.027.015	73 orang/bulan	4.589.007.555
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	1.069.754.851	B	1.091.149.948
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	1.069.754.851	1 unit kerja	1.091.149.948
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	850.632.000	100%	867.644.640
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	850.632.000	1 Puskesmas	867.644.640
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0002	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	850.632.000	1 dokumen	867.644.640
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003				Puskesmas Tawaeli				5.809.135.354		5.925.318.061
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	5.194.240.354	BB	5.298.125.161
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	4.303.830.114	100%	4.389.906.716
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	70 orang/bulan	4.303.830.114	70 orang/bulan	4.389.906.716
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	890.410.240	B	908.218.445
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	890.410.240	1 unit kerja	908.218.445
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	614.895.000	100%	627.192.900

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	614.895.000	1 Puskesmas	627.192.900
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0003	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	614.895.000	1 dokumen	627.192.900
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004				Puskesmas Mamboro				5.265.544.283		5.370.855.169
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	4.560.193.283	BB	4.651.397.149
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	3.572.612.944	100%	3.644.065.203
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	58 orang/bulan	3.572.612.944	58 orang/bulan	3.644.065.203
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	987.580.339	B	1.007.331.946
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	987.580.339	1 unit kerja	1.007.331.946
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	705.351.000	100%	719.458.020
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	705.351.000	1 Puskesmas	719.458.020
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0004	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	705.351.000	1 dokumen	719.458.020
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005				Puskesmas Talise				8.451.173.027		8.620.196.488
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	7.427.816.027	BB	7.576.372.348

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	5.239.015.261	100%	5.343.795.566
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	85 orang/bulan	5.239.015.261	85 orang/bulan	5.343.795.566
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	2.188.800.766	B	2.232.576.781
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	2.188.800.766	1 unit kerja	2.232.576.781
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	1.023.357.000	100%	1.043.824.140
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	1.023.357.000	1 Puskesmas	1.043.824.140
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0005	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	1.023.357.000	1 dokumen	1.043.824.140
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006				Puskesmas Singgani				7.154.198.781		7.297.282.757
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	6.485.866.781	BB	6.615.584.117
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	4.339.474.514	100%	4.426.264.004
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	70 orang/bulan	4.339.474.514	70 orang/bulan	4.426.264.004
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	2.146.392.267	B	2.189.320.112
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	2.146.392.267	1 unit kerja	2.189.320.112
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	668.332.000	100%	681.698.640

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	668.332.000	1 Puskesmas	681.698.640
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0006	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	668.332.000	1 dokumen	681.698.640
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007				Puskesmas Kawatuna				5.708.184.881		5.822.348.579
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	4.644.657.881	BB	4.737.551.039
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	3.387.492.344	100%	3.455.242.191
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	55 orang/bulan	3.387.492.344	55 orang/bulan	3.455.242.191
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	1.257.165.537	B	1.282.308.848
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	1.257.165.537	1 unit kerja	1.282.308.848
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	1.063.527.000	100%	1.084.797.540
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	1.063.527.000	1 Puskesmas	1.084.797.540
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0007	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	1.063.527.000	1 dokumen	1.084.797.540
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008				Puskesmas Birobuli				7.243.586.697		7.388.458.431
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	6.437.150.697	BB	6.565.893.711

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	4.330.438.282	100%	4.417.047.048
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	70 orang/bulan	4.330.438.282	70 orang/bulan	4.417.047.048
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	2.106.712.415	B	2.148.846.663
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	2.106.712.415	1 unit kerja	2.148.846.663
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	806.436.000	100%	822.564.720
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	806.436.000	1 Puskesmas	822.564.720
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0008	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	806.436.000	1 dokumen	822.564.720
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009				Puskesmas Bulili				6.119.385.723		6.241.773.437
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	5.359.745.723	BB	5.466.940.637
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	4.354.331.323	100%	4.441.417.949
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	71 orang/bulan	4.354.331.323	71 orang/bulan	4.441.417.949
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	1.005.414.400	B	1.025.522.688
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	1.005.414.400	1 unit kerja	1.025.522.688
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	759.640.000	100%	774.832.800

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	759.640.000	1 Puskesmas	774.832.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0009	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	759.640.000	1 dokumen	774.832.800
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010				Puskesmas Mabelopura				6.244.900.604		6.369.798.616
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	5.514.303.604	BB	5.624.589.676
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	4.064.742.140	100%	4.146.036.983
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	66 orang/bulan	4.064.742.140	66 orang/bulan	4.146.036.983
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	1.449.561.464	B	1.478.552.693
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	1.449.561.464	1 unit kerja	1.478.552.693
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	730.597.000	100%	745.208.940
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	730.597.000	1 Puskesmas	745.208.940
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0010	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	730.597.000	1 dokumen	745.208.940
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011				Puskesmas Sangurara				7.512.285.693		7.662.531.407
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	6.716.884.693	BB	6.851.222.387

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	5.031.608.459	100%	5.132.240.628
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	81 orang/bulan	5.031.608.459	81 orang/bulan	5.132.240.628
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	1.685.276.234	B	1.718.981.759
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	1.685.276.234	1 unit kerja	1.718.981.759
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	795.401.000	100%	811.309.020
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	795.401.000	1 Puskesmas	811.309.020
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0011	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	795.401.000	1 dokumen	811.309.020
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012				Puskesmas Kamonji				7.984.206.611		8.143.890.743
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	7.296.197.611	BB	7.442.121.563
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	4.649.588.185	100%	4.742.579.949
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	75 orang/bulan	4.649.588.185	75 orang/bulan	4.742.579.949
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	2.646.609.426	B	2.699.541.615
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	2.646.609.426	1 unit kerja	2.699.541.615
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	688.009.000	100%	701.769.180

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	688.009.000	1 Puskesmas	701.769.180
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0012	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	688.009.000	1 dokumen	701.769.180
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013				Puskesmas Anuntodea Tipo				4.525.084.165		4.615.585.848
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	3.802.968.165	BB	3.879.027.528
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	2.978.080.206	100%	3.037.641.810
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	48 orang/bulan	2.978.080.206	48 orang/bulan	3.037.641.810
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	824.887.959	B	841.385.718
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	824.887.959	1 unit kerja	841.385.718
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	722.116.000	B	736.558.320
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	722.116.000	1 Puskesmas	736.558.320
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0013	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	722.116.000	1 dokumen	736.558.320
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014				Puskesmas Nosarara				5.199.648.172		5.303.641.135
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	4.530.679.172	BB	4.621.292.755

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	3.824.304.184	100%	3.900.790.268
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	62 orang/bulan	3.824.304.184	62 orang/bulan	3.900.790.268
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	706.374.988	B	720.502.488
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	706.374.988	1 unit kerja	720.502.488
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	668.969.000	100%	682.348.380
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	668.969.000	1 Puskesmas	682.348.380
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0014	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	668.969.000	1 dokumen	682.348.380
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015				Puskesmas Lere				5.339.340.465		5.446.127.274
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	4.630.338.465	BB	4.722.945.234
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	4.072.790.308	100%	4.154.246.114
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	66 orang/bulan	4.072.790.308	66 orang/bulan	4.154.246.114
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD	Kota Palu	B	557.548.157	B	568.699.120
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	1 unit kerja	557.548.157	1 unit kerja	568.699.120
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan SPM Kesehatan	Kota Palu	100%	709.002.000	100%	723.182.040

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan pelayanan kesehatan UKM UKP	Kota Palu	1 Puskesmas	709.002.000	1 Puskesmas	723.182.040
1	02	1.02.0.00.0.00.01.0015	02	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Kota Palu	1 dokumen	709.002.000	1 dokumen	723.182.040
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000				Rumah Sakit Umum Anutapura				191.773.781.807		195.609.257.443
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Evaluasi Kinerja BLUD sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI No. Per 36/PB/2016	Kota Palu	A	158.090.020.557	AA	161.251.820.968
							Nilai SAKIP OPD		A		A	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	51.974.220.557	95%	53.013.704.968
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	518 orang/ bulan	51.974.220.557	518 orang/ bulan	53.013.704.968
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Capaian SPM Gawat Darurat	Kota Palu	75,00%	106.115.800.000	75,00%	108.238.116.000
							Persentase Capaian SPM Rawat Jalan		66,67%		83.33%	
							Persentase Capaian SPM Rawat Inap		81,82%		81,82%	
							Persentase Capaian SPM Bedah		100,00%		100,00%	
							Persentase Capaian SPM Persalinan dan Perinatologi		62,50%		62,50%	
							Persentase Capaian SPM Intensif		50%		50%	
							Persentase Capaian SPM Radiologi		75%		75%	
							Persentase Capaian SPM Laboratorium dan Patologi Klinik		75%		75%	
							Persentase Capaian SPM Rehabilitasi Medik		100%		100%	

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
				Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
		Persentase Capaian SPM Farmasi		75,00%		75,00%	
		Persentase Capaian SPM Gizi		100,00%		100,00%	
		Persentase Capaian SPM Transfusi Darah		100,00%		100,00%	
		Persentase Capaian SPM Keluarga Miskin		100,00%		100,00%	
		Persentase Capaian SPM Rekam Medis		75%		75%	
		Persentase Capaian SPM Pengelolaan Limbah		50%		50%	
		Persentase Capaian SPM Administrasi dan Manajemen		56%		67%	
		Persentase Capaian SPM Ambulans/Kereta Jenazah		100,00%		100,00%	
		Persentase Capaian SPM Pemulasaran Jenazah		100,00%		100,00%	
		Persentase Capaian SPM Pelayanan Laundry		75%		75%	
		Persentase Capaian SPM Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit		33,33%		33,33%	
		Persentase Capaian SPM Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)		66,67%		66,67%	
		Persentase pengiriman Laporan SIRS		100,00%		100,00%	
		Persentase evaluasi pendokumentasian asuhan keperawatan di Rawat Inap		100,00%		100,00%	
		Persentase hasil survei kepuasan pasien terhadap pelayanan keperawatan		100,00%		100,00%	
		Persentase ketersediaan bahan-bahan logistik keperawatan		90,00%		90,00%	

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
							Cakupan Pengelolaan aset		100,00%		100,00%	
							Persentase pengelolaan surat menyurat		100,00%		100,00%	
							Cakupan pengelolaan keamanan dan ketertiban		100,00%		100,00%	
							Persentase produk hukum yang dikaji tepat waktu		100,00%		100,00%	
							Persentase penanganan dan penyelesaian pengaduan masyarakat		100,00%		100,00%	
							Cakupan pengordinasian keprotokolan dilingkungan RS		100,00%		100,00%	
							Cakupan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan		100,00%		100,00%	
							Level pengembangan SIM RS		Siloed 1		Siloed 1	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Kota Palu	13 unit kerja	106.115.800.000	13 unit kerja	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pemenuhan Kebutuhan fasilitas pelayanan Kesehatan RS	Kota Palu	85%	33.555.383.650	90%	34.226.491.323
							Persentase Capaian akreditasi RS		100%		100%	
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persentase peningkatan penyediaan sarana,prasarana dan peralatan kesehatan yang handal sesuai standar RS kelas B dan standar akreditasi	Kota Palu	70,3%	31.478.748.650	70,3%	32.108.323.623
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Kota Palu	124 unit	31.478.748.650	124 unit	32.108.323.623
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah BAB akreditasi yang dilaksanakan	Kota Palu	16 BAB	2.076.635.000	16 BAB	2.118.167.700

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	02	2.02	32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Kota Palu	3 Paket	2.076.635.000	3 Paket	2.118.167.700
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Ketersediaan tenaga RS tersertifikasi sesuai standar	Kota Palu	49.5%	128.377.600	50,0%	130.945.152
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga RS yang mendapat Pelataihan 20 Jam/Tahun	Kota Palu	47.6%	128.377.600	48.5%	130.945.152
1	02	1.02.0.00.0.00.02.0000	03	2.02	02	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Kota Palu	6 orang	128.377.600	6 orang	130.945.152
1	03					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG				155.306.376.837		158.412.504.374
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00				Dinas Pekerjaan Umum				148.069.090.286		151.030.472.092
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	16.853.350.404	B	17.190.417.412
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	133.418.000	5 dokumen	136.086.360
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	25.350.000	2 dokumen	25.857.000
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	22.240.000	1 dokumen	22.684.800

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	25.425.000	1 dokumen	25.933.500
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	60.403.000	1 laporan	61.611.060
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	9.295.604.454	95%	9.481.516.543
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	92 orang/ bulan	9.228.764.454	92 orang/ bulan	9.413.339.743
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	66.840.000	1 Laporan	68.176.800
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	419.565.000	100%	427.956.300
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1 Laporan	419.565.000	1 Laporan	427.956.300
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	230.000.000	100%	234.600.000
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	20 orang	230.000.000	20 orang	234.600.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	900.668.200	100%	918.681.564
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	14 paket	7.597.400	14 paket	7.749.348
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	29 paket	228.661.500	29 paket	233.234.730
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	45 paket	110.984.300	45 paket	113.203.986
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	7 paket	16.695.000	7 paket	17.028.900
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	33.900.000	12 dokumen	34.578.000
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	28.150.000	1 laporan	28.713.000
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	35 laporan	474.680.000	35 laporan	484.173.600
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	2.380.000.000	100%	2.427.600.000
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	480.000.000	1 unit	489.600.000
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	1.900.000.000	1 unit	1.938.000.000
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.808.802.250	100%	1.844.978.295
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	165.680.000	12 laporan	168.993.600

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.643.122.250	12 laporan	1.675.984.695
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	1.685.292.500	100%	1.718.998.350
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	20 unit	355.200.000	20 unit	362.304.000
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	32 unit	485.241.200	32 unit	494.946.024
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Kota Palu	4 unit	619.854.200	4 unit	632.251.284
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	140 unit	224.997.100	140 unit	229.497.042
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Kota Palu	100%	1.961.455.080	100%	2.000.684.182
							Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik		40,48		41,68	
							Rasio jaringan irigasi		80,14		80,14	
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase irigasi Kota dalam kondisi baik Rasio jaringan irigasi	Kota Palu	100%	683.472.500	100%	697.141.950
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.01	80	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Kota Palu	5 km	683.472.500	5 km	697.141.950

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik	Kota Palu	80%	1.277.982.580	80%	1.303.542.232
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kota Palu	7,838,35 km	798.485.250	7,838,35 km	814.454.955
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Palu	1,741 m	373.097.480	1,741 m	380.559.430
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	02	2.02	35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Kota Palu	1 dokumen	106.399.850	1 dokumen	108.527.847
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	Kota Palu	96,51%	9.814.919.326	96,92%	10.011.217.713
							Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan		33,12%		33,79%	
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Air Bersih dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari	Kota Palu	20%	9.814.919.326	20%	10.011.217.713
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01	25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Kota Palu	1 dokumen	184.995.000	1 dokumen	188.694.900
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01	28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kota Palu	10 Liter/Detik	6.742.355.000	10 Liter/Detik	6.877.202.100

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	03	2.01	29	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Palu	10 Unit	2.887.569.326	10 Unit	2.945.320.713
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Kota Palu	8,16%	318.310.100	9,23%	324.676.302
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pengeloaan Limbah Domestik	Kota Palu	20,00%	318.310.100	20,00%	324.676.302
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05	2.01	33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Kota Palu	100 Rumah Tangga	105.965.000	100 Rumah Tangga	108.084.300
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	05	2.01	38	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kota Palu	1 Unit	212.345.100	1 Unit	216.592.002
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase dalam kondisi baik	Kota Palu	66,18%	8.102.521.678	67,68%	8.264.572.112
							Persentase jalan yang memiliki drainase		8,38%		10,72%	
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	20,00%	8.102.521.678	20,00%	8.264.572.112
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01	24	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Kota Palu	10 Sistem Drainase Perkotaan	6.338.109.831	10 Sistem Drainase Perkotaan	6.464.872.028
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01	25	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	Kota Palu	2 Sistem Drainase Perkotaan	350.700.000	2 Sistem Drainase Perkotaan	357.714.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01	30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Kota Palu	1 Dokumen	96.670.000	1 Dokumen	98.603.400
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	06	2.01	31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Kota Palu	10 Sistem Drainase Perkotaan	1.317.041.847	10 Sistem Drainase Perkotaan	1.343.382.684
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase pemenuhan gedung pemerintah yang andal	Kota Palu	100%	58.806.157.441	100%	59.982.280.590
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase tersedianya bangunan gedung kantor yang andal sesuai standar bangunan tahan gempa	Kota Palu	100%	58.806.157.441	100%	59.982.280.590
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	08	2.01	18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kota Palu	10 Bangunan Gedung	7.253.612.941	10 Bangunan Gedung	7.398.685.200
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	08	2.01	21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	15 dokumen	51.552.544.500	15 dokumen	52.583.595.390
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Kota Palu	81,07%	51.854.537.257	86,23%	52.891.628.002
							Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk		0,467		0,474	
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase jalan dalam Kondisi Baik dan Sedang	Kota Palu	5 Km	51.854.537.257	5 Km	52.891.628.002

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
							Persentase jembatan dalam kondisi baik		100%		100%	
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Kota Palu	1 dokumen	984.187.900	1 dokumen	1.003.871.658
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	32	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Kota Palu	16,307,50 km	35.066.690.133	16,307,50 km	35.768.023.936
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	34	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Kota Palu	9,471,00 km	878.150.000	9,471,00 km	895.713.000
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	38	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Palu	1 km	606.794.000	1 km	618.929.880
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Kota Palu	340 km	513.985.000	340 km	524.264.700
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	44	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Kota Palu	63,675,70 km	8.636.339.500	63,675,70 km	8.809.066.290
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	10	2.01	46	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Kota Palu	440 km	5.168.390.724	440 km	5.271.758.538
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Cakupan pengembangan jasa konstruksi	Kota Palu	100%	357.839.000	100%	364.995.780
							Rasio tenaga operator/ teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		52,06		55,81	
							Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi		0,63		0,38	
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil yang di hasilkan	Kota Palu	40 Peraturan	298.649.000	40 Peraturan	304.621.980
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11	2.01	16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Kota Palu	40 org	298.649.000	40 org	304.621.980

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	'Jumlah Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Kota Palu	1 laporan	59.190.000	1 laporan	60.373.800
1	03	1.03.1.03.0.00.02.00	11	2.02	13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Kota Palu	1 dokumen	59.190.000	1 dokumen	60.373.800
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00				Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan				7.237.286.551		7.382.032.282
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	6.406.332.001	BB	6.534.458.641
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dok	45.078.600	5 dok	45.980.172
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	14.942.650	2 dokumen	15.241.503
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6.723.300	1 dokumen	6.857.766
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6.723.300	1 dokumen	6.857.766
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	16.689.350	1 laporan	17.023.137

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	4.306.568.901	95%	4.392.700.279
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	38 orang/ bulan	4.294.708.801	38 orang/ bulan	4.380.602.977
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	11.860.100	1 Laporan	12.097.302
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	7.400.200	100%	7.548.204
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5.500.100	1 dokumen	5.610.102
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.900.100	1 Laporan	1.938.102
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	396.504.900	100%	404.434.998
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	2.424.800	1 paket	2.473.296
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	2.804.200	1 paket	2.860.284
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	59 paket	92.177.950	59 paket	94.021.509
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	21.350.950	4 paket	21.777.969

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	3 dokumen	6.900.000	3 dokumen	7.038.000
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	21.736.000	11 laporan	22.170.720
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	15 laporan	249.111.000	15 laporan	254.093.220
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	7.339.000	100%	7.485.780
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	3.300.000	1 unit	3.366.000
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	4.039.000	1 unit	4.119.780
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.168.062.400	100%	1.191.423.648
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	141.955.000	12 laporan	144.794.100
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.026.107.400	12 laporan	1.046.629.548
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	475.378.000	100%	484.885.560
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	18 unit	223.200.000	18 unit	227.664.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	7 unit	131.808.000	7 unit	134.444.160
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	163 unit	70.370.000	163 unit	71.777.400
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	50.000.000	1 unit	51.000.000
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	Kota Palu	34,10%	609.651.750	34,12%	621.844.785
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Rekomendasi Bangunan Gedung yang dikelola secara Teknis	Kota Palu	605 Reg PBG	609.651.750	666 Rek PBG	621.844.785
							Jumlah Dokumen Pendataan Bangunan Gedung yang disusun		1 dokumen		1 dokumen	
							Jumlah Regulasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung di Wilayah Kota Palu yang ditetapkan		2 peraturan		2 peraturan	
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08	2.01	19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Kota Palu	1 dokumen	8.260.000	1 dokumen	8.425.200
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08	2.01	22	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Kota Palu	30 orang	172.039.750	30 orang	175.480.545

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	08	2.01	23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Kota Palu	100 dokumen	429.352.000	100 dokumen	437.939.040
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Kota Palu	95,08%	221.302.800	100,00%	225.728.856
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Pelaksanaan Tata Ruang yang ditetapkan	Kota Palu	2 peraturan	8.492.800	1 peraturan	8.662.656
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.01	03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang	Kota Palu	1 dokumen	1.650.000	1 dokumen	1.683.000
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.01	13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang		Kota Palu	1 laporan	6.842.800	1 laporan	6.979.656
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pemanfaatan ruang yang disusun	Kota Palu	1 laporan	94.505.000	1 laporan	96.395.100
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.03	04	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Kota Palu	1 layanan	94.505.000	1 layanan	96.395.100
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun	Kota Palu	4 dokumen	118.305.000	4 dok	120.671.100

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.04	09	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Kota Palu	12 laporan	72.295.000	12 laporan	73.740.900
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00	12	2.04	13	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Kota Palu	5 berita acara	46.010.000	5 berita acara	46.930.200
1	04					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				48.219.506.046		49.183.896.167
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00				Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman				48.219.506.046		49.183.896.167
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	6.920.556.038	BB	7.058.967.159
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	131.459.400	5 dokumen	134.088.588
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	2.798.000	2 dokumen	2.853.960
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5.065.000	1 dokumen	5.166.300
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	4.308.500	1 dokumen	4.394.670
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	119.287.900	1 laporan	121.673.658

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	3.760.016.538	95%	3.835.216.869
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	37 orang/ bulan	3.753.177.538	37 orang/ bulan	3.828.241.089
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	6.839.000	1 Laporan	6.975.780
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	1.275.488.700	100%	1.300.998.474
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	4.808.000	1 paket	4.904.160
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	569.243.200	1 paket	580.628.064
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	166.863.500	1 paket	170.200.770
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	21.245.000	1 paket	21.669.900
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	1 dokumen	3.600.000	1 dokumen	3.672.000
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	28.500.000	11 laporan	29.070.000
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	32 laporan	481.229.000	32 laporan	490.853.580
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.060.839.400	100%	1.082.056.188

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	143.999.600	12 laporan	146.879.592
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	916.839.800	12 laporan	935.176.596
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	692.752.000	100%	706.607.040
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	12 unit	374.080.000	12 unit	381.561.600
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Opersional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	3 Unit	96.412.000	3 Unit	98.340.240
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	46 unit	13.140.000	46 unit	13.402.800
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	200.000.000	1 unit	204.000.000
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	14 unit	9.120.000	14 unit	9.302.400
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase pemenuhan kebutuhan perumahan	Kota Palu	79,40%	835.388.200	80,47%	852.095.964

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota	Persentase penyediaan/rehab rumah korban bencana	Kota Palu	100,00%	500.000.000	100,00%	510.000.000
							Persentase penyediaan rumah akibat relokasi program pemerinath		100,00%		100,00%	
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Kota Palu	15 unit	500.000.000	15 unit	510.000.000
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase rusunawa yang terkelola	Kota Palu	100%	205.117.500	100%	209.219.850
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.05	01	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Kota Palu	3 laporan	205.117.500	3 laporan	209.219.850
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase izin site plan yang diterbitkan	Kota Palu	100,00%	130.270.700	100,00%	132.876.114
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	02	2.06	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Kota Palu	6 laporan	130.270.700	6 laporan	132.876.114
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Kota Palu	94,85%	7.654.264.308	100,00%	7.807.349.594
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perssentse pemenuhan dokumen perencanaan penataan kawasan permukiman	Kota Palu	100,00%	5.047.442.208	100,00%	5.148.391.052
							Persentase sanitasi yang terbangun		100,00%		100,00%	
							Persentase drainase lingkungan permukiman yang terbangun		100,00%		100,00%	
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.02	08	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	Kota Palu	10 dokumen	1.085.058.900	10 dokumen	1.106.760.078

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.02	12	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kota Palu	10 Kelompok Masyarakat	3.962.383.308	10 Kelompok Masyarakat	4.041.630.974
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase rumah MBR dalam kawasan kumuh yang mendapat bantuan	Kota Palu	100,00%	2.606.822.100	100,00%	2.658.958.542
							Persentase jalan lingkungan permukiman kumuh yang terbangun		100,00%		100,00%	
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	03	2.03	03	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Kota Palu	5 dokumen	2.606.822.100	5 dokumen	2.658.958.542
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Kota Palu	9,21%	11.360.842.800	8,66%	11.588.059.656
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rumah MBR luar kawasan kumuh yang mendapat bantuan	Kota Palu	100,00%	11.360.842.800	100,00%	11.588.059.656
							Persentase jalan lingkungan luar permukiman kumuh yang terbangun		100,00%		100,00%	
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Kota Palu	350 Unit	8.548.456.300	350 Unit	8.719.425.426
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	04	2.01	05	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Kota Palu	1 dokumen	2.812.386.500	1 dokumen	2.868.634.230

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Peningkatan Prasarana,sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Kota Palu	100%	21.448.454.700	100%	21.877.423.794
							Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)		100%		100%	
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase jalan lingkungan perumahan yang terbangun	Kota Palu	100%	21.448.454.700	100%	21.877.423.794
							Persentase drainase lingkungan perumahan yang terbangun		100%		100%	
							Persentase lampu PJU hemat energi terpasang		100%		100%	
1	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	Kota Palu	6 lokasi	3.256.937.800	6 lokasi	3.322.076.556
	04	1.04.0.00.0.00.01.00	05	2.01	09	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Kota Palu	4 dokumen	18.191.516.900	4 dokumen	18.555.347.238
1	05					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				34.664.903.558		35.358.201.629
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00				Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				11.765.261.630		12.000.566.863
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	11.187.197.030	B	11.410.940.971

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	9.393.300	5 dokumen	9.581.166
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	2.107.700	2 dokumen	2.149.854
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.325.000	1 dokumen	2.371.500
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.985.600	1 dokumen	3.045.312
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.975.000	1 laporan	2.014.500
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	6.531.150.980	95%	6.661.774.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	43 orang/ bulan	6.529.054.580	43 orang/ bulan	6.659.635.672
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	2.096.400	1 Laporan	2.138.328
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	546.770.650	100%	557.706.063
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	48.780.300	1 paket	49.755.906

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	128.318.550	4 paket	130.884.921
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	11.649.800	5 paket	11.882.796
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	53 laporan	358.022.000	53 laporan	365.182.440
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	3.621.716.600	100%	3.694.150.932
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	24 laporan	69.407.000	24 laporan	70.795.140
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	66 laporan	3.552.309.600	66 laporan	3.623.355.792
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	478.165.500	100%	487.728.810
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	6 unit	389.105.500	6 unit	396.887.610
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	13 unit	4.000.000	13 unit	4.080.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	14 unit	5.060.000	14 unit	5.161.200

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	6 unit	80.000.000	6 unit	81.600.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Kota Palu	97,95%	578.064.600	97,88%	589.625.892
							Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota		100%		100%	
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kesiagaan dan Upaya Mencegah Bencana Kebakaran	Kota Palu	97,16%	572.202.100	97,51%	583.646.142
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	12 laporan	249.861.000	12 laporan	254.858.220
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Kota Palu	12 dokumen	3.444.200	12 dokumen	3.513.084
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Kota Palu	20 orang	2.308.200	20 orang	2.354.364

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.01	17	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Kota Palu	10 unit	316.588.700	10 unit	322.920.474
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksannya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Kota Palu	100%	4.462.500	100%	4.551.750
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Kota Palu	313 dokumen	1.020.000	313 dokumen	1.040.400
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.02	02	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/ Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana ProteksiKebakaran	Kota Palu	313 dokumen	3.442.500	313 dokumen	3.511.350
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran	Terlaksananya Investigasi Kejadian Kebakaran	Kota Palu	5 kali	1.100.000	5 kali	1.122.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.03	01	Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Kota Palu	5 dokumen	1.100.000	5 dokumen	1.122.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terwujudnya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Kota Palu	56 orang	300.000	56 orang	306.000
1	05	1.05.0.00.0.00.01.00	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/ Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Kota Palu	1 dokumen	300.000	1 dokumen	306.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00				Satuan Polisi Pamong Praja				16.269.723.876		16.595.118.354
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	14.021.243.876	BB	14.301.668.754
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	4.417.500	5 dokumen	4.505.850
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	756.300	2 dokumen	771.426
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.527.450	1 dokumen	1.557.999
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.377.450	1 dokumen	1.404.999
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	756.300	1 laporan	771.426
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	5.824.137.526	95%	5.940.620.277
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	300 orang/ bulan	5.823.635.076	300 orang/ bulan	5.940.107.778

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	502.450	1 Laporan	512.499
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	441.561.750	100%	450.392.985
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	3.575.600	1 paket	3.647.112
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	8.750.000	1 paket	8.925.000
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	6 paket	46.400.400	6 paket	47.328.408
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	29.054.750	3 paket	29.635.845
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	10.100.000	12 dokumen	10.302.000
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	23 laporan	343.681.000	23 laporan	350.554.620
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	18.764.000	100%	19.139.280
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	4.039.000	1 unit	4.119.780
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	10 unit	14.725.000	10 unit	15.019.500
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	6.282.954.900	100%	6.408.613.998

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	93.126.500	12 laporan	94.989.030
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	6.189.828.400	12 laporan	6.313.624.968
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	1.449.408.200	100%	1.478.396.364
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	6 unit	306.115.600	6 unit	312.237.912
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	15 unit	1.103.312.600	15 unit	1.125.378.852
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	46 unit	30.220.000	46 unit	30.824.400
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	15 unit	9.760.000	15 unit	9.955.200
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Kota Palu	100%	2.248.480.000	100%	2.293.449.600
							Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		100%		100%	

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	2.248.480.000	100%	2.293.449.600
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02	2.01	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kota Palu	1 dokumen	606.000.000	1 dokumen	618.120.000
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02	2.01	15	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kota Palu	58 laporan	1.521.280.000	58 laporan	1.551.705.600
1	05	1.05.0.00.0.00.02.00	02	2.01	16	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kota Palu	38 laporan	121.200.000	38 laporan	123.624.000
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00				Badan Penanggulangan Bencana Daerah				6.629.918.052		6.762.516.413
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	5.684.149.452	BB	5.797.832.441
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	139.665.050	4 dokumen	142.458.351
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	9.099.850	1 dokumen	9.281.847

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	9.460.000	1 dokumen	9.649.200
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	109.841.000	1 laporan	112.037.820
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.01	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 berita acara	11.264.200	1 berita acara	11.489.484
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	3.914.857.177	95%	3.993.154.321
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	36 orang/ bulan	3.898.892.177	36 orang/ bulan	3.976.870.021
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	15.965.000	2 laporan	16.284.300
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	431.864.300	100%	440.501.586
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	3.370.000	1 paket	3.437.400

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	88.008.400	1 paket	89.768.568
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	52.772.800	1 paket	53.828.256
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	7.812.100	1 paket	7.968.342
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	6.100.000	12 dokumen	6.222.000
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	10 laporan	16.650.000	10 laporan	16.983.000
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	21 laporan	257.151.000	21 laporan	262.294.020
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	750.625.800	100%	765.638.316
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	110.640.600	12 laporan	112.853.412
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	639.985.200	12 laporan	652.784.904
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	447.137.125	100%	456.079.868
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	9 unit	225.900.000	9 unit	230.418.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	7 unit	165.131.500	7 unit	168.434.130
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	40 unit	21.500.000	40 unit	21.930.000
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	29 unit	20.405.625		20.813.738
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	10 unit	14.200.000	10 unit	14.484.000
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga Kota Palu yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Kota Palu	75%	945.768.600	90%	964.683.972
							Persentase pemerintah desa/kelurahan yang mengadopsi dan menerapkan desa/kelurahan tangguh bencana		85%		100%	
							Persentase Pemulihan sektor terdampak pasca bencana		85%		100%	
							persentase jumlah jiwa terdampak bencana yang terselamatkan		100%		100%	
							Persentase warga Kota palu yang memperoleh layanan informasi rawan bencana		75%		85%	
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlayaninya Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Kota Palu	50%	224.431.800	65%	228.920.436

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	20	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kota Palu	1 kawasan	46.526.400	1 kawasan	47.456.928
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	21	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Kota Palu	500 orang	24.726.400	500 orang	25.220.928
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	26	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Kota Palu	5 laporan	37.500.000	5 laporan	38.250.000
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.02	28	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kota Palu	1 kawasan	115.679.000	1 kawasan	117.992.580
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlayaninya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Palu	100%	448.571.700	100%	457.543.134
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Kota Palu	1 dokumen	234.708.000	1 dokumen	239.402.160

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.03	09	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Kota Palu	100 orang	213.863.700	100 orang	218.140.974
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Kota Palu	100%	272.765.100	100%	278.220.402
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.04	05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Kota Palu	6 laporan	209.353.300	6 laporan	213.540.366
1	05	1.05.0.00.0.00.03.00	03	2.04	10	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kota Palu	1 kegiatan	63.411.800	1 kegiatan	64.680.036
1	06					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				18.152.668.382		18.515.721.750
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000				Dinas Sosial				18.152.668.382		18.515.721.750
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	7.376.675.472	B	7.524.208.981
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	27.025.000	5 dokumen	27.565.500
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	8.250.000	2 dokumen	8.415.000
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	4.125.000	1 dokumen	4.207.500

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	4.125.000	1 dokumen	4.207.500
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	10.525.000	1 laporan	10.735.500
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	4.687.433.972	95%	4.781.182.651
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	42 orang/ bulan	4.668.383.972	42 orang/ bulan	4.761.751.651
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	3 laporan	19.050.000	3 laporan	19.431.000
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	811.449.700	100%	827.678.694
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	15 paket	153.378.400	15 paket	156.445.968
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	40 paket	113.573.400	40 paket	115.844.868
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	61.478.400	3 paket	62.707.968
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	7.800.000	2 dokumen	7.956.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	4 laporan	45.523.500	4 laporan	46.433.970
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	15 laporan	429.696.000	15 laporan	438.289.920
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.159.496.800	100%	1.182.686.736
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	7 laporan	97.900.000	7 laporan	99.858.000
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.061.596.800	12 laporan	1.082.828.736
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	691.270.000	100%	705.095.400
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	6 unit	523.860.000	6 unit	534.337.200
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	15 unit	110.880.000	15 unit	113.097.600
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	18 unit	40.150.000	18 unit	40.953.000
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	20 unit	16.380.000	20 unit	16.707.600

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Kota Palu	100%	650.861.850	100%	663.879.087
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	20%	32.650.000	20%	33.303.000
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Kota Palu	1 dokumen	32.650.000	1 dokumen	33.303.000
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteran Sosial Kabupaten/Kota	Kota Palu	20%	618.211.850	20%	630.576.087
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	92 org	313.497.100	92 org	319.767.042
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	9 org	48.840.000	9 org	49.816.800
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	03	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	46 keluarga	236.699.750	46 keluarga	241.433.745
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	02	2.03	04	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	46 lembaga	19.175.000	46 lembaga	19.558.500

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase tercapainya Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Kota Palu	100%	22.928.000	100%	23.386.560
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase pelaksanaan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Palu	100%	22.928.000	100%	23.386.560
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	03	2.01	01	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	5 orang	22.928.000	5 orang	23.386.560
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase pelayanan rehabiltasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansia terlantar, disabilitas, OGDJ terlantar dan gelandangan pengemis	Kota Palu	100%	944.264.000	100%	963.149.280
							Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti		16,45%		16,58%	
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase palaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan dan Pengemis Diluar Panti Sosial	Kota Palu	20%	932.254.000	25%	950.899.080

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	20 orang	47.731.500	20 orang	48.686.130
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	50 orang	75.177.500	50 orang	76.681.050
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	28 orang	90.250.000	28 orang	92.055.000
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.01	05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	71 org	719.095.000	71 org	733.476.900
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPA di Luar Panti Sosial	Kota Palu	20%	12.010.000	25%	12.250.200
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	04	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	12.010.000	1 dokumen	12.250.200
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase fakir miskin yang mendapatkan bantuan modal usaha dan Presentase masyarakat yang mendapatkan jaminan sosial (BPJS gratis)	Kota Palu	100%	8.188.874.600	100%	8.352.652.092

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota	Kota Palu	100%	8.188.874.600	100%	8.352.652.092
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kota Palu	300 keluarga	528.767.000	300 keluarga	539.342.340
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	385 orang	7.660.107.600	385 orang	7.813.309.752
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Kota Palu	99,70%	969.064.460	99,85%	988.445.749
							Persentase capaian penanganan bencana		100%		100%	
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten /Kota	Kota Palu	20%	717.389.460	20%	731.737.249
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	500 orang	351.690.300	500 orang	358.724.106
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	45 orang	353.266.910	45 orang	360.332.248

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	100 orang	12.432.250	100 orang	12.680.895
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraaan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	251.675.000	100%	256.708.500
1	06	1.06.2.13.0.00.01.0000	06	2.02	02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	50 org	251.675.000	50 org	256.708.500
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				173.608.715.693		177.080.890.007
2	07					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				389.405.850		397.193.967
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00				Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja				389.405.850		397.193.967
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Kota Palu	3%	148.222.800	3%	151.187.256
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya pelatihan kerja berdasarkan kompotensi	Kota Palu	100%	148.222.800	100%	151.187.256
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Kota Palu	210 Orang	148.222.800	210 Orang	151.187.256

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Kota Palu	8,72%	56.125.550	8,72%	57.248.061
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Data Informasi Pasar Kerja Yang tersedia	Kota Palu	14 dokumen	56.125.550	14 dokumen	57.248.061
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Kota Palu	3297 orang	56.125.550	3297 orang	57.248.061
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	Kota Palu	78%	185.057.500	75%	188.758.650
							Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)		46%		48%	
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan	Kota Palu	100%	20.026.150	100%	20.426.673
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Kota Palu	12 laporan	20.026.150	12 laporan	20.426.673
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial	Kota Palu	133 Kasus	165.031.350	133 Kasus	168.331.977

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	07	2.17.2.07.0.00.01.00	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Kota Palu	25 perkara	165.031.350	25 perkara	168.331.977
2	08					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.399.367.974		5.507.355.333
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00				Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				5.399.367.974		5.507.355.333
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	4.942.163.074	B	5.041.006.335
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	3.090.000	5 dokumen	3.151.800
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	210.000	2 dokumen	214.200
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.020.000	1 dokumen	1.040.400
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	510.000	1 dokumen	520.200

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.350.000	1 laporan	1.377.000
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	3.680.559.224	95%	3.754.170.408
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	28 orang/ bulan	3.680.559.224	28 orang/ bulan	3.754.170.408
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	363.282.950	100%	370.548.609
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	1.155.200	2 paket	1.178.304
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	3.577.400	2 paket	3.648.948
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	33 paket	17.480.800	33 paket	17.830.416
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	6 paket	9.991.550	6 paket	10.191.381
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	3.600.000	2 dokumen	3.672.000
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 Laporan	3.885.000	12 Laporan	3.962.700
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	33 laporan	323.593.000	33 laporan	330.064.860
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	541.030.900	100%	551.851.518

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	3 laporan	58.249.300	3 laporan	59.414.286
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	482.781.600	12 Laporan	492.437.232
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	354.200.000	100%	361.284.000
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	2 unit	322.780.000	2 unit	329.235.600
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	3 unit	17.820.000	3 unit	18.176.400
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	6 unit	13.600.000	6 unit	13.872.000
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Kota Palu	98,21	27.111.700	98,29	27.653.934
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	17.932.400	100%	18.291.048

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02	2.01	06	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG		41 orang	17.932.400	41 orang	18.291.048
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kota Palu	100%	9.179.300	100%	9.362.886
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Palu	1 dokumen	9.179.300	1 dokumen	9.362.886
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio KDRT	Kota Palu	0,06%	160.453.500	0,06%	163.662.570
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya pencegahan kekerasan terhadap perempuan	Kota Palu	100%	14.407.300	100%	14.695.446
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	41 Perangkat Daerah	14.407.300	41 Perangkat Daerah	14.695.446
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan	Kota Palu	100%	146.046.200	100%	148.967.124
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	03	2.02	01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	Kota Palu	80 orang	146.046.200	80 orang	148.967.124

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Pemberdayaan Gender (IGD)	Kota Palu	64,94	66.302.100	62,96	67.628.142
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak	Kota Palu	100%	28.731.000	100%	29.305.620
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	8 Perangkat Daerah	14.783.800	8 Perangkat Daerah	15.079.476
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Pengembangan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	8 dokumen	13.947.200	8 dokumen	14.226.144
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak	Kota Palu	100%	37.571.100	100%	38.322.522
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	04	2.02	03	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	8 dokumen	37.571.100	8 dokumen	38.322.522
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Kota Palu	100%	31.750.500	100%	32.385.510

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	Kota Palu	100%	31.750.500	100%	32.385.510
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	05	2.01	01	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Palu	2 Dokumen	31.750.500	2 Dokumen	32.385.510
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Indeks Kota Layak Anak	Kota Palu	Madya	150.175.800	Madya	153.179.316
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Kota Palu	100%	27.647.700	100%	28.200.654
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	27.647.700	1 dokumen	28.200.654
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Kota Palu	100%	122.528.100	100%	124.978.662
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.02	01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	33 orang	102.269.100	33 orang	104.314.482
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	06	2.02	04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	20.259.000	1 dokumen	20.664.180
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan perlindungan khusus anak	Kota Palu	100%	21.411.300	100%	21.839.526

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pencegahan Kekerasan terhadap Anak	Kota Palu	100%	21.411.300	100%	21.839.526
2	08	2.08.0.00.0.00.01.00	07	2.01	04	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Kota Palu	20 orang	21.411.300	20 orang	21.839.526
2	09					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				666.434.350		679.763.037
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				666.434.350		679.763.037
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Kota Palu	94,91	541.063.400	95,86	551.884.668
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Cakupan penyediaan Pangan Pokok dengan Harga Terjangkau	Kota Palu	100%	270.779.400	100%	276.194.988
							Nilai Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		94,91		95,86	
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	07	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kota Palu	100 keluarga	60.837.500	100 keluarga	62.054.250
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	11	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Kota Palu	12 dokumen	60.302.300	12 dokumen	61.508.346
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	12	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kota Palu	12 Laporan	149.639.600	12 Laporan	152.632.392

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	165.200.000	100%	168.504.000
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.02	03	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah kabupaten/Kota	Kota Palu	24 ton	165.200.000	25 ton	168.504.000
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Target Konsumsi Pangan Kota Palu	Kota Palu	100%	105.084.000	100%	107.185.680
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.04	02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Kota Palu	3 laporan	105.084.000	3 laporan	107.185.680
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase capaian penanganan kerawanan pangan	Kota Palu	100%	92.324.000	100%	94.170.480
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Kerawanan pangan kewenangan kabupaten/kota	Kota Palu	100%	92.324.000	100%	94.170.480
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.02	02	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 dokumen	92.324.000	2 dokumen	94.170.480
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase capaian pengawasan keamanan panagan	Kota Palu	100%	33.046.950	100%	33.707.889
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengawasan Mutu dan Kemanan Pangan	Kota Palu	100%	33.046.950	100%	33.707.889
2	09	3.27.2.09.3.25.01.0000	05	2.01	04	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 dokumen	33.046.950	2 dokumen	33.707.889
2	10					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				202.300.800		206.346.816

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
1	03	1.03.2.10.0.00.01.00				Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan				202.300.800		206.346.816
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Kota Palu	80%	49.045.200	100%	50.026.104
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	04	2.01		Penyelesaiaan Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah laporan sengketa Tanah garapan dalam kota yang disususun	Kota Palu	1 laporan	49.045.200	1 laporan	50.026.104
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	04	2.01	04	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	13 berita acara	49.045.200	13 berita acara	50.026.104
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Kota Palu	100%	39.334.750	100%	40.121.445
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian gantirugi dan santunan Tanah untuk pembangunan yang disusun	Kota Palu	2 laporan	39.334.750	2 laporan	40.121.445
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	05	2.01	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaiaan Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	39.334.750	1 dokumen	40.121.445
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Cakupan penatagunaan tanah	Kota Palu	100%	113.920.850	100%	116.199.267
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10	2.01		Pengunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kab/Kota	Jumlah sertipikat Tanah berdasarkan pengunaannya yang diterbitkan	Kota Palu	266 sertipikat	113.920.850	266 sertipikat	116.199.267
							Jumlah kawasan pemetaan berdasarkan hasil konsolidasi tanah dan penggunaan zona nilai tanah		2 lokasi		2 lokasi	

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 laporan	108.403.550	1 laporan	110.571.621
2	10	1.03.2.10.0.00.01.00	10	2.01	03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	5.517.300	1 dokumen	5.627.646
2	11					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				51.265.117.116		52.290.419.458
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00				Dinas Lingkungan Hidup				51.265.117.116		52.290.419.458
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	12.878.483.994	BB	13.136.053.674
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	70.392.750	5 dokumen	71.800.605
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	53.291.500	2 dokumen	54.357.330
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7.752.200	1 dokumen	7.907.244
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3.488.750	1 dokumen	3.558.525
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	5.860.300	1 laporan	5.977.506

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	8.864.800.294	95%	9.042.096.300
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	88 orang/ bulan	8.860.978.644	88 orang/ bulan	9.038.198.217
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	3.821.650	2 laporan	3.898.083
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	515.125.950	100%	525.428.469
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	10 paket	45.400.000	10 paket	46.308.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	80.832.100	1 paket	82.448.742
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	52.286.050	5 paket	53.331.771
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	5 dokumen	1.000.000	5 dokumen	1.020.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	19.651.800	11 laporan	20.044.836
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	39 laporan	315.956.000	39 laporan	322.275.120
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	113.041.000	100%	115.301.820
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	2 unit	113.041.000	2 unit	115.301.820
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.900.889.200	100%	1.938.906.984

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	114.020.400	12 Laporan	116.300.808
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	1.786.868.800	12 Laporan	1.822.606.176
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	1.414.234.800	100%	1.442.519.496
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	103 unit	943.446.200	103 unit	962.315.124
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	11 unit	359.368.600	11 unit	366.555.972
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	2 unit	17.650.000	2 unit	18.003.000
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	10 unit	93.770.000	10 unit	95.645.400
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan perencanaan lingkungan hidup	Kota Palu	100%	207.375.000	100%	211.522.500
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	207.375.000	100%	211.522.500

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	207.375.000	1 dokumen	211.522.500
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Cakupan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kota Palu	100%	719.616.822	100%	734.009.158
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	649.200.722	100%	662.184.736
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Palu	1 dokumen	138.217.100	1 dokumen	140.981.442
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.01	15	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Kota Palu	12 dokumen	510.983.622	12 dokumen	521.203.294
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	28.421.300	100%	28.989.726
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kota Palu	1 titik	28.421.300	1 titik	28.989.726
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	41.994.800	100%	42.834.696

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	03	2.03	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Kota Palu	1 dokumen	41.994.800	1 dokumen	42.834.696
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Cakupan pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Kota Palu	100%	6.757.836.800	100%	6.892.993.536
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	6.757.836.800	100%	6.892.993.536
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	5 Ha	2.389.113.800	5 Ha	2.436.896.076
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	04	2.01	08	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	10 unit	4.368.723.000	10 unit	4.456.097.460
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Kota Palu	100%	116.686.300	100%	119.020.026
							Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota		19		20	

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	116.686.300	100%	119.020.026
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kota Palu	1 dokumen	94.716.300	1 dokumen	96.610.626
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	06	2.01	09	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Palu	1 badan usaha	21.970.000	1 badan usaha	22.409.400
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Cakupan peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Kota Palu	100%	657.705.500	100%	670.859.610
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	657.705.500	100%	670.859.610

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	08	2.01	05	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/ komunitas/kelompok masyarakat	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Palu	5 lembaga	657.705.500	5 lembaga	670.859.610
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Kota Palu	70%	29.927.412.700	70%	30.525.960.954
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11	2.01		Pengelolaan Sampah	Terlaksananya pengelolaan sampah	Kota Palu	72%	29.927.412.700	71%	30.525.960.954
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Palu	1 unit	4.207.613.050	1 unit	4.291.765.311
2	11	2.11.0.00.0.00.01.00	11	2.01	17	Penanganan sampah melalui pemilahan danpengolahan sampah di instalasi pengolahansampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA,PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan,biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kota Palu	50.000 ton	25.719.799.650	50.000 ton	26.234.195.643
2	12					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				6.918.636.062		7.057.008.783
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00				Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				6.918.636.062		7.057.008.783
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	6.527.919.512	A	6.658.477.902

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	137.638.600	5 dokumen	140.391.372
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	41.612.300	2 dokumen	42.444.546
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	15.116.850	1 dokumen	15.419.187
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	11.250.000	1 dokumen	11.475.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	69.659.450	1 laporan	71.052.639
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	4.088.604.912	95%	4.170.377.010
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	36 orang/ bulan	4.074.713.362	36 orang/ bulan	4.156.207.629
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	13.891.550	1 Laporan	14.169.381
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	12.858.000	100%	13.115.160

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	80 orang	12.858.000	80 orang	13.115.160
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	763.617.200	100%	778.889.544
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	7 paket	2.330.500	7 paket	2.377.110
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	13 paket	13.520.850	13 paket	13.791.267
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	96 paket	310.147.800	96 paket	316.350.756
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	13 paket	84.495.650	13 paket	86.185.563
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	7.600.000	2 dokumen	7.752.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	77.778.400	12 laporan	79.333.968
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	24 laporan	267.744.000	24 laporan	273.098.880
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	1.500.000	100%	1.530.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	1.500.000	1 unit	1.530.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.159.860.800	100%	1.183.058.016
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	155.700.000	12 laporan	158.814.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.004.160.800	12 laporan	1.024.244.016
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	363.840.000	100%	371.116.800
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	156 unit	334.320.000	156 unit	341.006.400
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	25 Unit	29.520.000	25 Unit	30.110.400
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Rasio penduduk ber-KTP el per satuan penduduk	Kota Palu	0,662	173.250.000	0,659	176.715.000
							Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA		50%		50%	
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terpenuhinya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Palu	100%	173.250.000	100%	176.715.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kota Palu	12000 laporan	173.250.000	12000 laporan	176.715.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase/cakupan penerbitan akta pencatatan sipil	Kota Palu	100%	127.319.150	100%	129.865.533
							Kepemilikan akta kelahiran		100%		100%	
							Cakupan Kepemilikan Kutipan Akta Kematian		100%		100%	
							Cakupan kepemilikan akta perkawinan /buku nikah		100%		100%	
							Cakupan Penerbitan Akta Perceraian		100%		100%	

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Terpenuhinya Pelayanan Pencatatan Sipil	Kota Palu	100%	127.319.150	100%	129.865.533
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kota Palu	9000 Dokumen	15.360.000	9000 Dokumen	15.667.200
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Kota Palu	2 layanan	111.959.150	2 layanan	114.198.333
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kota Palu	100%	67.347.400	100%	68.694.348
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Kota Palu	100%	52.773.150	100%	53.828.613
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kota Palu	2 dokumen	38.299.950	2 dokumen	39.065.949
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kota Palu	13 dokumen	14.473.200	13 dokumen	14.762.664
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Palu	100%	14.574.250	100%	14.865.735
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	04	2.03	05	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kota Palu	1 laporan	14.574.250	1 laporan	14.865.735
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Cakupan pengelolaan profil kependudukan	Kota Palu	100%	22.800.000	100%	23.256.000
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Profil Kependudukan	Kota Palu	100%	22.800.000	100%	23.256.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	12	2.12.0.00.0.00.01.00	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Kota Palu	1 dokumen	22.800.000	1 dokumen	23.256.000
2	14					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				12.153.613.414		12.396.685.682
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000				Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				12.153.613.414		12.396.685.682
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	6.335.715.493	BB	6.462.429.803
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 Dokumen	3.425.000	5 Dokumen	3.493.500
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	387.500	2 dokumen	395.250
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.325.000	1 dokumen	1.351.500
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.325.000	1 dokumen	1.351.500
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	387.500	1 laporan	395.250

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	4.307.518.093	95%	4.393.668.455
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	38 orang/ bulan	4.306.068.093	38 orang/ bulan	4.392.189.455
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.450.000	1 laporan	1.479.000
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	429.818.500	100%	438.414.870
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	620.500	1 paket	632.910
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	41.428.600	3 paket	42.257.172
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	35 paket	51.584.900	35 paket	52.616.598
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	23.958.500	5 paket	24.437.670
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	3.600.000	2 dokumen	3.672.000
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	27 laporan	308.626.000	27 laporan	314.798.520
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.130.546.400	100%	1.153.157.328
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	96.010.800	12 laporan	97.931.016

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.034.535.600	12 laporan	1.055.226.312
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	464.407.500	100%	473.695.650
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	58 Unit	419.957.500	58 Unit	428.356.650
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	32 Unit	44.450.000	32 Unit	45.339.000
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	Kota Palu	1,65	165.499.000	1,6	168.808.980
							TFR (Angka Kelahiran Total)		33,12%		33,17%	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	100%	165.499.000	100%	168.808.980
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Palu	1 laporan	13.390.000	1 laporan	13.657.800
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	12	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Palu	1 laporan	81.600.000	1 laporan	83.232.000
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Palu	1 dokumen	70.509.000	1 dokumen	71.919.180
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Kota Palu	100%	3.065.598.421	100%	3.126.910.389

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
							Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)		4,1%		3,6%	
							Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		7,1%		6,6%	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Palu	100%	655.456.450	100%	668.565.579
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Kota Palu	8 laporan	80.000.000	8 laporan	81.600.000
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Palu	1 laporan	246.800.000	1 laporan	251.736.000
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	11	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Palu	4 laporan	120.000.000	4 laporan	122.400.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	12	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Palu	8 dokumen	108.656.450	8 dokumen	110.829.579
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	14	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Kota Palu	10 Organisasi	100.000.000	10 Organisasi	102.000.000
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Palu	100%	146.075.000	100%	148.996.500
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.02	04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Palu	100 orang	146.075.000	100 orang	148.996.500
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	1.246.403.271	100%	1.271.331.336
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Palu	35 laporan	40.500.000	35 laporan	41.310.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Palu	50 orang	985.472.863	50 orang	1.005.182.320
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	05	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Palu	2 dokumen	7.158.208	2 dokumen	7.301.372
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Palu	30 unit	156.000.000	30 unit	159.120.000
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Palu	1 laporan	29.235.000	1 laporan	29.819.700
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Kota Palu	8 laporan	28.037.200	8 laporan	28.597.944
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04		Pemberdayaandan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyrakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan pembinaan Kesertaan BerKB	Terwujudnya Pemberdayaandan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyrakatan Tingkat Daerah Kab/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan pembinaan Kesertaan BerKB	Kota Palu	100%	1.017.663.700	100%	1.038.016.974
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	01	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pembinaan BerKB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Palu	4 organisasi	7.634.250	4 organisasi	7.786.935

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	05	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Kota Palu	24 unit	719.869.450	24 unit	734.266.839
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	03	2.04	06	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kota Palu	18 kampung	290.160.000	18 kampung	295.963.200
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	Kota Palu	79%	2.586.800.500	81%	2.638.536.510
							Cakupan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)		100%		100%	
							Persentase usia kawin pertama wanita di bawah 21 tahun		22%		21%	
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Palu	76%	2.586.800.500	77%	2.638.536.510
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	18	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Kota Palu	25 unit	300.000.000	25 unit	306.000.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	21	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Kota Palu	1 laporan	121.700.500	1 laporan	124.134.510
2	14	2.14.0.00.0.00.01.0000	04	2.01	24	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan PendapatanKeluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kota Palu	861 orang	2.165.100.000	861 orang	2.208.402.000
2	15					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				32.163.911.530		32.807.189.761
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00				Dinas Perhubungan				32.163.911.530		32.807.189.761
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	12.983.529.880	A	13.243.200.478
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	21.677.300	5 dokumen	22.110.846
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	4.602.650	2 dokumen	4.694.703
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6.233.600	1 dokumen	6.358.272

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6.361.700	1 dokumen	6.488.934
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	4.479.350	1 laporan	4.568.937
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	8.748.895.630	95%	8.923.873.543
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	94 orang/ bulan	8.734.319.930	94 orang/ bulan	8.909.006.329
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	12 laporan	14.575.700	12 laporan	14.867.214
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	54.324.500	100%	55.410.990
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	100 orang	30.142.500	100 orang	30.745.350
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	1 orang	24.182.000	1 orang	24.665.640
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	513.152.050	100%	523.415.091

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	1.262.100	2 paket	1.287.342
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	14 paket	89.060.800	14 paket	90.842.016
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	52.822.800	4 paket	53.879.256
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	15.925.350	4 paket	16.243.857
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	12.900.000	2 dokumen	13.158.000
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	4 laporan	7.655.000	4 laporan	7.808.100
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	28 laporan	333.526.000	28 laporan	340.196.520
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	3.033.584.400	100%	3.094.256.088
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	161.399.500	12 laporan	164.627.490
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	2.872.184.900	12 laporan	2.929.628.598
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	611.896.000	100%	624.133.920

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	18 unit	329.892.000	18 unit	336.489.840
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	44 unit	271.904.000	44 unit	277.342.080
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	25 unit	5.720.000	25 unit	5.834.400
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	5 unit	4.380.000	5 unit	4.467.600
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	Kota Palu	25,92%	19.180.381.650	29,51%	19.563.989.283
							Cakupan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)		100,00%		100,00%	
							Rasio konektivitas kabupaten/kota		0,72		0,8	
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	117.417.750	100%	119.766.105
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Palu	13 unit	53.473.000	13 unit	54.542.460
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Kota Palu	17 unit	63.944.750	17 unit	65.223.645
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Cakupan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Kota Palu	100%	41.332.100	100%	42.158.742

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.03	06	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Kota Palu	3 dokumen	41.332.100	3 dokumen	42.158.742
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Cakupan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Kota Palu	100%	1.242.711.300	100%	1.267.565.526
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.04	02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	12 laporan	1.242.711.300	12 laporan	1.267.565.526
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Cakupan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kota Palu	100%	57.852.550	100%	59.009.601
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.05	01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Kota Palu	4 unit	57.852.550	4 unit	59.009.601
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	Kota Palu	100%	129.570.250	100%	132.161.655
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.06	15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kota Palu	4 laporan	26.199.750	4 laporan	26.723.745
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.06	16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Kota Palu	4 dokumen	103.370.500	4 dokumen	105.437.910
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Cakupan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	14.836.100	100%	15.132.822

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.07	06	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Kota Palu	4 laporan	14.836.100	4 laporan	15.132.822
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	17.129.116.400	100%	17.471.698.728
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.09	03	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kota Palu	26 unit	17.129.116.400	26 unit	17.471.698.728
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	447.545.200	100%	456.496.104
2	15	2.15.0.00.0.00.01.00	02	2.11	03	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	12 dokumen	447.545.200	12 dokumen	456.496.104
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.360.000.815		10.567.200.831
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00				Dinas Komunikasi dan Informatika				10.360.000.815		10.567.200.831
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	5.617.523.155	BB	5.729.873.618
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	22.125.150	5 dokumen	22.567.653

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	5.310.000	2 dokumen	5.416.200
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	5.415.000	1 dokumen	5.523.300
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	4.915.000	1 dokumen	5.013.300
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	6.485.150	1 laporan	6.614.853
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	4.233.699.555	95%	4.318.373.546
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	38 orang/ bulan	4.223.045.655	38 orang/ bulan	4.307.506.568
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 laporan	10.653.900	1 laporan	10.866.978
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	478.672.450	100%	488.245.899
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	687.000	1 paket	700.740
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	96.170.600	1 paket	98.094.012

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	24.169.250	1 paket	24.652.635
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	6.903.700	1 paket	7.041.774
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	1 dokumen	8.900.000	1 dokumen	9.078.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	11.472.900	1 laporan	11.702.358
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	20 laporan	330.369.000	20 laporan	336.976.380
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	379.016.000	100%	386.596.320
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	34.200.400	12 laporan	34.884.408
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	344.815.600	12 laporan	351.711.912
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	504.010.000	100%	514.090.200
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	4 unit	326.320.000	4 unit	332.846.400

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	4 unit	27.270.000	4 unit	27.815.400
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	20 unit	14.200.000	20 unit	14.484.000
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	2 unit	136.220.000	2 unit	138.944.400
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Kota Palu	100%	901.024.750	100%	919.045.245
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	901.024.750	100%	919.045.245
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Kota Palu	1 laporan	673.566.000	1 laporan	687.037.320
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Kota Palu	1 rekomendasi	64.713.750	1 rekomendasi	66.008.025
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Kota Palu	1 media	162.745.000	1 media	165.999.900

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan pengelolaan aplikasi informatika	Kota Palu	100%	3.841.452.910	100%	3.918.281.968
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03	2.02		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Kota Palu	100%	3.841.452.910	100%	3.918.281.968
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03	2.02	15	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Kota Palu	1 laporan	258.578.850	1 laporan	263.750.427
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00	03	2.02	24	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Palu	41 Perangkat Daerah	3.582.874.060	41 Perangkat Daerah	3.654.531.541
2	17					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				12.838.230.256		13.094.994.861
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00				Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja				12.838.230.256		13.094.994.861
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	5.394.311.806	BB	5.502.198.042
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	26.234.500	5 dokumen	26.759.190
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	3.575.000	2 dokumen	3.646.500
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	8.570.400	1 dokumen	8.741.808

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dokumen Penetapan DPA yang Tersusun	Kota Palu	1 dokumen	9.939.100	1 dokumen	10.137.882
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	4.150.000	1 laporan	4.233.000
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	4.194.599.306	95%	4.278.491.292
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	38 orang/ bulan	4.187.874.306	38 orang/ bulan	4.271.631.792
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	13 laporan	3.450.000	13 laporan	3.519.000
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Palu	2 dokumen	3.275.000	1 dokumen	3.340.500
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	7.685.000	100%	7.838.700
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palu	12 dokumen	7.685.000	1 dokumen	7.838.700
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	748.884.200	100%	763.861.884
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	4.280.700	1 paket	4.366.314

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	15 paket	305.839.200	15 paket	311.955.984
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	14 paket	103.316.700	14 paket	105.383.034
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	12.064.200	5 paket	12.305.484
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	16.692.400	12 laporan	17.026.248
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	60 laporan	306.691.000	60 laporan	312.824.820
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	53.998.800	100%	55.078.776
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	45 laporan	53.998.800	45 laporan	55.078.776
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	362.910.000	100%	370.168.200
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	11 Unit	306.600.000	11 Unit	312.732.000
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	31 Unit	33.510.000	31 Unit	34.180.200
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	3 unit	22.800.000	3 unit	23.256.000
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi aktif	Kota Palu	90,67%	31.919.950	99,74%	32.558.349

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kab/Kota	Kota Palu	100 Koperasi	31.919.950	100 Koperasi	32.558.349
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	03	2.01	04	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Kota Palu	50 unit usaha	31.919.950	50 unit usaha	32.558.349
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi sehat	Kota Palu	5,2%	47.369.250	5,2%	48.316.635
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilaksanakan penilaian	Kota Palu	41 Koperasi	47.369.250	41 Koperasi	48.316.635
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	04	2.01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Kota Palu	20 unit usaha	47.369.250	20 unit usaha	48.316.635
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pemenuhan kebutuhan pendidikan dan latihan perkoperasian	Kota Palu	100%	36.902.100	100%	37.640.142
							Meningkatnya Koperasi yang berkualitas		46		46	
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah Koperasi Yang Dilatih	Kota Palu	50 koperasi	36.902.100	50 koperasi	37.640.142

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	05	2.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kab/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Kota Palu	80 orang	36.902.100	80 orang	37.640.142
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Cakupan pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Kota Palu	100%	346.095.250	100%	353.017.155
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Kota Palu	8 Dok	346.095.250	8 Dok	353.017.155
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	07	2.01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Kota Palu	200 unit usaha	346.095.250	200 unit usaha	353.017.155
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Cakupan pengembangan UMKM	Kota Palu	5,0%	6.981.631.900	5,1%	7.121.264.538
							Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha		14,40		16,20	
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Kota Palu	200 UMKM	6.981.631.900	200 UMKM	7.121.264.538
2	17	2.17.2.07.0.00.01.00	08	2.01	02	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Kota Palu	200 unit usaha	6.981.631.900	200 unit usaha	7.121.264.538
2	18					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL				9.824.352.657		10.020.839.710
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00				Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu				6.626.247.580		6.758.772.532

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	5.761.483.080	A	5.876.712.742
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 Dokumen	2.075.000	5 Dokumen	2.116.500
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	475.000	2 dokumen	484.500
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	650.000	1 dokumen	663.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	475.000	1 dokumen	484.500
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	475.000	1 laporan	484.500
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	3.910.067.280	95%	3.988.268.626
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	32 orang/ bulan	3.909.417.280	32 orang/ bulan	3.987.605.626
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 laporan	325.000	1 laporan	331.500

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	1 laporan	325.000	1 laporan	331.500
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	502.919.600	100%	512.977.992
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	1.550.500	2 paket	1.581.510
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	7 paket	81.631.500	7 paket	83.264.130
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	17.878.400	3 paket	18.235.968
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	5.600.000	2 dokumen	5.712.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	3.919.200	1 laporan	3.997.584
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	38 laporan	392.340.000	38 laporan	400.186.800
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	882.879.200	100%	900.536.784
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	334.612.000	12 Laporan	341.304.240
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	548.267.200	12 Laporan	559.232.544

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	463.542.000	100%	472.812.840
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	9 unit	403.500.000	9 unit	411.570.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	1 unit	29.300.000	1 unit	29.886.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	18 unit	12.940.000	18 unit	13.198.800
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	9.872.000	1 unit	10.069.440
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	14 unit	7.930.000	14 unit	8.088.600
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Kota Palu	5%	78.168.200	5%	79.731.564
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyederhanaan Prosedur Perizinan	Kota Palu	100%	78.168.200	100%	79.731.564
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Kota Palu	2 Perda	48.920.000	2 Perda	49.898.400

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Kota Palu	1 dokumen	29.248.200	1 dokumen	29.833.164
							Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)		64		67	
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Palu	Sangat Baik	163.866.400	Sangat Baik	167.143.728
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu	Kota Palu	100%	163.866.400	100%	167.143.728
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	2000 Pelaku Usaha	117.550.000	2000 Pelaku Usaha	119.901.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	5 Pelaku Usaha	34.916.400	5 Pelaku Usaha	35.614.728
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	04	2.01	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kota Palu	200 kegiatan usaha	11.400.000	200 kegiatan usaha	11.628.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kota Palu	100%	592.729.900	100%	604.584.498
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya koordinasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kota Palu	100%	592.729.900	100%	604.584.498
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	04	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kota Palu	12 kegiatan usaha	195.775.000	12 kegiatan usaha	199.690.500
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	05	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kota Palu	350 Pelaku Usaha	283.079.900	350 Pelaku Usaha	288.741.498
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kota Palu	200 kegiatan usaha	113.875.000	200 kegiatan usaha	116.152.500
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Kota Palu	100%	30.000.000	100%	30.600.000
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	Kota Palu	100%	30.000.000	100%	30.600.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	18	2.18.0.00.0.00.01.00	06	2.01	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Palu	12 dokumen	30.000.000	12 dokumen	30.600.000
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00				Administrator Kawasan Ekonomi Khusus				3.198.105.077		3.262.067.179
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	2.832.310.077	BB	2.888.956.279
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 Dokumen	3.210.000	5 Dokumen	3.274.200
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	1.365.000	2 dokumen	1.392.300
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	240.000	1 dokumen	244.800
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	240.000	1 dokumen	244.800
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.365.000	1 laporan	1.392.300
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	2.038.476.627	95%	2.079.246.160

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	18 orang/ bulan	2.037.876.627	18 orang/ bulan	2.078.634.160
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	300.000	1 Laporan	306.000
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	300.000	2 laporan	306.000
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	20.896.700	100%	21.314.634
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	Kota Palu	1 paket	12.751.700	1 paket	13.006.734
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	2 orang	8.145.000	2 orang	8.307.900
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	242.418.050	100%	247.266.411
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan komponen instlasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	1.710.000	1 paket	1.744.200
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	8.539.600	1 paket	8.710.392
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	24.377.550	4 paket	24.865.101

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	10.539.900	1 paket	10.750.698
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	13.365.000	1 laporan	13.632.300
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	10 laporan	183.886.000	10 laporan	187.563.720
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	280.896.000	100%	286.513.920
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	90.500.000	12 Laporan	92.310.000
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 Laporan	190.396.000	12 Laporan	194.203.920
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	246.412.700	100%	251.340.954
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	8 Unit	214.952.700	8 Unit	219.251.754
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	18 unit	27.660.000	18 unit	28.213.200
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	4 unit	3.800.000	4 unit	3.876.000
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	Kota Palu	45 investor	108.055.000	47 investor	110.216.100

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
							Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) (Miliar Rupiah)		38.500		38.550	
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpublikasinya Kawasan Ekonomi Khusus Palu	Kota Palu	100%	108.055.000	100%	110.216.100
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	03	2.01	02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	107.155.000	1 dokumen	109.298.100
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	03	2.01	03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Kota Palu	1 dokumen	900.000	1 dokumen	918.000
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Indeks Kepuasan Masyarakat	Kota Palu	Baik	200.040.000	Baik	204.040.800
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggaranya Pelayanan Perizinan dan non perizinan	Kota Palu	100%	200.040.000	100%	204.040.800
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04	2.01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Dokumen	41.400.000	1 Dokumen	42.228.000
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04	2.01	06	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	8 pelaku usaha	117.240.000	8 pelaku usaha	119.584.800

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04	2.01	07	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Kota Palu	39 pelaku usaha	4.950.000	39 pelaku usaha	5.049.000
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	04	2.01	08	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kota Palu	2 kegiatan usaha	36.450.000	2 kegiatan usaha	37.179.000
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Cakupan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Kota Palu	100%	8.250.000	100%	8.415.000
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya Kegiatan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan	Kota Palu	100%	8.250.000	100%	8.415.000
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	05	2.01	06	Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kota Palu	1 kegiatan usaha	8.250.000	1 kegiatan usaha	8.415.000
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Cakupan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Kota Palu	100%	49.450.000	100%	50.439.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Sistem Pendukung Penanaman Modal	Kota Palu	100%	49.450.000	100%	50.439.000
2	18	2.18.0.00.0.00.02.00	06	2.01	02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Kota Palu	3 dokumen	49.450.000	3 dokumen	50.439.000
2	19					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				18.245.033.657		18.609.934.330
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00				Dinas Pemuda dan Olahraga				18.245.033.657		18.609.934.330
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	6.042.387.507	BB	6.163.235.257
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	61.710.000	4 dokumen	62.944.200
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	16.937.500	1 dokumen	17.276.250
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	16.937.500	1 dokumen	17.276.250

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	27.835.000	1 laporan	28.391.700
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	3.639.708.207	95%	3.712.502.371
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	32 orang/ bulan	3.639.708.207	32 orang/ bulan	3.712.502.371
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	754.837.400	100%	769.934.148
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	2.186.000	1 paket	2.229.720
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	154.039.900	5 paket	157.120.698
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kota Palu	6 paket	7.344.800	6 paket	7.491.696
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	93.431.100	12 paket	95.299.722
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	8 paket	2.400.000	8 paket	2.448.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	7 dokumen	3.900.000	7 dokumen	3.978.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	15 laporan	12.387.600	15 laporan	12.635.352
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	26 laporan	479.148.000	26 laporan	488.730.960

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Palu	100%	428.572.200	100%	437.143.644
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	380.000.000	1 unit	387.600.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	10 paket	48.572.200	10 paket	49.543.644
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	660.989.600	100%	674.209.392
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	69.000.000	12 laporan	70.380.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	591.989.600	12 laporan	603.829.392
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	496.570.100	100%	506.501.502
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	6 unit	482.770.100	6 unit	492.425.502
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	33 unit	13.800.000	33 unit	14.076.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	Kota Palu	100%	588.636.600	100%	600.409.332

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	588.636.600	100%	600.409.332
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	02	2.01	10	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Kota Palu	1 dokumen	203.344.200	1 dokumen	207.411.084
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	02	2.01	11	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Kota Palu	20 orang	115.649.500	20 orang	117.962.490
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	02	2.01	15	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Kota Palu	69 orang	269.642.900	69 orang	275.035.758
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	Kota Palu	100%	10.897.198.100	100%	11.115.142.062

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	582.800.000	100%	594.456.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.01	05	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Kota Palu	10 unit	251.250.000	10 unit	256.275.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.01	06	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Kota Palu	1 dokumen	331.550.000	1 dokumen	338.181.000
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Kejuaraan Dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Kota Palu	100%	9.261.266.600	100%	9.446.491.932
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.02	04	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 kegiatan	7.663.094.500	1 kegiatan	7.816.356.390
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.02	06	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Kota Palu	250 orang	1.598.172.100	250 orang	1.630.135.542
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Kota Palu	100%	93.746.200	100%	95.621.124

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.04	06	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkai	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	93.746.200	1 dokumen	95.621.124
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Tercapainnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Kota Palu	100%	959.385.300	100%	978.573.006
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.05	09	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Kota Palu	10 unit	100.625.400	10 unit	102.637.908
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	03	2.05	10	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Kota Palu	5 lembaga	858.759.900	5 lembaga	875.935.098
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan pengembangan kapasitas kepramukaan	Kota Palu	100%	716.811.450	100%	731.147.679
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Kota Palu	100%	716.811.450	100%	731.147.679
2	19	2.19.0.00.0.00.01.00	04	2.01	05	Penyelenggaraan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Kota Palu	3 laporan	716.811.450	3 laporan	731.147.679
2	20					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				148.435.950		151.404.669
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00				Dinas Komunikasi dan Informatika				148.435.950		151.404.669
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase pemenuhan data statistik sektoral	Kota Palu	100%	148.435.950	100%	151.404.669

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
							Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah		100%		100%	
							Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah		100%		100%	
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	148.435.950	100%	151.404.669
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	07	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan dibidang statistik	Kota Palu	1 orang	16.286.600	1 orang	16.612.332
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	08	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data Statistik untuk Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Pembangunan dan/atau Penyusunan Kebijakan	Kota Palu	90%	75.302.150	90%	76.808.193
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	Kota Palu	90%	42.328.000	90%	43.174.560
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	10	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Kota Palu	1 dokumen	6.534.600	1 dokumen	6.665.292
2	20	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	11	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	umlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	Kota Palu	1 dokumen	7.984.600	1 dokumen	8.144.292
2	21					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				152.091.350		155.133.177
2	16	2.16.2.20.2.21.01.00				Dinas Komunikasi dan Informatika				152.091.350		155.133.177

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Cakupan penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Kota Palu	100%	152.091.350	100%	155.133.177
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	152.091.350	100%	155.133.177
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Kota Palu	1 dokumen	29.039.350	1 dokumen	29.620.137
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 laporan	74.073.000	1 laporan	75.554.460
2	21	2.16.2.20.2.21.01.00	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kota Palu	1 laporan	48.979.000	1 laporan	49.958.580
2	22					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				6.050.932.720		6.171.951.374
1	01	1.01.1.01.2.22.01.0000				Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				6.050.932.720		6.171.951.374
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan pengembangan kebudayaan	Kota Palu	100%	5.016.456.000	100%	5.116.785.120
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	5.016.456.000	100%	5.116.785.120
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	02	2.02	02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Kota Palu	20 laporan	5.016.456.000	20 laporan	5.116.785.120

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Cakupan pengembangan kesenian tradisional	Kota Palu	100%	111.250.000	100%	113.475.000
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	111.250.000	100%	113.475.000
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	03	2.01	01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Kota Palu	10 orang	111.250.000	10 orang	113.475.000
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Terlestarikannya Cagar Budaya	Kota Palu	87%	923.226.720	90%	941.691.254
							Cakupan pelestraian dan pengelolaan cagar budaya		100%		100%	
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat	Kota Palu	100	423.616.000	100	432.088.320
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	05	2.01	02	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Kota Palu	1 objek	423.616.000	1 objek	432.088.320
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	78%	499.610.720	83%	509.602.934
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	05	2.02	01	Perlindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Kota Palu	1 objek	49.610.720		50.602.934
2	22	1.01.1.01.2.22.01.0000	05	2.02	03	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Kota Palu	6 objek	450.000.000	6 objek	459.000.000
2	23					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				371.559.700		378.990.894
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				371.559.700		378.990.894
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase capaian pembinaan pepustakaan	Kota Palu	100%	355.954.500	100%	363.073.590

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perpustakaan Yang dapat diakses Ke Masyarakat	Kota Palu	100%	76.780.500	100%	78.316.110
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	11	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Kota Palu	50 Perpustakaan	26.710.000	50 Perpustakaan	27.244.200
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	13	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Kota Palu	46 Perpustakaan	16.272.500	46 Perpustakaan	16.597.950
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	16	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	25 orang	16.193.000	25 orang	16.516.860
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	18	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Kota Palu	192 eksemplar	12.495.000	192 eksemplar	12.744.900
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	20	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Kota Palu	1 Perpustakaan	5.110.000	1 Perpustakaan	5.212.200
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Budaya Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	Kota Palu	100%	279.174.000	100%	284.757.480
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	06	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Kota Palu	3 orang	25.620.000	3 orang	26.132.400

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	07	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Kota Palu	4 perpustakaan	219.469.000	4 perpustakaan	223.858.380
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	09	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Kota Palu	18 orang	34.085.000	18 orang	34.766.700
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase pemenuhan kebutuhan pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Kota Palu	100%	15.605.200	100%	15.917.304
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan Peran Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno	Kota Palu	100%	15.605.200	100%	15.917.304
2	23	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.01	03	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Kota Palu	13 orang	15.605.200	13 orang	15.917.304
2	24					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				6.459.291.492		6.588.477.322
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000				Dinas Kearsipan dan Perpustakaan				6.459.291.492		6.588.477.322
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	6.356.142.092	BB	6.483.264.934
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	14.400.000	5 dokumen	14.688.000
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	3.300.000	2 dokumen	3.366.000
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	4.500.000	1 dokumen	4.590.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3.300.000	1 dokumen	3.366.000
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	3.300.000	1 laporan	3.366.000
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	4.292.521.692	95%	4.378.372.126
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	39 orang/ bulan	4.285.621.692	39 orang/ bulan	4.371.334.126
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	3.450.000	1 Laporan	3.519.000
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	3.450.000	2 laporan	3.519.000
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	657.455.300	100%	670.604.406
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	12.020.000	1 paket	12.260.400
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	127.102.200	1 paket	129.644.244

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	78.565.000	1 paket	80.136.300
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	17.040.100	1 paket	17.380.902
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	3 dokumen	6.100.000	3 dokumen	6.222.000
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	16.125.000	1 laporan	16.447.500
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	12 laporan	400.503.000	12 laporan	408.513.060
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	990.015.100	100%	1.009.815.402
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	323.029.900	12 laporan	329.490.498
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	666.985.200	12 laporan	680.324.904
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	401.750.000	100%	409.785.000
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	7 unit	313.800.000	7 unit	320.076.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	3 unit	37.600.000	3 unit	38.352.000
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	1 unit	27.300.000	1 unit	27.846.000
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	6 unit	23.050.000	6 unit	23.511.000
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Cakupan tata kelola arsip dinamis dan arsip statis	Kota Palu	100%	87.515.200	100%	89.265.504
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Kota Palu	100%	53.967.200	100%	55.046.544
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Kota Palu	1 berkas	26.149.000	1 berkas	26.671.980
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Kota Palu	45 berkas	19.685.200	45 berkas	20.078.904
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	41 laporan	8.133.000	41 laporan	8.295.660
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	Kota Palu	100%	9.423.000	100%	9.611.460
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	01	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga Kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Kota Palu	1 arsip	6.953.000	1 arsip	7.092.060
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.02	04	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis		1 arsip	2.470.000	1 arsip	2.519.400

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	24.125.000	100%	24.607.500
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Kota Palu	1 layanan	7.845.000	1 layanan	8.001.900
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	45 laporan	16.280.000	45 laporan	16.605.600
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase pemenuhan kebutuhan perlindungan dan penyelamatan arsip	Kota Palu	100%	13.174.200	100%	13.437.684
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.01		Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki retensi dibawah 10 Tahun	Kota Palu	100%	4.943.200	100%	5.042.064
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.01	04	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Kota Palu	45 Arsip	4.943.200	45 Arsip	5.042.064
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Terwujudnya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kab/Kota	Kota Palu	100%	3.421.000	100%	3.489.420
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.03	04	Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Kota Palu	8 arsip	3.421.000	8 arsip	3.489.420

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Terwujudnya Pencarian Arsip Statis Kab/Kota	Kota Palu	100%	4.810.000	100%	4.906.200
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	03	2.05	03	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yangDilakukan Penetapan dan Pengumuman	Kota Palu	1 arsip	4.810.000	1 arsip	4.906.200
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Cakupan perizinan penggunaan arsip	Kota Palu	100%	2.460.000	100%	2.509.200
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	2.460.000	100%	2.509.200
2	24	2.24.2.23.0.00.01.0000	04	2.01	03	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	Kota Palu	9 SOP	2.460.000	9 SOP	2.509.200
3						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				48.002.961.959		48.963.021.198
3	25					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				3.380.232.900		3.447.837.558
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				3.380.232.900		3.447.837.558
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi perikanan tangkap (ton)	Kota Palu	1156	1.722.710.100	1191	1.757.164.302
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan pengelolaan penangkapan ikan	Kota Palu	100%	1.722.710.100	100%	1.757.164.302
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	04	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	umlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Kota Palu	50 unit	1.722.710.100	50 unit	1.757.164.302

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi perikanan budidaya (ton)	Kota Palu	138	1.480.375.900	143	1.509.983.418
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan	Kota Palu	100%	1.480.375.900	100%	1.509.983.418
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	21 unit	1.131.720.500	21 unit	1.154.354.910
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04	09	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kota Palu	3 unit	348.655.400	3 unit	355.628.508
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Konsumsi ikan (Kg/Kap/Tahun)	Kota Palu	76,87	177.146.900	77,64	180.689.838
							Persentase capaian pengolahan dan pemasaran hasil perikanan		100%		100%	
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya Bahan Baku dan Sarana Pengolahan Hasil Perikanan	Kota Palu	100%	177.146.900	100%	180.689.838
3	25	3.27.2.09.3.25.01.0000	06	2.03	02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Kota Palu	4 pelaku usaha	177.146.900	4 pelaku usaha	180.689.838
3	26					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				9.289.148.221		9.474.931.185
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00				Dinas Pariwisata				9.289.148.221		9.474.931.185
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	4.885.161.721	BB	4.982.864.955
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	56.864.800	4 dokumen	58.002.096

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	3.697.800	1 Dokumen	3.771.756
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.425.000	1 dokumen	1.453.500
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.425.000	1 dokumen	1.453.500
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	50.317.000	1 laporan	51.323.340
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	3.458.678.021	95%	3.527.851.581
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	38 orang/ bulan	3.456.024.621	38 orang/ bulan	3.525.145.113
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	18 laporan	2.653.400	18 laporan	2.706.468
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	352.513.100	100%	359.563.362
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	17.021.500	1 paket	17.361.930
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	6 paket	23.793.100	6 paket	24.268.962

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	7.797.500	1 paket	7.953.450
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	3.300.000	12 dokumen	3.366.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	10 laporan	9.900.000	10 laporan	10.098.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	33 laporan	290.701.000	33 laporan	296.515.020
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	587.515.800	100%	599.266.116
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	54.659.800	12 laporan	55.752.996
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	532.856.000	12 laporan	543.513.120
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	429.590.000	100%	438.181.800
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	5 unit	425.540.000	5 unit	434.050.800
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	5 unit	4.050.000	5 unit	4.131.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Cakupan peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Kota Palu	100%	708.910.700	100%	723.088.914

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	170.000.000	100%	173.400.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Perencanaan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	173.400.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	510.355.800	100%	520.562.916
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Kota Palu	3 unit	428.000.000	3 unit	436.560.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 laporan	82.355.800	1 laporan	84.002.916
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	28.554.900	100%	29.125.998
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	02	2.04	12	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Kota Palu	1 laporan	28.554.900	1 laporan	29.125.998
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan pemasaran pariwisata	Kota Palu	100%	2.951.792.200	100%	3.010.828.044
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Wisata di Luar Negri	Kota Palu	100%	2.951.792.200	100%	3.010.828.044
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi PariwisataKabupaten/Kota,	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Palu	3 dokumen	38.292.300	3 dokumen	39.058.146

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	03	2.01	06	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Palu	25 Kegiatan	2.705.499.900	25 Kegiatan	2.759.609.898
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	03	2.01	07	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Kota Palu	5 Promosi	208.000.000	5 Promosi	212.160.000
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Cakupan pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Kota Palu	100%	743.283.600	100%	758.149.272
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Kota Palu	100%	743.283.600	100%	758.149.272
3	26	3.26.0.00.0.00.01.00	05	2.01	06	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi SDM Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Kota Palu	30 orang	743.283.600	30 orang	758.149.272
3	27					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				22.337.600.336		22.784.352.343
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000				Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan				22.337.600.336		22.784.352.343
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	A	17.675.838.426	A	18.029.355.195
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	31.931.100	5 dokumen	32.569.722
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	6.570.700	2 dokumen	6.702.114

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	6.974.700	1 dokumen	7.114.194
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	2.214.000	1 dokumen	2.258.280
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	16.171.700	1 laporan	16.495.134
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	13.470.221.076	95%	13.739.625.498
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	128 orang/ bulan	13.460.096.076	128 orang/ bulan	13.729.297.998
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	2 laporan	10.125.000	2 laporan	10.327.500
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	711.148.650	100%	725.371.623
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	1.746.000	1 paket	1.780.920
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	93.416.300	5 paket	95.284.626
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	72.584.800	1 paket	74.036.496

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	10.500.550	1 paket	10.710.561
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	24 dokumen	3.600.000	24 dokumen	3.672.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	16.500.000	1 laporan	16.830.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	12 laporan	512.801.000	12 laporan	523.057.020
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	18.799.000	100%	19.174.980
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	10 unit	18.799.000	10 unit	19.174.980
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	2.691.178.600	100%	2.745.002.172
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	220.999.800	12 laporan	225.419.796
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	2.470.178.800	12 laporan	2.519.582.376
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	752.560.000	100%	767.611.200
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	60 Unit	625.200.000	60 Unit	637.704.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	42 Unit	78.800.000	42 Unit	80.376.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	53 Unit	24.180.000	53 Unit	24.663.600
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	5 Unit	24.380.000	5 Unit	24.867.600
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kota Palu	5,74	2.568.095.720	5,8	2.619.457.634
							Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		100%		100%	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan SDG Tumbuhan	Kota Palu	100%	1.611.190.520	100%	1.643.414.330
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Kota Palu	1 Dokumen	57.502.470	1 Dokumen	58.652.519
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.02	03	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Kota Palu	4 dokumen	1.457.168.000	4 dokumen	1.486.311.360
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.02	05	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Kota Palu	1 laporan	96.520.050	1 laporan	98.450.451
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Fasilitasi Sarana Pertanian bagi Kelompok Ternak	Kota Palu	100%	956.905.200	100%	976.043.304

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	02	2.06	03	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Kota Palu	100 Ekor	956.905.200	100 Ekor	976.043.304
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase pemenuhan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Kota Palu	100%	689.612.600	100%	703.404.852
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Fasilitasi Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	Kota Palu	100%	689.612.600	100%	703.404.852
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	10	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Kota Palu	3 unit	42.974.000	3 unit	43.833.480
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	03	2.01	15	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Kota Palu	4 dokumen	646.638.600	4 dokumen	659.571.372
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Kota Palu	-10%	445.190.390	-10%	454.094.198
							Cakupan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner		100%		100%	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penjaminan Kesehatan Hewan	Kota Palu	100%	59.376.640	100%	60.564.173

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.01	08	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Kota Palu	1 laporan	59.376.640	1 laporan	60.564.173
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksannya Pengawasan Teknis Kesmavet	Kota Palu	100%	385.813.750	100%	393.530.025
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	04	2.04	05	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi		1 unit usaha	385.813.750	1 unit usaha	393.530.025
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase pemenuhan perizinan usaha pertanian	Kota Palu	100%	29.175.400	100%	29.758.908
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota	Kota Palu	100%	29.175.400	100%	29.758.908
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	06	2.01	05	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Kota Palu	10 izin usaha	29.175.400	10 izin usaha	29.758.908
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan Bina Kelompok Tani (%)	Kota Palu	25%	929.687.800	30%	948.281.556
							Persentase capaian pelaksanaan penyuluhan pertanian		100%		100%	
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian dan Perikanan	Kota Palu	100%	929.687.800	100%	948.281.556
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07	2.01	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kota Palu	50 unit	334.016.350	50 unit	340.696.677
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07	2.01	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kota Palu	5 unit	351.186.450	5 unit	358.210.179

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	umlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kota Palu	5 unit	62.650.000	5 unit	63.903.000
3	27	3.27.2.09.3.25.01.0000	07	2.01	07	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Kota Palu	46 unit	181.835.000	46 unit	185.471.700
3	30					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				10.772.958.436		10.988.417.605
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00				Dinas Perdagangan dan Perindustrian				10.772.958.436		10.988.417.605
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	7.144.322.436	BB	7.287.208.885
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	37.316.000	5 dokumen	38.062.320
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	3.263.000	2 dokumen	3.328.260
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3.510.000	1 dokumen	3.580.200
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3.510.000	1 dokumen	3.580.200
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	27.033.000	1 laporan	27.573.660

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	4.536.642.482	95%	4.627.375.332
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Kota Palu	42 orang/ bulan	4.531.344.482	42 orang/ bulan	4.621.971.372
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	12 laporan	5.298.000	12 laporan	5.403.960
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	792.323.551	100%	808.170.022
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	15 paket	140.349.875	15 paket	143.156.873
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	60 paket	150.633.900	60 paket	153.646.578
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	6 paket	31.949.881	6 paket	32.588.879
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	5.000.000	12 dokumen	5.100.000
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	8.150.000	11 laporan	8.313.000
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	18 laporan	456.239.895	18 laporan	465.364.693
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	35.000.000	100%	35.700.000
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	35.000.000	5 paket	35.700.000
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.149.559.200	100%	1.172.550.384

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	186.600.000	12 laporan	190.332.000
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	962.959.200	12 laporan	982.218.384
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	593.481.203	100%	605.350.827
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	12 unit	439.280.000	12 unit	448.065.600
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	80 unit	81.078.000	80 unit	82.699.560
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	11 unit	26.700.000	11 unit	27.234.000
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	5 unit	46.423.203	5 unit	47.351.667
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Kota Palu	97,80%	124.730.000	100%	127.224.600
							Persentase pemenuhan perizinan dan pendaftaran perusahaan		100%		100%	

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Rekomendasi Tanda Daftar Gudang	Kota Palu	100%	33.600.000	100%	34.272.000
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.02	01	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Kota Palu	12 dokumen	33.600.000	12 dokumen	34.272.000
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Tersedianya Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C Untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum Di Tempat	Kota Palu	100%	91.130.000	100%	92.952.600
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.05	01	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kota Palu	16 dokumen	91.130.000	16 dokumen	92.952.600
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pemenuhan peningkatan sarana distribusi perdagangan	Kota Palu	100%	2.629.109.000	100%	2.681.691.180
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Palu	100%	1.727.309.000	100%	1.761.855.180
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Palu	12 unit	867.687.500	12 unit	885.041.250
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.01	02	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Palu	12 unit	859.621.500	12 unit	876.813.930
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Kota Palu	100%	901.800.000	100%	919.836.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.02	01	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Palu	12 dokumen	901.800.000	12 dokumen	919.836.000
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan pelaksanaan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kota Palu	100%	442.080.000	100%	450.921.600
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terjaminnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Palu	100%	293.260.000	100%	299.125.200
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Palu	100 laporan	293.260.000	100 laporan	299.125.200
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Di tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Kota Palu	100%	148.820.000	100%	151.796.400
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Palu	100 laporan	148.820.000	100 laporan	151.796.400
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pemenuhan standarisasi dan perlindungan konsumen	Kota Palu	100%	432.717.000	100%	441.371.340
							Persentase penyelesaian sengketa konsumen		100%		100%	
							Persentase alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku		85%		92%	

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Terlaksananya Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Palu	100%	432.717.000	100%	441.371.340
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	06	2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Palu	1985 Unit	273.125.000	1985 Unit	278.587.500
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00	06	2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kota Palu	50 orang	159.592.000	50 orang	162.783.840
3	31					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				2.223.022.066		2.267.482.507
3	30	3.30.3.31.0.00.01.00				Dinas Perdagangan dan Perindustrian				2.223.022.066		2.267.482.507
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina IKM	Kota Palu	51%	1.958.822.067	54%	1.997.998.508
							Cakupan perencanaan dan pembangunan industri		100%		100%	
							Persentase IKM yang memiliki izin		67%		68%	
							Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi		2.080		2.135	
							Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP		20%		25%	
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Palu	100%	1.958.822.067	100%	1.997.998.508
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Palu	20 dokumen	771.180.850	20 dokumen	786.604.467

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kota Palu	20 dokumen	281.010.800	20 dokumen	286.631.016
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Palu	20 dokumen	73.950.000	20 dokumen	75.429.000
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	02	2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Palu	100 dokumen	832.680.417	100 dokumen	849.334.025
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Kota Palu	1,25%	150.449.999	1,32%	153.458.999
							Cakupan pengendalian Izin Usaha Industri		100,00%		100,00%	
							Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota		3,40%		4,40%	
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Rekomendasi Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan (IUI) Menengah	Kota Palu	12 dokumen	150.449.999	12 dokumen	153.458.999

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	03	2.01	04	Fasilitasi verifikasi pemenuhanpersyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Kota Palu	100 dokumen	150.449.999	100 dokumen	153.458.999
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Kota Palu	100%	113.750.000	100%	116.025.000
							Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		50		60	
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Palu	100 dokumen	113.750.000	100 dokumen	116.025.000
3	31	3.30.3.31.0.00.01.00	04	2.01	02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Kota Palu	100 dokumen	113.750.000	100 dokumen	116.025.000
4						UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				103.125.931.235		105.188.449.860
4	01					SEKRETARIAT DAERAH				56.694.603.854		57.828.495.931
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00				Sekretariat Daerah				56.694.603.854		57.828.495.931

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Kota Palu	Kota Palu	A	36.654.320.804	A	37.387.407.220
							Indeks Reformasi Birokrasi		90		92	
							Nilai SAKIP OPD		BB		A	
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	135.421.250	5 dokumen	138.129.675
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	8.450.000	2 dokumen	8.619.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	17.906.750	1 dokumen	18.264.885
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	19.364.500	1 dokumen	19.751.790
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	89.700.000	1 laporan	91.494.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	15.163.191.066	95%	15.466.454.887
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	110 orang/ bulan	15.129.331.066	110 orang/ bulan	15.431.917.687
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	16.100.000	1 Laporan	16.422.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	3 laporan	17.760.000	3 laporan	18.115.200
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	62.372.000	100%	63.619.440
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	1 dokumen	62.372.000	1 dokumen	63.619.440
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	13.900.000	100%	14.178.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kota Palu	12 dokumen	13.900.000	12 dokumen	14.178.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	7.764.918.700	100%	7.920.217.074
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	14.585.500	1 paket	14.877.210
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	709.909.900	12 paket	724.108.098
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	81.549.300	12 paket	83.180.286
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	79.625 laporan	2.465.600.000	79.625 laporan	2.514.912.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	213 laporan	4.493.274.000	213 laporan	4.583.139.480

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	148.842.800	100%	151.819.656
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	12 unit	148.842.800	12 unit	151.819.656
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	4.788.479.800	100%	4.884.249.396
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palu	12 laporan	9.000.000	12 laporan	9.180.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	915.579.600	12 laporan	933.891.192
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	932.369.600	12 laporan	951.016.992
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	2.931.530.600	12 laporan	2.990.161.212
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	3.231.492.000	100%	3.296.121.840
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	108 unit	2.325.378.000	108 unit	2.371.885.560
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	180 Unit	38.340.000	180 Unit	39.106.800
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	7 unit	759.000.000	7 unit	774.180.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	477 unit	108.774.000	477 unit	110.949.480
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	100%	1.123.668.088	100%	1.146.141.450
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	2 Orang/ bulan	831.743.088	2 Orang/ bulan	848.377.950
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Palu	8 paket	111.925.000	8 paket	114.163.500
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Palu	4 orang	180.000.000	4 orang	183.600.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Kota Palu	100%	2.009.923.800	100%	2.050.122.276
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	828.000.000	12 paket	844.560.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	654.000.000	12 paket	667.080.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Palu	12 paket	527.923.800	12 paket	538.482.276
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13		Penataan Organisasi	Terwujudnya Pelaksanaan Penataan Organisasi	Kota Palu	100%	1.040.304.300	100%	1.061.110.386
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Palu	1 dokumen	85.043.100	1 dokumen	86.743.962

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Palu	1 Laporan	471.288.300	1 Laporan	480.714.066
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Palu	1 dokumen	128.560.450	1 dokumen	131.131.659
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palu	1 dokumen	355.412.450	1 dokumen	362.520.699
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terwujudnya Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kota Palu	100%	1.171.807.000	100%	1.195.243.140
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Palu	12 Laporan	871.445.000	12 Laporan	888.873.900
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Palu	12 Laporan	126.140.000	12 Laporan	128.662.800
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Palu	12 Laporan	174.222.000	12 Laporan	177.706.440
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase ketercapaian pelaksanaan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Kota Palu	100%	16.879.462.650	100%	17.217.051.903
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Terwujudnya Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Kota Palu	100%	2.789.971.800	100%	2.845.771.236
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Palu	22 dokumen	2.202.389.750	22 dokumen	2.246.437.545
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Palu	4 dokumen	197.517.350	4 dokumen	201.467.697
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kota Palu	175 dokumen	390.064.700	175 dokumen	397.865.994
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Indeks kerukunan umat beragama	Kota Palu	84	12.591.345.750	85	12.843.172.665

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Palu	12 dokumen	3.572.807.150	12 dokumen	3.644.263.293
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Palu	6 dokumen	6.374.944.000	6 dokumen	6.502.442.880
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kota Palu	5 dokumen	1.371.588.100	5 dokumen	1.399.019.862
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerjasama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	3.300 keluarga	272.006.500	3.300 keluarga	277.446.630
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.02	06	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kota Palu	6.400 keluarga	1.000.000.000	6.400 keluarga	1.020.000.000
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Indeks Kualitas Kebijakan	Kota Palu	78	1.498.145.100	80	1.528.108.002

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Palu	1352 dokumen	825.802.900	1352 dokumen	842.318.958
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Palu	12 kasus	606.690.000	12 kasus	618.823.800
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	02	2.03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Palu	41 dokumen	65.652.200	41 dokumen	66.965.244
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase ketercapaian pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan	Kota Palu	100%	3.160.820.400	100%	3.224.036.808
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase bahan perumusan pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang perekonomia n yang direkomendasikan	Kota Palu	73%	275.224.900	75%	280.729.398
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Palu	17 dokumen	146.212.300	17 dokumen	149.136.546
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Palu	10 laporan	129.012.600	10 laporan	131.592.852
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Cakupan pelaksanaan administrasi pembangunan	Kota Palu	100%	1.966.680.000	100%	2.006.013.600
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Palu	4 Dokumen	1.610.680.050	4 Dokumen	1.642.893.651
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Palu	12 laporan	232.193.000	12 laporan	236.836.860
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Palu	4 laporan	123.806.950	4 laporan	126.283.089

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terwujudnya Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	100%	680.535.350	100%	694.146.057
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	225 dokumen	263.366.500	225 dokumen	268.633.830
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Palu	236 dokumen	310.013.000	236 dokumen	316.213.260
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Palu	92 orang	107.155.850	92 orang	109.298.967
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Cakupan terlaksananya pemantauan kebijakan sumber daya alam	Kota Palu	100%	238.380.150	100%	243.147.753
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.04	01	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kota Palu	1 dokumen	12.175.000	1 dokumen	12.418.500
4	01	4.01.0.00.0.00.01.00	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kota Palu	2 dokumen	226.205.150	2 dokumen	230.729.253
4	02					SEKRETARIAT DPRD				46.431.327.381		47.359.953.929
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00				Sekretariat DPRD				46.431.327.381		47.359.953.929
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	30.163.550.031	BB	30.766.821.032

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	31.015.150	5 dokumen	31.635.453
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	10.950.000	2 dokumen	11.169.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7.515.150	1 dokumen	7.665.453
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7.225.000	1 dokumen	7.369.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	5.325.000	1 laporan	5.431.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	4.975.079.445	95%	5.074.581.034
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	50 orang/ bulan	4.970.504.445	50 orang/ bulan	5.069.914.534
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	4.575.000	1 Laporan	4.666.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	280.870.000	100%	286.487.400

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	10 Orang	280.870.000	10 Orang	286.487.400
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	2.977.985.499	100%	3.037.545.209
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	15 paket	10.257.350	15 paket	10.462.497
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	20 paket	512.581.249	20 paket	522.832.874
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	5.298.100	2 paket	5.404.062
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	107 paket	934.352.200	107 paket	953.039.244
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	13 paket	63.277.300	13 paket	64.542.846
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	15 dokumen	849.216.000	15 dokumen	866.200.320
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	314.832.300	12 laporan	321.128.946
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	26 laporan	288.171.000	26 laporan	293.934.420
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	529.300.900	100%	539.886.918
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Palu	2 unit	50.000.000	2 unit	51.000.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	5 Unit	479.300.900	5 Unit	488.886.918
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	2.371.158.400	100%	2.418.581.568
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Palu	4 laporan	37.500.000	4 laporan	38.250.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	4 laporan	517.020.000	4 laporan	527.360.400
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.816.638.400	12 laporan	1.852.971.168
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	592.447.300	100%	604.296.246
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	25 Unit	345.459.500	25 Unit	352.368.690
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	4 Unit	44.657.800	4 Unit	45.550.956
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	113 unit	99.360.000	113 unit	101.347.200

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	65 unit	102.970.000	65 unit	105.029.400
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terwujudnya Pelayanan Prima Anggota DPRD	Kota Palu	100%	18.405.693.337	100%	18.773.807.204
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Kota Palu	35 org/bln	17.966.508.937	35 org/bln	18.325.839.116
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Kota Palu	146 paket	239.184.400	146 paket	243.968.088
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Kota Palu	35 Orang	200.000.000	35 Orang	204.000.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase pemenuhan dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Kota Palu	100%	16.267.777.350	100%	16.593.132.897
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Terlaksananya Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kota Palu	100%	514.578.600	100%	524.870.172
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Kota Palu	1 dokumen	514.578.600	1 dokumen	524.870.172
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Terwujudnya Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kota Palu	100%	101.337.350	100%	103.364.097
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Kota Palu	2 dokumen	18.930.000	2 dokumen	19.308.600
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Palu	2 dokumen	13.230.000	2 dokumen	13.494.600
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Kota Palu	1 dokumen	32.472.350	1 dokumen	33.121.797

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Kota Palu	1 dokumen	26.280.000	1 dokumen	26.805.600
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.02	05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Kota Palu	2 dokumen	10.425.000	2 dokumen	10.633.500
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kota Palu	100%	40.800.000	100%	41.616.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.03	07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Kota Palu	1 dokumen	40.800.000	1 dokumen	41.616.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	cakupan Peningkatan Kapasitas DPRD	Kota Palu	100%	1.632.800.000	100%	1.665.456.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kota Palu	19 orang	1.240.000.000	19 orang	1.264.800.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Kota Palu	9 orang	348.000.000	9 orang	354.960.000
	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.04	08	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Kota Palu	9 dokumen	44.800.000	9 dokumen	45.696.000
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	cakupan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kota Palu	100%	4.074.720.800	100%	4.156.215.216
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.05	01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Kota Palu	12 laporan	319.344.000	12 laporan	325.730.880
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Kota Palu	105 dokumen	3.755.376.800	105 dokumen	3.830.484.336
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Cakupan Fasilitasi tugas DPRD	Kota Palu	100%	9.903.540.600	100%	10.101.611.412
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kota Palu	684 dokumen	9.841.665.600	684 dokumen	10.038.498.912
4	02	4.02.0.00.0.00.01.00	02	2.08	02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Kota Palu	19 laporan	61.875.000	19 laporan	63.112.500

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5						UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				90.688.012.786		92.501.773.042
5	01					PERENCANAAN				11.314.405.689		11.540.693.803
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				11.314.405.689		11.540.693.803
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	A	7.424.391.939	A	7.572.879.778
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	80.078.500	5 dokumen	81.680.070
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	38.223.200	2 dokumen	38.987.664
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7.690.000	1 dokumen	7.843.800
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7.690.000	1 dokumen	7.843.800
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	26.475.300	1 laporan	27.004.806
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	4.801.778.463	95%	4.897.814.032
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	34 orang/ bulan	4.734.198.463	34 orang/ bulan	4.828.882.432

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	67.580.000	2 laporan	68.931.600
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	802.601.450	100%	818.653.479
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	2.714.400	1 paket	2.768.688
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	124.132.100	1 paket	126.614.742
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	79.295.100	1 paket	80.881.002
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	14.641.850	1 paket	14.934.687
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	31.200.000	2 dokumen	31.824.000
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	93.420.000	12 laporan	95.288.400
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	47 laporan	457.198.000	47 laporan	466.341.960
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	44.000.000	100%	44.880.000
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan dinas jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	44.000.000	1 unit	44.880.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	962.047.200	100%	981.288.144
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	20.480.000	12 laporan	20.889.600
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	941.567.200	12 laporan	960.398.544
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	733.886.326	100%	748.564.053
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	12 unit	561.600.000	12 unit	572.832.000
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	17 unit	43.560.000	17 unit	44.431.200
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	17 Unit	128.726.326	17 Unit	131.300.853
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	Kota Palu	100%	3.890.013.750	100%	3.967.814.025
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Cakupan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Kota Palu	100%	1.660.873.500	100%	1.694.090.970
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Kota Palu	1 dokumen	390.216.050	1 dokumen	398.020.371

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Kota Palu	3 dokumen	59.914.100	2 dokumen	61.112.382
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Kota Palu	1 berita acara	148.121.200	1 berita acara	151.083.624
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Kota Palu	1 berita acara	75.579.800	1 berita acara	77.091.396
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Kota Palu	2 berita acara	402.514.750	2 berita acara	410.565.045
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Kota Palu	758 usulan	34.804.350	758 usulan	35.500.437
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Kota Palu	3 dokumen	549.723.250	3 dokumen	560.717.715
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Kota Palu	100%	1.248.455.750	100%	1.273.424.865
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Kota Palu	1 Dokumen	371.487.500	1 Dokumen	378.917.250
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Kota Palu	47 orang	695.843.100	47 orang	709.759.962
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Kota Palu	1 buku	181.125.150	1 buku	184.747.653
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tercapai	Kota Palu	100%	980.684.500	100%	1.000.298.190

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Palu	4 laporan	345.753.500	4 laporan	352.668.570
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kota Palu	2 kerjasama	141.586.150	2 kerjasama	144.417.873
5	01	5.01.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Kota Palu	4 laporan	493.344.850	4 laporan	503.211.747
5	02					KEUANGAN				63.827.309.361		65.103.855.548
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000				Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah				24.012.110.002		24.492.352.202
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	12.351.670.352	A	12.598.703.759
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	201.294.800	5 dokumen	205.320.696
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	76.921.500	2 dokumen	78.459.930
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	45.146.650	1 dokumen	46.049.583
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	43.246.650	1 dokumen	44.111.583

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	35.980.000	1 laporan	36.699.600
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	7.215.566.332	95%	7.359.877.659
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	63 orang/ bulan	7.056.536.332	63 orang/ bulan	7.197.667.059
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	56.180.000	1 Laporan	57.303.600
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	1 laporan	102.850.000	1 laporan	104.907.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	104.664.000	100%	106.757.280
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	8 orang	104.664.000	8 orang	106.757.280
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	1.930.996.600	100%	1.969.616.532
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	9.273.400	1 paket	9.458.868

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	43 paket	680.642.700	43 paket	694.255.554
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	324.093.000	5 paket	330.574.860
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	36.881.500	1 paket	37.619.130
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	15.600.000	2 dokumen	15.912.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	167.805.000	11 laporan	171.161.100
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	40 laporan	328.664.000	40 laporan	335.237.280
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Palu	1 dokumen	368.037.000	1 dokumen	375.397.740
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	2.185.974.400	100%	2.229.693.888
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	627.999.200	12 laporan	640.559.184
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.557.975.200	12 laporan	1.589.134.704
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	713.174.220	100%	727.437.704

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	24 unit	469.950.000	24 unit	479.349.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	6 unit	24.000.000	6 unit	24.480.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	52 unit	60.390.000	52 unit	61.597.800
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	1 unit	37.350.000	1 unit	38.097.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	2 unit	98.684.220	2 unit	100.657.904
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	25 unit	22.800.000	25 unit	23.256.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini BPK	Kota Palu	WTP	9.638.770.400	WTP	9.831.545.808
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terwujudnya penyusunan rencana anggaran yang efektif dan efisien	Kota Palu	100%	2.212.028.200	100%	2.256.268.764
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Palu	2 dokumen	78.970.000	2 dokumen	80.549.400
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Palu	2 dokumen	78.970.000	2 dokumen	80.549.400
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Palu	41 dokumen	54.000.000	41 dokumen	55.080.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Kota Palu	41 dokumen	54.000.000	41 dokumen	55.080.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Kota Palu	41 dokumen	14.400.000	41 dokumen	14.688.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Palu	2 dokumen	403.399.600	2 dokumen	411.467.592
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Palu	2 dokumen	67.829.600	2 dokumen	69.186.192
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Kota Palu	3 dokumen	120.256.000	3 dokumen	122.661.120
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Kota Palu	1 dokumen	335.971.000	1 dokumen	342.690.420
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	47 orang	1.004.232.000	47 orang	1.024.316.640
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terwujudnya pengelolaan perbendaharaan daerah yang akuntabel	Kota Palu	100%	952.274.700	100%	971.320.194
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Kota Palu	1 dokumen	220.650.600	1 dokumen	225.063.612
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Kota Palu	2 dokumen	246.400.000	2 dokumen	251.328.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Kota Palu	1 dokumen	163.334.000	1 dokumen	166.600.680
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Kota Palu	4 laporan	193.318.000	4 laporan	197.184.360
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Palu	19 dokumen	128.572.100	19 dokumen	131.143.542
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Cakupan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah	Kota Palu	100%	1.474.467.500		1.503.956.850
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Palu	2 laporan	386.665.000	2 laporan	394.398.300

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Kota Palu	4 dokumen	163.332.000	4 dokumen	166.598.640
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Kota Palu	6 laporan	135.408.500	6 laporan	138.116.670
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Kota Palu	3 laporan	367.920.000	3 laporan	375.278.400
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Palu	1 dokumen	214.566.000	1 dokumen	218.857.320
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Kota Palu	1 dokumen	206.576.000	1 dokumen	210.707.520
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Palu	100%	5.000.000.000	100%	5.100.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Palu	1 laporan	5.000.000.000	1 laporan	5.100.000.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan pengelolaan aset daerah	Kota Palu	100%	2.021.669.250	100%	2.062.102.635

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Cakupan pengelolaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	2.021.669.250	100%	2.062.102.635
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Kota Palu	2 dokumen	338.771.000	2 dokumen	345.546.420
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 dokumen	60.046.000	1 dokumen	61.246.920
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Palu	2 dokumen	104.721.000	2 dokumen	106.815.420
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 dokumen	30.531.250	1 dokumen	31.141.875
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 laporan	288.091.000	1 laporan	293.852.820
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 laporan	142.000.000	1 laporan	144.840.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 laporan	495.250.000	1 laporan	505.155.000
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 laporan	129.079.000	1 laporan	131.660.580
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 laporan	77.604.000	1 laporan	79.156.080
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Palu	2 dokumen	221.339.000	2 dokumen	225.765.780

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Palu	1 laporan	78.776.000	1 laporan	80.351.520
5	02	5.02.0.00.0.00.01.0000	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Kota Palu	41 orang	55.461.000	41 orang	56.570.220
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000				Badan Pendapatan Daerah				39.815.199.359		40.611.503.346
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	30.887.493.459	A	31.505.243.328
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	314.034.950	5 dokumen	320.315.649
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	59.872.500	2 dokumen	61.069.950
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	17.042.500	1 dokumen	17.383.350
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	15.262.450	1 dokumen	15.567.699
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	221.857.500	1 laporan	226.294.650
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	26.316.261.209	95%	26.842.586.433

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	76 orang/ bulan	26.304.823.709	76 orang/ bulan	26.830.920.183
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	11.437.500	1 Laporan	11.666.250
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	1.711.196.000	100%	1.745.419.920
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	6.254.600	1 paket	6.379.692
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	668.056.500	1 paket	681.417.630
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	297.523.700	1 paket	303.474.174
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	57.842.200	1 paket	58.999.044
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 dokumen	28.600.000	12 dokumen	29.172.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	57.420.000	12 laporan	58.568.400
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	35 laporan	595.499.000	35 laporan	607.408.980
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.436.555.600	100%	1.465.286.712
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	541.520.200	12 laporan	552.350.604

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	895.035.400	12 laporan	912.936.108
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	1.109.445.700	100%	1.131.634.614
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	46 unit	674.720.000	46 unit	688.214.400
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	5 unit	184.665.700	5 unit	188.359.014
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	153 unit	234.680.000	153 unit	239.373.600
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	17 unit	15.380.000	17 unit	15.687.600
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Capaian pemenuhan target PAD	Kota Palu	100%	8.927.705.900	100%	9.106.260.018
							Rasio PAD		7,99		7,61	
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Kota Palu	100%	8.927.705.900	100%	9.106.260.018
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Kota Palu	1 dokumen	232.094.500	1 dokumen	236.736.390

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Kota Palu	1 laporan	2.041.617.000	1 laporan	2.082.449.340
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Kota Palu	1 laporan	397.035.000	1 laporan	404.975.700
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Kota Palu	100 objek pajak	4.078.345.000	100 objek pajak	4.159.911.900
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	08	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Kota Palu	1 dokumen	454.000.000	1 dokumen	463.080.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Kota Palu	100 layanan	427.649.900	100 layanan	436.202.898
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Kota Palu	1 Dokumen	225.792.500	1 Dokumen	230.308.350
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	11	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	524.712.000	1 Dokumen	535.206.240
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	33.550.000	1 Dokumen	34.221.000
5	02	5.02.0.00.0.00.02.0000	04	2.01	13	Pengendalian,pemeriksaan dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	512.910.000	1 Dokumen	523.168.200
5	03					KEPEGAWAIAN				9.239.307.630		9.424.093.783
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				9.239.307.630		9.424.093.783

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	BB	7.502.367.130	A	7.652.414.473
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	85.336.850	5 dokumen	87.043.587
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	2.634.350	2 dokumen	2.687.037
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	17.542.000	1 dokumen	17.892.840
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	9.419.500	1 dokumen	9.607.890
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	55.741.000	1 laporan	56.855.820
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	5.492.429.980	95%	5.602.278.580
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	51 orang/ bulan	5.492.429.980	51 orang/ bulan	5.602.278.580
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	387.126.100	100%	394.868.622
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	7 paket	5.655.500	7 paket	5.768.610

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	52.229.900	5 paket	53.274.498
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	45 paket	55.440.450	45 paket	56.549.259
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	15.402.350	4 paket	15.710.397
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	6.100.000	2 dokumen	6.222.000
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	18.978.900	12 laporan	19.358.478
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	35 laporan	233.319.000	35 laporan	237.985.380
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	968.452.200	100%	987.821.244
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	326.300.400	12 laporan	332.826.408
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	642.151.800	12 laporan	654.994.836
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	569.022.000	100%	580.402.440
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	16 unit	491.800.000	16 unit	501.636.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	1 unit	51.352.000	1 unit	52.379.040
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	45 unit	13.670.000	45 unit	13.943.400
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	65 unit	12.200.000	65 unit	12.444.000
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan pengelolaan kepegawaian daerah	Kota Palu	100%	1.736.940.500	100%	1.771.679.310
							Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		0,1542		0,16	
							Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		0,06		0,07	
							Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		100%		100%	
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	cakupan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kota Palu	100%	522.016.200	100%	532.456.524
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kota Palu	1 dokumen	178.486.100	1 dokumen	182.055.822
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kota Palu	200 dokumen	66.390.400	200 dokumen	67.718.208

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Kota Palu	10 lembaga	89.197.800	10 lembaga	90.981.756
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Kota Palu	1 dokumen	187.941.900	1 dokumen	191.700.738
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN	Cakupan Pelayanan Mutasi dan Promosi ASN	Kota Palu	100%	465.833.900	4 TW	475.150.578
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Kota Palu	200 dokumen	59.776.250	200 dokumen	60.971.775
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kota Palu	1300 dokumen	207.242.250	1300 dokumen	211.387.095
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Kota Palu	4 dokumen	198.815.400	4 dokumen	202.791.708
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN	cakupan Pengembangan Kompetensi ASN	Kota Palu	100%	668.779.500	100%	682.155.090
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.03	04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Kota Palu	5 orang	223.805.250	5 orang	228.281.355
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.03	05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Kota Palu	1 dokumen	444.974.250	1 dokumen	453.873.735
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	cakupan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kota Palu	100%	80.310.900	100%	81.917.118
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Kota Palu	9 orang	26.221.400	9 orang	26.745.828
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kota Palu	20 laporan	54.089.500	20 laporan	55.171.290
5	04					PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				1.272.913.400		1.298.371.668

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	03	5.03.5.03.5.04.01.0000				Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah				1.272.913.400		1.298.371.668
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan pengembangan sumber daya manusia daerah	Kota Palu	100%	1.272.913.400	100%	1.298.371.668
							Rata - Rata Lama Pegawai mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan		20 JP		20 JP	
							Persentase ASN yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		8		9	
							Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Struktural		90,55		95	
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah Pengembangan kompentensi teknis yang terlaksana	Kota Palu	35 org	282.599.600	35 org	288.251.592
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.01	03	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Kota Palu	35 Org	282.599.600	35 Org	288.251.592
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	Kota Palu	70%	990.313.800	80%	1.010.120.076

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	04	5.03.5.03.5.04.01.0000	02	2.02	07	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kota Palu	1 laporan	990.313.800	1 laporan	1.010.120.076
5	05					PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				5.034.076.706		5.134.758.240
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00				Badan Riset dan Inovasi Daerah				5.034.076.706		5.134.758.240
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	A	4.066.346.206	A	4.147.673.130
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 Dokumen	8.642.000	5 Dokumen	8.814.840
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	2.412.000	2 dokumen	2.460.240
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.410.000	1 dokumen	1.438.200
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.410.000	1 dokumen	1.438.200
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	3.410.000	1 laporan	3.478.200
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	3.199.559.206	95%	3.263.550.390

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	30 orang/ bulan	3.194.765.206	30 orang/ bulan	3.258.660.510
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.410.000	1 Laporan	1.438.200
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	4 laporan	3.384.000	4 laporan	3.451.680
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	308.625.000	100%	314.797.500
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	968.000	1 paket	987.360
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	37.803.000	4 paket	38.559.060
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	12.165.000	3 paket	12.408.300
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	1 dokumen	1.800.000	1 dokumen	1.836.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	6 laporan	2.700.000	6 laporan	2.754.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	23 laporan	253.189.000	23 laporan	258.252.780

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	17.500.000	100%	17.850.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	17.500.000	1 paket	17.850.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	254.650.000	100%	259.743.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	68.864.000	12 laporan	70.241.280
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	185.786.000	12 laporan	189.501.720
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	277.370.000	100%	282.917.400
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	20 Unit	260.600.000	20 Unit	265.812.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	18 Unit	10.670.000	18 Unit	10.883.400
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	8 Unit	6.100.000	8 Unit	6.222.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil litbang bidang penyelenggaraan pemerintahan dan pengkajian peraturan yang ditindaklanjuti	Kota Palu	90,91%	572.630.200	92,86%	584.082.804

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
							Persentase hasil litbang bidang sosial dan kependudukan yang ditindaklanjuti		90%		92,31%	
							Persentase hasil litbang bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti		100%		100%	
							Persentase implementasi inovasi daerah		0,8		83,33%	
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Cakupan penelitian dan pengembangan bidang penyelenggaraan pemerintahan Kota Palu yang dihasilkan	Kota Palu	36%	93.660.200	57%	95.533.404
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.01	12	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Kota Palu	1 laporan	93.660.200	1 laporan	95.533.404
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Cakupan penelitian dan pengembangan bidang sosial yang dihasilkan	Kota Palu	31%	240.070.000	54%	244.871.400
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02	01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Kota Palu	1 Dokumen	120.035.000	1 Dokumen	122.435.700
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kota Palu	1 Dokumen	120.035.000	1 Dokumen	122.435.700
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Cakupan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang dihasilkan	Kota Palu	40%	238.900.000	60%	243.678.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.03	01	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Kota Palu	1 Dokumen	109.865.000	1 Dokumen	112.062.300
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	02	2.03	07	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kota Palu	1 Dokumen	129.035.000	1 Dokumen	131.615.700

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Daerah	Kota Palu	80%	395.100.300	83,33%	403.002.306
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	03	2.02		Invensi dan Inovasi	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Kota Palu	60,98%	395.100.300	73,17%	403.002.306
							Jumlah Penerapan Inovasi Daerah		20 inovasi		25 inovasi	
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	03	2.02	04	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Prakarsa Pengembangan Riset dan Inovasi di Daerah berdasarkan Kebutuhan Daerah untuk Promosi Produk Unggulan Daerah dan/atau Mengatasi Permasalahan Daerah	Kota Palu	1 laporan	112.665.000	1 laporan	114.918.300
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	03	2.02	06	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan untuk Peningkatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual	Kota Palu	1 laporan	11.000.000	1 laporan	11.220.000
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	03	2.02	07	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Kota Palu	1 laporan	95.616.000	1 laporan	97.528.320
5	05	5.05.0.00.0.00.01.00	03	2.02	12	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Kota Palu	1 laporan	175.819.300	1 laporan	179.335.686
6						UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				12.822.453.234		13.078.902.299
6	01					INSPEKTORAT DAERAH				12.822.453.234		13.078.902.299
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000				Inspektorat				12.822.453.234		13.078.902.299
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	A	10.940.743.634	A	11.159.558.507

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 dokumen	11.812.500	4 dokumen	12.048.750
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	7.987.500	2 dokumen	8.147.250
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.912.500	1 dokumen	1.950.750
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.912.500	1 dokumen	1.950.750
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	9.201.588.784	95%	9.385.620.560
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	57 orang/ bulan	9.199.676.284	57 orang/ bulan	9.383.669.810
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.912.500	1 Laporan	1.950.750
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	264.100.000	100%	269.382.000
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	100 orang	6.000.000	100 orang	6.120.000
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Palu	58 orang	258.100.000	58 orang	263.262.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	329.052.750	100%	335.633.805
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	2.170.000	2 paket	2.213.400
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	Kota Palu	2 paket	32.181.600	2 paket	32.825.232
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	10 paket	39.668.400	10 paket	40.461.768
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	16.454.750	1 paket	16.783.845
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	2 dokumen	3.800.000	2 dokumen	3.876.000
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	1 laporan	8.250.000	1 laporan	8.415.000
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	12 laporan	226.528.000	12 laporan	231.058.560
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	4.000.000	100%	4.080.000
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	4.000.000	1 unit	4.080.000
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	516.899.600		527.237.592
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	111.744.000	12 laporan	113.978.880

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	405.155.600	12 laporan	413.258.712
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	613.290.000	100%	625.555.800
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Palu	17 unit	560.800.000		572.016.000
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	37 unit	35.290.000	37 unit	35.995.800
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	22 unit	17.200.000	22 unit	17.544.000
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Cakupan penyelenggaraan pengawasan	Kota Palu	100%	1.712.197.100	100%	1.746.441.042
							Persentase tindak lanjut temuan		82%		82%	
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terwujudnya Obyek Pemeriksaan disetiap OPD sesuai ketentuan yang berlaku	Kota Palu	100%	1.466.609.600	100%	1.495.941.792
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Palu	36 laporan	251.837.500	36 laporan	256.874.250
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	02	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Palu	48 laporan	275.350.000	48 laporan	280.857.000
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	03	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Kota Palu	17 laporan	185.675.000	17 laporan	189.388.500

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	04	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Kota Palu	23 laporan	230.312.500	23 laporan	234.918.750
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kota Palu	2 kesepakatan	104.515.600	2 kesepakatan	106.605.912
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Kota Palu	12 dokumen	418.919.000	12 dokumen	427.297.380
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Cakupan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu	Kota Palu	100%	245.587.500	100%	250.499.250
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	02	2.02	02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kota Palu	29 laporan	245.587.500	29 laporan	250.499.250
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Cakupan Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Kota Palu	100%	169.512.500	100%	172.902.750
							Persentase pelanggaran pegawai		15%		15%	
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Cakupan Pendampingan dan Asistensi	Kota Palu	100%	169.512.500	100%	172.902.750
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	03	2.02	01	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Palu	41 perangkat daerah	104.262.500	41 perangkat daerah	106.347.750
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	03	2.02	02	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kota Palu	41 perangkat daerah	23.700.000	41 perangkat daerah	24.174.000
6	01	6.01.6.01.0.00.01.0000	03	2.02	03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kota Palu	2 kegiatan	41.550.000	2 kegiatan	42.381.000
7						UNSUR KEWILAYAHAN				156.934.048.863		160.072.729.840
7	01					KECAMATAN				156.934.048.863		160.072.729.840

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00				Kecamatan Palu Selatan				20.437.675.431		20.846.428.940
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	9.704.963.448	B	9.899.062.717
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4dokumen	46.418.300	4dokumen	47.346.666
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	5.428.500	1 Dokumen	5.537.070
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7.489.800	1 dokumen	7.639.596
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7.500.000	1 dokumen	7.650.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	26.000.000	1 laporan	26.520.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	7.344.484.348	100%	7.491.374.035
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	83 orang/ bulan	7.337.034.348	83 orang/ bulan	7.483.775.035
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	7.450.000	1 Laporan	7.599.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	601.870.200	100%	613.907.604
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	5.689.100	3 paket	5.802.882
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	25 paket	120.470.700	25 paket	122.880.114
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	26 paket	125.165.400	26 paket	127.668.708
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	46.350.000	2 paket	47.277.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	36 dokumen	23.400.000	36 dokumen	23.868.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	12 laporan	25.620.000	12 laporan	26.132.400
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	13 laporan	255.175.000	13 laporan	260.278.500
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.07		Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	8.250.000	100%	8.415.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	8.250.000	2 paket	8.415.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.230.802.800	100%	1.255.418.856
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	111.634.800	12 laporan	113.867.496

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.119.168.000	12 laporan	1.141.551.360
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	473.137.800	100%	482.600.556
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	30 unit	430.377.800	30 unit	438.985.356
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	49 unit	20.000.000	49 unit	20.400.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	16 unit	22.760.000	16 unit	23.215.200
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Palu	Baik	9.530.000	Baik	9.720.600
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Kota Palu		9.530.000		9.720.600
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kota Palu	1 dokumen	9.530.000	1 dokumen	9.720.600
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	10.503.631.983	100%	10.713.704.623
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kota Palu		56.991.500		58.131.330

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Palu	30 lembaga kemasyarakatan	56.991.500	30 lembaga kemasyarakatan	58.131.330
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	8.390.517.233	100%	8.558.327.578
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	32 unit	1.459.239.800	32 unit	1.488.424.596
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	25 Pokmas/ Ormas	6.931.277.433	25 Pokmas/ Ormas	7.069.902.982
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	1.986.123.450	100%	2.025.845.919
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	25 lembaga kemasyarakatan	1.986.123.450	25 lembaga kemasyarakatan	2.025.845.919
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	100%	69.999.800	100%	71.399.796
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	50 keluarga	69.999.800	50 keluarga	71.399.796
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Palu	100%	219.550.000	100%	223.941.000
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	100%	219.550.000	100%	223.941.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.02.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	219.550.000	54 orang	223.941.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00				Kecamatan Mantikulore				27.004.002.204		27.544.082.248
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	12.386.010.572	B	12.633.730.783
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	98.280.000	4 dokumen	100.245.600
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	36.840.000	1 Dokumen	37.576.800
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	27.310.000	1 dokumen	27.856.200
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	27.310.000	1 dokumen	27.856.200
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	12 laporan	6.820.000	12 laporan	6.956.400
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	9.078.888.972	95%	9.260.466.751

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	72 orang/ bulan	9.063.158.972	72 orang/ bulan	9.244.422.151
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	2 Laporan	15.730.000	2 Laporan	16.044.600
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	1.097.842.700	100%	1.119.799.554
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	10 paket	12.043.400	10 paket	12.284.268
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	10 paket	87.086.000	10 paket	88.827.720
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	3.146.500	1 paket	3.209.430
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	30 paket	425.329.000	30 paket	433.835.580
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	67.448.000	3 paket	68.796.960
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	8 dokumen	27.000.000	8 dokumen	27.540.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	83.608.800	11 laporan	85.280.976
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	20 laporan	392.181.000	20 laporan	400.024.620
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	13.404.500	100%	13.672.590

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	8.404.500	1 unit	8.572.590
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	5.000.000	1 unit	5.100.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.499.234.400	100%	1.529.219.088
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	320.016.000	12 laporan	326.416.320
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.179.218.400	12 laporan	1.202.802.768
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	598.360.000	100%	610.327.200
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	22 unit	541.600.000	22 unit	552.432.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	36 unit	38.460.000	36 unit	39.229.200
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	30 unit	18.300.000	30 unit	18.666.000
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Palu	Baik	23.310.000	Baik	23.776.200

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Kota Palu	100%	23.310.000	100%	23.776.200
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	23.310.000	1 laporan	23.776.200
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	14.226.347.032	100%	14.510.873.973
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	11.091.623.732	100%	11.313.456.207
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	40 lembaga kemasyarakatan	159.540.000	40 lembaga kemasyarakatan	162.730.800
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	26 unit	2.234.895.000	26 unit	2.279.592.900
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	8 pokmas/ ormas	8.697.188.732	8 pokmas/ ormas	8.871.132.507
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	3.035.283.200	100%	3.095.988.864
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	40 lembaga kemasyarakatan	3.035.283.200	40 lembaga kemasyarakatan	3.095.988.864

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	100%	99.440.100	100%	101.428.902
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	80 keluarga	99.440.100	80 keluarga	101.428.902
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Palu	100%	368.334.600	100%	375.701.292
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	100%	368.334.600	100%	375.701.292
7	01	7.01.0.00.0.00.03.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	24 orang	368.334.600	24 orang	375.701.292
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00				Kecamatan Palu Barat				18.322.523.114	- -	18.688.973.576
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	9.199.811.845	B	9.383.808.082
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	44.120.000	4 dokumen	45.002.400
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	7.290.000	1 Dokumen	7.435.800

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	15.280.000	1 dokumen	15.585.600
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	15.230.000	1 dokumen	15.534.600
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	6.320.000	1 laporan	6.446.400
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	6.122.643.322	95%	6.245.096.188
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	61 orang/ bulan	6.115.213.322	61 orang/ bulan	6.237.517.588
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	7.430.000	1 Laporan	7.578.600
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	1.003.249.800	100%	1.023.314.796
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	7.465.200	1 paket	7.614.504
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	22 paket	186.963.500	22 paket	190.702.770

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	298.366.400	4 paket	304.333.728
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	41.825.000	3 paket	42.661.500
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	99 dokumen	17.900.000	99 dokumen	18.258.000
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	58.548.700	11 laporan	59.719.674
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	27 laporan	392.181.000	27 laporan	400.024.620
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	139.215.400	100%	141.999.708
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	2 paket	116.626.900	2 paket	118.959.438
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	3 unit	22.588.500	3 unit	23.040.270
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.292.703.323	100%	1.318.557.389
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	182.585.323	12 laporan	186.237.029
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	81 laporan	1.110.118.000	81 laporan	1.132.320.360
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	597.880.000	100%	609.837.600

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	22 unit	525.800.000	22 unit	536.316.000
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	63 unit	57.200.000	63 unit	58.344.000
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	35 unit	14.880.000	35 unit	15.177.600
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Palu	Baik	15.895.000	Baik	16.212.900
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat	Kota Palu	100%	15.895.000	100%	16.212.900
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	15.895.000	1 laporan	16.212.900
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	8.759.581.469	100%	8.934.773.098
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	7.125.752.069	100%	7.268.267.110

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	30 lembaga kemasyarakatan	61.646.800	30 lembaga kemasyarakatan	62.879.736
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	646 unit	2.224.644.669	646 unit	2.269.137.562
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	7 pokmas	4.839.460.600	7 pokmas	4.936.249.812
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	1.473.013.200	100%	1.502.473.464
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	30 lembaga kemasyarakatan	1.473.013.200	30 lembaga kemasyarakatan	1.502.473.464
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	100%	160.816.200	100%	164.032.524
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	50 keluarga	160.816.200	50 keluarga	164.032.524
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Palu	100%	347.234.800	100%	354.179.496
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	100%	347.234.800	100%	354.179.496

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.04.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	347.234.800	54 orang	354.179.496
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00				Kecamatan Palu Timur				16.796.782.694		17.132.718.348
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	8.505.255.738	B	8.675.360.853
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	36.402.650	4 dokumen	37.130.703
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	5.573.600	1 Dokumen	5.685.072
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	11.664.950	1 dokumen	11.898.249
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	10.813.550	1 dokumen	11.029.821
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	8.350.550	1 laporan	8.517.561
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	6.024.141.238	95%	6.144.624.063

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	64 orang/ bulan	6.019.112.838	64 orang/ bulan	6.139.495.095
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	5.028.400	1 Laporan	5.128.968
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	631.224.650	100%	643.849.143
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	44.234.000	3 paket	45.118.680
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	161.834.200	4 paket	165.070.884
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	39.292.150	4 paket	40.077.993
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	96 dokumen	33.600.000	96 dokumen	34.272.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	60.709.300	11 laporan	61.923.486
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	34 laporan	291.555.000	34 laporan	297.386.100
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	170.900.000	100%	174.318.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	3 unit	8.400.000	3 unit	8.568.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	159.000.000	1 unit	162.180.000

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	3.500.000	1 unit	3.570.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.127.277.200	100%	1.149.822.744
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	142.880.400	12 laporan	145.738.008
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	984.396.800	12 laporan	1.004.084.736
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	515.310.000	100%	525.616.200
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	12 unit	479.500.000	12 unit	489.090.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	52 unit	23.610.000	52 unit	24.082.200
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	16 unit	12.200.000	16 unit	12.444.000
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Palu	Baik	7.340.000	Baik	7.486.800

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan pada Masyarakat	Kota Palu	100%	7.340.000	100%	7.486.800
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	7.340.000	1 laporan	7.486.800
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	7.953.872.156	100%	8.112.949.599
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	6.197.161.856	100%	6.321.105.093
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	25 lembaga kemasyarakatan	56.709.000	25 lembaga kemasyarakatan	57.843.180
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	32 unit	1.277.165.976	32 unit	1.302.709.296
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	7 pokmas/ ormas	4.863.286.880	7 pokmas/ ormas	4.960.552.618
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	1.583.589.500	100%	1.615.261.290
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	25 lembaga kemasyarakatan	1.583.589.500	25 lembaga kemasyarakatan	1.615.261.290

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	100%	173.120.800	100%	176.583.216
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	50 keluarga	173.120.800	50 keluarga	176.583.216
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Palu	100%	330.314.800	100%	336.921.096
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	100%	330.314.800	100%	336.921.096
7	01	7.01.0.00.0.00.05.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 Orang	330.314.800	54 Orang	336.921.096
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00				Kecamatan Tatanga				19.128.317.261		19.510.883.606
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	A	8.905.504.861	A	9.083.614.958
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	73.595.000	4 dokumen	75.066.900
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	35.045.000	1 Dokumen	35.745.900

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	15.545.000	1 dokumen	15.855.900
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	15.545.000	1 dokumen	15.855.900
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	7.460.000	1 laporan	7.609.200
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	6.478.985.589	95%	6.608.565.301
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	70 orang/ bulan	6.458.475.589	70 orang/ bulan	6.587.645.101
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kota Palu	2 laporan	20.510.000	2 laporan	20.920.200
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	627.033.300	100%	639.573.966
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	7.611.000	1 paket	7.763.220
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	38.866.700	5 paket	39.644.034

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	9 paket	245.298.400	9 paket	250.204.368
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	46.800.000	5 paket	47.736.000
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	24 dokumen	20.400.000	24 dokumen	20.808.000
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	56.278.200	11 laporan	57.403.764
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	15 laporan	211.779.000	15 laporan	216.014.580
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.251.030.972	100%	1.276.051.591
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	216.548.972	12 laporan	220.879.951
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.034.482.000	12 laporan	1.055.171.640
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	474.860.000	100%	484.357.200
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	11 Unit	442.220.000	11 Unit	451.064.400
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	10 unit	32.640.000	10 unit	33.292.800

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Palu	Baik	17.215.000	Baik	17.559.300
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Palu	100%	17.215.000	100%	17.559.300
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	17.215.000	1 laporan	17.559.300
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	10.035.347.400	100%	10.236.054.348
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	8.023.409.600	100%	8.183.877.792
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	24 lembaga kemasyarakatan	119.376.700	24 lembaga kemasyarakatan	121.764.234
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	50 unit	995.008.100	50 unit	1.014.908.262
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	7 pokmas/ ormas	6.909.024.800	7 pokmas/ ormas	7.047.205.296
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	1.906.074.000	100%	1.944.195.480

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	24 lembaga kemasyarakatan	1.906.074.000	24 lembaga kemasyarakatan	1.944.195.480
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	100%	105.863.800	100%	107.981.076
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06	12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kota Palu	50 keluarga	105.863.800	50 keluarga	107.981.076
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Palu	100%	170.250.000	100%	173.655.000
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	100%	170.250.000	100%	173.655.000
7	01	7.01.0.00.0.00.06.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	170.250.000	54 orang	173.655.000
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00				Kecamatan Tawaeli				17.201.944.631		17.545.983.524
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	7.399.694.982	B	7.547.688.882

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	18.520.950	4 dokumen	18.891.369
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	4.424.650	1 Dokumen	4.513.143
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	9.387.700	1 dokumen	9.575.454
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	3.047.650	1 dokumen	3.108.603
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	1.660.950	1 laporan	1.694.169
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	5.159.976.632	95%	5.263.176.165
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	50 orang/ bulan	5.157.995.032	50 orang/ bulan	5.261.154.933
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	1.981.600	1 Laporan	2.021.232
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	567.663.800	100%	579.017.076

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	3.287.900	1 paket	3.353.658
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	18.973.200	3 paket	19.352.664
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	222.793.200	5 paket	227.249.064
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	34.454.500	3 paket	35.143.590
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	12 Dokumen	12.600.000	12 Dokumen	12.852.000
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	43.120.000	11 laporan	43.982.400
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	15 laporan	232.435.000	15 laporan	237.083.700
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	162.014.000	100%	165.254.280
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	5 paket	75.249.000	5 paket	76.753.980
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	3 unit	10.550.000	3 unit	10.761.000
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	10 unit	76.215.000	10 unit	77.739.300
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.008.229.600	100%	1.028.394.192
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	114.883.200	12 laporan	117.180.864

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	893.346.400	12 laporan	911.213.328
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	483.290.000	100%	492.955.800
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	5 unit	425.020.000	5 unit	433.520.400
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	20 unit	26.000.000	20 unit	26.520.000
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	4 unit	32.270.000	4 unit	32.915.400
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Palu	Baik	13.111.600	Baik	13.373.832
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Palu	100%	13.111.600	100%	13.373.832
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	13.111.600	1 laporan	13.373.832
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	100%	9.446.365.249	100%	9.635.292.554

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				48.197.400		49.161.348
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Palu	25 Lembaga Kemasyarakatan	48.197.400	25 Lembaga Kemasyarakatan	49.161.348
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	100%	8.254.517.349	100%	8.419.607.696
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	100 paket	1.688.074.549	100 paket	1.721.836.040
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	7 pokmas/ ormas	6.566.442.800	7 pokmas/ ormas	6.697.771.656
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	1.051.477.200	100%	1.072.506.744
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	25 Lembaga Kemasyarakatan	1.051.477.200	25 Lembaga Kemasyarakatan	1.072.506.744
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	100%	92.173.300	100%	94.016.766
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	50 keluarga	92.173.300	50 keluarga	94.016.766
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Palu	100%	342.772.800	100%	349.628.256

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	Kota Palu	100%	342.772.800		349.628.256
7	01	7.01.0.00.0.00.07.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	342.772.800	54 orang	349.628.256
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00				Kecamatan Ulujadi				20.336.226.507		20.742.951.037
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	8.436.544.107	B	8.605.274.989
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	6 dokumen	36.885.950	5 dokumen	37.623.669
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	3 Dokumen	7.825.950	2 dokumen	7.982.469
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	12.090.000	1 dokumen	12.331.800
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	11.130.000	1 dokumen	11.352.600

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	5.840.000	1 laporan	5.956.800
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	5.576.279.257	95%	5.687.804.842
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	60 orang/ bulan	5.570.749.257	60 orang/ bulan	5.682.164.242
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	2 laporan	5.530.000	2 laporan	5.640.600
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	699.372.300	100%	713.359.746
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	33 paket	297.964.000	33 paket	303.923.280
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	43.780.800	3 paket	44.656.416
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	24 dokumen	16.400.000	24 dokumen	16.728.000
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	69.052.500	11 laporan	70.433.550
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	15 laporan	272.175.000	15 laporan	277.618.500
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	101.466.200	100%	103.495.524

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	25.000.000	1 unit	25.500.000
7	01	7.01.0.00.0.00.08.0000	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	5 unit	76.466.200	5 unit	77.995.524
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.426.470.400	100%	1.454.999.808
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	162.634.400	12 laporan	165.887.088
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	1.263.836.000	12 laporan	1.289.112.720
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	596.070.000	100%	607.991.400
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	15 unit	559.620.000		570.812.400
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	58 unit	36.450.000	58 unit	37.179.000
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Palu	Baik	40.294.800	Baik	41.100.696

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kota Palu	100%	40.294.800	100%	41.100.696
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	3 laporan	40.294.800	3 laporan	41.100.696
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	11.417.162.600	100%	11.645.505.852
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Kota Palu		62.710.300		63.964.506
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kota Palu	30 lembaga kemasyarakatan	62.710.300	30 lembaga kemasyarakatan	63.964.506
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	9.695.262.300	100%	9.889.167.546
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	47 unit	1.953.150.900	47 unit	1.992.213.918
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	24 pokmas/ ormas	7.742.111.400	24 pokmas/ ormas	7.896.953.628
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	1.525.708.200	100%	1.556.222.364
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	30 lembaga kemasyarakatan	1.525.708.200	30 lembaga kemasyarakatan	1.556.222.364

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	100%	133.481.800	100%	136.151.436
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	50 keluarga	133.481.800	50 keluarga	136.151.436
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	Kota Palu	100%	442.225.000	100%	451.069.500
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	100%	442.225.000	100%	451.069.500
7	01	7.01.0.00.0.00.08.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	442.225.000	54 orang	451.069.500
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00				Kecamatan Palu Utara				17.706.577.021		18.060.708.561
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	8.036.412.721	B	8.197.140.975
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	4 dokumen	28.330.150	4 dokumen	28.896.753
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	6.608.000	1 Dokumen	6.740.160

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	7.483.650	1 dokumen	7.633.323
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	8.057.000	1 dokumen	8.218.140
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	12 laporan	6.181.500	12 laporan	6.305.130
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	100%	5.094.701.571	100%	5.196.595.602
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	52 orang/ bulan	5.085.280.571	52 orang/ bulan	5.186.986.182
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	2 Laporan	9.421.000	2 Laporan	9.609.420
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	1.100.526.300	100%	1.122.536.826
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	3.119.300	1 paket	3.181.686
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	10 paket	379.719.900	10 paket	387.314.298
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	268.843.700	4 paket	274.220.574

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	3 paket	30.783.800	3 paket	31.399.476
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	24 dokumen	18.600.000	24 dokumen	18.972.000
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	56.953.600	11 laporan	58.092.672
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	16 laporan	342.506.000	16 laporan	349.356.120
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	206.861.900	100%	210.999.138
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Palu	1 unit	25.000.000	1 unit	25.500.000
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	6 paket	100.504.900	6 paket	102.514.998
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	6 unit	81.357.000	6 unit	82.984.140
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	1.013.552.800	100%	1.033.823.856
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	294.124.400	12 laporan	300.006.888
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	12 laporan	719.428.400	12 laporan	733.816.968
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	592.440.000	100%	604.288.800

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	14 unit	469.740.000	14 unit	479.134.800
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	58 unit	47.700.000	58 unit	48.654.000
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Palu	18 unit	75.000.000	18 unit	76.500.000
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Palu	Baik	7.085.600	Baik	7.227.312
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Cakupan Peningkatan Efektifitas Pelayanan Pada Masyarakat	Kota Palu	100%	7.085.600	100%	7.227.312
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kota Palu	1 laporan	7.085.600	1 laporan	7.227.312
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Kota Palu	100%	9.364.343.900	100%	9.551.630.778
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan kelurahan	Kota Palu	100%	8.224.529.500	100%	8.389.020.090

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kota Palu	25 lembaga kemasyarakatan	62.191.700	25 lembaga kemasyarakatan	63.435.534
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kota Palu	27 unit	2.161.891.200	27 unit	2.205.129.024
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kota Palu	7 pokmas/ ormas	6.000.446.600	7 pokmas/ ormas	6.120.455.532
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Cakupan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Kota Palu	100%	966.716.100	100%	986.050.422
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.03	01	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Kota Palu	25 lembaga kemasyarakatan	966.716.100	25 lembaga kemasyarakatan	986.050.422
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Kota Palu	100%	173.098.300	100%	176.560.266
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	03	2.06	02	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kota Palu	50 keluarga	173.098.300	50 keluarga	176.560.266
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kota Palu	100%	298.734.800	100%	304.709.496
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kota Palu	100%	298.734.800	100%	304.709.496

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
7	01	7.01.7.01.7.01.01.00	05	2.01	04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kota Palu	54 orang	298.734.800	54 orang	304.709.496
8						UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				10.844.304.553		11.061.190.644
8	01					KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				10.844.304.553		11.061.190.644
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00				Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				10.844.304.553		11.061.190.644
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP OPD	Kota Palu	B	3.955.391.613	B	4.034.499.445
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Palu	5 Dokumen	6.430.000	5 Dokumen	6.558.600
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Palu	1 Dokumen	675.000	1 Dokumen	688.500
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.657.500	1 dokumen	1.690.650
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.657.500	1 dokumen	1.690.650

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Palu	1 laporan	2.440.000	1 laporan	2.488.800
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi keuangan	Kota Palu	95%	2.618.241.563	95%	2.670.606.394
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Palu	25 orang/ bulan	2.613.251.763	25 orang/ bulan	2.665.516.798
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kota Palu	1 Laporan	3.147.350	1 Laporan	3.210.297
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Kota Palu	1 dokumen	1.842.450	1 dokumen	1.879.299
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	4.039.500	100%	4.120.290
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Palu	1 dokumen	1.365.150	1 dokumen	1.392.453
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kota Palu	1 Laporan	2.674.350	1 Laporan	2.727.837
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Palu	100%	26.449.150	100%	26.978.133

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Kota Palu	42 paket	24.234.000	42 paket	24.718.680
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kota Palu	3 Dokumen	2.215.150	3 Dokumen	2.259.453
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Palu	100%	330.028.600	100%	336.629.172
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Palu	1 paket	1.434.800	1 paket	1.463.496
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Palu	29 paket	18.022.500	29 paket	18.382.950
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Palu	4 paket	5.834.000	4 paket	5.950.680
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Palu	24 dokumen	3.600.000	24 dokumen	3.672.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Palu	11 laporan	10.288.300	11 laporan	10.494.066
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Palu	22 laporan	290.849.000	22 laporan	296.665.980
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan barang milik daerah	Kota Palu	100%	135.332.300	100%	138.038.946
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Palu	3 Unit	51.378.800	3 Unit	52.406.376
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Palu	8 Unit	83.953.500	8 Unit	85.632.570
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Palu	100%	341.420.500	100%	348.248.910

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Palu	48 laporan	55.600.000	48 laporan	56.712.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Palu	33 laporan	285.820.500	33 laporan	291.536.910
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah	Kota Palu	100%	493.450.000	100%	503.319.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Palu	5 unit	459.300.000	5 unit	468.486.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Palu	32 Unit	34.150.000	32 Unit	34.833.000
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase capaian pembinaan dan pengendalian di Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang terlaksana	Kota Palu	98%	3.926.034.450	100%	4.004.555.139
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kota Palu	15 dokumen	3.926.034.450	15 dokumen	4.004.555.139

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Palu	500 orang	462.601.250	500 orang	471.853.275
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Palu	942 orang	1.602.118.800	942 orang	1.634.161.176
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kota Palu	2 laporan	349.495.700	2 laporan	356.485.614
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	08	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kota Palu	54 orang	1.433.193.800	54 orang	1.461.857.676
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	02	2.01	11	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Kota Palu	54 orang	78.624.900	54 orang	80.197.398
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik dan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik dalam rangka pengembangan demokrasi Pancasila	Kota Palu	95%	807.667.290	100%	823.820.636

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Kota Palu	6 dokumen	807.667.290	6 dokumen	823.820.636
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Palu	70 orang	22.916.200	70 orang	23.374.524
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Palu	19 orang	776.645.990	19 orang	792.178.910

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	03	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kota Palu	12 laporan	8.105.100	12 laporan	8.267.202
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persaentase ormas yang ber-SKT dan Aktif	Kota Palu	70%	64.236.000	80%	65.520.720
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kota Palu	8 dokumen	64.236.000		65.520.720
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Palu	25 orang	26.852.450	25 orang	27.389.499
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi Di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Palu	17 orang	32.452.350	17 orang	33.101.397

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Kota Palu	12 laporan	4.931.200	12 laporan	5.029.824
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya yang dilaksanakan	Kota Palu	98%	1.584.627.100	100%	1.616.319.642
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Kota Palu	17 dokumen	1.584.627.100	17 dokumen	1.616.319.642
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Palu	168 orang	1.562.815.100	168 orang	1.594.071.402
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Palu	262 orang	14.304.600	262 orang	14.590.692

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kota Palu	3 laporan	7.507.400	3 laporan	7.657.548
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penurunan gangguan keamanan di Kota Palu	Kota Palu	9%	506.348.100	12%	516.475.062
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah dokumen yang dihasilkan dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial	Kota Palu	16 dokumen	506.348.100	16 dokumen	516.475.062
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Palu	116 orang	109.914.600	116 orang	112.112.892

Kode Rekening						Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2025		Perkiraan Maju Tahun 2026	
									Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif Rp
8	01	8.01.0.00.0.00.01.00	06	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Palu	121 orang	243.135.550	121 orang	247.998.261
8	01	8.01.0.00.0.00.01.0000	06	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kota Palu	8 laporan	153.297.950	8 laporan	156.363.909
TOTAL										**1.646.628.052.299**		**1.679.560.613.345**



www.bappeda.palukota.go.id
@bappeda.kotapalu